2025

Nomor : 23.13/RIS/VI/2025

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Kamis, 26 Juni 2025

1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

23

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara :
1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.20 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.35 WIB

Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. — Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. — -
3. Triyono Hari Kuncoro — Hadir

Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Wali Kota Yogyakarta.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

==========

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wali Kota Yogyakarta dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Hadirin dimohon berdiri.

  ------- **MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA** -------

- Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.

  ------- **PEMBACAAN TEKS PANCASILA** -------

Hadirin disilakan duduk kembali.

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

HARI KAMIS, TANGGAL 26, BULAN JUNI, TAHUN 2025

DENGAN ACARA :

- **Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;**
- **Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;**

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Plt. Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 29 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.

Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Kamis tanggal 26 Juni 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda pertama Rapat Paripurna Dewan pada hari ini adalah Penandatanganan Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029, dengan rangkaian acara sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Kesimpulan Panitia Khusus;
2. Permintaan persetujuan secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta.
4. Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta.

Untuk kesempatan pertama, berikut akan dibacakan Laporan Kesimpulan Panitia Khusus atas pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029.

Untuk itu kepada Juru Bicara Panitia Khusus disilahkan.

----- LAPORAN PANITIA KHUSUS-----

----- (H. Hermawan Setyaji) -----

Terima kasih disampaikan kepada Juru Bicara Panitia Khusus yang telah membacakan Laporan Kesimpulan Panitia Khusus.

Selanjutnya akan dibacakan rancangan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.

Kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD, disilahkan membacakan rancangan persetujuan bersama dimaksud.

---- PEMBACAAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ----

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD yang telah membacakan rancangan persetujuan bersama tersebut.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Dengan memperhatikan laporan Kesimpulan Panitia Khusus dan rancangan persetujuan bersama tersebut di atas, selanjutnya perlu saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat disetujui?

Jawab : Setuju.

- **Ketok Palu 1 Kali. (X).**

Terima kasih.

Selanjutnya saya silahkan kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor urut persetujuan bersama tersebut.

Plt. SEKRETARIS DPRD :

Jawab :

- Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029, diberi nomor :

  2/PB/DPRD/2025
  ——————————————— , tanggal 26 Juni 2025.
  2/PB.YK/100.3.2/VI/2025

Terima Kasih

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tersebut, maka acara selanjutnya adalah penandatanganan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta.

Untuk ketertiban dan kelancaran proses penandatanganan, maka Saya silahkan Pembawa Acara dari Sekretariat Dewan untuk memandu jalannya acara.

PEMBAWA ACARA :

Terima Kasih.

Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029; Kepada yang terhormat Pimpinan DPRD, Wali Kota Yogyakarta dimohon untuk menempatkan diri, dan kepada hadirin mohon berkenan berdiri.

--- PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA ---

Penandatanganan persetujuan bersama telah selesai, dilanjutkan dengan sesi foto bersama Pimpinan DPRD dengan Wali Kota Yogyakarta, disilahkan.

--- FOTO BERSAMA ---

Yang terhormat Pimpinan DPRD, Wali Kota Yogyakarta Yogyakarta disilahkan untuk kembali ke tempat .

Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.

Acara penandatanganan telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna selanjutnya kami haturkan kembali kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih

Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati.

Agenda selanjutnya adalah penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta atas persetujuan bersama terhadap raperda tersebut, sekaligus mohon untuk dapat disampaikan Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta disilahkan.

-- PENDAPAT AKHIR & JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA --

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan pendapat akhir dan jawabannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA,	Plt. SEKRETARIS,
FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.	ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P. NIP. 197106301996031003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara :
1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.20 WIB
Waktu Selesai Rapat : 15.35 WIB

Pimpinan Rapat :

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.	Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.	-
3. Triyono Hari Kuncoro	Hadir

Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Wali Kota Yogyakarta.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Hasil Rapat :
1. Rapat dipimpin oleh FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. (Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 29 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Laporan Kesimpulan Panitia Khusus atas pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029, disampaikan oleh H. Setyaji Hermawan selaku juru bicara panitia khusus.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029 disetujui untuk ditetapkan menjadi perda.

4. Wali Kota Yogyakarta menyampaikan pendapat akhir atas persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029 sekaligus Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Ketua,

FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Nomor : 000.1.5/912
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara :
1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Nomor : 000.1.5/912
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara :
1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Nomor : 000.1.5/912
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr.

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara :
1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Nomor : 000.1.5/912
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr. Komandan Kodim Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara :
1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SAEDONO PUTRO, S.H., M.H.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Nomor : 000.1.5/912
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kapolresta Kota Yogyakarta
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara :
1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Nomor : 000.1.5/912
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Ketua Pengadilan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara :
1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Nomor : 000.1.5/912
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kepala Kejaksaan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara :
1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SAJOKONO PUTRO, S.H., M.H.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara :
1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

LEGISLATIF

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
1.	Sdr. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.	Ketua DPRD	1.	
2.	Sdr. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.	Wakil Ketua Satu DPRD	2.	
3.	Sdr. Triyono Hari Kuncoro	Wakil Ketua dua DPRD	3.	
4.	Sdr. H. Danang Rudiyatmoko	Anggota DPRD	4.	
5.	Sdr. Subagyo	Anggota DPRD	5.	
6.	Sdr. Ipung Purwandari, S.H.	Anggota DPRD	6.	
7.	Sdr. Endro Sulaksono	Anggota DPRD	7.	
8.	Sdr. Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota DPRD	8.	
9.	Sdr. Darini, S.IP.	Anggota DPRD	9.	
10.	Sdr. Sigit Nurcahyo, S.H.	Anggota DPRD	10.	
11.	Sdr. Novita Mawar Sharon	Anggota DPRD	11.	
12.	Sdr. Haryanto, S.E.	Anggota DPRD	12.	
13.	Sdr. Agus Riyanto	Anggota DPRD	13.	
14.	Sdr. Bambang Seno Baskoro, S.T	Anggota DPRD	14.	
15.	Sdr. Yogo Prasetyo Prihutomo	Anggota DPRD	15.	
16.	Sdr. Munazar, M.Psi.	Anggota DPRD	16.	
17.	Sdr. Muhammad Affan	Anggota DPRD	17.	
18.	Sdr. R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota DPRD	18.	
19.	Sdr. Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota DPRD	19.	
20.	Sdr. Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota DPRD	20.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara :
1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

LEGISLATIF

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan		Ket
21.	Sdr. Marwoto Hadi, S.H.	Anggota DPRD	21.		
22.	Sdr. Krisnadi Setyawan	Anggota DPRD		22.	
23.	Sdr. Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota DPRD	23.		
24.	Sdr. Dwi Candra Putra, S.P.,M.I.P.	Anggota DPRD		24.	
25.	Sdr. Oleg Yohan	Anggota DPRD	25.		
26.	Sdr. Choliq Nugroho Adji	Anggota DPRD		26.	
27.	Sdr. Eko Djoko Widiyatno, S.H., M.H.	Anggota DPRD	27.		
28.	Sdr. Solihul Hadi, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD		28.	
29.	Sdr. Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota DPRD	29.		
30.	Sdr. Nurcahyo Nugroho	Anggota DPRD		30.	
31.	Sdr. Mu'adz A.A., S.E., M.E.	Anggota DPRD	31.		
32.	Sdr. Fajar Kurniawan, S.IP.	Anggota DPRD		32.	
33.	Sdr. Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota DPRD	33.		
34.	Sdr. Affan Baskara Patria, S.IP.	Anggota DPRD		34.	
35.	Sdr. Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota DPRD	35.		
36.	Sdr. Mohammad Sofyan, S.T.	Anggota DPRD		36.	
37.	Sdr. H. Setyaji Hermawan	Anggota DPRD	37.		
38.	Sdr. Agus Trianto	Anggota DPRD		38.	
39.	Sdr. Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota DPRD	39.		
40.	Sdr. I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota DPRD		40.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara :
1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Nama		Tanda Tangan		Ket
1.	Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K)	WALI KOTA YOGYAKARTA	1.		
2.	WAWAN HARMAWAN, S.E., M.M..	WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA		2.	
3.		KODIM 0734	3.		
4.	BUDI WANTARA	POLRESTA		4.	
5.		PENGADILAN NEGERI	5.		
6.	Yogie R, SH, MH	KEJAKSAAN NEGERI		6.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara :
1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

EKSEKKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.			Sekretariat daerah	1.	
2.			Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.	
3.			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	3.	
4.			Asisten Administrasi Umum	4.	
5.			Staf Ahli Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraa	5.	
6.			Staf Ahli Bid. Perekonomian dan Pembangunan	6.	
7.			Staf Ahli Bid. Administrasi Umum	7.	
8.			Sekretariat DPRD	8.	
9.			Bagian Tata Pemerintahan	9.	
10.			Bagian Hukum	10.	
11.			Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.	
12.			Bagian Administrasi Pembangunan	12.	
13.	Sri Wuntarti		Bagian Perekonomian dan Kerjasama	13.	
14.	ENDAH DWI D		Bagian Umum dan Protokol	14.	
15.			Bagian Organisasi	15.	
16.			Bagian Administrasi dan Keuangan	16.	
17.			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	17.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara :
1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan		Ket
1.			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.		
2.			Dinas Kesehatan		2.	
3.	Erna. Susanti	IV	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.		
4.	Lucia Daning Kinawati		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang		4.	
5.			Satuan Polisi Pamong Praja	5.		
6.	Gunam Adelia		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		6.	
7.	Ria Kinowah		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.		
8.	Ita R		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		8.	
9.			Dinas Perdagangan	9.		
10.			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		10.....	
11.	IFTYA		Dinas Pertanian dan Pangan	11.		
12.	Afin Ty H		Dinas Lingkungan Hidup		12.	
13.	Tutiek .S.	IV	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	13.		
14.	Chriantoro		Dinas Perhubungan		14.	
15.	Nunu Z		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.		
16.	Tri Sotta		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		16.	
17.			Dinas Pariwisata Tipe A	17.		
18.	Rini Widarti		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		18.	
19.	Supriyanto		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19.		

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara :
1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Fitri Paulina A.		Inspektorat	1.	
2.	Apu Tri H	IV	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.	
3.	Yuli		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.	
4.	Fatmah R		BKPSDM	4.	
5.	Widiyastuti		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.	
6.			BPBD	6.	
7.	Marwa Yunita	IV	RSUD	7.	
8.	DESSY		PDAM Tirta Marta	8.	
9.	MARTO		PD BPK Bank Jogja	9.	
10.			BPD DIY Cab. Senopati	10.....	
11.			PD Jogjatama Vishesha	11.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara :
1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
2. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Bambang Endrow		Kemantren Danurejan	1.	
2.	HENDRO TRIYAKSONO		Kemantren Gedongtengen	2.	
3.	SURATI		Kemantren Gondokusuman	3.	
4.	Cahyono		Kemantren Gondomanan	4.	
5.	Gyanep JP		Kemantren Jetis	5.	
6.	Suhesh.		Kemantren Kotagede	6.	
7.	SULASMI		Kemantren Kraton	7.	
8.	Eni		Kemantren Mantrijeron	8.	
9.	Siti S.		Kemantren Mergangsan	9.	
10.	AE. SIWI U		Kemantren Ngampilan	10.	
11.	AGUNG P		Kemantren Pakualaman	11.	
12.	Agus Ambeh		Kemantren Tegalrejo	12.	
13.	Ana Wik		Kemantren Umbulharjo	13.	
14.	Samwanto		Kemantren Wirobrajan	14.	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651
YOGYAKARTA 55165

Email: dprd@jogjakota.go.id-Email **Intranet:** dprd@intra.jogjakota.go.id

KESIMPULAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta,
Yang kami hormati, Ketua Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta,
Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah beserta segenap Pejabat Eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta, rekan-rekan Wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini dalam keadaan sehat wal afi'at.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu kepada kami selaku Juru Bicara Panitia Khusus untuk melaporkan Kesimpulan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Anggota Panitia Khusus dan Tim Eksekutif yang secara intensif bersama-sama melakukan pembahasan terhadap Raperda ini hingga selesai.
Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.
Setelah mendengar dan memperhatikan :

1. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta Atas Raperda Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, pada Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 19 Mei 2025;

2. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, pada Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 19 Mei 2025;
3. Masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus pada tanggal 10 Juni 2025;
4. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 2 Juni 2025;
5. Jawaban Walikota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 5 Juni 2025;
6. Hasil Konsinyering pembahasan Raperda yang dilakukan oleh Panitia Khusus bersama Tim Eksekutif pada tanggal 20-21 Juni 2025;
7. Hasil rapat-rapat pembahasan raperda yang dilakukan oleh Panitia Khusus, baik yang dilakukan secara internal maupun bersama Tim Eksekutif;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas Panitia Khusus sepakat untuk memberikan catatan sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, maju, dan sejahtera.
2. Sebagai dokumen strategis, RPJMD memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Proses penyusunan RPJMD harus memastikan kesinambungan antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kajian lingkungan hidup strategis.

3. RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi landasan utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah, sehingga setiap kebijakan yang dirancang dipastikan bersifat terukur, sistematis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
4. Berdasarkan situasi politik dan ekonomi global dan nasional yang fluktuatif, maka dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun-tahun mendatang ada kecendurungan menurun sehingga akan mempengaruhi struktur pendapatan dan belanja pemerintah daerah secara keseluruhan.
5. Bahwa data proyeksi keuangan daerah jangka menengah akan menjadi bagian yang sangat penting guna menentukan arah kebijakan strategis dan membiayai program kegiatan dimasa mendatang. Penyusunan proyeksi keuangan daerah dalam RPJMD telah dilakukan dengan pendekatan yang moderat, realistis, dan selaras dengan pertumbuhan nasional dan regional.
6. Konstruksi pembiayaan belanja pegawai dan belanja sosial perlu mendapatkan perhatian serius guna mencapai program kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
7. Penyusunan Peraturan Daerah ini telah disertai dengan analisa permasalahan dan isu strategis yang dihadapi daerah serta merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan. Isu Strategis, Permasalahan pada Raperda RPJMD, Data/Fakta pendukung, Strategi Arah Kebijakan, serta Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab perlu menjadi pedoman dalam menyusun rencana strategis Pemerintah Kota Yogyakarta.

Selanjutnya berdasarkan catatan tersebut diatas Panitia Khusus memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka, Pemerintah Kota Yogyakarta agar memperhatikan visi, misi, isu-isu strategis, dan arah kebijakan serta sasaran dan indikator kerja yang telah dituangkan dalam Perda RPJMD;
2. Untuk mencapai target pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 5 tahun mendatang maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan:
    a. Optimalisasi dan digitalisasi pajak dan retribusi daerah, salah satunya melalui optimalisasai pajak hotel non bintang yang belum dilengkapi *tippingbox*.
    b. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah

c. Optimalisasi kinerja BUMD dengan memberikan peran kepada BUMD dalam menyerap belanja rutin yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga kinerja BUMD semakin meningkat dan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah.

d. Peningkatan layanan kesehatan antara lain melalui Peningkatan kelas RS Pratama, mempromosikan *sport tourism* dan *health tourism*

e. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) menjadi tindakan nyata untuk mendukung pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat pada sektor sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

f. Menyusun kajian optimalisasi pendapatan yang salah satunya berdasarkan optimalisasi pemanfaatan aset.

g. Penyesuaian kebijakan dan regulasi terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), khususnya dalam hal pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan ini terjadi karena adanya kebijakan opsen yang memungkinkan kabupaten/kota mengenakan pajak tambahan atas pokok pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini perlu didukung dengan kemudahan pelayanan pembayaran pajak bagi masyarakat.

3. Dalam rangka mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai *City of Festival* yang diharapkan meningkatkan *length of stay* belum mampu menjadi bagian dari pengungkit ekonomi maka perlu ada mitigasi sektor pariwisata, termasuk maraknya homestay yang belum bisa memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah secara langsung. Harus ada upaya untuk memetakan arah kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan keberadaan homestay yang merupakan bagian dari stimulan peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus diharapkan mampu memberikan konstribusi peningkatan pendapatan asli daerah.

4. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah, serta memprioritaskan belanja yang mendukung pencapaian target kinerja pelayanan publik maka Pemerintah Kota Yogyakarta agar lebih selektif dalam memberikan hibah langsung, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, kepada kementerian/lembaga.

5. Pengelolaan dan penanganan sampah secara terpadu dan berkelanjutan dari hulu-hilir menuju *zero solid waste city* perlu mendapatkan prioritas

6. Program Jaminan Pendidikan Daerah perlu mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, antara lain berkaitan dengan masih adanya tunggakan biaya pendidikan di sekolah swasta dan beasiswa pendidikan guna mendukung program wajib belajar.
7. Penurunan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Yogyakarta akan berdampak pada peningkatan cakupan penerima Program Penduduk Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk itu Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menghitung ulang data penerima jaminan kesehatan sekaligus daya dukung anggarannya sebagai wujud tanggungjawab pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan jaminan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage*) kepada warganya.
8. Eksisting ruang terbuka hijau publik (RTHP) masih belum dikelola secara optimal perlu mendapatkan prioritas penanganan.
9. Kegiatan pariwisata agar berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan UMKM.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Panitia Khusus berpendapat:

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, layak disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Selaku Juru Bicara Panitia Khusus, kami mohon maaf apabila di dalam menyampaikan Laporan Panitia Khusus terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.
Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Juni 2025

PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025 – 2029

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Ketua/Anggota	1. .....
2	Dhian Novitasari, S.Pd.	Wakil Ketua/Anggota	2. .....
3	Darini, S.IP.	Anggota	3. .....
4	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	4. .....
5	Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota	5. .....
6	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Anggota	6. .....
7	Yogo Prasetya Pri Hutomo	Anggota	7. .....
8	Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota	8. .....
9	Mohammad Sofyan, S.T.	Anggota	9. .....
10	H. Setyaji Hermawan	Anggota	10. .....
11	Dwi Candra Putra, S.P.,M.IP.	Anggota	11. .....

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
WALI KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

NOMOR : 2/PB/DPRD/2025
NOMOR : 2/PB.YK/100.3.2/VI/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima (26-06-2025), bertempat di Yogyakarta, dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami :

1. Nama : FX. WISNU SABDONO PUTRO
   Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
   Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43, Yogyakarta Kode Pos 55165
   Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2024 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2024-2029, tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (17–10–2024), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : HASTO WARDOYO
   Jabatan : Wali Kota Yogyakarta
   Alamat : Jl. Kenari 56, Yogyakarta, Kode Pos 55165
   Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima (28-01-2025), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, telah sepakat untuk mengadakan PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Persetujuan Bersama ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Persetujuan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA	PIHAK KEDUA WALI KOTA YOGYAKARTA
10000 METERAI TEMPEL 3840BAMX258838646	
FX. WISNU SABDONO PUTRO	HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR :
2/PB/DPRD/2025
2/PB.YK/100.3.2/VI/2025
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah agar dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah sesuai visi dan misi pembangunan Daerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka mengatasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan dalam rencana pembangunan periode sebelumnya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Yogyakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menyusun RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota.

(3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta memperhatikan:

a. RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. RTRW Daerah; dan

c. RPJMD Kabupaten sekitar.

(4) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:

a. RKPD;

b. Renstra Perangkat Daerah; dan

c. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika:

a. BAB I : PENDAHULUAN;

b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;

c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan

e. BAB V : PENUTUP.

(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang perencanaan dan pengendalian.

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...
WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029

UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban dasar untuk menciptakan suatu kehidupan yang sejahtera, baik bersifat materiil maupun imateriil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa harus mengorbankan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berlebihan dengan harapan tatanan sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan tetap stabil, kondusif, demokratis, bertanggung jawab dan berkeadilan. Prinsip dasar etika dalam mewujudkan keadilan hukum sebagaimana terkandung dalam sila-sila Pancasila yang meliputi prinsip-prinsip nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan yang beradab, serta keadilan dalam kehidupan sosial kenegaraan Indonesia.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mampu mewujudkan agar cita-cita Negara indonesia tersebut dapat terwujud, oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development Function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility. Responsibility objective* bersumber pada adanya pengendalian dari luar *(external controls)* yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three es (economy, efficiency and effectiveness)* dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Yogyakarta diperlukan sinergitas dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang diwujudkan dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemajuan pembangunan Kota Yogyakarta perlu didukung dengan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas serta mempunyai daya saing tinggi. Disisi lain diperlukan peran serta dunia usaha dan swasta dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan tetap mengacu dan memperhatikan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan menghasilkan perkembangan pembangunan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Kota Yogyakarta.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA	WALI KOTA YOGYAKARTA
FX. WISNU SABDONO PUTRO	HASTO WARDOYO

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR TABEL xii

BAB I 1

1.1. 1

1.2. 4

1.3. 7

1.4. 13

1.5. 14

BAB II 1

2.1. 1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1

2.1.1.2. Peran Strategis dan Potensi Pengembangan Wilayah II-13

2.1.1.3. Kondisi Ekoregion II-15

2.1.1.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....II-19

2.1.1.5. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan.....II-27

2.1.1.6. Kualitas Lingkungan Hidup II-31

2.1.1.7. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-35

2.1.1.8. Demografi II-42

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-51

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi II-51

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua II-65

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang merata II-68

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif II-73

2.1.2.5. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif II-75

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah II-81

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia II-81

2.1.3.2. IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi II-83

2.1.3.3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-89

2.1.3.4. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-91

2.1.3.5. Stabilitas Ekonomi Makro dan Iklim Investasi II-92

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum II-99

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang 98

2.1.4.2 Hukum yang Berkeadilan dan Keamanan yang Tangguh .II-106

2.1.4.2. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-111

2.1.4.3. Perkembangan Pembangunan Kemantren II-112

2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah II-113

2.2. 242

2.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....II-242

2.2.1.1. Pendapatan Daerah.....II-242

2.2.1.2. Belanja Daerah II-255

2.2.1.3. Pembiayaan Daerah II-261

2.2.1.4. Analisis Pembiayaan Keuangan Daerah.....II-266

2.2.2. Neraca Daerah.....II-267

2.2.2.1. Aset II-267

2.2.2.2. Kewajiban II-269

2.2.2.3. Ekuitas Dana.....II-270

2.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan II-276

2.2.4. Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan.. II-281

2.3. 293

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah II-292

2.3.1.1. Belum Tuntasnya Pengentasan Kemiskinan II-292

2.3.1.2. Belum Optimalnya Sektor Perdagangan dan Pertanian Untuk 294

2.3.1.3. Kebutuhan Peningkatan Investasi II-294

2.3.1.4. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat ...II-295

2.3.1.5. Belum Meratanya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat.....II-297

2.3.1.6. Belum Optimalnya Aksesibilitas dan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan II-299

2.3.1.7. Tantangan dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas Melalui Pemberdayaan Masyarakat II-300

2.3.1.8. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Kewilayahan II-302

2.3.1.9. Kesenjangan antara Kualitas Angkatan Kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri II-303

2.3.1.10. Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian dan Pemerataan Distribusi Pendapatan II-304

2.3.1.11. Penurunan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan II-306

2.3.1.12. Tantangan Pemenuhan Ketahanan Pangan II-308

2.3.1.13. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan II-310

2.3.1.14. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Perkotaan II-311

2.3.1.15. Belum Optimalnya Pengelolaan Risiko Bencana, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan II-313

2.3.1.16. Belum Tuntasnya Penanganan Kawasan Kumuh serta Pemenuhan Penyediaan Hunian Layak dan Terjangkau II-315

2.3.1.17. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Merespon Dinamika dan Inklusivitas Pembangunan II-316

2.3.1.18. Masih Adanya Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang Berpotensi Mempengaruhi Harmoni Kehidupan Masyarakat II-318

2.3.1.19. Belum Optimalnya Pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat II-319

2.3.2. Isu Lingkungan Dinamis II-319

2.3.2.1. Isu Global II-320

2.3.2.2. Isu Nasional.....II-326

2.3.2.3. Isu Regional II-330

2.3.3. Isu Strategis Daerah II-333

2.3.3.1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan.....II-333

2.3.3.2..... Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.....II-336

2.3.3.3. Pengelolaan Layanan Infrastruktur Perkotaan Berkualitas untuk Mewujudkan Ruang Kota yang Berkelanjutan II-338

2.3.3.4. Tantangan Peningkatan Kualitas Layanan Publik untuk Mewujudkan 341

BAB III 1

3.1. 1

3.2. 7

3.3. 10

3.4. 1

3.4.1. Penahapan Pembangunan..... III-1

3.4.2. Lokus Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 ..... III-8

3.4.2.1. Orientasi Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang..... III-9

3.4.2.2. Lokus Pembangunan Prioritas III-13

3.4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah..... III-16

3.4.4. Program Prioritas..... III-30

BAB IV 1

4.1. Program Perangkat Daerah IV-1

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-42

BAB V 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain Terkait I-13

Gambar II.1 Peta Administrasi Kota Yogyakarta II-4

Gambar II.2 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Yogyakarta II-9

Gambar II.3 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-12

Gambar II.4 Peta Bentang Lahan Kota Yogyakarta II-16

Gambar II.5 Peta Vegetasi Alami Kota Yogyakarta II-18

Gambar II.6 Peta Status Daya Dukung Air Kota Yogyakarta II-20

Gambar II.7 Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta II-23

Gambar II.8 Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-27

Gambar II.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-31

Gambar II.10 Peta Risiko Untuk Setiap Jenis Bencana II-39

Gambar II.11 Peta Risiko Multi Bahaya Kota Yogyakarta II-40

Gambar II.12 Indeks Risiko Bencana di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-41

Gambar II.13 Distribusi Persentase Penduduk Per Kemantren Tahun 2024 II-43

Gambar II.14 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-45

Gambar II.15 Struktur Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2024 II-47

Gambar II.16 Proyeksi Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 II-50

Gambar II.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 II-52

Gambar II.18 PDRB Per Kapita Menurut ADHB (Ribu Rupiah) Kota Yogyakarta Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 II-53

Gambar II.19 Rasio Gini Kota Yogyakarta terhadap Provinsi dan Nasional II-54

Gambar II.20 Angka Kemiskinan Kota Yogyakarta terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 II-56

Gambar II.21 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 II-57

Gambar II.22 Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2020 - 2024 II-65

Gambar II.23 Usia Harapan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 II-66

Gambar II.24 Prevalensi *Stunting* Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-67

Gambar II.25 Indeks Keluarga Sehat Kota Yogyakarta terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2023-2024 II-68

Gambar II.26 Rata Rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 II-69

Gambar II.27 Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-70

Gambar II.28 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2024 II-72

Gambar II.29 Indeks Pembangunan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-76

Gambar II.30 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-77

Gambar II.31 Indeks Ketimpangan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-78

Gambar II.32 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Yogyakarta 2021-2024 II-79

Gambar II.33 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Yogyakarta 2021-2024 II-80

Gambar II.34 Persentase PDRB Industri Pengolahan Terhadap Keseluruhan PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-84

Gambar II.35 Persentase PDRB Akomodasi dan Makan Minum Terhadap Keseluruhan PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-85

Gambar II.36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 II-87

Gambar II.37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-88

Gambar II.38 Indeks Inovasi Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021-2024 II-89

Gambar II.39 Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-92

Gambar II.40 Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta terhadap Nasional Tahun 2020-2024 II-97

Gambar II.41 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-100

Gambar II.42 Tingkat Kriminalitas per 100.000 Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-106

Gambar II.43 Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-113

Gambar II.44 Angka Partisipasi Kasar Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-114

Gambar II.45 Persentase Ruang Kelas SD/MI dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-118

Gambar II.46 Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta 2020-2024 II-119

Gambar II.47 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-130

Gambar II.48 Persentase Balita Gizi Kurang Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-131

Gambar II.50 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kota Yogyakarta 2020-2024 II-136

Gambar II.51 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 II-137

Gambar II.52 Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-144

Gambar II.53 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024 II-145

Gambar II.54 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-146

Gambar II.55 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-147

Gambar II.56 Persentase Berakses Air Minum Aman di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-147

Gambar II.57 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-149

Gambar II.58 Luas Permukiman Layak Huni Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-150

Gambar II.59 Ketersediaan Pangan Utama Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-168

Gambar II.60 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-170

Gambar II.61 Skor Pola Pangan Harapan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-171

Gambar II.62 Indeks Kualitas Air Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-177

Gambar II.63 Indeks Kualitas Udara Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-178

Gambar II.64 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-178

Gambar II.65 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tahun 2020-2024 II-180

Gambar II.66 Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-181

Gambar II.67 Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-182

Gambar II.68 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-183

Gambar II.69 Rasio Akseptor KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-186

Gambar II.70 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-187

Gambar II.71 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-189

Gambar II.72 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-191

Gambar II.73 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-192

Gambar II.74 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-193

Gambar II.75 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-200

Gambar II.76 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADHB (Ribu Rupiah) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-211

Gambar II.77 Jumlah Investor PMDN/PA Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-213

Gambar II.78 Jumlah Nilai Investasi PMDN/PA Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-215

Gambar II.79 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-217

Gambar II.80 Persentase Wirausaha Muda di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-218

Gambar II.81 Jumlah Atlet yang Memenangi Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional dalam Satu Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-220

Gambar II.82 Jumlah Prestasi Cabang Olahraga yang Dimenangkan dalam Satu Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-221

Gambar II.83 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-226

Gambar II.84 Pergerakan Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-228

Gambar II.85 Lama Kunjungan Wisata di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-229

Gambar II.86 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-231

Gambar II.87 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-232

Gambar II.88 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-233

Gambar II.89 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-234

Gambar II.90 Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-234

Gambar II.91 Ekspor Bersih Perdagangan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-236

Gambar II.92 Produksi Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-238

Gambar II.93 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-240

Gambar II.94 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-241

Gambar II.95 Tren Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta 2020–2024 (dalam Juta Rupiah) II-248

Gambar II.96 Tren Realisasi PAD dalam Juta Rupiah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 (dalam Juta Rupiah) II-251

Gambar II.97 Grafik Realisasi Fisik dan Keuangan BKK Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-283

Gambar III.1 Visi Pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan yang Relevan III-2

Gambar III.2 Keterkaitan Misi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 dengan Misi Wali Kota III-9

Gambar III.3 Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 III-10

Gambar III.4 Tahapan Periode Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta 2025-2034 III-2

Gambar III.5 Penahapan Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 III-5

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta II-2
Tabel II.2 Ketinggian Wilayah Kota Yogyakarta dari Permukaan Laut II-5
Tabel II.3 Curah Hujan Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 II-6
Tabel II.4 Kelembaban Udara Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 II-7
Tabel II.5 Tekanan Udara Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 II-7
Tabel II.6 Rata-Rata Suhu Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 II-7
Tabel II.7 Tutupan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 2013 dan 2023 II-10
Tabel II.8 Ekoregion Bentang Lahan di Kota Yogyakarta II-15
Tabel II.9 Tipe Vegetasi Kota Yogyakarta II-17
Tabel II.10 Status Daya Dukung Air Kota Yogyakarta II-21
Tabel II.11 Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta II-24
Tabel II.12 Analisis Daya Dukung Lahan Permukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2030 II-27
Tabel II.13 Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi Air Baku PDAM Tirtamarta untuk Kota Yogyakarta Tahun 2020 II-30
Tabel II.14 Cakupan Layanan Sanitasi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-33
Tabel II.15 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-34
Tabel II.16 Indeks Ketahanan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 II-41
Tabel II.17 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2020-2024 II-42
Tabel II.18 Dinamika Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024 II-43
Tabel II.19 *Sex Ratio* Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-44
Tabel II.20 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kota Yogyakarta 2020-2024 II-46
Tabel II.21 Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-47
Tabel II.22 Proyeksi Beban Ketergantungan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Usia II-48
Tabel II.23 Angka Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-53
Tabel II.24 Status Ketenagakerjaan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Yogyakarta (Agustus 2023) II-56

Tabel II.25 Distribusi Pendapatan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-58

Tabel II.26 Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-60

Tabel II.29 Angka Literasi dan Numerasi Kota Yogyakarta Tahun 2023-2024 II-66

Tabel II.30 Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-71

Tabel II.31 Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024 II-71

Tabel II.32 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-76

Tabel II.33 Angka Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-77

Tabel II.34 Tingkat Penyerapan Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-80

Tabel II.35 Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-84

Tabel II.36 Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-85

Tabel II.38 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-86

Tabel II.39 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-88

Tabel II.40 Jenis Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-90

Tabel II.41 Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-91

Tabel II.44 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-99

Tabel II.45 Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-99

Tabel II.46 Indikator Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-100

Tabel II.47 Indeks Daya Saing Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 II-103

Tabel II.48 Dimensi dan Indikator Pilar Stabilitas Ekonomi Makro dan Pilar Dinamisme Bisnis dalam IDSD II-104

Tabel II.49 Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 II-107

Tabel II.50 Angka Partisipasi Sekolah Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 II-107

Tabel II.51 Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-108

Tabel II.52 Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 II-109

Tabel II.53 Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 II-109

Tabel II.54 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 II-111

Tabel II.55 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 II-112

Tabel II.56 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 II-113

Tabel II.57 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-114

Tabel II.58 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-114

Tabel II.59 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Menengah di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 II-115

Tabel II.61 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-115

Tabel II.62 Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-116

Tabel II.63 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Yogyakarta 2020-2024 II-117

Tabel II.64 Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 II-118

Tabel II.65 Angka Kematian Neonatal di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-119

Tabel II.66 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-120

Tabel II.67 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-124

Tabel II.70 Penderita Penyakit Tidak Menular di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-126

Tabel II. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Aman di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 II-131

Tabel II.72 Luasan RTH Publik Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-132

Tabel II.74 Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024 II-134

Tabel II.75 Data Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-136

Tabel II.76 Jumlah Petugas Linmas di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-136

Tabel II.77 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-137

Tabel II.78 Persentase Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-138

Tabel II.79 Persentase PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-140

Tabel II.80 Persentase PMKS yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-141

Tabel II.81 Persentase PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-142

Tabel II.82 Persentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-143

Tabel II.83 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-144

Tabel II.84 Persentase WKBSM yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024 II-145

Tabel II.85 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial di Tahun 2020-2024 II-146

Tabel II.86 Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat 2020-2024 II-147

Tabel II.87 Persentase Korban Bencana yang mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 II-148

Tabel II.88 Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2020-2024 II-149

Tabel II.89 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun 2020-2024 II-150

Tabel II.90 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-151

Tabel II.91 Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024 II-152

Tabel II.93 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-153

Tabel II.98 Cakupan Penanganan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-154

Tabel II.99 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Yogyakarta yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2020-2024 II-155

Tabel II.100 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-156

Tabel II.103 Pemenuhan Energi dan Protein per Kapita per Hari Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-157

Tabel II.104 Persentase Cadangan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-161

Tabel II.105 Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-163

Tabel II.106 Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-163

Tabel II.107 Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-168

Tabel II.108 Kategori Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2024 II-169

Tabel II.109 Daya Tampung Depo/Sumber Lainnya Kota Yogyakarta II-169

Tabel II.110 Total *Fertility Rate dan Crude Birth Rate* di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-174

Tabel II.112 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-177

Tabel II.113 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-178

Tabel II.114 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri II-183

Tabel II.115 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat di Kota Yogyakarta 2020-2024 II-184

Tabel II.117 Rata-Rata Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 II-185

Tabel II.118 Rata-Rata Binaan PKK Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-186

Tabel II.119 Persentase LSM Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-186

Tabel II.120 Jumlah PKK Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-187

Tabel II.121 Persentase Posyandu Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-188

Tabel II.122 Jumlah Penumpang Bis yang Masuk Terminal di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-190

Tabel II.123 Jumlah Terminal Bis dan Stasiun Kereta Api di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-191

Tabel II.124 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-193

Tabel II.125 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-194

Tabel II.126 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-194

Tabel II.127 Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-195

Tabel II.128 Persentase Koperasi Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-195

Tabel II.129 Jumlah Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-196

Tabel II.130 Jenis Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2024 II-197

Tabel II.132 Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2024 II-197

Tabel II.134 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-199

Tabel II.135 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Yogyakarta 2020-2024 II-202

Tabel II.136 Indeks Pembangunan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 II-204

Tabel II.137 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-212

Tabel II.138 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-215

Tabel II.139 Jumlah Tempat Wisata di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-216

Tabel II.140 PAD Sektor Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-218

Tabel II.141 Listrik Terjual di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-222

Tabel II.142 Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-224

Tabel II.143 Jumlah Transmigran di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-225

Tabel II.145 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-227

Tabel II.146 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-228

Tabel II.147 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-229

Tabel II.148 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-230

Tabel II.149 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-230

Tabel II.150 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-231

Tabel II.151 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-232

Tabel II.153 Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 II-236

Tabel II.154 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 II-237

Tabel II.155 Proporsi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-239

Tabel II.156 Proporsi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-242

Tabel II.157 Proporsi Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2020-2025 II-245

Tabel II.158 Proporsi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Yogyakarta II-246

Tabel II.159 Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-248

Tabel II.160 Proporsi Komponen Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2020–2024 II-249

Tabel II.161 Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 II-250

Tabel II.162 Capaian Target Pembiayaan Daerah (Pembiayaan Netto) Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 II-254

Tabel II.163 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 II-255

Tabel II.164 Analisis Pembiayaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-258

Tabel II.165 Analisis Rasio Keuangan Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 II-262

Tabel II.166 Neraca Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 (dalam Juta Rupiah) II-263

Tabel II.167 Proyeksi Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2030 II-270

Tabel II.168 Alokasi Penerimaan BKK Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 II-273

Tabel II.169 Realisasi Keuangan dan Fisik Kumulatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta s.d. TW IV T.A. 2024 II-275

Tabel III.1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kerja RPJMD Kota Yogyakarta III-11

Tabel III.2 Arah Kebijakan Prioritas pada Periode I berdasarkan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah III-3

Tabel III.3 Arah Kebijakan berdasarkan Misi Pembangunan Daerah III-17

Tabel III.4 Keterkaitan Program Strategis/Unggulan Kepala Daerah dengan Program Perangkat Daerah III-32

Tabel III.5 Rumusan Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Pengampu III-40

Tabel IV.1 Program Perangkat Daerah Kota Yogyakarta IV-3

Tabel IV.2 Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 IV-34

Tabel IV.3 Indikator Kinerja Daerah Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 IV-36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses sistematis untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks pembangunan daerah, perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi lokal, keterbatasan sumber daya, serta dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keterbatasan sumber daya inilah yang harus diatasi dengan membuat perencanaan pembangunan agar pilihan tindakan yang dilaksanakan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memanfaatkan potensi untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD): Dokumen perencanaan dengan jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): Dokumen perencanaan 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPD serta disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD): Dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai dokumen strategis, RPJMD memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yang kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Proses penyusunan RPJMD harus memastikan kesinambungan antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kajian lingkungan hidup strategis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kota tentang RPJMD kota paling lambat 6 bulan setelah Wali Kota dan wakil Wali Kota dilantik. Apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD dalam waktu tersebut, maka kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 3 bulan.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Sejalan dengan pendekatan pembangunan global, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals*/SDGs) yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pembangunan di Indonesia harus dilakukan secara universal, terintegrasi, dan inklusif guna memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal *(no one left behind).*

Sebagai bagian dari komitmen nasional terhadap pencapaian SDGs, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perumusan kebijakan daerah. Kota Yogyakarta selama ini dikenal sebagai pusat budaya, pendidikan, dan pariwisata, dengan tantangan besar dalam hal menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta harus berorientasi pada pengembangan kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga selaras dengan upaya pelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Dalam proses penyusunannya, RPJMD Tahun 2025-2029 telah diintegrasikan dengan cakupan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan daya dukung lingkungan. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMD Tahun 2025-2029 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan komitmen Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian SDGs.

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi landasan utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah, sehingga setiap kebijakan yang dirancang dipastikan bersifat terukur, sistematis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan publik. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan fisik dan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan akses dan

kualitas pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan jangka menengah, tetapi juga instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.2. **Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021/Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY;
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten;
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta 2023-2027 (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 78);
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;.
27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43)

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun, yang merumuskan visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJP Daerah. RPJMD Tahun 2025-2029 berfungsi

sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, RPJMD harus memedomani dokumen perencanaan pembangunan yang berada di tingkat hierarki lebih tinggi, meliputi RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RPJPD DIY 2025-2045, RPJMD DIY 2022-2027, dan RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. Selain itu, penyusunan RPJMD juga harus memedomani dokumen perencanaan spasial, seperti RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kota.

Dalam hal ketentuan memedomani dokumen perencanaan pembangunan pada hierarki di atasnya dalam penyusunan RPJMD maka hal tersebut dapat dimaknai bahwa sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang di daerah harus selaras dengan muatan yang menjadi arahan dalam skala nasional, provinsi, maupun Kota. Sementara itu, terkait dengan ketentuan memedomani RTRW, hal ini berarti bahwa muatan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah harus selaras dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah sesuai hierarki RTRW yang dipedomani.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:

1. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani RPJMN Tahun 2025-2029 yang di dalamnya telah memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
    a. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan dimulai dari visi, misi, isu strategis, prioritas dan target nasional yang termuat dalam RPJMN 2025-2029.

b. Visi pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”
c. Misi RPJMN Tahun 2025-2029 adalah berikut:
    i. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
    ii. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
    iii. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
    iv. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
    v. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
    vi. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
    vii. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
    viii. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045.
    a. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan RPJPD Tahap I dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045.
    b. Visi pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta untuk periode 2025-2045, yaitu "Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan".
    c. Adapun misi jangka panjang Kota Yogyakarta adalah berikut:
        i. Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial;
        ii. Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan;
        iii. Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Kesinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola;
        iv. Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Penataan Ruang dan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.
    d. Pada pembangunan jangka panjang tahap 1 difokuskan pada Perkuatan Fondasi Pembangunan dengan arah kebijakan prioritas pada periode 2025-2029, meliputi:
        i. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
        ii. Penguatan potensi daerah pada sektor ekonomi produktif;
        iii. Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, dan digitalisasi pelayanan publik; dan
        iv. Pemerataan layanan infrastruktur perkotaan berdasarkan arahan rencana tata ruang.
3. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan memerhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.

4. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun memerhatikan RPJMD DIY Tahun 2022-2027.
    a. Penyelarasan RPJMD memerhatikan arah kebijakan yang termuat pada RPJMD DIY 2022-2027.
    b. Sama halnya dengan penyelarasan dengan RPJMN, penyelarasan dengan RPJMD DIY guna melihat kebijakan pembangunan di tingkat provinsi yang berkaitan dengan Kota Yogyakarta.
    c. Visi pembangunan DIY dalam RPJMD *Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, yaitu "Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi"*
    d. Misi pembangunan dalam RPJMD DIY 2022-2027, meliputi:
        i. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
        ii. Memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
        iii. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi; dan
        iv. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.
5. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan arah rencana pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041.
6. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Yogyakarta dalam periode tahun 2025-2029.

7. RPJMD Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.
    a. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD.
    b. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan.
8. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJPID) untuk mensinergikan kebijakan pembangunan dengan implementasi hasil riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan di daerah.
9. Data capaian pembangunan 5 tahun terakhir dari tahun 2020-2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.
10. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan /atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029.
11. Manajemen Risiko Pembangunan di Daerah.
12. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan pada skema berikut.

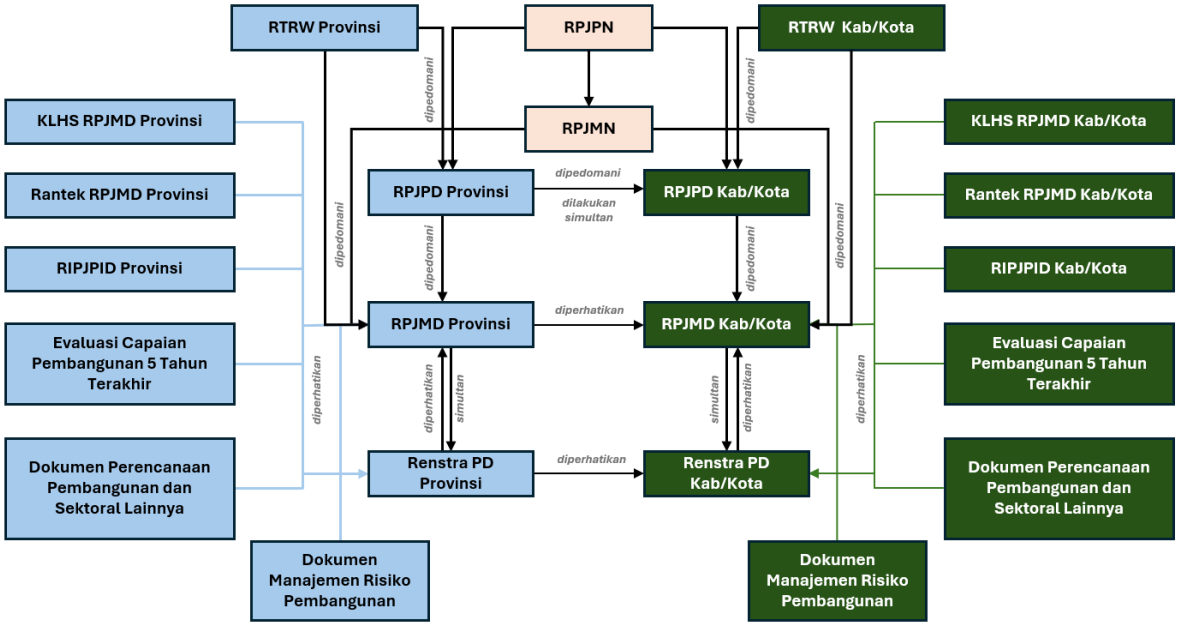

Gambar I.1 Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain Terkait

Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam membangun komitmen bersama dalam mewujudkan cita-cita Masyarakat Kota Yogyakarta secara sinergis dan berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan pada jangka waktu 2025 – 2029.
2. Menyediakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing perangkat daerah untuk mencapai keselarasan dan sinkronisasi dengan RPJMD.
3. Menyediakan acuan dalam penyusunan RKPD, yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu

indikatif, sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Menyediakan instrumen sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga perumusan indikator untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama 5 (lima) tahun kepemimpinan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang perumusan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, Maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.

BAB II **GAMBARAN UMUM DAERAH**

Bab ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi Kota Yogyakarta, meliputi aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan publik. Uraian ini juga mencakup kondisi keuangan daerah, termasuk kapasitas riil pembiayaan Kota Yogyakarta untuk periode 2025–2029. Di dalamnya turut dijelaskan identifikasi permasalahan dan penentuan isu-isu strategis daerah dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan di tingkat global, nasional, dan regional.

BAB III **VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini memuat arah pembangunan jangka menengah daerah yang dituangkan melalui visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan program prioritas pembangunan. Subbab Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sekurang-kurangnya memuat rumusan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029. Sementara itu, Subbab Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029, serta program-program prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

BAB IV **PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini memuat program-program dari masing-masing Perangkat Daerah serta pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Subbab Program Perangkat Daerah mencantumkan daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang diarahkan untuk mencapai kinerja pembangunan daerah, serta indikator program, target, dan pagu indikatif masing-masing program pada periode tersebut. Selanjutnya, Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V **PENUTUP**

Bab Penutup memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD setelah periode berakhir atau terjadi perubahan kondisi yang memerlukan penyesuaian.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1. Lokasi dan Luas Batas Wilayah Administrasi

Kota Yogyakarta merupakan ibu kota DIY. Fungsi ini mencerminkan peran Kota Yogyakarta sebagai pusat administrasi, baik pada tingkat regional provinsi maupun kota. Selain itu, Kota Yogyakarta juga telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dalam Rencana Tata Ruang Nasional, dengan fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, jasa pelayanan, pariwisata, serta sosial budaya.

Berdasarkan luas wilayah, Kota Yogyakarta memiliki luas sebesar 32,819 km^2, atau sekitar 1,04% dari total luas wilayah DIY. Dengan demikian, Kota Yogyakarta adalah wilayah dengan luas terkecil di DIY dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya.

Secara astronomis, Kota Yogyakarta terletak di antara 110°24’19”-110°28’53” BT dan antara 07°15’24”-07°49’26” LS. Dalam konstelasi spasial kewilayahan DIY, Kota Yogyakarta menempati lokasi strategis di pusat daerah dan diapit oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sleman (Kapanewon Depok dan Kapanewon Mlati);
2. Sebelah Timur : Kabupaten Sleman (Kapanewon Depok dan Kapanewon Berbah) dan Kabupaten Bantul (Kapanewon Banguntapan);
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul (Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Sewon); dan

4. Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (Kapanewon Gamping) dan Kabupaten Bantul (Kapanewon Kasihan).

Wilayah administrasi Kota Yogyakarta terdiri atas 14 Kemantren, 45 Kelurahan, 616 Rukun Warga (RW) dan 2.535 Rukun Tetangga (RT). Kemantren Umbulharjo memiliki luas wilayah terbesar dengan luas 8,326 km^2 (25,36% dari luas Kota Yogyakarta). Sementara itu, Kemantren Pakualaman menjadi kemantren terkecil dengan luas wilayah sebesar 0,647 km^2 (1,97% dari luas Kota Yogyakarta). Pembagian administrasi Kota Yogyakarta disajikan pada tabel berikut.

Tabel -1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta

No.	Kemantren	Kelurahan	Luas Area (km^2)	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Mantrijeron	Gedongkiwo	0,916	18	86
		Suryodiningratan	0,885	17	70
		Mantrijeron	0,871	20	75
		Total	**2,672**	**55**	**231**
2.	Kraton	Patehan	0,379	10	44
		Panembahan	0,647	18	78
		Kadipaten	0,349	15	53
		Total	**1,375**	**43**	**175**
3.	Mergangsan	Brontokusuman	0,917	23	84
		Keparakan	0,530	13	58
		Wirogunan	0,850	24	77
		Total	**2,297**	**60**	**219**
4.	Umbulharjo	Giwangan	1,293	13	46
		Sorosutan	1,750	18	70
		Pandeyan	1,388	13	52
		Warungboto	0,838	9	38
		Tahunan	0,805	12	50
		Muja Muju	1,580	12	55
		Semaki	0,672	10	34
		Total	**8,326**	**87**	**345**
5.	Kotagede	Prenggan	1,023	13	57
		Purbayan	0,743	14	58
		Rejowinangun	1,222	13	50
		Total	**2,986**	**40**	**165**
6.	Gondokusuman	Baciro	1,023	21	87

No.	Kemantren	Kelurahan	Luas Area (km²)	Jumlah RW	Jumlah RT
		Demangan	0,746	12	44
		Klitren	0,689	16	62
		Kotabaru	0,724	4	20
		Terban	0,797	12	58
		Total	**3,989**	**65**	**271**
7.	Danurejan	Suryatmajan	0,295	14	40
		Tegalpanggung	0,331	16	66
		Bausasran	0,482	12	49
		Total	**1,109**	**42**	**155**
8.	Pakualaman	Purwokinanti	0,339	10	47
		Gunungketur	0,308	9	36
		Total	**0,647**	**19**	**83**
9.	Gondomanan	Prawirodirjan	0,466	18	61
		Ngupasan	0,677	13	49
		Total	**1,142**	**31**	**110**
10.	Ngampilan	Notoprajan	0,380	8	50
		Ngampilan	0,461	13	70
		Total	**0,841**	**21**	**120**
11.	Wirobrajan	Patangpuluhan	0,444	10	51
		Wirobrajan	0,649	12	58
		Pakuncen	0,678	12	56
		Total	**1,771**	**34**	**165**
12.	Gedongtengen	Pringgokusuman	0,487	22	84
		Sosromenduran	0,499	14	54
		Total	**0,985**	**36**	**138**
13.	Jetis	Bumijo	0,585	13	57
		Gowongan	0,458	13	52
		Cokrodiningratan	0,677	11	57
		Total	**1,721**	**37**	**166**
14.	Tegalrejo	Tegalrejo	0,820	12	48
		Bener	0,581	7	27
		Kricak	0,849	13	61
		Karangwaru	0,711	14	56
		Total	**2,961**	**46**	**192**
Jumlah			**32,819**	**616**	**2.535**

Sumber: Keputusan Walikota Nomor 279 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Nomor 499 Tahun 2021 tentang Penetapan Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga se-Kota Yogyakarta, 2025

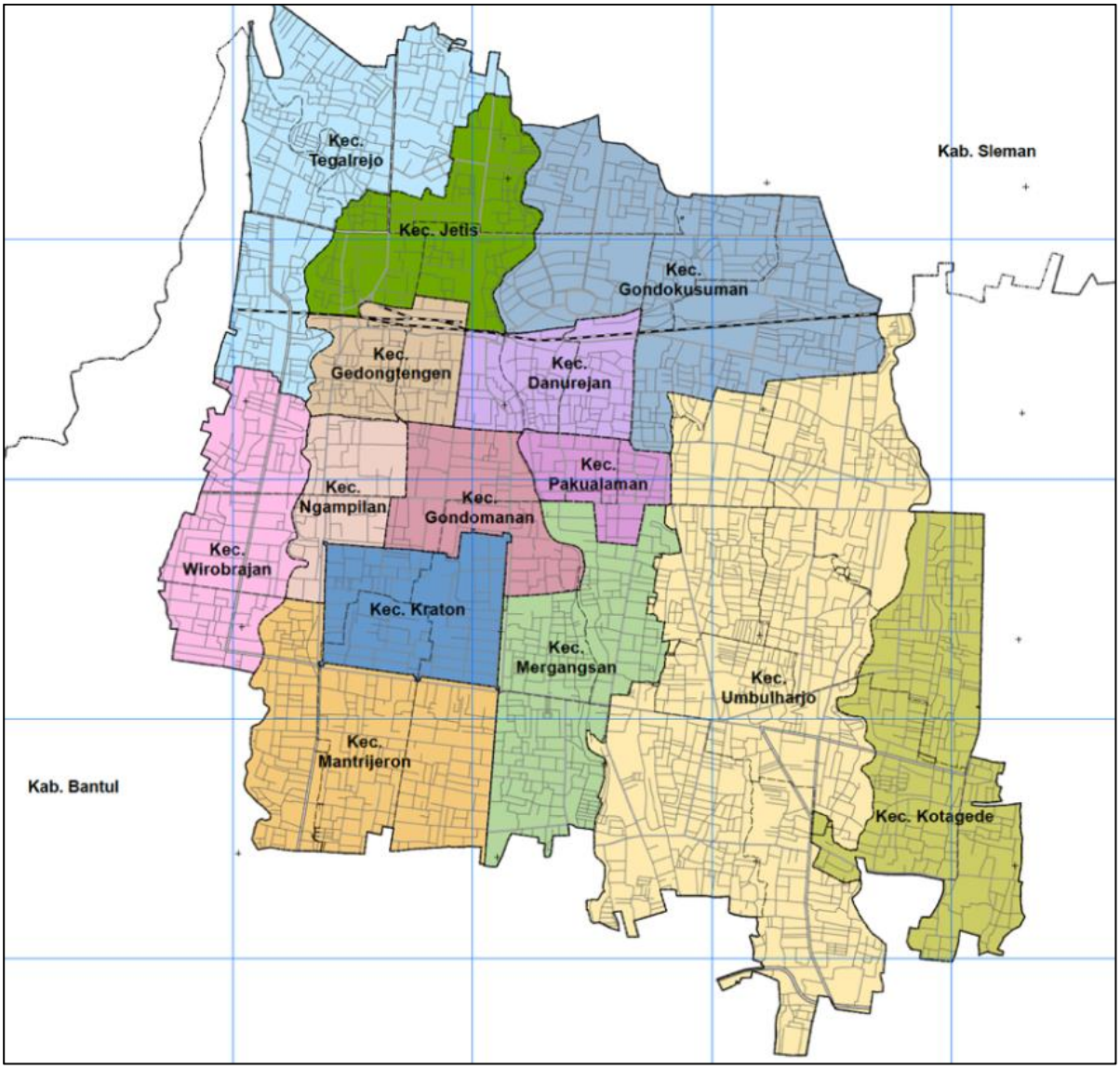

Gambar II.1 Peta Administrasi Kota Yogyakarta

Sumber: Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, 2025

2.1.1.1.2. ***Geologi***

Kondisi tanah di Kota Yogyakarta sebagian besarnya adalah tanah regosol atau vulkanis muda. Tanah regosol merupakan tanah hasil erupsi gunung berapi yang cenderung subur karena kaya akan unsur hara, memiliki tekstur tanah kasar berupa pasir dan/atau pasir berlempung, berwarna keabuan, namun peka terhadap erosi. Jenis tanah ini mudah meresapkan air, sehingga tanah ini dapat berfungsi sebagai median perkolasi yang baik bagi imbuhan air tanah. Kondisi tanah yang subur dan kaya unsur hara memungkinkan untuk ditanami berbagai jenis tanaman pertanian.

Kota Yogyakarta terletak di atas formasi geologi yang terdiri dari batuan sedimen andesit tua (*old andesite*). Kota ini dilintasi oleh tiga sungai yang mengalir dari utara ke selatan, yaitu Sungai Code di bagian tengah kota, Sungai Winongo di bagian barat, dan Sungai Gajah Wong di bagian timur Kota Yogyakarta.

2.1.1.1.3. ***Topografi***

Kota Yogyakarta memiliki rata-rata ketinggian dari permukaan laut yaitu 126 mdpl. Kemantren terendah yaitu Kemantren Gondomanan yaitu 96 mdpl. Sementara itu, kemantren dengan ketinggian paling tinggi adalah Gedongtengen yaitu 156,9 mdpl sebagaimana secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel -2 Ketinggian Wilayah Kota Yogyakarta dari Permukaan Laut

No.	Kemantren	Tinggi Wilayah (mdpl)
1.	Tegalrejo	128,90
2.	Jetis	114,00
3.	Gondokusuman	152,00
4.	Danurejan	159,00
5.	Gedongtengen	156,90
6.	Ngampilan	125,00
7.	Wirobrajan	128,00
8.	Mantrijeron	113,00
9.	Kraton	114,00
10.	Gondomanan	96,00
11.	Pakualaman	157,00
12.	Mergangsan	119,30
13.	Kotagede	110,00
14	Umbulharjo	126,00
Rata-rata Kota Yogyakarta		**126,00**

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2024, 2025

2.1.1.1.4. ***Klimatologi***

Kota Yogyakarta mengalami perbedaan musim hujan dan kemarau yang signifikan. Musim hujan berlangsung dari November hingga April, sedangkan musim kemarau dari Mei hingga Oktober. Pada tahun 2024, rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Yogyakarta tercatat pada bulan Januari dengan curah hujan sebesar 498,00 mm dan 22 hari hujan. Sebaliknya, hujan tidak terjadi di Bulan Agustus. Secara keseluruhan, rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2024 di Kota Yogyakarta adalah 126,25 mm. Kelembaban udara pada tahun 2024 memiliki rata-rata 92,3%. Sementara itu, rata-rata tekanan udara adalah 991,4 mm dengan suhu rata-rata 26,6°C.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi klimatologi pada tahun 2024 menunjukkan perbedaan dalam waktu puncak musim hujan, meskipun masih berada dalam rentang periode yang sama. Selain itu, suhu di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan meskipun masih dalam musim hujan. Perubahan-perubahan ini mencerminkan dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kenyamanan masyarakat. Untuk menghadapi musim kemarau, perlu dilakukan persiapan pola tanam yang tepat guna menghindari risiko gagal panen.

Tabel -3 Rata-Rata Curah Hujan Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

Bulan	Curah Hujan (mm^3)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	308,20	349,80	224,00	259,00	498,00
Februari	398,40	305,30	386,00	392,90	235,00
Maret	516,80	152,10	349,00	347,50	210,00
April	207,00	237,40	308,60	380,60	113,00
Mei	275,90	2,30	169,20	76,00	13,00
Juni	3,70	267,40	176,80	5,00	12,00
Juli	3,30	23,10	22,50	21,00	14,00
Agustus	13,70	24,70	74,70	1,00	0
September	6,80	78,50	163,50	-	32,00
Oktober	114,00	57,10	412,50	-	35,00
November	182,80	495,50	575,50	195,50	439,00
Desember	341,60	281,00	339,50	276,50	380,00

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025, 2025

Tabel -4 Kelembaban Udara Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

Bulan	Kelembaban Udara (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	77,59	78,90	81,00	83,00	96,00
Februari	79,47	80,40	82,00	85,00	93.00
Maret	81,49	77,20	85,00	83,00	95,00
April	78,90	74,50	84,00	83,00	93,00
Mei	79,21	74,10	82,40	79,00	90,00
Juni	75,32	77,90	83,50	80,00	96,00
Juli	71,71	72,90	80,70	79,00	93,00
Agustus	70,62	73,90	79,74	78,00	84,00
September	69,20	71,40	82,26	75,00	85,00
Oktober	75,21	75,10	87,31	76,00	90,00
November	76,61	85,20	86,79	80,00	96,00
Desember	81,32	81,40	85,00	79,00	97,00

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025, 2025

Tabel -5 Tekanan Udara Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

Bulan	Tekanan Udara (mb)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	995,06	993,6	990,20	990,00	993,70
Februari	995,48	994,0	989,30	989,50	993,60
Maret	995,18	994,4	989,20	990,90	994,00
April	995,34	995,2	990,00	990,20	992,00
Mei	995,10	994,6	990,10	992,10	992,70
Juni	995,78	966,0	990,70	992,00	993,70
Juli	995,52	996,0	990,90	993,30	994,60
Agustus	995,90	996,8	991,50	994,00	995,30
September	996,08	996,0	992,30	994,00	994,30
Oktober	995,13	995,9	991,50	994,10	994,60
November	995,09	994,1	990,50	990,50	992,50
Desember	993,40	995,1	989,23	992,00	992,30

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025, 2025

Tabel -6 Rata-Rata Suhu Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

Bulan	Suhu Udara (°C)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	22,0–33,4	22,4–33,0	23,40-31,10	23,3-30,3	23,7-31,0
Februari	23,2–33,8	21,8–33,0	23,50-30,90	23,3-30,5	24,0-31,7
Maret	22,8–33,4	22,0–33,8	23,40-30,80	23,2-31,3	24,0-31,4
April	22,2–34,2	21,1–34,0	23,00-31,00	23,5-31,2	24,4-32,0
Mei	23,0–34,2	21,6–34,6	23,60-32,00	22,9-31,5	23,3-31,9
Juni	21,0–33,4	21,7–33,2	22,60-30,40	23,0-30,9	23,3-31,9
Juli	18,0–32,8	19,0–33,6	21,90-30,40	21,5-29,7	21,5-30,9
Agustus	19,9–35,0	20,6–33,4	22,40-30,30	20,7-30,5	21,5-31,0
September	21,8–34,6	21,0–34,2	24,20-30,40	21,3-31,2	22,9-32,2
Oktober	22,4–34,2	22,0–34,2	22,90-29,10	23,2-33,0	23,8-32,5
November	22,5–34,2	22,4–32,4	22,80-29,80	24,4-32,4	23,7-31,9
Desember	21,0–33,4	22,8–33,4	23,00-30,20	23,9-31,5	23,7-30,8

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025, 2025

2.1.1.1.5. ***Hidrologi***

Kondisi hidrologi Kota Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh keberadaan aliran sungai. Terdapat tiga aliran sungai utama di wilayah ini, yaitu Sungai Gajahwong di bagian timur, Sungai Code di bagian tengah, dan Sungai Winongo di bagian barat Kota Yogyakarta. Wilayah Kota Yogyakarta termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak dan Progo. DAS Opak merupakan bagian dari Wilayah Sungai (WS) Progo-Opak-Serayu. Ketiga sungai tersebut bermuara di Sungai Opak, membentuk sub sistem Sungai Opak.

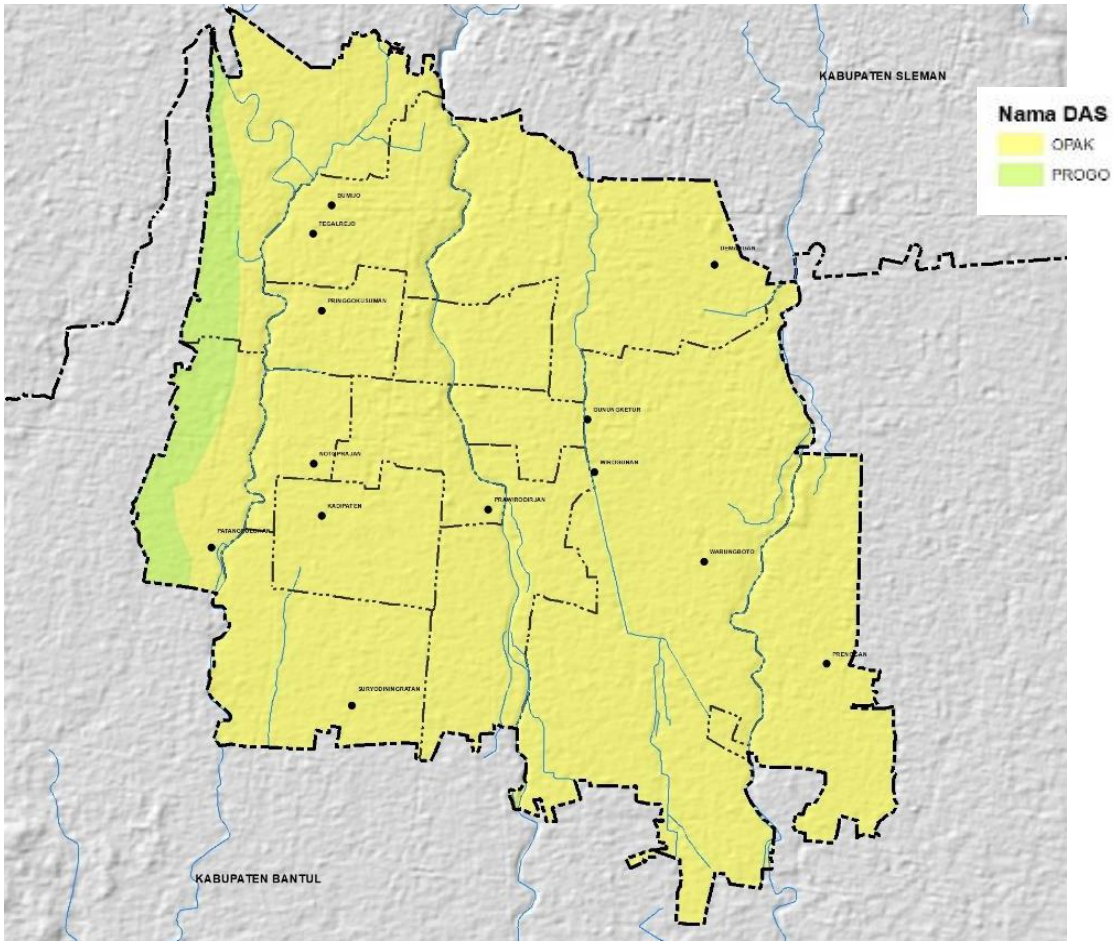

Gambar II.2 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Yogyakarta

Sumber: Balai Besar Wilayah Serayu – Opak, 2023

2.1.1.1.6. ***Penutup Lahan***

Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan (UU No. 4 Tahun 2011). Kota Yogyakarta merupakan wilayah perkotaan sehingga tutupan lahan yang dominan adalah lahan terbangun berupa permukiman, perkantoran, jalan, dan fasilitas umum. Persentase penutup lahan berupa vegetasi teridentifikasi relatif kecil dibandingkan tutupan lahan yang terbangun di Kota Yogyakarta, hal ini dikarenakan perkembangan Kota Yogyakarta yang sangat pesat dan ketersediaan lahan dengan fungsi lindung yang terbatas.

Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2013, teridentifikasi bahwa permukiman kepadatan tinggi di Kota Yogyakarta menjadi tutupan lahan terbesar yang mencapai seluas 1.665,10 ha atau seluas 50,79% dari total

luas wilayah. Tutupan lahan berikutnya yang juga cukup dominan, yaitu berupa perdagangan umum seluas 279,28 ha atau 8,52% dari total luas wilayah. Selain itu, Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan juga tergambar dari tutupan lahan berupa fasilitas pendidikan seluas 5,41% dari total luas wilayah, berupa bangunan sekolah maupun perguruan tinggi.

Pada tahun 2023, penutup lahan berupa lahan terbangun seperti permukiman, perkantoran, jalan, dan fasilitas umum masih mendominasi kondisi Kota Yogyakarta. Permukiman kepadatan tinggi di Kota Yogyakarta menjadi tutupan lahan paling dominan sebesar 1.669,24 ha atau seluas 50% dari total luas wilayah. Sementara itu, penutup lahan terluas kedua adalah perdagangan umum seluas 294,81 ha atau 8,99% dari total luas wilayah. Luasan setiap tutupan lahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel -7 Tutupan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 2013 dan 2023

Penggunaan Lahan	Tahun 2013		Tahun 2023	
	Luasan (ha)	Persentase	Luasan (ha)	Persentase
Akomodasi dan Rekreasi	103,98	3,17	78,03	2,38
Fasilitas Kesehatan	31,52	0,96	30,87	0,94
Fasilitas Layanan Umum	22,29	0,68	12,38	0,38
Fasilitas Olahraga	18,16	0,55	3,83	0,12
Fasilitas Pemerintahan	89,25	2,72	76,15	2,32
Fasilitas Pendidikan	194,53	5,93	177,50	5,41
Fasilitas Peribadatan	23,29	0,71	8,96	0,27
Industri Non Pertanian	6,87	0,21	40,34	1,23
Industri Pertanian	7,46	0,23	3,50	0,11
Instalasi	3,71	0,11	0,30	0,01
Jalan	198,27	6,05	199,37	6,08
Jalan Arteri	2,23	0,07	2,23	0,07
Jalan Kolektor	74,09	2,26	74,11	2,26
Jalur Hijau	3,87	0,12	3,87	0,12
Kebun Binatang	18,82	0,57	16,34	0,50
Komplek Masjid Agung Kauman	2,52	0,08	2,52	0,08
Lapangan	9,82	0,30	6,36	0,19
Lembaga Usaha	14,78	0,45	26,27	0,80
Pasar	13,44	0,41	11,82	0,36
Pemakaman	37,19	1,13	37,17	1,13
Pemakaman Khusus	4,44	0,14	4,44	0,14
Perbengkelan	6,53	0,20	6,53	0,20
Perdagangan Khusus	13,63	0,42	13,63	0,42
Perdagangan Umum	294,81	8,99	279,28	8,52
Pergudangan	31,28	0,95	14,52	0,44

Penggunaan Lahan	Tahun 2013		Tahun 2023	
	Luasan (ha)	Persentase	Luasan (ha)	Persentase
Perkantoran Swasta	28,08	0,86	19,32	0,59
Permukiman Kepadatan Sedang	76,48	2,33	123,12	3,76
Permukiman Kepadatan Tinggi	1669,24	50,92	1.665,10	50,79
Permukiman Khusus	28,78	0,88	28,78	0,88
Pertanian Tanah Basah	32,08	0,98	62,99	1,92
Pertanian Tanah Kering	24,62	0,75	75,51	2,30
Peternakan	0,17	0,01	0,17	0,01
Prasarana Transportasi	33,30	1,02	44,41	1,35
Rel Kereta Api	4,41	0,13	4,41	0,13
Semak Belukar	20,97	0,64	31,53	0,96
Taman Kota	13,41	0,41	8,81	0,27
Tanah Kosong	78,19	2,39	41,85	1,28
Tubuh Air/Sungai	29,29	0,89	29,31	0,89
Waduk/Embung	1,43	0,04	2,10	0,06
Wisata Budaya	10,79	0,33	10,79	0,33
Total	**3.278,03**	**100,00**	**3.278,54**	**100,00**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta 2025 – 2029, 2025

2.1.1.1.7. ***Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang***

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman yang memuat rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis. Selain RTRW, Kota Yogyakarta juga memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai rencana tata ruang yang lebih rinci. Pembangunan yang dilakukan di Kota Yogyakarta harus sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam RTRW dan RDTR. Indikator persentase pemanfaatan ruang sesuai tata ruang menunjukkan tingkat capaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan RTRW dan RDTR.

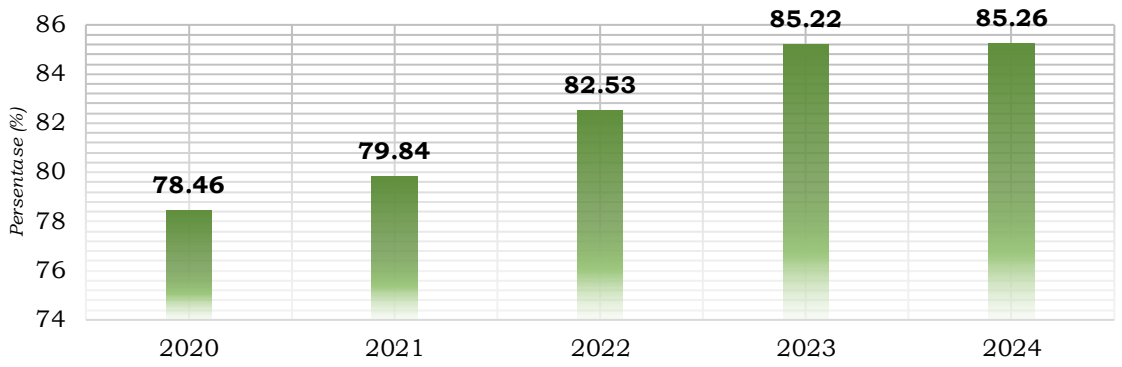

Gambar II.3 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, 2025

Kesesuaian pemanfaatan tata ruang dari tahun 2023 ke 2024 hanya mengalami kenaikan 0,04%. Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2024 untuk pemanfaatan ruang yang diizinkan (I), diizinkan terbatas (T), diizinkan bersyarat (B), dan diizinkan terbatas bersyarat (TB) adalah sebesar 85,26% dan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang (klasifikasi X) adalah 1,22%, dengan disertai persentase luas jalan sebesar 11,95% dan sungai sebesar 1,57%.

Kemantren dengan kesesuaian pemanfaatan ruang yang paling tinggi adalah Kemantren Pakualaman sebesar 87,99%, sedangkan yang paling rendah adalah Kemantren Gedongtengen sebesar 81,56% Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang dominan di Kemantren Gedongtengen adalah pergudangan.

Meskipun indikator ini telah menunjukkan tren positif, namun sebagai upaya untuk memastikan bahwa tujuan penataan ruang dapat terwujud sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, jelas bahwa peningkatan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW menjadi salah satu kondisi yang harus terus diupayakan. Kondisi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW merupakan aspek yang penting karena akan berpengaruh pada kualitas lingkungan, aspek mitigasi bencana, termasuk mempengaruhi daya dukung dan daya tampung kawasan.

2.1.1.2. Peran Strategis dan Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Yogyakarta merupakan bagian utama dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). KPY sendiri mencakup seluruh wilayah administrasi Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Sleman (Kapanewon Depok, sebagian Ngaglik, Mlati, Godean, Gamping, dan Ngemplak) serta sebagian wilayah Kabupaten Bantul (sebagian Kasihan, Sewon, dan Banguntapan).

Dalam konteks regional Jawa–Bali, peran Kota Yogyakarta sebagai PKN diarahkan tidak terbatas pada skala regional, tetapi juga menjangkau skala nasional bahkan internasional. Berbagai fungsi strategis Kota Yogyakarta dalam kerangka PKN tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pengaturan tata ruang wilayah di Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan

   Penetapan ini menuntut ketersediaan zonasi yang mendukung pengembangan fungsi sebagai pusat riset (research center), baik dalam bentuk ruang fisik, infrastruktur pendukung, maupun ekosistem pengetahuan.

2. Pusat Industri Kreatif yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan

   Peran ini perlu didukung oleh rencana zonasi yang memfasilitasi aktivitas produksi, distribusi, dan layanan industri kreatif, serta mendorong pariwisata berbasis pengetahuan (business knowledge).

3. Pusat Perdagangan dan Jasa Berskala Internasional

   Penetapan ini menuntut adanya standarisasi ruang, infrastruktur, dan layanan yang sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional dapat berjalan secara berkelanjutan.

4. Pusat Pariwisata Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
   Pengembangan fungsi ini membutuhkan sistem zonasi yang mampu mengintegrasikan pemanfaatan ruang untuk kepariwisataan berbasis

budaya dan ilmu pengetahuan, serta menjamin penyelarasan antara keduanya dalam kerangka pengelolaan ruang yang efisien.

5. Pusat Penyelenggaraan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)

   Implikasinya terhadap tata ruang adalah perlunya penetapan zona-zona fungsional yang mampu mewadahi kegiatan MICE secara optimal dan terkonsolidasi dengan fungsi-fungsi perkotaan lainnya.

Sebagai ibu kota provinsi, Kota Yogyakarta diarahkan untuk dapat memberikan pelayanan fungsional yang optimal sebagai pusat kegiatan skala regional, melalui pengembangan pusat-pusat layanan bagi masyarakat, seperti pusat transportasi darat, pusat pariwisata budaya, dan pusat permukiman perkotaan.

Kota Yogyakarta memiliki struktur pusat pelayanan kota yang memainkan peran strategis dalam mendorong kemajuan wilayah dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Masing-masing pusat pelayanan tersebut memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi dalam mendukung dinamika pembangunan kota.

Pertama, Kawasan Balai Kota di Kemantren Umbulharjo berfungsi sebagai pusat pelayanan administrasi pemerintahan. Kawasan ini menjadi simpul pengambilan keputusan dan koordinasi pembangunan lintas sektor. Keberadaannya tidak hanya memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga mempengaruhi struktur pelayanan, dan pola pergerakan di sekitarnya.

Kedua, Kawasan Jalan Malioboro yang terletak di Kemantren Gondomanan berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata. Kawasan Jalan Malioboro memuat nilai historis dan simbolis yang kuat sebagai poros penghubung antara Tugu Pal Putih, Kraton Yogyakarta, hingga Panggung Krapyak. Dengan posisinya sebagai ikon kota dan destinasi wisata berskala internasional, Kawasan Jalan Malioboro menjadi magnet pertumbuhan bagi sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata berbasis budaya.

Ketiga, Kawasan Kraton Yogyakarta di Kemantren Kraton dan Kawasan Pakualaman di Kemantren Pakualaman secara keseluruhan berperan sebagai pusat pelayanan budaya. Kraton merupakan inti dari Kawasan Sumbu Filosofi sekaligus pusat kekuasaan simbolik dan spiritual yang mencerminkan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Sementara itu, Pakualaman memegang peranan penting sebagai pusat budaya dan kesejarahan yang memperkaya narasi kebudayaan lokal. Keduanya menjadi sumber pelestarian tradisi, penguatan identitas budaya, dan penggerak kegiatan sosial-budaya masyarakat Yogyakarta.

Dengan berbagai peran tersebut, Kota Yogyakarta tidak hanya menjadi simpul utama pembangunan di tingkat daerah, tetapi juga memainkan peran strategis dalam mendukung daya saing wilayah di kancah nasional dan global melalui pengelolaan ruang yang terintegrasi dan berorientasi masa depan.

2.1.1.3. **Kondisi Ekoregion**

2.1.1.3.1. ***Karakteristik Bentang Lahan***

Secara umum, ekoregion bentang lahan di Kota Yogyakarta adalah dataran fluviovulkanik yang merupakan bagian dari ekoregion bentang lahan vulkanik Gunung Merapi di sebelah utara. Adapun secara regional, Kota Yogyakarta secara keseluruhan berada pada bentang alam dataran fluviovulkanik bermaterial alluvium dengan vegetasi alami berupa vegetasi terna rawa air tawar (SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021).

Pendekatan yang dilakukan dalam menentukan bentang lahan di Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara interpretasi citra, analisis literatur, dan survei lapangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa Kota Yogyakarta memiliki ekoregion bentang lahan sebagaimana disampaikan pada tabel dan peta berikut.

Tabel -8 Ekoregion Bentang Lahan di Kota Yogyakarta

Ekoregion	Luasan (ha)	Persentase (%)
Dataran banjir bermaterial aluvium	89,76	2,74
Dataran banjir bermaterial aluvium, prioklastik, endapan lahar	19,75	0,60
Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium endapan merapi muda	141,34	4,31
Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium merapi muda campuran	2.991,13	91,25
Lembah danau/waduk bermaterial aluvium	2,49	0,08
Lembah fluviovulkanik bermaterial aluvium endapan merapi muda	0,67	0,02
Lembah sungai bermaterial aluvium	32,90	1,00
Total	**3.278,03**	**100,00%**

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029, 2025

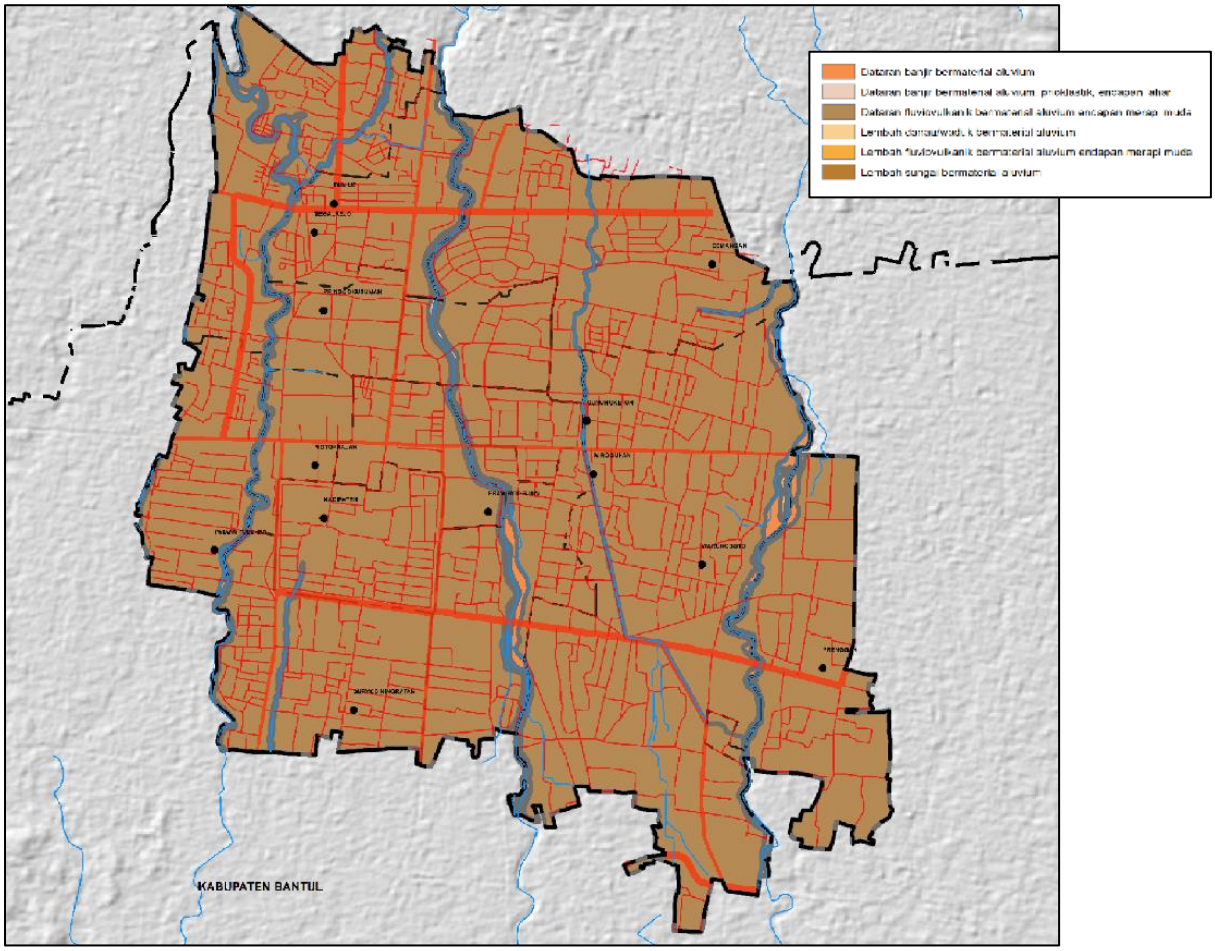

Gambar II.4 Peta Bentang Lahan Kota Yogyakarta

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029, 2024

Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium endapan merapi muda campuran merupakan bentang lahan dominan dengan luas mencapai 91% dari total wilayah. Sementara itu, berdasarkan pendetailan melalui analisis citra dan survei lapangan diketahui bahwa terdapat dataran banjir dan juga lembah. Bentang lahan berupa dataran banjir, lembah danau maupun lembah sungai merupakan bagian dari proses morfogenesa fluviovulkanik karena aliran air berupa sungai-sungai yang mengaliri Kota Yogyakarta.

2.1.1.3.2. ***Karakteristik Vegetasi Alami***

Tipe vegetasi merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam menentukan kondisi jasa lingkungan di Kota Yogyakarta. Vegetasi merupakan komponen atau aspek kedua yang menentukan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan. Komponen vegetasi dapat diartikan sebagai komunitas tumbuhan dalam lanskap yang belum dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Kota Yogyakarta secara alami memiliki tipe vegetasi berupa air tawar tergenang, vegetasi lahan kering pamah (non-dipterocarpa), vegetasi rawa air tawar pamah kerapatan sedang, vegetasi rawa air tawar pamah kerapatan tinggi, vegetasi terna rawa monsun, vegetasi terna rawa monsun kerapatan rendah, vegetasi terna rawa monsun kerapatan sedang, dan vegetasi terna rawa monsun kerapatan tinggi.

Adapun Kota Yogyakarta berada di ketinggian >100 meter sehingga tipe vegetasi yang dominan adalah vegetasi lahan kering pamah (non-dipteropcarpa) yang mencakup 96% dari total keseluruhan wilayah. Vegetasi lahan kering pamah (non-dipterocarpa) sendiri merupakan komunitas tumbuhan yang tumbuh di geomorfologi dataran, perbukitan atau pegunungan yang terletak pada ketinggian di bawah 1000 m dari muka air laut dan berstatus kering, tidak becek, tidak basah, maupun tidak tergenang oleh air. Secara rinci, distribusi tipe vegetasi di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel dan peta sebagai berikut.

Tabel -9 Tipe Vegetasi Kota Yogyakarta

Vegetasi	Luas (Ha)	Persentase
Air tawar tergenang	16,62	0,51
Vegetasi lahan kering pamah (non dipteropcarpa)	3.138,67	95,75
Vegetasi rawa air tawar pamah kerapatan sedang	1,04	0,03
Vegetasi rawa air tawar pamah kerapatan tinggi	13,86	0,42
Vegetasi terna rawa monsun	3,60	0,11
Vegetasi terna rawa monsun kerapatan rendah	58,15	1,77
Vegetasi terna rawa monsun kerapatan sedang	43,96	1,34
Vegetasi terna rawa monsun kerapatan tinggi	2,14	0,07
Total	3.278,04	100%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029, 2025

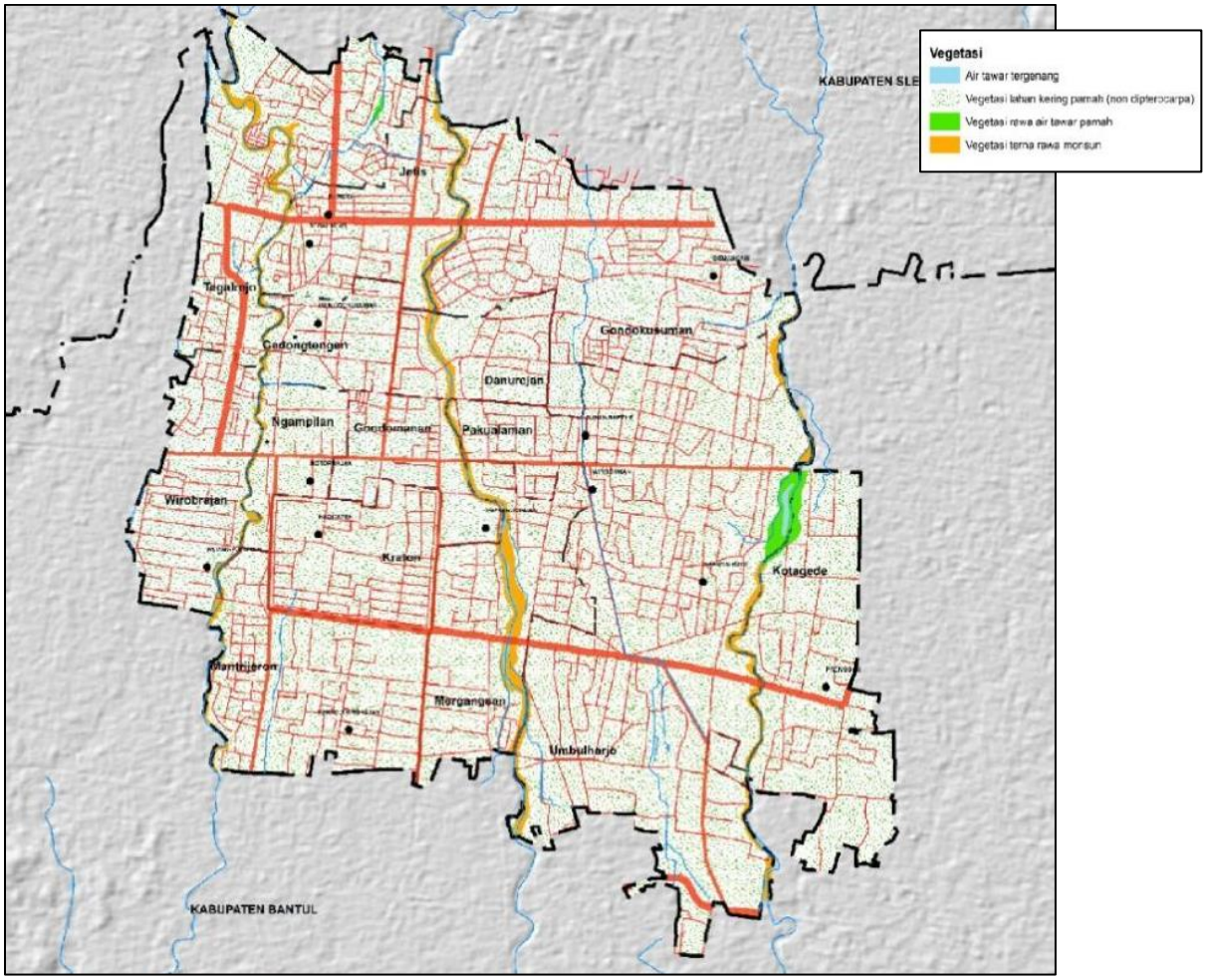

Gambar II.5 Peta Vegetasi Alami Kota Yogyakarta

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029, 2024

2.1.1.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

*2.1.1.4.1. **Daya Dukung Air***

Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian, kelestarian air harus selalu dijaga karena air sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Upaya menjaga kelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menghemat penggunaan air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya kekeringan ketika musim kemarau ataupun tanah longsor dan banjir ketika musim hujan.

Berdasarkan hasil analisis antara ketersediaan air dan kebutuhan air Kota Yogyakarta pada dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, seluruh wilayah

di Kota Yogyakarta memiliki status daya dukung air yang surplus atau ketersediaan air masih lebih banyak daripada kebutuhan air.

Surplus cadangan air yang masih tersisa dari ketersediaan air setelah dikurangi kebutuhan air Kota Yogyakarta tercatat mencapai 584,858,567.28 m^3/tahun. Hal ini disebabkan karena berbagai macam faktor, antara lain karena Kota Yogyakarta berada di wilayah yang memiliki cadangan air tanah melimpah, yaitu berada di akuifer pada Cekungan Air Tanah Yogyakarta - Sleman yang meliputi dataran fluviovulkan hingga lereng Gunung Merapi di bagian utara. Hasil analisis pada dokumen KLHS RPJMD menunjukkan bahwa 99% wilayah di Kota Yogyakarta memiliki nilai status daya dukung air yang belum melampaui, dan hanya sebesar 1% saja wilayahnya yang telah melampaui status daya dukung air tersebut.

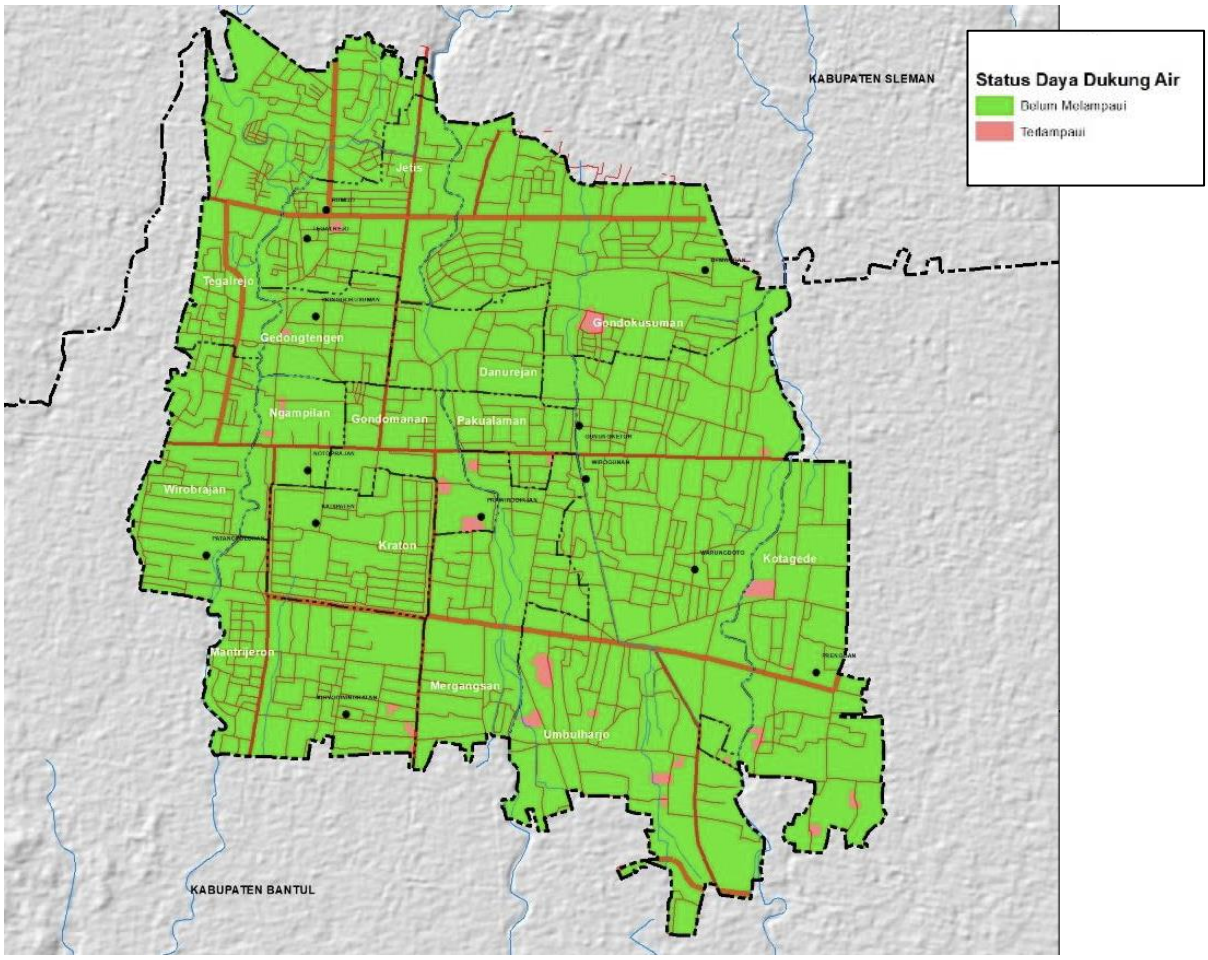

Gambar II.6 Peta Status Daya Dukung Air Kota Yogyakarta

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2039, 2025

Tabel -10 Status Daya Dukung Air Kota Yogyakarta

No.	Kemantren	Jumlah Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Ketersediaan Air (m^3/tahun)	Kebutuhan Air (m^3/tahun)	Surplus/ Defisit (m^3/tahun)	Status (Terlampaui / Belum Terlampaui)	Ambang Batas Penduduk (Jiwa)	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
1	Danurejan	18.950	17.964.616,81	3.020.390,55	14.944.226,26	Belum	16.605	35.555
2	Gedongtengen	16.674	49.636.643,62	3.092.669,62	46.543.973,99	Belum	51.716	68.390
3	Gondokusuman	37.347	92.831.679,93	15.466.292,57	77.365.387,37	Belum	85.962	123.309
4	Gondomanan	12.941	55.561.494,39	7.760.436,04	47.801.058,36	Belum	53.112	66.053
5	Jetis	23.655	47.262.985,57	4.960.127,24	42.302.858,33	Belum	47.003	70.658
6	Kotagede	34.097	29.416.349,24	17.562.249,29	11.854.099,95	Belum	13.171	47.268
7	Kraton	18.244	44.109.797,66	2.848.733,67	41.261.063,99	Belum	45.846	64.090
8	Mantrijeron	34.146	53.499.867,04	7.914.260,91	45.585.606,13	Belum	50.651	84.797
9	Mergangsan	29.071	52.123.363,05	6.075.078,35	46.048.284,69	Belum	51.165	80.236
10	Ngampilan	15.535	42.416.479,64	4.455.158,65	37.961.320,99	Belum	42.179	57.714
11	Pakualaman	9.254	46.254.446,51	2.192.378,22	44.062.068,29	Belum	48.958	58.212
12	Tegalrejo	35.018	86.328.330,21	5.690.990,69	80.637.339,52	Belum	89.597	124.615
13	Umbulharjo	68.957	48.165.098,44	30.100.518,85	18.064.579,59	Belum	20.072	89.029
14	Wirobrajan	25.024	34.394.712,75	3.968.012,92	30.426.699,83	Belum	33.807	58.831
Kota Yogyakarta		378.913	699.965.864,84	115.107.297,56	584.858.567,28	Belum	649,843	1.028.756

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

2.1.1.4.2. ***Daya Dukung Pangan***

Ketersediaan pangan merupakan jumlah bahan pangan yang tersedia di suatu daerah dalam waktu tertentu dalam bentuk natura maupun unsur gizinya dan dinyatakan dalam satuan kilo kalori per tahun (kkal/tahun). Ketersediaan pangan ditentukan berdasarkan data total produksi komoditas bahan pangan setempat yang dikonversi dalam satuan kkal per tahun.

Analisis daya dukung lahan tanaman pangan dihitung sesuai dengan pedoman Permen LH No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah nilai produksi yang didapatkan dengan mengalikan jumlah produksi per komoditas dikalikan harga komoditas.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pangan pada dokumen KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045, diketahui bahwa Kota Yogyakarta pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebesar 378.913 jiwa, sehingga kebutuhan pangannya adalah 290.436,814.500 kkal/tahun dengan asumsi kebutuhan energi sebesar 2.100 kkal/hari.

Hasil perhitungan status daya dukung pangan di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa secara keseluruhan telah terlampaui. Hasil dari neraca antara kebutuhan pangan dengan ketersediaan pangan bernilai minus atau defisit. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta belum dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan penduduknya secara mandiri, sehingga membutuhkan bahan pangan dari wilayah lain. Upaya yang dilakukan oleh Kota Yogyakarta dalam menangani hal tersebut yaitu menjaga distribusi, stabilisasi pasokan dan harga pangan, menjalin kerja sama dengan daerah penyangga di DIY maupun luar DIY, serta meningkatkan produksi pangan beragam lokal seperti kebun sayur.

Peta status daya dukung pangan diperoleh dari hasil analisis kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan berdasarkan sistem *grid.*

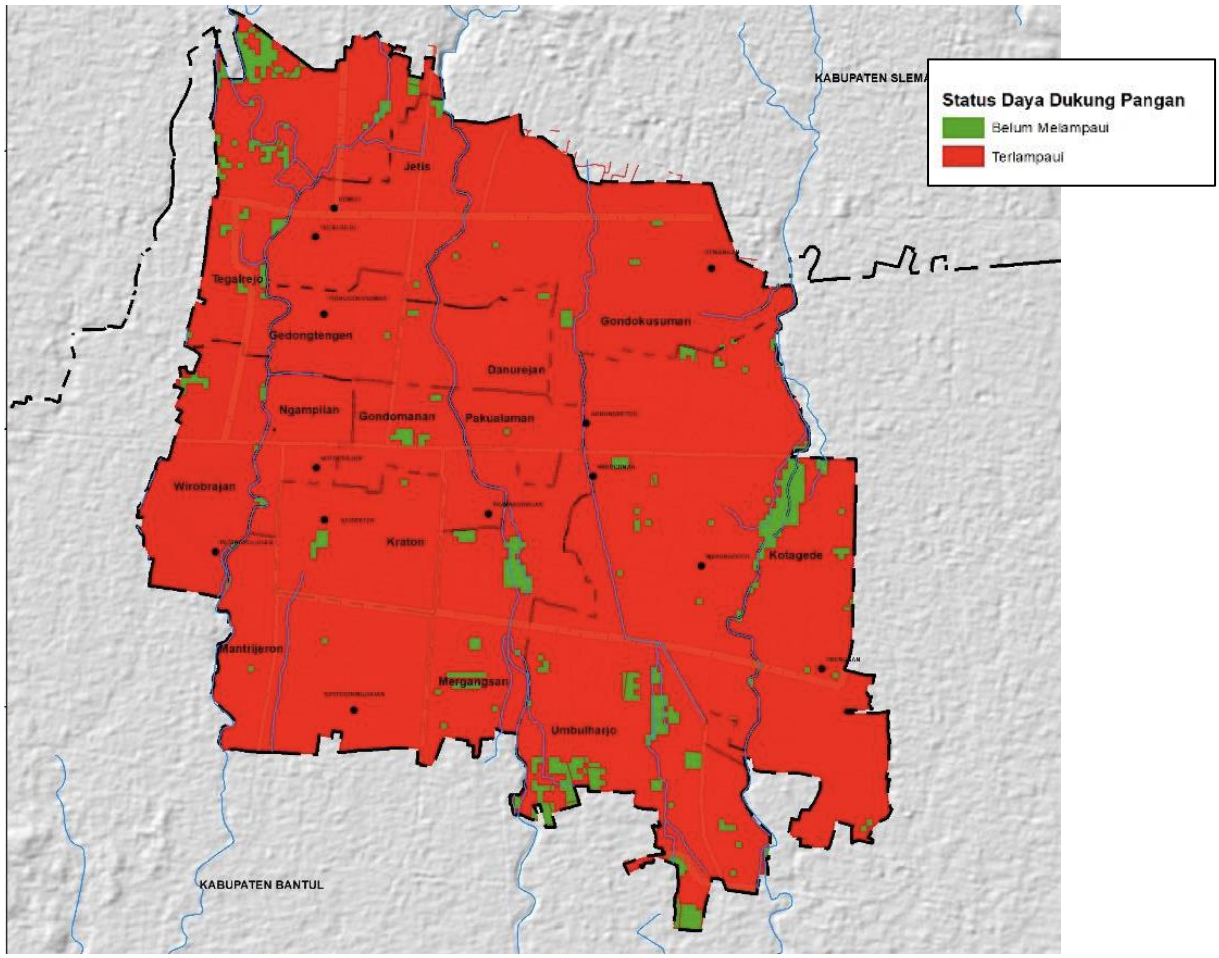

Gambar II.7 Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta

Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, 2025

Tabel -11 Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta

No.	Kemantren	Jumlah Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Ketersediaan Pangan (kkal/tahun)	Kebutuhan Pangan (kkal/tahun)	Surplus/Defisit (kkal/tahun)	Status	Ambang Batas Penduduk (Jiwa)	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
1	Mantrijeron	34.146	3.151.347.698	26,172,909,000	-23.021.561.302	Terlampaui	3.924	3.924
2	Kraton	18.244	989.608.276	13,984,026,000	-12.994.417.724	Terlampaui	1.232	1.232
3	Mergangsan	29.071	2.426.659.893	22,282,921,500	-19.856.261.607	Terlampaui	3.022	3.022
4	Umbulharjo	68.957	10.923.645.198	52,855,540,500	-41.931.895.302	Terlampaui	13.604	13.604
5	Kotagede	34.097	3.286.887.136	26,135,350,500	-22.848.463.364	Terlampaui	4.093	4.093
6	Gondokusuman	37.347	2.263.633.386	28,626,475,500	-26.362.842.114	Terlampaui	2.819	2.819
7	Danurejan	18.950	1.060.244.970	14,525,175,000	-13.464.930.030	Terlampaui	1.320	1.320
8	Pakualaman	9.254	588.080.600	7,093,191,000	-6.505.110.400	Terlampaui	732	732
9	Gondomanan	12.941	1.698.519.189	9,919,276,500	-8.220.757.311	Terlampaui	2.115	2.115
10	Ngampilan	15.535	711.093.741	11,907,577,500	-11.196.483.759	Terlampaui	886	886
11	Wirobrajan	25.024	2.124.634.073	19,180,896,000	-17.056.261.927	Terlampaui	2.646	2.646
12	Gedongtengen	16.674	488.603.800	12,780,621,000	-12.292.017.200	Terlampaui	608	608
13	Jetis	23.655	2.061.834.950	18,131,557,500	-16.069.722.550	Terlampaui	2.568	2.586
14	Tegalrejo	35.018	5.418.219.677	26,841,297,000	-21.423.077.323	Terlampaui	6.747	6.747
Kota Yogyakarta		**378.913**	**37.193.012.587**	**290.436.814.500**	**-253,243,801,913**	**Terlampaui**	**46.318**	**46.318**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, 2025

2.1.1.4.3. ***Daya Dukung Lahan***

Daya dukung lahan permukiman di Kota Yogyakarta sebagian masih berada dalam status belum terlampaui apabila dilihat dari perbandingan antara luas lahan permukiman yang tersedia dan jumlah penduduk saat ini. Namun, jika mempertimbangkan tren pertumbuhan penduduk serta tingginya angka migrasi risen, kebutuhan akan lahan pemukiman diperkirakan akan terus meningkat. Angka migrasi risen, yakni penduduk yang berpindah tempat tinggal dalam lima tahun terakhir-di DIY tercatat sebesar 4,2%, dan Kota Yogyakarta diasumsikan mengalami tren yang serupa.

Peningkatan jumlah penduduk dan migrasi mendorong permintaan lahan permukiman yang semakin tinggi, sedangkan ketersediaan lahan bersifat terbatas. Berdasarkan proyeksi kebutuhan tahun 2030, rata-rata kebutuhan lahan permukiman diperkirakan sebesar 150 m^2 per rumah tangga. Angka ini belum mencakup kebutuhan untuk sarana prasarana lingkungan. Secara nominal, luas lahan permukiman mungkin masih mencukupi, tetapi dalam praktiknya terjadi ketimpangan dalam distribusi, kualitas, dan keterjangkauannya. Tekanan permintaan ini juga berimplikasi pada meningkatnya harga tanah, perluasan kawasan terbangun, dan berkurangnya RTH, yang semuanya cenderung berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hunian.

Selain itu, kawasan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta masih cukup signifikan, yakni mencapai 57,14 hektar pada tahun 2024. Hal ini menjadi indikasi bahwa kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap hunian yang layak dan sehat, belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa daya dukung lahan permukiman di Kota Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, dinamika migrasi, dan meningkatnya daya tarik investasi di sektor hunian. Jika tidak dikelola secara berkelanjutan, hal ini dapat memicu krisis ketersediaan dan keterjangkauan permukiman, serta memperparah tekanan terhadap kualitas lingkungan kota.

Tabel -12 Analisis Daya Dukung Lahan Permukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2030

No.	Kemantren	Luas Permukiman yang bisa dikembangkan (ha)	Jumlah Penduduk (2030)	Kepadatan Netto (jiwa/ha)	Jumlah KK (Asumsi 3 org/kk) 2030	Penduduk Migrasi Risen (4,1%)	Jml Kebutuhan Rumah(ha) 1 KK =60 m2	Luas Kaveling/ Rumah Maksimal (m2)*	Status (Terlampaui<60m2), (belum terlampaui>60m2)
1	Danurejan	88,27	19.012	215	6.337	8.712	52	101	Belum
2	Gedongtengen	80,08	17.786	222	5.929	7.665	46	104	Belum
3	Gondokusuman	298,27	39.022	131	13.007	17.169	103	174	Belum
4	Gondomanan	92,06	13.532	147	4.511	5.949	36	155	Belum
5	Jetis	132,64	26.024	196	8.675	10.874	65	122	Belum
6	Kotagede	248,53	35.626	143	11.875	15.675	94	159	Belum
7	Kraton	141,72	19.322	136	6.441	8.387	50	169	Belum
8	Mantrijeron	237,38	35.678	150	11.893	15.697	94	151	Belum
9	Mergangsan	203,34	30.399	149	10.133	13.364	80	152	Belum
10	Ngampilan	70,68	16.232	230	5.411	7.142	43	99	Belum
11	Pakualaman	54,9	9.669	176	3.223	4.254	26	129	Belum
12	Tegalrejo	231,08	36.589	158	12.196	16.098	97	144	Belum
13	Umbulharjo	596,89	72.05	121	24.017	31.7	190	188	Belum
14	Wirobrajan	143,65	26.043	181	8.681	11.504	69	125	Belum
Kota Yogyakarta		**2619,49**	**396.984**	**152**	**132.328**	**174.19**	**1.045**	**150**	**Belum**

*Keterangan: * Menggunakan kaveling minimum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Angka migrasi risen ini diasumsikan memiliki sebaran merata di Kota Yogyakarta.*

Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, 2025

2.1.1.5. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

2.1.1.5.1. ***Indeks Ketahanan Pangan***

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

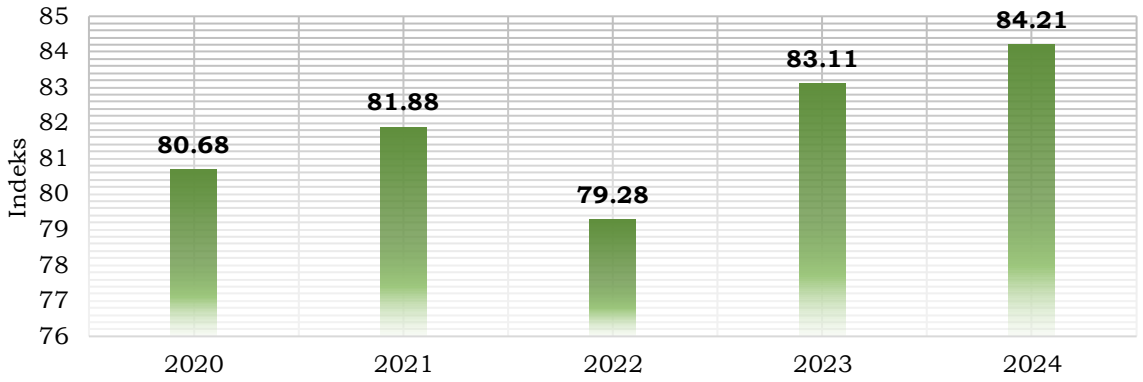

Gambar II.8 Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Lebih lanjut, Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai capaian ketahanan pangan dan gizi daerah. Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan menggunakan tiga aspek ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Semakin besar nilai Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan daerah tersebut paling tahan pangan, sebaliknya semakin kecil nilai Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan bahwa daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

2.1.1.5.2. ***Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan***

Indikator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah indikator yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur kondisi kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dapat

diartikan sebagai proporsi atau persentase penduduk di suatu wilayah yang memiliki kondisi mengonsumsi makanan dengan jumlah energi yang tidak memenuhi kebutuhan tubuh sesuai dengan standar energi minimum yang ditetapkan untuk hidup sehat dan aktif.

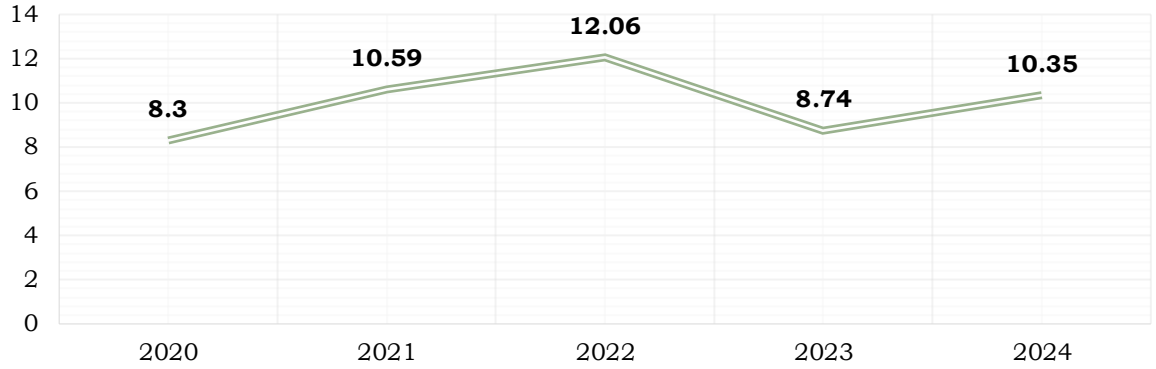

Gambar II.9 Grafik Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data tahun 2020-2024, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menunjukkan tren yang fluktuatif cenderung meningkat. Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengalami peningkatan cukup signifikan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menjadi 12,06%. Kondisi ini merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2023 kembali menunjukkan terjadinya penurunan angka prevalensi kembali menjadi 8,74% atau berkurang sebesar 27,53%. Namun, data ini kembali meningkat lagi di tahun 2024. Kondisi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan berkaitan dengan kondisi ekonomi, seperti harga pangan, pendapatan masyarakat, kondisi kemiskinan, dan sebagainya. Pada konteks Kota Yogyakarta, masalah dalam ketahanan pangan adalah adanya inflasi karena faktor *supply* dan *demand* pada pemenuhan pangan, sehingga harga pangan meningkat.

2.1.1.5.3. ***Kapasitas Air Baku***

Sistem penyediaan air minum di Kota Yogyakarta didukung oleh sumber air baku utama yang dikelola oleh PDAM Tirtamarta. Sistem penyediaan air tersebut memanfaatkan beberapa sumber air baku, yaitu Mata Air Umbul

Wadon dan Karanggayam I, Sungai Padasan, sumur dalam, dan sumur dangkal yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Total kapasitas dari air baku yang terpasang mencapai 591,43 liter/detik dan kapasitas produksi air baku mencapai 484,69 liter/detik. Sejak tahun 2021, PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta memperoleh tambahan suplai air baku sebesar 400 liter per detik dari SPAM Regional Kartamantul. Tambahan suplai air baku tersebut didapatkan dari terbitnya perjanjian kerja sama jual beli air bersih antara PDAM Tirtatama DIY dan Perumda PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta.

Tabel -13 Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi Air Baku PDAM Tirtamarta untuk Kota Yogyakarta Tahun 2020

No.	Lokasi	Kapasitas	
		Terpasang (l/detik)	Produksi (l/detik)
I	**SUNGAI**	**46,48**	**46,48**
1.	Padasan	46,48	46,48
II	**MATA AIR**	**89,88**	**77,45**
2.	Umbul Wadon	63,77	58,67
3.	Kr. Gayam I. List.	26,11	18,78
III	**GRAVITASI**	**60,50**	**40,90**
4.	Sumur Bedoyo	17,66	17,60
5.	Sumur Besi I	25,12	23,30
6.	Sumur Besi II	17,72	0,00
IV	**SUMUR DANGKAL**	**79,78**	**61,22**
7.	Sumur Candi	7,15	6,30
8.	Sumur Bulusan	4,09	0,18
9.	Sumur Jongkang	23,47	20,39
10.	Sumur Nandan List.	7,17	6,83
11.	Smr Kr. Gayam II	0,00	0,00
12.	Smr Kr. Gayam III	9,09	9,04
13.	Smr Kr. Gayam IV	4,49	4,49
14.	Sumur Kr. Wuni List	6,90	0,00
15.	Sumur Bener. 4	4,57	5,25
16.	Sumur Bener. 3	5,30	2,95
17.	Sumur Kentungan Utara	7,55	5,79
V	**SUMUR DALAM**	**294,79**	**248,50**
18.	Sumur K. 1	4,32	1,17
19.	Sumur K. 3	10,57	8,60
20.	Sumur K. 4	3,24	2,63
21.	Sumur K. 5	7,98	7,14
22.	Sumur K. 6	3,89	3,93
23.	Sumur B. 1	4,62	4,75
24.	Sumur B. 2	4,69	4,67
25.	Sumur B. 3	5,56	3,06

No.	Lokasi	Kapasitas	
		Terpasang (l/detik)	Produksi (l/detik)
26.	Sumur B. 4	10,42	11,35
27.	Sumur B. 5	3,02	2,82
28.	Sumur B. 6	9,94	7,62
29.	Sumur B. 7	3,64	2,38
30.	Sumur B. 8	6,89	6,42
31.	Sumur B. 9	5,46	4,66
32.	Sumur B. 10	14,59	13,40
33.	Sumur B. 11	6,24	4,49
34.	Sumur B. L	1,96	1,96
35.	Sumur B. 13	6,03	3,61
36.	Sumur B. R1	17,13	14,95
37.	Sumur B. R2	15,17	9,35
38.	Sumur N. 3	8,52	7,25
39.	Sumur N. 4	7,50	8,27
40.	Sumur N. 5	1,80	2,86
41.	Sumur N. 6	10,18	10,18
42.	Sumur N. 7	6,83	5,30
43.	Sumur N. 8	0,00	0,00
44.	Sumur N. 9	6,90	5,73
45.	Sumur N. 10	16,16	17,83
46.	Sumur Gemawang. 1	2,60	2,50
47.	Sumur Gemawang. 2	7,89	8,10
48.	Sumur Gemawang. 3	15,33	8,24
49.	Sumur A & G	23,50	16,27
50.	Sumur Kd. 1	5,16	5,83
51.	Sumur Kd. 2	9,74	7,86
52	Sumur Pengok. 1	13,68	11,50
53.	Sumur Pengok. 2	5,64	4,86
54.	Sumur Bener. 1	4,87	3,94
55.	Sumur Bener. 2	3,13	3,02
VI.	SPAM REGIONAL	20,00	10.14
	JUMLAH	**591,43**	**484,69**

Sumber: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum, 2021

Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Penyediaan Air Minum Kota Yogyakarta tahun 2022-2050, terdapat 55 sumber air baku yang dimanfaatkan oleh PDAM Tirtamarta untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kota Yogyakarta.

2.1.1.6. **Kualitas Lingkungan Hidup**

2.1.1.6.1. ***Indeks Kualitas Lingkungan Hidup***

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada periode waktu tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dihitung dengan menggabungkan tiga komponen indeks, meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Aspek yang mendorong kenaikan IKLH pada tahun 2024 adalah analisis hasil laboratorium parameter pemantauan kualitas air dan udara tahun 2024 yang menunjukkan kenaikan. Selain itu, terdapat kenaikan IKTL pada tahun 2024 ini terjadi karena naiknya luasan tutupan vegetasi sebanyak sekitar 5 Ha. Dari kenaikan luasan tutupan vegetasi tersebut, mampu menaikkan IKL sekitar 0,1 poin.

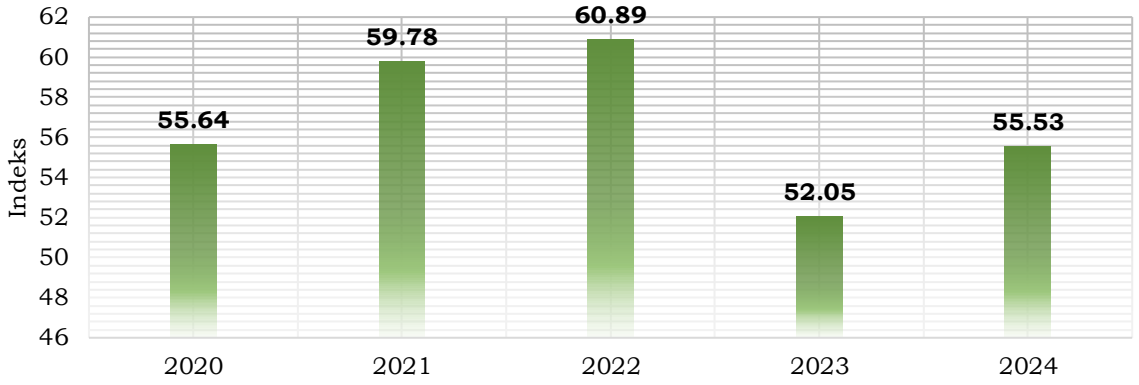

Gambar II.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025

2.1.1.6.2. ***Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman***

Sanitasi yang aman dalam rumah tangga berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dengan mencegah pencemaran air, tanah, dan udara. Pengelolaan limbah domestik yang baik, seperti sistem pembuangan limbah yang tertutup dan tidak mencemari sumber air, dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit serta menjaga ekosistem tetap sehat.

Selain itu, sanitasi yang memadai juga membantu mengurangi emisi gas berbahaya dari limbah organik yang membusuk, sehingga berkontribusi pada udara yang lebih bersih. Berikut adalah cakupan sanitasi layanan sanitasi di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel -14 Cakupan Layanan Sanitasi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Akses Layanan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Aman	%	28,02	35,05	37,75	39,74	43,67
	KK	38.757	42.928	46.727	49.532	53.967
Akses Layak Tidak Termasuk Aman	%	70,57	63,91	61,17	59,18	55,24
	KK	97.631	78.279	75.718	73.764	68.272
Akses Belum Layak	%	1,41	1,05	1,09	1,08	1,09
	KK	1.954	1.285	1.346	1.346	1.346
Tidak Ada Akses	%	0	0	0	0	0
	KK	0	0	0	0	0
Jumlah Cakupan Layanan Sanitasi	%	100	100,01	100	100	100
	KK	138.342	122.492	123.791	124.642	123.585

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, 2025

Secara umum, rumah tangga dengan cakupan akses sanitasi aman setiap tahun mengalami peningkatan, meskipun masih di bawah 50%. Peningkatan persentase untuk Akses Aman mengalami dan penurunan Akses Layak Tidak Termasuk Aman disebabkan oleh adanya pekerjaan pembangunan sambungan rumah (SPALD-T) dimana pekerjaan tersebut mengganti akses sanitasi layak dari tangki septik individual (SPALD-S) menjadi akses sanitasi aman sambungan rumah (SPALD-T) yang disalurkan ke riol kota.

2.1.1.6.3. Pengelolaan Sampah

Mengacu pada SNI 19-2454-2022, timbulan sampah dapat diartikan sebagai banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dalam satuan volume atau berat per kapita per hari atau perluas bangunan atau perpanjang jalan.

Hasil perhitungan timbulan sampah yang ditangani diperoleh dengan cara membagi volume timbulan sampah yang ditangani dengan besar total timbulan sampah. Beberapa faktor penyebab meningkatnya timbulan sampah adalah bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas daerah yang semakin berkembang. Banyaknya sampah yang tertangani akan berdampak positif pada penurunan pencemaran lingkungan.

Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari aktivitas perekonomian maupun rumah tangga di Kota Yogyakarta menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2020, jumlah timbulan sampah sebanyak 360,79 ton/hari dan di tahun 2024 jumlah ini mengalami penurunan yang pesat, yaitu sebesar 300,56 ton/hari. Hal tersebut dipengaruhi oleh upaya pemerintah kota untuk menekan jumlah sampah yang dibuang ke fasilitas pengelolaan sampah, baik melalui pengurangan produksi sampah maupun pengolahan sampah secara mandiri akibat kondisi darurat sampah yang terjadi di Kota Yogyakarta dan kabupaten lain seperti Kabupaten Sleman dan Bantul karena kapasitas TPST Piyungan yang semakin penuh. Pengurangan sampah dilakukan sejak dari sumber atau hulu yaitu dari sampah rumah tangga, yang didukung oleh adanya Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA). GZSA yakni metode pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri antara sampah organik dan sampah anorganik. GZSA meminimalkan produksi sampah anorganik dengan penyaluran ke bank sampah terdekat maupun pelapak, sedangkan produksi sampah organik rumah tangga diolah dengan biopori, losida, BSF dll.

Tabel -15 Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Potensi Timbulan Sampah	ton/hari	360,79	327,4	303,13	300,56	300,56
2	Penanganan (Terangkut ke TPA)	ton/hari	262,32	255,34	258,49	244,15	97,21
		%	72,71	85,44	85,86	81,23	32,34
3	Pengurangan melalui TPS 3R	ton/hari	94,06	40,46	38,84	110,45	150,38

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
		%	26,07	13,54	12,9	36,75	50,03
4	Sampah Sudah Terkelola	ton/hari	356,38	295,8	297,33	354,6	247,59
		%	98,78	90,35	98,09	117,98	82,38
5	Sampah Belum Terkelola	ton/hari	4,41	31,6	5,8	54,04	52,97
		%	1,22	9,65	1,91	17,98	17,62

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025, diolah

Pada Tahun 2024, terdapat 3 fasilitas pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta, yaitu UPS Nitikan, UPS Kranon, dan UPS Karangmiri. Selain itu Kota Yogyakarta mempunyai Bank Sampah dengan jumlah 694 bank sampah dengan jumlah sampah yang dapat dikelola rata-rata 3,68 ton/hari. Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah dengan pembangunan UPS. Namun, salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunannya adalah ketersediaan lahan yang terbatas. Saat ini, lahan yang tersedia hanya di sisi selatan sehingga untuk pembangunan UPS di sisi utara memerlukan kerja sama lebih lanjut, khususnya terkait dengan penyediaan lahan.

Tabel -16 Kategori Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2024

No.	Kategori Bank Sampah	Jumlah
1	Pembina	18
2	Inovatif	32
3	Reguler	458
4	Pembinaan	181
5	Bank Sampah Baru	5
Jumlah		**694**

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota YK 2024, 2025

Pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah/lokasi pembuangan sementara (TPS)/depo dengan total jumlah depo yang ada di Kota

Yogyakarta sebanyak 13 depo, dengan rincian daya tampung sebagai berikut:

Tabel -17 Daya Tampung Depo/Sumber Lainnya Kota Yogyakarta

No.	Depo/ Sumber Lainnya	Kapasitas Depo/ TPS (ton)
1	Mandala Krida	150
2	THR	100
3	Pengok	100
4	Lapangan Karang	100
5	Pringgokusuman	150
6	RRI	100
7	Argolubang	70
8	Ngasem	50
9	Utoroloyo	50
10	Serangan	50
11	Dukuh	30
12	Kebun Raya	50
13	Sorosutan	50
Total		**1.050**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data yang ada, sebanyak 17,62% (52,97 ton/hari) sampah yang belum terkelola dari keseluruhan timbulan sampah pada tahun 2024. Mengacu pada hasil survei EHRA tahun 2018, sebagian masyarakat masih melakukan pembuangan secara sembarangan baik di sungai maupun tempat terbuka dan melakukan pembakaran.

2.1.1.7. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.7.1. ***Indeks Risiko Bencana***

Kota Yogyakarta memiliki potensi terhadap kejadian bencana, antara lain bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan penyebaran wabah penyakit setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 2020-2024, tercatat bahwa jenis kejadian bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrem.

Untuk mengukur tingkat risiko bencana berdasarkan riwayat kebencanaan yang telah terjadi serta menimbulkan kerugian maka digunakan Indeks Risiko Bencana (IRB). Dalam penghitungannya, IRB terdiri dari komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, nilai IRB akan berubah apabila tiga komponen tersebut mengalami peningkatan atau penurunan sebagai akibat dari program/kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan ataupun meningkatkan kapasitas. IRB selama ini dapat digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi terhadap keberhasilan program pencegahan ataupun penanggulangan bencana.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta 2022 – 2026 terdapat 7 jenis potensi ancaman yang ada di Kota Yogyakarta meliputi banjir, wabah penyakit, cuaca ekstrem, gempa bumi, kegagalan teknologi, kekeringan meteorologi dan letusan gunung api dengan gambaran risiko sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta memiliki potensi risiko bencana banjir yang tinggi. Banjir tersebut terjadi karena sungai tidak mampu menampung volume air yang melimpah sehingga terjadi limpasan air. Risiko banjir yang tinggi juga dipicu oleh aktivitas manusia seperti rusaknya bangunan pengendali banjir, sampah yang menyumbat aliran air, penebangan vegetasi di bantaran sungai, serta permukiman padat penduduk di sepanjang aliran sungai. Sementara itu, secara alamiah banjir juga dapat disebabkan karena erosi di bagian hulu, sedimentasi, dan curah hujan yang tinggi.
2. Potensi risiko bencana wabah penyakit berada pada tingkat risiko sedang.
3. Kota Yogyakarta memiliki potensi cuaca ekstrem yang termasuk ke dalam tingkat risiko sedang. Hal tersebut tidak lepas dari tingginya kelas kapasitas sehingga mampu mengimbangi kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi.
4. Kota Yogyakarta berada pada daerah rawan bencana gempa bumi, namun potensi risiko bencana gempa bumi berada pada kategori

sedang. Hal tersebut karena kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi diimbangi dengan kelas kapasitas yang tinggi pula sehingga dapat menekan risiko bencana yang muncul.

5. Kekeringan meteorologi berpotensi menyebabkan krisis air yang akan berdampak bagi kehidupan seluruh makhluk hidup dan memberikan kerugian yang besar dalam berbagai sektor. Tingkat risiko bencana kekeringan meteorologi di Kota Yogyakarta berstatus sedang. Bencana tersebut umumnya terjadi karena musim kemarau dan penggunaan air tanah dangkal yang berlebihan.
6. Potensi risiko letusan gunung api di Kota Yogyakarta berada pada tingkat risiko rendah. Dampak letusan gunung api di Kota Yogyakarta adalah banjir lahar dingin dengan aliran ke arah sungai yang disebabkan letusan Gunung Merapi.
7. Potensi risiko bencana kegagalan teknologi di Kota Yogyakarta termasuk ke dalam level risiko sedang. Kegagalan teknologi merupakan seluruh kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.

Meskipun secara keseluruhan terdapat 7 jenis potensi ancaman bencana di Kota Yogyakarta, terdapat 2 jenis potensi ancaman yaitu ancaman kegagalan teknologi dan letusan gunung api yang tidak dimiliki seluruh kemantren dari 14 kemantren di Kota Yogyakarta berdasarkan kajian risiko bencana per bencana dan per kemantren. Berbeda dengan 5 jenis ancaman bencana lainnya yang dimiliki oleh seluruh kemantren di Kota Yogyakarta.

PETA RISIKO BANJIR KOTA YOGYAKARTA

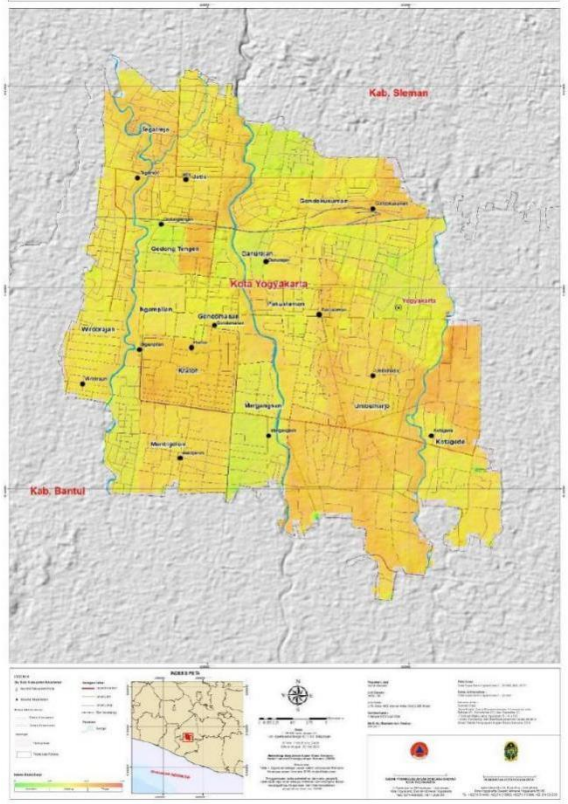

PETA RISIKO WABAH KOTA YOGYAKARTA

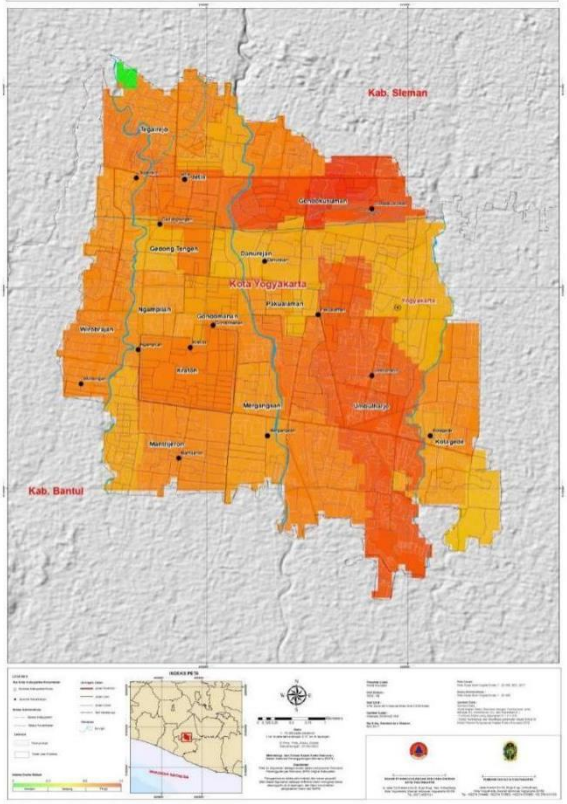

PETA RISIKO GEMPABUMI KOTA YOGYAKARTA

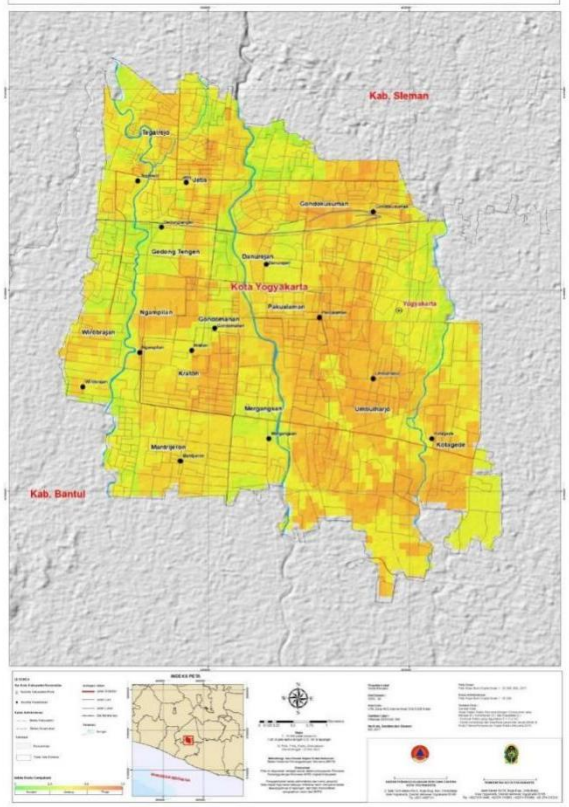

PETA RISIKO KEKERINGAN KOTA YOGYAKARTA

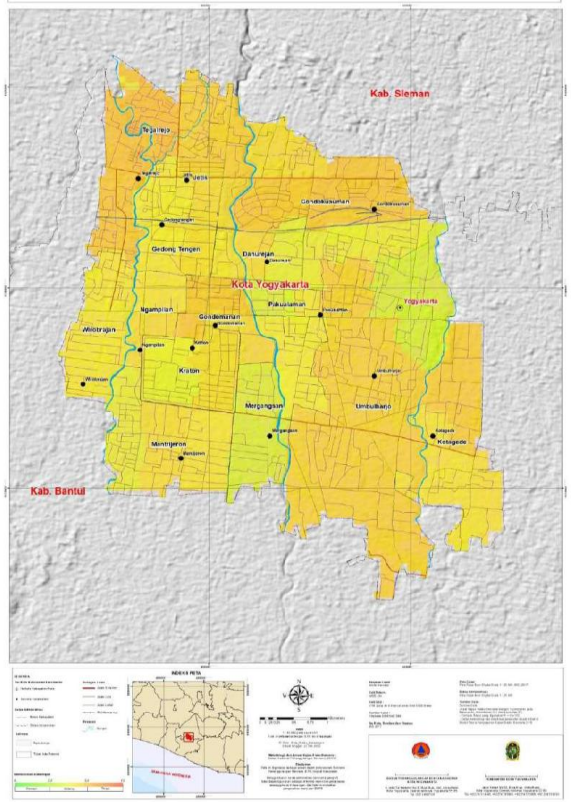

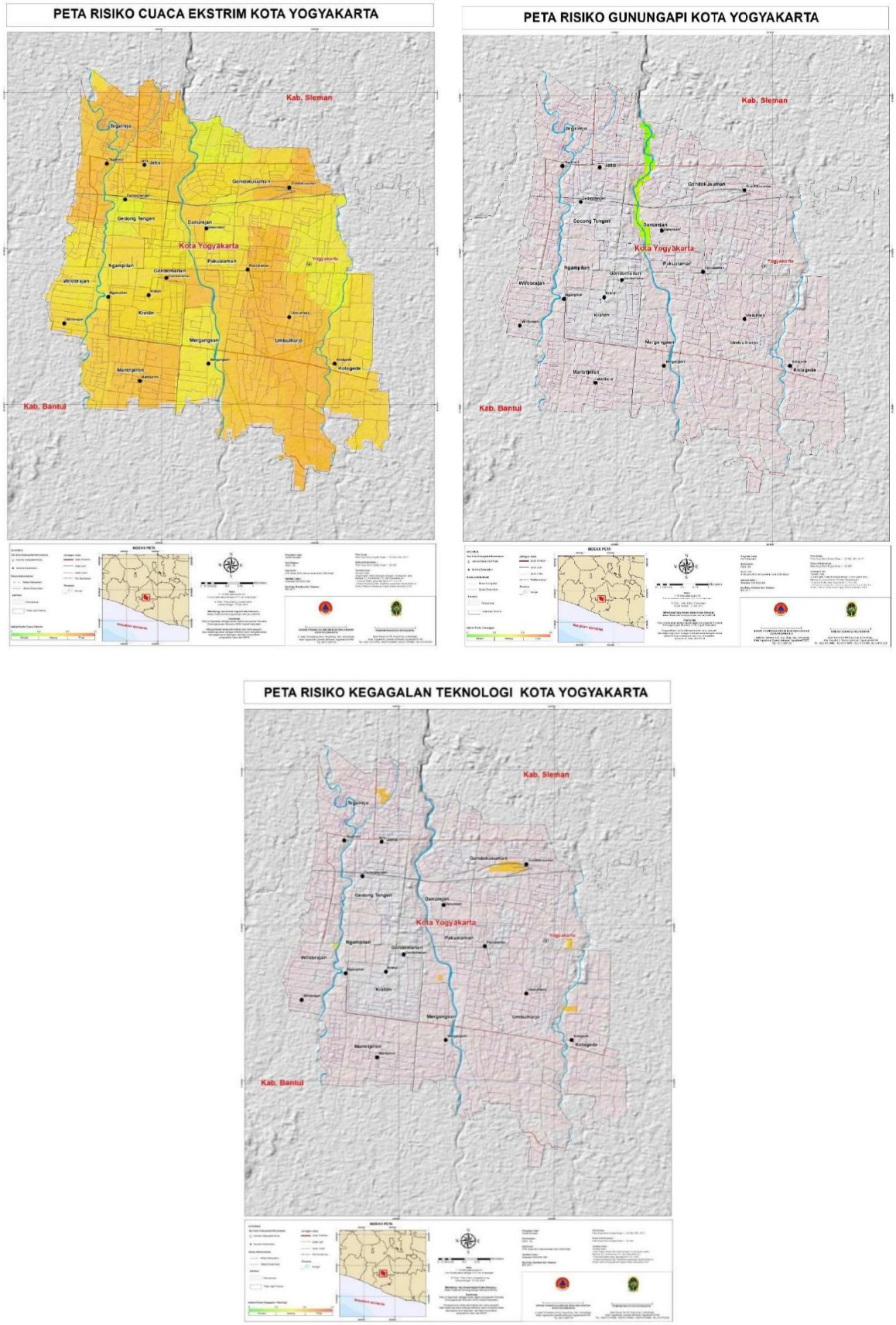

Gambar II.10 Peta Risiko Untuk Setiap Jenis Bencana

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2022-2026, 2025

Analisis risiko bencana untuk multi bahaya di Kota Yogyakarta berada pada tingkat sedang. Meskipun kelas bahaya dan kerentanan berada pada level kelas tinggi, namun kelas kapasitas juga termasuk ke dalam kelas tinggi. Sehingga sesuai dengan rumus risiko bencana, hasil perhitungan tingkat risiko bencana menjadi dapat ditekan.

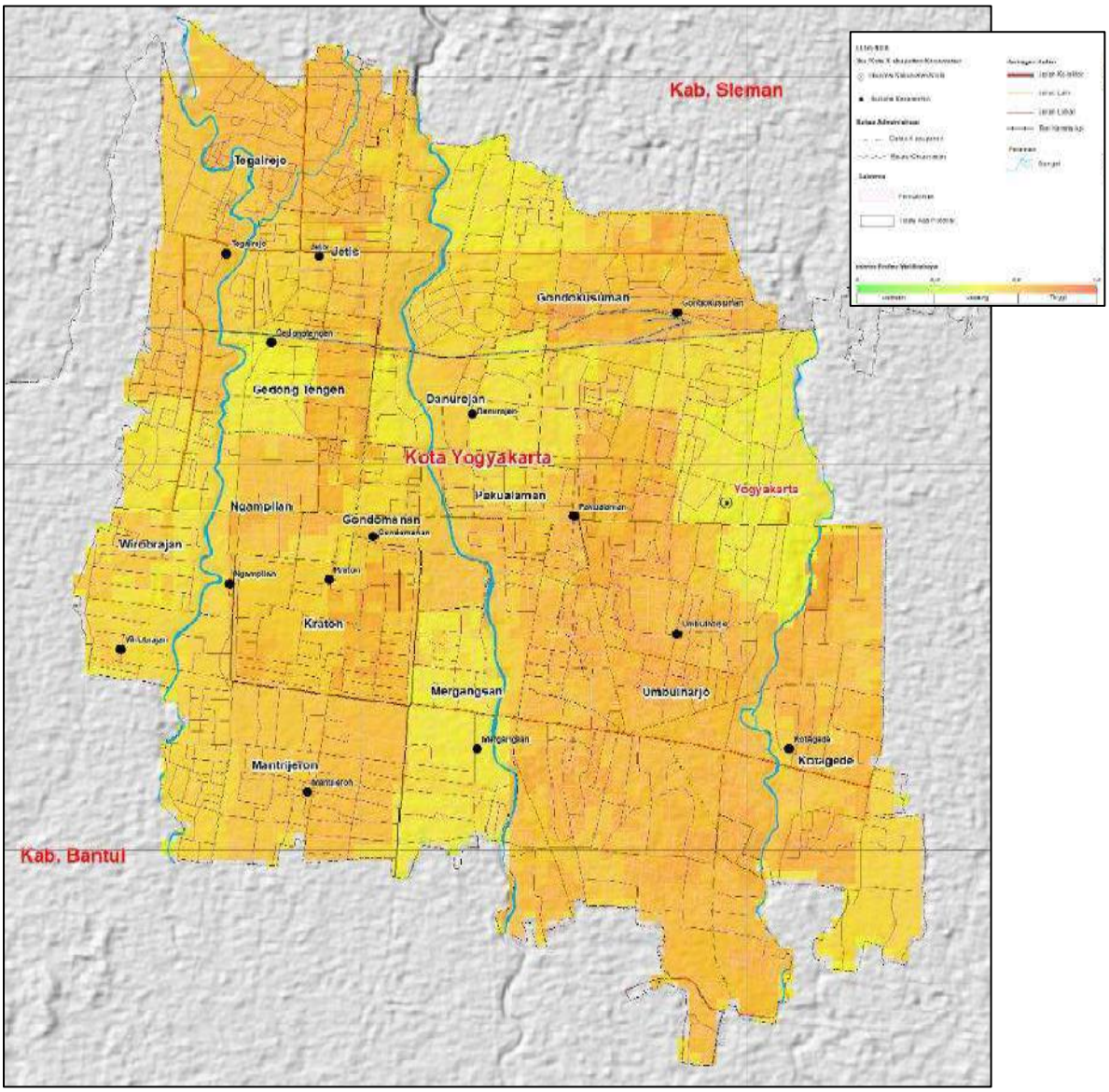

Gambar II.11 Peta Risiko Multi Bahaya Kota Yogyakarta

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2022-2026, 2025

Data IRB Kota Yogyakarta menunjukkan kecenderungan penurunan selama lima tahun terakhir. Rata-rata penurunan nilai IRB adalah sebesar -3,11% per tahun. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana di Kota Yogyakarta sudah berjalan secara baik dan perlu

untuk terus dijaga konsistensinya, terutama yang berkaitan dengan kapasitas pemerintah.

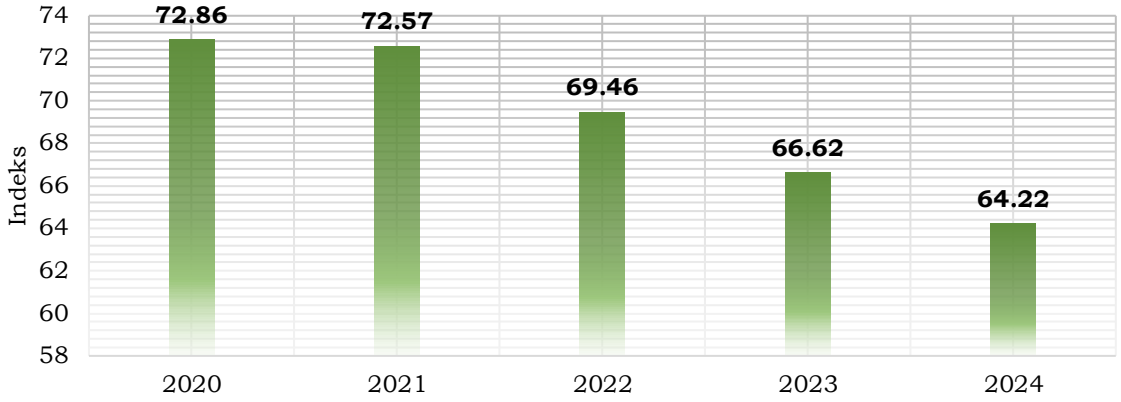

Gambar II.12 Indeks Risiko Bencana di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

2.1.1.7.2. ***Indeks Ketahanan Daerah***

Indeks Ketahanan Daerah adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam menghadapi bencana ataupun situasi darurat. Indeks Ketahanan Daerah dihitung dengan beberapa tolak ukur, meliputi (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, pada tahun 2022 hingga 2024, besar capaian Indeks Ketahanan Daerah Kota Yogyakarta berturut-turut adalah 0,65; 0,68; dan 0,69. Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Daerah bermakna bahwa semakin baik pula upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan daerah adalah melalui penyusunan peta kawasan rawan bencana. Dengan adanya informasi lokasi rawan bencana, akan memberikan manfaat positif untuk meningkatkan

kesadaran dan kewaspadaan dini masyarakat khususnya di wilayah rawan bencana. Secara rinci, capaian Indeks Ketahanan Daerah di tahun 2024 untuk setiap indikator ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel -18 Indeks Ketahanan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

No.	Indikator	Tahun 2024
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,93
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,77
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,70
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,68
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,68
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,45
Indeks Ketahanan Daerah		**0,69**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, 2025

2.1.1.8. **Demografi**

Aspek demografi merupakan bagian penting dari pengkajian terkait populasi penduduk yang mencakup berbagai elemen yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami karakteristik dari populasi penduduk di suatu wilayah.

Aspek demografi mencakup berbagai faktor yang berpengaruh terhadap struktur dan komposisi penduduk sehingga dapat memberikan gambaran pengetahuan yang digunakan sebagai acuan pertimbangan dalam pembangunan wilayah di masa yang akan datang. Aspek demografi dalam pembahasannya akan dijabarkan ke dalam beberapa poin pokok meliputi jumlah, laju pertumbuhan, komposisi berdasarkan kategori tertentu, kepadatan, dan proyeksi penduduk.

2.1.1.8.1. ***Jumlah Penduduk***

Jumlah penduduk mengacu pada total individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Jumlah penduduk adalah salah satu elemen dari aspek demografi yang penting dan memberikan gambaran

tentang ukuran populasi suatu wilayah. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2025) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2024 yaitu sebanyak 415.605 jiwa yang tersebar di 14 kemantren.

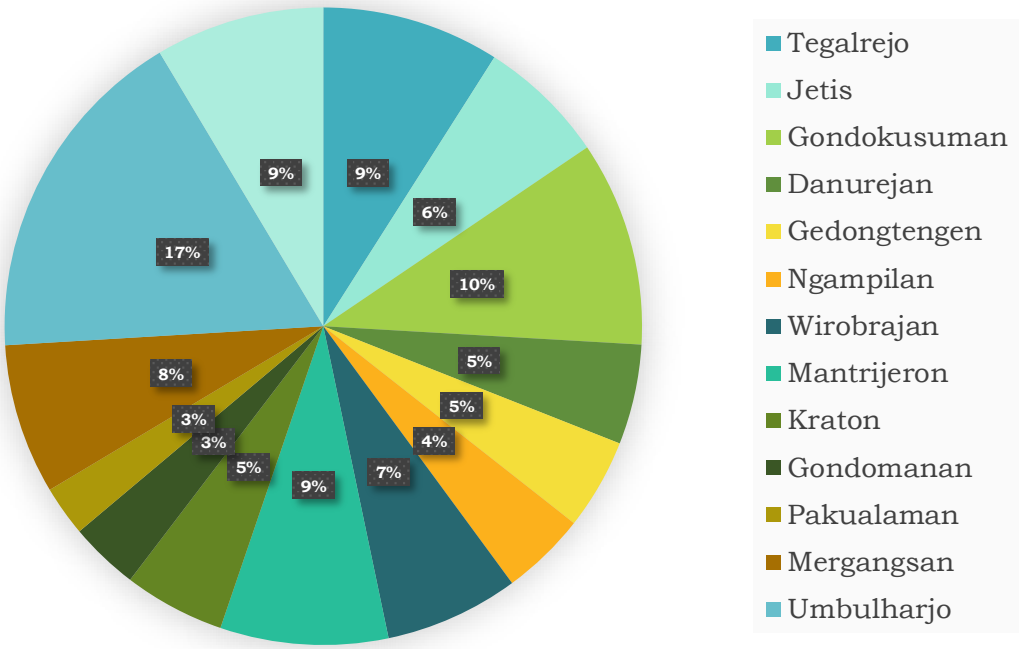

Gambar II.13 Distribusi Persentase Penduduk Per Kemantren Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2024; Hasil Olahan, 2025

Sebaran jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kemantren Umbulharjo sebanyak 72.203 jiwa atau 17%, sedangkan jumlah paling sedikit terdapat di wilayah Kemantren Pakualaman sebanyak 10.592 jiwa atau 3% dari keseluruhan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta.

Tabel -19 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2020-2024

No.	Kemantren	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tegalrejo	37.375	37.391	37.198	37.437	37.486
2.	Jetis	27.381	27.286	26.976	27.088	27.016
3.	Gondokusuman	43.141	43.179	42.752	43.051	43.214
4.	Danurejan	21.390	21.383	21.109	21.153	21.093
5.	Gedongtengen	19.886	19.683	19.260	19.213	19.141

No.	Kemantren	2020	2021	2022	2023	2024
6.	Ngampilan	18.483	18.285	18.075	18.071	17.925
7.	Wirobrajan	28.084	27.957	27.863	28.106	28.271
8.	Mantrijeron	35.633	35.469	35.188	35.222	35.398
9.	Kraton	21.905	21.755	21.510	21.460	21.325
10.	Gondomanan	14.990	14.869	14.725	14.702	14.590
11.	Pakualaman	10.731	10.657	10.549	10.622	10.592
12.	Mergangsan	32.013	31.875	31.584	31.665	31.697
13.	Umbulharjo	70.538	71.012	70.937	71.558	72.203
14.	Kotagede	34.567	34.708	35.071	35.357	35.654
Kota Yogyakarta		416.117	415.509	412.797	414.705	415.605

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025

Adanya dinamika jumlah penduduk dipengaruhi faktor mutasi penduduk, baik migrasi masuk, migrasi keluar, kelahiran, dan kematian. Pada tahun 2024, peningkatan jumlah penduduk disebabkan adanya penurunan pada seluruh aspek tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel -20 Dinamika Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024

No.	Dinamika Pertumbuhan Penduduk	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Lahir	7624	3658	3364	3275
2.	Mati	9097	3733	3341	3065
3.	Datang	17309	9834	7892	7296
4.	Pergi	19594	10968	7543	7446

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

2.1.1.8.2. ***Laju Pertumbuhan Penduduk***

Pertumbuhan penduduk mengacu pada perubahan jumlah total penduduk di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk di masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kebutuhan dasar penduduk.

Tren pertumbuhan penduduk yang menunjukkan kondisi penurunan yang berarti jumlah penduduk Kota Yogyakarta relatif mengalami pertumbuhan yang lambat. Penurunan jumlah penduduk dapat disebabkan kematian ataupun migrasi ke luar serta validasi data sensus penduduk seperti yang telah dijelaskan pada tabel II.18 tentang Dinamika Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.

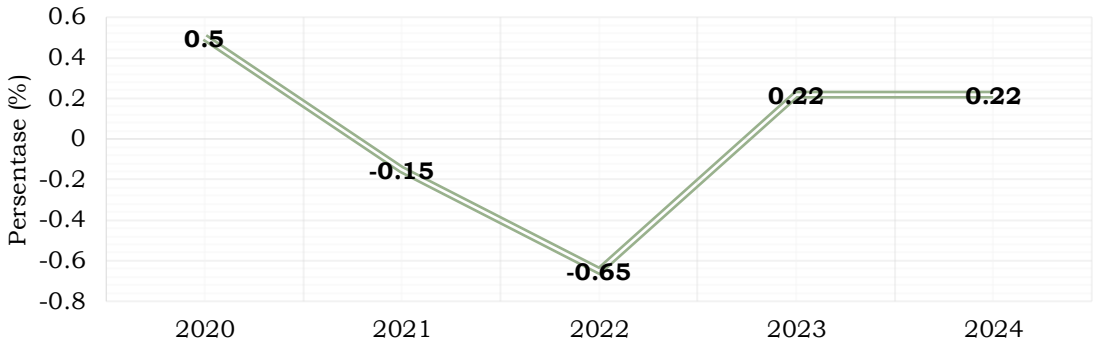

Gambar II.14 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025

2.1.1.8.3. ***Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin***

Sex ratio mengacu pada perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi penduduk. *Sex ratio* dinyatakan dalam bentuk perbandingan jumlah laki-laki per 100 perempuan. Angka perbandingan ini digunakan untuk menilai keseimbangan gender dalam suatu populasi penduduk dan dapat memberikan pengetahuan tentang dinamika demografi, kesehatan, dan sosial ekonomi.

Tabel -21 *Sex Ratio* Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1.	2020	203.072	213.045	416.117	95,32
2.	2021	202.575	212.934	415.509	95.14
3.	2022	201.198	211.599	412.797	95,08
4.	2023	202.062	212.643	414.705	95,02
5.	2024	202.478	213.127	415.605	95,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

Pada tahun 2020-2024, *sex ratio* menunjukkan angka 95 koma sekian yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki. Adanya penurunan pada jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, dapat dipengaruhi karena faktor kematian dan migrasi ke luar.

2.1.1.8.4. ***Komposisi Penduduk berdasarkan Umur***

Komposisi penduduk menurut kelompok umur mengacu pada distribusi jumlah penduduk dalam suatu populasi berdasarkan kelompok umur yang berbeda. Komposisi atau struktur penduduk menurut kelompok umur disajikan dalam bentuk piramida penduduk yang menunjukkan proporsi relatif dari setiap kelompok umur dalam suatu populasi di wilayah tertentu. Struktur penduduk menurut kelompok umur dapat memberikan informasi penting tentang komposisi demografis suatu populasi dan memberikan pengetahuan tentang berbagai aspek pembangunan.

Berdasarkan data tahun 2024 menunjukkan bahwa struktur piramida penduduk di Kota Yogyakarta berbentuk piramida stasioner dengan gambaran piramida seperti granat. Piramida ini merepresentasikan jumlah penduduk usia muda, dewasa, dan seimbang. Pertumbuhan penduduk juga cenderung stabil, angka kelahiran hampir seimbang dengan angka kematian. Piramida stasioner mengindikasikan adanya jumlah usia produktif yang lebih mendominasi pada populasi penduduk Kota Yogyakarta tahun 2024.

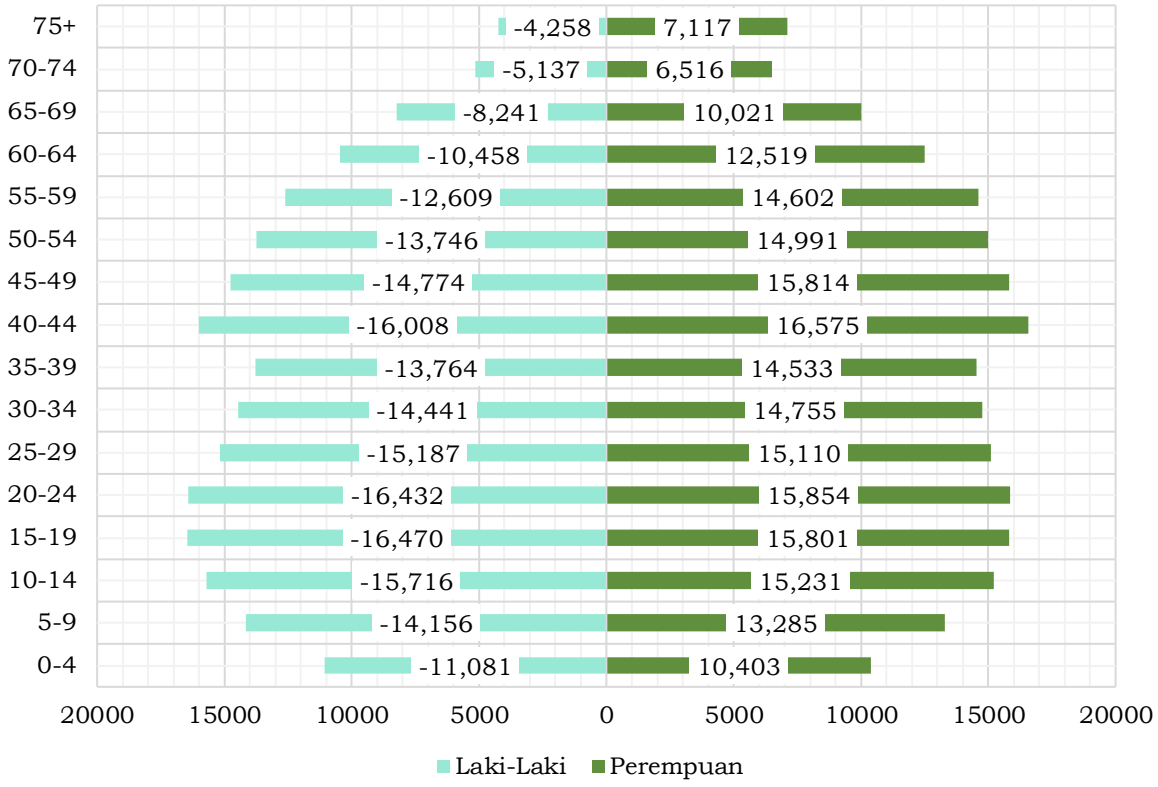

Gambar II.15 Struktur Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025

2.1.1.8.5. ***Komposisi Penduduk berdasarkan Agama***

Mayoritas penduduk Kota Yogyakarta merupakan pemeluk agama Islam. Tercatat bahwa pada tahun 2020-2024 jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang beragama Islam mencapai lebih dari 80% dari total populasi setiap tahunnya. Selain itu, agama Katolik dan Kristen menjadi dua agama yang cukup banyak dianut oleh penduduk Kota Yogyakarta. Namun demikian, secara umum hampir seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia juga tercatat dianut oleh sebagian penduduk Kota Yogyakarta, seperti Budha, Hindu, Konghucu, serta aliran kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Adanya keberagaman agama menunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta bersifat majemuk sehingga toleransi agama sangat diperlukan untuk mempertahankan kerukunan di dalam lingkungan masyarakat.

Tabel -22 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kota Yogyakarta 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Islam	Jiwa	344.817	346.556	346.532	344.998	348.102
2.	Kristen	Jiwa	26.180	26.407	26.184	25.779	25.807
3.	Katolik	Jiwa	41.299	41.410	41.088	40.358	40.085
4.	Budha	Jiwa	1.222	1.212	1.171	1.139	1.076
5.	Hindu	Jiwa	478	472	478	467	481
6.	Konghucu	Jiwa	26	27	26	26	25
7.	Kepercayaan Thd. Tuhan YME	Jiwa	33	33	30	30	29

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

2.1.1.8.6. ***Kepadatan Penduduk***

Kepadatan penduduk mengacu pada jumlah rata-rata penduduk yang tinggal dalam suatu luas wilayah tertentu. Kepadatan penduduk menjadi salah satu analisis kependudukan yang penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui seberapa padat atau jarang penduduk yang mendiami suatu wilayah. Informasi ini dapat menjadi masukan dan pengetahuan dalam pembangunan wilayah. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah total penduduk suatu wilayah dengan luas wilayah tersebut atau dengan kata lain menggunakan perhitungan kepadatan penduduk aritmatik.

Kota Yogyakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cenderung fluktuatif selama kurun waktu 5 tahun terakhir sesuai dengan dinamika perkembangan jumlah penduduk yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta tercatat 12.671 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk pada tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2023, tetapi apabila dibandingkan kembali dengan data kepadatan penduduk pada tahun 2020 maka teridentifikasi adanya penurunan.

Ditinjau dari sebaran kepadatan per wilayah kemantren, kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2024 terdapat di Kemantren Ngampilan, yaitu sebesar 21.088 jiwa/km². Sedangkan, wilayah dengan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kemantren Umbulharjo, yaitu sebesar 8.657 jiwa/km².

Adanya peningkatan dan penurunan kepadatan penduduk berkaitan dengan dinamika penduduk baik alami yaitu kelahiran dan kematian maupun migrasi masuk dan ke luar. Peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan kepadatan penduduk, begitu juga sebaliknya, sebab luas wilayah bersifat tetap dan tidak berubah.

Tabel -23 Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Kemantren	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tegalrejo	jiwa/km²	12.844	12.718	12.652	12.734	12.750
2.	Jetis	jiwa/km²	16.106	15.682	15.503	15.568	15.526
3.	Gondokusuman	jiwa/km²	10.812	10.876	10.769	10.844	10.885
4.	Danurejan	jiwa/km²	19.445	19.264	19.017	19.057	19.003
5.	Gedongtengen	jiwa/km²	20.715	19.882	19.455	19.407	19.334
6.	Ngampilan	jiwa/km²	22.540	21.512	21.265	21.260	21.088
7.	Wirobrajan	jiwa/km²	15.957	15.975	15.922	16.061	16.155
8.	Mantrijeron	jiwa/km²	13.652	13.235	13.130	13.143	13.208
9.	Kraton	jiwa/km²	15.646	15.764	15.587	15.551	15.453
10.	Gondomanan	jiwa/km²	13.384	12.930	12.804	12.784	12.687
11.	Pakualaman	jiwa/km²	17.033	16.652	16.483	16.597	16.550
12.	Mergangsan	jiwa/km²	13.858	13.919	13.792	13.828	13.841
13.	Umbulharjo	jiwa/km²	8.687	8.515	8.506	8.580	8.657
14.	Kotagede	jiwa/km²	11.260	11.686	11.808	11.905	12.005
Kota Yogyakarta		**jiwa/km²**	**12.804**	**12.668**	**12.578**	**12.643**	**12.671**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

2.1.1.8.7. ***Proyeksi Penduduk***

Proyeksi penduduk dihitung dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik untuk tahun proyeksi 2020-2035. Adapun proyeksi penduduk pada periode tahun 2040-2045 diperoleh dari metode perhitungan yang mempertimbangkan tren

pertumbuhan dengan model perhitungan pertumbuhan penduduk geometris. Perhitungan proyeksi penduduk dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator kependudukan utama, yaitu terkait dengan fertilitas dan mortalitas. Data yang dijadikan *baseline* adalah data jumlah penduduk pada tahun 2020.

Proyeksi penduduk pada periode tahun 2025–2029 diperoleh dari metode perhitungan yang mempertimbangkan tren pertumbuhan dengan model perhitungan pertumbuhan penduduk geometris. Perhitungan proyeksi penduduk mengacu pada proyeksi lima tahunan dalam dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Yogyakarta Tahun 2023. Dalam dokumen tersebut diproyeksikan jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2025 adalah sebesar 375.770 jiwa dan pada tahun 2030 sebesar 373.970 jiwa.

Menggunakan model perhitungan pertumbuhan penduduk geometris, diproyeksikan bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta mengalami tren penurunan jumlah penduduk dengan laju penurunan rata-rata sebesar −0,1% per tahun. Rincian proyeksi penduduk Kota Yogyakarta pada setiap tahunnya selama periode tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

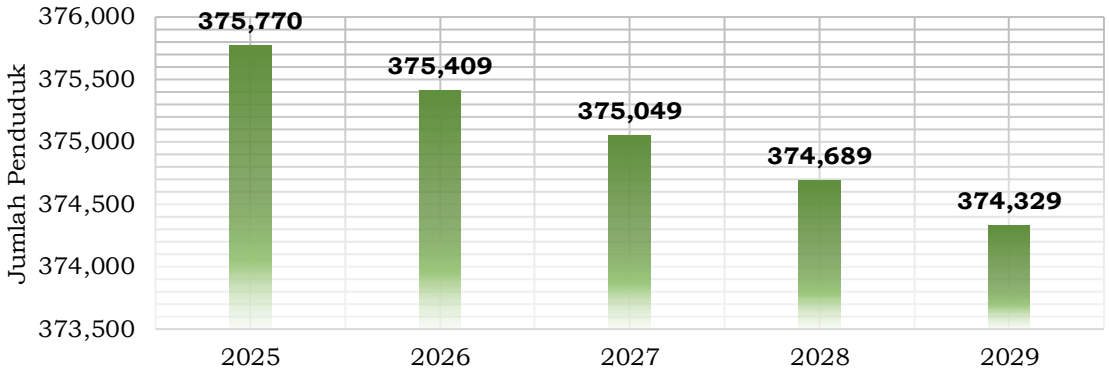

Gambar II.16 Proyeksi Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2023; Hasil Olahan, 2025

Penurunan laju pertumbuhan penduduk juga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk lanjut usia sehingga ke depannya diproyeksikan akan terjadi peningkatan beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif.

Tabel -24 Proyeksi Beban Ketergantungan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Usia

Kelompok Usia	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-14	19,45	18,34	17,71	17,49	16,88	16,3

Kelompok Usia	2020	2025	2030	2035	2040	2045
15-64	71,27	70,15	68,29	66,39	64,84	63,32
65+	9,28	11,51	14	16,12	18,28	20,38
Dependency Ratio	**40,31**	**42,55**	**46,43**	**50,62**	**54,23**	**57,29**

Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045, 2024

2.1.2. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

2.1.2.1. **Kesejahteraan Ekonomi**

2.1.2.1.1. ***Laju Pertumbuhan Ekonomi***

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makroekonomi yang diukur berdasarkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020–2024, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta secara umum menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, namun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pada tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi ekonomi yang signifikan sehingga mengakibatkan kondisi khusus. Kota Yogyakarta sendiri mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,42%. Sementara itu, DIY dan nasional secara berturut-turut mengalami perlambatan ekonomi sebesar -2,69%, dan -2,07%. Pada tahun berikutnya, pemulihan ekonomi berjalan cukup cepat. Kota Yogyakarta mencatat lonjakan pertumbuhan sebesar 5,16% pada 2021, melampaui nasional yang hanya 3,7%, meskipun masih sedikit di bawah DIY (5,58%). Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta, DIY dan nasional pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

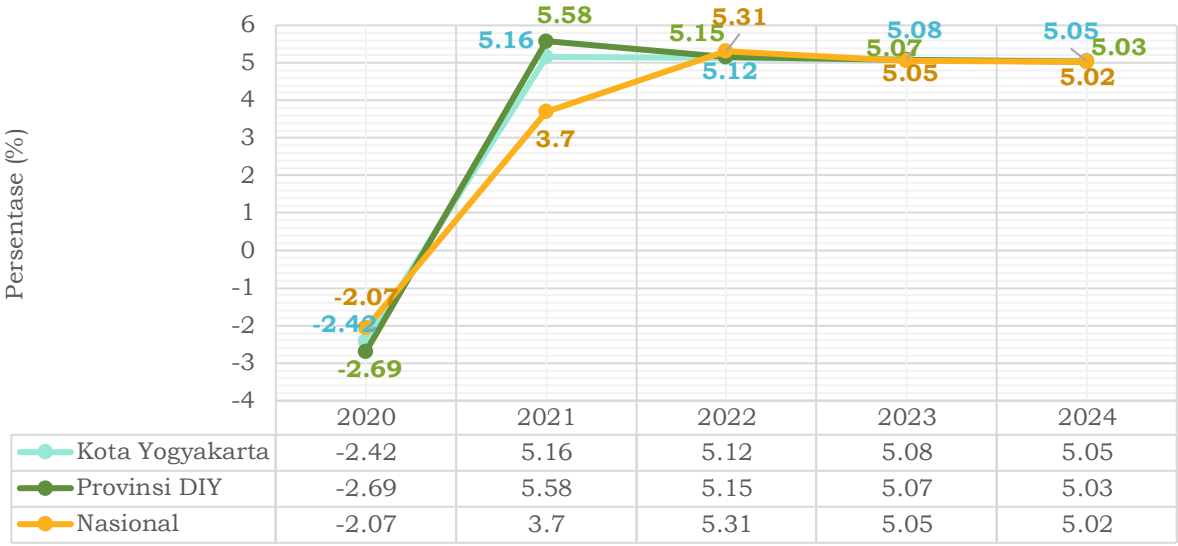

Gambar II.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (Nasional, Provinsi, Kota Yogyakarta), 2025

Jika dicermati dari sisi sektoral, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta terutama ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, serta industri pengolahan. Mayoritas sektor ekonomi di Kota Yogyakarta sendiri menunjukkan pertumbuhan positif setelah tahun 2020, mencerminkan pemulihan struktural meskipun laju pertumbuhan tahunan cenderung menurun dibanding fase rebound awal (2020–2021).

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta dalam lima tahun terakhir mencerminkan proses pemulihan yang berlangsung secara bertahap dan stabil. Hal ini menjadi dasar yang baik bagi perencanaan pembangunan ekonomi ke depan secara berkelanjutan.

2.1.2.1.2. ***PDRB Per Kapita***

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Indikator ini dihitung dengan membagi total nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk, sehingga mencerminkan rata-rata kontribusi ekonomi per individu. Besarnya nilai PDRB per kapita dipengaruhi tidak hanya oleh aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB per kapita Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Grafik berikut memperlihatkan bahwa Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan nasional.

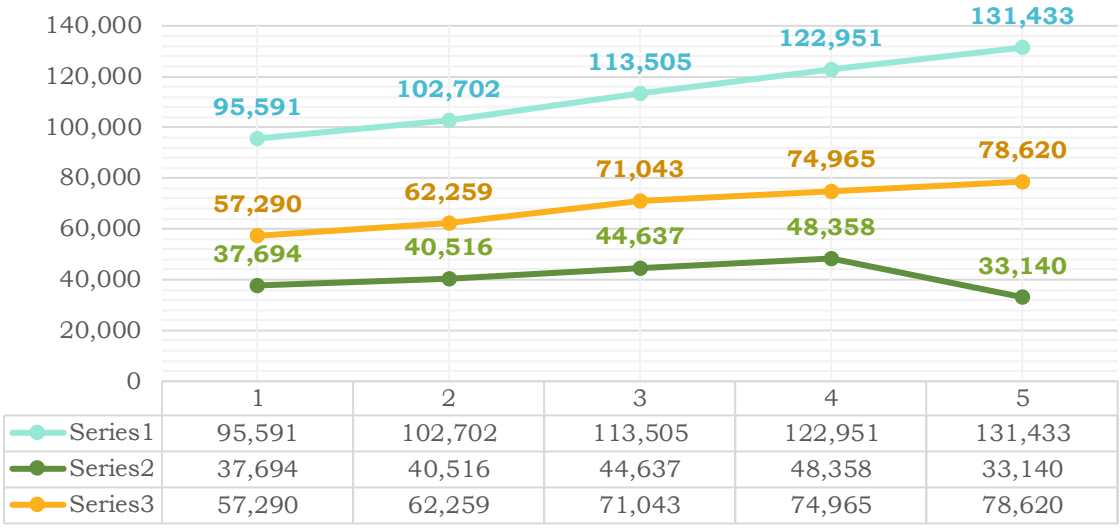

Gambar II.18 PDRB Per Kapita Menurut ADHB (Ribu Rupiah) Kota Yogyakarta Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (Nasional, Provinsi, Kota Yogyakarta), 2025

Adapun pada tahun 2024, PDRB per kapita Kota Yogyakarta tercatat sebesar Rp131.433 ribu, tertinggi dibandingkan DIY dan nasional pada periode yang sama. Capaian ini mencerminkan peningkatan kapasitas ekonomi lokal serta peran penting sektor-sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.1.2.1.3. ***Indeks Gini***

Meskipun PDRB per kapita Kota Yogyakarta tergolong tinggi dan terus mengalami peningkatan, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melihat indikator lain seperti Indeks Gini guna memahami sejauh mana hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Indeks Gini sendiri digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai indeks ini menggunakan skala rasio berkisar antara 0 hingga 1. Adapun nilai mendekati 0 mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata, dan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Perbandingan indeks Gini Kota Yogyakarta terhadap DIY dan Nasional dijelaskan pada grafik di bawah ini.

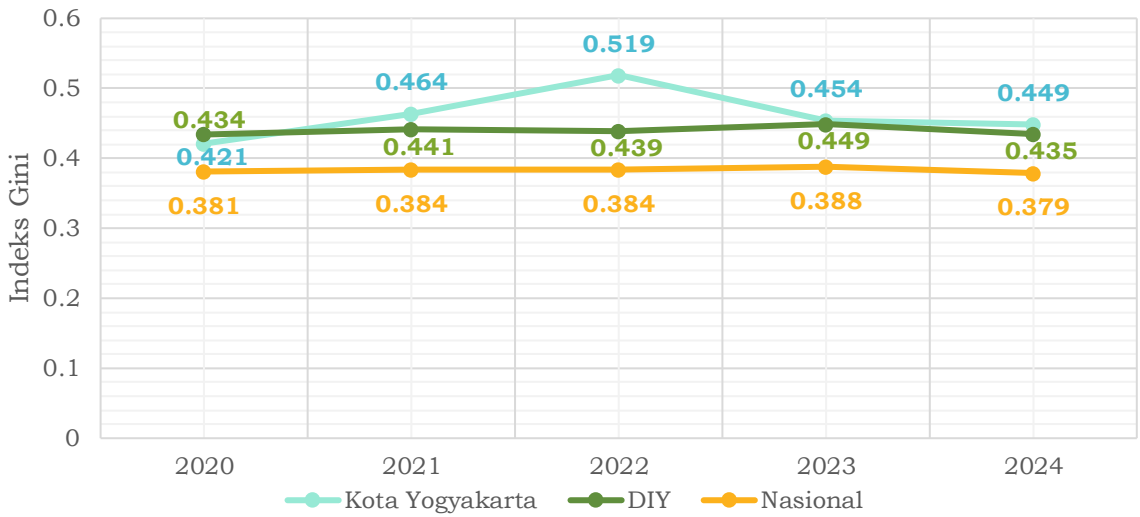

Gambar II.19 Rasio Gini Kota Yogyakarta terhadap Provinsi dan Nasional

Sumber: Gini Ratio BPS Kota Yogyakarta, 2025 dan Gini Ratio Perkotaan+Perdesaan Semester 1 (Maret) BPS Nasional

Berdasarkan data BPS, dalam empat tahun terakhir, Indeks Gini Kota Yogyakarta tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi. DIY dan nasional secara konsisten termasuk wilayah dengan tingkat ketimpangan tertinggi secara nasional, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Kota Yogyakarta sebagai pusat perkotaan utama turut mencerminkan karakteristik ketimpangan tersebut.

Tren ketimpangan di Kota Yogyakarta meningkat dari 0,421 pada tahun 2020 menjadi 0,519 pada tahun 2022. Nilai tersebut menempatkan Kota Yogyakarta dalam kategori ketimpangan tinggi pada tahun tersebut, sedangkan di tahun-tahun lainnya berada dalam kategori moderat (antara 0,4 hingga 0,5). Tingginya Indeks Gini pada 2022 juga tercermin dalam distribusi pendapatan: kelompok 40% penduduk dengan penghasilan terendah hanya memperoleh 11,58% dari total pendapatan.

Pada tahun 2024, terdapat perbaikan ketimpangan Kota Yogyakarta yang ditunjukkan dengan penurunan angka gini *ratio* menjadi 0,449. Dari angka tersebut ketimpangan DIY wilayah perkotaan mengalami penurunan dari 0,453 pada Maret 2023 menjadi 0,440 pada Maret 2024. Data indeks gini DIY wilayah perkotaan terbaru pada September 2024 menunjukkan angka 0,429. Hal tersebut menjadi sinyal positif realisasi penurunan ketimpangan di Kota Yogyakarta tahun 2024.

Meskipun menunjukkan arah perbaikan, tingkat ketimpangan di Kota Yogyakarta masih tergolong sedang dan tetap lebih tinggi dibandingkan provinsi maupun nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi hasil pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya merata di seluruh kelompok masyarakat.

Ke depannya, strategi pembangunan perlu diarahkan untuk memperkuat ekonomi inklusif. Selain itu, diperlukan pula intervensi fiskal yang berpihak pada kelompok rentan serta program perlindungan sosial yang terintegrasi guna mempercepat penurunan ketimpangan dan mendorong pemerataan hasil pembangunan.

2.1.2.1.4. ***Angka Kemiskinan***

Angka kemiskinan merupakan indikator yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penetapan garis kemiskinan dilakukan oleh pemerintah berdasarkan standar kebutuhan dasar minimum untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Sebagaimana dapat dicermati pada tabel di bawah, pada periode 2020–2024, angka kemiskinan Kota Yogyakarta mengalami dinamika.

Tabel -25 Angka Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	29,45	34,07	29,68	29,48	28,79
Angka Kemiskinan	%	7,27	7,69	6,62	6,49	6,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Angka kemiskinan tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat pada tahun 2021 dengan persentase 7,69%, sebelum akhirnya menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak tahun 2022 hingga mencapai angka terendah 6,26% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan hasil dari implementasi berbagai program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah pasca pandemi.

Selain itu, besar kemungkinan pula bahwa penurunan ini mencerminkan efektivitas program dan kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah dalam upaya menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun perbandingan angka kemiskinan Kota Yogyakarta dengan DIY dan nasional disajikan pada grafik berikut.

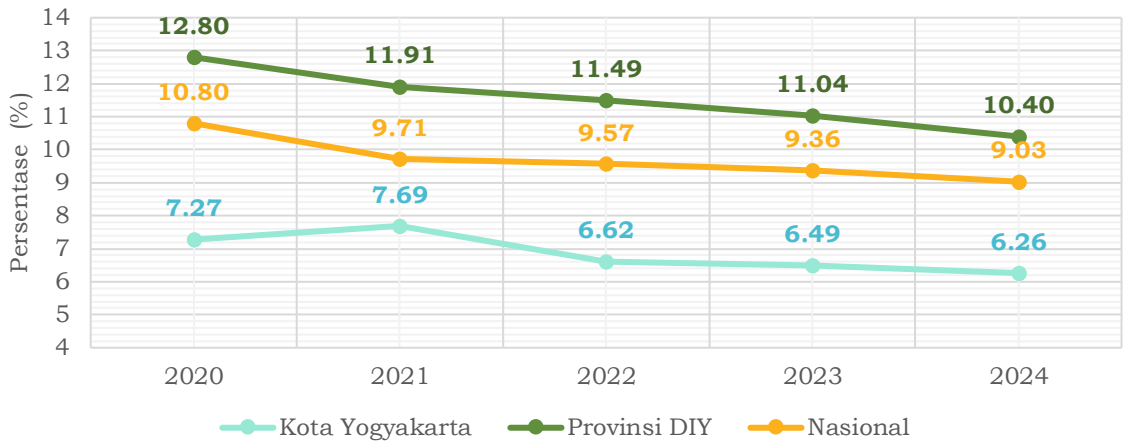

Gambar II.20 Angka Kemiskinan Kota Yogyakarta terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan perbandingan antarwilayah, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta selalu lebih rendah dibandingkan rata-rata DIY dan nasional. Grafik perbandingan menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024, DIY mencatat angka kemiskinan tertinggi dengan rata-rata sekitar 11,6%, diikuti oleh nasional sebesar 9,5%, dan Kota Yogyakarta dengan angka terendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, Kota Yogyakarta mampu menjaga kinerja sosial-ekonominya dengan baik.

2.1.2.1.5. ***Tingkat Pengangguran Terbuka***

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka mencakup empat kelompok: a) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan; b) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha baru; c) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan *(discouraged workers);* dan d) mereka yang telah memiliki pekerjaan/usaha, tetapi belum mulai bekerja/berusaha.

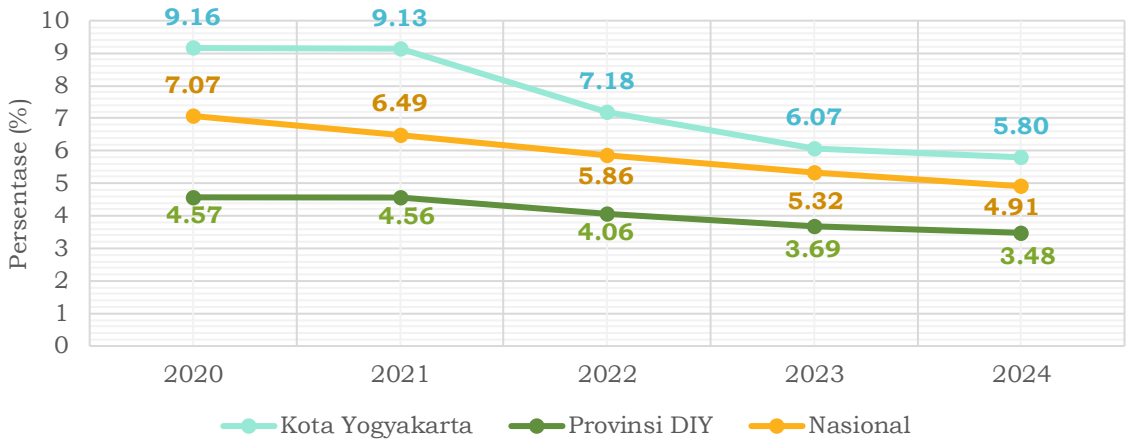

Gambar II.21 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data BPS, TPT di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 tercatat sebesar 9,16%, kemudian mengalami penurunan secara bertahap dan mencapai 5,8% pada tahun 2024. Perkembangan ini menunjukkan perbaikan kondisi pasar kerja di kota tersebut. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di tingkat DIY dan nasional, Kota Yogyakarta menunjukkan dinamika yang relatif lebih fluktuatif, namun akhirnya memiliki tren penurunan yang serupa dengan lingkup provinsi dan nasional.

Penurunan TPT dapat diartikan sebagai hasil dari perbaikan aktivitas ekonomi dan berbagai inisiatif ketenagakerjaan yang telah dijalankan, termasuk pelatihan kerja dan program pemberdayaan usaha.

Selain itu, karakteristik demografis dan struktur angkatan kerja juga turut mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Salah satunya adalah tren peningkatan kelompok pemuda yang termasuk dalam kategori NEET (*Not in Education, Employment, or Training*), yang menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk memperkuat akses generasi muda terhadap pelatihan dan dunia kerja secara produktif. Adapun data mengenai statistik ketenagakerjaan pemuda berdasarkan kelompok umurnya dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel -26 Status Ketenagakerjaan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Yogyakarta (Agustus 2023)

Laki-Laki + Perempuan											
Golongan Umur	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				Jumlah Total (Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja)	% Bekerja terhadap Angkatan Kerja	TPT (%)	TPAK (%)
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah Angkatan Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah Bukan Angkatan Kerja				
15–24	24.570	3.045	**27.615**	23.407	5.627	1.300	**30.334**	**57.949**	**88,97**	**11,03**	**47,65**
25–54	137.444	5.856	**143.300**	109	19.114	443	**19.666**	**162.966**	**95,91**	**4,09**	**87,93**
55+	48.232	4.681	**52.913**	0	25.053	6.904	**31.957**	**84.870**	**91,15**	**8,85**	**62,35**
Jumlah	**210.246**	**13.582**	**223.828**	**23.516**	**49.794**	**8.647**	**81.957**	**305.785**	**93,93**	**6,07**	**73,2**
Laki-Laki											
Golongan Umur	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				Jumlah Total (Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja)	% Bekerja terhadap Angkatan Kerja	TPT	TPAK (%)
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah Angkatan Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah Bukan Angkatan Kerja				
15–24	12.327	2.113	**14.440**	13.119	669	861	**14.649**	**29.089**	**85,37**	**14,63**	**49,64**
25–54	75.374	3.464	**78.838**	0	1.211	228	**1.439**	**80.277**	**95,61**	**4,39**	**98,21**
55+	25.614	2.396	**28.010**	0	6.075	3.812	**9.887**	**37.897**	**91,45**	**8,55**	**73,91**
Jumlah	**113.315**	**7.973**	**121.288**	**13.119**	**7.955**	**4.901**	**25.975**	**147.263**	**93,43**	**6,57**	**82,36**
Perempuan											
	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja						TPT	TPAK (%)

Golongan Umur	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah Angkatan Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Jumlah Total (Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja)	% Bekerja terhadap Angkatan Kerja		
15–24	12.243	932	**13.175**	10.288	4.958	439	**15.685**	**28.860**	**92,93**	**7,07**	**45,65**
25–54	62.070	2.392	**64.462**	109	17.903	215	**18.227**	**82.689**	**96,29**	**3,71**	**77,96**
55+	22.618	2.285	**24.903**	0	18.978	3.092	**22.070**	**46.973**	**90,82**	**9,18**	**53,02**
Jumlah	**96.931**	**5.609**	**102.540**	**10.397**	**41.839**	**3.746**	**55.982**	**158.522**	**94,53**	**5,47**	**64,69**

Sumber: Sakernas Agustus 2023, diolah (2025)

Mengacu pada data terakhir dari Sakernas Agustus 2023, TPT Kota Yogyakarta tercatat sebesar 6,07%, menurun dari 9,16% pada tahun 2020. Penurunan ini mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi, sekaligus menunjukkan hasil dari berbagai intervensi kebijakan seperti pelatihan kerja, dukungan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Meskipun demikian, jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan kelompok umur, tingkat pengangguran tertinggi justru terjadi pada kelompok usia 15–24 tahun, yaitu mencapai 11,03%. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 25–54 tahun (4,09%) maupun 55 tahun ke atas (8,85%).

Tingginya TPT di kalangan pemuda ini mengindikasikan tantangan serius dalam menjembatani transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Fenomena ini selaras dengan tingginya jumlah pemuda yang tergolong dalam kategori NEET (*Not in Education, Employment, or Training*). Pada tahun 2023, terdapat sekitar 3.045 pemuda usia 15–24 tahun yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak sedang mengikuti pelatihan yang mengindikasikan suatu kondisi yang dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia dan berisiko memunculkan pengangguran jangka panjang.

Terlebih, jika mengacu pada definisi NEET maka sekitar 5.397 perempuan usia 15–24 tahun di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 tergolong NEET, yaitu mereka yang tidak sedang bekerja, tidak sedang mengikuti pendidikan, dan tidak mengikuti pelatihan keterampilan. Adapun TPT untuk kelompok ini sendiri mencapai hingga 14%. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat kerentanan kelompok perempuan terhadap eksklusi sosial dan ekonomi.

Lebih lanjut, TPAK kelompok usia 15–24 tahun yang sebesar 47,65% mengindikasikan bahwa lebih dari separuh pemuda usia kerja di Kota Yogyakarta belum berpartisipasi aktif dalam pasar tenaga kerja. Kondisi ini kemudian menuntut perhatian khusus untuk memperluas akses pelatihan vokasi, menyediakan skema kerja magang transisi, serta meningkatkan literasi karier dan kewirausahaan sejak usia dini. Penanganan kelompok NEET secara serius bukan hanya soal mengurangi angka pengangguran,

tetapi juga kunci untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memperkuat pondasi ekonomi daerah kedepannya.

2.1.2.1.6. ***Distribusi Pendapatan Penduduk***

Distribusi pendapatan penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan ekonomi. Dalam indikator ini, penduduk dibagi menjadi tiga kelompok: kelompok 40% penduduk yang berpendapatan rendah *(bottom 40%),* kelompok 40% penduduk yang berpendapatan menengah (*middle* 40%), dan kelompok 20% penduduk yang berpendapatan tinggi (*top* 20%).

Berdasarkan standar pemerataan pendapatan dari Bank Dunia, ketimpangan pendapatan dikategorikan ke dalam tiga tingkatan: (i) ketimpangan pendapatan tinggi apabila kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah hanya menerima kurang dari 12% total pendapatan; (ii) ketimpangan pendapatan sedang/menengah apabila kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12–17% dari total pendapatan; dan (iii) ketimpangan pendapatan rendah apabila kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% total pendapatan.

Tabel -27 Distribusi Pendapatan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	40% Penduduk Berpendapatan Terendah	Persen	15,26	13,14	11,58	14,63	14,70
2	40% Penduduk Berpendapatan Menengah	Persen	34,5	35,22	31,15	32,54	33,10
3	20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi	Persen	50,24	51,63	57,27	52,83	52,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Data distribusi pendapatan penduduk Kota Yogyakarta pada periode 2020–2024 menunjukkan adanya dinamika, dengan kecenderungan membaik dalam dua tahun terakhir. Proporsi pendapatan yang diterima oleh 40% kelompok penduduk berpendapatan terendah sempat menurun dari 15,26%

pada tahun 2020 menjadi 11,58% pada 2022, yang mencerminkan tingkat ketimpangan yang relatif tinggi pada saat itu. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi peningkatan bertahap hingga mencapai 14,70% yang menandakan adanya perbaikan dalam kaitannya distribusi pendapatan ke arah yang lebih merata.

Di sisi lain, proporsi pendapatan yang diterima oleh 20% kelompok penduduk berpendapatan tertinggi tercatat terus di atas 50%, dengan angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar 57,27%. Meskipun distribusi pemerataan pendapatan kelompok atas masih dominan, penurunan proporsinya pada 2023 dan 2024 menunjukkan adanya pergeseran positif dalam konteks pemerataan distribusi pendapatan di Kota Yogyakarta.

Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Yogyakarta mengalami perbaikan ke arah yang lebih merata, meskipun belum sepenuhnya ideal. Perkembangan ini memberikan ruang positif bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kebijakan pemerataan ekonomi, termasuk memperluas akses terhadap peluang ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta memperkuat jaring pengaman sosial.

2.1.2.1.7. ***Indeks Pembangunan Manusia***

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan usia harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata

besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel -28 Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Usia Harapan Hidup (LF SP2020)	Tahun	74,65	74,76	75,43	74,91	75,73
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,43	17,6	17,61	17,62	17,66
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,46	11,72	11,89	12,11	12,12
4	Pengeluaran Riil per Kapita	Ribu Rupiah	18.678	18.801	19.319	19.920	20.603
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	86,93	87,50	88,00	88,61	89,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Selama periode 2020–2023, IPM Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 86,93 pada tahun 2020 menjadi 89,10 pada tahun 2024. Nilai ini menempatkan Kota Yogyakarta secara stabil dalam kategori “Sangat Tinggi” dengan nilai IPM di atas 80 dan berada di atas rata-rata DIY maupun nasional.

Dimensi kesehatan juga mencatatkan adanya tren perbaikan yang ditunjukkan oleh peningkatan usia harapan hidup dari 75,24 tahun pada 2020 menjadi 75,73 tahun pada 2024. Lebih lanjut, indikator pendidikan juga mengalami kenaikan, yang mana harapan lama sekolah naik dari 17,43 menjadi 17,66 tahun, dan rata-rata lama sekolah meningkat dari 11,46 menjadi 12,12 tahun pada periode yang sama. Di sisi lain, pengeluaran riil per kapita sebagai indikator standar hidup naik dari Rp18.678 ribu menjadi Rp20.603 ribu, yang menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat.

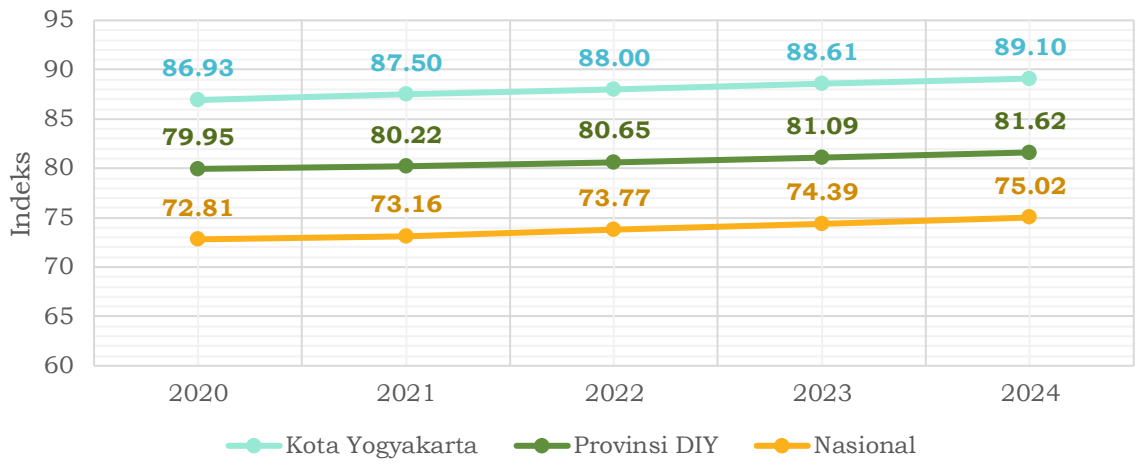

Gambar II.22 Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Secara keseluruhan, kenaikan IPM Kota Yogyakarta mencerminkan kemajuan di seluruh aspek dasar pembangunan manusia. Meski demikian, perkembangan ini juga perlu disertai dengan kebijakan strategis yang mengantisipasi perubahan struktur demografi, termasuk bertambahnya proporsi penduduk lanjut usia sebagai implikasi dari meningkatnya usia harapan hidup. Hal ini krusial agar menjamin bahwa capaian pembangunan manusia tetap berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang.

2.1.2.2. **Kesehatan untuk Semua**

2.1.2.2.1. ***Usia Harapan Hidup***

Usia harapan hidup menunjukkan perkiraan rata-rata tahun yang diharapkan seseorang dapat hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang biasanya dihitung dari saat kelahiran. Indikator ini digunakan sebagai indikator utama dalam mengevaluasi tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Berikut data usia harapan hidup di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

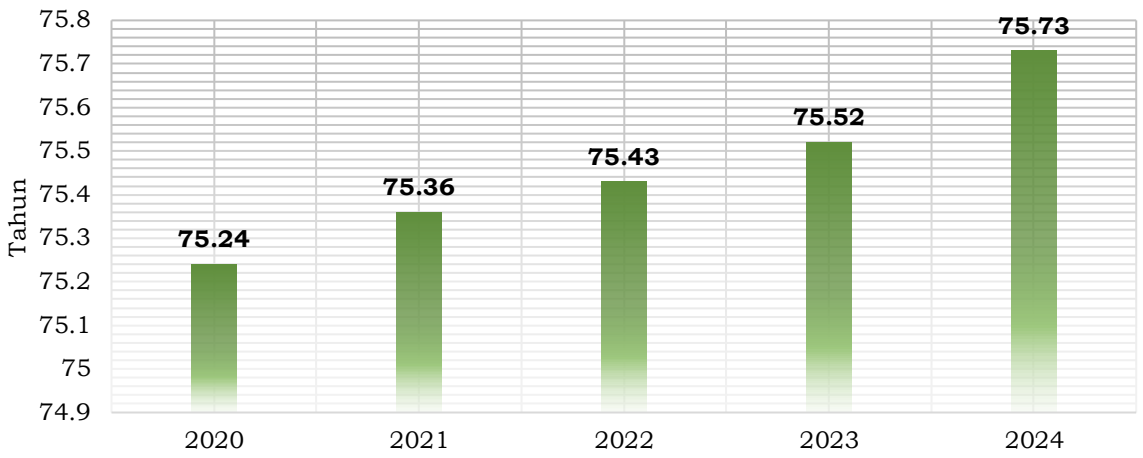

Gambar II.23 Usia Harapan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan grafik di atas, usia harapan hidup di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 mengalami tren peningkatan yang bersifat menerus. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan yang ada.

2.1.2.2.2. ***Prevalensi Stunting***

Prevalensi *stunting* adalah persentase anak-anak di suatu wilayah yang memiliki tinggi badan lebih rendah dari tinggi badan yang seharusnya sesuai dengan usia mereka. *Stunting* pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh banyak faktor baik dari masalah kesehatan maupun di luar kesehatan. Berikut data prevalensi *stunting* di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

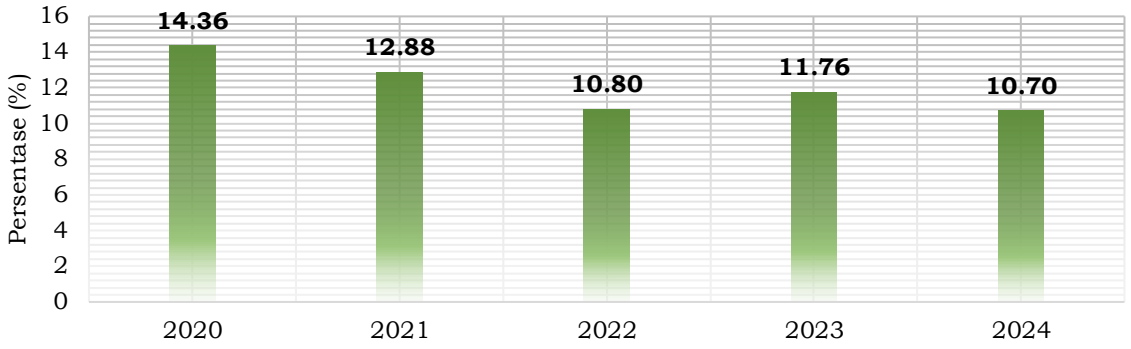

Gambar II.24 Prevalensi *Stunting* Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Pemantauan Permasalahan Gizi Balita (PPGB), 2025

Berdasarkan data di atas, prevalensi *stunting* di Kota Yogyakarta cenderung menurun selama kurun waktu lima tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan data tahun 2020, penurunan prevalensi stunting pada tahun 2024 cukup signifikan dengan ditetapkannya 35 lokus penanganan stunting di Kota Yogyakarta yaitu di Kelurahan Purbayan, Sosromenduran, Pandeyan, Notoprajan, Sorosutan, Pringgokusuman, Semaki, Tahunan, Warungboto, Ngampilan, Pakuncen, Kricak, Karangwaru, Bener, Mantrijeron, Prenggan, Muja Muju, Ngupasan, Giwangan, Tegal Panggung, Gedongkiwo, Suryodiningratan, Suryatmajan, Rejowinangun, patangpuluhan, Terban, Panembahan, Klitren, Demangan, dan Baciro. Penentuan lokus stunting didasarkan pada angka prevalensi *stunting* pada kelurahan, persentase kedatangan pada penimbangan serta cakupan layanan yang ada di kelurahan.

2.1.2.2.3. ***Indeks Keluarga Sehat***

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat melalui kondisi kesehatan dan perilaku hidup sehat dalam lingkup keluarga. Tujuan utama dari IKS adalah untuk memastikan bahwa setiap keluarga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat.

IKS sendiri dihitung berdasarkan pemenuhan dua belas indikator keluarga sehat, yaitu (i) keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), (ii) ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan, (iii) bayi mendapatkan

imunisasi dasar lengkap, (iv) bayi memperoleh ASI eksklusif selama 6 bulan, (v) balita dipantau pertumbuhannya setiap bulan, (vi) penderita tuberculosis (TB) paru berobat sesuai standar, (vii) penderita hipertensi berobat secara teratur, (viii) penderita gangguan jiwa berat mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, (ix) tidak ada anggota keluarga yang merokok, (x) keluarga memiliki dan menggunakan jamban sehat, (xi) keluarga menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan (xii) keluarga memiliki akses terhadap air bersih.

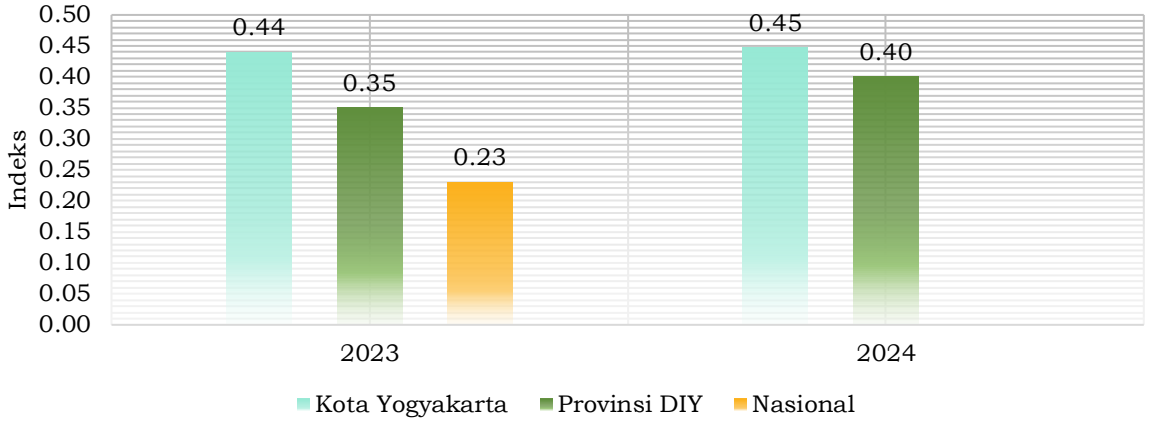

Gambar II.25 Indeks Keluarga Sehat Kota Yogyakarta terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2023-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, nilai Indeks Keluarga Sehat di kota ini mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan dalam cakupan layanan kesehatan dasar dan perilaku hidup sehat di tingkat rumah tangga. Jika dibandingkan dengan rata-rata DIY dan nasional, Kota Yogyakarta menunjukkan nilai IKS yang relatif lebih tinggi dan dikategorikan sebagai keluarga pra sehat. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dari sisi sistem pelayanan kesehatan berbasis keluarga.

2.1.2.3. **Pendidikan Berkualitas yang merata**

2.1.2.3.1. ***Rata-Rata Lama Sekolah***

Indikator ini menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan seseorang dalam pendidikan formal. Indikator ini digunakan sebagai

indikator penting dalam mengukur tingkat pendidikan di suatu daerah. Indikator ini dapat memberikan gambaran terkait tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Semakin cepat atau mendekati waktu yang ideal untuk lulus, maka semakin baik kualitas pendidikan penduduk di daerah tersebut.

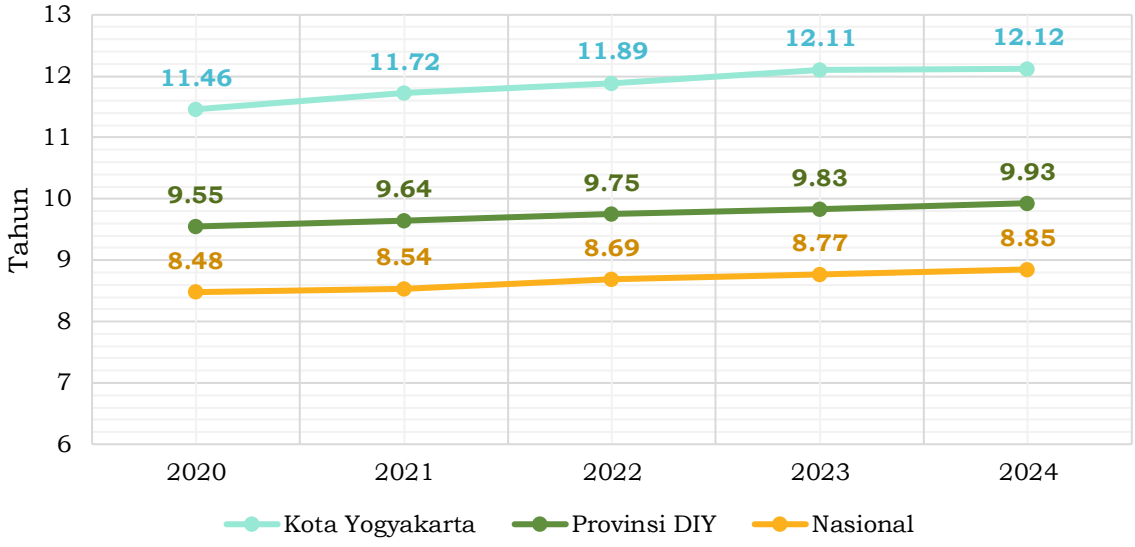

Gambar II.26 Rata Rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan menjadi 12,12 tahun di tahun 2024. Dibandingkan dengan DIY dan Nasional, rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta relatif lebih tinggi.

2.1.2.3.2. ***Harapan Lama Sekolah***

Secara umum persentase harapan lama sekolah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 harapan lama sekolah di Kota Yogyakarta adalah sebesar 17,43 tahun, kemudian angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada 2024 naik menjadi 17,66 tahun. Harapan lama sekolah sudah mencapai angka 17 tahun-an yang berarti rata-rata anak usia tertentu, dalam konteks ini adalah 7 tahun ke atas (Usia SD) diharapkan bersekolah formal hingga 17 tahun, yang artinya menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

hingga tingkat SMA/MA/SMK dan dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi.

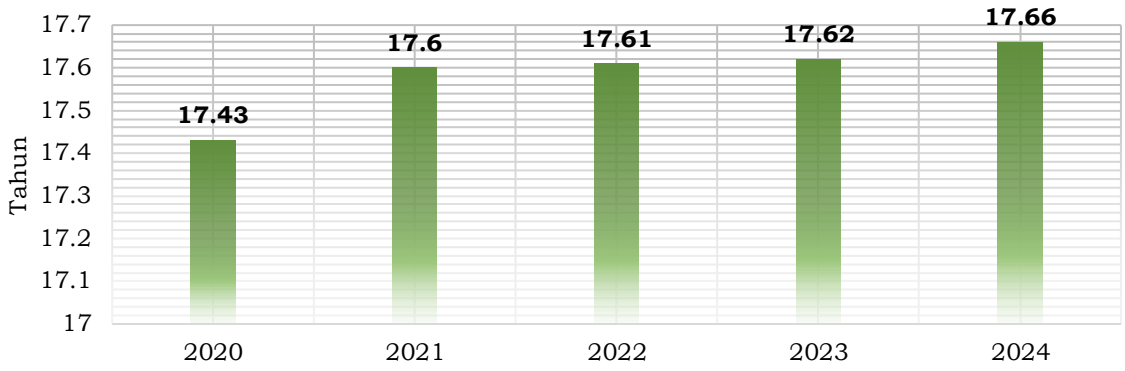

Gambar II.27 Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

2.1.2.3.3. ***Kemampuan Literasi dan Numerasi***

Kemampuan literasi merupakan indikator yang menunjukkan tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam membaca, menulis, dan memahami informasi. Sementara itu, kemampuan numerasi merujuk pada tingkat kemampuan penggunaan angka, simbol, dan grafik untuk memecahkan masalah yang dimiliki oleh masyarakat. Penilaian kemampuan literasi dan numerasi dilakukan berdasarkan asesmen nasional. Pada indikator kinerja, perhitungan kemampuan literasi dan numerasi dilakukan hanya melihat SD dan SMP Umum (Negeri dan Swasta), sehingga sekolah keagamaan, SLB, dan sebagainya tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Secara umum, angka literasi dan numerasi di Kota Yogyakarta berdasarkan asesmen nasional pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka literasi kategori baik pada tahun 2023 menunjukkan angka 88,39 dan kemudian meningkat menjadi 88,43 di tahun 2024. Angka numerasi kategori baik pada tahun 2023 menunjukkan angka 61,05 dan kemudian meningkat menjadi 80,60 di tahun 2024.

Tabel -29 Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa Kota Yogyakarta Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2023-2024

No.	Indikator	2023			2024		
		Baik	Sedang	Kurang	Baik	Sedang	Kurang
Kemampuan Literasi Berdasarkan Asesmen Nasional							
1	SD	92,35	3,83	1,09	91,85	3,26	0,54
2	SMP	79,76	5,95	2,38	80,95	7,14	3,57
3	Total	88,39	4,49	1,50	88,43	4,48	1,49
Kemampuan Numerasi Berdasarkan Asesmen Nasional							
1	SD	66,67	26,78	3,83	82,61	11,41	1,63
2	SMP	48,81	29,76	9,52	76,19	11,90	3,57
3	Total	61,05	27,72	5,62	80,60	11,57	2,24

Sumber: Rapor Pendidikan Kota Yogyakarta, 2025

Jika melihat angka literasi dan numerasi pada SD dan SMP Umum, secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat data karena kegiatan Ujian Nasional (UN) dihapuskan. Pada tahun 2022, tidak tersedia hasil nilai secara langsung, namun kami justifikasi dengan pendekatan dengan menjumlahkan kemudian merata-rata komponen penilaian numerasi.

Tabel -30 Angka Literasi dan Numerasi SD dan SMP Umum (Negeri dan Swasta Kota Yogyakarta 2020-2024

No	Jenjang	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Literasi						
1	SD	N/A	N/A	65,02	68,19	76.43
2	SMP	N/A	N/A	72,99	80,18	84.62
Angka Numerasi						
1	SD	N/A	N/A	40,27	49,13	56.07
2	SMP	N/A	N/A	58,45	63,86	73.15

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2025

2.1.2.3.4. ***Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat***

Indeks pembangunan literasi masyarakat merupakan pengukuran tingkat literasi masyarakat berdasarkan serangkaian upaya yang dilakukan. Indeks ini mencakup tidak hanya literasi membaca dan menulis saja, tetapi juga mencakup literasi finansial, digital, lingkungan dan literasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dan dapat berperan dalam masyarakat baik dari politik, sosial maupun ekonomi.

Indeks pembangunan literasi masyarakat di Kota Yogyakarta dapat dilihat dari tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang meliputi:

1. pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1);
2. ketercukupan koleksi (UPLM 2);
3. ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3);
4. tingkat kunjungan masyarakat/hari (UPLM 4);
5. jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP (UPLM 5);
6. keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM 6);
7. anggota perpustakaan (UPLM 7)

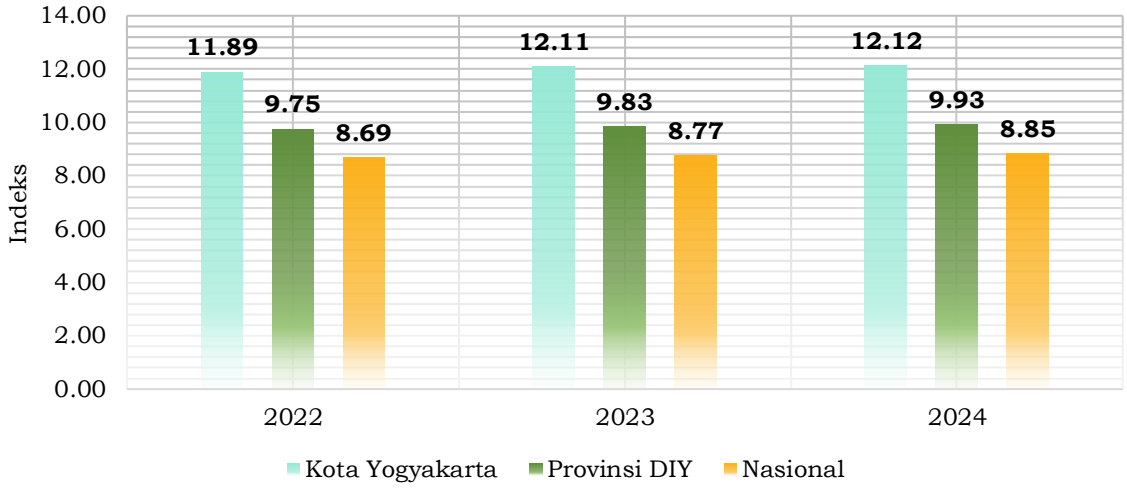

Gambar II.28 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2024

Sumber: Perpustakaan Nasional RI, 2025

Berdasarkan data Perpustakaan Nasional RI, indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Yogyakarta tahun 2022-2024 mengalami fluktuasi. Dibandingkan dengan DIY dan nasional, indeks pembangunan literasi masyarakat di Kota Yogyakarta relatif lebih tinggi dan selalu berada di

kategori tinggi. Hal ini menandakan bahwa perpustakaan Kota Yogyakarta dapat mendukung budaya literasi masyarakat dan masyarakat telah memiliki kemampuan literasi yang baik.

2.1.2.4. **Perlindungan Sosial yang Adaptif**

2.1.2.4.1. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan indikator penting dalam menilai cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan di suatu daerah. Indikator ini menghitung persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek dibandingkan dengan jumlah total pekerja.

Penurunan persentase tenaga kerja peserta Program Jamsostek pada tahun 2020 disebabkan oleh perubahan metode pendataan, di mana sebelumnya menggunakan data Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLTK) yang berdiri sendiri, lalu mulai 2020 diintegrasikan dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan ini menyebabkan perbedaan cakupan dan metode pencatatan, yang berdampak pada penurunan angka persentase meskipun jumlah nominal peserta masih cukup tinggi.

Sementara itu, pada tahun 2021, jumlah peserta Jamsostek tercatat jauh lebih rendah (hanya 343 orang), karena sumber data yang digunakan berasal dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, bukan lagi dari Pemerintah Daerah DIY seperti pada tahun sebelumnya. Perbedaan sumber data ini turut mempengaruhi hasil perhitungan dan membuat tren antar tahun menjadi tidak sepenuhnya sebanding.

Perubahan sumber dan metode pendataan tersebut menyebabkan terjadinya fluktuasi tajam, terutama pada tahun 2021 ketika tercatat hanya 343 pekerja (1,36%) sebagai peserta aktif. Namun demikian, pemulihan cepat terlihat pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 persentase pekerja yang menjadi peserta Program Jamsostek telah mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan perbaikan sistem pendataan sekaligus menunjukkan bahwa

seluruh pekerja di Kota Yogyakarta yang tercatat telah sepenuhnya dilindungi oleh jaminan sosial tenaga kerja.

Tabel -31 Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta Program Jamsostek	Orang	58.121	343	47.777	91.276	90.503
2.	Jumlah seluruh pekerja	Orang	134.803	25.134	54.703	91.276	90.503
3.	Persentase tenaga kerja yang mengikuti Program Jamsostek	Persen	43,12	1,36	87,34	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2024

Meningkatnya cakupan Jamsostek juga mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja. Kedepannya, konsistensi dalam integrasi data dan pelaporan, serta pengawasan terhadap kepesertaan Jamsostek, menjadi penting pula guna memastikan bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan benar-benar menjangkau seluruh lapisan pekerja, termasuk pekerja informal dan rentan.

2.1.2.4.2. ***Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan***

Penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi strategi penting untuk melindungi pekerja, terutama di tengah dinamika pasar kerja yang semakin fleksibel. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen ini melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023–2024, yang bertujuan memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial, baik untuk jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan.

Dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan, perluasan perlindungan ditujukan tidak hanya bagi pekerja formal (Penerima Upah/PU), tetapi juga mencakup pekerja informal (Bukan Penerima Upah/BPU) dan tenaga kerja sektor jasa

konstruksi (Jakon). Berikut ini data cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta pada tahun 2024.

Tabel -32 Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024

No.	Rincian	Semesta	*Coverage**	% *Coverage*
1	Penerima Upah	106.574	68.993	64,7%
2	Bukan Penerima Upah	70.380	8.413	11,9%
3	Jasa Konstruksi	5.980	5.717	95,6%
TOTAL		**182.934**	**83.123**	**45,4%**

** Data per 30 Juni 2024*

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan DIY, 2024

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan DIY per 30 Juni 2024, jumlah penduduk bekerja di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 182.934 jiwa (mengacu pada data BPS). Dari jumlah tersebut, sebanyak 83.123 orang atau 45,4% telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Rincian cakupan kepesertaan adalah sebagai berikut: (i) Penerima Upah (PU): 64,7% dari total pekerja PU (68.993 dari 106.574); (ii) Bukan Penerima Upah (BPU): 11,9% dari total pekerja BPU (8.413 dari 70.380); dan (iii) Jasa Konstruksi (Jakon): 95,6% dari total pekerja sektor Jakon (5.717 dari 5.980)

Angka ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan kepesertaan pekerja formal sudah cukup tinggi, cakupan untuk pekerja informal masih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kedepannya diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mendorong inklusi pekerja informal ke dalam sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan.

2.1.2.5. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.4.1. *Indeks Pembangunan Gender*

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan gender di suatu daerah. IPG mengukur perbedaan antara laki-laki dan Perempuan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. IPG bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan mendorong

kebijakan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Berikut data Indeks Pembangunan Gender di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

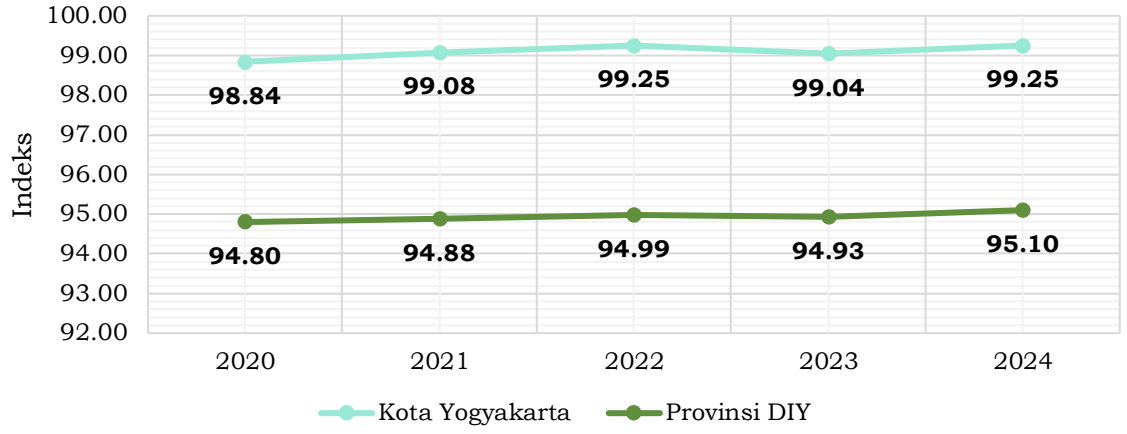

Gambar II.29 Indeks Pembangunan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, Indeks Pembangunan Gender di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Nilai Indeks Pembangunan Gender di Kota Yogyakarta selalu memiliki nilai di atas DIY. Meskipun terdapat fluktuasi kecil, nilai IPG Kota Yogyakarta tetap menunjukkan stabilitas dan komitmen dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam berpartisipasi untuk pembangunan. Capaian pembangunan gender di Kota Yogyakarta semakin merata secara jenis kelamin sehingga kesetaraan gender semakin meningkat dalam pembangunan.

2.1.2.4.2. ***Indeks Pemberdayaan Gender***

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat pemberdayaan perempuan dalam suatu masyarakat. IPG mengukur sejauh mana Perempuan memiliki akses yang setara dengan laki-laki terhadap sumber daya, kesempatan, dan pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. Berikut data Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

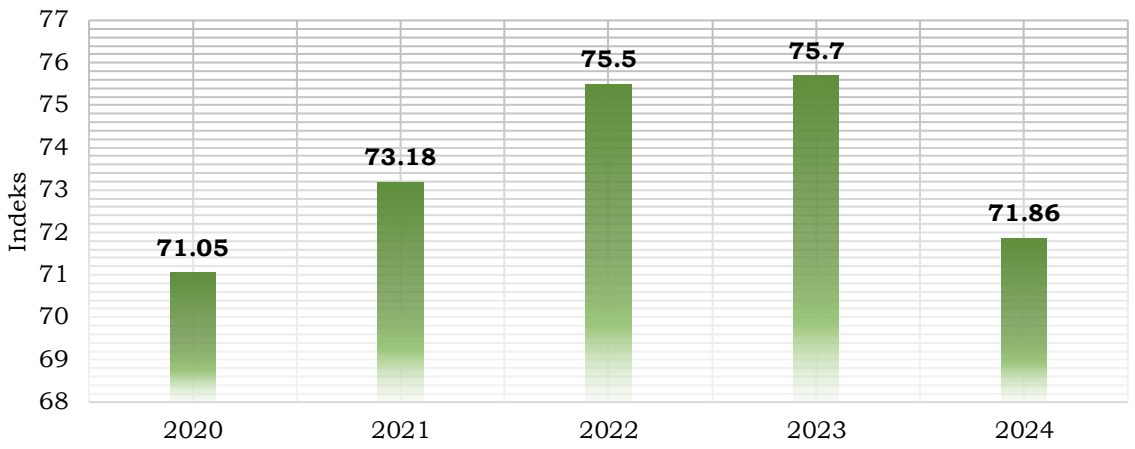

Gambar II.30 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Penurunan Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan bahwa kesempatan bagi perempuan di Kota Yogyakarta untuk memperoleh akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan masih belum setara dengan laki-laki. Nilai Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Yogyakarta tahun 2024 masih berada di bawah nilai Indeks Pemberdayaan Gender di DIY yang sebesar 74,65. Meskipun secara capaian pembangunan (Indeks Pembangunan Gender) sudah mencapai kesetaraan, tetapi secara partisipasi aktif kesetaraan gender masih kurang optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan di Kota Yogyakarta belum berjalan secara optimal.

2.1.2.4.3. ***Indeks Ketimpangan Gender***

Indeks Ketimpangan Gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal akibat kesenjangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Berikut data Indeks Ketimpangan Gender di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

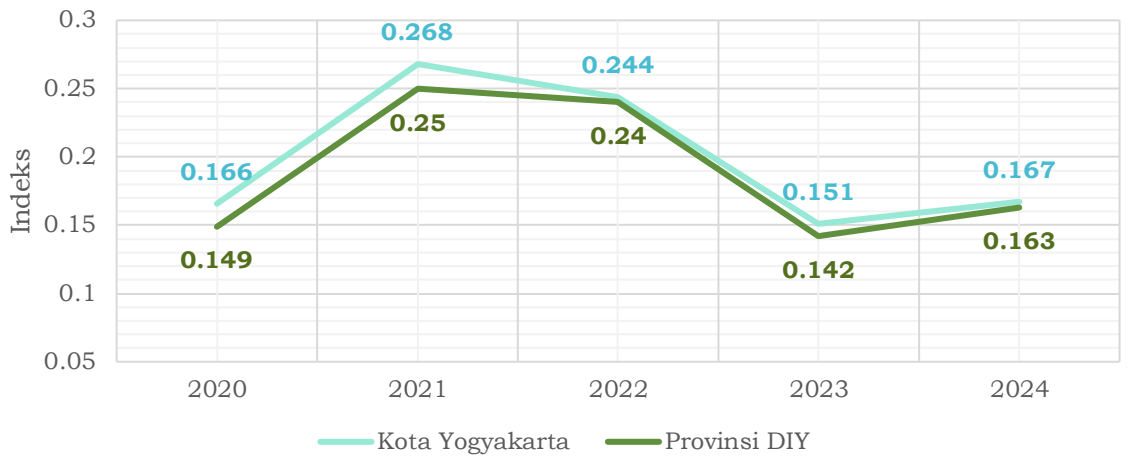

Gambar II.31 Indeks Ketimpangan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung bersifat fluktuatif meningkat meskipun sempat menurun drastis pada periode 2022-2023. Peningkatan indeks tersebut menunjukkan ketimpangan gender semakin melebar. Dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan menjadi faktor utama naiknya indeks ketimpangan gender di DIY. Kota Yogyakarta menjadi salah satu kota atau kabupaten di DIY yang mengalami peningkatan indeks ketimpangan gender selain Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024. Indeks ketimpangan gender Kota Yogyakarta juga masih berada di atas Provinsi. Namun, dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021-2022, indeks ketimpangan gender mengalami penurunan karena adanya upaya-upaya perbaikan pada dimensi-dimensi yang membentuk Indeks Ketimpangan Gender, yaitu MTF, MHPK20, Keterwakilan Legislatif, Pendidikan Minimal SMA, dan TPAK yang dapat ditingkatkan untuk lebih optimal lagi.

2.1.2.4.4. ***Indeks Perlindungan Anak***

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indeks untuk menilai pencapaian pembangunan perlindungan anak. Indeks ini dihitung berdasarkan empat dimensi pembentuk, yaitu:

a. Hak sipil dan kebebasan

b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e. Perlindungan khusus

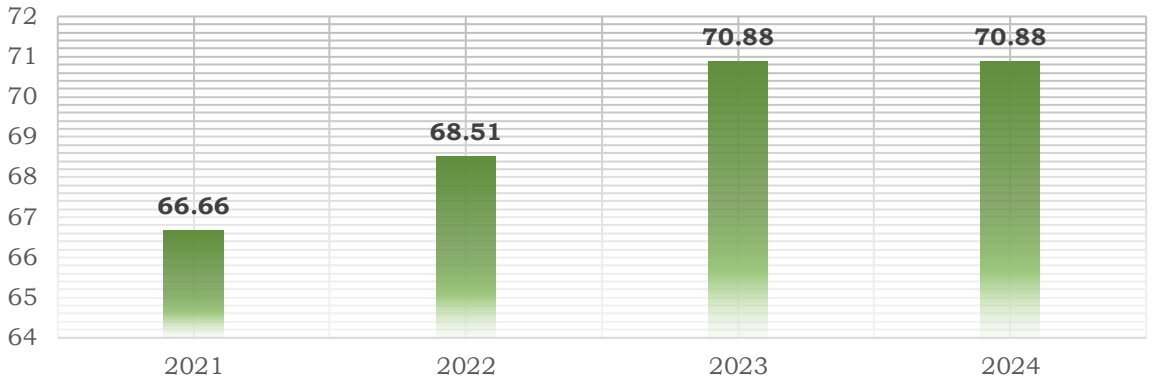

Gambar II.32 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Yogyakarta 2021-2024

Sumber: SIGA KemenPPPA, 2025

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Yogyakarta tahun 2021–2024 yang secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, nilai IPA tercatat sebesar 66,66 dan terus meningkat menjadi 68,51 pada 2022, lalu melonjak signifikan menjadi 70,88 pada 2023. Angka ini bertahan di tahun 2024 karena data terbaru belum tersedia dan masih menggunakan capaian tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memperkuat perlindungan anak, terutama melalui kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak serta pencegahan kekerasan. Dimensi tertinggi yang berhasil dicapai selama periode tersebut adalah pada aspek lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dengan capaian sebesar 96,79 pada tahun 2023. Meskipun demikian, dimensi hak sipil dan kebebasan justru menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2021, yang menjadi perhatian penting dalam perumusan kebijakan ke depan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perlindungan anak di Kota Yogyakarta perlu dilakukan secara menyeluruh dan merata di semua dimensi agar kesejahteraan anak dapat terjamin secara utuh.

2.1.2.4.5. ***Indeks Pembangunan Keluarga***

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah indeks yang dibuat oleh Badan kependudukan dan Keluarga Berkualitas Nasional (BKKBN) untuk mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Tujuan indeks ini adalah meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Pengukuran indeks ini dimulai pada tahun 2021, dengan memperhatikan dimensi ketentraman, dimensi kemandirian, serta dimensi kebahagiaan. Hasil perhitungan indeks tersebut dikategorisasikan sebagai berikut:

a. >70 disebut Tangguh
b. 40-70 disebut berkembang
c. <40 disebut rentan

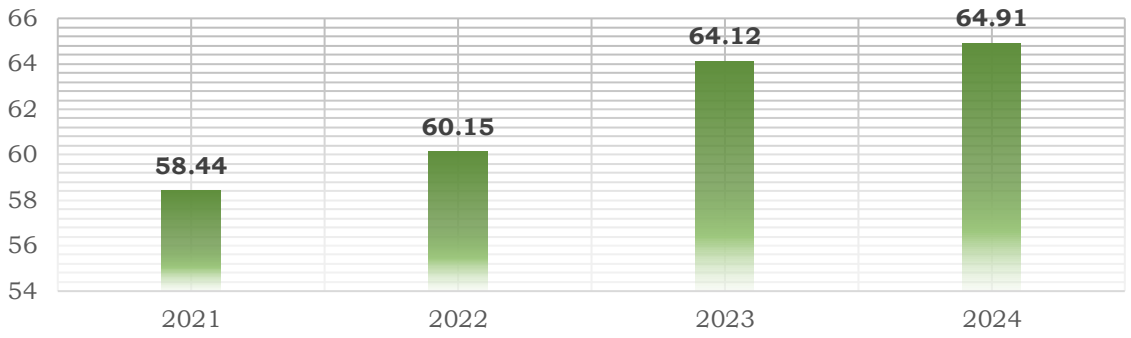

Gambar II.33 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Yogyakarta 2021-2024

Sumber: Badan Kependudukan dan keluarga Berkualitas Nasional (BKKBN), Siperindu, 2025

Indeks Pembangunan Keluarga Kota Yogyakarta 2021–2024 menunjukkan adanya tren peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2021, iBangga Kota Yogyakarta mengalami peningkatan meskipun masih dalam kategori *berkembang*. Sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, diperlukan berbagai upaya dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya beberapa indeks penyusun iBangga, seperti indeks ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil ini menunjukkan adanya penguatan program pemerintah daerah, seperti

peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kecukupan gizi keluarga, layanan konseling keluarga, serta penguatan peran lembaga keluarga dalam mendukung pembangunan sosial di masyarakat. Dengan demikian, upaya berkelanjutan masih perlu dilakukan agar iBangga dapat terus meningkat dan mencapai kategori *mandiri* di masa mendatang.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1. *Angka Pendidikan yang Ditamatkan*

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan perhitungan persentase masyarakat yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu. Dari indikator ini, dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas pendidikan penduduknya yang juga dapat menggambarkan kemajuan Kota Yogyakarta. Berikut data angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel -33 Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tidak/Belum Sekolah	Persen	15,09	15,9	16,48	16,57	16,90
2	Belum Tamat SD/Sederajat	Persen	10,29	10,17	10	9,84	9,69
3	Tamat SD/Sederajat	Persen	9,74	9,51	9,39	9,31	9,15
4	SLTP/Sederajat	Persen	12,49	12,3	12,17	12,04	11,83
5	SLTA/Sederajat	Persen	29,8	29,34	29,21	29,25	29,15
6	Diploma I/II	Persen	0,75	0,74	0,73	0,71	0,70
7	Diploma III/ Akademi/ Sarjana Muda	Persen	4,77	4,71	4,68	4,67	4,64
8	Diploma IV/Strata I	Persen	15,15	15,24	15,35	15,56	15,84
9	Strata II	Persen	1,71	1,74	1,78	1,82	1,89

No.	Jenjang Pendidikan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
10	Strata III	Persen	0,2	0,21	0,21	0,21	0,22

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data angka pendidikan yang ditamatkan di atas, pada kurun waktu 2020 hingga 2024 terdapat penurunan pada tingkat belum tamat SD/Sederajat, tamat SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Diploma I/II, dan Diploma III/Akademi/Sarjana Muda. Sedangkan peningkatan terdapat pada kategori tidak/belum sekolah dan jenjang Diploma IV dan Strata. Peningkatan pada jenjang tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesadaran Masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan tinggi.

2.1.3.1.2. ***Angka Ketergantungan***

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah indikator demografis yang menggambarkan jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) yang ditanggung oleh setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun). Rasio ini digunakan untuk menganalisis potensi beban ekonomi dan sosial yang ditanggung oleh kelompok usia produktif dalam suatu wilayah.

Tabel -34 Angka Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Ketergantungan	-	40,91	40,66	41,32	41,08	41,15
2	Penduduk usia <15 th & >64 th	jiwa	120.802	120.106	120.698	120.760	121.162
3	Penduduk Usia 15-64 th	jiwa	295.315	295.403	292.099	293.945	294.443

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, angka ketergantungan selama periode 2020–2024 cenderung stabil, dengan nilai berkisar antara 40,66 hingga 41,32. Pada tahun 2024,

rasio ketergantungan tercatat sebesar 41,15, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sekitar 41 penduduk usia tidak produktif. Meskipun mengalami sedikit fluktuasi, angka ini tergolong rendah dan masih berada dalam batas yang relatif ideal secara demografis.

Stabilitas angka ketergantungan ini mencerminkan struktur penduduk yang masih didominasi oleh kelompok usia produktif, yang dapat menjadi peluang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jika diimbangi dengan kebijakan yang tepat. Upaya untuk mengelola beban ketergantungan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan jumlah penduduk usia produktif, tetapi juga melalui penyediaan lapangan kerja, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, kelompok usia produktif dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan sekaligus menopang kebutuhan kelompok non-produktif secara berkelanjutan.

2.1.3.2. **IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**

2.1.3.2.1. ***Rasio PDRB Industri Pengolahan***

Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kota Yogyakarta menunjukkan tren penurunan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang sebesar 13,01% terhadap total PDRB—angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Namun demikian, sejak tahun tersebut, kontribusinya terus menurun secara bertahap hingga mencapai 12,02% pada tahun 2024 (angka sangat sementara). Penurunan kontribusi ini dapat mengindikasikan terjadinya perubahan struktur ekonomi daerah, dengan sektor industri pengolahan mengalami perlambatan relatif dibanding sektor lainnya. Tabel berikut menunjukkan tren kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur PDRB Kota Yogyakarta.

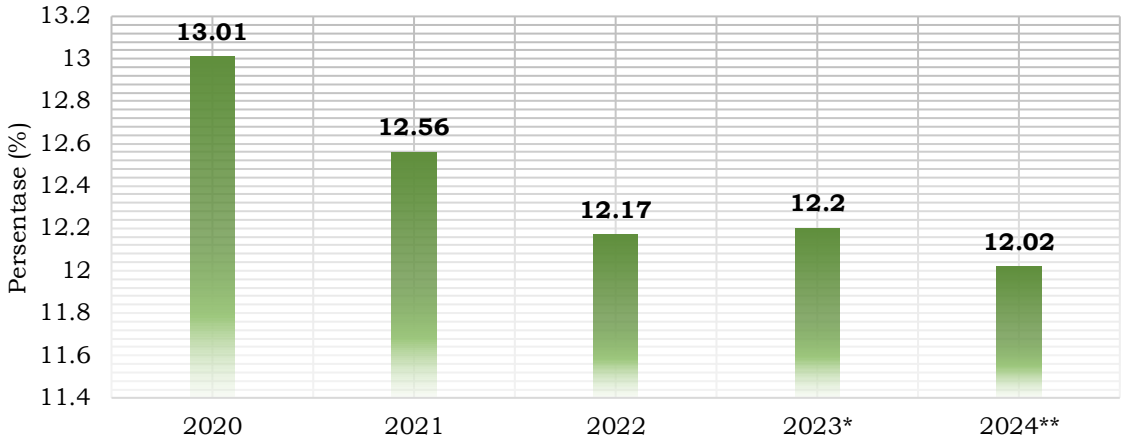

Gambar II.34 Persentase PDRB Industri Pengolahan Terhadap Keseluruhan PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

**) Angka sementara, **) Angka sangat sementara*

Sumber: Buku Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024, 2025

2.1.3.2.2. ***Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum***

Persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 10,92%, dan terus meningkat hingga mencapai 13,44% pada tahun 2024 (angka sangat sementara).

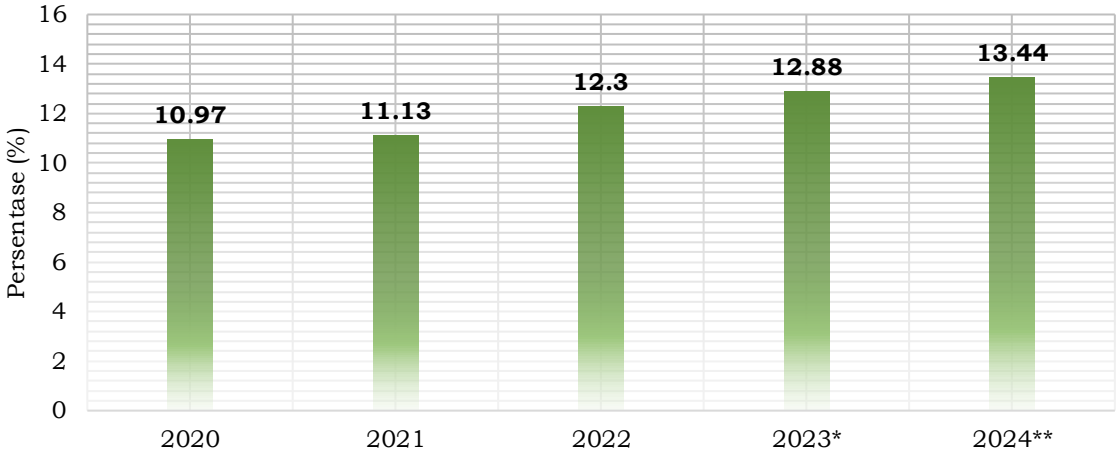

Gambar II.35 Persentase PDRB Akomodasi dan Makan Minum Terhadap Keseluruhan PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

**) Angka sementara, **) Angka sangat sementara*

Sumber: *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025, 2025*

Peningkatan kontribusi sektor ini erat kaitannya dengan membaiknya sektor pariwisata pascapandemi Covid-19 , yang mendorong pertumbuhan usaha penginapan, restoran, dan jasa boga lainnya. Kenaikan jumlah pergerakan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, menjadi faktor utama yang mendorong aktivitas ekonomi di subsektor ini. Perkembangan positif ini mencerminkan peran strategis sektor akomodasi dan makan minum sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Kota Yogyakarta.

2.1.3.2.3. ***Rasio Penduduk yang Bekerja***

Indikator rasio penduduk yang bekerja dalam konteks ini dihitung sebagai persentase jumlah penduduk yang bekerja terhadap total angkatan kerja. Secara teknis, indikator ini identik dengan tingkat penyerapan angkatan kerja, atau dikenal pula sebagai *Employment Rate/Ratio* (ER). Indikator ini sendiri digunakan untuk melihat tingkat penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar proporsi angkatan kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan, yang pada gilirannya mencerminkan kondisi pasar kerja yang relatif sehat.

Tabel -35 Tingkat Penyerapan Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan kerja	jiwa	247.092	262.125	267.712	223.828	216.299
2	Bekerja	jiwa	224.468	238.202	248.484	210.246	203.748
3	Pengangguran	jiwa	22.624	23.923	19.228	13.582	12.551
4	Rasio penduduk bekerja atau ER = (2)/(1)	%	90,84	90,87	92,82	93,94	94,21

Sumber: BPS Kota Yogyakarta – Sakernas Agustus, diolah (2025)

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus yang diolah oleh BPS Kota Yogyakarta, rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang

meningkat. Pada tahun 2020, rasio ini berada di angka 90,84%, kemudian sedikit naik menjadi 90,87% pada 2021. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 hingga 2024, dengan rasio masing-masing sebesar 92,82%; 93,94%; hingga mencapai 94,21% pada tahun 2024.

Peningkatan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk dalam kelompok angkatan kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan. Meskipun fluktuasi terjadi pada jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja setiap tahunnya, tren rasio ini tetap mengarah positif. Hal ini mencerminkan kondisi pasar kerja yang relatif stabil dan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang membaik.

2.1.3.2.4. ***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja***

Mengacu pada definisi Booklet Sakernas, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menunjukkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk usia produktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Angka ini mencerminkan seberapa besar potensi tenaga kerja yang tersedia dan aktif di pasar kerja suatu wilayah.

TPAK sendiri merupakan indikator penting dalam perencanaan ketenagakerjaan karena memberikan gambaran mengenai potensi tenaga kerja yang siap dimobilisasi. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja terlibat dalam pasar tenaga kerja, sedangkan TPAK yang rendah dapat mengindikasikan hambatan partisipasi seperti keterbatasan akses pekerjaan, beban rumah tangga, atau ketimpangan sosial dan ekonomi.

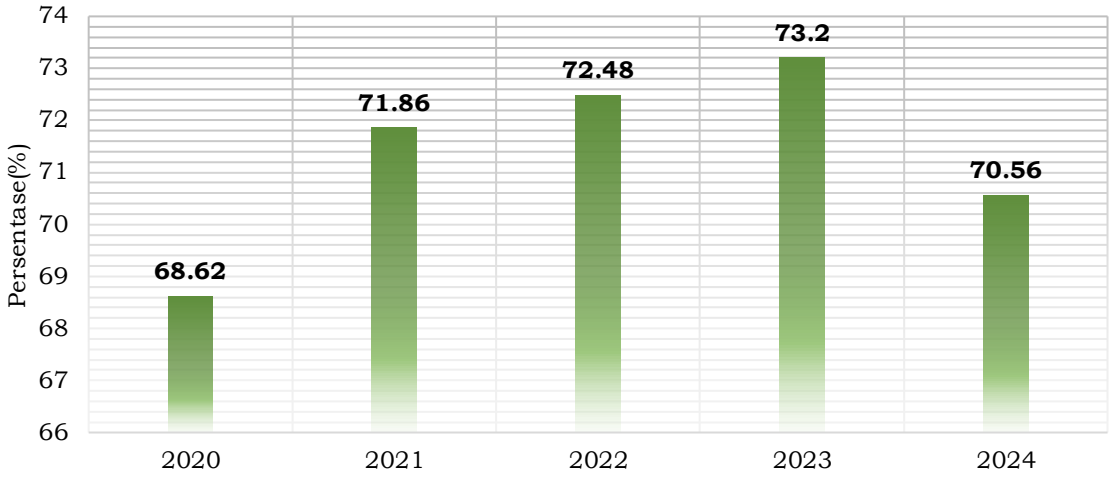

Gambar II.36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPS DIY – Sakernas Agustus, 2025

Selama periode 2020–2024, TPAK di Kota Yogyakarta menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2020, nilai TPAK tercatat sebesar 68,62%, kemudian terus mengalami kenaikan hingga mencapai 70,56% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik dengan bekerja maupun sedang mencari pekerjaan.

Tren peningkatan TPAK ini dapat diartikan sebagai sinyal positif terhadap dinamika ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi sehingga memperkuat potensi pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.3.2.5. ***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan***

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) merupakan indikator yang menunjukkan persentase perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini penting untuk memahami sejauh mana penduduk perempuan terlibat dalam kegiatan ekonomi formal dan informal.

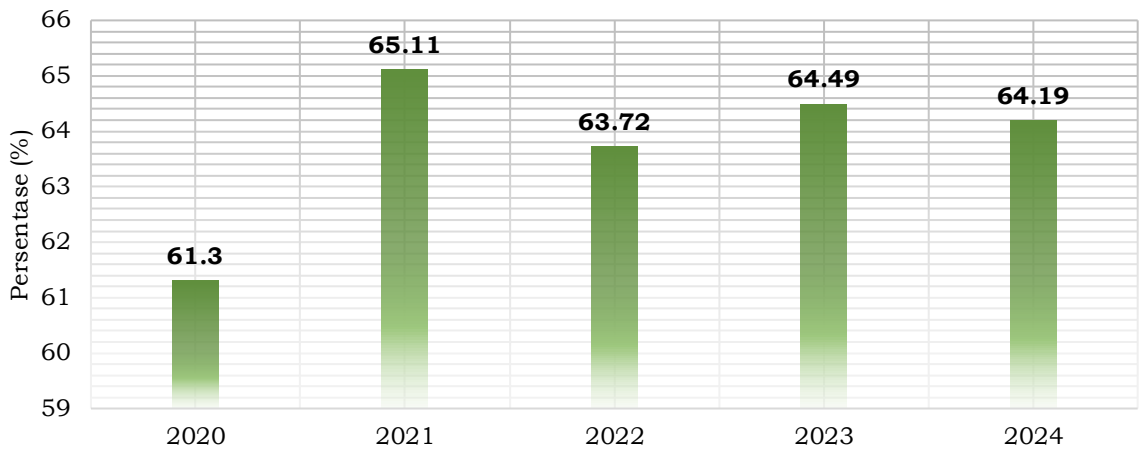

Gambar II.37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Di Kota Yogyakarta, TPAK Perempuan dalam periode 2020–2024 menunjukkan pola yang relatif fluktuatif. Pada awal pandemi Covid-19 (2020), TPAK perempuan berada di angka 61,30%. Kemudian, pada tahun 2021, angka ini meningkat menjadi 65,11% seiring dengan proses pemulihan ekonomi, di mana banyak pekerja, termasuk perempuan, kembali masuk ke pasar kerja setelah sempat terdampak pembatasan aktivitas ekonomi. Setelah itu, angka TPAK perempuan bergerak dalam kisaran 63–64%, dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 64,19%. Konsistennya angka TPAK perempuan di atas 60% mencerminkan bahwa partisipasi ekonomi perempuan di Kota Yogyakarta tergolong cukup kuat.

2.1.3.2.6. ***Indeks Inovasi Daerah***

Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indeks inovasi daerah memiliki peran penting bagi peningkatan produktivitas sektor ekonomi karena memberikan gambaran mengenai tingkat inovasi daerah yang telah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerah masing-masing.

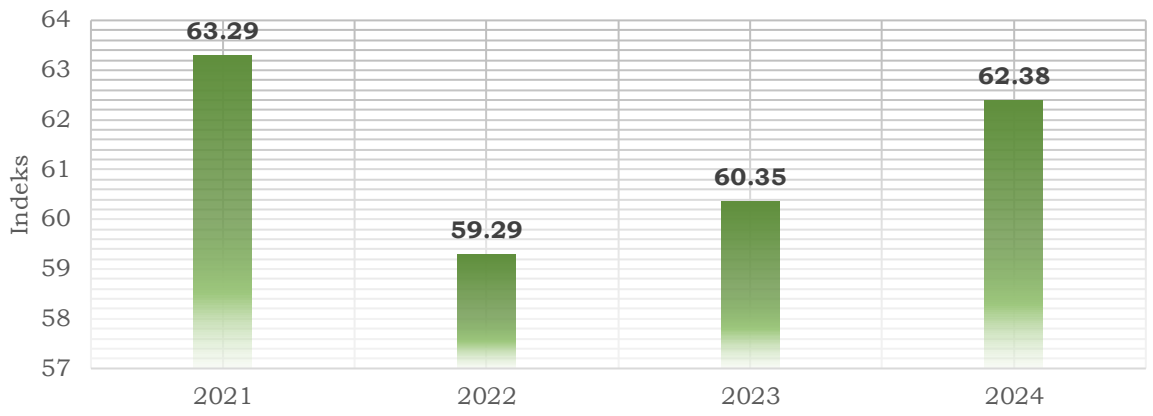

Gambar II.38 Indeks Inovasi Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021-2024

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2025

Dengan mengacu pada kriteria penilaian dalam penghitungan indeks inovasi daerah, nilai indeks inovasi daerah di Kota Yogyakarta pada periode 2021-2024 masuk dalam dua kategori. Nilai indeks inovasi daerah pada rentang 60,01 – 100 termasuk dalam kategori daerah sangat inovatif, yang dicapai Kota Yogyakarta pada tahun 2021, 2023, dan 2024.

Sementara itu, rentang 35,00 – 60,00 termasuk dalam kategori inovatif yang diperoleh Kota Yogyakarta pada tahun 2022. Pada tahun 2024, Kota Yogyakarta mengirimkan 44 inovasi daerah melalui Forum *Innovative Government Award* (IGA). Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mengirimkan 49 inovasi.

2.1.3.3. **Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**

2.1.3.3.1. ***Pembentukan Modal Tetap Bruto***

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen penting dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan nilai investasi fisik (kapital) berupa bangunan, peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya. Kapital ini digunakan sebagai input tidak langsung dalam proses produksi dan bersumber dari baik produksi domestik maupun impor.

PMTB menjadi indikator strategis untuk melihat kapasitas produksi jangka panjang, serta menjadi cerminan integrasi ekonomi suatu daerah dalam konteks nasional dan global. Semakin tinggi nilai PMTB, semakin besar pula potensi pertumbuhan ekonomi dan partisipasi dalam rantai pasok global.

Pertumbuhan PMTB umumnya dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan jalan, revitalisasi pasar dan fasilitas pangan, serta pembangunan sarana publik seperti sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Di Kota Yogyakarta, besaran nilai PMTB sendiri menunjukkan fluktuasi pertumbuhan selama periode 2020–2024 sebagaimana dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel -36 Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Total PMTB					
a. ADHB (Juta Rp)	8.940.398,0	9.930.354,2	10.693.786,10	11.543.603,20	12.099.314,74
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	5.547.823,6	6.026.212,9	6.285.800,37	6.561.014,53	6.765.982,86
Proporsi thd. PDRB (% ADHB)	25,03	25,77	25,08	24,99	24,49
Pertumbuhan					
Total PMTB (%)	-13,98	8,62	4,31	4,38	3,12

**) Angka sementara, **) Angka sangat sementara*

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2020, PMTB Kota Yogyakarta mencatat pertumbuhan negatif sebesar -13,98% sebagai akibat dari kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19 . Pemulihan ekonomi mulai terjadi pada tahun 2021, tercermin dari lonjakan pertumbuhan PMTB sebesar 8,62%. Tren positif berlanjut pada 2022 dan 2023, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,31% dan 4,38%.

Namun demikian, pada tahun 2024, pertumbuhan kembali melambat menjadi 3,12%. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh menurunnya realisasi belanja modal dalam APBD, terutama pada kategori pembangunan gedung, jaringan jalan, dan irigasi, yang berdampak pada penurunan investasi fisik dalam perekonomian.

Lebih lanjut, meskipun nilai nominal PMTB terus meningkat setiap tahun, proporsinya terhadap total PDRB cenderung menurun sejak tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PMTB berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan total PDRB.

2.1.3.4. **Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**

2.1.3.4.1. ***Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak***

Penduduk yang tinggal di Kota Yogyakarta, belum seluruhnya memiliki akses hunian layak. Indikator ini menunjukkan cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Yogyakarta. Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah keseluruhan rumah di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data di bawah, cakupan ketersediaan rumah layak huni terus mengalami peningkatan. Cakupan rumah layak huni pada tahun 2020 menunjukkan angka 97,89% dan pada tahun 2024 menunjukkan angka 98,70%. Peningkatan terjadi karena adanya kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui APBD Kota Yogyakarta, APBD DIY, dan pendanaan CSR. Berikut cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Yogyakarta.

Tabel -37 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	122.310	122.764	122.924	123.139	123.324
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	2.640	2.187	2.027	1.812	1.627
3	Jumlah Seluruh Rumah	Unit	124.951	124.951	124.951	124.951	124.951
4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen3	97,89	98,25	98,38	98,55	98,70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025

2.1.3.4.2. ***Kecepatan Rata-Rata Kendaraan***

Kecepatan rata-rata kendaraan ditentukan berdasarkan total jarak yang ditempuh terhadap total waktu perjalanan. Kecepatan rata-rata kendaraan berperan dalam mengetahui kondisi lalu lintas, efisiensi sistem transportasi dan infrastruktur jalan.

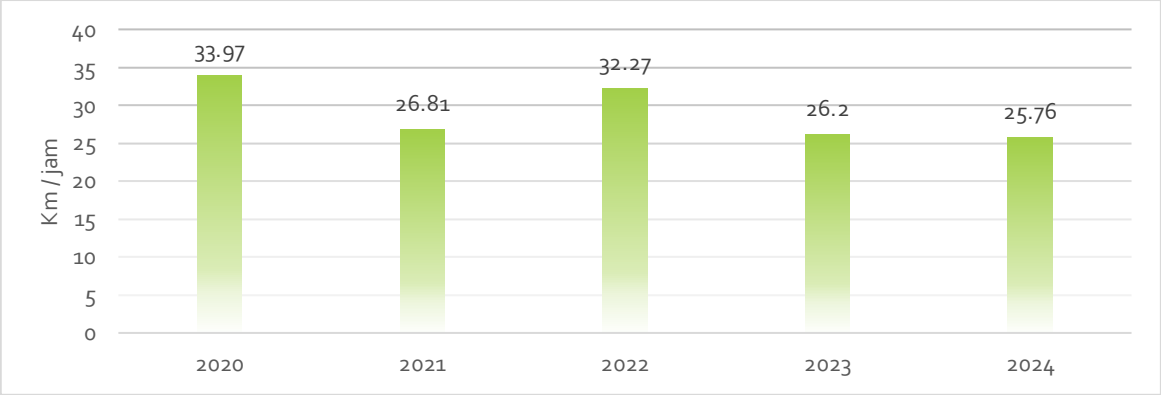

Gambar II.39 Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025

Fluktuasi kecepatan rata-rata kendaraan di Kota Yogyakarta ditandai dengan peningkatan di tahun 2020 dan 2022. Pada tahun 2020, peningkatan kecepatan rata-rata disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak dengan berkurangnya aktivitas lalu lintas yang memudahkan kendaraan lebih cepat bergerak. Sedangkan pada tahun 2022, peningkatan kecepatan rata-rata kendaraan disebabkan oleh dua aspek, yaitu penerapan sistem *gyratory* di beberapa ruas jalan yang berdampak pada kelancaran lalu lintas dan survei kecepatan rata-rata kendaraan yang tidak dilakukan pada bulan September, tetapi di bulan Mei s.d Agustus.

2.1.3.5. Stabilitas Ekonomi Makro dan Iklim Investasi

2.1.3.5.1. *Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB*

Rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah indikator yang menggambarkan kapasitas fiskal daerah dalam mengumpulkan pendapatan dari aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayahnya. Rasio ini diperoleh dari perbandingan antara total penerimaan pajak daerah dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kontribusi pendapatan pajak terhadap ukuran ekonomi daerah, yang mencerminkan efektivitas pemungutan pajak dari basis ekonomi lokal.

Di Kota Yogyakarta, rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan tren meningkat selama periode 2020–2023. Pada tahun 2020, rasio tercatat

sebesar 0,96%, dan meningkat bertahap hingga mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 1,19%. Namun, pada tahun 2024, rasio ini sedikit menurun menjadi 1,17% sebagaimana dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel -38 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Pajak Daerah	Miliar Rupiah	342,78	372,46	482,27	552,12	575,87
PDRB ADHB	Miliar Rupiah	36.492,64	35.724,05	42.621,75	46.193,84	49.389,88
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,94	1,04	1,13	1,19	1,17

Sumber: DJPK Kemenkeu dan Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022 & 2025, Hasil Olahan, 2025

Di Kota Yogyakarta, rasio ini mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, mencerminkan efektivitas pemungutan pajak seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun pada tahun 2024, meskipun penerimaan pajak daerah secara nominal meningkat menjadi 575,87 Miliar Rupiah, rasio pajaknya justru menurun dari 1,19% (2023) menjadi 1,17%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak, terutama jika sektor yang tumbuh memiliki potensi pajak yang relatif rendah.

Penurunan rasio ini kemudian dapat dijelaskan oleh dinamika struktur ekonomi Kota Yogyakarta. Dalam konteks ini, terdapat pergeseran kontribusi sektoral dalam PDRB, seperti meningkatnya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa keuangan dan asuransi, sedangkan sektor industri pengolahan dan konstruksi justru mengalami penurunan.

Adapun sektor-sektor yang tumbuh pesat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terefleksikan dalam basis penerimaan pajak daerah. Hal ini menandakan adanya celah antara potensi ekonomi riil dengan efektivitas sistem perpajakan daerah dalam menangkap pertumbuhan tersebut.

Di sisi lain, penerimaan Kota Yogyakarta dari pos bagi hasil pajak pusat juga menunjukkan tren menurun dalam tiga tahun terakhir, dari Rp57,58 miliar pada 2022 menjadi Rp52,83 miliar pada 2024. Kontraksi ini terutama disebabkan oleh penurunan drastis pada pos Pajak Bumi dan Bangunan serta nihilnya pendapatan dari PPh Pasal 25/29 di 2024. Ketidaksinkronan antara pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak daerah, dan alokasi bagi hasil menegaskan perlunya optimalisasi basis pajak, peningkatan akurasi data ekonomi sektoral, serta penguatan koordinasi fiskal antara pusat dan daerah untuk menjaga kesinambungan kapasitas fiskal Kota Yogyakarta.

2.1.3.5.2. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sementara retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan.

Pajak dan retribusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Jumlah jenis pajak dan retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta juga mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PERDA Kota Yogyakarta No. 10/2023).

Jumlah jenis pajak yang diberlakukan di Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2020-2024 tidak berubah, yaitu sepuluh jenis pajak daerah. Sumber

pendapatan pajak daerah di Kota Yogyakarta terdiri dari: (1) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, (2) Pajak Air Tanah, (3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (4) Pajak Hiburan, (5) Pajak Hotel, (6) Pajak Parkir, (7) Pajak Penerangan Jalan, (8) Pajak Reklame, (9) Pajak Restoran, dan (10) Pajak Sarang Burung Walet.

Lebih lanjut, jumlah jenis retribusi di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2020-2024 juga tidak mengalami perubahan, yaitu 14 jenis retribusi. Retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta terdiri dari: (1) pelayanan kesehatan; (2) pelayanan persampahan/kebersihan; (3) pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; (4) pelayanan parkir di tepi jalan umum; (5) pelayanan pasar; (6) pengujian kendaraan bermotor; (7) pengolahan limbah cair; (8) pelayanan tera/tera ulang; (9) perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing; (10) pemakaian kekayaan daerah; (11) tempat khusus parkir; (12) rumah potong hewan; (13) penjualan produksi usaha daerah; (14) izin mendirikan bangunan (IMB).

Tabel -39 Jenis Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pendapatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak	jenis	10	10	10	10	10
2	Retribusi	jenis	14	14	14	14	14
Jumlah			24	24	24	24	24

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025

Meskipun secara jenis dan jumlah tidak mengalami perubahan, nilai penerimaan dari pajak dan retribusi daerah mampu menunjukkan dinamika yang mencerminkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Penerimaan pajak dan retribusi daerah sendiri sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan pembatasan aktivitas masyarakat. Akan tetapi, sejak 2021, tren pemulihan ekonomi mendorong peningkatan signifikan pada realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Yogyakarta.

Pada 2024, penerimaan pajak daerah tercatat sebesar Rp575,87 miliar dan retribusi daerah mencapai Rp76,24 miliar. Dengan demikian, total

penerimaan daerah dari kedua pos penerimaan, yakni pajak dan retribusi daerah, mampu mencapai sebesar Rp652,11 miliar—angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Komposisi kontribusi juga menunjukkan pola yang khas. Pajak hotel menjadi penyumbang terbesar pajak daerah tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 9,22% dari total penerimaan pajak daerah. Nilai ini mencerminkan peran penting sektor pariwisata dan perhotelan dalam perekonomian daerah Kota Yogyakarta. Sementara itu, dari sisi retribusi, kategori jasa umum mendominasi dengan kontribusi berkisar 59% dari total retribusi yang menunjukkan bahwa layanan dasar, seperti halnya kesehatan, kebersihan, dan pasar tetap menjadi prioritas utama dalam pelayanan publik yang dikenai tarif oleh pemerintah kota.

Kestabilan jumlah jenis pungutan ini di satu sisi memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi, namun di sisi lain juga menuntut optimalisasi dari sisi pengelolaan, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan masyarakat untuk mencapai potensi fiskal daerah yang maksimal.

Tabel -40 Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pendapatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Daerah	juta rupiah	342.781	372.463	482.270	552.125	575.872
2	Retribusi Daerah	juta rupiah	23.311	26.855	29.052	29.670	76.242
Jumlah		juta rupiah	483.694	366.091	399.318	511.321	652.114

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025

2.1.3.5.3. ***Tingkat Inflasi***

Indeks perkembangan harga atau inflasi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Berikut data indeks perkembangan harga/inflasi di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

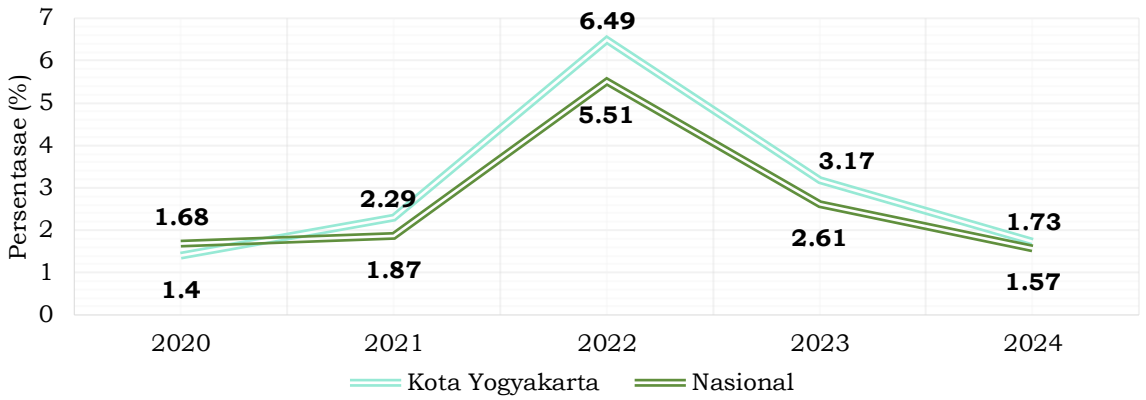

Gambar II.40 Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta terhadap Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, tingkat inflasi tahunan di Kota Yogyakarta periode 2020–2024 memperlihatkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 1,40%, relatif rendah karena melemahnya permintaan akibat pandemi Covid-19 . Inflasi meningkat secara bertahap di tahun 2021 menjadi 2,29%, sejalan dengan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Peningkatan tajam terjadi pada tahun 2022 ketika inflasi melonjak hingga mencapai 6,49%, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 5,51%.

Menurut publikasi "Inflasi Kota Yogyakarta 2022" oleh BPS Kota Yogyakarta, dari sebelas kelompok pengeluaran, sepuluh di antaranya memberikan andil positif terhadap inflasi. Kontributor terbesar adalah kelompok pengeluaran Transportasi dengan andil 1,94%, diikuti kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 1,55%, serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,93%.

Dalam konteks kelompok pengeluaran Transportasi, salah satu penyebab kenaikan inflasi pada tahun 2022 ialah tingginya harga komoditas minyak dunia yang menyebabkan Pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite sebesar 30,72%, Solar sebesar 32,04%, dan Pertamax sebesar 16%.

Lebih lanjut, dari sisis kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, kenaikan harga disumbangkan oleh peningkatan harga global yang tajam

dari komoditas minyak kelapa sawit (*crude palm oil*) yang menyebabkan tingginya harga minyak goreng dan kelangkaan pasokan minyak goreng.

Memasuki tahun 2023, tekanan inflasi berhasil dikendalikan dengan baik, yang tercermin dari turunnya angka inflasi menjadi 3,17%. Penurunan ini mengindikasikan efektivitas kebijakan stabilisasi harga dan perbaikan distribusi barang serta bahan pokok di kota tersebut. Adapun pada tahun 2024, inflasi Kota Yogyakarta terus menurun ke angka yang lebih rendah, yakni sebesar 1,73%, menunjukkan tingkat stabilitas harga yang semakin baik sejalan dengan inflasi nasional yang juga turun ke 1,57%.

Secara keseluruhan, tren inflasi Kota Yogyakarta selama periode lima tahun tersebut mencerminkan kondisi ekonomi kota yang responsif terhadap dinamika nasional dan global. Meski mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022 akibat tekanan harga transportasi serta bahan pangan, langkah-langkah pengendalian harga yang diambil mampu menstabilkan inflasi di tahun-tahun berikutnya. Hal ini memperlihatkan respons kebijakan yang relatif efektif dari pemerintah dalam mengelola fluktuasi harga dan menjaga daya beli masyarakat.

2.1.4. **Aspek Pelayanan Umum**

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegrasi dan Adaptif

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan disajikan secara utuh melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebagai instrumen strategis dan sistematis untuk melakukan perbaikan dan perubahan mendasar, menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk menggambarkan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis) dan sumber daya manusia (aparatur), maka dilakukan penilaian melalui indeks reformasi birokrasi (RB). Nilai indeks reformasi birokrasi menjadi dasar

pengelompokan kondisi reformasi daerah ke dalam kategori Istimewa (90–100), Memuaskan (80–90), Sangat Baik (70–80), Baik (60–70), Cukup (50–60), Kurang (30–50), dan sangat kurang (0-30).

Secara umum, nilai indeks reformasi birokrasi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung terus mengalami perbaikan. Nilai indeks reformasi birokrasi terendah yang dicapai Kota Yogyakarta tercatat pada tahun 2020 sebesar 76,17. Sementara itu, nilai indeks reformasi birokrasi tertinggi dicapai pada tahun 2024 sebesar 91,57 dengan predikat A- atau terjadi peningkatan Indeks RB dari predikat BB di tahun sebelumnya. Namun, hasil evaluasi tahun 2023 dan tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

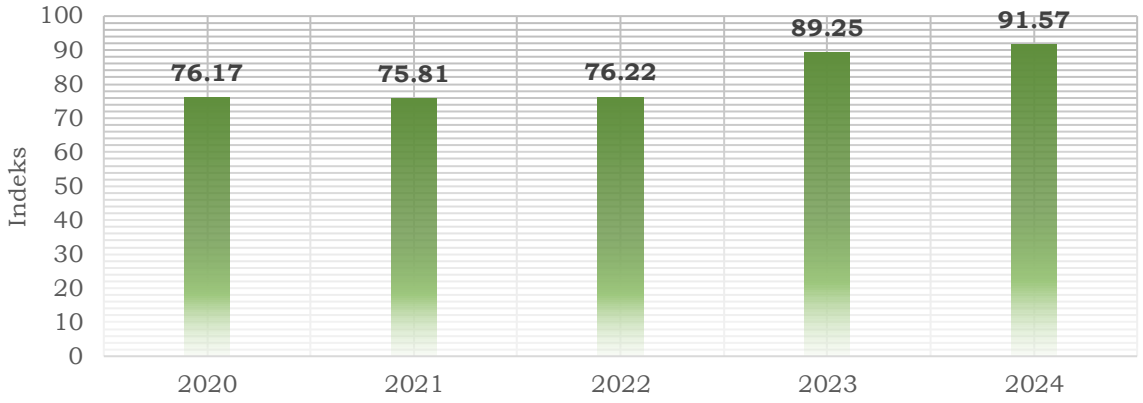

Gambar II.41 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: LHE RB dari KemenPANRB, 2025

Indeks Reformasi Birokrasi terdiri atas dua pendekatan, yaitu RB General dan RB Tematik, yang di dalamnya terdapat beberapa indikator penyusun. Berdasarkan PermenPANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, RB General mencakup 9 area perubahan dan RB Tematik mencakup 4 fokus strategis nasional.

Reformasi Birokrasi tidak hanya mencakup perubahan struktural dan manajerial dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi jembatan

utama dalam mencapai sasaran transformasi kelembagaan. Oleh karena itu, indikator dan capaian dalam urusan perencanaan, urusan kepegawaian kualitas pelayanan publik, reformasi hukum, urusan pengelolaan keuangan daerah, urusan pengawasan, dan berbagai kebijakan tata kelola lain yang sebelumnya dipisahkan analisis maupun penjelasannya, dilebur menjadi satu kesatuan pembahasan karena telah terintegrasi ke dalam Indeks Reformasi Birokrasi khususnya Indeks Reformasi Birokrasi General.

Tabel II.42 Target dan Realisasi RB General 2023 - 2024

Sasaran Strategis	Sasaran (*Inmmediate Outcome*)	Kegiatan Utama (*Mandatory*)	Indikator Kegiatan Utama	*Baseline* Tahun 2022	Target dan Realisasi Per Tahun			
					2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	**S.1 Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi**	KU.1 Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*	Capaian Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah: a. Penyederhanaan Birokrasi	100% (Baik)	Baik	-	Baik	-
			b. Persentase Capaian Penyederhanaan Organisasi Pemerintah Daerah	91% (Baik)	Baik	-	Baik	-
	S.2 Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	KU.2 Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	-	Baik	4	Baik	4
	S.3 Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	KU.3 Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,98 (Baik)	Baik	3,41 (Baik)	Baik	3,5
			Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	-	Baik	-	Baik	2
	S.4 Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	KU.4 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	93,7 (Sangat Baik)	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-
			Nilai SAKIP	83,67 (A)	A	84,17 (A)	A	84,84
	S.5 Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)	KU.5 Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	-	Baik	-	Baik	-

Sasaran Strategis	Sasaran (*Inmmediate Outcome*)	Kegiatan Utama (*Mandatory*)	Indikator Kegiatan Utama	*Baseline* Tahun 2022	Target dan Realisasi Per Tahun			
					2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
	S.6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan	KU.6 Pembangunan Zona Integritas (ZI) di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	-	-	0,5	Baik	0,5
		KU.7 Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	3,4
		KU.8 Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	-	Baik	2 (Kurang Baik)	Baik	5
		KU.9 Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Waspada	TerJAGA	(81,27) TerJAGA	TerJAGA	79,39
	S.7 Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	KU.10 Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	48,88 (Kurang)	Sangat Baik	86,8 (Sangat Baik)	Sangat Baik	86,8
		KU.11 Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	-	Sangat Baik	86,35 (Sangat Baik)	Sangat Baik	97,46
	S.8 Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	KU.12 Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	93,28 (Sangat Memuaskan)	Sangat Memuaskan	95,26 (Sangat Memuaskan)	Sangat Memuaskan	98,09
		KU.13 Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	Baik	2,05 (Cukup)	Baik	2,85

Sasaran Strategis	Sasaran (*Inmmediate Outcome*)	Kegiatan Utama (*Mandatory*)	Indikator Kegiatan Utama	*Baseline* Tahun 2022	Target dan Realisasi Per Tahun			
					2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
	S.9 Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	KU.14 Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	59,7 (Cukup)	Baik	77,07 (Baik)	Baik	84,21
		KU.15 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Capaian Akuntabilitas Keuangan: Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Capaian Akuntabilitas Keuangan: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	91%	Baik	96,4%	Baik	98,68
SS.2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	**S.1 Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional**	KU.16 Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	300,5 (Baik)	Sangat Baik	332,5 (Sangat Baik)	Sangat Baik	332,5 (Sangat Baik)
	S.2 Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	KU.17 Penguatan Manajemen Talenta ASN	Indeks Sistem Merit	300,5 (Baik)	Sangat Baik	332,5 (Sangat Baik)	Sangat Baik	332,5 (Sangat Baik)
	S.6 Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	KU.18 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Indeks Sistem Merit	300,5 (Baik)	Sangat Baik	332,5 (Sangat Baik)	Sangat Baik	332,5 (Sangat Baik)
	S.7 Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	KU. 19 Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	300,5 (Baik)	Sangat Baik	332,5 (Sangat Baik)	Sangat Baik	332,5 (Sangat Baik)
		KU.20 Pelaksanaan *Core Values* ASN	Indeks BerAKHLAK	62,8% (Cukup Sehat)	B (Cukup Sehat)	62,7% (B, Cukup Sehat)	B (Cukup Sehat)	74,46%
			Nilai *Employer Branding* ASN	-	Baik	-	Baik	-

Sasaran Strategis	Sasaran (*Inmmediate Outcome*)	Kegiatan Utama (*Mandatory*)	Indikator Kegiatan Utama	*Baseline* Tahun 2022	Target dan Realisasi Per Tahun			
					2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
		KU.21 Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,55 (Pelayanan Prima)	Pelayanan Prima	4,41 (Pelayanan Prima)	Pelayanan Prima	4,53
			Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	90,75 (Zona Hijau Kualitas Tertinggi)	Zona Hijau Kualitas Tertinggi	96,13 (Zona Hijau Kualitas Tinggi)	Zona Hijau Kualitas Tertinggi	98,91
			Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,24 (Baik)	Baik	84,26 (Baik)	Baik	85,58

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2025

Pada Kota Yogyakarta, secara umum, pelaksanaan reformasi birokrasi telah berjalan cukup baik, rata-rata penilaian setiap komponen berada pada kategori "baik" hingga "sangat baik". Beberapa komponen RB General Kota Yogyakarta yang sudah memiliki predikat sangat baik/sangat memuaskan beberapa di antaranya adalah Indeks Sistem Merit, Tingkat Digitalisasi Arsip, dan Indeks Reformasi Hukum.

Namun, yang menjadi tantangan adalah masih terdapat beberapa komponen yang perlu dioptimalkan, khususnya yang masih bernilai cukup maupun yang trennya menurun beberapa di antaranya seperti Indeks BerAKHLAK, Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Komponen yang saat ini memiliki predikat baik juga perlu dioptimalkan agar mencapai predikat sangat baik/sangat sehat/sangat memuaskan/dsb. Masing-masing komponen ini juga memiliki beberapa sub-komponen penyusun. Beberapa indikator dan capaian yang sebelumnya dibahas secara terpisah per urusan merupakan bagian dari sub-komponen tersebut reformasi birokrasi tersebut.

2.1.4.2 Hukum yang Berkeadilan dan Keamanan yang Tangguh

Tingkat Kriminalitas

Tingkat Kriminalitas adalah perbandingan jumlah laporan tindak kriminalitas per 100.000 penduduk. Jenis pelanggaran/kejahatan yang termasuk ke dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kota Yogyakarta antara lain pencurian pemberatan, pencurian kekerasan, pencurian motor, pemerasan, penipuan, dan sebagainya. Kriminalitas adalah permasalahan yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kriminalitas yang tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan sehingga seluruh pihak harus mendukung upaya penurunan kriminalitas. Keamanan merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh investor untuk membuat keputusan terkait investasi; tingkat kriminalitas yang tinggi dapat menciptakan persepsi negatif terhadap keamanan investasi dan potensi risiko operasional. Selain itu, tingkat kriminalitas yang rendah dapat mencerminkan stabilitas sosial yang baik sehingga mendukung keberlanjutan investasi jangka panjang.

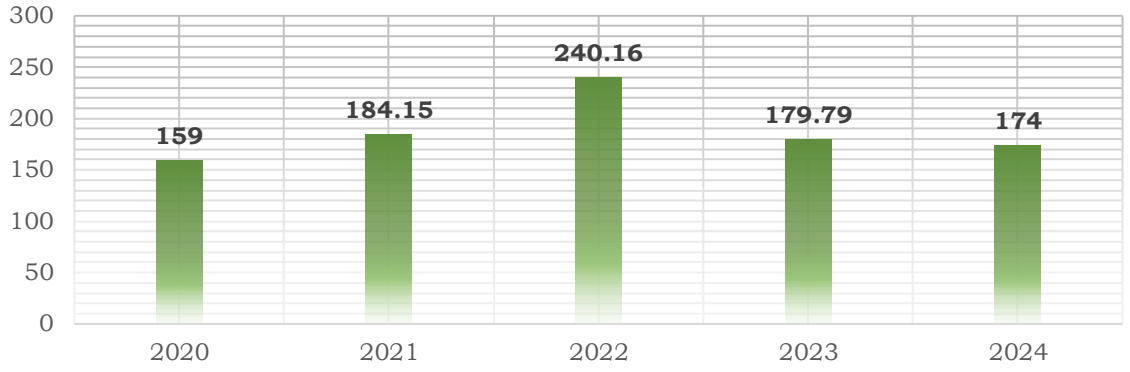

Gambar II.42 Tingkat Kriminalitas per 100.000 Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Polresta Kota Yogyakarta dan BPS Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025

Pada tahun 2024 tingkat kriminalitas di Kota Yogyakarta didominasi oleh kasus lainnya (narkoba, UU ITE/Ilegal akses, tindak pidana perdagangan orang, dan lain-lain) sebanyak 141 kasus, kasus penipuan sebanyak 82 kasus, pencurian sebanyak 68 kasus, serta penganiayaan sebanyak 60

kasus. Selain tingkat kriminalitas yang dilaporkan, terdapat indikator angka kriminalitas yang tertangani. Perhitungan angka kriminalitas yang tertangani didapatkan dari hasil perbandingan jumlah tindak kriminal tertangani dengan jumlah laporan tindak kriminalitas dalam satu tahun.

Tabel -41 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas	Kasus	373	516	695	692	406
2.	Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas	Kasus	594	693	910	819	502
3.	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Persen	62,79	74,46	76,37	84,49	80,88

Sumber: Polresta Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data yang ada, angka kriminalitas yang tertangani di Kota Yogyakarta yang semula mengalami peningkatan, mulai menunjukkan penurunan di tahun 2024. Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Yogyakarta sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 . Akan tetapi, pada tahun selanjutnya, angka kriminalitas yang tertangani mengalami peningkatan karena pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang membuat tingkat mobilitas masyarakat kembali meningkat.

Upaya yang telah dilakukan Polresta Kota Yogyakarta untuk menekan angka kriminalitas: (1) peningkatan volume patroli, terutama di lokasi yang rawan kerumunan; (2) penempatan personal kepolisian di daerah rawan kejahatan; (3) pembentukan satgas saber pungli dan satgas anti *klithih*; (4) penetapan perda terkait pemasangan CCTV; serta (5) pelaksanaan operasi kepolisian secara terus menerus.

Tabel -42 Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Tindak Kriminalitas yang Tertangani	Kasus	621	516	695	692	406
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	416.117	415.509	412.797	414.705	415.605
3.	Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk	Kasus	14,92	12,42	16,84	16,69	9,77

Sumber: Polresta Kota Yogyakarta, 2025

Pada indikator angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk, terjadi penurunan drastis di tahun 2024. Tahun 2022 menjadi tahun dengan capaian tertinggi pada indikator angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk, yaitu sebesar 16,84 kasus. Sementara adanya angka kriminalitas yang tidak tertangani pada tahun 2021 disebabkan karena tersangka tindak kriminalitas yang tidak jelas karena korban tidak pernah bertemu dengan pelaku atau hanya berinteraksi secara *online*. Hal tersebut membuat penyelesaian tindak kriminalitas menjadi terhambat karena terbatasnya informasi atau data pelaku. Penurunan pada tahun 2024 dapat menunjukkan bahwa upaya pencegahan tindak kriminal yang dilakukan berjalan cukup optimal.

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Selain angka kriminalitas, kondusivitas sebuah daerah, baik dari segi keadilan dan keamanan, dapat dilihat dari indikator sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Berikut ini realisasi beberapa indikator Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Tabel -43 Indikator Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	persen	99,52	99,61	100	100	100
2	Persentase Penegakan PERDA	persen	92,4	89,97	100	100	100
3	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan perlindungan masyarakat	persen	84,18	94,73	97,72	97,22	100
4	Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	persen	88,57	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2025

Indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan dan dari tahun 2022 hingga tahun 2024 telah mencapai 100% berturut-turut. Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada (K3) dilaksanakan melalui strategi penegakan Perda secara represif yustisi dan non yustisi. Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada Kota Yogyakarta mencapai 100% yang diperoleh dari rasio jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan sejumlah 5013 pelanggaran dari 5013 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 5013 pelanggaran didapat dari Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 4918 pelanggaran dan secara yustisi sebesar 95 pelanggaran. Adapun kenaikan jumlah pelanggaran perda dan Perkada pada Tahun 2023 terdapat pada pelanggaran Perda terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perkada/Perwal tentang larangan penggunaan kendaraan dengan penggerak motor listrik, dan Perda yang mengatur tentang PKL. Hal ini merupakan ekses dari lonjakan jumlah wisatawan khususnya di Kawasan Malioboro yang berpotensi meningkatkan pelanggaran perda dan Perkada tersebut di atas.

Pada tahun 2023 terjadi pelanggaran Perda sejumlah 95 kasus dan dapat terselesaikan semua. Jumlah pelanggaran ini turun dibandingkan dengan pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun 2022. Jumlah pelanggaran Perda Kota Yogyakarta didasarkan pada hasil penegakan secara yustisi dan telah terbukti melakukan pelanggaran Perda melalui proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP. Penyelesaian penegakan Perda berdasarkan Berita Acara Penyidikan (BAP) yang selanjutnya dilakukan pelimpahan berkas pelanggaran ke Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta untuk dilakukan sidang pelanggaran Perda. Persentase penyelesaian penegakan Perda tercapai 100%dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan tersangka pelanggaran dalam memenuhi Surat Panggilan pemeriksaan oleh PPNS. Adapun penurunan jumlah pelanggaran Perda secara yustisi dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi oleh intensitas pelanggaran secara yustisi menurun dan penegakan pelanggaran Perda yustisi diharapkan menjadi tindakan paling akhir dalam penyelesaian pelanggaran Perda (*ultimum remedium*).

Indikator persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat terealisasi 97,22% dengan tingkat capaiannya sebesar 100,37% pada tahun 2023 dan 2024. Indikator ini mengalami perubahan pada target kinerja menyesuaikan dengan kondisi yang dinamis pada tahun berjalan serta optimalisasi kualitas kinerja Perangkat Daerah, sehingga data pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan data pada tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi indikator kinerja persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebesar 100% selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Data potensi gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Yogyakarta sejumlah 150 potensi gangguan diperoleh dari laporan kegiatan operasional pengamanan, diantaranya laporan kegiatan pengamanan umum, pengamanan *event* di Kota Yogyakarta, penjagaan objek vital, adanya laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta laporan kegiatan pengamanan tertutup

oleh anggota intel Pol PP. Penyelesaian terhadap laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ditindaklanjuti dengan melakukan upaya mediasi oleh petugas Satpol PP dengan tujuan untuk menghindari potensi terjadinya konflik horizontal yang lebih meluas. Dari sejumlah potensi gangguan di tahun 2024 dapat dikendalikan seluruhnya oleh petugas sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaan kegiatannya.

2.1.4.2. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah Kota Yogyakarta Terhadap DIY dan Nasional

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Yogyakarta secara umum lebih tinggi dibandingkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nasional. Skor IDSD Kota Yogyakarta tahun 2024 adalah 4,39, sedangkan DIY dan Nasional adalah 3,97 dan 3,43. Hampir seluruh pilar IDSD Kota Yogyakarta memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan DIY maupun Nasional, kecuali pada pilar 4 (pilar stabilitas ekonomi makro) jika dibandingkan keduanya dan pilar 6 (pilar keterampilan) serta pilar 12 (pilar kapabilitas inovasi) jika dibandingkan dengan DIY.

Tabel -44 Indeks Daya Saing Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tingkat	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kota Yogyakarta	4,67	4,34	5,00	3,94	4,17	4,27	4,26	4,97	4,34	4,61	3,70	4,39	4,39
DIY	4,53	3,17	4,36	4,14	4,18	4,43	3,10	4,58	2,78	4,28	3,37	4,72	3,97
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43

Keterangan:

Pilar 1: Institusi	*Pilar 2: Infrastruktur*	*Pilar 3: Adopsi TIK*
Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro	*Pilar 5: Kesehatan*	*Pilar 6: Keterampilan*
Pilar 7: Pasar Induk	*Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja*	*Pilar 9: Sistem Keuangan*
Pilar 10: Ukuran Pasar	*Pilar 11: Dinamisme Bisnis*	*Pilar 12: Kapabilitas Inovasi*

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2025

2.1.4.3. **Perkembangan Pembangunan Kemantren**

Tingkat keberhasilan pembangunan di wilayah kemantren dapat diukur menggunakan indikator berupa nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren. Nilai ini dihitung dari rata-rata nilai perkembangan pembangunan seluruh kelurahan yang berada di dalam satu kemantren. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka semakin baik capaian pembangunan di wilayah tersebut.

Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, terjadi trend peningkatan pembangunan di sebagian besar wilayah kemantren di Kota Yogyakarta. Meskipun demikian, masih terdapat variasi capaian antar wilayah. Pada tahun 2024, nilai tertinggi tercatat sebesar 409 yang dicapai oleh Kemantren Danurejan, sedangkan nilai terendah berada pada angka 372 yang dicapai oleh Kemantren Gondomanan.

Tabel II- Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Kemantren	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tegalrejo	362	369	388	377	389
2	Jetis	377	399	402	403	404
3	Gondokusuman	395	401	391	399	399
4	Danurejan	401	402	408	409	409
5	Gedongtengen	365	360	367	374	390
6	Ngampilan	383	382	382	392	395
7	Wirobrajan	372	377	378	379	380
8	Mantrijeron	376	378	381	384	385
9	Kraton	351	362	383	393	397
10	Gondomanan	387	385	376	379	372
11	Pakualaman	349	372	399	409	407
12	Mergangsan	391	396	400	401	400
13	Umbulharjo	382	377	381	388	388

14	Kotagede	400	396	398	399	402

Sumber:

2.1.4.4. **Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah**

Urusan Pendidikan

a. ***Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***

Indikator Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan perhitungan dari rasio antara jumlah siswa pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA)/Penitipan Anak dengan jumlah anak yang berusia 4 sampai 6 tahun. Berikut data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

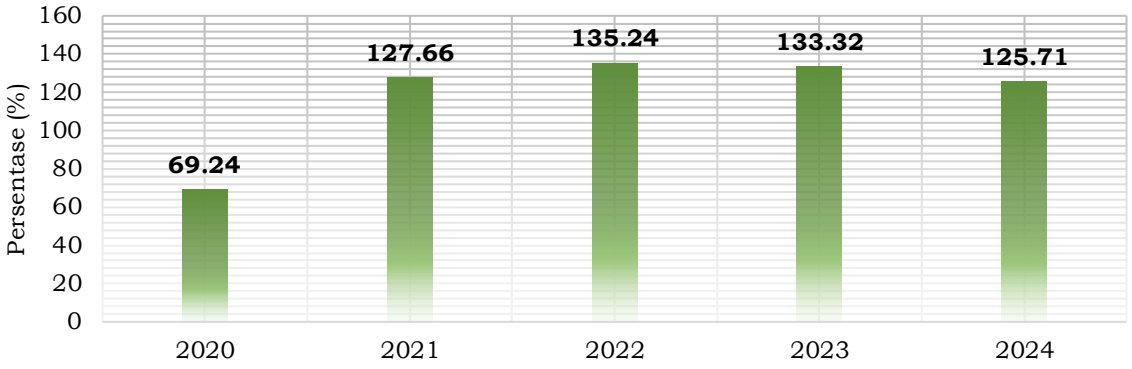

Gambar II.43 Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di atas terdiri dari siswa yang berdomisili baik di Kota Yogyakarta maupun di luar Kota Yogyakarta. Berdasarkan data tersebut, rasio PAUD di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2022, tetapi pada dua tahun terakhir mengalami penurunan. Rasio PAUD melebihi angka 100% menunjukkan bahwa terdapat banyak anak dari luar kota yang bersekolah di TK/RA/Penitipan anak di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020, rasio PAUD cenderung rendah yaitu 69,24% akibat terdampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan proses pembelajaran dilakukan secara daring sehingga banyak orang tua yang menunda untuk memasukkan anaknya pada jenjang TK.

Pada tahun 2021 hingga 2022, rasio PAUD mengalami peningkatan signifikan menjadi 135,24% karena masa peralihan *new normal* dari pandemi Covid-19 . Peningkatan yang cukup signifikan juga disebabkan jumlah ibu bekerja semakin tinggi dan adanya kesadaran untuk mendapatkan pendidikan lebih dini bagi anak balita. dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan karena jumlah siswa dan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta juga mengalami penurunan. Penurunan pada tahun 2024 diakibatkan oleh tutupnya 23 Satuan PAUD Sejenis (SPS) di 10 kemantren akibat kendala sinkronisasi Dapodik Kota Yogyakarta dan terdapat SPS yang sudah tidak aktif kegiatan pembelajarannya.

b. ***Angka Partisipasi Kasar***

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang pada suatu tahun dari berbagai usia sedang sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pada suatu tahun berada pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Indikator APK dapat digunakan untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK pada jenjang pendidikan apa pun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, meskipun mengabaikan aspek usia dari siswa yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. Berikut data APK di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

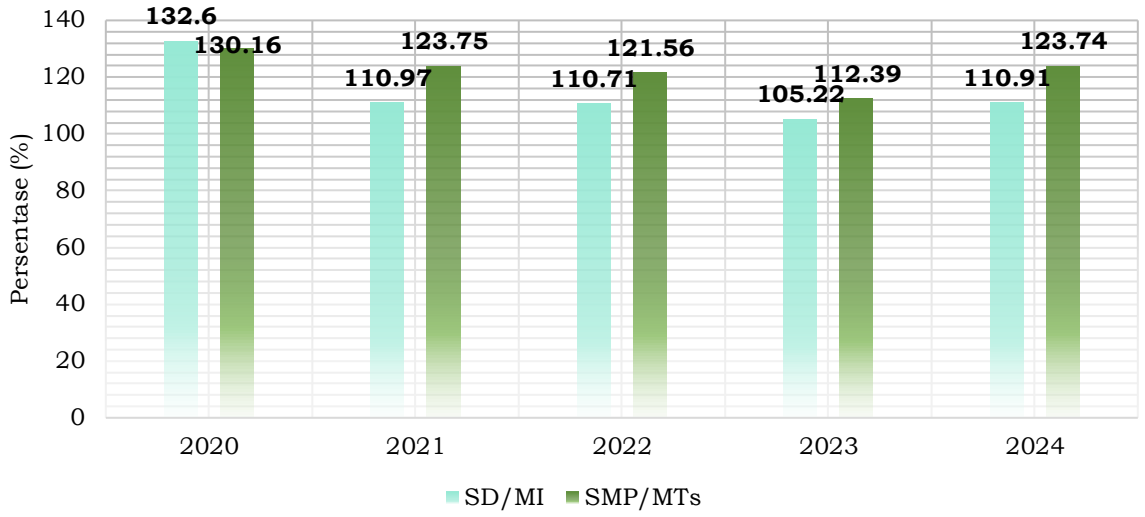

Gambar II.44 Angka Partisipasi Kasar Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan tabel di atas, APK dari setiap jenjang pendidikan memiliki nilai lebih dari 100% sehingga menunjukkan bahwa terdapat banyak penduduk dari luar Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020 sampai tahun 2024, APK pada jenjang SD/MI cenderung mengalami penurunan dari 132,3% menjadi 110,91%, meskipun pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sama halnya dengan APK jenjang SMP/MTs, pada kurun waktu 2020 hingga 2024 terus mengalami penurunan yaitu dari 130,16% menjadi 123,74%, meskipun tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Penurunan tersebut terjadi karena adanya pemberlakuan kebijakan Permendikbud terkait PPDB yang berdasar sistem zonasi, sehingga mengakibatkan minat penduduk luar kota bersekolah di Kota Yogyakarta juga menurun. Selain itu jumlah penduduk 7-12 tahun dan 13-15 tahun di Kota Yogyakarta lebih kecil dibandingkan jumlah siswa dan pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan jumlah kenaikan siswa yang seimbang.

c. ***Angka Partisipasi Murni***

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk kelompok usia tersebut. APM dianggap lebih mampu untuk menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia

tertentu di jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan APK. Berikut data Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	Persen	130,13	105,83	105,08	105,95	104,67
2	SMP/MTs	Persen	107,61	110,81	108,03	108,58	108,1

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, APM pada jenjang SD/MI pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan jumlah siswa usia 7-15 tahun dan penduduk usia 7-15 tahun. Untuk APM pada jenjang SMP/MTs pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Nilai-nilai APM pada setiap jenjang sebagian besar berada di atas angka 100% sehingga mengindikasikan kecenderungan kondisi daya serap pendidik yang lebih baik dan semakin banyak penduduk usia sekolah pada tiap jenjang yang menikmati pendidikan sesuai dengan usianya. Selain itu kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta yang masih unggul sehingga menjadi referensi masyarakat DIY.

d. ***Angka Partisipasi Sekolah***

Angka Partisipasi Sekolah adalah perhitungan hasil membagi jumlah siswa kelompok usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Berikut data Angka Partisipasi Sekolah Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Angka Partisipasi Sekolah Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	Persen	99,99	99,99	99,99	100	99,99
2	SMP/MTs	Persen	100	99,98	99,97	99,99	99,98

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, APS pada jenjang SD/MI pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung stabil dengan capaian yang tinggi. Pada tahun 2024,

jenjang SD mengalami penurunan diakibatkan terdapat 1 siswa yang tidak melanjutkan pendidikan. Pada APS pada jenjang SMP/MTs pada kurun waktu 2020 hingga 2024 juga memiliki angka capaian yang stabil. Penurunan tahun 2024 diakibatkan terdapat sebanyak 5 siswa tidak melanjutkan sekolah karena faktor lingkungan.

e. ***Angka Putus Sekolah***

Angka Putus Sekolah menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan jumlah seluruh murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Berikut data angka putus sekolah di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	Persen	0	0,01	0,01	0	0,003
2	SMP/MTs	Persen	0,02	0,02	0,03	0,01	0,02

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, kondisi pendidikan di Kota Yogyakarta pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan angka putus sekolah di seluruh jenjang. Meski begitu, angka secara keseluruhan yang mendekati 0 menunjukkan kondisi pendidikan yang baik. Walaupun pada kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2024 masih terdapat angka putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, sistem pendidikan yang diterapkan di Kota Yogyakarta semakin baik serta adanya peningkatan program bantuan pembiayaan bagi KMS dan penyediaan layanan untuk anak berkebutuhan khusus. Masih adanya angka putus sekolah di Kota Yogyakarta disebabkan karena beberapa faktor yaitu adanya faktor lingkungan pergaulan, faktor keluarga dan ekonomi, disabilitas intelektual dan tidak adanya minat bersekolah.

f. ***Angka Kelulusan***

Angka kelulusan menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang

mengikuti ujian nasional. Berikut data angka kelulusan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	Persen	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung berada di angka yang tetap yaitu 100%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta semakin baik dengan faktor dari guru, murid, orang tua, dan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

g. ***Fasilitas Pendidikan***

Bangunan pendidikan dengan kondisi baik menunjukkan perbandingan antara bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh bangunan. Data pada indikator ini menggunakan data kelas dalam kondisi baik karena data kondisi bangunan tidak didapatkan.

1) Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Berikut data ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

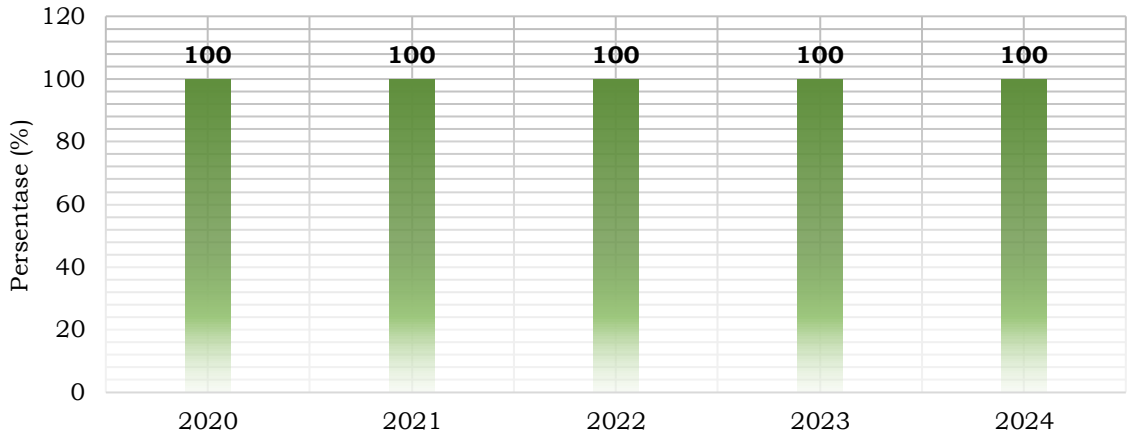

Gambar II.45 Persentase Ruang Kelas SD/MI dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, pada kurun waktu 2020 hingga 2024 hampir semua ruang kelas pada jenjang SD/MI sudah berada pada kondisi baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase ruang kelas dengan kondisi baik dan berhasil mencapai 100% karena adanya penambahan ruang belajar dan kegiatan renovasi kelas. Pada tahun 2024 terdapat empat SD negeri dan dua SD swasta yang mengalami merger.

2) Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik

Berikut data ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta 2020-2024.

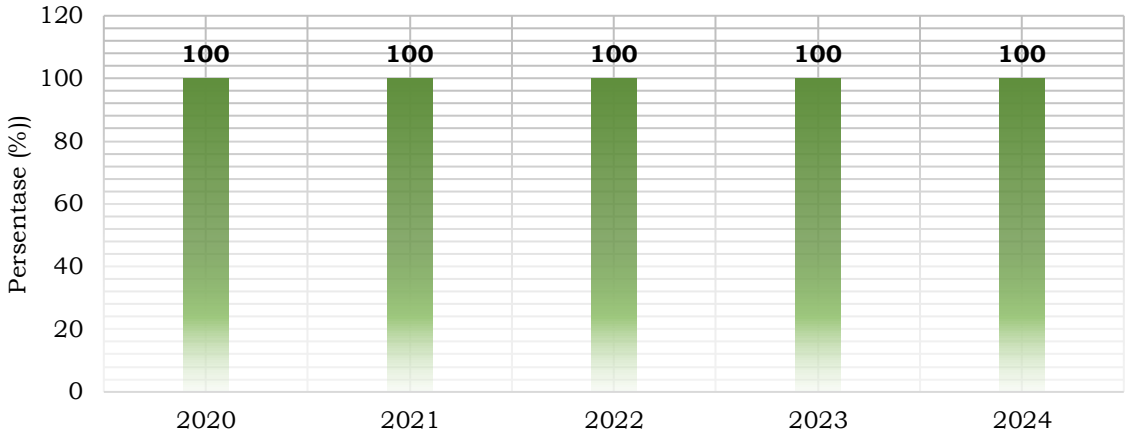

Gambar II.46 Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, persentase ruang kelas dengan kondisi dan berhasil mencapai 100%. Capaian ini disebabkan oleh adanya penambahan rombongan belajar, penambahan ruang kelas dan kegiatan renovasi kelas sehingga menunjukkan bahwa fasilitas SMP/MTs di Kota Yogyakarta sudah semakin baik.

h. ***Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar***

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Berikut data rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs	Unit	232	233	234	234	220
2	Jumlah penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun	Jiwa	49.828	55.663	55.387	54.377	53.546
3	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar		47	42	42	43,03	41,09

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2024, rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar menunjukkan angka 41,09, angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya diakibatkan oleh adanya empat SD negeri dan dua SD swasta yang mengalami *merger*.

i. ***Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah***

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Berikut data rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sekolah SMA/SMK/MA	Unit	75	76	78	76	77
2	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	Jiwa	19.510	19.434	19.093	19.194	19.701
3	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah	-	38,44	39,11	40,85	39,60	39,08

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Penurunan pada tahun 2024 diakibatkan pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan.

j. ***Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar***

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Indikator ini digunakan untuk mengindikasi ketersediaan tenaga pendidik dan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut data rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Guru SD/MI	Murid/Guru	15,79	14,66	15,91	14,95	15,77
2	Rasio Guru SMP/MTs	Murid/Guru	12,93	13,44	14,67	13,14	14,28

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, rasio ketersediaan guru/murid SD/MI pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2024, rasio ketersediaan guru/murid SD/MI menunjukkan angka 15,77 yang berarti satu guru dapat mengajar 15 hingga 16 murid. Pada rasio ketersediaan

guru/murid SMP/MTs pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Rasio ketersediaan guru/murid SMP/MTs di tahun 2024 menunjukkan angka 14,28 yang berarti satu guru mengajar 14 hingga 15 murid.

Kondisi ketersediaan guru/murid sekolah pendidikan dasar di Kota Yogyakarta dipengaruhi adanya guru yang sudah pensiun, mutasi keluar daerah, dan masih terdapat guru yang belum masuk Data Pokok Pendidikan. Peningkatan pada jenjang SMP/MTs diakibatkan oleh peningkatan jumlah siswa yang melanjutkan jenjang SMP di Kota Yogyakarta.

k. ***Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah***

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Indikator ini digunakan untuk mengindikasi ketersediaan tenaga pendidik dan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut data rasio guru/murid SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah guru SMA/SMK/MA	Orang	2.884	2.767	2.797	2.702	2.710
2	Jumlah murid SMA/SMK/MA	Orang	36.496	34.802	36.682	37.417	37.247
3	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Murid/Guru	12,65	12,58	13,11	13,85	13,74

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, rasio guru/murid pada jenjang SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 bersifat fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 angka rasio menunjukkan angka 12,65 atau setara dengan 1 guru mengampu 12-13 murid dan pada tahun 2024 menunjukkan angka 13,85. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pada 10.000 murid diajar oleh 727,5 guru atau dengan kata lain seorang guru dapat mengampu hingga 13-14 murid.

l. ***Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Pendidikan Dasar***

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa per kelas pada jenjang pendidikan SD/MI dikali dengan 10.000. Berikut data rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah guru SD per kelas	Orang	2.687	2.663	2.419	2.541	2.363
2	Jumlah murid SD	Orang	42.429	39.224	39.548	38.058	37.301
3	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Guru/Murid	633,29	678,92	611,66	667,67	633,50

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020rasio menunjukkan angka 633,29 dan pada tahun 2024 menunjukkan angka 633,50. Penurunan pada tahun 2024 dari 2023 diakibatkan oleh sejumlah guru yang pensiun.

m. ***Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah***

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa per kelas pada jenjang pendidikan SMP/MTs dikali dengan 10.000. Berikut data rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Menengah di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah guru SMP per kelas	Orang	1.795	1.574	1.367	1.530	1.390
2	Jumlah murid SMP	Orang	23.207	20.697	23.904	20.172	20.400
3	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	Guru/Murid	773,47	760,50	571,87	758,48	681,37

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio menunjukkan angka 773,47 sedangkan pada tahun 2024 menunjukkan angka 681,37. Sama halnya dengan sekolah dasar, penurunan pada setahun terakhir disebabkan karena adanya sejumlah guru yang pensiun.

n. ***Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV***

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total guru yang ada. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa banyak guru yang memenuhi kualifikasi sehingga memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Berikut data guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV Jenjang SD	Orang	2572	2252	2258	2455	2300
2	Jumlah guru SD/MI	Orang	2674	2392	2411	2612	2427
Persentase			**96,19**	**94,15**	**93,65**	**93,99**	**94,77**
3	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV Jenjang SMP	Orang	1467	1308	1301	1608	1563

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah guru SMP/MTs	Orang	1744	1364	1394	1775	1650
Persentase			**84,12**	**95,89**	**93,33**	**90,59**	**94,73**

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1-D-IV pada jenjang SD di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 berjalan fluktuatif di mana pada tahun 2020 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1-D-IV menunjukkan angka 96,19% dan pada tahun 2024 menjadi 94,77%. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1-D-IV pada jenjang SMP di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 berjalan fluktuatif namun cenderung meningkat di mana pada tahun 2020, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1-D-IV menunjukkan angka 84,12% dan pada tahun 2024 menjadi 94,73%. Pada kedua jenjang, peningkatan pada setahun terakhir terjadi karena sudah banyak guru yang melanjutkan S1/D-IV, terutama guru ASN di sekolah negeri. Hal ini sesuai dengan edaran dari pemerintah pusat bahwa guru harus memenuhi kualifikasi tersebut hingga tahun 2029. Untuk sekolah swasta, dinas tidak bisa mengintervensi, tetapi memberikan himbauan berdasarkan UU Guru dan Dosen.

Urusan Kesehatan

a. ***Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup***

Indikator ini menunjukkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi Masyarakat di mana angka kematian tersebut dihitung. Berikut data angka kematian bayi di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)	bayi	35	33	27	18	21

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah kelahiran hidup	bayi	3.118	2.757	2.499	2.427	2.148
3	Angka kematian bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)	per 1.000 kelahiran hidup	11,23	11,97	10,80	7,42	9,78

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kematian bayi menunjukkan angka 11,23 dan pada tahun 2023 menunjukkan angka 9,78. Angka kematian bayi cukup tinggi berada pada tahun 2020 dan 2021. Penyebab kematian bayi di kota Yogyakarta disebabkan karena berat badan lahir rendah, asfiksia, sepsis, kelahiran kongenital, dan pneumonia akibat Pandemi Covid-19 . Pada tahun 2024, peningkatan terjadi akibat meningkatnya kasus kematian bayi akibat meningkatnya kasus berat badan lahir rendah (BBLR) atau prematuritas, yaitu sebanyak 4 kasus kematian bayi, dan 6 kasus akibat kelainan kongenital. Untuk menekan angka kematian bayi dan kematian neonatus, beberapa upaya telah dilakukan meliputi:

1) Adanya upaya deteksi dini pada pelayanan selama kehamilan dengan penerapan pemeriksaan USG pada K1 dan K5 oleh dokter Puskesmas.
2) Adanya upaya skrining pada bayi baru lahir : Skrining hipotiroid kongenital, Skrining Penyakit Jantung bawaan kritis.
3) Adanya dukungan dana melalui DAK Non Fisik untuk upaya penguatan pelayanan bayi.

b. ***Angka Kelangsungan Hidup Bayi***

Indikator ini menunjukkan probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Perhitungan pada indikator ini menggunakan jumlah kematian bayi di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berikut data angka kelangsungan hidup bayi di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Yogyakarta 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	11,23	11,97	10,8	7,42	9,78
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) → (1000-AKB)	988,77	988,03	989,2	992,58	990,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, angka kelangsungan hidup bayi di Kota Yogyakarta pada kurun 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kelangsungan hidup bayi menunjukkan angka 988,77. Kemudian pada tahun 2021, angka kelangsungan hidup bayi menurun menjadi 988,03 di mana hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan kasus pneumonia pada bayi akibat Pandemi Covid-19 . Pada tahun 2024, angka kelangsungan hidup bayi menunjukkan penurunan dari tahun 2023 dan menunjukkan angka 990,22 yang berarti setiap 1.000 kelahiran bayi terdapat 992 bayi yang dapat hidup sampai dengan satu tahun. Pada tahun tersebut, angka kelahiran bayi (*Total Fertility Rate*) rendah sehingga setiap tahun terjadi penurunan jumlah kelahiran. Angka kematian bayi meningkat karena jumlah kasus yang meningkat dan jumlah bayi lahir hidup menurun, sehingga angka kematian bayi meningkat.

c. ***Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup***

Indikator ini menunjukkan jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. Berikut data angka kematian balita di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian balita (berumur kurang 5 tahun)	balita	6	3	3	11	6
2	Jumlah kelahiran hidup	Balita	3.118	2.757	2.499	2.427	2.148
3	Angka kematian balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)	per 1.000 kelahiran hidup	1,92	1,09	1,20	4,53	2,79

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, angka kematian balita di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020, angka kematian balita menunjukkan angka 1,92 dan pada tahun 2024 menunjukkan angka 2,79. Angka penurunan pada tahun 2024 disebabkan oleh penurunan jumlah kasus infeksi seperti pneumonia, sepsis dan diare sebagai penyebab kematian balita. Hal ini menunjukkan indikator keberhasilan intervensi penyakit seperti pendekatan tatalaksana bayi sakit dengan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), cakupan imunisasi dan skrining penyakit.

d. ***Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup***

Indikator ini menunjukkan jumlah kematian bayi pada masa neonatus (kurang dari satu bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Berikut data angka kematian neonatal di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Angka Kematian Neonatal di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan)	Bayi	24	20	19	10	11
2	Jumlah kelahiran hidup	Bayi	3.118	2.757	2.499	2.427	2.148
3	Angka kematian neonatal (per 1.000 Kelahiran Hidup)	per 1.000 kelahiran hidup	7,70	7,25	7,60	4,12	5,12

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, angka kematian neonatal di Kota Yogyakarta berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kematian neonatal menunjukkan angka 7,70 yang berarti setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat 3-4 bayi berumur kurang dari satu bulan yang meninggal dunia dan pada tahun 2024 menunjukkan angka 5,12 yang berarti setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat 4 bayi berumur kurang dari satu bulan yang meninggal dunia. Peningkatan dari tahun sebelumnya diakibatkan adanya peningkatan 1 kasus kematian neonatal serta jumlah bayi lahir hidup menurun, sehingga menyebabkan angka kematian meningkat. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan kematian neonatal meliputi:

1) Adanya upaya deteksi dini pada pelayanan selama kehamilan dengan penerapan pemeriksaan USG pada K1 dan K5 oleh dokter Puskesmas.
2) Adanya upaya skrining pada bayi baru lahir : Skrining hipotiroid kongenital, Skrining Penyakit Jantung bawaan kritis.
3) Adanya dukungan dana melalui DAK Non Fisik untuk upaya penguatan pelayanan bayi.
4) Adanya Sistem Komunikasi Yang Efektif melalui WAG rujukan Gadar neonatal untuk mempercepat rujukan kasus kegawatdaruratan bayi baru lahir.

e. ***Angka Kematian Ibu***

Angka kematian ibu (AKI) menunjukkan rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, nifas atau pengelolaannya pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Dengan kata lain, AKI sekaligus menggambarkan risiko yang dihadapi ibu hamil selama kehamilan dan melahirkan.

Dalam implementasinya, AKI telah ditetapkan sebagai satu indikator untuk mengukur keberhasilan upaya kesehatan ibu dan derajat kesehatan masyarakat. AKI dipengaruhi oleh status gizi, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, ketersediaan dan akses fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut data angka kematian ibu di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	jiwa	2	16	4	0	2
2	Jumlah kelahiran hidup	jiwa	3.118	2.757	2.499	2.427	2.147
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	jiwa	64,14	580,34	160,06	0	93,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, angka kematian ibu di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kematian ibu menunjukkan angka 64,14 kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 580,34. Pada tahun 2023, angka kematian ibu menurun menjadi 0 yang berarti tidak terdapat ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas. Kondisi tersebut dipengaruhi salah satunya oleh adanya penguatan upaya skrining pada ibu hamil, peningkatan kualitas layanan ANC interprofesi, serta adanya penguatan puskesmas PONED dan RS PONEK untuk tatalaksana kegawatan maternal. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan 2 kasus kematian ibu yang diakibatkan oleh preeklamsia berat dan komplikasinya serta faktor lain yang berkontribusi yaitu kehamilan tidak dikehendaki atau disembunyikan, sehingga deteksi dini adanya komplikasi kehamilan tidak bisa dilakukan.

f. ***Persentase Balita Gizi Buruk***

Indikator ini menunjukkan proporsi balita (bayi di bawah usia lima tahun) yang mengalami kondisi gizi buruk dalam suatu wilayah. Gizi buruk pada balita merupakan kondisi di mana anak mengalami kekurangan gizi atau tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Persentase balita gizi buruk di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -36,21%. Pada tahun 2020, persentase balita gizi buruk yaitu sebesar 1,31% kemudian menurun hingga tahun 2024 menjadi 0,22%. Penurunan tersebut terjadi karena dilakukannya beberapa upaya yang meliputi:

1) Tetap dilaksanakan surveilans gizi untuk melakukan deteksi dini khususnya *weight faltering* (kenaikan berat badan yang tidak cukup, atau masih berada di bawah rata-rata kenaikan berat badan minimal tiap bulannya) pada balita di posyandu
2) Dilakukan validasi dan *assesment* oleh puskesmas yang meliputi pemeriksaan fisik, pengukuran antropometri (BB, PB/TB, LILA, LIKA), pemeriksaan laboratorium (status anemia, urin rutin, kecacingan),

skrining TB dan alergi, skrining perkembangan, dan *recall* asupan makan;

3) Petugas gizi bersama lintas program lintas sektoral melaksanakan pelacakan kasus seperti kunjungan rumah untuk melihat lingkungan dan sanitasi, melakukan penggalian data kepada orang tua untuk menanyakan pola asuh di rumah;
4) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pangan lokal kepada anak usia 6-29 bulan dengan status gizi kurang;
5) Petugas kesehatan tetap melakukan pendampingan selama anak masih mengalami status gizi buruk; dan
6) Pelaksanaan tatalaksana balita gizi buruk di Rumah pemulihan Gizi (RPG) bagi balita usia 6-59 bulan, sedangkan bayi gizi buruk usia 0-5 bulan dan balita gizi buruk 6-59 bulan dengan komplikasi medis dirujuk puskesmas ke rumah sakit untuk dilakukan tatalaksana balita gizi buruk rawat inap sesuai pedoman.

Berikut data persentase balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.

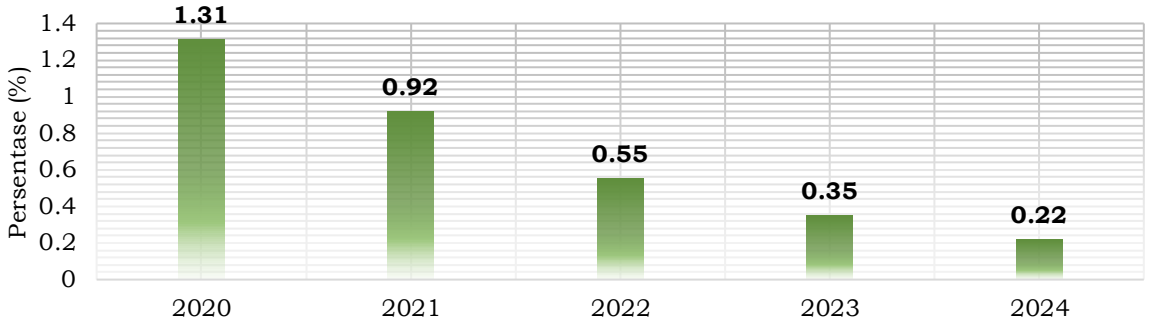

Gambar II.47 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

g. ***Prevalensi Balita Gizi Kurang***

Indikator ini menunjukkan proporsi balita (bayi di bawah usia lima tahun) yang mengalami kekurangan gizi dalam suatu wilayah. Kekurangan gizi dapat berarti kurangnya asupan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kognitif yang sehat.

Prevalensi balita gizi kurang di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan.

Faktor peningkatan angka gizi buruk pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa kendala dalam pemantauan dan intervensi gizi. Petugas puskesmas belum secara optimal melakukan ploting di Grafik Pertumbuhan Anak (GPA) dalam Buku KIA saat pemantauan di posyandu maupun fasilitas kesehatan, sehingga deteksi dini masalah gizi pada balita belum berjalan maksimal. Selain itu, tidak semua balita dengan berat badan tidak naik (*weight faltering*) atau berat badan kurang (*underweight*) dirujuk dari posyandu ke puskesmas, yang mengakibatkan keterlambatan intervensi dan meningkatkan risiko gizi kurang (*wasting*). Penerimaan orang tua terhadap Pemberian Makanan Tambahan (PMT) juga masih menjadi tantangan, di mana sebagian orang tua membagi PMT dengan anak lain sehingga asupan gizi tidak mencukupi, ada yang menolak karena gengsi, serta beberapa kurang disiplin dalam memberikan PMT kepada anak mereka.

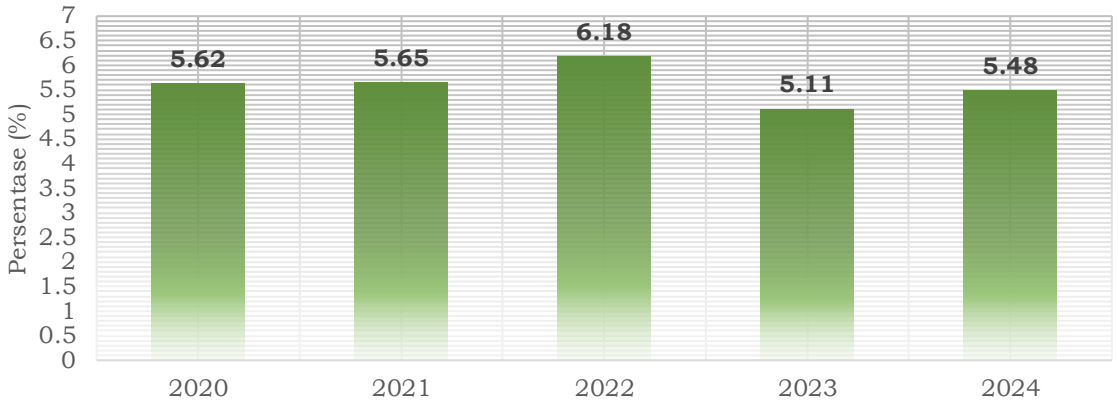

Gambar II.48 Persentase Balita Gizi Kurang Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

h. ***Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Lainnya***

Selama lima tahun terakhir, berbagai indikator kesehatan ibu dan anak di Kota Yogyakarta menunjukkan capaian signifikan, baik dari sisi pelayanan preventif, promotif, hingga penanganan kasus.

Tabel - Cakupan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Lainnya

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	100	100	100	100
2	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	78,88	100	88,03	100	100
3	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	100	100
5	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	100	100	100	100	100
6	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	persen	97,2	96,06	96,49	96,85	96,64
7	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	persen	30,45	10,16	48,15	54,66	45,96
8	Cakupan kunjungan bayi	persen	85,95	86,97	86,75	90,14	92,03
9	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	persen	92,35	100	100	100	99,77
10	Cakupan pelayanan nifas	persen	94,56	95,33	99,44	99,43	99,49
11	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	persen	90,6	85,23	100	97,57	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan telah mencapai 100% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Keberhasilan ini tidak lepas dari tersedianya sarana, prasarana, serta tenaga kesehatan yang mencukupi, dukungan peran aktif guru dan pelaksana UKS, serta adanya kebijakan yang mendukung seperti surat edaran tentang penjaringan kesehatan dan gerakan sekolah sehat.

Pelayanan kesehatan untuk balita telah mencapai angka 100% pada tahun 2023 dan 2024. Capaian ini didukung dengan ketersediaan fasilitas posyandu yang memadai, termasuk antropometri kit berstandar di seluruh

posyandu, serta pelaksanaan sweeping aktif oleh kader dan petugas kesehatan.

Selama periode 2020 hingga 2024, seluruh bayi baru lahir di Kota Yogyakarta telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Keberhasilan ini ditopang oleh fasilitas kesehatan yang lengkap, koordinasi rujukan neonatal yang cepat melalui grup WhatsApp, serta dukungan pembiayaan dari pusat untuk pelatihan dan penyediaan alat skrining neonatal seperti pulse oximeter.

Cakupan pelayanan persalinan bagi ibu bersalin di Kota Yogyakarta konsisten mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut. Hal ini dapat tercapai karena akses terhadap fasilitas persalinan yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil juga berhasil menjangkau 100% hingga tahun 2024. Seluruh puskesmas dilengkapi dengan fasilitas USG dan dokter terlatih, serta memanfaatkan jaringan internet dan media sosial untuk edukasi dan pemantauan ibu hamil secara digital.

Imunisasi campak bagi anak usia 1 tahun mengalami peningkatan hingga 96,85% pada tahun 2023, namun sedikit menurun menjadi 96,64% di tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh bertepatan waktunya dengan pelaksanaan imunisasi JE massal, yang mengharuskan jeda minimal 4 minggu antar pemberian vaksin.

Penanganan pneumonia pada balita meningkat pada tahun 2023, namun menurun kembali di 2024 menjadi 45,96%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya perkiraan jumlah kasus, keterbatasan data dari puskesmas, dan belum optimalnya pemeriksaan napas dan TDDK terhadap balita yang datang berobat.

Cakupan kunjungan bayi di fasilitas kesehatan meningkat pada tahun 2024, dengan angka kunjungan sebesar 92,03%. Angka ini dihitung dari rasio antara bayi yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah bayi yang bertahan hidup hingga usia satu tahun.

Pada tahun 2024, cakupan kunjungan ibu hamil sedikit menurun menjadi 99,77%. Dari total 2.139 ibu hamil, terdapat lima orang yang tidak menerima layanan K4 secara lengkap karena berbagai alasan, seperti tidak menyadari kehamilan atau menyembunyikannya.

Pelayanan nifas mengalami peningkatan hingga mencapai 99,49% pada tahun 2024. Meski belum mencapai 100%, capaian ini sudah sangat tinggi, dengan sebagian ibu yang melahirkan di akhir Desember belum sempat menerima layanan ketiga. Proses persalinan yang sepenuhnya dilakukan oleh tenaga kesehatan turut mendukung keberhasilan kunjungan layanan pasca melahirkan.

Penanganan neonatus dengan komplikasi pada tahun 2024 mencapai cakupan sempurna, yaitu 100%. Sebanyak 342 neonatus dengan komplikasi berhasil ditangani secara tuntas, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

i. ***Persentase Orang Terduga Tuberkulosis Mendapatkan Pelayanan Kesehatan***

Selama lima tahun terakhir, persentase orang dengan dugaan tuberkulosis yang memperoleh layanan kesehatan tercatat mencapai 100%. Berdasarkan laporan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) tahun 2024, tercatat sebanyak 10.839 orang terduga TBC telah menjalani pemeriksaan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta, termasuk puskesmas, rumah sakit, klinik, serta praktik mandiri dokter yang menyediakan layanan Tuberkulosis Direct Observer Treatment Short (TB DOTS). Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.003 orang merupakan penduduk Kota Yogyakarta, sementara 3.836 lainnya berasal dari luar wilayah Kota Yogyakarta.

j. ***Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA***

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis menggunakan perhitungan perbandingan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah selama 1 tahun terhadap jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama. Berikut

data cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	jiwa	429	345	458	584	386
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	jiwa	960	730	730	943	558
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	44,69	47,26	62,74	61,93	69,18

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020, cakupan TBC berada di 44,69% dan pada tahun 2024 menjadi 69,18%. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dipengaruhi oleh adanya kegiatan penemuan aktif di wilayah dan kondisi pencatatan dan pelaporan kasus TB dengan SITB yang semakin lebih baik, serta adanya standar pemeriksaan untuk penegakan diagnosa TBC yang sudah menggunakan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) yang lebih sensitif dan akurat.

k. ***Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)***

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan banyaknya jumlah kasus penderita TBC baik yang baru dan lama terhadap jumlah penduduk pada kurun waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan per 100.000 penduduk. Berikut data tingkat prevalensi tuberkulosis di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

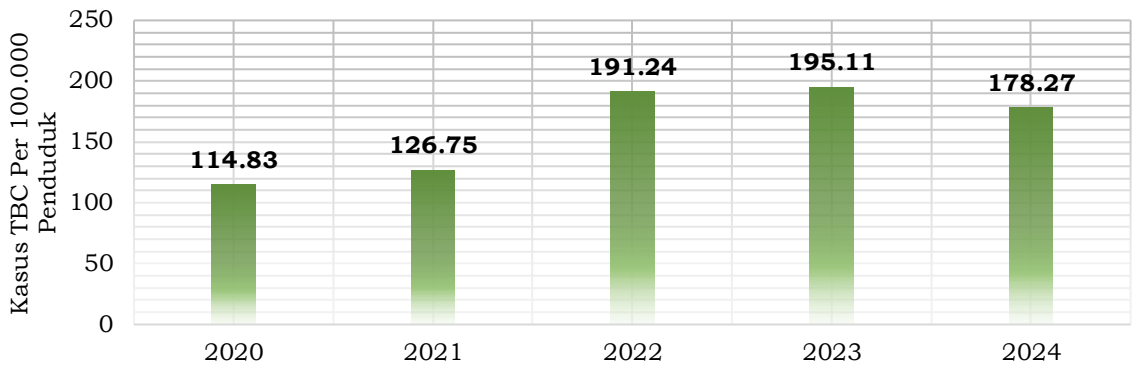

Gambar II.50 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kota Yogyakarta 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, tingkat prevalensi tuberkulosis di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020, tingkat prevalensi tuberkulosis menunjukkan angka 114,83 dan kemudian pada tahun 2024 menjadi 178,27, meskipun terjadi penurunan dari tahun 2023. Penurunan pada tahun 2024 disebabkan oleh jumlah kasus TBC yang ditemukan menurun. Upaya yang telah dilakukan dalam hal ini yaitu adanya kegiatan *active case finding* TBC dilaksanakan di seluruh wilayah Puskesmas dan penjaringan kasus melibatkan layanan swasta seperti klinik dan DPM.

1. ***Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)***

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah pasien tuberkulosis yang meninggal terhadap jumlah penduduk pada kurun waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan per 100.000 penduduk. Berikut data tingkat kematian karena tuberkulosis di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

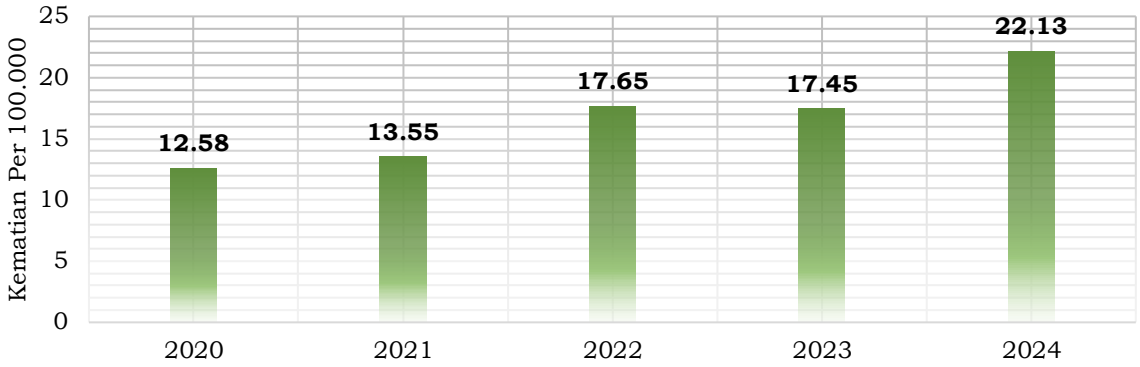

Gambar II.51 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, tingkat kematian karena tuberkulosis di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, tingkat kematian karena tuberkulosis menunjukkan angka 12,58 dan pada tahun 2024 menjadi 22,13. Hal tersebut berarti terdapat 23 pasien tuberkulosis yang meninggal per 100.000 penduduk. Tingkat kematian karena tuberkulosis tidak hanya disebabkan oleh penyakit tuberkulosis saja, namun juga terdapat komplikasi dengan penyakit lain seperti HIV dan Diabetes Melitus. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan kematian sebanyak dari tahun 2023 karena peningkatan pasien TBC secara signifikan.

m. ***Penyakit Tidak Menular***

Indikator ini menunjukkan jumlah individu yang menderita kondisi penyakit kronis yang umumnya tidak disebabkan oleh infeksi dan tidak ditularkan secara langsung dari satu individu ke individu lainnya. Penyakit tidak menular merupakan penyebab utama kematian dan gangguan kesehatan di seluruh dunia. Berikut data jumlah penderita penyakit tidak menular di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Jenis Penyakit	Tahun (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyakit Jantung	4.367	4.242	1.147	1.622	3.631
2	Kanker	205	217	977	997	962
3	Gangguan Jiwa Berat	1.030	1.002	1.201	1.239	1.096
4	Gagal Ginjal	1.109	1.031	1.301	1.632	1.538
5	Anemia	1.200	923	2.136	2.824	1.349
6	Stroke	398	443	725	875	1.000
7	Asma	1.756	1.307	1.799	2.493	2.791
8	Diabetes	10.635	13.237	13.676	14.595	17.251
9	Hipertensi	23.032	27.843	28.420	30.273	34.753
Jumlah		43.732	50.245	51.382	56.550	64.371

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Jumlah penderita penyakit tidak menular (PTM) di Kota Yogyakarta pada periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Penyakit yang paling banyak ditemukan meliputi hipertensi, diabetes, penyakit jantung, asma, gagal ginjal, dan gangguan jiwa berat, dengan hipertensi menjadi kasus terbanyak pada tahun 2024, mencapai 34.753 jiwa. Secara umum, jumlah penderita PTM mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh semakin intensifnya upaya deteksi dini melalui skrining di berbagai wilayah, sehingga lebih banyak kasus baru teridentifikasi dan mendapatkan penanganan di puskesmas. Selain itu, perubahan jumlah kasus juga dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, kematian, serta tingkat kesembuhan, seperti yang terjadi pada penderita anemia.

n. ***Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya***

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya di Kota Yogyakarta menunjukkan capaian yang cukup tinggi selama periode 2020–2024. Sebagian besar indikator mencatatkan capaian 100%, mencerminkan ketersediaan layanan dan upaya promotif-preventif yang optimal.

Tabel - Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penderita diare yang ditangani	Persen	46,54	34,18	53,08	72,29	79,75
2	Prevalensi HIV/AIDS	Persen	0,017	0,018	0,027	0,023	0,028
3	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
4	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	86,55	100	100	100	100
5	Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	90	100	100	100	100
6	Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
7	Persentase usia produktif (15-59 tahun)yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	87,13	100	100
8	Persentase usia lanjut (>60 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
9	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	persen	62,22	66,7	84,44	84,44	86,67

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Penanganan kasus diare di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024 dengan cakupan sebesar 79,75%. Kenaikan ini sejalan dengan semakin intensifnya kegiatan monitoring dan evaluasi, serta validasi data secara berkala yang dilakukan oleh petugas kesehatan di lapangan.

Sementara itu, prevalensi HIV/AIDS mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,028% di tahun 2024. Hal ini berkaitan langsung dengan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan tes HIV, yang kini tersedia di 18 puskesmas, 14 rumah sakit, dan satu klinik. Upaya deteksi dini juga diperkuat melalui pendekatan aktif seperti VCT mobile, layanan tambahan di luar jam operasional (Puskesmas Extra Hour), dan penyediaan layanan Point of Care di Drop-in Center (PoC di DiC). Kesadaran populasi kunci terhadap pentingnya tes HIV juga meningkat, berkat peran aktif LSM penjangkau dan kampanye edukatif dari Dinas Kesehatan. Meningkatnya penemuan kasus ini pada akhirnya mendorong prevalensi naik, tetapi juga menunjukkan sistem deteksi yang semakin efektif.

Selama lima tahun terakhir, cakupan pelayanan kesehatan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV telah mencapai 100%. Pada tahun 2024 saja, tercatat 20.678 orang telah memperoleh layanan sesuai standar. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi lintas sektor, termasuk dukungan OPD terkait, LSM Peduli HIV, Kelompok Pendukung Sebaya, dan Warga Peduli AIDS (WPA). Fleksibilitas pelayanan seperti tes HIV di luar jam kerja maupun di luar fasilitas puskesmas juga berkontribusi besar dalam menjangkau kelompok rentan dan memperluas akses layanan.

Di bidang kesehatan jiwa, capaian pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) juga menunjukkan hasil maksimal, dengan angka 100% pada tahun 2024. Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan penguatan dengan menyusun ulang Rencana Aksi Daerah Kesehatan Jiwa, membentuk dan memperkuat Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM), serta mengembangkan program kesehatan jiwa di lingkungan sekolah. Upaya ini dilengkapi dengan pelatihan petugas kesehatan, validasi data rutin, dan pendekatan promotif serta preventif untuk meningkatkan deteksi dini serta penanganan ODGJ.

Di sisi lain, cakupan pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus (DM) usia 15 tahun ke atas telah mencapai 100%, menjangkau 17.251 warga. Layanan ini mencakup pemeriksaan gula darah, edukasi, terapi farmakologi, hingga pemantauan melalui kunjungan rumah. Upaya ini

diperkuat dengan pelaksanaan Posbindu dan penguatan jejaring antar fasilitas kesehatan tingkat primer.

Begitu juga dengan pelayanan bagi penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas, yang mencakup 34.753 orang atau 100% dari total sasaran. Penanganan hipertensi dilakukan secara komprehensif melalui pengukuran tekanan darah, edukasi perubahan gaya hidup, pemberian obat, hingga konseling rutin. Edukasi masyarakat serta advokasi lintas sektor turut memperkuat intervensi ini.

Untuk kelompok usia produktif (15–59 tahun), cakupan pelayanan kesehatan telah menjangkau seluruh target. Layanan meliputi edukasi kesehatan, pelayanan keluarga berencana, dan skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular, seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, berat badan, serta lingkar perut. Capaian ini diperoleh melalui kegiatan Posbindu yang didukung kolaborasi lintas sektor dan lintas program.

Sementara itu, kelompok usia lanjut di atas 60 tahun, pelayanan kesehatan juga telah menjangkau 100% sasaran, yakni sebanyak 35.708 lansia. Program skrining kesehatan lansia berjalan dengan optimal berkat penjadwalan ulang kegiatan posyandu lansia yang sempat tertunda sebelumnya, serta dukungan sumber daya yang memadai di tingkat wilayah.

Selain cakupan pelayanan kepada kelompok usia, penguatan berbasis wilayah juga terus dilakukan melalui pembentukan *Kelurahan Siaga* (Kesi). Seluruh 45 kelurahan di Kota Yogyakarta kini telah memiliki Kesi, yang merupakan bentuk kesiapan masyarakat untuk secara mandiri mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, maupun kegawatdaruratan. Untuk mengukur keberdayaan masing-masing wilayah, dilakukan stratifikasi Kesi dalam empat tingkat: pratama, madya, purnama, dan mandiri. Hingga tahun 2024, sebanyak 39 dari 45 kelurahan atau 86,67% telah mencapai status Kesi aktif mandiri, mencerminkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat dalam menjaga ketahanan kesehatan di tingkat komunitas.

Fasilitas Kesehatan

Akreditasi merupakan bentuk pengakuan terhadap mutu layanan yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, setelah dilakukan proses penilaian dan dinyatakan memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk rumah sakit, proses akreditasi dilakukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Capaian akreditasi yang berhasil diraih menunjukkan komitmen kuat dari rumah sakit maupun puskesmas dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Penilaian akreditasi terakhir dilaksanakan pada Oktober 2022, dengan hasil memuaskan yaitu Lulus Paripurna dan skor 93,27%, sesuai target yang ditetapkan. Status akreditasi ini berlaku selama empat tahun, hingga tahun 2026, dan akan dievaluasi setiap tahunnya. Pada Agustus 2024, dilakukan evaluasi oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan DIY, serta PERSI Wilayah DIY. Hasil evaluasi tersebut memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti dalam waktu yang telah ditentukan.

Selama empat tahun berturut-turut (2021–2024), persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar telah mencapai 100%. Sebanyak 165 rumah sakit dan fasilitas kesehatan telah memenuhi persyaratan standar usaha, yang tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan mutu layanan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pasien serta masyarakat umum.

Sementara itu, persentase rumah sakit dan puskesmas terakreditasi menunjukkan pola fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Namun, pada tahun 2024, capaian tersebut berhasil mencapai 100%, menempatkannya dalam kategori Sangat Baik. Fokus peningkatan mutu kini diarahkan pada pelaksanaan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) berdasarkan rekomendasi dari hasil survei akreditasi.

Tabel 0-65 Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Akreditasi RS	Persen	-	-	-	93,27	93,27

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	94	100	100	100	100
3	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	Persen	84,21	89,47	94,44	88,89	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. *Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap*

Indikator ini menunjukkan proporsi Panjang jalan dalam kondisi mantap terhadap panjang seluruh jalan di Kota Yogyakarta. Jalan dengan kondisi mantap adalah jalan yang memenuhi syarat dan masuk ke dalam kondisi baik atau sedang. Sedangkan kondisi lainnya adalah kondisi tidak mantap adalah jalan dengan kondisi rusak ringan hingga rusak sedang. Secara keseluruhan, persentase jalan dengan kondisi mantap terhadap panjang keseluruhan jalan di Kota Yogyakarta sudah baik dengan persentase terendah 79,96% di tahun 2020 dan tertinggi di angka 98,77% pada tahun berikutnya. Angka ini kemudian kembali menurun di tahun 2022 hingga 2024, meskipun pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Faktor penyebab peningkatan pada tahun 2024 adalah diselenggarakan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan. Berikut persentase jalan dalam kondisi mantap terhadap keseluruhan Panjang jalan di Kota Yogyakarta.

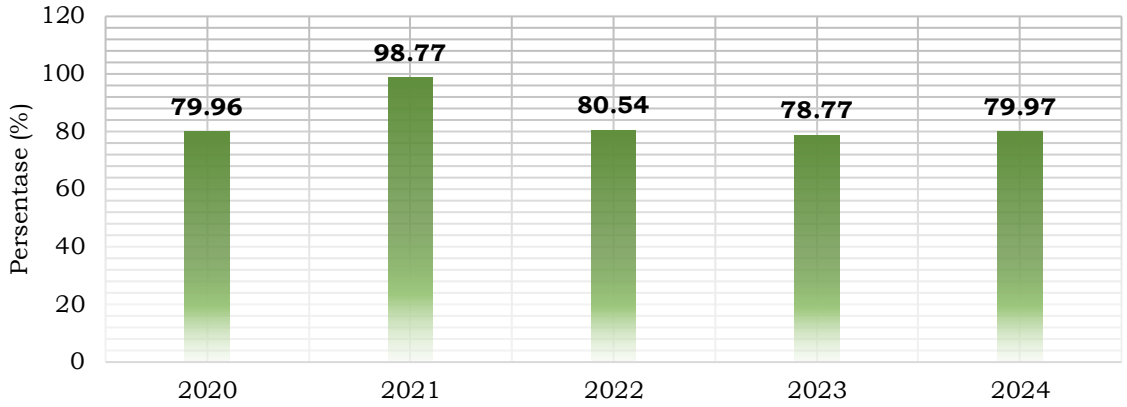

Gambar II.52 Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025

b. *Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk*

Indikator ini menggunakan perhitungan jumlah panjang jalan dibagi jumlah penduduk yang menempati suatu kota. Berdasarkan data di bawah, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh ruas jalan cenderung tetap sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kota Yogyakarta No. 71 Tahun 2018, sedangkan jumlah penduduk cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir. Tahun 2024 terjadi penurunan dari tahun 2023 karena tidak ada penambahan ruas jalan baru, sehingga rasio panjang jalan hanya dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk. Berikut data rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta.

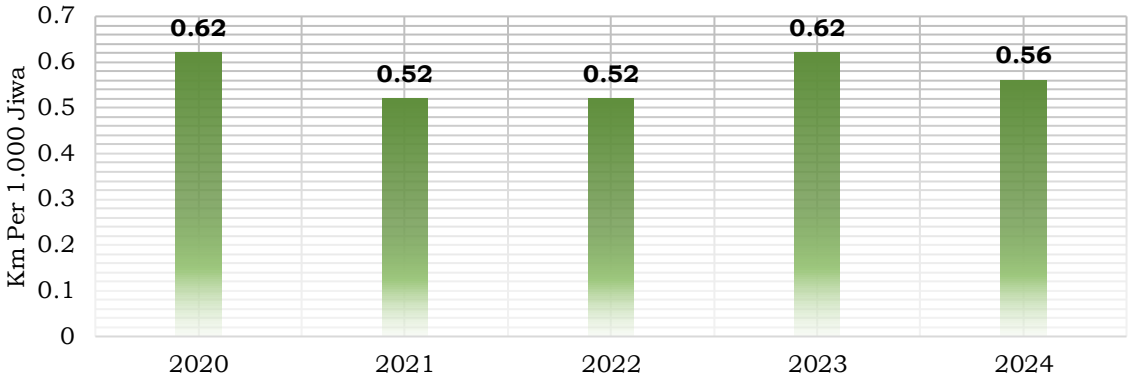

Gambar II.53 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025

c. *Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air*

Indikator ini menunjukkan persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase terhadap panjang seluruh jalan di Kota Yogyakarta. Pada indikator ini terdapat kriteria tambahan yaitu syarat minimal lebar trotoar adalah 1,5 meter. Data yang digunakan sebagai pembilang di indikator ini hanya data trotoar saja, dan data yang digunakan sebagai penyebut adalah data panjang jalan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penetapan Ruas- Ruas Jalan Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data di bawah, persentase jalan yang memiliki trotoar terhadap panjang keseluruhan jalan di Kota Yogyakarta stagnan. Dalam 5 tahun terakhir, tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan jumlah panjang jangan yang memiliki trotoar yaitu sepanjang 158,98 Km, sedangkan data panjang seluruh ruas jalan di Kota Yogyakarta mengacu pada Perwal Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penetapan Ruas- Ruas Jalan Kota Yogyakarta yaitu 233,21 Km. Pada tahun 2024 hanya terdapat pekerjaan pemeliharaan trotoar dan tidak ada peningkatan trotoar jalan, sehingga panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase tidak mengalami peningkatan. Berikut persentase jalan yang memiliki trotoar terhadap keseluruhan Panjang jalan di Kota Yogyakarta.

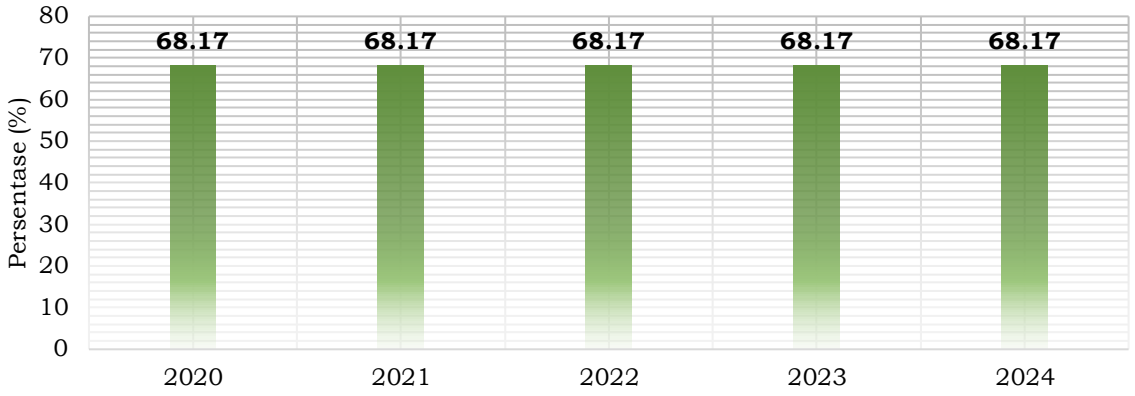

Gambar II.54 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025

d. *Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat*

Indikator ini menunjukkan persentase drainase dalam kondisi baik terhadap panjang seluruh drainase di Kota Yogyakarta. Pada indikator, drainase dalam kondisi baik dimaknai bahwa drainase tersebut pembuangan aliran limpasan air hujan tidak mengalami penyumbatan. Berdasarkan data di bawah, persentase drainase dalam kondisi baik terhadap panjang seluruh drainase di Kota Yogyakarta sebagian besar mengalami peningkatan dan nilainya selalu berada di *range* 87% dengan nilai terbesar adalah 88,44% di tahun 2024 dan terendah adalah 87,58 di tahun 2020. Dalam 5 tahun terakhir, selalu terdapat penambahan drainase dalam keadaan baik, begitu pula dengan panjang seluruh drainase yang dimiliki Kota Yogyakarta juga selalu meningkat. Berikut persentase jalan dengan kondisi drainase baik terhadap keseluruhan panjang drainase di Kota Yogyakarta.

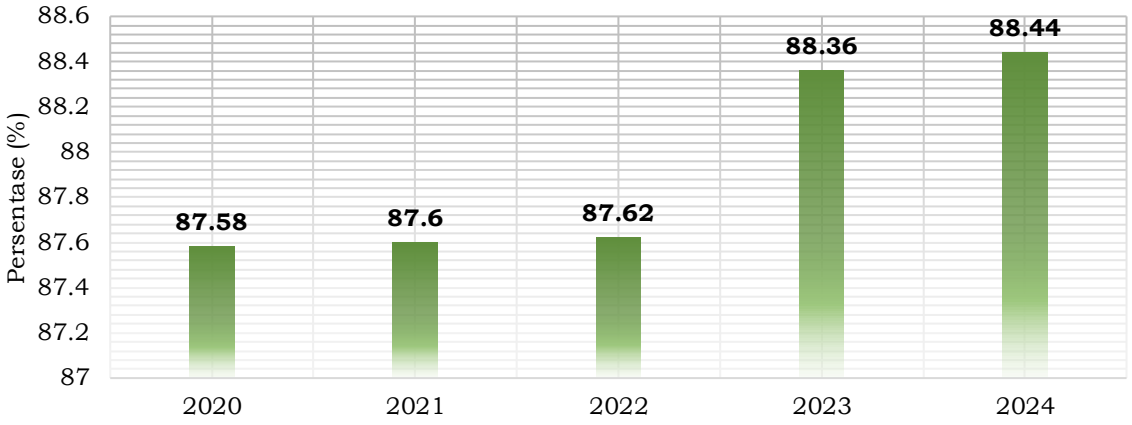

Gambar II.55 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025

e. *Persentase Penduduk Berakses Air Minum Aman*

Indikator ini menunjukkan persentase penduduk berakses air minum aman atau yang menggunakan jaringan perpipaan PDAM terhadap jumlah keseluruhan penduduk di Kota Yogyakarta. Asumsi yang digunakan sesuai dengan referensi BPS untuk Kota Yogyakarta 1 KK = 3,04 jiwa. Berdasarkan tabel dibawah, Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dalam tahun 2020-2024. Meskipun persentase cenderung mengalami fluktuasi, capaian tergolong masih rendah, sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan capaian tersebut.

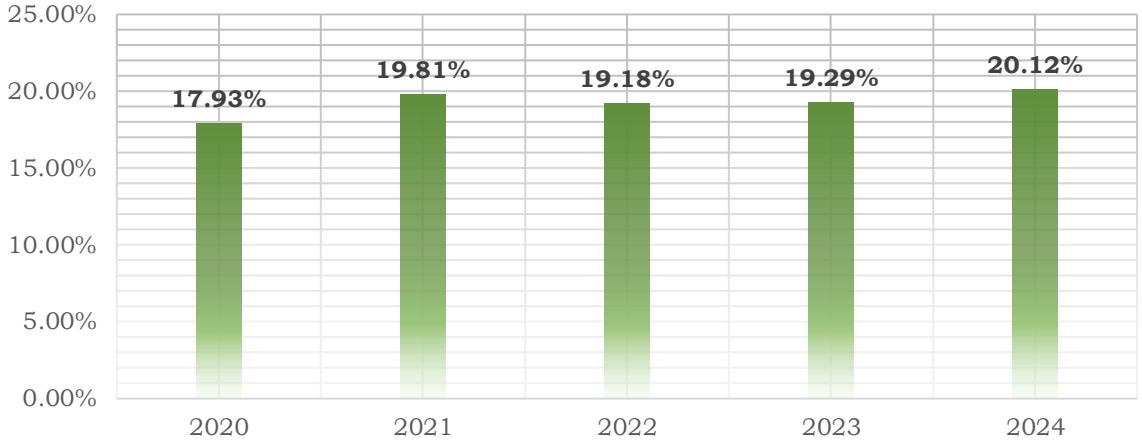

Gambar II.56 Persentase Berakses Air Minum Aman di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dokumen RISPAM dan Bappeda, 2025

f. *Luasan RTH Publik 20% dari Luas Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan*

Indikator ini menunjukkan pemenuhan luasan RTH publik yang diamanatkan dalam undangan-undang sebesar minimal 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan data di bawah, luasan RTH Publik di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, penurunan persentase RTH teridentifikasi karena adanya pemutakhiran data luas wilayah Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2021 – 2041 menjadi seluas 3.281,9 ha dari sebelumnya 3.250 ha. Pada tahun 2024, tercatat adanya peningkatan RTH publik seiring dengan pembangunan RTH Publik skala lingkungan permukiman sejumlah 5 lokasi baru dengan total penambahan sekitar 0,244 ha.

Tabel - Luasan RTH Publik Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luasan RTH publik yang tersedia	Ha	263,634	263,716	264,151	264,374	264,618
2	Luas Wilayah	Ha	3.250	3.250	3.250	3.281,9	3.281,9
3	Luas RTH Publik/ luas wilayah kota	Persen	8,11	8,11	8,13	8,06	8,06

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025

Dalam praktiknya, upaya penambahan RTH Publik dan jalur hijau sejauh ini mengalami kesulitan dalam hal mencari ketersediaan ruang. Oleh karena itu, penyediaan RTH diarahkan pada skala lingkungan terkecil tingkat kampung yang diharapkan setiap kampung memiliki satu ruang terbuka hijau publik sekaligus sebagai ruang untuk berinteraksi. Selain itu, optimalisasi berbagai bentuk RTH selain taman dan *roof garden* juga terus dilakukan, termasuk identifikasi area pertanian yang dimungkinkan sebagai RTH dengan catatan berada di persil milik pemerintah serta memenuhi syarat teknis lainnya.

g. *Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan*

Indikator ini menunjukkan rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan di Kota Yogyakarta. Berikut luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Berdasarkan data di bawah, rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan data di tahun 2023 terjadi karena hasil dari pendeliniasian yang lebih mendetail dibandingkan perhitungan sebelumnya. Sebelumnya, deliniasi citra terakhir dilakukan pada tahun 2017, yang kemudian menjadi dasar data dari 2017 hingga 2022, dengan pembaruan hanya berdasarkan penambahan luasan akibat pembangunan RTHP. Selain itu, terdapat penyesuaian luas wilayah Kota Yogyakarta dari 32,5 km² menjadi 32,82 km², yang baru disesuaikan dengan delineasi yang lebih mendetail oleh DLH pada tahun 2023 dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya.

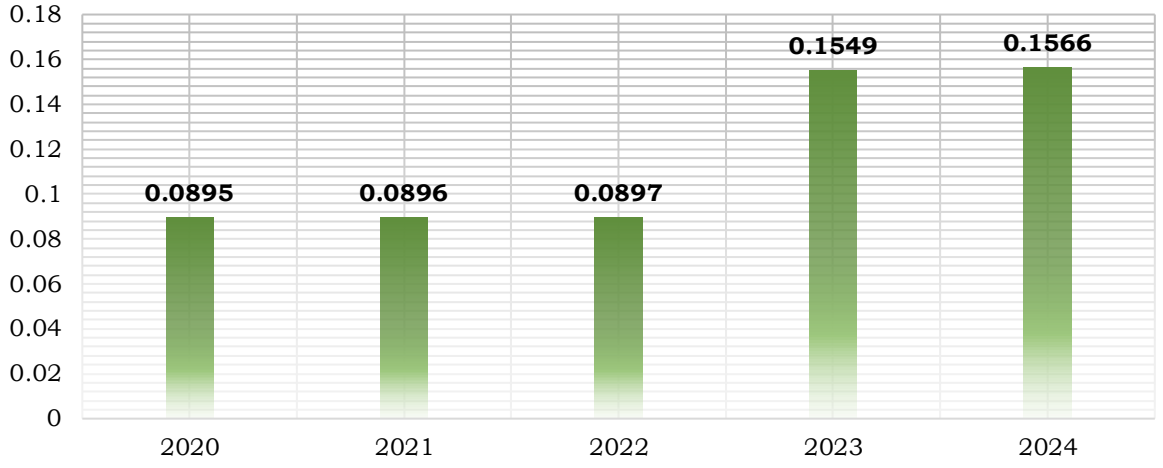

Gambar II.57 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. ***Permukiman Layak Huni***

Indikator ini menunjukkan luas permukiman layak huni di Kota Yogyakarta. Luas permukiman layak huni didefinisikan sebagai luas seluruh permukiman dikurangi luas permukiman kumuh. Data luas permukiman yang digunakan adalah data luas permukiman yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sejak tahun 2020. Sejak tahun tersebut, penanganan permukiman kumuh terus dilakukan sehingga meningkatkan luas permukiman layak huni menjadi 1.434,86 Ha di tahun 2024.

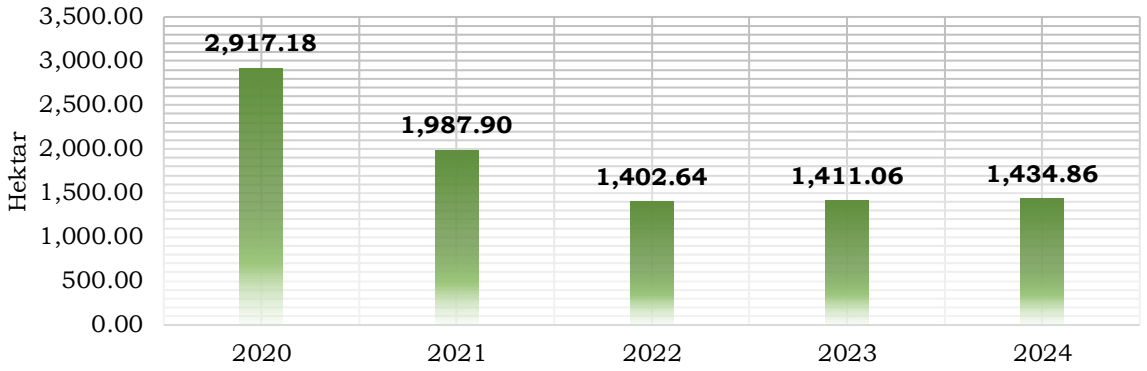

Gambar II.58 Luas Permukiman Layak Huni Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025

b. ***Permukiman Kumuh dan Penanganannya***

Indikator ini menunjukkan luas permukiman kumuh dan persentase permukiman kumuh yang tertangani di Kota Yogyakarta. Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani merupakan hasil dari luas permukiman kumuh tertangani kumulatif dibagi luas permukiman kumuh. Lokasi permukiman kumuh sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta No.158 tahun 2021, dengan luasan kumuh sebesar 114,72 hektar. Sejak penetapan SK sampai dengan akhir tahun 2024, luasan kawasan kumuh terus berkurang sebanyak 57,58 Ha sehingga luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2024 adalah 57,14. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah melalui pola pemugaran dengan konsep *Mundur, Munggah* dan *Madhep Kali* (M3K) dan

peremajaan dengan konsep MAHANANNI (Perumahan dan Permukiman Layak Huni menuju Kampung Madani).

Tabel - Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Permukiman Kumuh yang tertangani	Ha	4,45	20,54	4,82	8,42	23,8
Sisa Luas Permukiman Kumuh	Ha	70,82	94,18	89,36	80,94	57,14
Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	Persen	6,28	21,81	5,39	10,4	41,65

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas perlindungan masyarakat (linmas) memiliki tujuan untuk mendukung pelayanan keamanan ketertiban sampai pada instansi terbawah yaitu kelurahan. Dengan beragam dan heterogennya masyarakat yang tinggal di Kota Yogyakarta, kemungkinan terjadinya friksi dan timbulnya permasalahan di tengah lingkungan masyarakat pun semakin besar. Untuk menjaga stabilitas keadaan, maka diperlukan peran linmas dalam perlindungan dan pengendalian masyarakat dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti kerusuhan, bentrok, maupun konflik lain. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat secara luas. Perhitungan cakupan petugas linmas bertujuan untuk mengetahui berapa banyak petugas linmas yang bertugas di tengah masyarakat. Berikut adalah perhitungan cakupan petugas linmas di Kota Yogyakarta dengan menggunakan aspek wilayah kerja kota yaitu cakupan per 10.000 penduduk.

Tabel - Data Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah linmas	Orang	3.823	3.837	3.726	4.234	4.259
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	373.589	376.324	414.487	414.705	415.021
3	Jumlah wilayah kerja kota	Jiwa	102,33	101,96	89,89	102,10	102,62
4	Cakupan	Persen	37,36	37,63	41,45	41,47	41,50

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan tabel hasil perhitungan cakupan petugas Linmas di atas, terlihat bahwa cakupan petugas Linmas dari tahun 2020 hingga 2024 masih di bawah 50%, dengan rentang 37-42%. Meskipun demikian, cakupan ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, kenaikan cakupan Linmas dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah petugas. Peningkatan jumlah anggota Linmas ini terjadi karena tingginya minat masyarakat Kota Yogyakarta untuk secara sukarela bergabung dalam Linmas demi meningkatkan perlindungan di wilayah masing-masing, terutama pada tahun 2024 yang bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan umum. Cakupan petugas Linmas dalam 1 RT sudah terisi minimal 1 petugas Linmas. Berikut data sebaran jumlah petugas linmas se-Kota Yogyakarta sampai ke tingkat RT berdasarkan identifikasi data pada SIM linmas.

Tabel - Jumlah Petugas Linmas di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Kemantren	Kampung	RW	RT	Jumlah Linmas				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Tegalrejo	14	46	192	360	354	324	362	368
2	Jetis	9	37	166	266	270	265	290	274
3	Gondokusuman	17	66	271	372	395	403	450	429
4	Danurejan	16	41	155	220	220	243	269	235
5	Gedongtengen	14	36	138	208	208	208	200	229
6	Ngampilan	7	21	120	142	142	145	162	189
7	Wirobrajan	8	34	165	273	273	277	334	327

No	Kemantren	Kampung	RW	RT	Jumlah Linmas				
					2020	2021	2022	2023	2024
8	Mantrijeron	12	55	231	334	334	327	344	363
9	Kraton	12	43	175	249	248	202	246	264
10	Gondomanan	7	31	110	150	150	100	127	133
11	Pakualaman	7	19	83	120	120	113	129	132
12	Mergangsan	17	60	219	331	325	353	392	388
13	Umbulharjo	19	87	345	530	530	532	648	670
14	Kotagede	10	40	165	268	268	234	281	258
Yogyakarta		**169**	**616**	**2535**	**3823**	**3837**	**3726**	**4234**	**4259**

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2025

b. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota

Kebakaran merupakan bencana yang sering melanda wilayah perkotaan. Sifat perkampungan yang padat, jarak antar bangunan yang sangat dekat, dan kondisi instalasi listrik yang kurang terpelihara dapat menjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pelayanan bencana kebakaran di Kota Yogyakarta sangat diperlukan. Perlu adanya penanggulangan yang cepat apabila sewaktu waktu terjadi kebakaran. Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran (WMK). WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

Tabel - Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	km^2	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
2	Luas potensi ancaman kebakaran	km^2	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, 2025

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Yogyakarta telah mencapai 100%. Hal ini dihitung dengan cara membagi luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan luas potensi ancaman kebakaran di kota. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 luas WMK adalah sebesar 32,5 km^2 yang merupakan keseluruhan wilayah Kota Yogyakarta dan seluruhnya berpotensi mengalami kebakaran. Hal ini pun menjadikan cakupan pelayanan kebakaran di Kota Yogyakarta telah mencapai 100%. Pada saat ini Pos Pemadam Kebakaran terdapat di 2 lokasi yaitu di Mako Balaikota dan Pos Mojo (Jl. Kyai Mojo No.70C, Bener, Kemantren Tegalrejo).

c. *Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran*

Besarnya potensi bencana kebakaran di seluruh wilayah Kota Yogyakarta perlu diimbangi dengan daya tanggap yang baik terhadap terjadinya bencana kebakaran. Daya tanggap yang baik dilihat dari adanya penanganan yang cepat dari petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yang dilakukan tidak melebihi tingkat waktu tanggap pada daerah layanan WMK. Tingkat waktu tanggap yaitu kurang dari atau sama dengan 15 menit setelah adanya laporan bencana kebakaran.

Tabel - Persentase Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (*Response Time Rate*) ≤ 15 menit	Kejadian	32	50	56	90	71
2.	Jumlah Kejadian	Kejadian	53	50	56	90	71
3.	Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	60,38	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	menit	13,4	6,3	9,17	9,6	8

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, 2025

Jumlah kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta banyak disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik. Kesadaran masyarakat dalam penggunaan listrik khususnya rumah tangga juga masih minim sehingga diperlukan sosialisasi terus menerus terhadap penggunaan listrik dan peralatan pendukungnya. Terjadinya penurunan frekuensi kebakaran pada tahun 2020-2021 diperkirakan karena pada masa pandemi Covid-19 aktivitas publik mengalami penurunan, keberhasilan pemerintah dalam sosialisasi pencegahan kebakaran di wilayah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran. Tingkat waktu tanggap yang terjadi di daerah layanan WMK Kota Yogyakarta tahun 2020 cukup rendah dibandingkan total kejadian disebabkan oleh lokasi kejadian di luar jangkauan (2,5 km) dari pos terdekat, tingkat kepadatan lalu lintas pada jam tertentu yang menyebabkan mobilitas unit mobil pemadam kebakaran tidak leluasa bergerak, serta tingkat kesadaran lalu lintas pemakai jalan untuk memprioritaskan unit mobil pemadam kebakaran masih kurang, sehingga tingkat waktu tanggap meningkat menjadi 13,4 menit.

Selanjutnya, pada tahun 2021 tingkat waktu tanggap kembali mencapai angka 100%. Hal ini disebabkan karena lokasi terjadinya kebakaran dekat dengan pos serta didukung oleh cukup tingginya kesadaran dari masyarakat dalam memberikan kesempatan berjalan mendahului. Pada tahun 2024, terdapat sarana dan prasarana REDKAR yang ada di wilayah berhasil mempersingkat waktu tanggap dan mengkondisikan wilayah sesuai dengan pelatihan yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran. Peningkatan

dan pelatihan bagi personil turut memperbaiki waktu tanggap. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan pengembangan kebutuhan pelayanan tanggap bencana kebakaran untuk mengatasi kemungkinan kejadian di masa mendatang, baik dalam hal kuantitas sarana pemadam kebakaran, petugas, hingga kualitasnya. Persebaran kejadian kebakaran di tiap Kemantren berbeda, perkiraan penyebabnya antara lain keluasan wilayah dan tingkat kepadatan bangunan, aktivitas masyarakat yang berpotensi bahaya kebakaran, bangunan rumah tidak permanen dan semi permanen masih banyak, serta kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran masih perlu ditingkatkan. Bangunan yang terbakar didominasi beberapa hal, yakni bangunan perumahan yang belum permanen, penggunaan listrik yang berlebihan, penambahan kebutuhan energi listrik yang belum diikuti perbaikan jaringan kelistrikan, serta pola hidup masyarakat yang belum terbangun upaya pencegahan kebakaran.

Urusan Sosial

a. Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepedulian dan kemampuan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau penanganan kemiskinan. Contohnya termasuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta organisasi kemasyarakatan lainnya yang aktif dalam pelayanan sosial.

Tabel - Persentase PSKS yang Aktif di Kota Yogyakarta 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	persen	84,6	91,53	90,42	90,69	91,99

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

Capaian persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif pada tahun 2024 mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar 91,99 persen. Peningkatan ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tim pendamping PSKS, peningkatan kapasitas dan peran PSKS itu sendiri, serta keterlibatan Karang Taruna yang kini menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2024. Selain itu, indikator keaktifan PSKS juga dijadikan sebagai salah satu parameter dalam proses evaluasi kinerja Kemantren, yang turut mendorong optimalisasi peran lembaga sosial di tingkat lokal.

b. Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kriteria lainnya yang ditetapkan oleh menteri. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PPKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel - Persentase PPKS Skala Kota yang Memperoleh layanan Kedaruratan Sosial dan Perlindungan dan Jaminan sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pemerlu Pelayanan	Persen	N/A	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial						
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	98,72	82,46	89,25	94,08	92,91

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dalam layanan kedaruratan sosial telah mencapai 100% sejak 2021 hingga 2024. Hal ini berkat koordinasi yang baik antar-stakeholder dalam penanganan pemakaman jenazah terlantar, santunan kematian, dan orang terlantar kehabisan bekal. Selain itu, inovasi aplikasi *Sankem Berbagi* juga mempermudah akses informasi serta mempercepat pengajuan dan verifikasi.

Sementara itu, persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada 2024, realisasinya sebesar 92,91%, menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi ketidakjelasan periode bantuan APBN, tidak adanya data BNBA KPM, serta calon penerima bansos yang pindah domisili. Meski begitu, pendamping sosial aktif memperbarui data sehingga capaian tetap melebihi target, yakni sebesar 100,09%.

c. *Persentase Anak Terlantar, Gelandangan Pengemis, Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Terlantar, yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti*

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan yang termasuk dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti menunjukkan hasil

yang sangat baik. Selama dua tahun terakhir, persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis mencapai angka 100%. Capaian ini mencerminkan efektivitas kolaborasi antar instansi serta penguatan pendekatan pelayanan berbasis masyarakat.

Tabel - Persentase Anak Terlantar, Gelandang Pengemis, Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti

No.	Peneriman	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Anak Terlantar	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
2.	Gelandangan Pengemis	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
3.	Lanjut Usia Terlantar	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
4.	Penyandang Disabilitas Terlantar	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar di luar panti berhasil mencapai 100% selama dua tahun berturut-turut. Hal ini didukung oleh koordinasi yang solid dengan berbagai pihak seperti Dindikpora, DP3AP2KB, Dindukcapil, serta Dinas Sosial DIY. Selain itu, pelaksanaan workshop PPKS untuk PSKS dengan tema penanganan berbasis masyarakat turut memperkuat peran PSKS dalam menjangkau anak terlantar di komunitas.

Capaian serupa juga terlihat pada penanganan gelandangan dan pengemis. Dalam dua tahun terakhir, kebutuhan dasar kelompok ini terpenuhi secara menyeluruh berkat sinergi yang terjalin antara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan berbagai instansi seperti Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kementerian Sosial, hingga Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Laras (BRSBKL).

Adapun pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti tercapai 100% sejak tahun 2023. Capaian ini merupakan hasil dari koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, pelibatan tim

penjangkauan, PSM, dan TKSK, serta penggunaan aplikasi UPIK khusus PPKS di Jogja Smart Service (JSS) yang mempercepat pelaporan dan penanganan. Edukasi kepada keluarga tentang pentingnya perawatan lansia serta pelaksanaan workshop PSKS juga turut memperkuat pendekatan berbasis masyarakat.

Sementara itu, kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar juga telah terpenuhi 100% selama tahun 2023 dan 2024. Keberhasilan ini ditopang oleh koordinasi yang efektif antar lembaga serta peran aktif dari 14 orang tim pendamping disabilitas yang solid dan responsif.

d. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Indikator ini merupakan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tidak memiliki data terkait korban bencana pada masa tanggap darurat. Akan tetapi, dinas tersebut memiliki data terkait dengan bencana biasa (tidak ditetapkan sebagai tanggap darurat) dengan penanganan sesuai dengan peristiwa bencana yang terjadi. Persentase korban yang menerima bantuan sosial pada tahun 2020 hingga 2024 sudah selalu mencapai 100%.

Kenaikan kuantitas korban bencana penerima bantuan sosial pada tahun 2020 terjadi karena adanya bencana alam dan sosial serta wabah pandemi Covid-19 yang tidak bisa diprediksi yang kemudian berdampak pada banyaknya implementasi kebijakan atau program pemberdayaan sosial. Pada tahun 2024, terdapat kenaikan kejadian bencana sebanyak 77 bencana dengan jumlah korban sebanyak 183 orang, meskipun demikian seluruh korban telah mendapatkan bantuan sosial.

Tabel - Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial di Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	Orang	127	11	53	103	183
2.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	Orang	127	11	53	103	183
3.	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

e. ***Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta***

Selama periode 2020–2024, seluruh korban bencana di Kota Yogyakarta tercatat mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota, dengan persentase penanganan mencapai 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2020, terdapat 1.043 orang korban bencana yang tersebar di 14 kemantren. Angka tersebut meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 10.922 orang, seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai bencana.

Pada tahun 2022, jumlah korban yang mendapatkan intervensi tercatat sebanyak 1.273 orang, termasuk pasien Covid-19 yang difasilitasi isolasi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah korban bencana—yang meliputi kejadian seperti kebakaran, atap roboh, angin kencang, dan tanah longsor—berjumlah 103 orang. Pada tahun 2024, jumlah korban meningkat menjadi 183 orang akibat naiknya jumlah kejadian bencana sebanyak 77 kejadian. Seluruh korban dalam periode tersebut telah mendapatkan bantuan sosial dan intervensi sesuai prosedur yang berlaku.

Tabel - Persentase Korban Bencana yang mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2020	2024
1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan	Orang	1.043	10.922	1.273	103	183

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2020	2024
	intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta						
2.	Jumlah korban bencana	Orang	1.043	10.922	1.273	103	183
3.	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

Urusan Tenaga Kerja

a. ***Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan***

Indikator besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Selama periode tahun 2020-2024 persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan cenderung mengalami tren peningkatan dengan laju rata-rata sebesar 10,88% per tahun.

Pada tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan menurun akibat dampak pandemi Covid-19. Banyak perusahaan melakukan efisiensi, salah satunya dengan tidak membuka lowongan pekerjaan. Kemudian terjadi penurunan persentase dari tahun 2022 ke tahun 2023. Menurunnya persentase pencari kerja yang ditempatkan dikarenakan tingginya pencari kerja yang terdaftar.

Walaupun terdapat kenaikan penempatan pada tahun 2023, tetapi terjadi juga kenaikan pendaftar. Sementara kebanyakan pendaftar adalah angkatan kerja di usia 30 tahun ke atas, sehingga lebih sulit untuk ditempatkan di sektor formal. Pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 95,95%. Meskipun persentase pencari kerja yang ditempatkan naik, tetapi pencari kerja yang ditempatkan dan pencari kerja yang terdaftar berkurang.

Tabel - Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	665	748	1071	1349	1137
2.	Pencari kerja yang mendaftar	Orang	833	1.174	1.278	1.783	1.185
3.	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	79,83	63,71	83,80	75,66	95,95

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

b. *Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi*

Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja menjadi salah satu fokus strategis Pemerintah Kota Yogyakarta melalui pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan ini ditujukan agar tenaga kerja memiliki keahlian yang relevan dan siap bersaing di pasar kerja.

Pada tahun 2020, hanya tiga jenis pelatihan yang berhasil dilaksanakan dari 20 jenis pelatihan yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 , sehingga proses pendaftaran pelatihan hanya berlangsung hingga bulan April. Pada tahun 2021, jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan mulai meningkat seiring dengan membaiknya kondisi pandemi. Beberapa pelatihan bahkan dilaksanakan secara daring untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

Memasuki tahun 2022 hingga 2023, pelaksanaan pelatihan kembali berjalan normal. Jumlah pelatihan yang dilaksanakan meningkat, termasuk tambahan pelatihan menyetir mobil dan pelatihan satuan pengamanan (satpam) yang dimasukkan dalam anggaran perubahan sebagai respons terhadap tingginya minat masyarakat.

Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah peserta pelatihan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh

ketidaksesuaian jumlah pendaftar dengan kuota yang tersedia, sehingga mempengaruhi tingkat penyerapan peserta.

Tabel - Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	20	363	328	473	483
2.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	571	633	634	763	913
3.	Persentase tenaga kerja terbina kompetensi	Persen	3,50	57,35	51,74	61,99	52,9

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. ***Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam UPT***

Indikator ini digunakan untuk mengukur cakupan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, khususnya yang ditangani oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Persentase cakupan dihitung dengan membandingkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh UPT terhadap total pengaduan yang masuk.

Selama periode 2020–2024, cakupan penanganan pengaduan mencapai 100% setiap tahunnya, yang berarti seluruh pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan telah ditangani oleh petugas terlatih. Capaian ini menunjukkan optimalisasi layanan perlindungan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Pertama, keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap jenis kekerasan yang perlu dilaporkan. Kedua, meningkatnya kesadaran bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan, serta pemahaman masyarakat mengenai alur pengaduan dan akses layanan.

Ketiga, peran aktif Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Yogyakarta dalam deteksi dini kasus. Keempat, adanya keterbukaan dari sekolah dalam menangani kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Data cakupan penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel - Cakupan Penanganan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pengaduan/ laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Orang	145	165	192	194	199
2.	Jumlah laporan/ pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Orang	145	165	192	194	199
3.	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

b. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang menerima layanan kesehatan dari tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A serta PPT/PKT di rumah sakit. Persentase ini diperoleh dengan membandingkan jumlah korban yang mendapatkan layanan kesehatan dengan total korban yang datang ke fasilitas tersebut.

Pada periode 2020-2024, cakupan layanan kesehatan ini telah mencapai 100%, yang berarti semua korban yang mengakses layanan telah ditangani

oleh puskesmas atau rumah sakit yang memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan terlatih. Fluktuasi cakupan layanan bagi korban perempuan dan anak bergantung pada kebutuhan yang muncul akibat kasus kekerasan. Tingginya kasus KDRT di Kota Yogyakarta, khususnya kekerasan fisik, berkontribusi terhadap naik turunnya permintaan layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Data cakupan layanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Yogyakarta selama tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Yogyakarta yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS pada suatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu	Orang	34	31	15	47	54
2.	Jumlah seluruh korban KtP/A yang datang ke puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RSpada suatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu	Orang	34	31	15	47	54
3.	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

c. *Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum*

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan layanan bantuan hukum. Persentase tersebut dihitung dengan membandingkan jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum terhadap jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum. Selama periode tahun 2020-2024, cakupan penanganan pengaduan kekerasan telah mencapai 100%, yang artinya seluruh korban yang membutuhkan bantuan hukum telah diberikan layanan tersebut. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 yang mengatur persyaratan baru bagi pasangan yang mengajukan cerai dengan alasan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan dalam SEMA tersebut, para penggugat diwajibkan untuk terlebih dahulu berpisah tempat tinggal minimal selama enam bulan. Kebijakan ini tampaknya memberikan dampak positif, mendorong pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian dan memberi kesempatan bagi upaya perdamaian sebelum proses perceraian diajukan. Data penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	Orang	42	60	70	103	76
2.	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Orang	42	60	70	103	76
3.	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

Urusan Pangan

a. ***Ketersediaan Pangan Utama***

Ketersediaan pangan utama diperoleh dari hasil perbandingan jumlah penduduk dengan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan utama menunjukkan tingkat pemenuhan kebutuhan penduduk terhadap pangan utama. Selama kurun waktu 2020 hingga 2023, ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun.

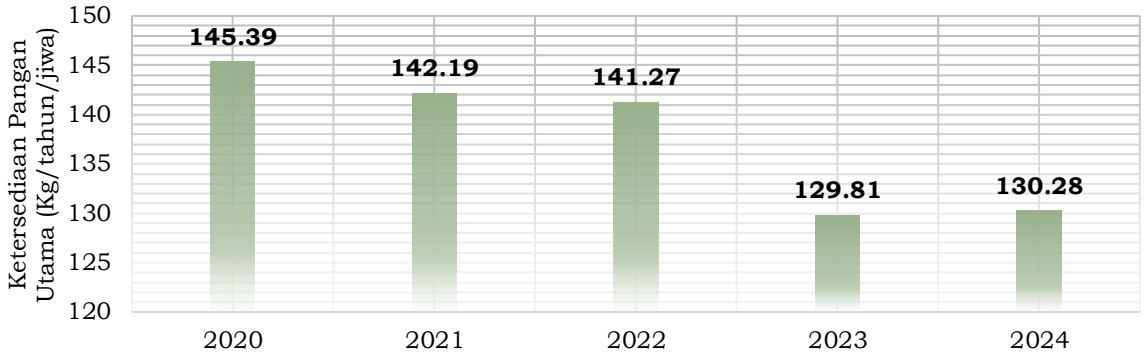

Gambar II.59 Ketersediaan Pangan Utama Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025

Pada tahun 2020, ketersediaan pangan utama sebesar 145,39 kg/tahun/jiwa. Pada tahun 2024, ketersediaan pangan utama sebesar 130,28 kg/tahun/jiwa. Pada periode tahun 2020-2024, ketersediaan pangan utama Kota Yogyakarta selalu berada di atas angka 100 kg/jiwa. Secara umum, realisasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pangan utama penduduk di Kota Yogyakarta telah tercukup dengan optimal. Adapun ketersediaan pangan di Kota Yogyakarta tidak hanya berasal dari hasil produk di dalam wilayah, tetapi juga berasal dari daerah lain di sekitar wilayah Kota Yogyakarta.

b. ***Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita***

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan pangan dan cadangan pangan, salah satunya dioperasionalkan melalui indikator

ketersediaan energi dan protein per kapita. Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/ Kapita/Hari dan protein 57 Gram/kapita/hari.

Tabel - Pemenuhan Energi dan Protein per Kapita per Hari Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemenuhan Energi per Kapita per Hari	Kkal	2.595	2.607	2.692	2.745,3	2.773,7
2	Pemenuhan Protein per Kapita per Hari	Gram	83,7	80,61	79,03	84,3	86,7
3	Persentase Pemenuhan Energi per Kapita per Hari	Persen	117,95	124,14	128,21	130,73	132,08
4	Persentase Pemenuhan Protein per Kapita per Hari	Persen	146,84	141,42	138,65	147,89	152,11

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025

Selama lima tahun terakhir, ketersediaan energi dan protein per kapita di Kota Yogyakarta menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020, besar persentase pemenuhan energi per kapita per hari adalah 117,95% dan pada tahun 2024 menjadi 132,08%. Sementara itu, pada persentase pemenuhan protein per kapita per hari pada tahun 2020 sebesar 146,84% dan pada tahun 2024 menjadi 152,11%. Pemenuhan Energi dan protein mengalami peningkatan karena peningkatan permintaan bahan pangan yang masuk dari daerah produksi ke Kota Yogyakarta. Peningkatan ataupun penurunan dipengaruhi oleh panen di daerah produksi. Harga bahan pangan utama juga berpengaruh terhadap naik turunnya ketersediaan energi dan protein di Kota Yogyakarta.

c. ***Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan***

Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, dilakukan

perhitungan rumus pangan aman dengan menghitung persentase jumlah sampel yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku terhadap jumlah total sampel pangan yang diambil di pedagang pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

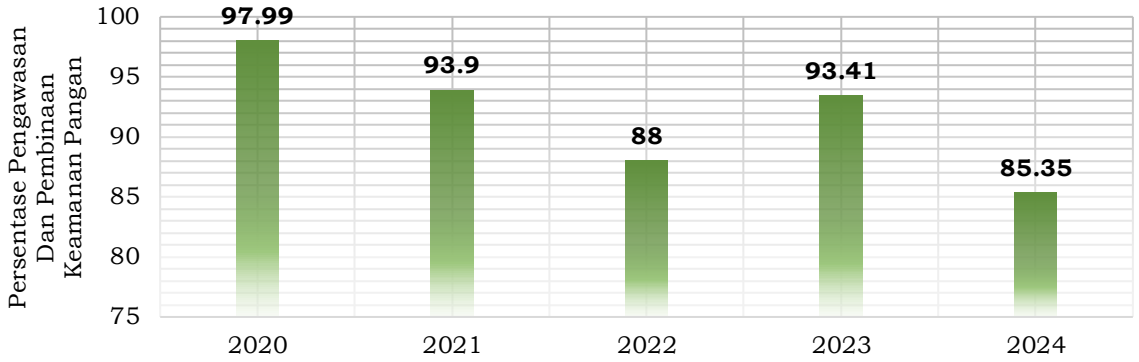

Gambar II.60 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025

Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kota Yogyakarta berada di atas angka 85 persen selama kurun waktu 2020 hingga 2024. Kendati demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 85,35. Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, penurunan pada tahun 2021 dan 2022 disebabkan karena pengurangan jumlah pengambilan sampel (kegiatan *monitoring*) disebabkan adanya pandemi Covid-19 . Sedangkan pada tahun 2024, penurunan diakibatkan oleh kondisi kualitas produk pangan yang beredar dipengaruhi oleh musim dan cuaca ekstrim. Pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi mengenai mutu dan keamanan pangan asal ikan serta Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) telah dilakukan di berbagai aspek masyarakat seperti pedagang pasar, kelompok tani, masyarakat umum dan juga anak sekolah. Pengawasan dan pembinaan dilakukan secara intensif, bersinergi dengan dinas terkait yaitu Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) dan Dinas Perdagangan. Paguyuban pedagang ikan yang telah dibina sepakat untuk melakukan perbaikan terhadap manajemen lapaknya. Pengawasan mutu

dan keamanan PSAT dilakukan secara intensif di pasar modern dan pasar tradisional, baik kepada pelaku usaha/pedagang maupun kelompok tani.

d. ***Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan***

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. PPH merupakan salah satu indikator yang termasuk ke dalam analisis kesejahteraan masyarakat. Kuantitas dan kualitas pangan masyarakat mempengaruhi kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan dapat menyebabkan malnutrisi ataupun penyakit lainnya. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Yogyakarta selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan besaran yang fluktuatif. Pada tahun 2020, besar PPH adalah 94,3 persen. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan sehingga skor PPH menjadi 91,61 persen. Walau menurun tapi masih masuk dalam kategori baik, dan menunjukkan keberagaman konsumsi pangan. Pada tahun 2024, kelompok pangan padi-padian tidak mencapai skor maksimal yaitu 23 dari 25, hal tersebut dikarenakan adanya penurunan konsumsi padi-padian yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai mengurangi jumlah konsumsi nasi. Konsumsi kelompok pangan umbi-umbian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

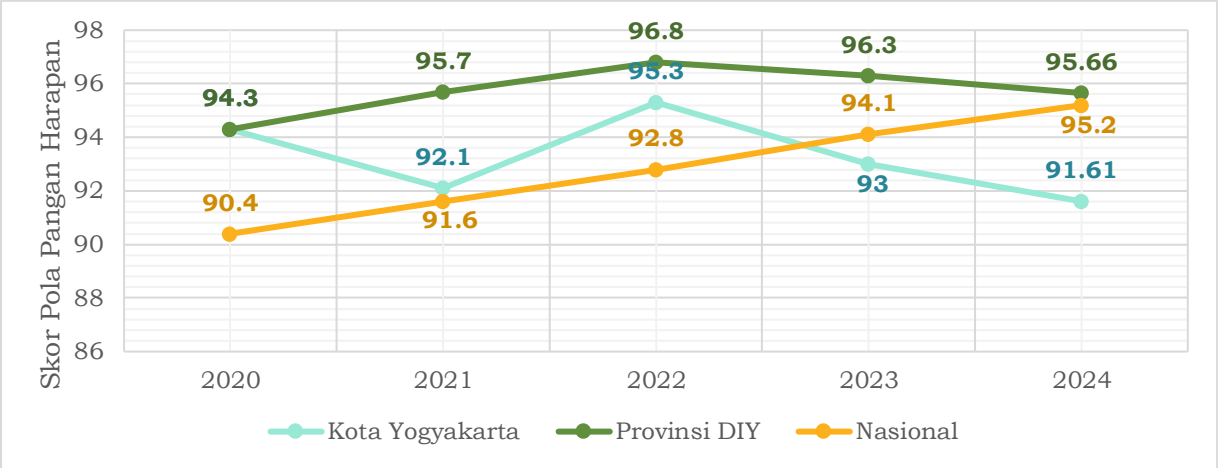

Gambar II.61 Skor Pola Pangan Harapan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2025

e. ***Penguatan Cadangan Pangan***

Penguatan cadangan pangan berfungsi untuk memastikan pada kabupaten/kota tertentu setiap tahunnya agar mempunyai inventarisasi cadangan pangan sebesar 100 ton bahan pangan utama untuk keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Persentase cadangan pangan Kota Yogyakarta mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020 hingga 2024. Berdasarkan data yang ada, selama sembilan tahun ke belakang selalu berada di atas angka 100 persen. Kota Yogyakarta sudah memiliki cadangan pangan yang bersumber dari APBD dan melakukan kerja sama pangan darurat dengan BULOG sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI No. 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria Kota Yogyakarta memiliki sebesar minimum 120 ton. Pada tahun 2020, Kota Yogyakarta melakukan pencadangan beras sendiri, yaitu sebesar 16,75 ton sehingga persentase cadangan pangan mencapai 116,75 persen. Kemudian pada tahun selanjutnya, terdapat penambahan cadangan pangan beras sehingga sampai dengan tahun 2024, besar persentase cadangan pangan mencapai 165,05 persen. Tahun 2024, cadangan pangan tidak mengalami penambahan karena pengadaan cadangan beras tidak terealisasi yang disebabkan oleh faktor eksternal.

Tabel - Persentase Cadangan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Cadangan Pangan	Ton	116,75	131,75	146,75	165,05	165,05
2	Persentase Cadangan Pangan	Persen	116,75	131,75	146,75	165,05	165,05

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025

f. ***Penanganan Daerah Rawan Pangan***

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah sistem

pendeteksi dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi. Informasi tersebut menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi. Pendekatan SKPG mencakup tiga indikator yaitu pertanian, kesehatan dan sosial ekonomi. Indikator pertanian berkaitan dengan ketersediaan pangan daerah, indikator kesehatan terkait dengan preferensi energi, sementara indikator sosial-ekonomi berkaitan dengan kemiskinan keluarga sejahtera dan prasejahtera. Setiap indikator tersebut dihitung dan ditotal sebagai penentu tingkat risiko kerawanan pangan daerah. Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, Kota Yogyakarta tercatat tidak memiliki daerah yang terkena atau termasuk rawan bencana sehingga seluruh wilayah di Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori aman pangan (tidak ada wilayah rawan pangan). Kendati demikian, daerah tersebut sudah tertangani sesuai dengan standar yang berlaku sehingga persentase daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani mencapai 100 persen.

Selain itu situasi ketahanan dan kerentanan pangan Kota Yogyakarta digambarkan dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security And Vulnerability Atlas* atau FSVA Kota Yogyakarta. FSVA disusun berbasis kelurahan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk dan (2) kelurahan dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek ketahanan pangan adalah (1) rasio rumah tangga tanpa akses air bersih dan (2) rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.

Kelurahan diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan dan dan penyebab kerentanan pangan. Kelurahan pada prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, prioritas 2 rentan pangan sedang dan prioritas 3

rentan pangan rendah. Berikut tabel jumlah wilayah rentan pangan menurut klasifikasinya.

Table II-1 Jumlah Wilayah Rentan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024

No	Klasifikasi	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	Prioritas 1	Kelurahan	0	0	0	0
2	Prioritas 2	Kelurahan	4	0	0	0
3	Prioritas 3	Kelurahan	6	7	3	2

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. 2025

Mendasarkan hasil analisis FSVA 2024 prioritas 3 sebanyak 2 kelurahan dari 45 kelurahan. Kelurahan yang termasuk prioritas 3 yaitu Kelurahan Bener dan Kelurahan Pakuncen. Pada analisis FSVA 2023 terdapat 3 kelurahan prioritas 3 yang kemudian pada analisis FSVA tahun 2024 turun menjadi 2 kelurahan.

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal.
b) Pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan pertanian perkotaan.
c) Pemantauan stok, pasokan dan harga bahan pangan secara periodik.
d) Optimalisasi prasarana dan sarana penyedia pangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan wilayah sekitarnya.
e) Program pemberdayaan sosial, program perlindungan dan jaminan sosial kepada seluruh penduduk tidak sejahtera.
f) Peningkatan akses kesehatan melalui pemenuhan tenaga kesehatan, peningkatan sarana pelayanan primer, pemenuhan prasarana pendukung dan inovasi pelayanan di daerah.
g) Peningkatan mutu baik fasilitas kesehatan maupun sumber daya manusia kesehatan.
h) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakan ekonomi wilayah.
i) Pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana.

Urusan Pertanahan

a. ***Persentase Luas Lahan Bersertifikat***

Indikator ini menunjukkan persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan data di bawah, persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah cenderung naik setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2024. Tahun 2023 menjadi capaian tertinggi persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah. Kenaikan ini terjadi karena Banyaknya permohonan penyertifikatan tanah baik Hak Milik dan HGB (perorangan dan Badan Hukum) serta banyaknya penyertifikatan Hak Pakai, termasuk oleh Pemkot Yogyakarta berupa penyertifikatan jalan. Namun pada tahun 2024, persentase luas lahan bersertifikat mengalami penurunan menjadi 84,45% karena hak atas tanah sudah mati misal HGB tapi belum perpanjangan/pembaruan hak, hak sudah terdaftar tapi belum terpetakan dalam sistem, atau adanya pelepasan hak karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Tabel - Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas lahan bersertifikat	Ha	2657,17	2698,79	2812,52	2918,75	2769,82
2	Luas Wilayah	Ha	3250	3250	3280	3280	3280
3	Persentase Luas Lahan Bersertifikat terhadap Luas Wilayah	Persen	81,76	83,04	85,75	88,99	84,45

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, 2024

b. ***Penyelesaian Kasus Tanah***

Indikator ini menunjukkan persentase penyelesaian kasus sengketa tanah di Kota Yogyakarta. Persentase penyelesaian kasus sengketa tanah merupakan jumlah kasus diselesaikan terhadap jumlah kasus terdaftar. Berdasarkan data di bawah, persentase penyelesaian kasus sengketa tanah

fluktuatif. Hal ini terjadi menyesuaikan jumlah kasus terdaftar yang berubah-ubah setiap tahunnya.

Tabel - Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	8	5	17	4	5
2	Jumlah kasus yang terdapat	Kasus	14	11	20	4	14
3	Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah	Persen	57,14	45,45	85,00	100,00	35,71

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, 2024

Setiap tahun terdapat kasus sengketa tanah yang tidak selesai tertangani dengan persentase paling sedikit ditangani terjadi di tahun 2024 yaitu hanya sebesar 35,71 atau 5 kasus ditangani dari 14 kasus terdaftar, sedangkan kasus terbanyak yang ditangani adalah tahun 2023 dengan persentase 100% atau seluruh kasus tertangani dari 4 kasus terdaftar yang jumlahnya lebih sedikit dari tahun 2021. Pemicu munculnya sengketa disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum pemegang hak, ketidakjelasan status pemilikan dan penguasaan tanah, dan kesadaran masyarakat yang rendah terkait proses pewarisan yang memicu sengketa.

Urusan Lingkungan Hidup

a. ***Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air***

Indeks Kualitas Air merupakan salah satu komponen penyusun di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Semakin tinggi indeks kualitas air maknanya semakin tinggi pula mutu air di wilayah tersebut. Selama kurun waktu 2020 sampai 2024, indeks kualitas air di Kota Yogyakarta menunjukkan penurunan dari 39,79 di tahun 2020 menjadi 33,57 di tahun 2024 atau pertumbuhan rata-rata -3,00% per tahun. Hal tersebut mengindikasikan adanya penurunan kualitas air di Kota Yogyakarta akibat pencemaran.

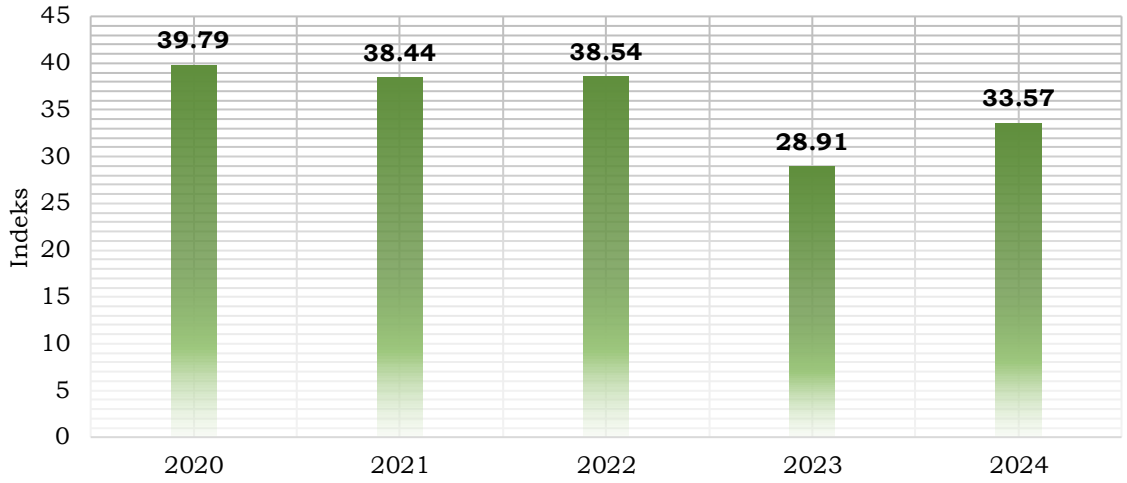

Gambar II.62 Indeks Kualitas Air Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025

b. ***Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara***

Indeks Kualitas Udara merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Nilai indeks kualitas udara dapat mengindikasikan bagaimana tingkat polusi di suatu wilayah selama periode tertentu. Berdasarkan data yang ada, indeks kualitas udara Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan capaian tertinggi sebesar 90,74 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan di tahun selanjutnya menjadi 84,97. Pada tahun 2024, indeks kualitas udara kembali meningkat menjadi 89,16. Adapun rata-rata pertumbuhan indikator ini adalah 0,73% per tahun. Peningkatan pada periode tahun 2020-2022 salah satunya disebabkan oleh faktor pandemi Covid-19 sehingga diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal tersebut berimplikasi pada penurunan aktivitas dan mobilitas masyarakat sehingga polusi berkurang dan kualitas udara bertambah baik.

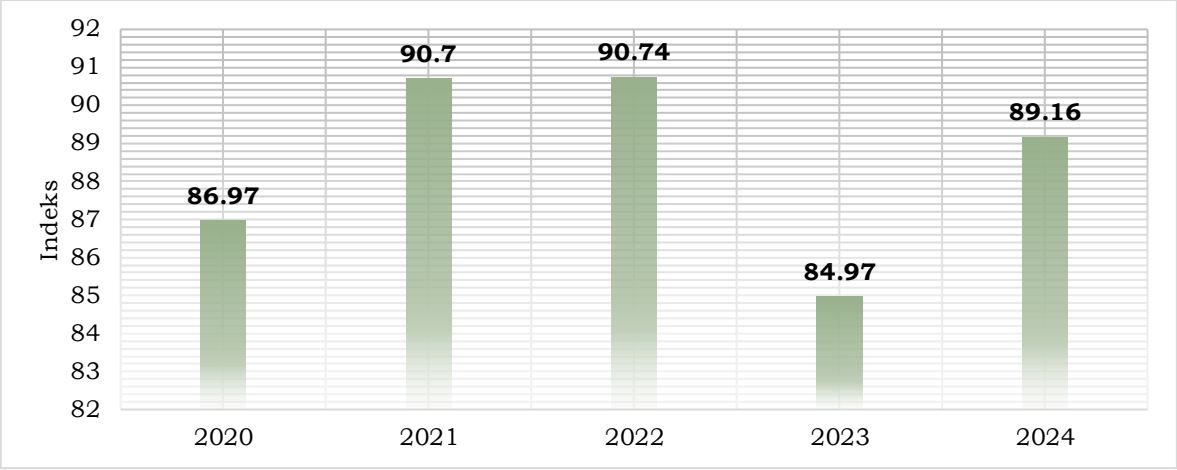

Gambar II.63 Indeks Kualitas Udara Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025

c. ***Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan***

Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Semakin tinggi indeks kualitas tutupan lahan maka hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup akan semakin baik. Indeks ini berhubungan dengan beberapa aspek seperti luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan. Indeks ini menghitung tutupan lahan hutan dan tutupan vegetasi non hutan seperti ruang terbuka hijau, kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati.

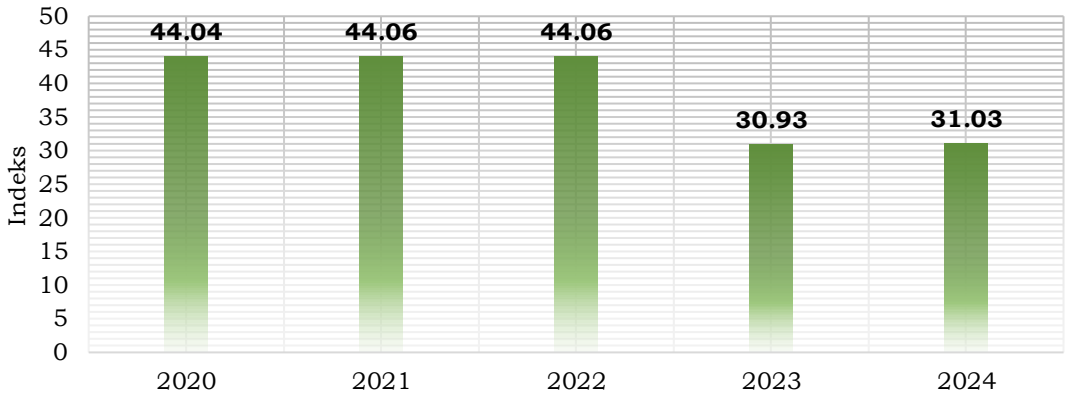

Gambar II.64 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025

Indeks kualitas tutupan lahan Kota Yogyakarta mengalami kondisi yang konstan dan penurunan pada periode tahun 2022 ke 2023. Pada tahun

2020, besar nilai indeks ini adalah 44,04 dan di tahun 2024 menurun menjadi 31,03. Kenaikan IKL pada tahun 2024 dari tahun 2023 terjadi karena meningkatnya luasan tutupan vegetasi yang terbaharui pada tahun 2024, sebanyak sekitar 5 Ha. Adanya kenaikan luasan tutupan vegetasi tersebut, membuat IKL naik sekitar 0,1 point.

Pertumbuhan rata-rata indikator ini adalah -7,36% per tahun pada kurun waktu 2020-2024. Berdasarkan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, capaian indeks kualitas tutupan lahan yang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu lahan di Ruang Terbuka Hijau terutama di jalur hijau yang menjadi kewenangan DLH sulit untuk dikembangkan. Selain itu, perhitungan indeks kualitas tutupan lahan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dasar perhitungan indeks kualitas tutupan lahan untuk Kota Yogyakarta hanya berdasarkan luas tutupan vegetasi.

d. ***Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota***

Tujuan dilakukannya pembinaan dan pengawasan adalah menegakkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan agar menaati peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, kerusakan lingkungan dapat dicegah dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Indikator ini merupakan hasil perbandingan antara jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota yang ditangani dengan total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota. Berdasarkan data yang ada, indikator ini mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Capaian tertinggi terdapat di tahun 2020 dengan nilai 76,47% dan capaian terendah terjadi di tahun 2021 yang

nilainya hanya 19,23%. Secara umum, pertumbuhan rata-rata indikator ini pada periode tahun 2020-2024 adalah 25,50% per tahun.

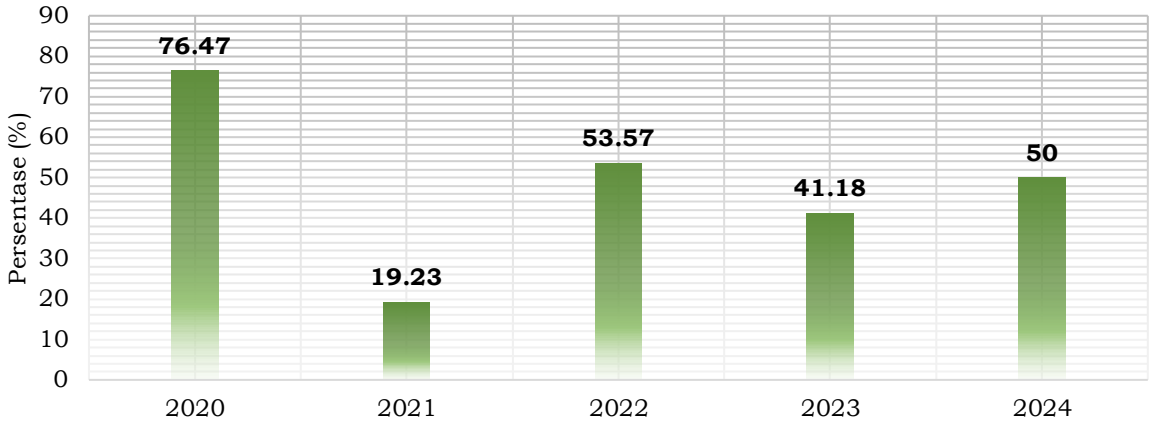

Gambar II.65 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025

e. ***Persentase Cakupan Area Pelayanan***

Cakupan area pelayanan menunjukkan seberapa besar jangkauan pelayanan pengelolaan sampah di suatu daerah. Indikator ini diperoleh dari hasil perbandingan antara luas area pelayanan pengelolaan sampah dengan luas area kota. Data Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa di tahun 2020 hingga 2024, persentase cakupan area pelayanan sudah mencapai 100%. Hal tersebut berarti sudah seluruh wilayah kota telah terlayani fasilitas pengelolaan sampah. Secara administrasi Kota Yogyakarta memiliki TPS/Depo yang tersebar untuk dan sudah melayani seluruh area di Kota Yogyakarta.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. ***Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk***

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah. KTP atau Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang

berlaku. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,30% per tahun. Pada tahun 2020, rasio penduduk ber-KTP menunjukkan angka 0,98 dan pada tahun 2024 menjadi 0,992. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan rasio penduduk ber-KTP meliputi layanan rekam KTP di sekolah dan lembaga permasyarakatan, jemput bola dengan metode *mobile* ke Masyarakat lansia, ODGJ, dan difabel dengan dasar informasi dari wilayah. Berikut data rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Yogyakarta.

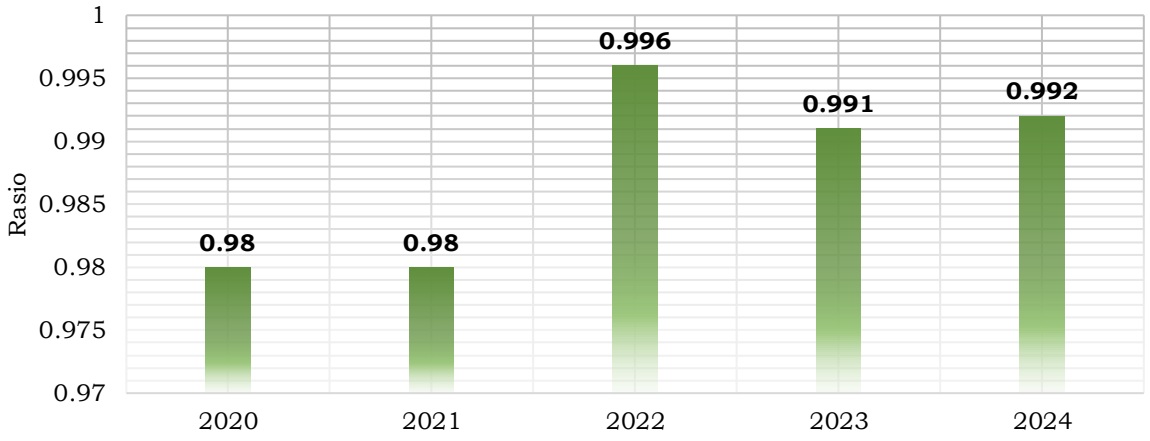

Gambar II.66 Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

b. ***Rasio Anak Berakta Kelahiran***

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah anak berakta kelahiran dengan jumlah anak seluruhnya. Akta kelahiran merupakan sumber data jumlah kelahiran sehingga menjadi data penting untuk proyeksi penduduk ke depan. Akta lahir menunjukkan bahwa suatu kelahiran telah dicatat di dalam data kependudukan. Rasio anak berakta kelahiran di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 memiliki besar nilai yang selalu stabil, yaitu di angka 1. Hal tersebut mengindikasi bahwa seluruh anak sudah memiliki akta kelahiran. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan Kado Ananda, bayi yang lahir di rumah sakit/klinik bersalin yang telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, sehingga dibuatkan akta kelahiran bagi bayi yang lahir di tempat tersebut.

c. ***Rasio Pasangan Berakta Nikah***

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah pasangan nikah berakta nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah. Akta nikah merupakan bukti pernikahan yang sah diakui oleh negara dan agama. Rasio pasangan berakta nikah di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio pasangan berakta nikah menunjukkan angka 0,75 dan pada tahun 2024 menjadi 0,88. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya layanan *Mantul Tenan* (Manten Anyar Entuk Telu Dokumen – KK, KTP, Akta Nikah), adanya layanan *Mantab* (Manten Anyar Dapat Empat untuk penduduk muslin – KTP, KK, 2 Buku Nikah), adanya layanan di JSS untuk pemutakhiran data perkawinan untuk mengubah status dari tercatat menjadi kawin tercatat. Namun, angka rasio tersebut belum mencapai angka 1 sehingga mengindikasi bawah belum semua pasangan yang sudah menikah di Kota Yogyakarta melaporkan pernikahannya. Berikut rasio pasangan berakta nikah di Kota Yogyakarta.

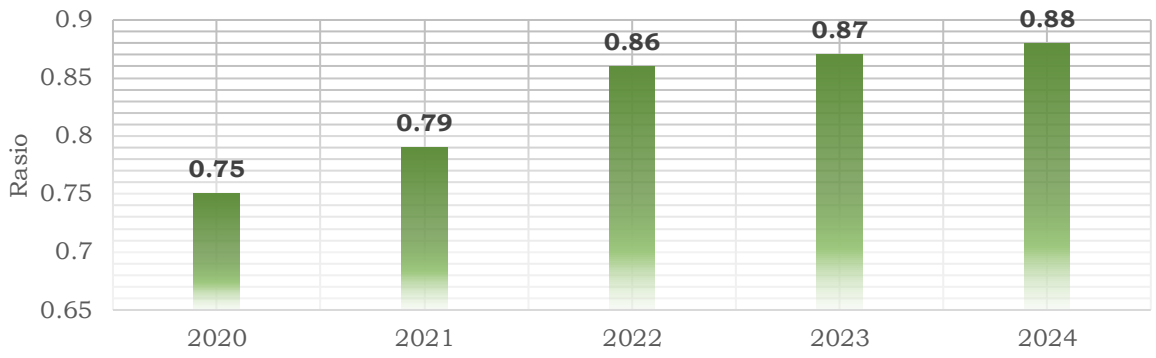

Gambar II.67 Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

d. ***Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)***

Indikator cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dihitung berdasarkan jumlah KTP ber-NIK yang telah diterbitkan dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP. Di Kota Yogyakarta, cakupan penerbitan KTP selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif

namun cenderung meningkat, meskipun dengan pertumbuhan yang relatif kecil. Pada tahun 2020, cakupan penerbitan KTP tercatat sebesar 98,02% dan meningkat menjadi 99,20% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk wajib KTP telah memiliki KTP ber-NIK.

Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai inovasi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti layanan *drive-thru*, program jemput bola untuk perekaman dan pencetakan KTP pemula di sekolah-sekolah, serta peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan.

Pada tahun 2024, dari total 322.511 penduduk wajib KTP, sebanyak 319.946 jiwa telah memiliki KTP elektronik ber-NIK. Perekaman KTP elektronik juga mengalami peningkatan, dari 97,13% pada tahun 2023 menjadi 99,20% pada tahun 2024. Wajib KTP elektronik diberlakukan bagi penduduk yang berusia di atas 17 tahun atau telah menikah, serta telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terdata sebagai penduduk Kota Yogyakarta. Berikut data cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kota Yogyakarta.

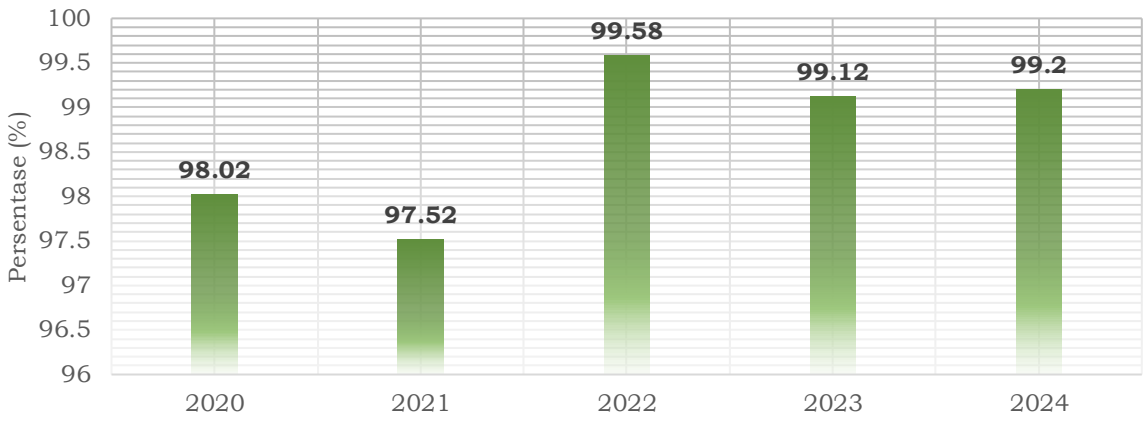

Gambar II.68 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

e. ***Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran***

Indikator ini menggunakan perhitungan jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran bersangkutan terhadap jumlah kelahiran. Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 telah mencapai angka 100%. Kondisi tersebut disebabkan

oleh adanya kegiatan Kado Ananda bayi yang lahir di rumah sakit/klinik bersalin yang telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dibuatkan akta kelahiran bagi bayi yang lahir di tempat tersebut. Berikut data cakupan penerbitan akta kelahiran di Kota Yogyakarta.

Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

a. ***Determinan Fertilitas***

Pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan karena pertumbuhan penduduk tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, akan tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Jumlah penduduk yang tidak terkontrol akan menghambat proses pembangunan karena sumber daya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang selalu bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Indikator urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel - Total *Fertility Rate dan Crude Birth Rate* di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Kesuburan Umum/ *Total Fertility Rate* (TFR)	TFR	1,46	1,59	1,53	1,67	1,65
2	*Crude Birth Rate* (CBR)	CBR	7,48	6,53	6,03	5,87	5,17

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2024; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta, 2025

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah anak rata-rata yang dilahirkan seorang perempuan selama masa reproduksinya yaitu pada usia 15-49 tahun. Tingkat kesuburan umum mengalami penurunan 2021. Pada tahun 2020, TFR sebesar 1,67 kemudian menurun menjadi 1,53 pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 1,67 pada tahun 2022.

CBR (*Crude Birth Rate*) dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan angka yang semakin baik mencapai 5,17 CBR pada tahun 2024. Hal ini didukung dengan adanya pembinaan Kampung KB baik melalui Pelaksanaan

Operasional Lini Lapangan, Pertemuan Pokja Kampung KB, pertemuan Kampung KB berbasis Tribina, penyampaian informasi–informasi terkait program Bangga Kencana melalui kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU).

Adanya kerja sama dengan DP3AP2 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam kegiatan Sosialisasi Dampak Kependudukan dan Arah Kebijakan DP3AP2 DIY Tahun 2022 untuk FAPSEDU. Kemudian dilakukan *monitoring* dan evaluasi program pengendalian penduduk melalui sosialisasi advokasi SSK bersama dengan BKKBN Perwakilan DIY implementasi materi pendidikan kependudukan. Selain itu pelaksanaan bakti sosial pelayanan KB yang bekerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dengan antusias masyarakat yang tinggi menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berkeluarga berencana, serta adanya keterpaduan antara BKB dengan PAUD, posyandu, dapur balita dan dapur sehat.

b. ***Rasio Akseptor KB***

Akseptor KB adalah pasangan usia subur yang salah satunya menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan melalui program maupun non-program. Adapun rasio akseptor KB adalah hasil perbandingan antara jumlah akseptor KB dengan jumlah pasangan usia subur.

Rasio akseptor KB di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan capaian tertinggi di tahun 2022 sebesar 74,04% dan capaian terendah di tahun 2023 dengan realisasi 62,58%, kemudian kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 62,60%. Penurunan jumlah akseptor KB disebabkan banyak penerima KB yang berhenti dan beralih ke KB tradisional.

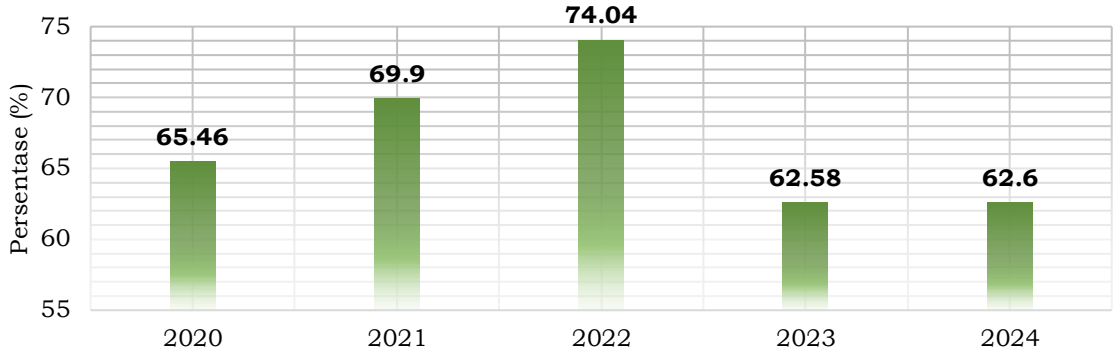

Gambar II.69 Rasio Akseptor KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

c. ***Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)***

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani terhadap jumlah pasangan usia subur. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah. Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmet need)* di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 berjalan fluktuatif mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2020, cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmet need)* menunjukkan angka 9,45% kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 11,15%, kembali meningkat menjadi 16,18% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali menjadi 12,55%. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu perubahan dalam data dasar statistik rutin, usia pasangan usia subur, kesadaran pria ber-KB yang relatif masih rendah, dan tingkat pendidikan wanita. Banyaknya PUS yang makin sadar pentingnya ber-KB dan meningkatnya jumlah layanan KB di semua fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi baik melalui media cetak maupun elektronik membuat adanya peningkatan PUS yang ber-KB tidak terpenuhi. Berikut data cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmet need)* di Kota Yogyakarta.

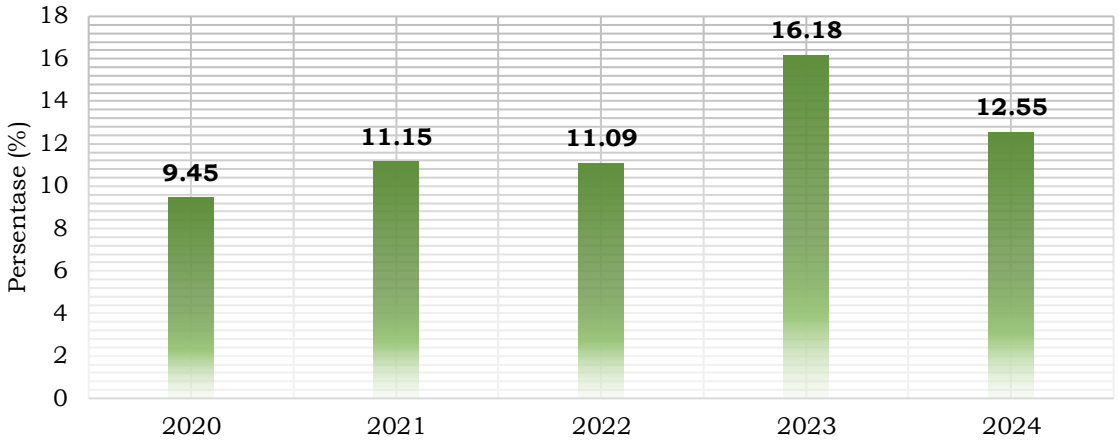

Gambar II.70 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

d. ***Persentase Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP)***

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP terhadap jumlah akseptor KB. MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang merupakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menunjukkan angka 45,02%, kemudian mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 menjadi 40,11%. Meskipun data jumlah akseptor KB meningkat, di sisi lain persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menurun, hal ini dapat disebabkan karena masyarakat memilih menggunakan metode kontrasepsi non-MKJP atau akseptor KB MKJP (PUS) beralih ke KB tradisional serta lulus PUS (Menopause). Berikut data persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang di Kota Yogyakarta.

Tabel - Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Pasangan	9.985	10.229	10.031	9.988	9.538
2	Jumlah akseptor KB	Pasangan	22.177	23.978	27.306	24.453	23.782
3	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	45,02	42,66	36,74	40,85	40,11

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

e. ***Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi***

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi terhadap jumlah akseptor KB. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung meningkat. Meningkatnya persentase keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dikarenakan Kesadaran masyarakat terhadap kemanfaatan pemakaian kontrasepsi meningkat karena terlaksananya komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai KB yang lebih masif oleh bidan, tenaga lini lapangan, dan tim pendamping keluarga pasca KB, serta adanya SE Gubernur DIY No. 2 tahun 2022 terkait dengan KB pasca salin sehingga PUS lebih senang menggunakan alat kontrasepsi yang modern dalam hal ini adalah MKJP . Kendati demikian, pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan yang signifikan menjadi 1,22%. Namun, pada tahun 2024 meningkat kembali secara signifikan menjadi 20,63%. Berikut data persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kota Yogyakarta.

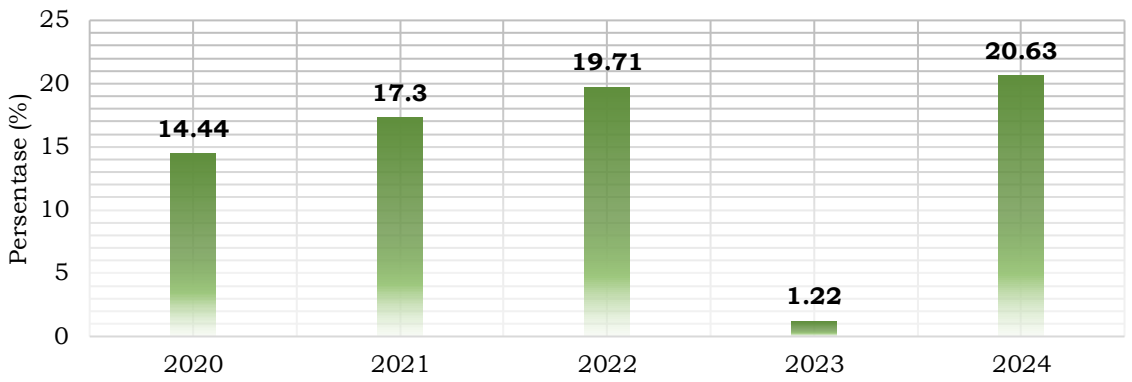

Gambar II.71 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

f. ***Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB***

Indikator ini menunjukkan perbandingan dari anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB. Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balita. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 fluktuatif mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB menunjukkan angka 80,42% hingga 100% pada tahun 2024.

Tabel - Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	Orang	3.980	3.952	4.007	1.886	2.829
2	Jumlah anggota kelompok BKB yang berstatus PUS	Orang	4.949	5.039	6.787	1.888	2.829
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB	Persen	80,42	78,43	59,04	99,89	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan tabel II.112, cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kota Yogyakarta di tahun pasca pandemi mengalami penurunan dikarenakan penambahan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB tidak sebanding dengan penambahan anggota kelompok BKB yang berstatus pasangan usia subur. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan jumlah anggota kelompok BKB melalui posyandu balita (keanggotaan posyandu secara langsung menjadi anggota kelompok BKB).

Jumlah Anggota kelompok BKB yang ber-KB mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2021 menggunakan sumber data kombinasi (manual dan newsiga), pada tahun 2021 merupakan masa transisi penggunaan sumber data newsiga, sehingga cakupan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB belum semua ter-*input* kedalam sistem sehingga perlunya ditambahkan dari data manual. Pada tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan pada sistem sudah menyaring secara otomatis untuk PUS yang berusia 49 Tahun, sehingga untuk anggota yang ber-KB namun sudah tidak PUS maka tidak akan tercatat dalam SIGA.

Jika melihat dari Persentase Cakupan Anggota BKB ber-KB pada Tahun 2023, mengalami kenaikan hingga 99,89% dan pada tahun 2024 telah mencapai 100%. Kenaikan-kenaikan tersebut disebabkan jumlah BKB yang mengalami pertambahan pula. Hal ini disebabkan adanya Integrasi Layanan Primer di Posyandu termasuk berintegrasi dengan kelompok BKB. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan PUS BKB untuk ber-KB adalah melalui penggerakan pelayanan KB MKJP. Berikut data cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kota Yogyakarta.

g. ***Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB***

Indikator ini menunjukkan perbandingan dari anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 fluktuatif mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2022 menurun secara signifikan menjadi 54,04% dikarenakan penambahan jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB tidak sebanding dengan

penambahan anggota kelompok BKR yang berstatus pasangan usia subur. Pada tahun 2024, indikator ini menunjukkan angka 76,02%, meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan pelaporan melalui SIGA lebih tertib dan adanya upaya mendorong kelompok BKR agar kualitasnya semakin meningkat, di antaranya melalui adanya bantuan operasional kegiatan dan stratifikasi kelompok kegiatan, serta peningkatan penggerakan pelayanan KB MKJP. Berikut data cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kota Yogyakarta.

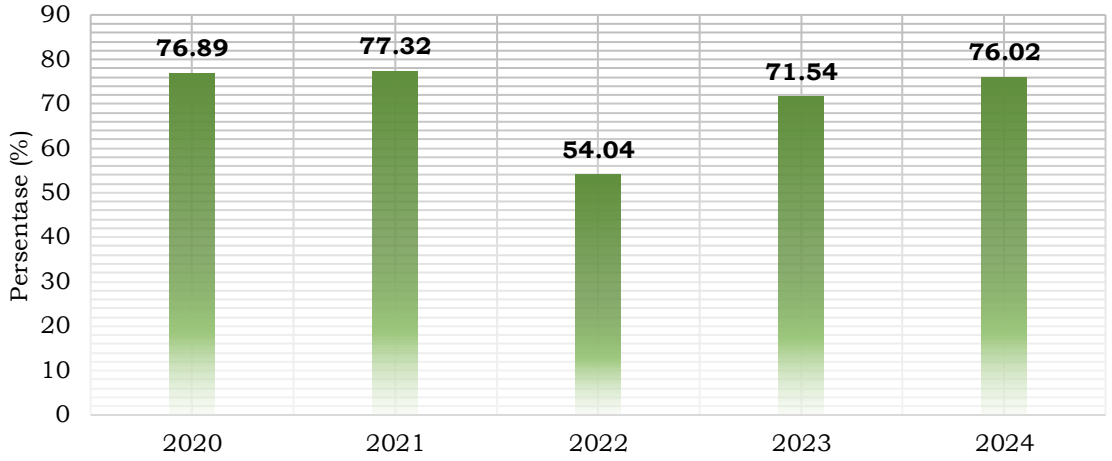

Gambar II.72 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

h. ***Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB***

Indikator cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang mengikuti program Keluarga Berencana (KB) menunjukkan fluktuasi dalam persentase partisipasi dari tahun 2020 hingga 2024. Data menunjukkan bahwa persentase cakupan meningkat karena adanya penurunan jumlah anggota BKL yang merupakan Pasangan Usia Subur (PUS). Pada tahun 2020, cakupan berada pada 73,21% dan dan pada 2021 hingga 2022 menunjukkan penurunan drastis hingga angka 7,54%, sebelum akhirnya naik kembali hingga tahun 2024 menjadi 72,36%. Peningkatan persentase cakupan ini dikarenakan jumlah anggota BKL yang termasuk dalam kategori Pasangan Usia Subur (PUS) mengalami penurunan, sehingga meskipun

jumlah total peserta program mungkin menurun, persentasenya tetap meningkat karena basis perhitungan yang lebih kecil. Pada tahun 2024 pelaporan melalui SIGA lebih tertib dan adanya upaya untuk mendorong kelompok BKL agar semakin meningkat kualitasnya, antara lain melalui adanya bantuan operasional kegiatan dan stratifikasi kelompok kegiatan, sehingga terdapat peningkatan BKL ber-KB.

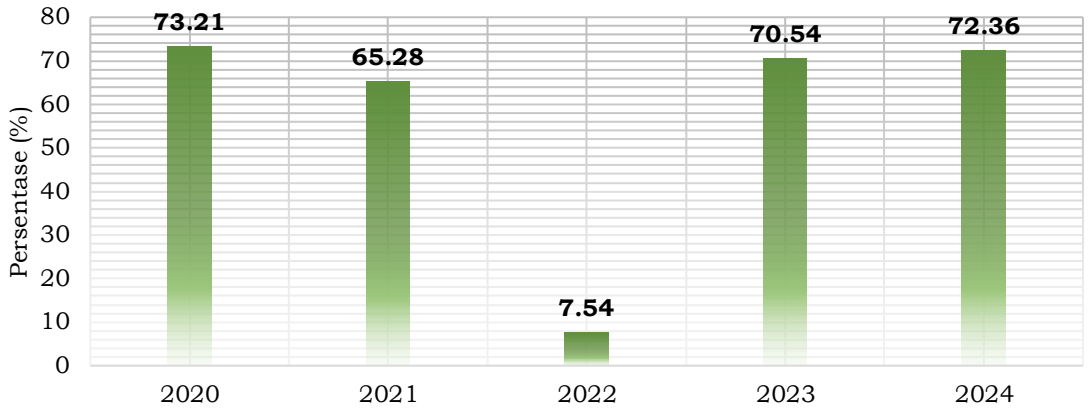

Gambar II.73 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

i. ***Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa***

Indikator ini menunjukkan jumlah cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) bagi remaja/mahasiswa. Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Indikator ini mencerminkan jumlah remaja yang terlibat aktif dalam PIK untuk mendapatkan informasi dan konseling yang dibutuhkan. Pada 2020, cakupan remaja berada pada angka 378,57%, cakupan tersebut meningkat tajam menjadi 514,29% pada tahun 2022, dan akhirnya berada pada angka 507,14% pada tahun 2024.

Fluktuasi yang pada cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling (PIK) terjadi karena adanya Covid-19 dan *lockdown di* tahun 2020-2021 yang

menyebabkan penurunan kelompok PIK yang aktif. Lalu jumlah kelompok PIK R/M yang aktif meningkat tajam sejak tahun 2022, karena sudah pasca pandemi Covid-19, yang menunjukkan bahwa program PIK terus berkembang dan menjangkau lebih banyak remaja dan mahasiswa yang membutuhkan layanan informasi dan konseling di Kota Yogyakarta.

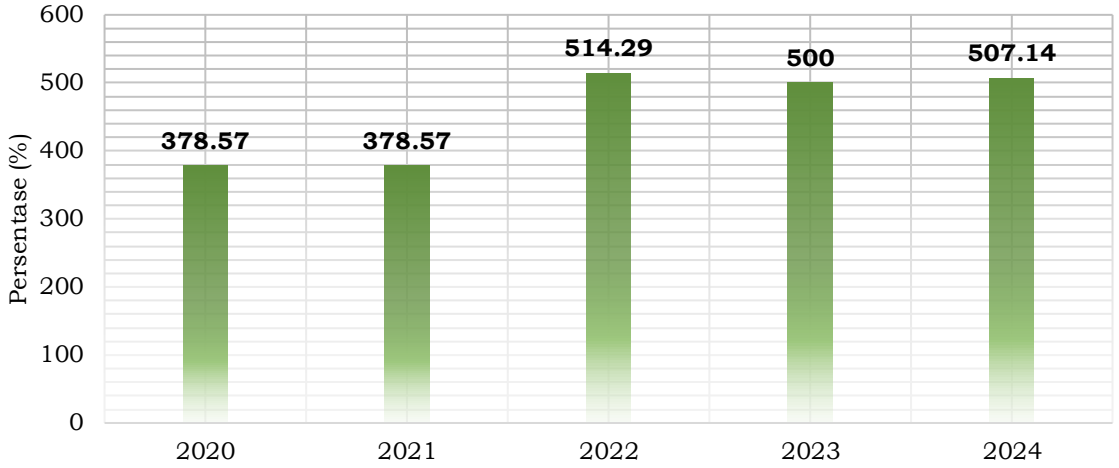

Gambar II.74 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

j. ***Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)***

Indikator ini menunjukkan cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Jumlah anggota kelompok UPPKA mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh penggunaan sumber data kombinasi (manual dan newsiga), di mana tahun 2022 merupakan masa transisi ke penggunaan sistem data newsiga. Akibatnya, cakupan jumlah anggota kelompok UPPKA belum seluruhnya ter-*input* ke dalam sistem, sehingga diperlukan penambahan data manual.

Pada tahun 2023, terjadi penurunan anggota kelompok UPPKA dan ber status PUS karena sistem secara otomatis menyaring anggota PUS yang berusia 49 tahun. Oleh karena itu, anggota yang ber-KB namun sudah tidak termasuk dalam kategori PUS tidak akan tercatat dalam SIGA. Hal ini

bertujuan untuk peremajaan data agar lebih terbarukan dan aktual. Meskipun demikian, jika dilihat dari persentase cakupan anggota BKL ber-KB pada tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan PUS UPPKA adalah melalui penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Tabel - Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok UPPKA yang ber-KB	Orang	1.389	966	946	295	392
2	Jumlah anggota kelompok UPPKA yang berstatus PUS	Orang	1.644	1.484	2260	459	574
3	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA) yang Ber-KB Mandiri	Persen	84,49	65,09	41,86	64,27	68,29

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

k. ***Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat***

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah alat kontrasepsi per mix kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan dan Gudang alat kontrasepsi kota terhadap perkiraan permintaan masyarakat. Berikut data cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat di Kota Yogyakarta 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah alat kontrasepsi per mix kontrasepsi yang	IUD	543	1.543	2.096	1621	2.096
		Kondom	453	359	241	167	241

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	tersedia di fasilitas kesehatan dan gudang alat kontrasepsi Kab/Kota	Pil KB	4.200	3.850	4.140	1365	4.140
		Suntikan	8.180	8.320	9.420	7890	9.420
		Susuk KB/Implan	712	791	1.260	595	1.260
		Total	**14.088**	**14.863**	**17.157**	**11.638**	**17.157**
2.	Perkiraan permintaan masyarakat	IUD	7.579	1.374	6.395	5817	6.395
		Kondom	102	159	9.581	9273	9.581
		Pil KB	2.384	2.180	1.358	985	1.358
		Suntikan	5.354	6.880	2.500	1970	2.500
		Susuk KB/Implan	1.073	677	555	414	555
		Total	**16.492**	**11.270**	**20.389**	**18459**	**20.389**
3.	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	Persentase	23,3	85,42	131,88	84,15	63,05

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020, cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat menunjukkan sebesar 23,3%. Pada tahun 2021 dan 2022, cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat meningkat hingga 131,88%. Pada tahun 2023, cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi mengalami penurunan menjadi 84,15%. Lalu menurun kembali pada tahun 2024 sebesar 63,05%. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, namun secara target khususnya pada pelayanan KB reguler di fasilitas kesehatan maupun bakti sosial pelayanan KB MKJP telah tercukupi dan mencapai target.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

a. ***Persentase Organisasi Terdaftar dan Teregister***

Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta adalah Jumlah yang menunjukkan proporsi ormas yang telah memenuhi persyaratan administratif dan legalitas sesuai dengan peraturan yang berlaku (SKT Kemendagri/AHU Kemenkumham/atau SKTO Kesbangpol).

Persentase organisasi masyarakat (ormas) yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta menunjukkan tren positif dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, seluruh ormas yang ditargetkan berhasil diregistrasi dengan capaian 100%. Capaian ini terus dipertahankan bahkan meningkat dalam tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, tingkat registrasi mencapai 100,89%, disusul dengan capaian 98,18% pada tahun 2023. Tahun 2024 mencatat peningkatan paling signifikan dengan realisasi sebesar 118,42%, melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel - Persentase Organisasi Terdaftar dan Teregister Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024

No.	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
1.	Target	Unit	44	51,5	55	60
2.	Realisasi	Unit	44	51,96	54	71,05
3.	Capaian	Persen	100	100,89	98,18	118,42

Sumber: Simoneva Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, 2025

b. ***Persentase PKK Aktif***

Indikator ini menunjukkan jumlah PKK yang aktif berkegiatan pada suatu wilayah. Keaktifan PKK ditinjau untuk melihat peran sertanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Jumlah kelompok PKK RT di Kota Yogyakarta pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 cenderung mengalami peningkatan meskipun PKK Dasawisma cenderung mengalami penurunan sebelum tahun 2024. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya penggabungan wilayah sehingga terjadi penurunan jumlah Dasawisma. Berikut data kegiatan PKK pada tiap jenjang administrasi di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel - Jumlah PKK Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah TP PKK Kota Yogyakarta	kelompok	1	1	1	1	1
2.	Jumlah TP PKK Kecamatan Se Kota Yogyakarta	kelompok	14	14	14	14	14
3.	Jumlah TP PKK Kelurahan Se Kota Yogyakarta	kelompok	45	45	45	45	45
4.	Jumlah kelompok PKK RW se Kota Yogyakarta	kelompok	575	617	616	616	616
5.	Jumlah kelompok PKK RT	kelompok	2.357	2.532	2.532	2.534	2.532
6.	Jumlah kelompok Dasawisma	kelompok	4.819	4.819	4.422	4.422	5.033

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

c. ***Persentase Posyandu Aktif***

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah posyandu aktif dengan total posyandu yang ada. Posyandu merupakan layanan kesehatan masyarakat yang berfokus pada pemantauan tumbuh kembang balita, kesehatan ibu, serta pelayanan keluarga berencana. Selain itu, terdapat juga Posyandu ILP Aktif, yaitu posyandu yang melayani seluruh siklus kehidupan mulai dari ibu hamil hingga lansia.

Selama periode 2020 hingga 2024, persentase posyandu aktif di Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada 2020–2022. Pada tahun 2020, persentasenya hanya mencapai 31,9%, angka yang cukup rendah karena pandemi Covid-19. Pandemi berdampak pada perubahan sistem pelayanan, menurunnya intensitas pendampingan, serta terhambatnya pencatatan kegiatan posyandu. Selain itu, pada tahun yang sama juga terjadi perubahan definisi operasional posyandu aktif, namun proses sosialisasi tidak bisa berjalan optimal karena pembatasan aktivitas.

Situasi mulai membaik pada 2022, di mana layanan posyandu kembali dilakukan secara rutin dan konvensional. Hal ini mendorong peningkatan persentase posyandu aktif menjadi 96%. Pada tahun 2023 dan 2024, seluruh posyandu tercatat aktif, dengan capaian 100%.

Sementara itu, data Posyandu ILP Aktif baru mulai dihitung pada akhir tahun 2024, sehingga belum tersedia data untuk periode 2020 hingga 2023.

Tabel - Persentase Posyandu Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah posyandu aktif	Unit	199	446	598	622	622
2.	Jumlah seluruh posyandu	Unit	623	623	623	622	622
3.	Posyandu Aktif	Persen	31,9	71,6	96,0	100,0	100,0
4	Posyandu ILP Aktif	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	103
5	Persentase Posyandu ILP Aktif	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	16,24

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Urusan Perhubungan

Sesuai dengan yang tertulis dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86/2017, terdapat sepuluh indikator pada urusan perhubungan, di antaranya adalah jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio ijin trayek, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis, persentase layanan angkutan darat, persentase kepemilikan KIR angkutan umum, pemasangan rambu-rambu, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, serta jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun. Dalam urusan perhubungan juga terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta yang dijelaskan melalui poin-poin berikut.

a. ***Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum***

Terminal Giwangan merupakan terminal penumpang yang terdapat di wilayah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri tidak memiliki terminal dengan tipe terminal barang (kargo). Jumlah penumpang angkutan umum berupa bis yang masuk ke terminal bis di Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan pada 2020-2021. selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 jumlah penumpang yang masuk ke terminal bis Kota Yogyakarta sebesar 1,2 juta jiwa dan kemudian turun menjadi 733 ribu jiwa di tahun 2021. Kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga 2024 menjadi 1,7 juta jiwa. Hal ini mengindikasikan dua kemungkinan, yaitu penurunan jumlah masyarakat yang masuk ke daerah Kota Yogyakarta atau penurunan jumlah masyarakat yang menggunakan angkutan umum berupa bus pada periode 2020-2021 karena Covid-19. Jumlah penumpang yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena masih efek pemulihan dari Covid-19 serta adanya diversifikasi pelayanan bus yang semakin bervariasi menjadikan bus pilihan baru untuk masyarakat bepergian. Berikut perincian jumlah penumpang bis yang masuk ke terminal Kota Yogyakarta pada tahun 2020-2024.

Tabel - Jumlah Penumpang Bis yang Masuk Terminal di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penumpang bus (yang masuk terminal)	Jiwa	1.214.302	733.727	1.120.971	1.399.968	1.704.088

b. Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025

c. ***Jumlah Uji Kir Angkutan Umum***

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian yang dimaksud meliputi (1) uji tipe yaitu

pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Nilai indikator jumlah uji KIR angkutan umum yang cenderung menurun diduga karena kendaraan mereka banyak yang tidak beroperasi atau bahkan dijual, serta adanya beban administrasi. Adanya peningkatan Uji KIR disebabkan sejak tahun 2024 , pengujian kendaraan bermotor tidak ada biaya administrasi dan tidak ada denda, sehingga wajib uji kendaraan bermotor tidak banyak yang mengujikan kendaraannya karena tidak ada beban administrasi apabila tidak mengujikan kendaraan mereka.

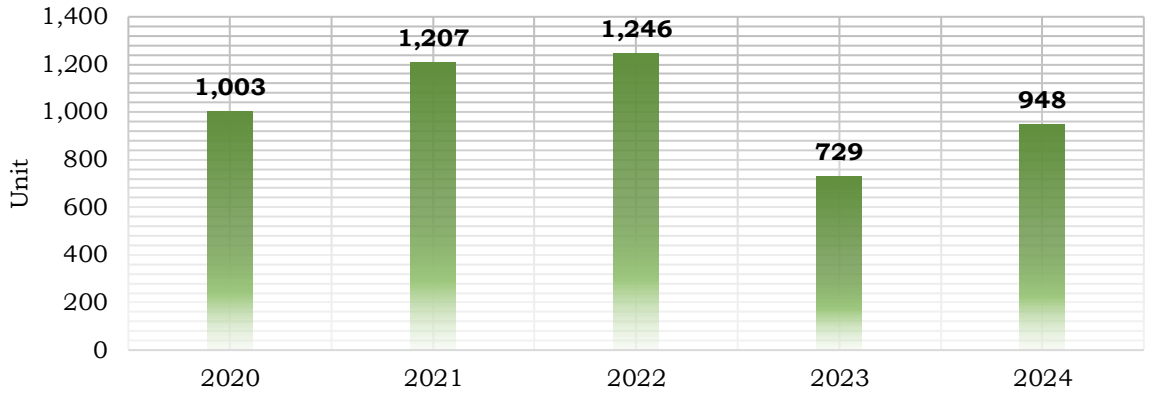

Gambar II.75 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025

d. ***Jumlah Terminal Bis dan Stasiun Kereta Api***

Terminal bis diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Hanya terdapat satu terminal bis di Kota Yogyakarta,

yaitu Terminal Giwangan yang terdapat di Kemantren Umbulharjo. Selain itu terdapat dua stasiun kereta api yang berada di Kota Yogyakarta, yaitu Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan. Data tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel - Jumlah Terminal Bis dan Stasiun Kereta Api di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Terminal Bis	Unit	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Halte Permanen Transjogja	Unit	69	65	65	64	64
3.	Jumlah Halte Portabel Bus Transjogja	Unit	77	70	70	70	71
4.	Jumlah Stasiun Kereta Api	Unit	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025

Terminal Giwangan merupakan terminal tipe A, di mana terminal tipe A berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan atau Antar Lintas Batas Negara, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Terdapat juga sejumlah halte untuk bus Transjogja. Bus Transjogja menggunakan dua jenis halte, yaitu halte permanen dan halte portabel. Secara umum, jumlah halte cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2020-2024.

Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan berada di bawah naungan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 6. Stasiun Yogyakarta (Tugu) beserta rel kereta api yang membujur dari barat ke timur berada di wilayah Kemantren Gedongtengen. Sedangkan Stasiun Lempuyangan beserta rel kereta api yang membujur dari barat ke timur berada di wilayah Kemantren Danurejan.

Masyarakat dapat memilih moda transportasi yang akan digunakan untuk mobilitas masuk/ keluar Kota Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing, baik moda transportasi umum maupun moda transportasi pribadi. Melihat data arus penumpang di Kota Yogyakarta

yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, diduga saat ini bis bukanlah sebuah moda yang menarik atau mungkin saja tidak adanya daya tarik yang dimiliki oleh terminal.

e. ***Persentase Layanan Angkutan Darat Aktif***

Persentase layanan angkutan darat menunjukkan cakupan angkutan darat dalam melayani penumpang. Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat. Selama periode tahun 2020-2024, fluktuatif, peningkatan persentase layanan angkutan darat mengalami peningkatan yang signifikan di periode 2020-2022, tetapi cenderung menurun pada 2023-2024. Pada tahun 2020 persentase layanan angkutan darat di Kota Yogyakarta adalah sebesar 21,41% dan kemudian meningkat menjadi 28,04% pada tahun 2022. Lalu mengalami penurunan hingga tahun 2024 sebesar 14,03%. Kenaikan persentase layanan di awal periode 5 tahun terakhir disebabkan oleh penurunan jumlah penumpang angkutan darat yang cukup signifikan di Kota Yogyakarta. Penurunan persentase layanan angkutan darat disebabkan oleh ritase bus yang mengalami penurunan karena ada beberapa PO (Perusahaan Otobus) yang mengurangi unitnya untuk beroperasi dan ada juga PO yang bangkrut, sedangkan jumlah penumpang mengalami kenaikan karena masih efek pemulihan Covid-19 serta diversifikasi pelayanan bus yang semakin bervariasi menjadikan bus pilihan baru untuk masyarakat bepergian. Data jumlah angkutan darat, jumlah penumpang angkutan darat, serta persentase layanan angkutan darat pada setiap tahun selama periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel - Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah angkutan darat	Unit	260.000	205.748	242.136	525.396	514.687
2.	Jumlah penumpang angkutan darat	Jiwa	1.214.302	733.727	1.120.971	3.275.515	3.667.767

3.	Persentase layanan angkutan darat	Persen	21,41	28,04	21,60	16,40	14,03

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025

f. ***Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum***

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kepemilikan KIR angkutan umum adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum dengan jumlah angkutan umum pada tahun yang berkaitan, sedangkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR didapatkan dari formula jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun berkenaan dibagi dengan pembilang dua. Angkutan umum yang dimaksudkan adalah kendaraan umum yang terjaring di wilayah Kota Yogyakarta dan belum tentu berdomisili di Kota Yogyakarta. Dengan kata lain adalah angkutan umum atau kendaraan yang hanya lewat wilayah Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Indikator kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta mengalami tren penurunan selama periode tahun 2020-2023 dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 9,72%. Penurunan terjadi karena banyak wajib uji kendaraan yang tidak mengujikan kendaraannya atau karena kendaraannya sudah tidak beroperasi dan telah dijual. Sedangkan, adanya peningkatan pada tahun 2024 disebabkan ada beberapa angkutan umum yang menumpang menguji.

Tabel - Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum	Unit	1173	894	1.031	729	823
2.	Jumlah angkutan umum pada tahun N	Unit	9546	11.399	10.649	9.585	8.467

3.	Kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	12,29	7,84	9,68	7,61	9,72

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025

g. ***Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan***

Indikator ini dihitung dengan membandingkan panjang jalan dalam kilometer dengan jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta pada tahun terkait. Rasio ini dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya. Selama periode tahun 2020-2024 panjang jalan di Kota Yogyakarta tidak mengalami perubahan. Sementara jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta fluktuatif mengalami peningkatan dan penurunan selama periode tersebut. Hal ini menyebabkan naiknya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini terjadi karena mutasi kendaraan dari menuju wilayah lainnya ke Kota Yogyakarta lebih besar daripada mutasi kendaraan keluar dari Kota Yogyakarta ke wilayah lain. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Pendaftaran kendaraan baru juga menjadi faktor peningkatan jumlah kendaraan. Data rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel - Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Panjang Jalan	Km	233,21	233,21	233,21	233,21	233,21
2.	Jumlah Kendaraan	Unit	291.978	288.360	295.022	298.139	304.073
3.	Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan	Km/ unit	0,000799	0,000809	0,000790	0,000782	0,0008

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025

Urusan Komunikasi dan Informasi

a. ***Cakupan Layanan Telekomunikasi***

Cakupan layanan telekomunikasi menunjukkan jangkauan luas wilayah yang memiliki akses layanan telekomunikasi di suatu daerah. Berdasarkan data yang ada, sudah seluruh wilayah di Kota Yogyakarta terlayani telekomunikasi. Hal tersebut berarti tidak ada area *blank spot* sehingga masyarakat di Kota Yogyakarta dapat mengakses layanan telekomunikasi dengan baik di seluruh titik.

Tabel - Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas Wilayah Yang Ter-*coverage*	Km	35,75	35,75	32,8	32,8	32,8
2.	Luas Wilayah Keseluruhan	Km	32,5	32,5	32,8	32,8	32,8
3.	Cakupan Layanan Telekomunikasi		1,10	1,10	1,00	1,00	1,00

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, 2025

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. ***Persentase Koperasi Aktif***

Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pentingnya fungsi koperasi ditunjukkan melalui peranannya dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Jumlah koperasi di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2020-2024 cenderung menurun. Dari 364 unit koperasi pada tahun 2020, turun hingga menjadi 346 unit koperasi pada tahun 2024. Walaupun begitu, persentase koperasi yang aktif dari jumlah keseluruhan selalu mencapai 100%.

Tabel - Persentase Koperasi Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi Aktif	unit	364	364	345	347	346

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah Seluruh Koperasi	unit	364	364	345	347	346
3	Persentase Koperasi Aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, 2025

Tren penurunan yang terjadi disebabkan adanya pindah kewenangan binaan ke DIY/Kabupaten lain berdasarkan NIK serta adanya pembubaran jumlah koperasi. Di sisi lain pemerintah Kota Yogyakarta, melalui Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, juga mendorong kelompok masyarakat untuk meningkatkan status kelembagaannya menjadi berbadan hukum koperasi sehingga ada penambahan jumlah koperasi dari tahun 2022 ke tahun 2023 meskipun tidak signifikan. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM juga menyelenggarakan perlombaan atau kompetisi antar koperasi dan diharapkan hadiah yang diperoleh dapat digunakan untuk pengurusan legalitas koperasi. Sementara apabila dilihat dari jumlah anggota koperasi, terjadi tren yang positif pada kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, tercatat jumlah anggota koperasi sebanyak 69.875 anggota. Terdapat kenaikan jumlah anggota meskipun ada penurunan pada jumlah koperasi.

Tabel - Jumlah Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
2020	364	71.426
2021	364	70.490
2022	345	79.508
2023	347	81.077
2024	346	69.875

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka Tahun 2025, 2025

Apabila ditinjau dari jenis koperasi, pada tahun 2024 di Kota Yogyakarta terdapat 16 jenis koperasi yang sebagian besar terdiri dari jenis Koperasi Pegawai Negeri/ Pusat Koperasi Pegawai Negeri. Sementara itu, koperasi sekunder merupakan jenis koperasi yang memiliki jumlah anggota

terbanyak. Jika dilihat dari sebaran koperasi, Kemantren Umbulharjo memiliki unit koperasi terbanyak di tahun 2024 sebesar 77 unit koperasi sedangkan Kemantren Pakualaman memiliki 7 unit koperasi dan menjadi yang terendah di antara kemantren lainnya.

Beberapa kendala yang dihadapi koperasi adalah 1) Sumber daya manusia, karena sebagian besar anggota koperasi adalah lansia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilaksanakan program koperasi *goes to school* yang bertujuan menarik minat generasi muda bergabung dalam koperasi; 2) Omset yang didapatkamn oleh koperasi terbatas karena ada persaingan dengan pihak lain seperti perbankan.

Tabel - Jenis Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2024

No.	Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
1	Koperasi Unit Desa	1	1.365
2	Koperasi Jasa	6	123
3	Koperasi Peternak	1	46
4	Koperasi Industri/Kerajinan	7	759
5	Koperasi Simpan Pinjam	28	9.124
6	Koperasi TNI/POLRI	8	2.645
7	Koperasi Wanita	18	1.457
8	KPN/PKPN	84	11.705
9	Kop. Mahasiswa/Pemuda/Pramuka	10	1.214
10	Koperasi Angkutan	4	73
11	Koperasi Veteran/Pensiunan	14	1.170
12	Koperasi Karyawan Swasta/BUMN	76	12.864
13	Koperasi Serba Usaha	66	4.681
14	Koperasi Pasar/Kaki Lima	6	6.262
15	Koperasi Lainnya	15	439
16	Koperasi Sekunder	2	16.128

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2025, 2025

No.	Jenis Koperasi	Modal Sendiri (Ribu Rupiah)	Modal Luar (Ribu Rupiah)
1	Koperasi Unit Desa	341.111	-
2	Koperasi Jasa	1.029.498	252.589
3	Koperasi Peternak	227.866	-
4	Koperasi Industri/Kerajinan	18.848.894	67.342
5	Koperasi Simpan Pinjam	17.744.575	26.114.440
6	Koperasi TNI/POLRI	22.982.216	5.874
7	Koperasi Wanita	3.995.123	22.667
8	KPN/PKPN	94.572.419	5.800.037
9	Kop. Mahasiswa/Pemuda/Pramuka	177.695	-
10	Koperasi Angkutan	4.314.606	69.333
11	Koperasi Veteran/Pensiunan	2.133.564	10.000
12	Koperasi Karyawan Swasta/BUMN	87.359.196	7.979.664
13	Koperasi Serba Usaha	9.039.081	383.690
14	Koperasi Pasar/Kaki Lima	5.314.309	-
15	Koperasi Lainnya	1.586.690	92.359
16	Koperasi Sekunder	10.000.302	892.600
Jumlah Total 2024		**279.667.146**	**41.690.596**
2023		**290.323.276**	**55.890.871**
2022		**290.703.261**	**123.060.008**
2021		**310.669.192**	**56.002.589**
2020		**292.158.264**	**41.934.900**

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2025, 2025

Koperasi Pegawai Negeri/Pusat Koperasi Pegawai Negeri merupakan jenis koperasi dengan nilai modal tertinggi dibandingkan koperasi lainnya. Dengan total Rp. 94.572.419.000 untuk modal sendiri dan Rp. 5.800.037.000 untuk modal dari luar. Sementara itu, Koperasi Mahasiswa/Pemuda/Pramuka menjadi jenis koperasi dengan nilai modal terendah, yaitu sebesar Rp. 177.695.000 yang berasal dari modal sendiri.

b. ***Capaian Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi***

Volume usaha koperasi memberikan informasi terkait besar total nilai penjualan ataupun pendapatan barang dan jasa dari hasil usaha koperasi. Dengan demikian, semakin besar volume usaha koperasi maknanya semakin besar pula nilai pendapatan dari koperasi tersebut. Sementara itu,

sisa hasil usaha adalah keuntungan bersih dari hasil usaha anggota koperasi. Sisa hasil usaha bukan berasal dari pendapatan usaha koperasi dan didistribusikan kepada anggota secara adil.

Tabel - Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2024

No.	Jenis Koperasi	Volume Usaha (Ribu Rupiah)	Sisa Hasil Usaha (Ribu Rupiah)
1	Koperasi Unit Desa	30.500	1.140
2	Koperasi Jasa	265.191	5.128
3	Koperasi Peternak	20.000	19.860
4	Koperasi Industri/Kerajinan	6.868.074	780.260
5	Koperasi Simpan Pinjam	81.459.525	1.493.580
6	Koperasi TNI/POLRI	26.067.672	1.074.415
7	Koperasi Wanita	4.776.210	239.034
8	KPN/PKPN	99.907.998	3.001.788
9	Kop. Mahasiswa/Pemuda/Pramuka	755.098	38.999
10	Koperasi Angkutan	3.116.117	414.591
11	Koperasi Veteran/Pensiunan	2.578.656	133.166
12	Koperasi Karyawan Swasta/BUMN	144.134.200	11.347.307
13	Koperasi Serba Usaha	17.508.579	711.583
14	Koperasi Pasar/Kaki Lima	5.824.174	79.941
15	Koperasi Lainnya	1.403.500	135.327
16	Koperasi Sekunder	2.491.140	77.749
Jumlah Total 2024		**397.206.633**	**19.553.868**
2023		**397.157.423**	**18.321.721**
2022		**366.330.175**	**17.878.270**
2021		**389.328.165**	**21.643.492**
2020		**444.606.264**	**44.965.068**

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2025, 2025

Jika dianalisis dari aspek volume usaha, Koperasi swasta/BUMN memiliki nilai terbesar dibandingkan jenis koperasi lainnya di tahun 2024, yaitu sebanyak Rp. 144.134.200.000,00 sedangkan koperasi peternak menjadi yang terendah dengan besar Rp. 20.000.000,00. Sementara itu, berdasarkan aspek sisa hasil usaha, koperasi unit desa memiliki nilai SHU terendah,

yakni Rp. 1.140.000,00. Koperasi swasta/BUMN tetap menjadi yang tertinggi dengan SHU sebesar Rp. 11.347.307.000,00.

c. ***Persentase Usaha Mikro dan Kecil***

Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Industri mikro dan kecil merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial untuk memberdayakan masyarakat menengah ke bawah, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan. Industri mikro dan kecil mendominasi industri di Kota Yogyakarta, dengan angka di 100% selama periode tahun 2020-2024. Namun ternyata jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta mengalami penurunan yang cukup signifikan selama tahun 2020-2024. Data jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel - Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah usaha mikro dan kecil	unit	14.654	18.402	6.835	6.835	6.835
2.	Jumlah Seluruh UKM	unit	14.654	18.402	6.835	6.835	6.835
3.	Persentase usaha mikro dan kecil	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2024; Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025

d. ***Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto***

Volume Usaha Koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa besar peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dibutuhkan indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap

PDRB. Rasio tersebut merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

	2020	2021	2022	2023	2024
Volume Koperasi (ribu rupiah)	444,606,264	389,328,165	366,330,175	397,157,423	397,206,633
PDRB ADHB (ribu rupiah)	35,768,259,1	38,416,520,0	46,628,180,0	46,192,500,0	49,389,880,0
Rasio Volume Usaha Koperasi	1.24	1.01	0.79	0.86	0.80

Gambar II.76 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADHB (Ribu Rupiah) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2021-2025, diolah

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kota Yogyakarta pada periode 2020-2024 masih berkisar di angka 1%, bahkan pada tahun 2022-2024 berada di bawah 1%. Rasio tertinggi justru terjadi pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 , di mana PDRB ADHB mengalami penurunan secara signifikan dari 36,559 triliun rupiah di tahun 2019 menjadi 35,768 triliun rupiah di tahun 2020. Di sisi lain, volume usaha koperasi meningkat dari 424,85 milyar menjadi 444,60 milyar. Pada tahun 2021 dengan membaiknya Perekonomian pasca pandemi PDRB ADHB mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 38,41 triliun rupiah. Peningkatan PDRB ADHB tersebut terus terjadi dengan signifikan sampai dengan tahun 2024, di mana PDRB ADHB ada pada angka 49.389,88 triliun rupiah. Di sisi lain, volume usaha koperasi mengalami fluktuasi yang kurang signifikan pada periode 2021-2023 sehingga rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mengalami penurunan dari 1,01 di tahun 2021 menjadi 0,80 di tahun 2024. Koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendasarkan

data rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB kebijakan pengembangan koperasi harus dilakukan.

Urusan Penanaman Modal

a. ***Jumlah Investor PMDN/PA***

Indikator jumlah investor PMDN/PA di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Data ini bersumber dari jumlah perusahaan yang memproses perizinan berusaha di OSS RBA periode tahun 2023. Data tahun 2020 menunjukkan angka 676 investor, dan naik pada tahun 2021 dengan 4.907 investor. Tahun 2022 menunjukkan penurunan kembali ke 480 investor, sebelum melonjak drastis pada tahun 2023 dengan 14.017 investor dan tahun 2024 dengan 14.485 investor.

Mulai pada tahun 2023, terdapat perbedaan pada sistem OSS di mana pada tahun-tahun sebelumnya, usaha mikro tidak masuk dalam perhitungan jumlah investor baru, sedangkan saat ini, usaha mikro dimasukkan ke dalam jumlah investor baru. Hal tersebut disebabkan karena di DIY, usaha mikro menjadi unsur penting dalam investasi. Peningkatan jumlah investor di Kota Yogyakarta disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk adanya peraturan yang mendorong kemudahan investasi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi, promosi investasi melalui media sosial, pembuatan video, dan foto promosi investasi, serta kemudahan proses perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS turut berkontribusi dalam peningkatan ini. Selain itu, layanan perizinan berusaha yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dan sosialisasi perizinan berusaha kepada pelaku usaha di Kota Yogyakarta juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha untuk mengurus legalitas usaha. Namun, jumlah investor Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami penurunan karena tidak tersedianya lahan yang cukup untuk berinvestasi di Kota Yogyakarta.

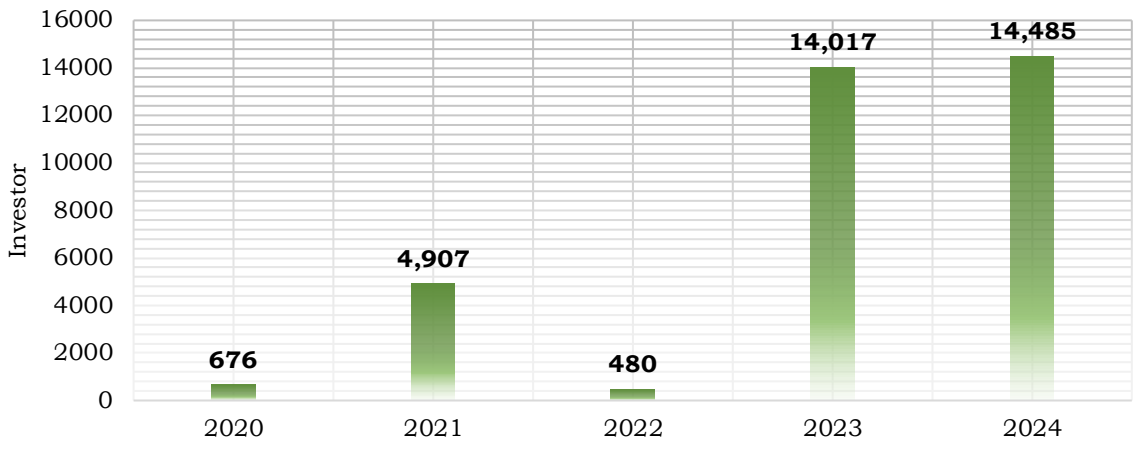

Gambar II.77 Jumlah Investor PMDN/PA Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

b. ***Rasio Daya Serap Tenaga Kerja***

Terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta baik dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Data yang tercatat berasal dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan. Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021, pelaku usaha/perusahaan yang wajib menyampaikan LKPM adalah pelaku usaha skala kecil, skala menengah, dan skala besar.

Terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta baik dari Perusahaan PMA maupun PMDN. Namun jumlah perusahaan PMDN terjadi penurunan di tahun 2023 hal ini dikarenakan yang tercatat hanyalah Pelaku Usaha Sekala Menengah dan Besar (NON UMK). Data yang tercatat bersumber dari LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang disampaikan oleh Perusahaan. Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Pelaku Usaha/Perusahaan yang wajib menyampaikan LKPM adalah Pelaku Usaha Skala Kecil, Skala Menengah dan Skala Besar. Namun untuk LKPM Skala Kecil saat ini belum dapat ditarik datanya sehingga terjadi penurunan pada angka Perusahaan PMDN. Tahun 2024 data yang disajikan merupakan data LKPM Triwulan IV (Januari 2024). Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan kembali jumlah perusahaan PMDN.

Peningkatan perusahaan PMDN diikuti dengan peningkatan daya serap tenaga kerja PMDN.

Tabel - Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Yogyakarta 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024*
Penanam Modal Asing (PMA)							
1	Tenaga Kerja	Jiwa	12	19	302	637	399
2	Perusahaan	Unit	3	3	34	51	49
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		63,67	4,00	6,33	8,88	12,49
Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)							
1	Tenaga Kerja	Jiwa	4.053	8.774	1.066	1.497	1.799
2	Perusahaan	Unit	673	4.907	446	216	269
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		13,83	6,02	1,79	2,39	6,93
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja			77,50	10,02	4.053	8.774	1.066

**) LKPM Triwulan IV (1-10 Januari 2024)*

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, 2025

c. ***Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA***

Secara umum, realisasi investasi pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena tahun 2020 masih merupakan masa transisi Covid-19 . Selain itu, perkembangan investasi di Kota Yogyakarta didukung dengan adanya penambahan personil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pendampingan, pembinaan, dan pengawasan, serta adanya sosialisasi dengan mengundang para pelaku usaha di Kota Yogyakarta. Banyak pelaku usaha yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mulai menaati kewajibannya untuk menjalankan kewajiban lapor LKPM yang di tahun sebelumnya belum dijalankan. Peningkatan kapasitas pelayanan investasi dengan didukung semua program penunjang capaian sasaran investasi juga turut berperan. Selain itu, dukungan promosi investasi melalui pameran investasi dan publikasi di berbagai media sosial turut menunjang kenaikan investasi di Kota Yogyakarta.

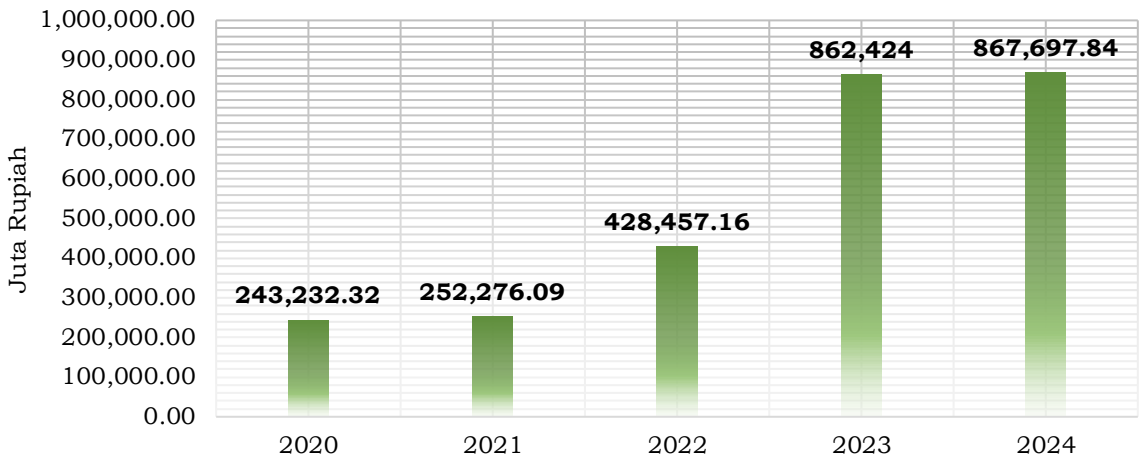

Gambar II.78 Jumlah Nilai Investasi PMDN/PA Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. ***Indeks Pembangunan Olahraga***

Indeks Pembangunan Olahraga adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan olahraga di suatu daerah. Indeks Pembangunan Olahraga mencakup berbagai aspek yang berkontribusi pada perkembangan olahraga. Indeks Pembangunan Olahraga (SDI) Kota Yogyakarta tahun 2024 mengungkapkan bahwa kota ini masih berada dalam kategori rendah dengan skor keseluruhan 0,387. Dimensi yang diukur mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), Ruang Terbuka, Literasi Fisik, Partisipasi, Kebugaran Jasmani, Kesehatan, Perkembangan Personal, Ekonomi, dan Performa. Dimensi SDM dan Ruang Terbuka mencatat skor terendah masing-masing 0,042 dan 0,175, menunjukkan kekurangan serius dalam jumlah dan kualitas tenaga profesional serta ketersediaan fasilitas olahraga. Meski literasi fisik memiliki skor tinggi (0,742), partisipasi aktif dalam olahraga masih rendah (0,302). Kebugaran Jasmani, dengan skor 0,376, menunjukkan bahwa implementasi kesadaran olahraga masih kurang. Skor dimensi Kesehatan yang berada pada angka 0,624 yang cukup tinggi, menunjukkan literasi atau kesadaran masyarakat untuk sehat sudah cukup tinggi baik secara fisik dan psikis.

Tabel - Indeks Pembangunan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024

Dimensi	2024
Sumber Daya Manusia	0,042
Ruang Terbuka	0,175
Literasi Fisik	0,742
Partisipasi	0,302
Kebugaran Jasmani	0,376
Kesehatan	0,624
Perkembangan Personal	0,607
Ekonomi	0,309
Performa	0,309
Indeks Pembangunan Olahraga Kota Yogyakarta	0,387

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2024

b. ***Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif***

Persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 berada pada angka 82,05%, persentase ini meningkat menjadi 92,31% pada tahun 2021 dan 2022, serta kembali mencapai 100% pada tahun 2023 hingga 2024. Adanya peningkatan tersebut disebabkan terdapat penambahan Organisasi Kepemudaan (OK) dari Forum Komunikasi Orkestra Pelajar (FKOP) Kota Yogyakarta. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dan inisiatif untuk mengaktifkan kembali dan mendukung organisasi pemuda di Kota Yogyakarta.

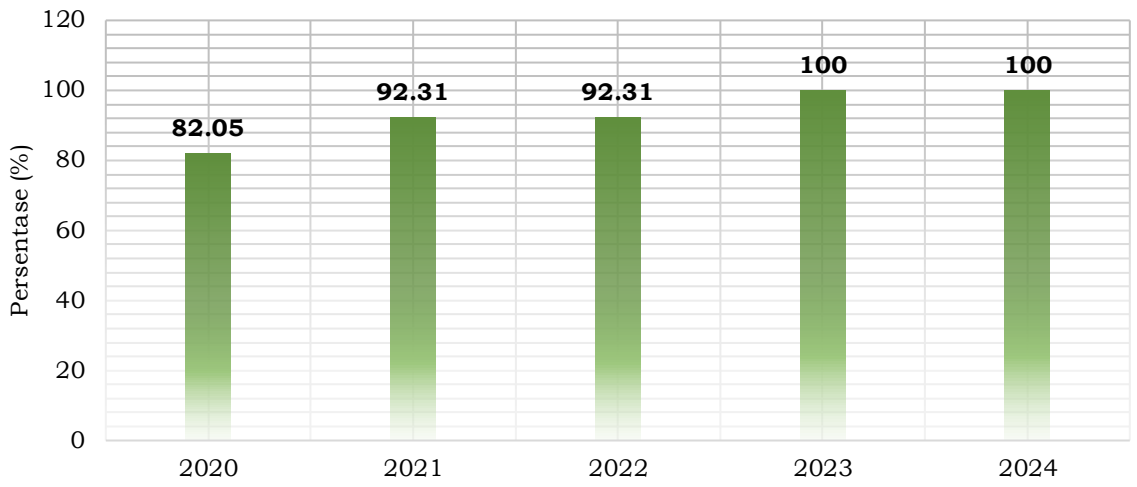

Gambar II.79 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

c. ***Persentase Wirausaha Muda***

Persentase wirausaha muda di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2021, persentase meningkat sedikit menjadi 8,65%. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan besar hingga 52,40%, yang menunjukkan dorongan kuat untuk wirausaha muda pada tahun tersebut. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan sedikit peningkatan menjadi 52,60%, serta menjadi 53,85% pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan jumlah wirausaha muda dari alumni kegiatan Pelatihan Kreativitas Pemuda di tahun 2024. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan keberhasilan berbagai program dan inisiatif yang mendukung pengembangan wirausaha muda di Kota Yogyakarta.

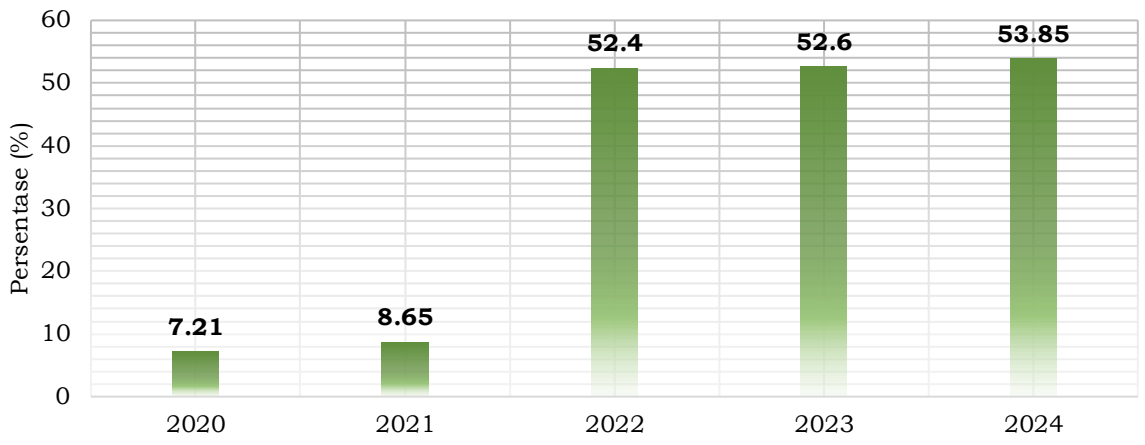

Gambar II.80 Persentase Wirausaha Muda di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

d. ***Cakupan Pembinaan Olahraga***

Cakupan pembinaan olahraga di Kota Yogyakarta tetap berada pada angka 100% dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh cabang olahraga yang ada mendapatkan pembinaan secara konsisten setiap tahunnya. Jumlah cabang olahraga yang dibina terdiri dari 51 cabang olahraga yang berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), 10 cabang olahraga di bawah *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCI), dan 11 cabang olahraga yang dikelola oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). Konsistensi ini mencerminkan komitmen dan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan setiap cabang olahraga mendapatkan perhatian dan dukungan yang diperlukan untuk berkembang. Pembinaan yang mencakup berbagai cabang olahraga ini juga menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi di berbagai bidang olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional.

e. ***Cakupan Pembinaan Atlet Muda***

Indikator cakupan pembinaan atlet muda menunjukkan persentase pembinaan atlet muda di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 hingga 2024. Data ini berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan mencerminkan upaya pembinaan yang konsisten untuk meningkatkan

prestasi olahraga. Cakupan pembinaan atlet muda mulai tercatat pada tahun 2020, cakupan pembinaan mencapai 100% dan konsisten bertahan hingga tahun 2024. Jumlah atlet pelajar disesuaikan dengan target pembinaan yang akan dicapai dalam kejuaraan yang diikuti, dengan harapan peningkatan prestasi olahraga. Pembinaan yang konsisten dan menyeluruh ini bertujuan untuk mempersiapkan atlet muda secara optimal sehingga mereka dapat berprestasi di berbagai kejuaraan. Program pembinaan mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan teknis, fisik, hingga mental, untuk memastikan bahwa atlet muda memiliki kesiapan yang komprehensif dalam menghadapi kompetisi. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelatih, pemerintah, dan organisasi olahraga, turut berperan dalam keberhasilan program pembinaan ini. Salah satu program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah program sentra pembinaan olahraga untuk atlet yang terdapat di satuan pendidikan dasar SD dan SMP.

f. ***Jumlah Atlet Berprestasi***

Jumlah atlet berprestasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada atlet yang tercatat memenangi kejuaraan, yang mungkin disebabkan oleh pembatalan atau penundaan banyak kejuaraan akibat pandemi Covid-19 . Pada tahun 2022, jumlah atlet berprestasi meningkat menjadi 12 atlet, pada tahun 2023, jumlah ini melonjak signifikan menjadi 38 atlet, hingga pada tahun 2024 menjadi 54 atlet. Dalam setiap fase atau tahun, atlet mengalami masa puncak performa, sehingga perolehan medali tidak dapat ditentukan secara pasti karena kekuatan atlet dari daerah lain juga mengalami perubahan. Pada tahun 2024, prestasi atlet berasal dari berbagai cabang olahraga baik di tingkat nasional maupun internasional.

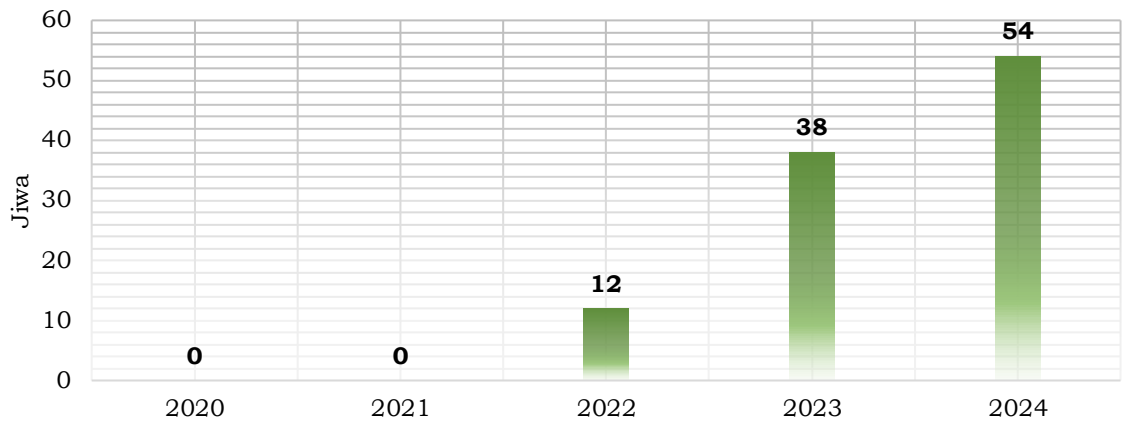

Gambar II.81 Jumlah Atlet yang Memenangi Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional dalam Satu Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

g. ***Jumlah Prestasi Olahraga***

Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada prestasi yang tercatat, kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membatasi banyak kegiatan olahraga dan kompetisi.

Pada tahun 2022, jumlah prestasi kembali meningkat secara signifikan menjadi 23, pada tahun 2023 mencapai 29 prestasi, serta pada tahun 2024 menjadi 30 prestasi. Masing-masing cabang olahraga mengalami naik turun prestasi dalam setiap kejuaraan yang diikuti, yang menunjukkan dinamika kompetisi dan perubahan kekuatan atlet dari daerah lain. Prestasi yang diraih oleh atlet-atlet ini mencerminkan efektivitas program pembinaan dan dukungan dari berbagai pihak. Kenaikan jumlah prestasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas pembinaan dan kesiapan atlet untuk berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Program-program pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan fasilitas serta sumber daya yang memadai sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi di masa mendatang.

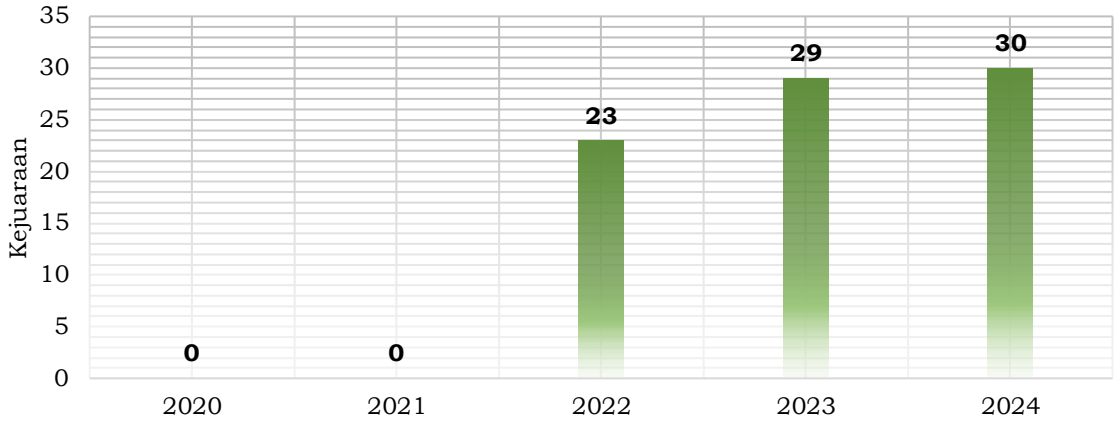

Gambar II.82 Jumlah Prestasi Cabang Olahraga yang Dimenangkan dalam Satu Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Urusan Statistik

a. ***Buku "Kota dalam Angka"***

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi secara progresif data semestinya disajikan hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tata kala waktu. Namun sebaliknya yang terjadi sering kali buku statistik terbit harus lengkap sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang *update*. Pada data tersebut menginformasikan bahwa buku statistik Kota Yogyakarta telah tersedia, yaitu tahun 2020-2024 sudah terdapat buku "kota dalam angka" Kota Yogyakarta.

b. ***Buku "PDRB"***

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik dilaksanakan. Penyusunan buku PDRB dilakukan sebagai pelaksanaan penyelenggaraan statistik. Pada data di bawah menginformasikan bahwa buku PDRB Kota Yogyakarta telah tersedia tahun

2020-2023 dengan satuan “Ada”. Namun, untuk tahun 2024 masih belum rilis atau “Tidak”.

Urusan Persandian

a. ***Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kebudayaan***

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi menunjukkan angka yang konsisten tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 hingga 2024, persentase ini stabil di angka 100%, menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah telah mengadopsi penggunaan sandi dalam komunikasi mereka. Adopsi sandi dalam komunikasi ini penting untuk meningkatkan keamanan informasi dan mencegah kebocoran data. Konsistensi pada angka 100% dari tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan komitmen dan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya keamanan informasi dalam komunikasi mereka. Implementasi ini juga menunjukkan efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian untuk memastikan bahwa semua perangkat daerah mengikuti standar keamanan yang ditetapkan.

Urusan Kebudayaan

a. ***Jumlah Rintisan Kelurahan Budaya***

Rintisan Kelurahan Budaya adalah kelurahan yang memiliki keterikatan bersama untuk mempertahankan kelestarian budaya setempat. Pada tahun 2020-2024, jumlah rintisan kelurahan budaya Kota Yogyakarta terus meningkat.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) yang signifikan dibanding Tahun 2021 yaitu 24 RKB dengan 17 RKB yang aktif. Tujuh (7) RKB diantaranya merupakan RKB baru yang ditetapkan mendasarkan akreditasi yang mengacu Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2020 tentang RKB dengan mempertimbangkan parameter upacara adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional serta tata

ruang, cagar budaya dan warisan budaya yaitu RKB Notoprajan, RKB Kadipaten, RKB Bumijo, RKB Demangan, RKB Tahunan, RKB Wirogunan dan RKB Mantrijeron.

Pada tahun 2024 terdapat 36 RKB, RKB dalam kategori tumbuh ada 22 kelurahan dan berkembang 14 kelurahan. Dua kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta masuk dalam pra-RKB dan 7 kelurahan telah masuk dalam kategori Kelurahan Budaya.

b. ***Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya***

Peningkatan jumlah kegiatan seni budaya yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 menunjukkan upaya yang signifikan dalam mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya di Kota Yogyakarta. Kegiatan seni budaya yang diselenggarakan pada tahun 2024 juga ditujukan untuk memfasilitasi lembaga budaya yang telah terdaftar dengan Nomor Induk Kebudayaan (NIKFluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk perubahan kebijakan, anggaran, dan kondisi eksternal seperti pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan signifikan pada tahun 2020 dengan hanya 32 hari kegiatan.

Kegiatan seni budaya pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan menjadi 231 hari, dibandingkan dengan 191 hari pada tahun 2023. Keberhasilan berbagai kegiatan seni budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kota Yogyakarta dicapai berkat kerja sama dengan *stakeholder* terkait di bidang kebudayaan. Selain itu, respons positif dan peran serta masyarakat yang tinggi sangat memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kota Yogyakarta. Peningkatan jumlah kegiatan ini mencerminkan komitmen Dinas Kebudayaan dalam melibatkan masyarakat dan *stakeholder* dalam setiap program budaya, serta memastikan bahwa setiap kegiatan budaya dapat dinikmati dan diakses oleh masyarakat luas, sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal.

c. ***Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan***

Adanya kenaikan jumlah objek Warisan Budaya Cagar Budaya (WBCB) yang dikaji dan ditetapkan menyebabkan objek WBCB yang dilestarikan semakin meningkat. Pada tahun 2020 hingga 2024, persentase pelestarian stabil pada angka 100%, menunjukkan bahwa semua objek WBCB yang dikaji dan ditetapkan telah dilestarikan sepenuhnya. Adanya kenaikan jumlah objek WBCB yang dikaji dan ditetapkan sehingga objek WBCB yang dilestarikan semakin meningkat. Peningkatan ini tidak lepas dari kerja sama yang baik antara Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kota Yogyakarta dengan *stakeholder* terkait dalam upaya pelestarian cagar budaya maupun warisan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Tim Ahli Cagar Budaya sebagai partner Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kota Yogyakarta dalam melakukan kegiatan rekomendasi Cagar Budaya memiliki kecakapan dan kompetensi yang mumpuni sehingga dapat membantu upaya pelestarian secara maksimal. Selain itu, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung upaya pelestarian dengan kesediaan atas rekomendasi BWB menjadi BCB dan juga semangat masyarakat untuk melakukan pelaporan dan perlindungan terhadap objek yang berpotensi untuk direkomendasikan sebagai BCB.

Tabel - Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	N/A	52	72	70,33	82,28
2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase Objek Warisan Budaya yang Diapresiasi	Persen	N/A	N/A	N/A	56,35	82,02

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2025

Adapun jika dilihat lebih detail, cagar budaya yang berada di kawasan sumbu filosofis hampir separuh dari total cagar budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Sumbu Filosofis sebagai Warisan Budaya Dunia yang harus dilestarikan oleh segenap masyarakat, baik Kota Yogyakarta maupun masyarakat luar yang beraktivitas di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2023, warisan budaya yang dilestarikan berubah menjadi Persentase Objek Warisan Budaya yang Diapresiasi sebagai peningkatan dengan menggunakan objek cagar budaya yang tercatat di register nasonal.

Urusan Perpustakaan

a. ***Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun***

Penurunan jumlah kunjungan pada tahun 2023 dan 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh perbedaan kriteria penghitungan kunjungan. Sebelum tahun 2023, penghitungan jumlah kunjungan didasarkan pada kunjungan ke perpustakaan dan kunjungan ke layanan lainnya seperti *wifi* dan *website*. Sedangkan, pada tahun 2023 dan 2024, perhitungan hanya berdasarkan pada pengunjung yang mengakses atau berkunjung ke perpustakaan secara fisik (baik perpustakaan Kotabaru, Pevita, Keliling, maupun perpustakaan digital/e-YK) tanpa menghitung frekuensi kunjungan penggunaan layanannya.

Perubahan metode penghitungan ini menyebabkan penurunan yang terlihat dalam data jumlah pengunjung pada tahun 2023 dan 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, pada tahun 2022, jumlah kunjungan mencapai puncaknya dengan 418.738 kunjungan, namun pada tahun 2023 jumlah ini turun menjadi 193.899, hingga menjadi 121.531. Penurunan ini tidak serta-merta menunjukkan penurunan minat, melainkan refleksi dari perubahan metodologi penghitungan kunjungan yang lebih spesifik dan terbatas pada kunjungan fisik ke perpustakaan. Selain perbedaan metodologi, juga terdapat perubahan nama indikator menjadi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat seperti yang tercantum pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Hal ini juga menunjukkan

upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mengadaptasi dan memperbarui cara mereka menghitung dan melacak pengunjung untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan terpilah, yang pada akhirnya akan membantu dalam perencanaan dan pengembangan layanan perpustakaan di masa mendatang.

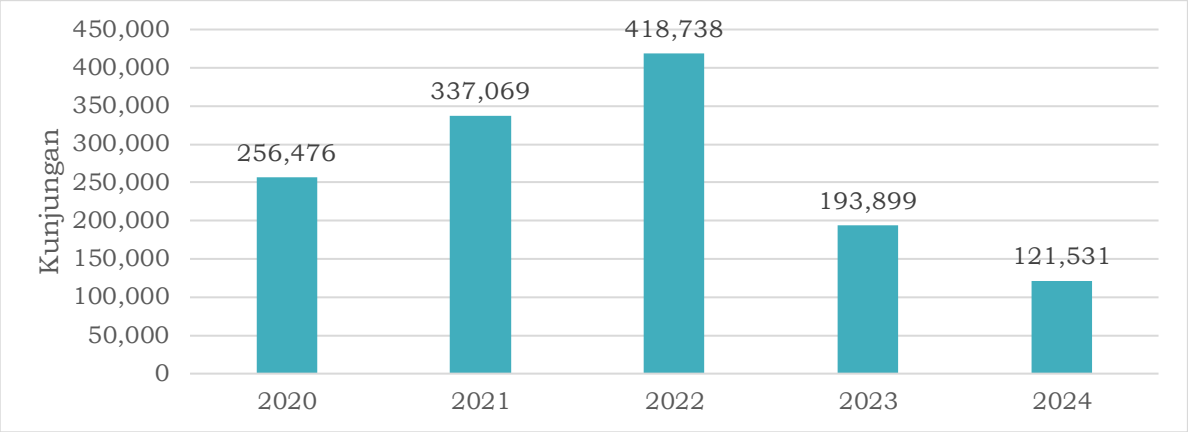

Gambar II.83 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2025

b. ***Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah***

Indeks koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan peningkatan pada tahun 2020, terjadi lonjakan besar dengan koleksi mencapai 0,81. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024, indeks koleksi buku mengalami penurunan. Pada tahun 2024, indeks koleksi buku yang tersedia tercatat sebanyak 0,67, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penghapusan aset buku pada bulan Oktober 2023. Buku-buku yang dihapus dari koleksi perpustakaan adalah buku yang rusak secara fisik dan buku yang informasinya sudah usang atau tidak relevan lagi *(out of date).* Penghapusan aset buku ini merupakan bagian dari upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menjaga kualitas koleksi buku yang tersedia di perpustakaan. Dengan memastikan bahwa hanya buku-buku yang masih dalam kondisi baik dan informatif yang tersedia, perpustakaan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pengunjung. Upaya ini juga mencerminkan komitmen untuk memperbarui dan meningkatkan koleksi

buku secara berkala, sesuai dengan perkembangan informasi dan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2024, kenaikan koleksi buku disebabkan adanya penambahan koleksi dari kegiatan DAK Fisik berupa DAK Koleksi perpustakaan sebanyak 824 judul dan penambahan koleksi tahun 2024 dari belanja rutin sebanyak 669 judul. Jumlah 33.436 judul buku adalah jumlah judul buku yang tersedia di dalam aplikasi Inlislite.

Tabel - Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul	35.220	35.962	33.246	31.764	33.436
Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar	43.247	46.443	49.065	46.813	50.034
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah		0,81	0,77	0,68	0,68	0,67

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2025

Urusan Kearsipan

a. ***Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku***

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Kerja di Kota Yogyakarta telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Hal ini tercermin dari persentase yang stabil di angka 100% dari tahun 2020 hingga 2024. Konsistensi ini menunjukkan keberhasilan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam memastikan semua perangkat daerah mengikuti standar pengelolaan arsip yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) yang setiap tahun selalu melakukan pendampingan pada OPD dan Unit Kerja di Kota Yogyakarta. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan arahan, pelatihan, dan evaluasi terkait pengelolaan arsip, sehingga memastikan bahwa semua perangkat daerah mampu mengelola arsip mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan yang rutin ini menciptakan kesadaran dan keterampilan di kalangan pegawai untuk

mengelola arsip secara efektif dan efisien. Selain itu, dukungan dari manajemen dan koordinasi yang baik antara DPK dan OPD serta Unit Kerja berkontribusi terhadap tercapainya standar pengelolaan arsip yang baku. Dengan pengelolaan arsip yang baik, kualitas layanan publik dapat ditingkatkan, serta memastikan bahwa informasi dan dokumentasi penting dapat diakses dan dikelola dengan benar.

Urusan Pariwisata

a. ***Pergerakan Wisatawan***

Jumlah pergerakan wisatawan di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi cenderung meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Peningkatan drastic dapat dilihat pada tahun 2022 hingga 2024, jumlah kunjungan meningkat tajam, dan mencapai lebih dari 10 juta kunjungan pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yakni penetapan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan, peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata, promosi inovatif serta penguatan kelembagaan pariwisata. Dengan berbagai upaya tersebut Kota Yogyakarta menjadi sebagai salah satu destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara.

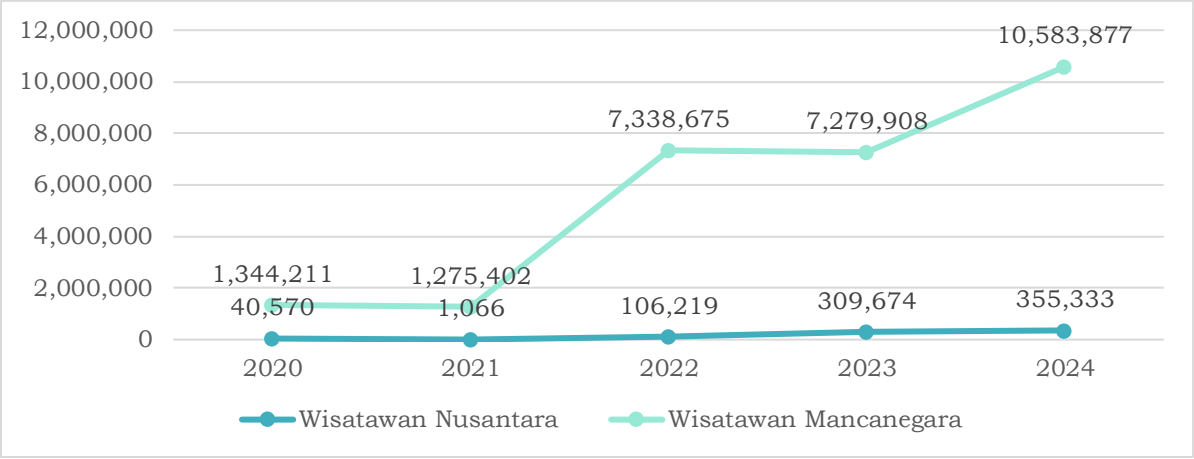

Gambar II.84 Pergerakan Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta didukung oleh berbagai potensi wisata. Potensi ini meliputi berbagai macam

jenis wisata yaitu wisata sejarah, wisata budaya, wisata religi, wisata Pendidikan, wisata belanja, dan desa wisata.

Tabel - Jumlah Tempat Wisata di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2023	2024
Wisata Sejarah, Budaya, Religi	Tempat	20	19
Pendidikan	Tempat	14	14
Belanja	Tempat	6	7
Desa Wisata	Tempat	25	18
Total	Tempat	65	58

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, 2025

b. ***Lama Kunjungan Wisata***

Lama kunjungan wisata di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, lama kunjungan mencapai puncaknya dengan rata-rata 1,63 hari. Namun, pada tahun 2021, durasi kunjungan menurun signifikan, kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas dan aktivitas wisata. Pada tahun 2024, durasi rata-rata kunjungan wisatawan mencapai 1,88 hari, yang menunjukkan peningkatan. Hal ini menandakan bahwa pariwisata di Kota Yogyakarta semakin baik.

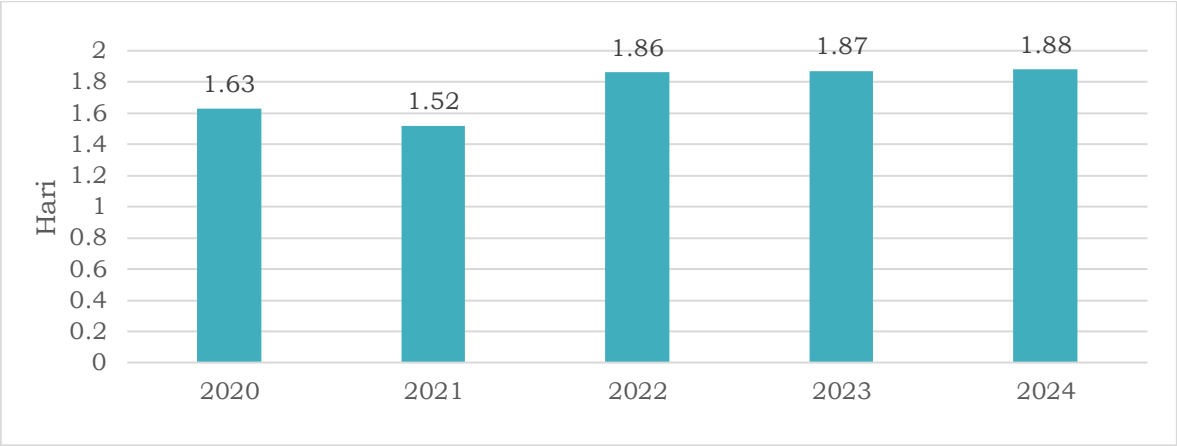

Gambar II.85 Lama Kunjungan Wisata di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2025

c. ***PAD Sektor Pariwisata***

Indikator PAD sektor pariwisata terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan BLUD Taman Pintar. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Yogyakarta menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Tahun 2021 menunjukkan penurunan signifikan yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 , yang mempengaruhi mobilitas dan aktivitas pariwisata serta berdampak negatif pada ekonomi lokal. Namun, pada tahun 2022 - 2024, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD mengalami peningkatan signifikan, mencapai 36,13% pada tahun 2024.

Tabel - PAD Sektor Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Hotel	Rp	78.279.066.037	69.577.661.221	178.609.791.299	204.454.322.895	205.248.934.658
Pajak Restoran	Rp	43.521.758.533	46.257.454.698	71.705.360.981	85.517.019.289	91.034.025.025
Pajak Hiburan	Rp	3.870.424.584	2.972.217.801	9.295.272.146	11.634.345.114	12.635.843.220
BLUD Taman Pintar	Rp	4.887.231.981	2.824.712.530	11.442.681.284	13.473.282.544	-
Total Sektor Pariwisata	Rp	130.558.481.135	121.632.046.250	271.053.105.710	315.078.969.842	308.918.802.903
Total PAD	Rp	563.174.371.397	598.121.885.338	725.577.542.998	805.346.115.793	855.100.858.914
PAD Sektor Pariwisata	Persen	23,18	20,34	37,36	39,12	36,13

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025

d. ***Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Yogyakarta***

Perhitungan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tidak tersedia secara khusus. Selama ini, kontribusi sektor pariwisata ditinjau dari kontribusi sektor akomodasi dan makan minum. Dari tahun 2020-2024,

nilai PDRB akomodasi dan makan minum cenderung meningkat. Pada tahun 2020, kontribusinya sebesar 10,97% hingga tahun 2024 meningkat sebesar 13,44%.

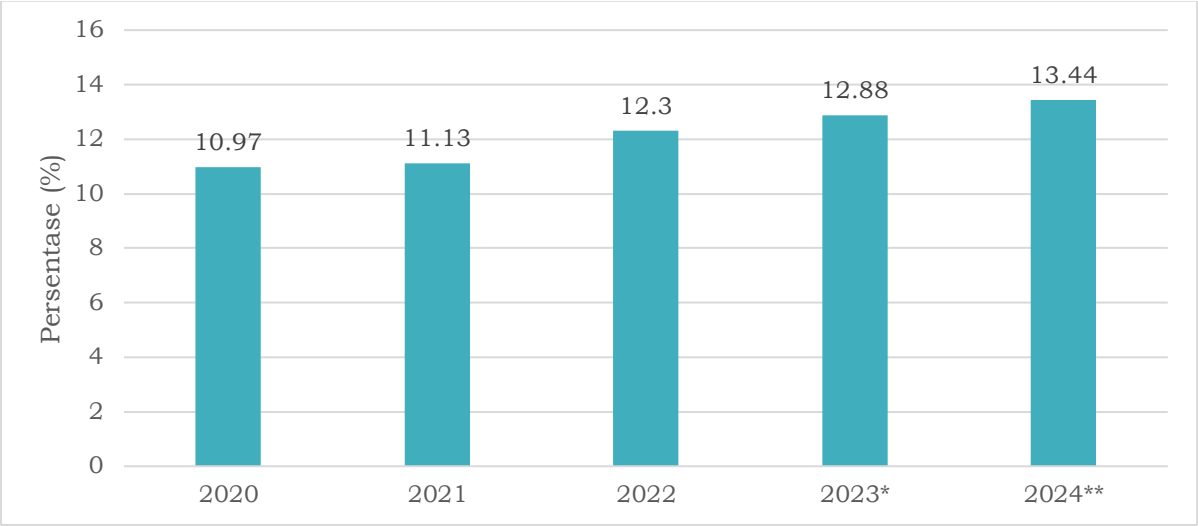

Gambar II.86 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

**) Angka sementara, **) Angka sangat sementara*

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2025, 2025

Urusan Pertanian

a. ***Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB***

Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB di Kota Yogyakarta menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Penurunan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam struktur ekonomi Kota Yogyakarta yang semakin bergeser dari sektor agraris ke sektor jasa dan industri. Faktor utama yang mendorong penurunan ini karena bentuk morfologi merupakan kawasan perkotaan sehingga muncul perubahan penggunaan lahan di perkotaan, selain itu kontribusi pertanian terhadap PDRB tergolong kecil yang menandakan bahwa karakter wilayah dengan morfologi perkotaan.

Selain itu, perubahan iklim dan degradasi lahan turut mempengaruhi produktivitas sektor pertanian dan perkebunan. Di sisi lain, investasi dan tenaga kerja cenderung lebih diarahkan ke sektor-sektor yang dinilai lebih menguntungkan seperti pariwisata dan perdagangan. Dalam menghadapi

tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian melalui inovasi teknologi, diversifikasi produk, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan dukungan kebijakan pemerintah yang memadai. Namun demikian, tantangan-tantangan seperti perubahan iklim, urbanisasi yang terus berlanjut, dan persaingan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya tetap menjadi faktor yang perlu dihadapi.

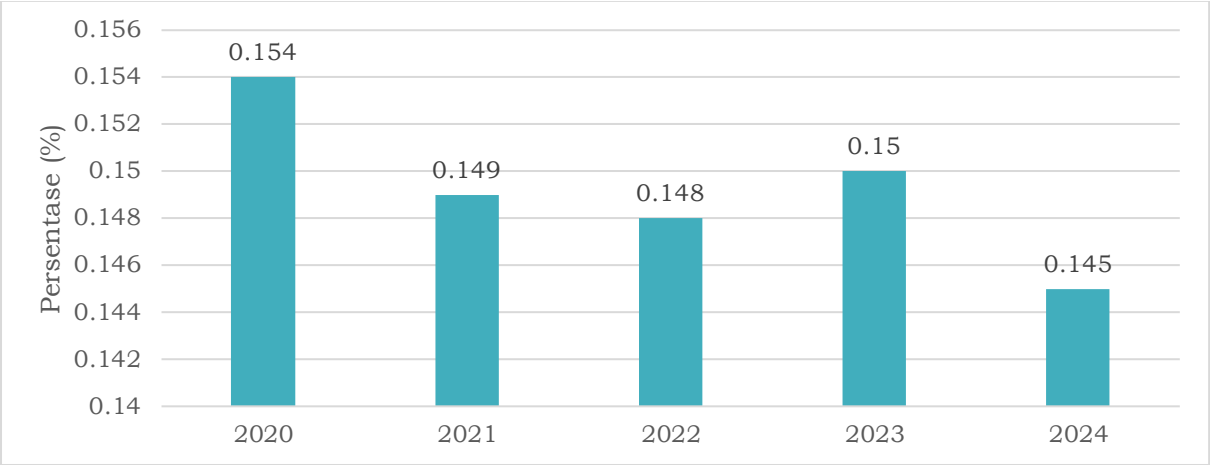

Gambar II.87 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

b. ***Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar***

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi pada kisaran 5 ton/ha dari tahun 2020 hingga 2024. Fluktuasi produktivitas ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, kualitas tanah, serangan hama, dan praktik pertanian yang mungkin kurang optimal. Untuk mengatasi fluktuasi produktivitas ini, perlu adanya kebijakan yang mengarah pada konsep pertanian perkotaan yang sekaligus menjadi alternatif upaya pemenuhan cadangan pangan bagi penduduk dan bahkan potensi pariwisata.

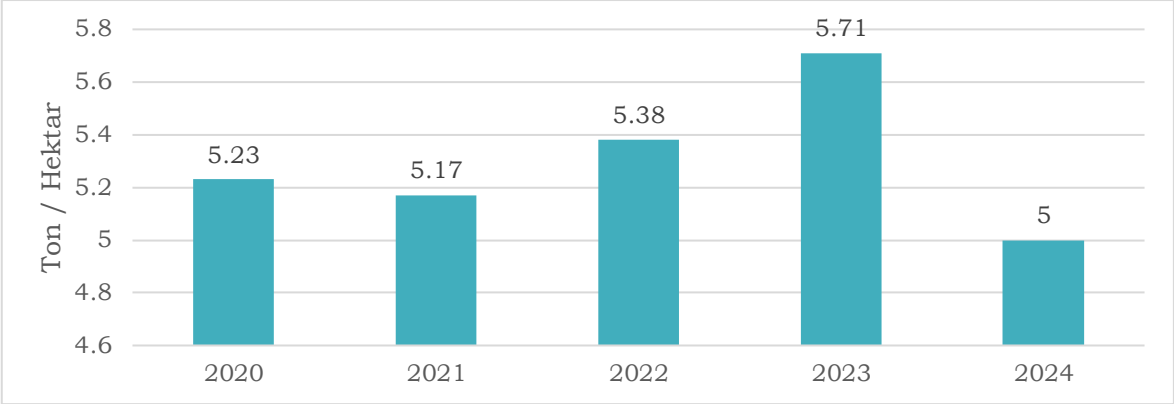

Gambar II.88 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. ***Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik***

Persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari PLN, pada tahun 2020 hingga 2024, persentase rumah tangga pengguna listrik menunjukkan angka yang hampir sempurna, yakni 99,99%. Hal ini mencerminkan keberhasilan program elektrifikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan PLN untuk memastikan hampir semua rumah tangga di Kota Yogyakarta memiliki akses terhadap listrik. Namun, penurunan jumlah rumah tangga pengguna listrik pada tahun-tahun sebelumnya terjadi akibat validasi data jumlah pelanggan rumah tangga non PLN. Selain itu, jumlah rumah tangga juga mengalami penurunan akibat validasi data jumlah rumah tangga. Proses validasi ini penting untuk memastikan akurasi dan keandalan data yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor kelistrikan.

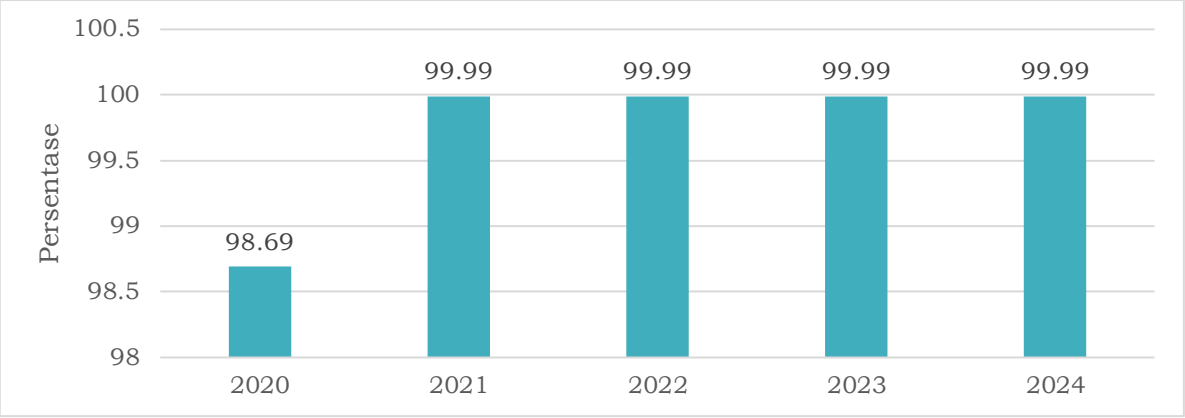

Gambar II.89 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: PLN Kota Yogyakarta, 2025

b. ***Rasio Ketersediaan Daya Listrik***

Rasio ketersediaan daya listrik di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 52,15%, dan terus menurun menjadi 44,99% pada tahun 2023. Lalu rasio ini meningkat pada tahun 2024 menjadi 46,91%. Fluktuasi ini perlu mendapatkan perhatian untuk memastikan bahwa pasokan listrik dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah pelanggan PLN dan aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta.

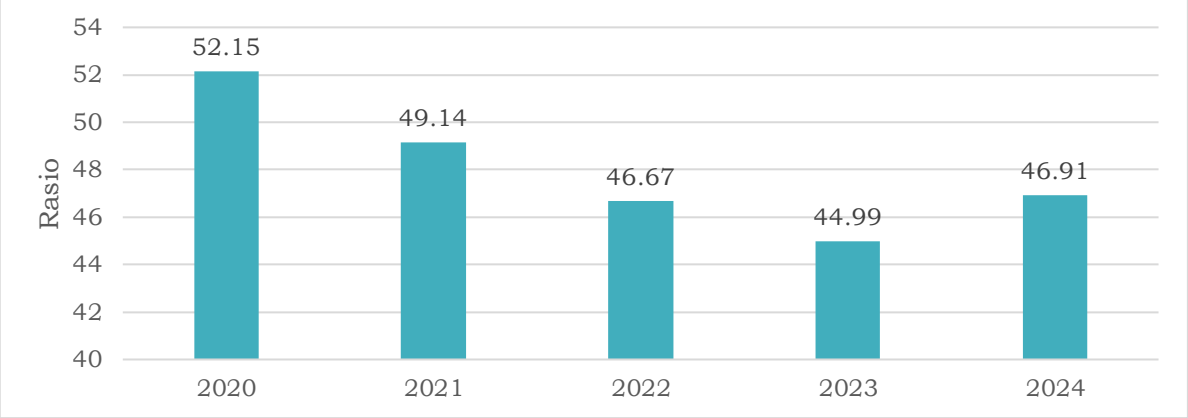

Gambar II.90 Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Sementara itu, berdasarkan data daya terpasang, produksi dan distribusi listrik PT. PLN pada unit layanan pelanggan PLN di Kota Yogyakarta, angka

realisasi mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kebutuhan daya listrik yang diimbangi dengan peningkatan produksi listrik sehingga jumlah listrik terjual meningkat tiap tahunnya pada jangka waktu 2020-2024.

Tabel - Listrik Terjual di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Daya Terpasang	VA	762.701.517	791.607.967	819.287.617	857.406.717	903.839.167
2	Produksi Listrik	KWh	1.091.697.928	1.091.264.920	1.580.609.856	1.701.127.448	1.730.439.409
3	Listrik Terjual	KWh	1.057.979.600	1.056.546.446	1.181.475.531	1.284.740.244	1.397.546.913

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta 2025

Urusan Perdagangan

a. ***Ekspor Bersih Perdagangan***

Eksor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai impor dengan nilai ekspor. Nilai positif menunjukkan bahwa nilai impor lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor, demikian sebaliknya nilai negatif menunjukkan nilai impor lebih kecil dibandingkan nilai ekspor. Indikator ini memberikan gambaran mengenai posisi neraca perdagangan suatu wilayah, termasuk ketergantungan terhadap barang luar daerah.

Selama periode 2020 hingga 2024, ekspor bersih perdagangan Kota Yogyakarta menunjukkan tren fluktuatif. Penurunan kinerja ekspor bersih pada dua tahun terakhir dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti halnya perubahan dinamika ekonomi global, perlambatan permintaan ekspor, peningkatan impor barang konsumsi atau penolong, serta potensi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah.

Fluktuasi ini mengindikasikan pentingnya penguatan kapasitas produksi lokal dan diversifikasi pasar ekspor sebagai bagian dari strategi perdagangan yang berkelanjutan. Evaluasi berkala terhadap kebijakan perdagangan dan dukungan terhadap sektor ekspor unggulan menjadi kunci dalam memperbaiki posisi neraca perdagangan Kota Yogyakarta di masa mendatang.

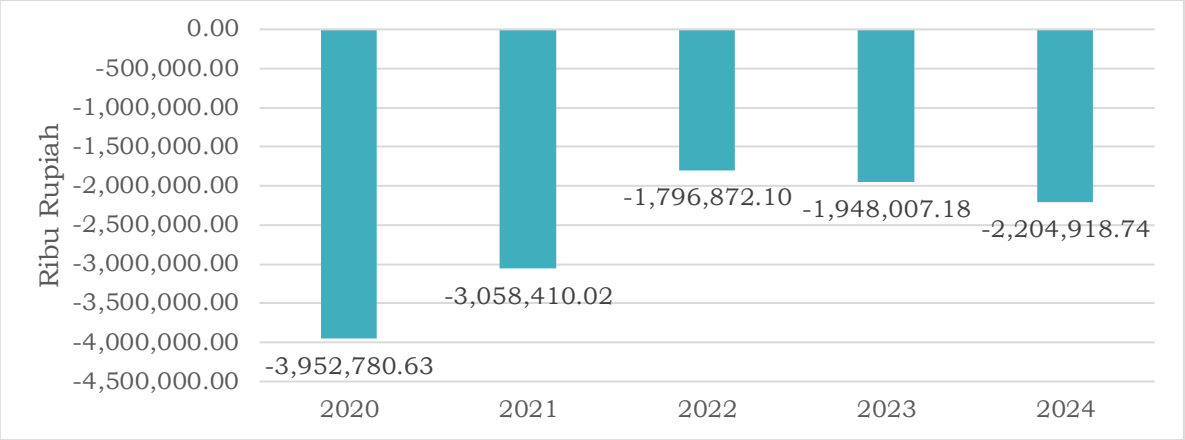

Gambar II.91 Ekspor Bersih Perdagangan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Urusan Perindustrian

a. ***Pertumbuhan Industri***

Berdasarkan data pada tabel di bawah, pertumbuhan industri mikro dan kecil cenderung fluktuatif pada kurun waktu 2020-2024. Namun demikian, jumlah usaha industri mikro dan kecil terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah usaha industri mikro dan kecil pada tahun 2020 sebanyak 4.375 unit dan pada tahun 2024 mencapai 8.052 unit.

Kendati jumlahnya terus bertambah, pertumbuhan industri mikro dan kecil menghadapi sejumlah kendala struktural. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan lahan. Sebagian besar lahan di Kota Yogyakarta—lebih dari 60%—diprioritaskan untuk kawasan permukiman sehingga menyulitkan pelaku industri untuk melakukan ekspansi atau peningkatan skala usaha (*upscaling*).

Selain itu, tidak adanya kawasan khusus industri menyebabkan banyak unit usaha berlokasi di area permukiman, yang berpotensi menimbulkan konflik tata ruang dan permasalahan lingkungan, terutama terkait dengan pengelolaan limbah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kota Yogyakarta.

Tabel - Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Unit Usaha Industri Mikro dan Kecil	Unit	4.375	5.579	7.534	7.970	8.052
Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil	Persen	52,87	27,52	35,04	5,79	1,03

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta, 2025

Urusan Transmigrasi

Transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan kerja dengan melakukan pemerataan daerah. Data transmigran tahun 2020 Kota Yogyakarta tidak bisa memberangkatkan transmigran karena pandemi Covid-19 . Penempatan jumlah transmigran pada tahun 2020-2024 cenderung mengalami fluktuasi. Jumlah KK yang diberangkatkan, disesuaikan dengan alokasi pembagian lokasi penempatan yang diberikan oleh Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi, penempatan transmigran se-Indonesia turun akibat dampak pengurangan anggaran di Pusat.

Tabel - Jumlah Transmigran di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kepala Keluarga	KK	0	5	8	4	6
2	Individu	Jiwa	0	16	31	13	22

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

Urusan Kelautan dan Perikanan

a. ***Produksi Perikanan***

Produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan mencapai 48.590 kg. Peningkatan ini disebabkan oleh banyaknya kelompok yang menerima bantuan hibah budidaya yang secara langsung menambah hasil panen dan produksi. Selain itu, bimbingan teknis dan pendampingan budidaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan kepada kelompok-kelompok penerima bantuan juga berperan penting dalam

meningkatkan produksi. Stimulan berupa bibit lele yang diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut turut mendukung peningkatan produksi perikanan.

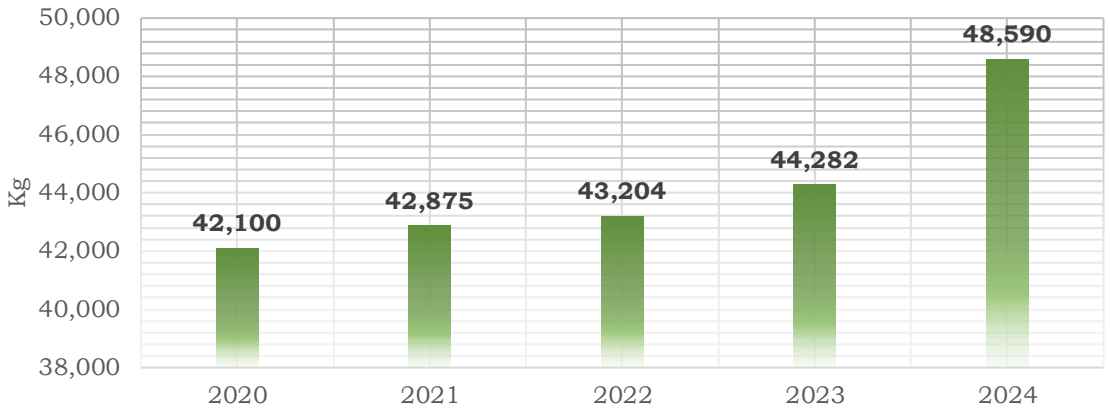

Gambar II.92 Produksi Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025

Urusan Keuangan

a. ***Opini BPK terhadap Laporan Keuangan***

Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut, dari tahun anggaran 2020 hingga 2024. Capaian ini mencerminkan konsistensi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota, antara lain melalui rekonsiliasi rutin atas belanja, aset, dan laporan keuangan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, dukungan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan aset dan persediaan, turut memperkuat akurasi dan keandalan pelaporan keuangan. Kinerja ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan.

Indikator opini BPK juga didukung oleh penurunan jumlah temuan BPK dan peningkatan persentase tindak lanjut temuan dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut mencerminkan bahwa perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah berjalan secara optimal.

b. ***Persentase Belanja Pendidikan (Minimal 20%)***

Persentase belanja pendidikan di Kota Yogyakarta selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun mengalami sedikit fluktuasi antartahun. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memperkuat sektor pendidikan melalui alokasi anggaran yang memadai. Fluktuasi yang terjadi selama lima tahun terakhir dapat disebabkan oleh penyesuaian kebijakan anggaran, pergeseran prioritas pembangunan, serta kebutuhan mendesak lainnya yang memengaruhi komposisi belanja. Meskipun demikian, alokasi anggaran pendidikan di Kota Yogyakarta secara konsisten telah melampaui ketentuan minimal 20% dari total belanja daerah, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Capaian output dari alokasi belanja pendidikan di Kota Yogyakarta antara lain terlihat dari peningkatan angka kelulusan dan transisi jenjang pendidikan, serta capaian rata-rata lama sekolah yang terus membaik dan melampaui rata-rata nasional. Selain itu, pemerintah kota juga berhasil memperluas akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus melalui integrasi di sekolah-sekolah negeri, serta mengembangkan fasilitas Taman Pintar sebagai pusat edukasi publik yang didukung oleh pembiayaan daerah dan BLUD. Program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu yang juga dicanangkan turut memastikan bahwa tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal akibat keterbatasan ekonomi, sehingga meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh warga kota. Hal ini menunjukkan upaya nyata pemerintah kota dalam memenuhi hak atas pendidikan dan memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

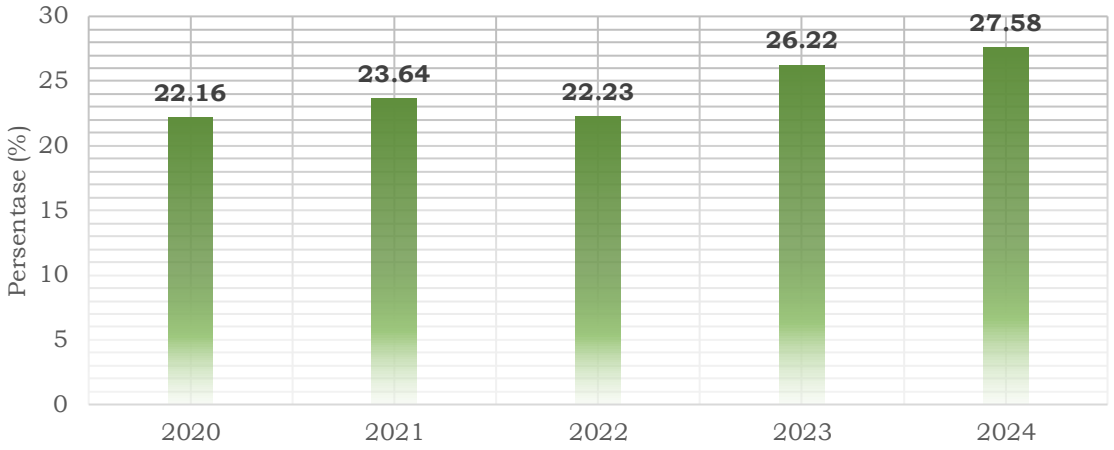

Gambar II.93 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025

c. ***Persentase Belanja Kesehatan (Minimal 10%)***

Persentase belanja kesehatan di Kota Yogyakarta selama periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan capaian tertinggi pada masa pandemi. Pada tahun 2020 dan 2021, anggaran kesehatan mencapai 21,40% dan 25,89% dari total belanja daerah. Kenaikan tajam tersebut merupakan respons langsung terhadap pandemi Covid-19 , di mana pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk penanganan kedaruratan kesehatan, seperti pengadaan alat kesehatan, layanan vaksinasi, serta penanganan pasien.

Setelah situasi pandemi mereda, proporsi belanja kesehatan mengalami penyesuaian. Pada tahun 2022 dan 2023, persentasenya menurun masing-masing menjadi 13,22% dan 13,96%, lalu kembali meningkat menjadi 16,65% pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika kebutuhan sektor kesehatan yang dipengaruhi oleh perubahan prioritas kebijakan, situasi darurat, serta pelaksanaan program kesehatan baru.

Meskipun mengalami penyesuaian, proporsi belanja kesehatan secara konsisten telah memenuhi amanat nasional, yakni minimal 10% dari total belanja daerah, yang menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pemenuhan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

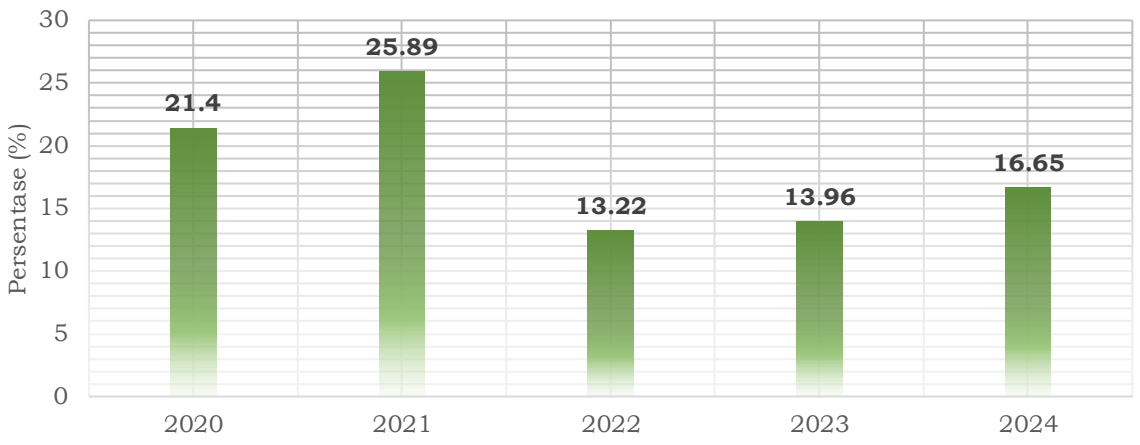

Gambar II.94 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta semua kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola secara langsung maupun melalui entitas lain, serta hak daerah dalam memungut pajak dan retribusi.

Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), kondisi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan stabilitas dan tren yang relatif positif, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun tata kelola anggaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari sekitar Rp563 miliar pada tahun 2020 menjadi lebih dari Rp855 miliar pada tahun 2024, dengan kontribusi utama dari sektor pariwisata, retribusi daerah, dan pengelolaan aset. Di sisi belanja, realisasi anggaran semakin optimal, tercermin dari penurunan persentase SILPA dari 25,23% pada tahun 2020 menjadi hanya 8,98% pada 2024. Alokasi belanja juga menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap sektor prioritas, seperti pendidikan (di atas 20%) dan kesehatan (di atas 10%), sesuai amanat nasional.

Selain itu, konsistensi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama lima tahun berturut-turut menunjukkan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan. Tepat waktunya penetapan APBD setiap tahun, serta minimnya program yang tidak terlaksana (0%), menandakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki sistem perencanaan dan penganggaran yang baik. Ke depan, tantangan utama terletak pada peningkatan kualitas belanja, penguatan pendapatan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PAD, serta pengelolaan aset dan pembiayaan inovatif agar kapasitas fiskal semakin berkelanjutan.

2.2.1. **Kinerja Pelaksanaan APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) pendapatan daerah; (2) belanja daerah; dan (3) pembiayaan daerah.

Analisis APBD Kota Yogyakarta dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025 – 2029 sendiri menggunakan data tahun anggaran 2020 – 2024. Rentang waktu ini ditetapkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pola pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir. Hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk memproyeksikan kapasitas fiskal daerah ke depan sehingga dapat digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan yang lebih terarah, realistis, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2.2.1.1. Pendapatan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena menentukan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017–2022, telah ditetapkan sejumlah arah kebijakan strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain: (1) mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) meningkatkan kualitas bahan pendukung kebijakan perpajakan dan retribusi; (3) memperkuat pembinaan terhadap BUMD dan BLUD; (4) membentuk BPR Syariah; (5) mengoptimalkan peran XT Square dalam pemberdayaan UMKM; dan (6) meningkatkan kualitas kerja sama daerah.

Capaian realisasi pendapatan daerah Kota Yogyakarta pada periode tahun anggaran 2020–2024 secara konsisten selalu melampaui target, dengan capaian tertinggi sebesar 105,77% pada tahun 2023. Capaian lebih dari 100% menunjukkan bahwa pendapatan riil melebihi pendapatan yang ditargetkan. Secara umum, baik target maupun realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan laju pertumbuhan rata-rata sekitar 5% per tahun. Rincian target, realisasi, serta capaian pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel - Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah/ Berkurang
2020	1.636.876.158.348,6	1.699.751.020.194,3	103,84	62.874.861.845,7
2021	1.631.391.993.906,0	1.707.273.287.342,5	104,65	75.881.293.436,5
2022	1.812.383.542.864,0	1.889.922.124.719,6	104,28	77.538.581.855,6
2023	1.891.691.059.144,0	2.000.846.169.483,5	105,77	109.155.110.339,5
2024	2.012.798.122.693,3	2.081.580.284.914,3	103,42	68.782.162.221,30

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Pendapatan Transfer, dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2024 sendiri, PAD Kota Yogyakarta memiliki proporsi sebesar 41,08% terhadap total pendapatan

daerah dan komponen ini menunjukkan tren positif sebesar 1,43% per tahun pada kurun waktu 2020-2024. Capaian ini mencerminkan arah positif dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang antara lain dihasilkan melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah.

Tabel - Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

URAIAN	REALISASI PENDAPATAN (RUPIAH)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	**1.699.751.020.194**	**1.707.273.287.342**	**1.889.922.124.720**	**2.000.846.169.484**	**2.081.580.284.914**
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**563.174.371.397**	**598.121.885.338**	**725.577.542.998**	**805.346.115.793**	**855.100.858.914**
1.Pajak Daerah	342.780.587.013	372.462.884.357	482.269.519.901	552.124.822.067	575.887.653.496
2.Retribusi Daerah	23.310.646.522	26.855.366.529	29.051.817.794	29.669.773.143	76.242.064.340
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	34.859.626.699	23.991.239.142	31.556.606.183	32.830.241.609	31.847.065.857
4. Lain-Lain PAD yang Sah	162.223.511.163	174.812.395.310	182.699.599.120	190.721.278.974	171.124.075.221
B. PENDAPATAN TRANSFER	**1.105.993.726.262**	**1.078.659.260.088**	**1.164.344.581.722**	**1.195.471.353.691**	**1.225.143.426.000**
1.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	818.760.445.269	812.159.214.937	894.708.151.723	866.426.526.418	934.903.824.677
1.1 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	48.878.978.276	62.643.616.366	57.580.293.987	54.633.493.787	52.835.068.000
1.2 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	627.247.170.000	617.524.294.000	611.115.719.499	640.404.377.241	673.920.861.000
1.3 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	42.628.557.012	36.468.809.740	78.219.658.794	13.825.807.247	45.033.949.392
1.4 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	100.005.739.981	95.522.494.831	147.792.479.443	157.562.848.143	163.113.946.285

URAIAN	REALISASI PENDAPATAN (RUPIAH)				
	2020	2021	2022	2023	2024
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**112.688.603.600**	**72.692.053.000**	**73.496.525.000**	**82.504.747.000**	**53.929.174.000**
2.1 Dana Insentif Daerah (DID)	-	72.692.053.000	73.496.525.000	82.504.747.000	-
2.2 Dana Penyesuaian	112.688.603.600	-	-	-	-
2.3 Intensif Fiskal	-	-	-	-	53.929.174.000
3. Pendapatan Transfer Antar Daerah	**174.544.677.393**	**193.807.992.151**	**196.139.904.999**	**246.540.080.273**	**236.310.427.323**
3.1 Pendapatan Bagi Hasil	120.965.338.876	-	145.324.342.606	153.071.631.950	150.610.796.469
3.2 Bantuan Keuangan	-	193.807.992.151	50.815.562.393	93.468.448.323	85.699.630.854
3.2 Pendapatan Lainnya	53.579.338.517	-	-	-	
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**30.582.922.535**	**30.492.141.917**	**-**	**28.700.000**	**1.336.000.000**
1. Pendapatan Hibah	30.582.922.535	298.000.000	-	28.700.000	1.336.000.000
2. Dana Darurat	-	-	-	-	-
3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	30.194.141.917	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025

Sementara itu, Pendapatan Transfer masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah, dengan kontribusi sebesar 58,86% pada tahun 2024. Namun, dari sisi tren, pendapatan transfer mencatat rata-rata pertumbuhan tahunan yang lebih rendah yaitu 2,69%, serta mengalami penurunan proporsi rata-rata sebesar -0,61% per tahun selama periode 2020–2024. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran komposisi pendapatan, meskipun secara nominal pendapatan transfer terus meningkat.

Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan kontribusi yang relatif kecil terhadap total pendapatan daerah, yaitu hanya sebesar 0,06% pada tahun 2024. Komponen ini mengalami fluktuasi dan kecenderungan menurun, baik secara nominal maupun proporsional, dengan rata-rata penurunan proporsi sebesar -1,74% per tahun dalam lima tahun terakhir. Tabel di bawah kemudian menunjukkan proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2020–2024.

Tabel - Proporsi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Uraian	Proporsi Pendapatan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33,13%	35,03%	38,39%	40,25%	41,08%
Pendapatan Transfer	65,07%	63,18%	61,61%	59,75%	58,86%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1,80%	1,79%	0,00%	0,00%	0,06%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025, Hasil Olahan, 2025

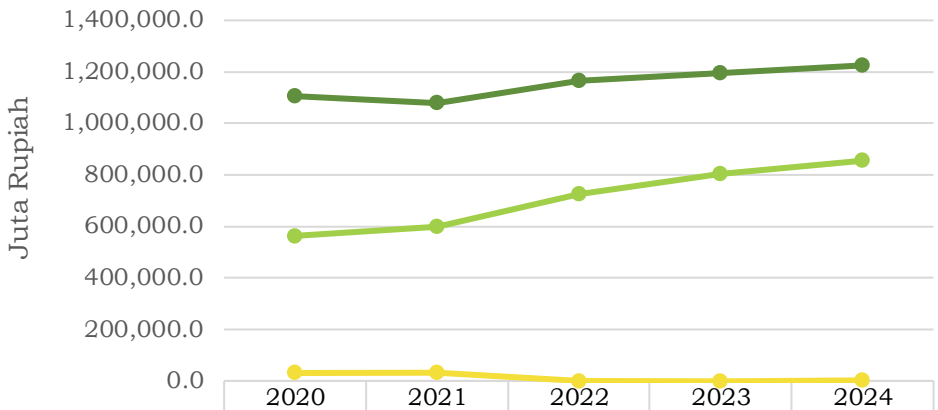

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	563,174.4	598,121.9	725,577.5	805,346.1	855,100.9
Pendapatan Transfer	1,105,993.7	1,078,659.3	1,164,344.6	1,195,471.4	1,225,143.4
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	30,582.9	30,492.1	0.0	28.7	1,336.0

Gambar II.95 Tren Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta 2020–2024 (dalam Juta Rupiah)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025

Lebih lanjut, figur di atas menunjukkan perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Yogyakarta selama periode 2020 hingga 2024, yang terdiri atas tiga komponen utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara umum, seluruh komponen menunjukkan tren yang bervariasi, dengan kontribusi terbesar berasal dari pendapatan transfer.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperlihatkan tren peningkatan yang stabil dan konsisten. Nilai realisasi PAD tumbuh dari sekitar Rp563.174,4 juta pada tahun 2020 menjadi Rp855.100,9 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan penguatan kapasitas fiskal daerah yang semakin baik, seiring dengan optimalisasi sumber-sumber penerimaan lokal seperti pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kuatnya peranan PAD dalam pembentukan pendapatan daerah mengindikasikan bahwa postur fiskal daerah semakin kokoh, karena pemanfaatan potensi-potensi daerah telah dilakukan secara lebih optimal. PAD Kota Yogyakarta memiliki laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,28% per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan total pendapatan daerah yang tercatat sebesar 3,46% per tahun. Perbedaan laju

ini mengindikasikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, jika pengelolaan potensi lokal terus ditingkatkan melalui kebijakan yang tepat, kontribusi PAD terhadap struktur pendapatan daerah akan semakin signifikan.

Sementara itu, Pendapatan Transfer, meskipun tetap menjadi sumber dominan, menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih moderat. Nilainya meningkat dari Rp1.105.998 juta pada tahun 2020 menjadi Rp1.125.143 juta pada tahun 2024, namun proporsinya terhadap total pendapatan daerah menunjukkan kecenderungan menurun. Ini memperkuat indikasi bahwa peranan PAD perlahan namun pasti mulai menggantikan dominasi transfer pusat.

Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap menjadi komponen dengan kontribusi terkecil. Meskipun terjadi fluktuasi cukup tajam dari Rp30.582 juta pada 2020 menjadi nihil di 2022, dan kembali muncul sebesar Rp1.336 juta di tahun 2024, secara keseluruhan komponen ini bersifat insidental dan tidak menjadi tumpuan utama pendapatan daerah dan grafik ini memperlihatkan arah positif dalam penguatan pendapatan daerah berbasis lokal. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, penguatan kelembagaan, serta inovasi dalam penggalian potensi fiskal, Kota Yogyakarta berpeluang besar untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya dalam beberapa tahun ke depan.

2.2.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas empat komponen, yakni: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-Lain PAD yang Sah. Keempat komponen ini membentuk fondasi kemandirian fiskal suatu daerah dan menjadi indikator utama dalam mengukur kapasitas pendapatan lokal.

Selama periode 2020–2024, realisasi PAD Kota Yogyakarta menunjukkan kinerja yang positif dengan tren pertumbuhan yang stabil. Realisasi PAD

secara konsisten melampaui target tahunan, dan pada tahun 2024 mencapai 109,48% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan penguatan peran pendapatan lokal dalam struktur APBD dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan.

Dalam struktur PAD, Pajak Daerah secara konsisten menjadi kontributor terbesar. Pada tahun 2024, Pajak Daerah menyumbang 67,35% dari total PAD, diikuti oleh Lain-Lain PAD yang Sah (20,01%), Retribusi Daerah (8,92%), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (3,72%). Komposisi ini relatif stabil selama lima tahun terakhir terkecuali untuk retribusi daerah yang mana proporsinya mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2024.

Tabel - Proporsi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Uraian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Proporsi PAD				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	60,87%	62,27%	66,47%	68,56%	67,35%
Retribusi Daerah	4,14%	4,49%	4,00%	3,68%	8,92%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	6,19%	4,01%	4,35%	4,08%	3,72%
Lain-Lain PAD yang Sah	28,81%	29,23%	25,18%	23,68%	20,01%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan Evaluasi Hasil RPJMD 2024, 2025; Hasil Olahan, 2025

Secara umum, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020-2024. Pada periode tersebut, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Namun, dua komponen PAD lainnya justru mengalami tren penurunan di tahun 2024. Sepanjang periode 2020-2024, Pajak Daerah tetap menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PAD.

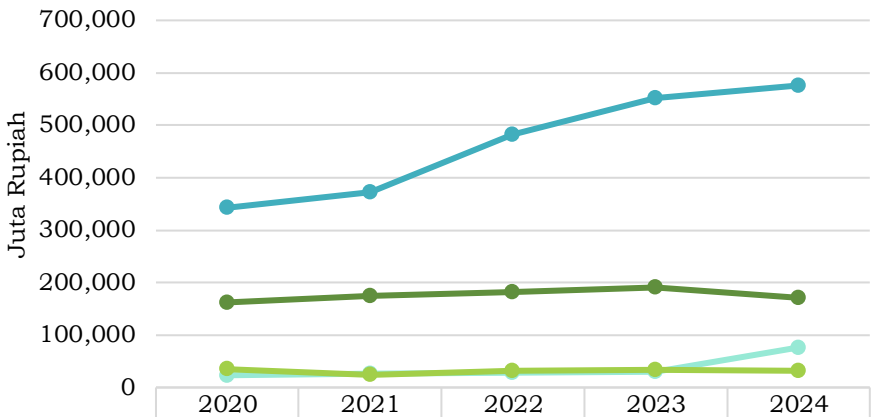

	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	342,781	372,463	482,270	552,125	575,888
Retribusi Daerah	23,311	26,855	29,052	29,670	76,242
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	34,860	23,991	31,557	32,830	31,847
Lain-Lain PAD yang Sah	162,224	174,812	182,700	190,721	171,124

Gambar II.96 Tren Realisasi PAD dalam Juta Rupiah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 (dalam Juta Rupiah)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025

Tren tersebut juga divisualisasikan dalam grafik di atas yang menunjukkan pertumbuhan realisasi PAD Kota Yogyakarta dalam juta rupiah selama tahun 2020–2024. Kenaikan ini sebagian besar didorong oleh peningkatan perolehan dari sektor pajak, yang mencerminkan pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara lebih optimal.

Pada tahun 2024, realisasi Pajak Daerah mencapai Rp575,89 miliar, melebihi target sebesar Rp532 miliar atau setara dengan 108,25% capaian. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas pemungutan dan/atau perluasan objek pajak, baik dari sisi jenis maupun nominal. Keberhasilan ini memperkuat posisi PAD dalam struktur pendapatan daerah dan mendukung tren peningkatan kemandirian fiskal Kota Yogyakarta.

Meskipun demikian, tetap terdapat ruang untuk optimalisasi lebih lanjut, terutama melalui indikator seperti rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio ini mencerminkan sejauh mana potensi fiskal daerah telah dimanfaatkan. Rendahnya rasio tersebut dapat menunjukkan bahwa meskipun PAD meningkat, sebagian potensi pajak daerah masih belum tergali secara maksimal.

Oleh karena itu, strategi peningkatan PAD ke depan perlu difokuskan tidak hanya pada peningkatan nominal semata, tetapi juga pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta modernisasi sistem pemungutan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

2.2.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan salah satu komponen utama dalam struktur pendapatan daerah yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antardaerah. Tujuan dari pendapatan transfer sendiri ialah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan menutup celah fiskal di daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam struktur pendapatan daerah Kota Yogyakarta, pendapatan transfer terbagi menjadi tiga komponen, yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya, dan Pendapatan Transfer Antardaerah. Selama periode 2020–2024, Dana Perimbangan secara konsisten menjadi komponen paling dominan. Pada tahun 2024, kontribusinya terhadap total pendapatan transfer mencapai 76,31%, meningkat dari 72,48% pada tahun sebelumnya. Dana Perimbangan terdiri atas empat subkomponen, yakni Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik.

Sementara itu, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya menunjukkan tren yang menurun selama lima tahun terakhir. Proporsinya menyusut dari 10,19% pada tahun 2020 menjadi hanya 4,40% pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan berkurangnya alokasi bantuan dari pusat yang tidak termasuk dalam skema dana perimbangan, seperti bantuan khusus yang bersifat insidental atau berbasis program tertentu.

Pendapatan Transfer Antardaerah menunjukkan pola yang lebih dinamis. Komponen ini mengalami peningkatan dari 15,78% pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya pada 20,62% di tahun 2023. Meskipun sedikit

menurun menjadi 19,29% pada tahun 2024, proporsi tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan dengan awal periode. Komponen ini mencakup pendapatan dari bagi hasil antardaerah, bantuan keuangan antar pemerintah daerah, serta pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tabel di bawah ini kemudian merangkum proporsi masing-masing komponen pendapatan transfer Kota Yogyakarta selama periode 2020–2024. Data tersebut menunjukkan bahwa Dana Perimbangan secara konsisten menjadi sumber utama, sedangkan dua komponen lainnya menunjukkan fluktuasi yang mengikuti dinamika kebijakan fiskal pusat dan interaksi keuangan antardaerah. Ke depannya, pengelolaan pendapatan transfer yang lebih akuntabel, transparan, dan terintegrasi antara pusat dan daerah akan menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas desentralisasi fiskal di Kota Yogyakarta.

Tabel - Proporsi Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2020-2025

URAIAN	Proporsi Pendapatan Transfer				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	74,03%	75,29%	76,84%	72,48%	76,31%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	10,19%	6,74%	6,31%	6,90%	4,40%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	15,78%	17,97%	16,85%	20,62%	19,29%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025

2.2.1.1.3. ***Lain-Lain Pendapatan yang Sah***

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan kelompok pendapatan daerah yang berada di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Komponen ini mencakup Pendapatan Hibah, Dana Darurat, serta Lain-Lain Pendapatan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun porsinya relatif kecil dibandingkan dua komponen PAD lainnya, kontribusi pendapatan ini tetap penting dalam

menambah fleksibilitas pendanaan daerah, terutama untuk kebutuhan yang bersifat insidental atau berbasis kerja sama.

Berdasarkan struktur pendapatan Kota Yogyakarta selama periode 2020–2024, Pendapatan Hibah tercatat sebagai komponen dengan kontribusi paling besar dalam kelompok Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Bahkan pada tahun 2020, 2023, dan 2024, 100% dari total pendapatan pada kelompok ini berasal dari hibah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkot Yogyakarta secara aktif menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memperoleh tambahan sumber pendanaan non-reguler.

Sebaliknya, pada tahun 2022, tercatat bahwa Lain-Lain Pendapatan yang Sah tidak memiliki realisasi sama sekali, atau sebesar nol rupiah. Hal ini mencerminkan ketergantungan pendapatan ini pada faktor eksternal dan ketersediaan hibah pada tahun berjalan. Tahun 2021 menjadi satu-satunya tahun dalam periode lima tahun tersebut ketika proporsi Lain-Lain Pendapatan yang Sah tidak didominasi oleh hibah. Pada tahun tersebut, 99,02% berasal dari kategori “Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,” dan hanya 0,98% berasal dari hibah.

Dana Darurat, sebagai bagian dari komponen ini, tidak memberikan kontribusi selama periode 2020–2024. Hal ini mengindikasikan bahwa selama lima tahun terakhir tidak ada kondisi yang mengharuskan pemerintah daerah mencatatkan penerimaan dari pos tersebut, atau mekanisme pencairannya dilakukan melalui jalur lain.

Tabel di bawah kemudian memperlihatkan perubahan proporsi antarkomponen dalam kelompok Lain-Lain Pendapatan yang Sah selama lima tahun terakhir. Meskipun nilainya tidak besar, kelompok ini tetap berperan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah secara selektif, khususnya dalam mendukung program-program berbasis kerja sama, donasi, atau intervensi nonreguler lainnya.

Tabel - Proporsi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Yogyakarta

URAIAN	Proporsi Lain-Lain Pendapatan yang Sah				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Hibah	100%	0,98%	-	100%	100%
Dana Darurat	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00%	99,02%	-	0,00%	0,00%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025

2.2.1.2. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diartikan sebagai semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa analisis terhadap belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran atas realisasi kebijakan belanja pada periode sebelumnya, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembelanjaan di masa mendatang.

Selama periode 2020–2024, Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan strategi penguatan perencanaan dan pengendalian anggaran. Hal ini tercermin dalam RPJMD 2020–2024, yang memuat arah kebijakan berupa peningkatan kualitas dokumen penganggaran dan optimalisasi pengendalian pelaksanaan anggaran. Strategi ini dilanjutkan dalam RPD 2023–2026, yang menargetkan tingkat pelaksanaan anggaran hingga 100% sebagai bentuk akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan APBD.

Namun demikian, realisasi belanja daerah selama periode 2020–2023 masih menunjukkan adanya deviasi dari target yang ditetapkan. Rata-rata capaian realisasi belanja selama empat tahun tersebut tercatat sebesar 87,74%, menandakan bahwa belum seluruh alokasi anggaran dapat terserap secara

optimal. Penyebabnya dapat berasal dari ketidaktepatan penentuan target, perencanaan kegiatan yang kurang realistis, maupun kendala dalam pelaksanaan program.

Capaian tertinggi selama periode RPJMD dan awal RPD tercatat pada tahun 2024, yaitu sebesar 94,07%, dengan realisasi anggaran belanja mencapai Rp2,09 triliun dari target Rp2,22 triliun. Meskipun masih di bawah target, angka ini menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan mencerminkan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Selisih antara target dan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp131,88 miliar juga relatif lebih kecil dibandingkan deviasi tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja ini memberikan sinyal positif atas penerapan kebijakan penganggaran yang semakin baik. Ke depan, konsistensi dalam menetapkan target yang realistis, serta penguatan pelaksanaan dan monitoring kegiatan, menjadi kunci untuk memastikan bahwa belanja daerah dapat terserap secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan Kota Yogyakarta.

Tabel II-123 Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024Tabel - Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024- Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah Berkurang
2020	1.837.219.591.471	1.517.599.468.488	82,60	- (319.620.122.983)
2021	1.944.826.298.734	1.691.968.885.089	87,00	- (252.857.413.645)
2022	2.049.712.899.206	1.826.804.253.747	89,12	- (222.908.645.459)
2023	2.138.486.539.080	1.972.232.487.692	92,23	- (166.254.051.388)
2024	2.223.246.284.420	2.091.367.191.908	94,07	- (131.879.092.512)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, APBD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Evaluasi RPJMD Tahun 2024, 2025; Hasil Olahan, 2025

Struktur dan tren proporsi belanja daerah selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa belanja operasi secara konsisten menjadi komponen

dominan. Belanja operasi sendiri merupakan pengeluaran rutin untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Proporsinya meningkat dari 82,26% pada tahun 2020 menjadi 87,05% pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 85,62% pada tahun 2024.

Lalu, belanja modal merupakan komponen terbesar kedua, digunakan untuk perolehan aset tetap dan investasi jangka panjang. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2023, proporsinya kembali meningkat menjadi 14,16% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kembali memperkuat alokasi untuk kegiatan pembangunan fisik dan investasi strategis.

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk penanganan kondisi darurat dan tidak terprediksi. Selama periode evaluasi, proporsinya tidak melebihi 0,5%, kecuali pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda dan proporsinya mencapai 4,90%. Setelah itu, belanja ini kembali ke tingkat normal, yakni di bawah 0,2% per tahun. Terakhir, belanja transfer adalah pengeluaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah lain atau desa. Proporsinya sangat kecil, yakni di kisaran 0,04% hingga 0,09%, dan meskipun fluktuatif, relatif stabil dari tahun ke tahun.

Tabel - Proporsi Komponen Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2020–2024

Belanja Daerah	Proporsi Per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	82,26%	85,44%	85,40%	87,05%	85,62%
Belanja Modal	12,75%	14,19%	14,42%	12,76%	14,16%
Belanja Tidak Terduga	4,90%	0,32%	0,14%	0,16%	0,17%
Belanja Transfer	0,09%	0,06%	0,05%	0,04%	0,05%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025

Tabel - Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

URAIAN	REALISASI BELANJA (RUPIAH)				
	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA DAERAH	**1.517.599.468.488**	**1.691.968.885.089**	**1.826.804.253.747**	**1.972.232.487.692**	**2.091.367.191.908**
A. BELANJA OPERASI	**1.248.329.702.539**	**1.445.551.076.433**	**1.560.028.542.837**	**1.716.767.689.465**	**1.790.533.974.907**
1.Belanja Pegawai	728.710.179.779	693.434.145.524	723.429.936.615	728.873.804.149	785.769.268.630
2.Belanja Barang dan Jasa	455.864.521.552	675.659.110.064	731.190.485.910	832.193.676.370	877.250.892.536
3.Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4.Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.Belanja Hibah	38.725.063.808	44.321.476.345	76.596.866.312	133.034.964.396	102.778.648.641
6.Belanja Bantuan Sosial	25.029.937.400	32.136.344.500	28.811.254.000	22.665.244.550	24.735.165.100
B. BELANJA MODAL	**193.523.645.424**	**240.007.571.436**	**263.386.424.104**	**251.570.529.367**	**296.224.425.411**
1.Belanja Tanah	17.920.111.920	31.234.102.680	801.666.600	1.349.053.990	2.201.626.190
2.Belanja Peralatan dan Mesin	54.368.762.898	57.237.140.570	121.999.668.034	96.478.793.958	107.853.441.626
3.Belanja Gedung dan Bangunan	41.131.637.106	52.693.245.460	86.723.158.187	85.468.822.761	108.885.066.704
4.Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.226.071.861	84.799.299.230	46.670.655.758	61.694.240.928	71.714.876.776

URAIAN	REALISASI BELANJA (RUPIAH)				
	2020	2021	2022	2023	2024
5.Belanja Aset Tetap Lainnya	3.834.203.994	14.043.783.496	7.191.275.525	6.579.617.730	5.386.845.115
6.Belanja Modal Lainnya	6.042.857.645	-	-	-	182.569.000
C. BELANJA TIDAK TERDUGA	**74.385.331.448**	**5.350.719.740**	**2.518.441.916**	**3.060.960.000**	**3.545.062.000**
1.Belanja Tidak Terduga	74.385.331.448	5.350.719.740	2.518.441.916	3.060.960.000	3.545.062.000
D. BELANJA TRANSFER	**1.360.789.078**	**1.059.517.480**	**870.844.890**	**833.308.860**	**1.063.729.590**
1.Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	466.746.200	232.293.000	221.477.000	344.897.000
2.Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	583.430.060	592.771.280	638.551.890	611.831.860	718.832.590
T3.ransfer Bantuan Keuangan Lainnya	777.359.018	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa komponen belanja operasi merupakan satu-satunya jenis belanja yang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Realisasi belanja operasi naik dari Rp1,25 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,79 triliun pada tahun 2024. Kenaikan paling signifikan terjadi antara tahun 2020 dan 2021, yaitu sebesar 15,8%, yang merupakan lonjakan tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Dominasi belanja operasi ini menyebabkan ketimpangan proporsi yang semakin besar dibandingkan dengan komponen belanja lainnya, seperti belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Kondisi ini menjadi isu utama yang perlu diperhatikan dalam kebijakan perencanaan dan pengendalian anggaran, terutama terkait dengan upaya mendorong belanja yang lebih produktif dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

Berbeda dengan belanja operasi, belanja modal menunjukkan tren yang fluktuatif. Setelah meningkat dari Rp193,52 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp263,39 miliar pada tahun 2022, belanja ini sempat menurun pada tahun 2023, sebelum kembali naik pada tahun 2024 menjadi Rp296,22 miliar. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan aset tetap, yang cenderung dipengaruhi oleh siklus proyek dan prioritas pembangunan tahunan.

Adapun belanja transfer, yang mencakup bantuan keuangan antar pemerintah daerah, juga menunjukkan pola yang tidak konsisten. Setelah mengalami penurunan berturut-turut sejak tahun 2020, belanja transfer meningkat kembali pada tahun 2024, meskipun nilainya tetap sangat kecil secara nominal, yaitu hanya sekitar Rp1,06 miliar. Kontribusi belanja transfer terhadap total belanja daerah masih sangat terbatas dan belum menunjukkan peningkatan peran yang signifikan.

Selanjutnya, belanja tidak terduga menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Namun, sifatnya yang insidental membuat tren ini tidak menjadi fokus utama dalam evaluasi belanja tahunan. Sebab, belanja tidak

terduga cenderung digunakan untuk keperluan darurat atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sehingga pertumbuhan dari tahun ke tahun tidak mencerminkan tren perencanaan melainkan respons terhadap situasi luar biasa.

Secara keseluruhan, struktur realisasi belanja daerah Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang kuat pada pembiayaan kegiatan rutin pemerintahan. Untuk mendorong belanja yang lebih berkualitas, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan upaya peningkatan belanja modal dan transfer secara terarah, sehingga distribusi belanja menjadi lebih seimbang antara kebutuhan operasional dan pembangunan jangka panjang.

2.2.1.3. Pembiayaan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan diartikan sebagai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sebagaimana halnya analisis terhadap belanja daerah, analisis pembiayaan dilakukan untuk merumuskan kebijakan pembiayaan di masa mendatang, khususnya dalam rangka menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih di antara keduanya disebut pembiayaan neto. Ketika pembiayaan neto bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan lebih besar dibandingkan pengeluarannya, yang berarti terdapat kelebihan dana yang dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran atau dialokasikan ke kas daerah.

Sepanjang periode 2020–2024, pembiayaan neto Kota Yogyakarta selalu mencapai target 100% atau lebih, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel II.153. Pada beberapa tahun seperti 2020 dan 2022, capaian bahkan sedikit melebihi target, sementara pada tahun 2024 capaian realisasi berada tepat di angka target yang ditetapkan, yaitu Rp210,45 miliar, tanpa ada selisih

lebih atau kurang. Hal ini menandakan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan daerah.

Tabel - Capaian Target Pembiayaan Daerah (Pembiayaan Netto) Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah/ Berkurang
2020	200.343.433.122	200.762.753.122	100,21%	419.320.000
2021	313.434.304.828	313.436.954.088	100,00%	2.649.260
2022	237.329.356.342	238.344.608.963	100,43%	1.015.252.621
2023	246.795.479.936	246.798.479.936	100,00%	3.000.000
2024	210.448.161.728	210.448.161.728	100,00%	0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, DJPK Kemenkeu, 2025; Hasil Olahan, 2025

Lebih lanjut, berdasarkan data realisasi pembiayaan, diketahui bahwa penerimaan pembiayaan Kota Yogyakarta secara konsisten lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya. Penerimaan pembiayaan selama periode 2020–2024 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, dengan proporsi yang hampir selalu melebihi 99%.

Selain dominasi SiLPA, pada tahun 2020 juga terdapat tambahan penerimaan pembiayaan dari hasil penjualan kekayaan daerah, pengembalian pinjaman, dan piutang, yang tidak muncul lagi di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan selama lima tahun terakhir seluruhnya berasal dari penyertaan modal daerah, dengan proporsi terhadap penerimaan berkisar antara 9% hingga 28%. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran menghasilkan pembiayaan neto yang cukup besar setiap tahun.

Kondisi ini mencerminkan kemampuan Kota Yogyakarta dalam menjaga keseimbangan pembiayaan daerah. Namun, tingginya pembiayaan neto dan akumulasi SiLPA juga menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas perencanaan anggaran, khususnya dalam pemanfaatan SiLPA secara

produktif, optimalisasi penyertaan modal, dan penajaman estimasi pembiayaan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Tabel - Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN (RUPIAH)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN NETO	**200.762.753.122**	**313.436.954.088**	**238.344.608.963**	**246.798.479.936**	**210.448.161.727**
A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**220.762.753.122**	**382.916.954.088**	**329.756.608.963**	**301.465.479.936**	**275.415.161.727**
1.Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	220.340.133.122	382.914.304.828	329.753.108.963	301.462.479.936	275.412.161.727
2.Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	410.000.000	-	-	-	-
4.Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	-
5.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	2.649.260	3.500.000	3.000.000	3.000.000
6.Penerimaan Piutang Daerah	12.620.000	-	-	-	-
7.Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	-	-	-	-	

URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN (RUPIAH)				
	2020	2021	2022	2023	2024
B.PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**20.000.000.000**	**69.480.000.000**	**91.412.000.000**	**54.667.000.000**	**64.967.000.000**
1.Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
2.Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	69.480.000.000	91.412.000.000	54.667.000.000	64.967.000.000
3.Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
4.Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5.Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025

2.2.1.4. Analisis Pembiayaan Keuangan Daerah

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kota Yogyakarta dilakukan berdasarkan dua indikator utama, yaitu surplus/defisit anggaran dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Surplus anggaran terjadi ketika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, sementara defisit terjadi sebaliknya. Jika mengalami defisit, maka gap anggaran perlu ditutup melalui penerimaan pembiayaan. Sementara itu, SiLPA dihitung dari selisih antara pendapatan dan belanja, ditambah pembiayaan neto.

Selama periode 2020–2024, Kota Yogyakarta secara konsisten mencatatkan surplus anggaran, meskipun dengan nilai yang fluktuatif. Surplus tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp182,1 miliar, seiring dengan menurunnya aktivitas pembangunan dan operasional akibat pandemi. Pada tahun-tahun berikutnya, nilai surplus berada dalam kisaran Rp9,79 miliar hingga Rp63,1 miliar, yang tetap mencerminkan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai seluruh belanja dari pendapatan yang dimiliki.

Apabila ditinjau dari SiLPA, Kota Yogyakarta memiliki SiLPA dengan jumlah yang cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, Kota Yogyakarta memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 200,6 miliar rupiah. Jumlah SiLPA yang terus menurun mengindikasikan kondisi keuangan yang lebih baik dalam konteks pembangunan daerah. Sebab hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan belum dilakukan secara optimal. Ke depannya, pengelolaan pembiayaan juga akan masih diarahkan untuk meminimalkan akumulasi dana yang mengendap, antara lain melalui pemanfaatan SiLPA secara produktif, penguatan manajemen kas daerah, serta perencanaan kegiatan yang lebih realistis dan tepat waktu. Adapun analisis pembiayaan keuangan daerah Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel - Analisis Pembiayaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN KEUANGAN DAERAH (JUTA RUPIAH)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Daerah	1.699.751	1.707.273	1.889.922	2.000.846	2.081.580
Belanja Daerah	1.517.599	1.691.969	1.826.804	1.972.232	2.091.367
Surplus/Defisit *(Pendapatan-Belanja)*	182.152	15.304	63.118	28.614	-9.787
Pembiayaan Neto Daerah	200.763	313.437	238.345	246.798	210.448
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran *(Pendapatan-Belanja+Pembiayaan Neto)*	382.914	328.741	301.462	275.412	200.661

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025

2.2.2. **Neraca Daerah**

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah, para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah, serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan/aset daerah, kewajibannya, serta ekuitas dana pada periode tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening. Neraca daerah Kota Yogyakarta secara rinci ditunjukkan pada tabel II.166.

2.2.2.1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan serta dapat dinilai dalam satuan uang. Aset Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri dapat

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Pada tahun 2024, total aset Pemerintah Kota Yogyakarta tercatat sebesar Rp5,97 triliun, dengan Aset Tetap menjadi komponen dominan, mencapai Rp4,70 triliun atau 78,83% dari total aset. Aset tetap mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan-jaringan-irigasi, aset dalam pengerjaan, dan dikurangi akumulasi penyusutan. Pertumbuhan signifikan pada aset tetap mencerminkan konsistensi pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan nilai aset fisik daerah.

Investasi Jangka Panjang mencapai Rp835,41 miliar (14,01%), seluruhnya berasal dari penyertaan modal daerah, tanpa nilai tercatat dari investasi non permanen karena seluruhnya telah disisihkan. Ini menunjukkan fokus pada penempatan modal jangka panjang yang strategis.

Lalu, Aset Lancar tercatat berjumlah Rp402,55 miliar atau 6,75% dari total aset. Komponen utamanya antara lain kas dan setara kas sebesar Rp200,66 miliar, piutang pajak daerah bersih sebesar Rp105,70 miliar, serta persediaan dan beban dibayar di muka. Proporsi aset lancar ini penting sebagai indikator likuiditas daerah.

Aset Lainnya berjumlah Rp23,84 miliar atau 0,40%, terdiri atas aset tidak berwujud, tagihan jangka panjang, dan aset lain-lain setelah dikurangi amortisasi. Selain itu, terdapat kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp775 juta, mencerminkan dana yang dialokasikan untuk keperluan tertentu.

Sementara itu, tidak terdapat dana cadangan yang tercatat secara eksplisit pada neraca aset tahun 2024, yang menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian fiskal lebih difokuskan pada efisiensi pemanfaatan belanja dan SiLPA.

Secara keseluruhan, struktur aset tahun 2024 menunjukkan keseimbangan antara likuiditas jangka pendek dan kekuatan aset jangka panjang, dengan tren pertumbuhan aset tetap dan investasi jangka panjang yang dominan.

2.2.2.2. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang atau beban yang timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah pada masa lalu. Kewajiban ini muncul antara lain karena penggunaan dana dari pihak ketiga, kontrak kerja dengan penyedia jasa, atau keterikatan administratif lainnya, termasuk yang berasal dari pegawai atau masyarakat. Dalam akuntansi pemerintahan, kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, tergantung pada jangka waktu penyelesaiannya.

Berdasarkan neraca tahun 2024, total kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta tercatat sebesar Rp11,37 miliar. Seluruh nilai kewajiban tersebut berasal dari kewajiban jangka pendek, sementara tidak terdapat kewajiban jangka panjang yang tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah daerah bersifat likuid, dan belum terdapat ketergantungan pada pembiayaan jangka panjang yang dapat membebani fiskal di masa depan.

Kewajiban jangka pendek tersebut didominasi oleh utang belanja sebesar Rp5,93 miliar, yang mencerminkan kewajiban kepada pihak ketiga atas transaksi barang dan jasa yang belum dibayarkan sampai akhir tahun anggaran. Selain itu, terdapat pendapatan diterima dimuka sebesar Rp4,73 miliar, yaitu penerimaan yang belum menjadi hak pemerintah daerah pada tahun berjalan dan akan dicatat sebagai pendapatan pada periode berikutnya. Di samping itu, utang perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp711 juta juga menjadi bagian dari kewajiban jangka pendek, terutama terkait kewajiban pemotongan atau pemungutan kepada pihak lain, seperti pajak pihak ketiga atau iuran yang dititipkan kepada pemerintah.

Secara umum, kewajiban daerah Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024. Meskipun secara nominal tergolong kecil dibandingkan total aset yang mencapai Rp5,97 triliun, keberadaan kewajiban ini tetap perlu dimonitor dan dikelola secara cermat untuk menjaga stabilitas fiskal. Tidak adanya kewajiban jangka panjang juga

mencerminkan kebijakan fiskal yang hati-hati dan cenderung konservatif dalam mengelola risiko pembiayaan jangka panjang.

2.2.2.3. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan hak residual pemerintah daerah atas aset yang dimiliki setelah dikurangi seluruh kewajiban. Dalam konteks pemerintahan, ekuitas mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang berasal dari akumulasi surplus anggaran dan pembentukan aset daerah dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, ekuitas Pemerintah Kota Yogyakarta tercatat sebesar Rp5,95 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selama periode 2020–2024, ekuitas mengalami pertumbuhan rata-rata yang mencapai hingga 7 per tahun dan mencerminkan peningkatan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah.

Analisis rasio keuangan di antaranya terdiri dari rasio lancar (*current ratio*), rasio total hutang terhadap total aset (*debt ratio*), dan rasio total hutang terhadap total ekuitas (*debt to equity ratio*). Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek.

Rasio lancar Kota Yogyakarta pada tahun 2020–2024 menunjukkan perbandingan yang besar antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2024, rasio lancar mencapai 35,39 yang menunjukkan bahwa nilai aset jauh melampaui kewajiban jangka pendek, sehingga daerah memiliki kemampuan yang tinggi dalam membayar kewajibannya. Rata-rata pertumbuhan rasio lancar Kota Yogyakarta sebesar -0,095% per tahun selama tahun 2020 – 2024.

Lebih lanjut, rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan perbandingan antara jumlah seluruh kewajiban dan jumlah seluruh aset. Nilai rasio tersebut sangat rendah, menunjukkan bagian aset yang digunakan untuk membayar kewajiban juga sangat kecil. Pada tahun 2024, rasio total hutang terhadap total aset sebesar 0,002. Rasio total hutang

terhadap total ekuitas menunjukkan kemampuan modal pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban.

Nilai rasio hutang terhadap ekuitas hampir sama dengan nilai rasio hutang terhadap aset, disebabkan nilai aset dan ekuitas yang hampir sama, dengan nilai kewajiban yang relatif rendah dibandingkan aset maupun ekuitas. Dalam rasio keuangan, rasio lancar termasuk dalam analisis Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*), yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Sementara itu, rasio hutang terhadap aset maupun ekuitas termasuk dalam analisis Rasio Solvabilitas, ditujukan untuk mengukur perbandingan dana yang harus dikeluarkan untuk membayar kewajiban terhadap aset maupun modal yang dimiliki. Dengan demikian, berdasarkan analisis neraca daerah, dapat disimpulkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik, sehingga perlu dipertahankan maupun ditingkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

Tabel - Analisis Rasio Keuangan Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas					
Rasio Lancar	57,54	43,40	40,64	29,32	35,39
Rasio Solvabilitas					
Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002
Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025

Tabel - Neraca Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 (dalam Juta Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan (%/Tahun)	Rerata Pertumbuhan CAGR (%/Tahun)
ASET	**4.506.498,95**	**4.723.776,07**	**5.743.650,89**	**5.869.669,86**	**5.965.940,54**	**7,56**	**7,26**
A.ASET LANCAR	**532.923,74**	**548.024,35**	**492.456,40**	**480.904,03**	**402.545,05**	**-6,49**	**-6,77**
1.Kas dan Setara Kas	382.962,46	328.899,56	301.635,94	275.412,16	200.661,25	-14,56	-14,92
2.Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-	-
3.Piutang Pajak Daerah Neto	76.155,99	94.324,41	100.932,76	101.112,78	105.696,47	8,89	8,54
4.Piutang Retribusi Daerah Neto	1.170,75	1.356,22	2.640,84	4.500,70	4.039,63	42,69	36,29
5.Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
6.Piutang Lain-lain PAD yang Sah Neto	20.644,08	53.611,51	36.229,32	34.490,02	32.714,16	29,33	12,20
7.Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-
8.Piutang Transfer Antar Daerah Neto	1.594,38	4.551,38	1.406,85	335,12	5.715,72	411,44	37,60
9.Piutang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
10.Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman Neto	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan (%/Tahun)	Rerata Pertumbuhan CAGR (%/Tahun)
11.Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Neto	223,88	377,13	273,63	273,63	273,63	10,25	5,14
12.piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Neto	1,19	1,08	0,60	0,60	0,60	-13,42	-15,73
13.Bagian Lancar Tagihan Sewa Neto	376,37	285,91	216,86	99,25	243,87	10,82	-10,28
14.Beban Dibayar Dimuka	451,38	1.270,59	1.537,64	2.020,27	1.580,18	53,03	36,79
15.Persediaan	49.343,25	63.346,56	47.581,97	62.659,49	51.619,54	4,39	1,13
B.INVESTASI JANGKA PANJANG	**540.866,73**	**617.580,91**	**707.966,21**	**763.350,63**	**835.411,61**	**11,52**	**11,48**
1.Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	-	-
2.Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	540.866,73	617.580,91	707.966,21	763.350,63	835.411,61	11,52	11,48
C.ASET TETAP	3.376.707,49	3.503.363,20	4.516.745,23	4.591.932,40	4.704.143,01	9,20	8,64
1.Tanah	1.906.244,30	1.979.608,64	2.770.495,12	2.774.152,49	2.749.707,82	10,76	9,59
2.Peralatan dan Mesin	806.756,27	891.412,02	1.001.277,43	1.056.927,40	1.138.952,55	9,03	9,00
3.Gedung dan Bangunan	1.127.571,46	1.162.663,31	1.337.765,40	1.398.178,36	1.515.012,46	7,76	7,66
4.Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.219.972,70	2.305.923,22	2.373.881,36	2.488.585,91	2.541.453,52	3,44	3,44

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan (%/Tahun)	Rerata Pertumbuhan CAGR (%/Tahun)
5.Aset Tetap Lainnya	42.180,67	45.722,11	48.792,96	49.672,07	51.529,79	5,16	5,13
6.Konstruksi Dalam Pengerjaan	23.523,37	24.668,84	26.213,04	7.237,95	4.931,42	-23,28	-32,33
7.Akumulasi Penyusutan	-2.749.541,28	-2.906.634,94	-3.041.680,09	-3.182.821,79	-3.297.444,55	4,65	4,65
D.DANA CADANGAN	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
E.ASET LAINNYA	**56.000,99**	**54.807,61**	**26.483,04**	**33.482,81**	**23.840,87**	**-14,04**	**-19,22**
1.Tagihan Jangka Panjang	1.236,23	873,31	573,97	273,63	235,44	-32,48	-33,94
2.Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.408,30	6.408,30	6.408,30	6.408,30	6.408,30	-	-
3.Aset Tidak Berwujud	50.474,68	57.114,89	56.655,00	77.150,02	77.904,15	12,38	11,46
4.Aset Lain-lain	22.617,39	23.614,11	635,30	775,78	1.614,60	9,33	-48,31
5.Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-27.488,17	-35.950,35	-39.764,95	-61.994,02	-63.097,00	24,77	23,09
6.Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
7.Kas yang dibatasi penggunaannya	2.752,56	2.747,34	1.975,43	10.869,12	775,38	82,27	-27,15

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan (%/Tahun)	Rerata Pertumbuhan CAGR (%/Tahun)
KEWAJIBAN	**9.261,20**	**12.626,65**	**12.118,21**	**16.399,66**	**11.374,84**	**9,25**	**5,27**
A.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**9.261,20**	**12.626,65**	**12.118,21**	**16.399,66**	**11.374,84**	**9,25**	**5,27**
1.Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.800,72	2.905,54	2.148,89	2.020,97	711,08	-23,27	-29,02
2.Pendapatan Diterima di Muka	2.106,06	3.078,23	3.217,51	5.277,23	4.733,46	26,10	22,44
3.Utang Belanja	4.354,42	6.642,88	6.751,82	9.101,47	5.930,29	13,54	8,03
B.KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.Utang kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
EKUITAS	**4.497.237,74**	**4.711.149,42**	**5.731.532,67**	**5.853.270,20**	**5.954.565,70**	**7,57**	**7,27**
A.EKUITAS	4.497.237,74	4.711.149,42	5.731.532,67	5.853.270,20	5.954.565,70	7,57	7,27
B.Surplus/Defisit-LO	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**4.506.498,95**	**4.723.776,07**	**5.743.650,89**	**5.869.669,86**	**5.965.940,54**	**7,56**	**7,27**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025

2.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Penghitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan publik. Dalam lima tahun ke depan, pelaksanaan pembangunan Kota Yogyakarta akan sangat bergantung pada kapasitas APBD. Adapun proyeksi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk periode 2025–2029 disusun dengan pendekatan moderat. Pendekatan ini mempertimbangkan tren data historis lima tahun terakhir, kondisi makroekonomi regional, baik di tingkat Kota Yogyakarta maupun DIY, serta tantangan global seperti halnya ketidakpastian geopolitik, tekanan inflasi, dan dinamika transfer fiskal nasional yang berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan daerah.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah, proyeksi keuangan daerah Kota Yogyakarta tidak hanya disusun untuk periode RPJMD 2025–2029, tetapi juga mencakup tahun 2030 sebagaimana dapat dicermati pada tabel di bawah. Hal ini dilakukan guna mengakomodasi penyusunan dokumen perencanaan dalam masa transisi pemerintahan. Tujuannya tidak lain ialah untuk memastikan keberlanjutan program prioritas strategis yang terdapat di dalam RPJPD maupun RPJMN 2025–2045.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 4,3% per tahun dan dengan nilai CAGR yang sepadan. Pertumbuhan ini ditopang oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diperkirakan meningkat rata-rata 4,3% per tahun, dengan kontribusi terbesar masih berasal dari pajak daerah. Sementara itu, pendapatan transfer, khususnya dari pemerintah pusat, juga menunjukkan tren pertumbuhan positif, mencerminkan dukungan fiskal yang relatif stabil terhadap kinerja pendapatan daerah Kota Yogyakarta.

Dari sisi belanja, anggaran belanja daerah diproyeksikan meningkat rata-rata 3,3% per tahun, mengindikasikan konsistensi dalam menjaga efisiensi dan keberlanjutan fiskal. Namun demikian, terdapat tantangan struktural yang perlu segera ditangani. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, daerah setingkat kabupaten/kota diwajibkan untuk mengalokasikan belanja pegawai daerah—di luar tunjangan guru—paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Selain itu, belanja infrastruktur pelayanan publik diwajibkan paling rendah 40% dari total belanja, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah atau desa.

Penyesuaian terhadap ketentuan ini harus dilakukan paling lambat Januari 2027. Oleh karena itu, tantangan utama dalam penganggaran belanja daerah Kota Yogyakarta adalah menurunkan proporsi belanja pegawai yang pada tahun 2023 masih tercatat sebesar 36,96%, serta meningkatkan belanja modal yang masih berada di angka 12,76%.

Selama periode perencanaan ini, Kota Yogyakarta juga diproyeksikan akan mengalami defisit anggaran setiap tahun, namun dengan tren menurun—dari Rp156,62 miliar pada APBD-P 2025 menjadi Rp84,84 miliar pada 2029. Dalam konteks menjaga keseimbangan fiskal, proyeksi pembiayaan daerah disusun secara realistis dengan mempertimbangkan potensi penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, serta kebutuhan pengeluaran untuk penyertaan modal daerah dan belanja strategis lainnya. SiLPA diposisikan sebagai salah satu sumber daya fiskal yang dapat dimanfaatkan secara selektif dan disesuaikan dengan kondisi aktual setiap tahun.

Lebih lanjut, strategi pengelolaan keuangan daerah juga perlu diperkuat dengan langkah-langkah yang lebih struktural dan berkelanjutan, seperti halnya optimalisasi pajak daerah dan peningkatan pendapatan dari retribusi daerah, efisiensi program, serta pemanfaatan aset dan BUMD secara lebih produktif. Pendekatan-pendekatan yang dicanangkan ini harapannya akan mampu memperkuat posisi fiskal Kota Yogyakarta dalam menghadapi dinamika ekonomi yang tidak selalu dapat diprediksi, sekaligus menjaga

kesinambungan pembiayaan pembangunan daerah secara akuntabel dan berdaya tahan.

Pada akhirnya, proyeksi ini menyiratkan perlunya disiplin fiskal dan perencanaan belanja yang semakin baik. Efektivitas pengelolaan pembiayaan serta akurasi dalam memproyeksikan kas awal menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan anggaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memastikan fleksibilitas pembiayaan pembangunan strategis di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Tabel - Proyeksi Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2030

Uraian	APBD 2025	APBD-P 2025	PROYEKSI				
			2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN DAERAH	**2.101.702.615.240**	**1.994.477.778.270**	**2.042.806.910.973**	**2.111.582.440.181**	**2.184.488.175.336**	**2.262.337.419.240**	**2.360.002.827.557**
A.PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.000.166.831.321**	**938.985.873.226**	**968.425.220.649**	**1.017.933.168.871**	**1.071.185.971.421**	**1.128.989.224.068**	**1.206.207.721.302**
1.Pajak Daerah	719.752.270.160	656.971.711.016	688.306.105.516	729.935.795.160	776.565.597.660	828.918.597.785	901.942.725.729
2.Retribusi Daerah	80.529.916.775	76.146.946.200	77.279.249.431	78.886.651.182	80.527.668.841	82.059.824.632	83.656.909.249
3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.176.145.992	37.169.425.336	33.893.297.089	37.879.372.316	40.161.856.207	41.656.751.938	42.187.775.411
4.Lain-lain PAD yang Sah	165.708.498.394	168.697.790.674	168.946.568.613	171.231.350.213	173.930.848.713	176.354.049.713	178.420.310.913
B.PENDAPATAN TRANSFER	**1.101.535.783.919**	**1.055.491.905.044**	**1.074.381.690.324**	**1.093.649.271.310**	**1.113.302.203.915**	**1.133.348.195.172**	**1.153.795.106.255**
1.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	977.801.282.000	944.489.264.000	963.379.049.280	982.646.630.266	1.002.299.562.871	1.022.345.554.128	1.042.792.465.211
2.Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.734.501.919	111.002.641.044	111.002.641.044	111.002.641.044	111.002.641.044	111.002.641.044	111.002.641.044
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
1.Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-
2.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	**2.180.516.463.311**	**2.151.095.701.003**	**2.119.474.594.198**	**2.190.688.940.563**	**2.266.486.777.907**	**2.347.173.707.200**	**2.448.571.611.351**

Uraian	APBD 2025	APBD-P 2025	PROYEKSI				
			2026	2027	2028	2029	2030
A.BELANJA OPERASI	**1.847.654.404.531**						
B.BELANJA MODAL	**230.084.593.387**						
C.BELANJA TIDAK TERDUGA	**101.524.276.013**						
D.BELANJA TRANSFER	**1.253.189.380**						
SURPLUS/ DEFISIT	**(78.813.848.071)**	**(156.617.922.733)**	**(76.667.683.225)**	**(79.106.500.383)**	**(81.998.602.571)**	**(84.836.287.960)**	**(88.568.783.795)**

PEMBIAYAAN DAERAH							
A.PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**122.857.180.071**	**200.661.254.733**	**121.667.683.225**	**124.106.500.383**	**126.998.602.571**	**129.836.287.960**	**133.568.783.795**
1.Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	122.857.180.071	200.661.254.733	121.667.683.225	124.106.500.383	126.998.602.571	129.836.287.960	133.568.783.795
B.PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**44.043.332.000**	**44.043.332.000**	**45.000.000.000**	**45.000.000.000**	**45.000.000.000**	**45.000.000.000**	**45.000.000.000**
1.Penyertaan Modal Daerah	44.043.332.000	44.043.332.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
C.PEMBIAYAAN NETTO	**78.813.848.071**	**156.617.922.733**	**76.667.683.225**	**79.106.500.383**	**81.998.602.571**	**84.836.287.960**	**88.568.783.795**
D.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, 2025

2.2.4. Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan

Kota Yogyakarta memperoleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber dana dari APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK), yang terdiri atas BKK Dana Keistimewaan DIY dan BKK Reguler DIY.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, BKK Dana Keistimewaan merupakan bantuan finansial dari Pemerintah Daerah DIY kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan. Bantuan tersebut berbentuk dana yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dan bersumber dari Dana Keistimewaan. Tujuan utama dari pendanaan ini adalah mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme anggaran yang diterapkan di tingkat kabupaten/kota dan/atau desa.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya untuk mengoptimalkan usulan Dana Keistimewaan seperti yang tersaji pada gambar berikut ini. Meskipun demikian, pagu definitif yang diperoleh, jauh lebih rendah dibandingkan usulan mengingat adanya verifikasi kesesuaian dengan isu strategis, baik pada level Pemerintah DIY maupun Pemerintah Pusat.

Pemanfaatan BKK Dana Keistimewaan di Kota Yogyakarta difokuskan pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Pendanaan ini mencakup berbagai aspek, antara lain kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. .Adapun lingkup urusan keistimewaan yang dimaksud sebagai berikut.

i. Urusan Kelembagaan

Ketentuan mengenai kelembagaan diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais DIY) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Penyelenggaraan urusan kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Prinsip yang diterapkan mencakup responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, dengan tetap mempertimbangkan bentuk serta susunan pemerintahan yang telah ada secara historis.

ii. Urusan Kebudayaan

Regulasi terkait kebudayaan tercantum dalam Perdais DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Dana Keistimewaan dalam urusan ini digunakan untuk pengadaan alat-alat dan pendanaan berbagai kegiatan budaya. Selain itu, alokasi dana juga dapat diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas kebudayaan.

iii. Urusan Pertanahan

Pengelolaan pertanahan diatur dalam Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Regulasi tersebut menetapkan bahwa pemanfaatan tanah bertujuan untuk mendukung pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan mencakup aspek penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan, sementara pemanfaatan meliputi perlindungan, penggunaan, dan pelepasan tanah sesuai ketentuan.

iv. Urusan Tata Ruang

Ketentuan mengenai tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tercantum dalam Perdais DIY Nomor 2 Tahun 2017. Pengaturan tata ruang bertujuan untuk mendukung pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan harmoni dengan satuan ruang lainnya. Dalam pelaksanaannya, Kasultanan dan Kadipaten menetapkan Kerangka Umum Kebijakan Tata Ruang, yang disusun dengan

mempertimbangkan kebijakan tata ruang nasional dan daerah sesuai Keistimewaan DIY.

Tabel - Alokasi Penerimaan BKK Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Urusan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelembagaan	174.296.500	51.613.900	212.786.250	658.789.750	817.590.000
2	Kebudayaan	11.986.349.265	30.128.799.295	34.618.248.279	59.887.519.324	69.957.978.400
3	Pertanahan	1.239.550.000	486.038.000	1.408.780.000	904.594.000	955.703.700
4	Tata Ruang	40.312.165.019	41.489.743.000	14.650.850.000	31.488.691.700	13.219.609.280
Total per Tahun		**53.712.360.784**	**72.156.194.195**	**50.890.664.529**	**92.939.594.774**	**84.950.881.380**
TOTAL		**354.649.695.662**				

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2025

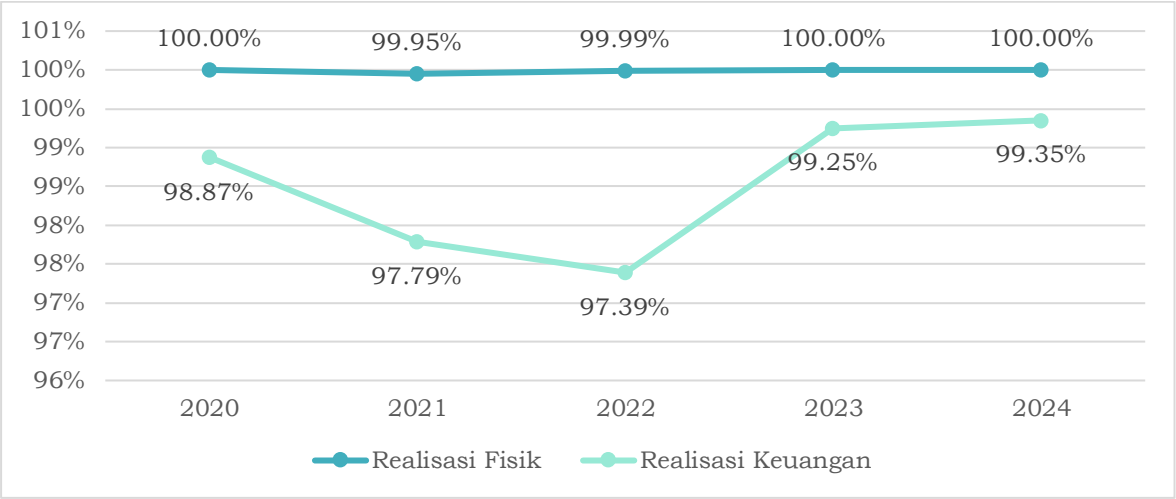

Gambar II.97 Grafik Realisasi Fisik dan Keuangan BKK Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2025

Selama rentang waktu tahun 2020-2024 total alokasi BKK Dana Keistimewaan kepada Kota Yogyakarta sebesar Rp 354.649.695.662,- dengan pagu anggaran disetiap tahunnya yang fluktuatif.

1. Tahun 2020 alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar Rp 53.712.360.784,- dengan persentase realisasi fisik mencapai 100,00% dan realisasi keuangan mencapai 98,87%.
2. Tahun 2021 alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar Rp 72.156.194.195,- dengan persentase realisasi fisik mencapai 99,95% serta capaian realisasi keuangan mencapai 97,79%.

3. Tahun 2022 alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar Rp 50.890.664.529,- dengan persentase realisasi fisik mencapai 99,99% serta capaian realisasi keuangan mencapai 97,39%.
4. Tahun 2023 alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar Rp 92.939.594.774,- dengan persentase realisasi fisik mencapai 100,00% serta capaian realisasi keuangan mencapai 99,25%.
5. Tahun 2024 alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar Rp 84.950.881.380,- dengan persentase realisasi fisik mencapai 100,00% serta capaian realisasi keuangan mencapai 99,35%.

Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY Tahun 2024 sebesar Rp 84.950.881.380,- yang dialokasikan untuk mendanai empat sektor utama, yaitu kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Hingga akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, realisasi kumulatif dana keistimewaan mencapai 99,48% dari total alokasi, yang setara dengan Rp 84.511.048.963,- (SP2D), atau 99,35% dari total alokasi setara Rp 84.400.282.254,- (SPJF). Sementara itu, realisasi fisik kumulatif tercatat mencapai 100,00%.

Tabel - Realisasi Keuangan dan Fisik Kumulatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta s.d. TW IV T.A. 2024

NO	URUSAN/SKPD	PAGU PERUBAHAN 2	KEUANGAN				FISIK (%)
			SP2D (Rp)	SP2D (%)	SPJF (Rp)	SPJF (%)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(8)*	*(9)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
KOTA YOGYAKARTA		**84,950,881,380**	**84,511,048,963**	**99.48%**	**84,400,282,254**	**99.35%**	**100.00%**
1	**KELEMBAGAAN**	**817,590,000**	**817,589,998**	**100.00%**	**817,160,312**	**99.95%**	**100.00%**
A.	BAGIAN ORGANISASI	70,416,000	70,416,000	100.00%	70,416,000	100.00%	100.00%
B.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	183,174,000	183,174,000	100.00%	183,174,000	100.00%	100.00%
C.	DINAS KESEHATAN	564,000,000	563,999,998	100.00%	563,570,312	99.92%	100.00%
2	**KEBUDAYAAN**	**69,957,978,400**	**69,547,736,980**	**99.41%**	**69,458,696,137**	**99.29%**	**100.00%**
A.	DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)	42,069,892,400	41,831,251,625	99.43%	41,743,598,757	99.22%	100.00%

NO	URUSAN/SKPD	PAGU PERUBAHAN 2	KEUANGAN				FISIK (%)
			SP2D (Rp)	SP2D (%)	SPJF (Rp)	SPJF (%)	
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)
B.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	27,513,086,000	27,345,951,155	99.39%	27,344,563,180	99.39%	100.00%
C.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	200,000,000	197,055,000	98.53%	197,055,000	98.53%	100.00%
D.	KEMANTREN GEDONGTENGEN	175,000,000	173,479,200	99.13%	173,479,200	99.13%	100.00%
3	**PERTANAHAN**	**955,703,700**	**947,508,550**	**99.14%**	**932,719,470**	**97.60%**	**100.00%**
A.	DINAS PERTANAHAN dan TATA RUANG (*KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA*)	955,703,700	947,508,550	99.14%	932,719,470	97.60%	100.00%
4	**TATA RUANG**	**13,219,609,280**	**13,198,213,435**	**99.84%**	**13,191,706,335**	**99.79%**	**100.00%**
A.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,316,889,280	8,315,700,735	99.99%	8,315,700,735	99.99%	100.00%
B.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	402,720,000	402,670,000	99.99%	402,670,000	99.99%	100.00%
C.	KEMANTREN DANUREJAN	300,000,000	300,000,000	100.00%	298,210,800	99.40%	100.00%
D.	KEMANTREN GEDONGTENGEN	200,000,000	199,552,700	99.78%	198,807,200	99.40%	100.00%
E.	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	500,000,000	499,467,200	99.89%	498,934,400	99.79%	100.00%
F.	KEMANTREN GONDOMANAN	200,000,000	199,653,200	99.83%	199,653,200	99.83%	100.00%
G.	KEMANTREN JETIS	300,000,000	298,798,800	99.60%	298,182,000	99.39%	100.00%
H.	KEMANTREN KOTAGEDE	300,000,000	298,369,000	99.46%	297,174,000	99.06%	100.00%
I.	KEMANTREN KRATON	300,000,000	300,000,000	100.00%	299,428,800	99.81%	100.00%
J.	KEMANTREN MANTRIJERON	300,000,000	298,210,800	99.40%	298,210,800	99.40%	100.00%
K.	KEMANTREN MERGANGSAN	300,000,000	298,155,200	99.39%	298,155,200	99.39%	100.00%
L.	KEMANTREN NGAMPILAN	200,000,000	199,212,800	99.61%	199,025,600	99.51%	100.00%
M.	KEMANTREN PAKUALAMAN	200,000,000	199,703,000	99.85%	199,673,000	99.84%	100.00%
N.	KEMANTREN TEGALREJO	400,000,000	400,000,000	100.00%	400,000,000	100.00%	100.00%
O.	KEMANTREN UMBULHARJO	700,000,000	688,720,000	98.39%	688,156,000	98.31%	100.00%
P.	KEMANTREN WIROBRAJAN	300,000,000	300,000,000	100.00%	299,724,600	99.91%	100.00%
TOTAL		**84,950,881,380**	**84,511,048,963**	**99.48%**	**84,400,282,254**	**99.35%**	**100.00%**

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2024

Secara ringkas, penjelasan capaian/realisasi kinerja keuangan dan fisik hasil pelaksanaan program dan kegiatan Keistimewaan per urusan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

a. Urusan Kelembagaan

Total alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2024 untuk urusan kelembagaan di Kota Yogyakarta mencapai Rp 817.590.000,- atau 0,96% dari total dana keistimewaan. Anggaran ini dialokasikan untuk Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan, yang dikelola oleh tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Kesehatan.

Hingga akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, realisasi keuangan program ini mencapai 100% dari pagu anggaran dengan rincian Rp 817.589.998,- (SP2D) dan Rp 817.160.312,- (SPJF). Sementara itu, realisasi fisik juga tercatat sebesar 100%.

1) Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi Setda menerima alokasi sebesar Rp 70.416.000,- untuk mendukung program kelembagaan melalui dua kegiatan utama. Kegiatan pertama adalah Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan, yang mencakup penataan bentuk kelembagaan asli di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan kedua adalah Peningkatan Budaya Pemerintahan, yang berfokus pada implementasi budaya pemerintahan berbasis keistimewaan di tingkat lokal.

2) BKPSDM Kota Yogyakarta

BKPSDM memperoleh Rp 183.174.000,- untuk melaksanakan Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan, yang mencakup subkegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan terkait sistem pemerintahan berbasis keistimewaan DIY.

3) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan mendapat alokasi Rp 564.000.000,- untuk mendukung Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan melalui subkegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan

Kabupaten/Kota. Tujuan utama dari program ini adalah memastikan penerapan kebijakan berbasis keistimewaan dalam layanan kesehatan bagi masyarakat.

b. Urusan Pertanahan

Total alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2024 untuk urusan pertanahan di Kota Yogyakarta mencapai Rp 955.703.700,- atau 1,13% dari total BKK Dana Keistimewaan DIY. Anggaran ini digunakan untuk Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, yang dikelola oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta**.**

Program ini mencakup dua kegiatan utama:

a. Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang terdiri dari:
   - **i.** Subkegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
   - **ii.** Subkegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa

b. Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang mencakup:
   - i. Subkegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
   - ii. Subkegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa

Hingga akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, realisasi keuangan pelaksanaan program ini mencapai 99,14% dari total pagu anggaran, setara dengan Rp 947.508.550,- (SP2D), atau 97,60% dari total pagu setara Rp 932.719.470,- (SPJF). Sementara itu, realisasi fisik tercatat mencapai 100%, menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan program sesuai dengan target perencanaan.

c. **Urusan Tata Ruang**

Total alokasi dana urusan tata ruang mencapai Rp 13.219.609.280,- atau 15,56% dari total BKK Dana Keistimewaan. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program Keistimewaan yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang dilaksanakan oleh 16 (enam belas) SKPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, dan 14 (empat belas) Kemantren di Kota Yogyakarta.

Hingga akhir tahun, realisasi keuangan program ini mencapai 99,84% (Rp 13.198.213.435,- SP2D) atau 99,79% (Rp 13.191.706.335,- SPJF), sementara realisasi fisik tercatat 100%. Adapun rincian kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Keistimewaan Urusan/ Kewenangan Tata Ruang di masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

1) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

DLH mengelola alokasi Rp 8.316.889.280,- yang digunakan untuk Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten. Kegiatan ini mencakup subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kawasan bersejarah melalui perencanaan ruang yang selaras dengan prinsip keistimewaan.

2) DPUPKP Kota Yogyakarta

DPUPKP menerima Rp 402.720.000,- untuk Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, melalui subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru. Dana ini dimanfaatkan untuk mendukung tata kelola kawasan yang memiliki nilai historis dan sosial, guna memperkuat identitas ruang berbasis keistimewaan.

3) Kemantren

Seluruh kemantren di Kota Yogyakarta mengelola dana yang dialokasikan untuk subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis. Setiap kemantren berperan dalam

mengembangkan ruang yang mencerminkan nilai kebudayaan dan keseimbangan tata kota, sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Seluruh kemantren melaksanakan 100% realisasi fisik. Realisasi keuangan di setiap kemantren berkisar antara 98,31% hingga 100%, menunjukkan efektivitas penggunaan dana dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di tingkat lokal.

d. **Urusan Kebudayaan**

Total alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY untuk Urusan Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2024 adalah Rp 69.957.978.400,- atau 82,35% dari total BKK Dana Keistimewaan DIY yang diterima Kota Yogyakarta. Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), DPUPKP, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, serta Kemantren Gedongtengen.

Secara kumulatif s/d akhir Triwulan IV T.A. 2024, realisasi kinerja keuangan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan adalah sebesar 99,41% dari total pagu Urusan/ Kewenangan Kebudayaan T.A. 2024 setara Rp 69.547.736.980,- (SP2D) atau sebesar 99,29% dari total pagu Urusan/ Kewenangan Kebudayaan T.A. 2024 setara Rp 69.458.696.137,- (SPJF), sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun rincian kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Keistimewaan Urusan/ Kewenangan Kebudayaan di masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

4) Dinas Kebudayaan (*Kudha Kabudayaan*)

Alokasi total BKK Dana Keistimewaan DIY untuk Urusan Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun anggaran 2024 yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) mencapai Rp 42.069.892.400,-, yang terbagi menjadi tiga bagian: Rp 20.612.450.000,- untuk Dinas Kebudayaan, Rp 653.640.000,-

untuk UPT Pengelolaan Taman Budaya, dan Rp 20.803.802.400,- untuk UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Hingga akhir Triwulan IV 2024, realisasi keuangan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan mencapai 99,43% dari total dana yang dikelola, yaitu Rp 41.831.251.625,- (SP2D) atau 99,22% dengan total Rp 41.743.598.757,- (SPJF). Sementara itu, realisasi fisik telah tercapai sepenuhnya dengan capaian 100%.

Program ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu kegiatan yang dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan, UPT Pengelolaan Taman Budaya, dan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

2. Dinas Kebudayaan menjalankan tiga kegiatan utama, yaitu:

v. Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman, yang mencakup pembinaan dan pengembangan kesejarahan, pengelolaan bahasa dan sastra, serta pemeliharaan museum.

vi. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, yang berfokus pada pengembangan situs bersejarah.

vii. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya, yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pembinaan desa budaya, diplomasi kebudayaan, festival seni, hingga penyelenggaraan event bagi penggiat seni.

3. UPT Pengelolaan Taman Budaya bertanggung jawab atas satu kegiatan utama, yaitu pengelolaan dan pengembangan Taman Budaya di wilayah Yogyakarta.

4. UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya menjalankan dua kegiatan utama, yaitu tata kelola cagar budaya dan warisan budaya, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung keistimewaan di bidang kebudayaan.

5) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman

Alokasi total BKK Dana Keistimewaan DIY untuk Urusan Kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta

pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp 27.513.086.000,-. Program ini dijalankan melalui dua kegiatan utama, yaitu Pengelolaan Taman Budaya, yang mencakup upaya pengelolaan dan pengembangan taman budaya di tingkat kabupaten/kota, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Budaya, yang berfokus pada pengadaan fasilitas pendukung kegiatan kebudayaan.

Hingga akhir Triwulan IV 2024, realisasi keuangan pelaksanaan program yang ditangani oleh DPUPKP mencapai 99,39% dari total anggaran, yaitu Rp 27.345.951.155,- (SP2D) atau Rp 27.344.563.180,- (SPJF). Sementara itu, realisasi fisik telah mencapai 100%, menunjukkan pencapaian penuh dalam pelaksanaan program.

6) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Alokasi total BKK Dana Keistimewaan DIY untuk Urusan Kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp 200.000.000,-. Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan utama, yaitu Pendidikan Berbasis Budaya, yang mencakup Pembinaan Muatan Lokal sebagai subkegiatan utama.

Hingga akhir Triwulan IV 2024, realisasi keuangan pelaksanaan program mencapai 98,53% dari total anggaran, yaitu Rp 197.055.000,- (SP2D maupun SPJF). Sementara itu, realisasi fisik telah mencapai 100%, menunjukkan pencapaian penuh dalam pelaksanaan kegiatan.

7) Kemantren Gedongtengen

Alokasi total BKK Dana Keistimewaan DIY untuk Urusan Kebudayaan yang dikelola oleh Kemantren Gedongtengen pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp 175.000.000,-. Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan utama, yaitu **Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya**, dengan fokus pada **Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya** sebagai subkegiatan utama.

Hingga akhir Triwulan IV 2024, realisasi keuangan program telah mencapai 99,13% dari total anggaran, yaitu Rp 173.479.200,- (SP2D maupun SPJF). Sementara itu, pelaksanaan fisik telah tercapai sepenuhnya dengan realisasi 100%, menandakan bahwa seluruh target dalam program ini telah terlaksana sesuai rencana.

2.3. **Permasalahan dan isu Strategis**

2.3.1. **Permasalahan Pembangunan Daerah**

2.3.1.1. Belum Tuntasnya Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu terus diupayakan penuntasannya. Belum tuntasnya pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta tersebut menjadi permasalahan sekaligus tantangan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi sosial, ekonomi, infrastruktur wilayah, dan kebijakan publik. Dengan konteks multidimensi yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan, maka diperlukan upaya bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dengan fokus intervensi sesuai dengan kapasitas masing-masing pihak. Selain itu, perlu pengembangan kebijakan yang tidak hanya fokus melihat penyelesaian kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan akses ke layanan sosial, perbaikan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Secara komparatif, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta relatif lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di tingkat provinsi maupun nasional. Data terakhir tahun 2024 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kota Yogyakarta sebesar 6,26%, masih jauh di bawah angka kemiskinan DIY sebesar 10,40% atau angka kemiskinan nasional sebesar 8,57%. Meskipun kondisi faktual menunjukkan tren yang semakin membaik selama kurun waktu empat tahun terakhir, namun konteks kemiskinan masih tetap perlu mendapatkan *highlight* prioritas sebagai permasalahan pembangunan yang akan terus diupayakan penyelesaiannya pada periode pembangunan ke depan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan terputusnya rantai

kemiskinan melalui berbagai intervensi pembangunan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Perhatian utama dalam upaya penyelesaian permasalahan kemiskinan di Kota Yogyakarta ini adalah berkaitan dengan penanganan kemiskinan yang selama ini masih belum optimal. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi di Kota Yogyakarta. Selain itu fakta bahwa standar minimal upah bagi pekerja yang relatif rendah dibandingkan kota besar lain di Indonesia juga memberikan pengaruh, terutama terhadap penduduk yang bekerja pada sektor non-formal.

2.3.1.2. Belum Optimalnya Sektor Perdagangan dan Pertanian Untuk Meningkatkan Pendapatan Kelompok Desil 1-4

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Yogyakarta. Secara konseptual, ketimpangan pendapatan mengindikasikan tidak meratanya distribusi hasil ekonomi antar kelompok penduduk. Kondisi ini dapat memicu dampak sosial dan ekonomi lanjutan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Nilai Indeks Gini Kota Yogyakarta pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,449, yang mengindikasikan kondisi lebih tinggi dari rata-rata DIY (0,435) dan nasional (0,381). Indeks gini di Kota Yogyakarta juga dalam kurun waktu 5 tahun terakhi secara konsisten menjadi yang tertinggi di DIY. Bahkan, pada tahun 2022, nilai indeks gini Kota Yogyakarta mencapai 0,519 yang masuk dalam kategori ketimpangan tinggi.

Ketimpangan tersebut semakin terlihat apabila ditinjau melalui distribusi penguasaan pendapatan. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa proporsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah (desil 1–4) hanya sebesar 14,70 persen. Meskipun meningkat dari capaian tahun 2022 yang hanya sebesar 11,58 persen, angka ini tetap menunjukkan ketimpangan distribusi yang signifikan. Pada saat yang sama, proporsi pendapatan yang dikuasai oleh 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi justru meningkat dari 50,24 persen di tahun 2020 menjadi 52,20 persen di tahun 2024. Hal ini mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi

belum bersifat inklusif dan belum mendorong perbaikan yang signifikan pada kelompok rentan ekonomi.

Salah satu faktor yang memperkuat kondisi tersebut adalah belum optimalnya kontribusi sektor-sektor ekonomi yang menjadi tumpuan utama kelompok penduduk berpendapatan rendah, khususnya sektor perdagangan dan sektor pertanian. Kedua sektor ini secara struktural menyerap tenaga kerja dari kelompok desil 1–4 di Kota Yogyakarta, terutama pada aktivitas perdagangan informal dan pertanian skala kecil. Namun, secara kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kedua sektor ini masih memberikan sumbangsih yang relatif rendah.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Yogyakarta selama periode 2020–2024 tercatat sangat kecil dan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, kontribusinya sebesar 0,154 persen, dan pada tahun 2024 turun menjadi 0,145 persen. Penurunan ini menunjukkan belum adanya penguatan struktural yang mendorong peningkatan nilai tambah sektor pertanian, sekaligus mencerminkan keterbatasan peran sektor ini dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat rentan yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.

Di sisi lain, meskipun sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Kota Yogyakarta, proporsi kontribusinya belum sepenuhnya merepresentasikan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan informal. Sebagian besar pelaku perdagangan yang berasal dari kelompok desil 1–4 beroperasi dalam skala mikro dengan produktivitas rendah, keterbatasan akses permodalan, serta rentan terhadap fluktuasi permintaan pasar. Ketimpangan dalam struktur dan daya saing pelaku usaha ini menyebabkan pertumbuhan sektor perdagangan belum sepenuhnya mengalir ke lapisan masyarakat berpendapatan rendah.

2.3.1.3. Kebutuhan Peningkatan Investasi

- Nilai investasi pada tahun 2024 adalah 806.892.968.992, adapun jumlah investor baru mencapai 11.350

2.3.1.4. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi merupakan arah pembangunan sektor kesehatan yang akan terus diupayakan untuk dapat tercapai. Konteks ketercapaian derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat diukur dengan merujuk pada kondisi mortalitas (kematian), morbiditas (kesakitan), status gizi, dan usia harapan hidup. Dengan kata lain, derajat kesehatan yang tinggi terjadi pada saat sebagian besar masyarakat di Kota Yogyakarta memiliki status kesehatan yang baik yang ditandai dengan tingginya harapan hidup, rendahnya angka penyakit, serta kualitas hidup yang lebih baik. Derajat kesehatan yang tinggi juga mencerminkan terpenuhinya akses yang merata dan berkualitas terhadap layanan kesehatan, perilaku hidup sehat, maupun lingkungan yang mendukung kesejahteraan.

Secara tidak langsung, derajat kesehatan yang belum terpenuhi secara optimal juga akan memberikan pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Meskipun usia harapan hidup Kota Yogyakarta terus mengalami tren peningkatan yang positif, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta. Beberapa kondisi yang mencerminkan adanya permasalahan dalam aspek kesehatan, antara lain 1) kematian bayi; 2) kelangsungan hidup bayi; 3) kematian balita; 4) kematian neonatal; 5) prevalensi stunting; 6) tingkat prevalensi tuberkulosis; 7) tingkat kematian karena tuberkulosis; 8) cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; dan 9) proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS.

Angka kematian bayi menunjukkan penurunan dari 11,23 (tahun 2020) menjadi 9,78 (tahun 2024). Di tahun 2020 hingga 2022, angka kematian bayi mencapai kisaran angka 10-11 per 1.000 kelahiran hidup. Indikator angka kelangsungan hidup bayi juga cenderung mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 sebesar 988,777 menjadi 990,22 di tahun 2024. Indikator angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan peningkatan jumlah kematian dari tahun 2020 sebesar 1,92 dan di tahun 2024 sebesar 2,79. Indikator angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan peningkatan dari 7,70 (tahun 2020) menjadi 5,12 (tahun

2024). Sementara itu, indikator prevalensi stunting mengalami tren perbaikan dari 11,76% pada tahun 2023 menjadi 10,70% di tahun 2024. Tren yang cenderung negatif pada beberapa indikator tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan kesehatan pada penduduk usia bayi dan balita yang perlu segera mendapatkan intervensi penanganan secara tepat.

Di sisi lain, tingkat prevalensi tuberkulosis tercatat meningkat dari 114,83 pada tahun 2020 menjadi 178,28 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2024. Capaian tersebut juga berkorelasi dengan indikator tingkat kematian karena tuberkulosis yang memiliki tren peningkatan dari 12,58 kematian per 100.000 penduduk di tahun 2020 menjadi 22,13 kematian per 100.000 penduduk di tahun 2024. Indikator lain yang berkaitan dengan tuberkulosis adalah cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA yang cenderung turun, yaitu dari 78,44% di tahun 2020 menjadi 61,93% di tahun 2024. Penurunan juga terjadi pada proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS dari 71,13% (2020) menjadi 46,75% (2024), meskipun faktanya banyak pasien yang menyelesaikan pengobatan tuberkulosis, namun tidak melakukan pemeriksaan laboratorium (BTA) di akhir pengobatan sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai sembuh.

Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan belum tuntasnya upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang kualitas kesehatan masyarakat mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih belum memiliki kesadaran dan pengetahuan terkait pola hidup sehat. Selain itu, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif juga masih belum optimal diberikan sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk meningkatkan pemenuhan derajat kesehatan masyarakat tersebut, maka perlu adanya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai sumber daya utama dalam pembangunan kesehatan.

2.3.1.5. Belum Meratanya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat

Permasalahan dalam sektor pendidikan di Kota Yogyakarta masih terlihat dari belum meratanya kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan, meskipun capaian indikator makro menunjukkan tren yang relatif baik. Kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan tetap menjadi isu utama, sebagaimana tercermin dari hasil Asesmen Nasional tahun 2024 yang menunjukkan bahwa hanya 76,43% satuan pendidikan SD dan SMP yang telah mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) untuk literasi membaca, serta 85,78% satuan pendidikan yang mencapai SKM untuk numerasi. Artinya, masih terdapat sekitar seperempat satuan pendidikan yang belum mencapai standar kompetensi minimum dalam literasi membaca, dan sekitar seperdelapan satuan pendidikan dalam aspek numerasi.

Jika ditilik lebih jauh, capaian rata-rata kemampuan siswa juga menunjukkan variasi yang cukup mencolok, terutama pada jenjang sekolah dasar. Rata-rata kemampuan literasi siswa SD berada pada angka 76,43, sedangkan kemampuan numerasi hanya mencapai 56,07. Sementara itu, capaian rata-rata pada jenjang SMP lebih tinggi, yakni 84,62 untuk literasi dan 73,15 untuk numerasi. Meski demikian, dalam distribusi kategorinya, masih terdapat siswa yang masuk dalam kategori “kurang”, yakni sebesar 0,54% untuk literasi SD dan 0,39% untuk numerasi SMP. Hal ini menunjukkan adanya kelompok siswa yang tertinggal dalam pemenuhan kompetensi dasar.

Kualitas pendidikan juga ditunjukkan melalui capaian akreditasi satuan pendidikan. Pada tahun 2024, sebanyak 99,08% satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, telah terakreditasi. Meskipun menunjukkan angka yang tinggi, capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kualitas, karena akreditasi tidak secara langsung menunjukkan pencapaian pembelajaran riil di satuan pendidikan.

Dalam hal aksesibilitas, angka partisipasi sekolah (APS) untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2024 tetap tinggi, berada pada kisaran 99,98% hingga 100%, dengan angka putus sekolah yang sangat rendah dan

mendekati nol. Namun demikian, permasalahan lain muncul dari rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang menunjukkan tren penurunan. Untuk pendidikan dasar (usia 7-15 tahun), rasio ini turun dari 47 sekolah per 10.000 penduduk pada tahun 2020 menjadi hanya 41,09 pada tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh merger sejumlah sekolah dasar dan swasta. Sementara pada pendidikan menengah, rasio ketersediaan sekolah juga mengalami fluktuasi, dengan angka sebesar 39,08 pada tahun 2024.

Selain itu, meskipun rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berada dalam kisaran yang ideal, terdapat indikasi ketidakseimbangan distribusi tenaga pendidik yang tergambar dari fluktuasi jumlah guru serta pensiunnya sejumlah guru pada tahun 2023–2024. Kualifikasi tenaga pendidik juga masih menjadi perhatian, terutama pada jenjang SD, di mana 5,23% guru pada tahun 2024 belum memiliki ijazah S1/D-IV. Pada jenjang SMP, proporsi guru yang belum memenuhi kualifikasi tersebut sebesar 5,27%.

Data-data tersebut menggambarkan bahwa Kota Yogyakarta masih menghadapi tantangan dalam memastikan pemerataan kualitas layanan pendidikan di seluruh satuan pendidikan, sekaligus dalam menjaga keberlanjutan akses yang merata dan berkualitas di seluruh jenjang. Permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar seluruh anak usia sekolah di Kota Yogyakarta dapat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas secara setara.

2.3.1.6. Belum Optimalnya Aksesibilitas dan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi salah satu hal yang diupayakan untuk dicapai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Perempuan memiliki peran penting untuk mendukung pembangunan yang dilaksanakan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Artinya, partisipasi perempuan dalam pembangunan dikatakan baik ketika perempuan terlibat secara aktif, setara, dan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk dalam hal

pengambilan keputusan, pelaksanaan program, maupun akses terhadap sumber daya yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Faktanya, rendahnya keterlibatan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di Kota Yogyakarta masih menjadi permasalahan pembangunan yang memerlukan perhatian serius. Hal ini tercermin dari tingkat partisipasi perempuan secara umum yang pada tahun 2024 yang tercatat baru mencapai 8,48%, jauh di bawah amanat nasional sebesar 30%. Ketimpangan ini semakin terlihat ketika ditinjau lebih lanjut pada tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan, yang menunjukkan capaian belum ideal. Selama periode 2021 hingga 2023, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tercatat paling rendah pada tahun 2021 sebesar 6,91% dan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 8,44%, yang tetap menunjukkan jarak signifikan dari proporsi representasi yang diharapkan. Sementara itu, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga belum mencapai target yang diharapkan, dengan angka yang berkisar antara 12% hingga 17% selama periode 2020–2024. Ketimpangan ini semakin diperkuat oleh data dari BPS mengenai proporsi perempuan sebagai tenaga profesional di tahun 2023 yang hanya mencapai 48,32%, menjadikan Kota Yogyakarta berada pada peringkat dua terbawah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.3.1.7. Tantangan dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Yogyakarta masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai keluarga yang berkualitas, diperlukan intervensi pemerintah yang bersifat edukatif dan memberdayakan, termasuk melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Namun demikian, berbagai indikator menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dalam membentuk keluarga berkualitas masih belum optimal.

Selama beberapa tahun terakhir, beberapa indikator utama program keluarga berencana (KB) menunjukkan kecenderungan stagnasi bahkan penurunan. Rasio akseptor KB mengalami penurunan dengan rata-rata laju -1,11% per tahun, sementara angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) bagi perempuan menikah usia 15–49 tahun juga menurun rata-rata -1,03% per tahun. Kondisi ini diperburuk oleh masih tingginya angka unmet need atau Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB namun belum terlayani, yaitu rata-rata 7,35% per tahun. Selain itu, penggunaan kontrasepsi jangka panjang menurun sebesar -2,85% per tahun, sementara tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi juga belum stabil. Di sisi lain, cakupan anggota bina keluarga remaja cenderung menurun, mencerminkan belum optimalnya pendekatan penguatan edukasi reproduksi sejak usia dini.

Masih rendahnya efektivitas pelaksanaan program KB antara lain disebabkan oleh fenomena berhentinya sebagian akseptor dari penggunaan KB modern dan beralih ke metode tradisional, serta adanya penolakan dari kelompok PUS dengan jumlah anak satu yang menganggap program KB tidak lagi relevan karena usia mereka telah melewati 40 tahun. Selain itu, tercatat bahwa banyak penerima KB yang berhenti dan berganti status menjadi Ingin Anak Segera (IAS). Ketidakoptimalan tersebut menunjukkan bahwa aspek edukasi dan pemberdayaan belum sepenuhnya menjangkau sasaran dengan pendekatan yang kontekstual dan inklusif.

Tantangan dalam membentuk keluarga berkualitas juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi demografi Kota Yogyakarta yang sedang mengalami transformasi menuju struktur penduduk menua *(aging population).* Jumlah penduduk Kota Yogyakarta tercatat mengalami penurunan dari 416.117 jiwa pada tahun 2020 menjadi 415.605 jiwa di tahun 2024. Penurunan ini disertai dengan menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, yang secara langsung menyebabkan kenaikan angka ketergantungan dari 40,91 pada tahun 2020 menjadi 41,15 pada tahun 2024. Kenaikan angka ketergantungan ini memberikan beban tambahan bagi

penduduk usia produktif yang harus menopang kebutuhan generasi sebelumnya maupun generasi berikutnya secara finansial dan emosional.

Fenomena tersebut memunculkan kelompok masyarakat dengan kondisi *"sandwich generation",* yaitu mereka yang berada di antara dua tanggung jawab: merawat anak-anak sekaligus orang tua yang telah lansia, dengan beban ekonomi yang semakin berat. Kondisi ini diperparah oleh cenderung sulitnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kota Yogyakarta, serta fluktuasi kondisi perekonomian yang berdampak langsung pada kapasitas pengeluaran keluarga.

Dengan meningkatnya beban kependudukan dan transformasi demografi yang berlangsung, pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas harus dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini mencakup aspek pengendalian penduduk, penguatan sistem edukasi keluarga, penyediaan fasilitas ramah lansia, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan keseimbangan antara jumlah anggota keluarga dengan kemampuan pemenuhannya. Jika tidak diatasi, tantangan-tantangan ini dapat menghambat pencapaian kualitas sumber daya manusia dan memperlebar kesenjangan kesejahteraan antar keluarga di Kota Yogyakarta.

2.3.1.8. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Kewilayahan

Kota Yogyakarta memiliki struktur pemerintahan kewilayahan yang terdiri atas 45 kelurahan dan 14 kemantren, yang masing-masing memiliki karakteristik potensi dan permasalahan yang berbeda-beda. Kondisi ini menuntut pendekatan pembangunan yang adaptif dan berbasis wilayah, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Dalam konteks ini, kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Mantri Pamong Praja (MPP) seharusnya menjadi peluang strategis untuk memperkuat desentralisasi pembangunan berbasis kewilayahan. Namun demikian,

pemberdayaan masyarakat dalam mendukung proses tersebut masih belum berjalan secara optimal.

Salah satu bentuk fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, yang diharapkan mampu menjaring aspirasi masyarakat dan menerjemahkannya menjadi program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil wilayah. Namun dalam pelaksanaannya, proses Musrenbang sering kali belum mampu menggali dan mengartikulasikan kebutuhan masyarakat secara komprehensif, sehingga output yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan prioritas pembangunan kewilayahan yang berbasis potensi lokal.

Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pendukung di tingkat kelurahan serta belum optimalnya sinergi antara perangkat wilayah dengan masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam mendorong pembangunan yang responsif terhadap kondisi nyata di lapangan. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan di tingkat wilayah sering kali masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya memperkuat proses pemberdayaan masyarakat secara substansial. Permasalahan ini mencerminkan perlunya penguatan sistem dan mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam skema pembangunan kewilayahan agar lebih partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga secara merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

2.3.1.9. Kesenjangan antara Kualitas Angkatan Kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Kota Yogyakarta menghadapi permasalahan ketenagakerjaan yang ditunjukkan dari tingkat pengangguran terbuka yang masih berada di atas DIY dan Nasional pada tahun 2020-2024. Tingkat pengangguran terbuka Kota Yogyakarta juga mengalami penurunan dengan laju rata-rata sebesar -10,8% per tahun. Kendati demikian, angka tersebut telah mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak pandemi Covid-19 . Namun, meskipun mengalami penurunan, angka tingkat pengangguran terbuka kota

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di menjadi indikasi bahwa masih banyak angkatan kerja di Kota Yogyakarta yang belum mendapatkan pekerjaan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu karena angkatan kerja terpaksa tidak bekerja karena belum diterima kerja atau karena ketidaksesuaian kualifikasi keahlian yang dibutuhkan pasar tenaga kerja.

Dalam hal ketidaksesuaian kualifikasi keahlian yang dimiliki oleh penduduk Kota Yogyakarta dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, maka dapat dikaitkan dengan kondisi SDM penduduk Kota Yogyakarta yang berkualitas baik. Kondisi tersebut tercermin dari nilai IPM Kota Yogyakarta yang selalu dalam kategori sangat tinggi selama lima tahun terakhir. Bahkan, apabila ditarik lebih jauh pada periode 10 tahun ke belakang, Kota Yogyakarta secara berturut-turut menjadi kota dengan nilai IPM tertinggi secara nasional. Tingginya nilai IPM tersebut memberikan gambaran bahwa SDM di Kota Yogyakarta dapat dikatakan memiliki kualitas unggul sehingga memiliki kecenderungan positif terhadap upaya untuk terus meningkatkan produktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta. Namun demikian, keunggulan kualitas SDM penduduk Kota Yogyakarta dapat menjadi permasalahan tersendiri apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai.

Dengan menambahkan konteks angka PDRB per kapita di Kota Yogyakarta yang juga cukup tinggi di atas DIY dan bahkan nasional, maka kombinasi kondisi kualitas SDM yang baik dengan tingginya PDRB per kapita tersebut mengindikasikan gambaran angkatan kerja yang berkualitas serta dalam kondisi kesejahteraan keluarga yang relatif baik. Artinya, angkatan kerja di Kota Yogyakarta dengan jumlah 181.426 terindikasi sebagian besar merupakan angkatan kerja yang berasal dari kelas ekonomi atas. Hal tersebut berdampak terhadap karakter angkatan kerja yang akan lebih selektif terhadap kualifikasi dan gaji dalam memilih lapangan pekerjaan sehingga terindikasi menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, maka dibutuhkan solusi yang berbeda dengan penanganan pengangguran pada

umumnya. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih bersifat formal, profesional, atau kreatif.

2.3.1.10. Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian dan Pemerataan Distribusi Pendapatan

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang menjadi penggerak utama roda perekonomian Kota Yogyakarta. Dengan *multiplier effect* yang besar terhadap sektor lain, pariwisata seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih inklusif. Pada masa pandemi Covid-19, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai komponen utama pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kota Yogyakarta, yakni sebesar 10,97% pada tahun 2020. Pada masa pasca pandemi, kontribusinya mengalami peningkatan menjadi 11,13% di tahun 2021, lebih tinggi dibandingkan laju pemulihan kontribusi sektor pariwisata di DIY (4,04%). Data tahun 2024 menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Yogyakarta mencapai 13,44%, lebih tinggi dari angka nasional (4,01%) maupun DIY (10,6%).

Meskipun demikian, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian kota masih menyisakan tantangan. Secara komparatif, dibandingkan dengan Kota Surakarta yang memiliki karakter sosial budaya serupa, kontribusi pariwisata Kota Yogyakarta memang lebih tinggi (Surakarta: 6,52%). Namun, kontribusi tersebut masih jauh di bawah capaian Kota Denpasar (25,55%) yang dikenal sebagai pusat pariwisata internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pariwisata Yogyakarta belum sepenuhnya termanfaatkan untuk mendorong akselerasi ekonomi lokal secara maksimal. Di sisi lain, kontribusi pariwisata terhadap pemerataan distribusi pendapatan juga belum optimal. Meskipun sektor ini menyerap banyak tenaga kerja, manfaat ekonominya belum sepenuhnya menjangkau kelompok penduduk berpendapatan rendah, khususnya kelompok desil 1–4.

Salah satu indikator yang menunjukkan belum optimalnya kinerja pariwisata adalah tingkat *Length of Stay* (LoS) atau lama tinggal wisatawan yang

cenderung stagnan, dengan laju pertumbuhan rata-rata hanya sebesar 3,63% per tahun. Pada tahun 2020, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta sebesar 1,63 hari, dan hanya meningkat menjadi 1,88 hari pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih kuat dalam menjaga dan meningkatkan LoS, terutama mengingat adanya tantangan ke depan seperti pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dan Yogyakarta-Solo yang berpotensi menurunkan durasi tinggal wisatawan karena kemudahan akses pulang-pergi dalam waktu singkat.

Dalam konteks ini, penguatan *branding* Kota Yogyakarta sebagai *City of Festival* menjadi peluang strategis yang dapat dioptimalkan. Salah satu contoh konkret adalah penyelenggaraan ArtJog, festival seni kontemporer berskala nasional dan internasional yang telah terbukti mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan kajian Dinas Pariwisata DIY (2024??), ArtJog menjadi bukti nyata bahwa event budaya berkualitas dapat mengangkat citra kota, meningkatkan pengeluaran wisatawan, dan memperkuat sektor-sektor pendukung seperti kuliner, UMKM, serta industri kreatif. Faktanya, Kota Yogyakarta memiliki karakter kuat dalam hal ini, dengan keberadaan kampung wisata, kelurahan budaya, dan beragam festival yang berbasis komunitas.

Dengan demikian, meskipun sektor pariwisata telah menunjukkan kontribusi positif terhadap PDRB, namun perannya dalam pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta masih belum optimal. Tantangan ini menuntut pengembangan strategi yang tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi juga peningkatan kualitas pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

2.3.1.11. Penurunan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan

Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan menjadi fokus utama dalam RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 sebagai bagian dari amanat yang tertuang di RPJP Nasional maupun RPJPD DIY. Faktanya, kontribusi sektor industri pengolahan di Kota Yogyakarta justru cenderung mengalami

penurunan. Pada tahun 2020 kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian Kota Yogyakarta adalah sebesar 13,01% dan kemudian turun menjadi 12,02% pada tahun 2024. Selain itu, indikator laju pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan menunjukkan tren pada tahun 2020-2024 sebesar -1,96%. Kendati demikian, laju pertumbuhan tersebut sudah mengalami peningkatan cukup signifikan sejak pandemi Covid-19 di tahun 2021 yang sempat mengalami laju penurunan sebesar -3,20%.

Adanya keterbatasan lahan dalam pengembangan sektor industri pengolahan menjadi salah satu pengaruh dalam penurunan kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian Kota Yogyakarta. Lahan yang terbatas di Kota Yogyakarta dan penggunaan lahan yang sebagian besar (>60%) peruntukannya untuk permukiman menyulitkan industri untuk melakukan *upscaling* terhadap usahanya. Hal ini menjadi dasar bahwa pengembangan industri menengah dan besar tidak menjadi fokus utama di Kota Yogyakarta. Fokus utama pengembangan industri pengolahan di Kota Yogyakarta adalah industri mikro dan kecil.

Pengembangan sektor industri pengolahan perlu menjadi perhatian karena kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku ekonomi, terutama pada kelompok pendapatan terendah dan menengah. Industri pengolahan di Kota Yogyakarta didominasi oleh industri mikro dan kecil. Pertumbuhan industri mikro dan kecil di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dengan laju penurunan rata-rata sebesar -62,64% per tahun. Pada tahun 2020 pertumbuhan industri mikro dan kecil di Kota Yogyakarta sebesar 52,87% kemudian turun pada tahun 2020 menjadi 1,03%.

Hal ini dapat ditunjukkan melalui jumlah usaha mikro dan kecil mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke 2024 dengan laju penurunan rata-rata sebesar -17,36% per tahun. Pada tahun 2020 jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta sebanyak 14.654 usaha dan kemudian turun menjadi 6.835 usaha pada tahun 2024.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas industri mikro dan kecil di Kota Yogyakarta, maka salah satu lembaga yang dapat dilakukan adalah lembaga koperasi. Koperasi menjadi salah satu lembaga yang

berpotensi dioptimalkan perannya sebagai pendorong produktivitas industri mikro dan kecil untuk berkembang, terutama dalam hal permodalan. Maka dari itu, perlu adanya kolaborasi antara pengembangan industri pengolahan dan pengembangan koperasi. Namun demikian, sejauh ini koperasi di Kota Yogyakarta masih belum secara optimal berkembang ditinjau dari indikator rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB di Kota Yogyakarta yang masih berkisar di bawah angka 1% selama periode 2020-2024. Pada tahun 2024 rasio tersebut sebesar 0,8. Bahkan, jika dilihat dari capaian volume usaha dan sisa usaha , selama periode tahun 2020-2024 total capaian volume dan sisa hasil usaha cenderung mengalami penurunan dari 489,5 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 416,7 miliar rupiah pada tahun 2024 dengan laju penurunan rata-rata per tahun sebesar -3,95%. Maka dari itu, perlu dilakukan pengembangan koperasi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan pengembangan industri pengolahan khususnya skala mikro dan kecil.

2.3.1.12. **Tantangan Pemenuhan Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan menjadi tantangan dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan, terutama dalam menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan pangan maupun komoditas pendukungnya. Dalam konteks wilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta, tantangan ini diperkuat oleh kondisi struktural yang kompleks, salah satunya adalah keterbatasan kapasitas produksi pangan lokal akibat semakin sempitnya lahan pertanian dan minimnya tenaga kerja di sektor tersebut.

Gambaran kondisi keterbatasan tersebut ditunjukkan melalui penurunan produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian dari sebesar 49,76 ribu rupiah/jiwa pada tahun 2019 menjadi 25,47 ribu rupiah/jiwa pada tahun 2023 dengan laju penurunan rata-rata sebesar -15,42% per tahun. Penurunan produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian menjadi suatu karakteristik kawasan perkotaan yang perekonomiannya lebih banyak bergerak pada sektor industri atau jasa. Maka dari itu, Kota Yogyakarta sebagai kawasan perkotaan perlu memasok kebutuhan pangan dari luar wilayah Kota Yogyakarta.

Selain itu, kondisi ketahanan pangan di Kota Yogyakarta juga dapat dipotret melalui indikator ketersediaan pangan utama yang tercatat mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 142,19 menjadi 130,28 pada tahun 2023, dengan laju penurunan rata-rata sebesar -27,10% per tahun. Kondisi penurunan ketersediaan pangan utama tersebut perlu menjadi perhatian sebagai bagian dari evaluasi dan antisipasi terhadap adanya potensi negatif yang muncul sebagai dampak terusan. Salah satu penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah pandemi Covid-19 yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian maupun tatanan kehidupan masyarakat secara umum.

Dalam periode 2020–2024, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan juga menunjukkan tren yang fluktuatif, namun pada dua tahun terakhir (2023–2024) mengalami peningkatan, dari 8,74 menjadi 10,35. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kelompok masyarakat yang semakin sulit memenuhi kebutuhan konsumsi pangannya secara layak, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam memastikan akses pangan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penurunan kinerja indikator ketahanan pangan tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menghadapi permasalahan ketahanan pangan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan yang sulit untuk memenuhi kebutuhan energi 2.745 kalori per hari. Ketahanan pangan merupakan salah satu tantangan yang harus diselesaikan dan dimitigasi secara tepat, khususnya dalam kondisi tingkat inflasi Kota Yogyakarta yang relatif fluktuatif terutama pada komoditas pangan.

Tantangan pengendalian terhadap peningkatan harga akan bertambah seiring dengan peningkatan *demand* pada komoditas pangan di hari besar keagamaan dan *peak season* pariwisata di mana konsumen pangan bertambah dengan hadirnya wisatawan. Dampaknya, inflasi yang terjadi dapat menyebabkan harga pangan menjadi naik dan menurunkan daya beli pangan berkualitas pada masyarakat desil 1-4. Pada kondisi tersebut, maka

strategi perlindungan pada masyarakat desil 1-4 dari dampak inflasi harus dilakukan secara tepat.

Strategi penjagaan tingkat konsumsi masyarakat menengah ke bawah dapat dilakukan melalui pengembangan sistem distribusi yang efisien dan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga. Sebagai daerah bukan penghasil dan komoditas pangan sering menjadi penyumbang inflasi, Kota Yogyakarta harus memperpendek rantai pasok distribusi komoditas untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya pangan, dan memastikan kualitas produk yang lebih baik yang beredar di pasar Kota Yogyakarta. Kerja sama antardaerah *(g to g)* yang ditindaklanjuti dengan kerja sama bisnis (*b to b*) dapat diperluas bagi komoditas lain. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan tindaklanjut dari kerja sama tersebut. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengembangkan dan mendukung pasar tradisional atau komunitas agar terhubung langsung dengan petani dan produsen dari luar wilayah Kota Yogyakarta, sehingga bisa menjaga stabilitas harga dan aksesibilitas produk bagi masyarakat menengah ke bawah.

2.3.1.13. **Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan**

Kondisi lingkungan hidup di Kota Yogyakarta menunjukkan tren penurunan yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mengalami penurunan yang relatif tajam dari 60,89 pada tahun 2022 menjadi 52,05 pada tahun 2023, sebelum meningkat kembali menjadi 55,53 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, rata-rata laju pertumbuhan IKLH selama lima tahun terakhir mengalami kontraksi/penurunan sebesar -0,05 persen per tahun. Tren kondisi ini mencerminkan memburuknya kondisi ekologi perkotaan dan meningkatnya tekanan terhadap daya dukung lingkungan.

Penurunan IKLH berkaitan langsung dengan menurunnya nilai pada tiga dimensi utama penyusunnya, yaitu kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Pada periode 2022–2023, indeks kualitas air menurun dari 38,54 menjadi 28,91, dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun -4,16

persen. Penurunan ini mengindikasikan peningkatan terhadap kejadian pencemaran air yang dapat berasal dari limbah rumah tangga, limbah kegiatan industri, maupun pencemaran bahan kimia di sungai atau air tanah. Sementara itu, indeks kualitas udara turun dari 90,74 menjadi 84,95, seiring dengan meningkatnya emisi kendaraan bermotor dan rendahnya proporsi penggunaan transportasi umum. Adapun indeks kualitas tutupan lahan mengalami penurunan paling tajam, dari 44,06 menjadi 30,93 dengan laju penurunan rata-rata -8,38 persen per tahun. Penurunan ini menunjukkan terjadinya konversi ruang terbuka menjadi lahan terbangun yang semakin masif.

Kondisi penurunan tutupan lahan turut memperkuat indikasi keterbatasan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Yogyakarta. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa luas RTH publik baru mencapai 8,06 persen dari luas wilayah kota, jauh di bawah ketentuan minimum 20 persen. Pertumbuhan RTH publik pun cenderung stagnan dengan laju pertumbuhan negatif sebesar -0,15 persen per tahun sejak 2020. Keterbatasan lahan menjadi faktor utama yang membatasi ekspansi RTH, meskipun terdapat berbagai upaya pengembangan RTH publik dan privat dalam skala lingkungan hingga institusi. Kondisi keterbatasan RTH ini secara langsung berdampak pada menurunnya kualitas udara, meningkatnya suhu lingkungan, dan terbatasnya akses warga terhadap ruang interaksi dan aktivitas fisik.

Di sisi lain, persoalan pengelolaan sampah juga memperlihatkan tekanan serius terhadap kualitas lingkungan kota. Ketergantungan yang tinggi terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di luar wilayah Kota Yogyakarta menyebabkan kerentanan sistem pengelolaan sampah. Ketika operasional TPA terganggu, terjadi penumpukan sampah di berbagai titik kota yang tidak tertangani secara optimal. Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan penegakan aturan, tidak meratanya partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah, serta kapasitas layanan yang belum mampu mengimbangi produksi sampah harian masyarakat.

Berbagai gejala tersebut memperlihatkan bahwa lingkungan hidup perkotaan di Kota Yogyakarta mengalami tekanan yang saling berkelindan. Penurunan

kualitas air, udara, tutupan lahan, keterbatasan RTH, dan krisis pengelolaan sampah saling memperkuat satu sama lain dalam membentuk kondisi lingkungan yang semakin rentan dan berisiko terhadap kesehatan, kenyamanan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat perkotaan.

2.3.1.14. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Perkotaan

Kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan merupakan salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya kota yang layak huni, efisien, dan berdaya saing. Namun demikian, pelayanan infrastruktur dasar di Kota Yogyakarta masih menghadapi berbagai kendala struktural dan fungsional yang mencerminkan belum optimalnya kualitas infrastruktur dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah masih tingginya ketergantungan terhadap fasilitas pengelolaan akhir (TPA) yang berada di luar wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Neraca Pengelolaan Persampahan tahun 2024, tingkat penanganan sampah baru mencapai 65,12%, sedangkan tingkat pengurangannya hanya sebesar 18,95%. Ketergantungan ini menimbulkan risiko keberlanjutan apabila tidak segera diimbangi dengan kebijakan internalisasi pengelolaan dan pengurangan sampah dari sumbernya.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Kota Yogyakarta telah mendorong program Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA) sejak 12 Desember 2022 melalui Surat Edaran Wali Kota Nomor 660/6123/SE/2022. Meskipun inisiatif ini merupakan langkah positif, implementasi dan dampaknya masih memerlukan evaluasi dan penguatan, terutama dari sisi kapasitas masyarakat dan infrastruktur pendukung.

Dalam aspek penyediaan air minum, cakupan layanan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Yogyakarta masih menunjukkan angka yang rendah dan kecenderungan fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data tren tahun 2020–2024, persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman melalui jaringan perpipaan PDAM berada dalam rentang 17,93% hingga 20,12%, tanpa menunjukkan pola pertumbuhan yang konsisten. Pada tahun 2024, cakupan pelayanan tercatat

sebesar 20,12% atau setara dengan 25.966 kepala keluarga dari total 123.585 KK. Fluktuasi ini mengindikasikan belum terciptanya sistem penyediaan air minum yang stabil dan merata, baik dari sisi kapasitas infrastruktur maupun aspek pembiayaan dan jangkauan wilayah pelayanan.

Permasalahan serupa juga terjadi dalam layanan air limbah domestik. Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dengan akses aman hanya sebesar 23,80%, sedangkan pelayanan SPALD Terpusat (SPALD-T) dengan akses aman hanya 19,87%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum memiliki sistem sanitasi yang layak, sehingga berisiko terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Di sektor transportasi, performa lalu lintas juga menunjukkan gejala penurunan kualitas layanan. Hasil survei *updating* kinerja lalu lintas tahun 2024 mencatat peningkatan rata-rata V/C Ratio dari 0,57 menjadi 0,63, yang menandakan bertambahnya kepadatan arus lalu lintas pada sejumlah ruas jalan di Kota Yogyakarta. Sejalan dengan itu, kecepatan rata-rata kendaraan mengalami penurunan dari 26,20 km/jam pada tahun 2023 menjadi 25,76 km/jam pada tahun 2024, yang berdampak terhadap efisiensi mobilitas dan waktu tempuh masyarakat.

Sementara itu, kapasitas fasilitas parkir yang tersedia juga belum sebanding dengan kebutuhan. Tempat Khusus Parkir (TKP) yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta (TKP Senopati, Ngabean, Sriwedani, Limaran, dan Selatan Beringharjo) hanya mampu menampung 112 SRP Bus, 205 SRP Mobil, dan 464 SRP Motor. Adapun TKP yang dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY (Ketandan dan Beskalan) hanya menambah kapasitas sebesar 141 SRP Mobil dan 1.500 SRP Motor. Terbatasnya kapasitas tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya penggunaan badan jalan untuk parkir sehingga mempengaruhi kondisi lalu lintas pergerakan kendaraan.

2.3.1.15. Belum Optimalnya Pengelolaan Risiko Bencana, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan

Kota Yogyakarta sebagai kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam pengurangan risiko bencana dan penanganan keadaan darurat. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2024, jenis bencana yang paling sering terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah cuaca ekstrem dan kekeringan. Sementara itu, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Yogyakarta menunjukkan nilai 64,22 pada tahun 2024, yang menempatkan wilayah ini dalam kategori risiko sedang. Jika ditinjau dalam tren lima tahun terakhir (2020–2024), IRB mengalami penurunan bertahap dari 72,86 menjadi 64,22, dengan rata-rata laju penurunan sebesar -3,11% per tahun. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana sudah berjalan cukup baik, khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor, dan perlu dijaga konsistensinya agar dampaknya semakin merata ke seluruh wilayah.

Lebih lanjut, berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta 2022–2026, terdapat tujuh jenis potensi ancaman bencana yang diidentifikasi di wilayah Kota Yogyakarta, yaitu banjir, wabah penyakit, cuaca ekstrem, gempa bumi, kegagalan teknologi, kekeringan meteorologi, dan letusan gunung api. Dari seluruh ancaman tersebut, banjir merupakan potensi risiko tertinggi yang dihadapi Kota Yogyakarta. Ancaman ini dipicu oleh kapasitas sungai yang tidak mencukupi, kerusakan infrastruktur pengendali banjir, sampah yang menyumbat aliran air, serta keberadaan permukiman padat di bantaran sungai. Sementara itu, risiko bencana gempa bumi, cuaca ekstrim, kekeringan meteorologi, kegagalan teknologi, dan wabah penyakit dikategorikan dalam risiko sedang, sedangkan letusan gunung api berada dalam kategori risiko rendah dan umumnya berdampak melalui banjir lahar dingin dari aktivitas Gunung Merapi.

Tingkat ketahanan terhadap bencana daerah diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah, yang mencerminkan kapasitas kelembagaan, sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, serta kesiapan respons dan pemulihan.

Selama periode 2022–2024, capaian indeks ini di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan bertahap dari 0,65 pada tahun 2022 menjadi 0,69 pada tahun 2024. Meskipun mengalami tren positif, angka tersebut mengindikasikan bahwa penguatan sistem pengurangan risiko bencana masih bersifat bertahap dan belum menyentuh seluruh aspek wilayah dan komunitas secara merata. Beberapa kelemahan masih terdapat dalam penguatan kelembagaan, pengembangan sistem informasi dan logistik, serta perlindungan kawasan rawan bencana di tingkat kampung.

Salah satu contoh konkret adalah masih terbatasnya pembangunan hidran kering untuk mendukung kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran di kawasan permukiman padat. Hingga tahun 2024, baru terdapat 16 unit hidran kering yang dibangun dari 27 Detail Engineering Design (DED) yang telah disusun. Ketidaksesuaian antara jumlah kebutuhan dan realisasi pembangunan menjadi salah satu tantangan dalam memastikan perlindungan menyeluruh di wilayah rawan kebakaran.

Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Kota Yogyakarta menuntut sistem penanggulangan kebakaran yang cepat dan responsif. Pada tahun 2024, jumlah kejadian pemadaman kebakaran dalam kota yang ditangani dengan waktu tanggap maksimal 15 menit mencapai 71 kejadian. Di luar kebakaran, jumlah permintaan layanan penyelamatan dan evakuasi juga meningkat, dari 581 kejadian pada tahun 2023 menjadi 653 kejadian pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kebutuhan terhadap layanan penyelamatan non-kebakaran (seperti evakuasi hewan, banjir lokal, dan insiden di ruang publik) semakin tinggi seiring kompleksitas kehidupan perkotaan.

Dalam hal edukasi masyarakat, pendekatan jemput bola untuk penyuluhan kebencanaan berbasis kampung baru mulai diimplementasikan pada tahun 2025. Sebelumnya, pendekatan yang digunakan masih berbasis kemantren, yang secara jangkauan dan intensitas dinilai belum cukup optimal untuk membangun budaya tanggap darurat di tingkat komunitas.

Secara umum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko bencana, kebakaran, dan penyelamatan di Kota Yogyakarta telah berjalan

namun masih belum optimal. Diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan, infrastruktur darurat, sistem peringatan dini, serta edukasi dan pelibatan masyarakat secara aktif, agar sistem perlindungan bencana dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata dan tangguh dalam menghadapi ancaman yang semakin dinamis.

2.3.1.16. Belum Tuntasnya Penanganan Kawasan Kumuh serta Pemenuhan Penyediaan Hunian Layak dan Terjangkau

Urbanisasi yang terus meningkat mendorong tingginya permintaan hunian, sementara penyediaan rumah yang layak dan terjangkau relatif masih terbatas. Hal ini menyebabkan munculnya permukiman padat dan kumuh di beberapa kawasan Kota Yogyakarta, dengan permasalahan pemenuhan jangkauan maupun kualitas layanan infrastruktur dasar seperti sanitasi, akses, persampahan serta kondisi rumah yang tidak layak huni. Di sisi lain, belum optimalnya penertiban dan penegakan terhadap terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, khususnya pada kawasan permukiman di bantaran sungai, turut mendorong tumbuhnya permukiman yang padat dan cenderung kumuh.

Berdasarkan UN-Habitat, permukiman kumuh adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap di kawasan kota yang memiliki satu atau beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut seperti rumah yang secara permanen dapat melindungi dari kondisi iklim yang ekstrim, pembagian ruangan lebih dari 3 orang dalam satu ruang yang sama, kesulitan akses air, dan akses sanitasi yang tidak tercukupi. Indikator pada permasalahan pengelolaan kualitas permukiman perkotaan yang masih belum optimal, antara lain luas kawasan kumuh, rasio permukiman layak huni dan persentase luasan permukiman kumuh tertangani.

Pengelolaan kualitas permukiman perkotaan serta penyediaan hunian yang layak dan terjangkau perlu menjadi perhatian untuk terus diupayakan dalam kurun waktu ke depan. Upaya untuk memperbaiki kondisi ini memerlukan strategi yang komprehensif, termasuk pengembangan kebijakan perumahan yang lebih inklusif, peningkatan kualitas infrastruktur, serta renovasi atau

rehabilitasi kawasan kumuh secara berkelanjutan. Pembangunan hunian yang terjangkau dan berkualitas harus menjadi prioritas dengan melibatkan berbagai pihak serta adanya program pemetaan dan penilaian yang efektif untuk mengidentifikasi kawasan kumuh dan merancang intervensi yang tepat. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan masalah penyediaan hunian layak dan terjangkau, serta kondisi kawasan kumuh dapat diatasi secara lebih menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta.

2.3.1.17. Belum Optimalnya Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dalam Merespon Dinamika Pembangunan dan Kondisi Sosial Masyarakat

Secara umum, pelaksanaan reformasi birokrasi telah berjalan cukup baik, rata-rata penilaian setiap komponen berada pada kategori "baik" hingga "sangat baik", tetapi yang menjadi tantangan adalah masih terdapat beberapa komponen yang perlu dioptimalkan.

1. Pembangunan Zona Integritas (ZI) masih rendah, dengan nilai 0,5 di tahun 2023 dan 2024 bahkan 0 pada tahun 2022, mengindikasikan bahwa penerapan ZI pada unit kerja yang melakukan pelayanan publik belum optimal.
2. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan pada tahun 2023 berada pada kategori kurang baik.
3. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang pada tahun 2023 dan 2024 masih berada pada predikat cukup.
4. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih berada pada level 3 (terdefinisi) pada tahun 2023 dan 2024.
5. Indeks SPBE di tahun 2023 (2,98), 2024 (3,41), dan 2024 (3,5) yang masih berada pada kategori baik masih perlu dioptimalkan hingga predikat sangat baik sebagai bentuk optimalisasi layanan digital.
6. Nilai SAKIP yang merepresentasikan evaluasi internal pemerintah daerah masih belum mencapai nilai atau predikat optimal (AA dengan

rentang 90-100). Nilai SAKIP di tahun 2022 (83,67), (2023 (84,17) dan 2024 (84,84) masih berada di peringkat A.

7. Indeks berAKHLAK di tahun 2022 (62,8%), 2023 (62,7%), dan 2024 (74,46%) masih berada pada predikat B (cukup sehat).
8. Indeks Pelayanan Publik sudah mencapai predikat Pelayanan Prima di tahun 2022 (4,45), 2023 (4,41) dan 2024 (4,53), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2022 (84,24), 2023 (84,26) dan 2024 (85,58) masih berada pada kategori "Baik", namun masih perlu dioptimalkan.

- Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (General) pada tahun 2024 sebesar 91,57% dengan predikat A-. Masih ada komponen yang perlu ditingkatkan, di antaranya Indikator Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, Indikator Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan
- Indikator Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas, Indikator Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, Indikator Tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah.

2.3.1.18. Masih Adanya Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang Berpotensi Memengaruhi Harmoni Kehidupan Masyarakat

Keamanan dan ketertiban merupakan elemen dasar bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, dan berkeadaban. Namun demikian, dinamika wilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta masih menyisakan berbagai potensi gangguan yang, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat memengaruhi harmoni sosial dan rasa aman warga. Gangguan-gangguan tersebut tidak hanya terjadi secara kasuistik, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural yang perlu diantisipasi secara berkelanjutan.

Salah satu indikator utama dalam aspek keamanan adalah tingkat kriminalitas (*crime rate*), yang meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, tetap mencerminkan adanya risiko terhadap ketenteraman masyarakat. Pada tahun 2024, tingkat kriminalitas tercatat sebesar 174 per 100.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, efektivitas penanganan tindak kriminal justru mengalami sedikit penurunan, dari 84,49% pada tahun 2023 menjadi 80,88% pada tahun 2024. Penurunan ini mengisyaratkan adanya tantangan dalam upaya penegakan hukum yang perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam konteks pencegahan dan pemulihan keamanan.

Di sisi lain, penyelesaian kasus pertanahan juga menunjukkan dinamika yang belum stabil. Tingkat penyelesaian kasus tanah mengalami pertumbuhan negatif sebesar -11,09%, dan pada tahun 2024 menjadi yang terendah, di mana dari 14 kasus yang ditemukan, hanya 5 kasus yang berhasil diselesaikan. Permasalahan pertanahan yang berlarut-larut memiliki potensi menimbulkan konflik sosial serta menghambat pengelolaan ruang secara tertib dan berkeadilan, terutama dalam konteks keterbatasan lahan di wilayah perkotaan yang padat.

Dalam aspek ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas), masih terdapat potensi gangguan yang memerlukan kewaspadaan dan respons cepat. Pada tahun 2024, terdapat 205 kasus potensi gangguan tibumtranmas. Seluruh kasus tersebut berhasil dikendalikan dengan baik (100%), namun tetap menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat perkotaan tidak lepas dari kerentanan terhadap gangguan sosial, baik yang bersifat insidental maupun yang bersumber dari tekanan lingkungan dan aktivitas perkotaan.

Kondisi serupa juga tercermin dalam aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Tercatat sebanyak 22.767 pelanggaran berhasil ditindak pada tahun 2024, yang terdiri atas 22.715 pelanggaran melalui mekanisme non yustisi dan 52 pelanggaran melalui mekanisme yustisi. Meskipun capaian penyelesaiannya mencapai 100%, tingginya jumlah pelanggaran tetap menjadi perhatian,

karena menunjukkan masih adanya tantangan dalam membangun budaya hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masih terjadi dan berpotensi memengaruhi harmoni kehidupan masyarakat. Keberhasilan dalam penanganan berbagai gangguan tersebut patut diapresiasi, namun kesinambungan upaya pencegahan, penguatan kelembagaan penegakan hukum, serta pendekatan berbasis komunitas tetap menjadi hal yang penting untuk memastikan stabilitas sosial secara berkelanjutan.

2.3.1.19. Belum Optimalnya Pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Mendasarkan trend usulan BKK Dana Keistimewaan dari tahun 2021-2025, didapatkan kesimpulan bahwa pagu definitif yang disetujui senantiasa lebih rendah dibandingkan yang diusulkan. Perolehan BKK Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta pada tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi, dimana tertinggi diperoleh pada tahun 2023 yakni Rp 97.958.129.900, diikuti tahun 2024 sebesar Rp 84.806.925.800,-. Permasalahan berkaitan dengan Dana Keistimewaan ini adalah bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar tidak hanya sekedar ceremonial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.

2.3.2. Isu Lingkungan Dinamis

Dalam konteks pembangunan Kota Yogyakarta ke depan, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari dinamika internal wilayah, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai perubahan dan perkembangan di tingkat global, nasional, dan regional. Lingkungan eksternal yang dinamis membawa dampak yang kompleks terhadap arah pembangunan kota, baik dalam bentuk peluang maupun risiko.

Pada skala global, perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi dunia, serta dinamika geopolitik global berpotensi memberikan pengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan perkotaan. Di tingkat nasional, Kota Yogyakarta diharapkan berperan aktif dalam mendukung pencapaian

program-program prioritas nasional sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029. Sedangkan di tingkat regional, konteks keistimewaan DIY memberikan peranan penting bagi Kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi dalam menjaga keberlanjutan dalam hal tata ruang, pelestarian budaya, maupun ketahanan lingkungan.

Memahami dinamika eksternal ini menjadi landasan penting dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan. Oleh karena itu, identifikasi isu lingkungan dinamis berikut dikategorikan dalam tiga tingkatan, meliputi isu global, isu nasional, dan isu regional.

2.3.2.1. **Isu Global**

Dalam menghadapi era global yang penuh ketidakpastian, Kota Yogyakarta perlu memahami berbagai dinamika eksternal yang memiliki potensi besar mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Berbagai risiko global yang berpotensi terjadi menunjukkan adanya tekanan besar terhadap stabilitas kondisi kehidupan perkotaan secara global, termasuk kota Yogyakarta.

2.3.2.1.1. ***Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota***

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global paling mendesak, sebagaimana ditegaskan dalam *Global Risks Report 2025* dan secara hukum internasional diatur dalam *Paris Agreement 2015*. Perubahan iklim ditandai dengan kenaikan suhu bumi, perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi. Laporan IPCC (*Sixth Assessment Report, 2021–2022*) memperkuat bukti bahwa intensitas perubahan iklim semakin cepat, dengan dampak yang menyebar di seluruh aspek ekosistem dan kehidupan manusia. Di Indonesia, data BMKG menunjukkan kenaikan suhu rata-rata dan perubahan pola musim yang signifikan, memperbesar risiko bencana hidrometeorologi di kawasan perkotaan.

Di Kota Yogyakarta, perubahan iklim terpantau dalam bentuk peningkatan intensitas hujan dalam waktu singkat, musim kemarau yang lebih panjang, kenaikan suhu udara, serta penurunan kualitas dan kuantitas air tanah. Hal

ini meningkatkan risiko banjir, memperburuk kondisi permukiman padat, mengancam keberlanjutan kawasan heritage, dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat serta produktivitas ekonomi. Sektor-sektor kunci seperti pariwisata, pendidikan, dan jasa turut mengalami tekanan akibat ketidakpastian iklim ini.

Ketahanan kota menjadi pilar utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Integrasi kebijakan pada seluruh aspek pembangunan kota dengan prinsip adaptasi dan mitigasi iklim menjadi keharusan, termasuk dalam rangka konservasi ruang hijau, pengelolaan air berkelanjutan, transisi energi bersih, serta penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana. Tanpa pembangunan berbasis ketahanan iklim, risiko sosial-ekonomi, degradasi lingkungan, dan kerusakan warisan budaya kota berpotensi akan semakin meningkat di masa depan.

Perubahan iklim tetap menjadi ancaman utama jangka panjang di tingkat global, dengan fenomena semakin meningkatnya intensitas cuaca ekstrem, perubahan pola musim, kenaikan suhu, dan kenaikan muka air laut. Kota-kota di seluruh dunia menghadapi peningkatan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan badai. Dalam konteks Kota Yogyakarta, perubahan iklim menyebabkan terjadinya peningkatan kerentanan terhadap bencana banjir, terutama pada kawasan di sepanjang bantaran sungai. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada penurunan cadangan air tanah, peningkatan penyebaran penyakit menular yang bersifat musiman, serta ancaman terhadap kelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya yang sensitif terhadap fenomena perubahan iklim.

2.3.2.1.2. ***Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)***

Pembangunan perkotaan di abad ke-21 tidak dapat dipisahkan dari komitmen global yang telah disepakati oleh komunitas internasional, khususnya melalui adopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *New Urban Agenda* (NUA). Keduanya merupakan bagian integral dari upaya membangun masa depan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan. SDGs menetapkan kerangka kerja makro pembangunan

berkelanjutan lintas sektor hingga tahun 2030, sedangkan NUA memperjelas implementasi pembangunan berkelanjutan di tingkat kota dan kawasan perkotaan. Dalam konteks ini, Kota Yogyakarta tidak dapat mengabaikan pentingnya integrasi prinsip-prinsip SDGs dan NUA dalam seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan ke depan.

SDGs mengusung 17 tujuan dan 169 target yang mencakup penghapusan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan penguatan institusi. Secara khusus, ujuan 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan) menjadi sangat relevan bagi Kota Yogyakarta, yang harus memastikan terciptanya ruang hidup yang aman, inklusif, layak huni, serta berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Selain itu, Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 6 (Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi), dan Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan) menjadi dimensi penting dalam konteks tantangan pembangunan perkotaan di Kota Yogyakarta. Dengan batas waktu pencapaian tahun 2030, Kota Yogyakarta dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mempercepat integrasi nilai-nilai SDGs ke dalam kebijakan pembangunan ke depan pada setiap sektor yang relevan.

Sementara itu, *New Urban Agenda* (NUA) sebagai hasil Konferensi Habitat III PBB tahun 2016 memberikan penekanan spesifik pada bagaimana kota-kota harus dirancang, dibangun, serta dikelola untuk mendukung pencapaian SDGs. NUA menekankan prinsip hak atas kota, yaitu bahwa ruang kota harus tersedia, diakses, dan dimanfaatkan oleh seluruh warga tanpa diskriminasi atau kota yang inklusif. Agenda ini juga menegaskan pentingnya tata kelola kota yang partisipatif, pengelolaan ruang publik yang adil, integrasi fungsi sosial-ekonomi-lingkungan dalam perencanaan kota, serta penguatan ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dalam konteks Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang terus mengalami perkembangan secara spasial dan fungsional, penerapan prinsip NUA menjadi tantangan krusial. Kota Yogyakarta tidak hanya perlu mengelola tekanan pembangunan urbanisasi di dalam kota, tetapi juga harus mengkoordinasikan pertumbuhan kawasan lintas wilayah sekitar secara

terpadu agar tidak memicu ketimpangan spasial, degradasi lingkungan, atau fragmentasi sosial.

Dengan waktu yang semakin terbatas menuju tahun 2030, urgensi untuk mempercepat adopsi prinsip-prinsip SDGs dan NUA dalam pembangunan Kota Yogyakarta menjadi semakin penting. Tanpa adanya komitmen kuat dan terukur dalam menerjemahkan agenda global ini ke dalam kebijakan lokal untuk pembangunan ke depan, Kota Yogyakarta berisiko menghadapi tantangan serius seperti ketidakmerataan pembangunan, degradasi kualitas lingkungan hidup, krisis identitas budaya, serta melemahnya daya saing kota. Oleh karena itu, penguatan komitmen pembangunan, reformasi tata kelola kota, pemberdayaan masyarakat, serta inovasi dalam pengelolaan ruang dan sumber daya menjadi faktor kunci dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang berkelanjutan, inklusif, tangguh, dan berdaya saing di masa depan.

2.3.2.1.3. ***Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global***

Ketidakpastian ekonomi global merupakan kondisi ketika arah dan stabilitas perekonomian dunia sulit diprediksi akibat interaksi kompleks antara faktor geopolitik, dinamika pasar internasional, krisis energi, serta disrupsi rantai pasok. Dalam beberapa tahun terakhir, ketidakpastian ini semakin meningkat seiring dengan eskalasi ketegangan antarnegara, konflik bersenjata di berbagai kawasan, serta perubahan kebijakan ekonomi proteksionis dari negara-negara besar. Salah satu contoh signifikan adalah konflik yang terjadi di Eropa Timur, yang berdampak luas terhadap pasokan energi, stabilitas harga pangan, dan perdagangan global. Selain itu, ketegangan dagang yang terus berlanjut antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam bentuk saling menaikkan tarif dan pembatasan teknologi menjadi simbol dari geoeconomic confrontation yang kian terbuka, di mana masing-masing negara mencoba memproteksi ekonomi dalam negerinya dari pengaruh eksternal.

Di kawasan Asia Tenggara, tensi geopolitik di Laut Cina Selatan menunjukkan tren peningkatan dan dapat berdampak pada stabilitas kawasan, termasuk Indonesia. Ketegangan ini tidak hanya memicu

ketidakpastian politik dan keamanan regional, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap jalur pelayaran internasional dan stabilitas hubungan dagang antarnegara. Di sisi lain, berbagai peristiwa seperti fluktuasi tajam harga komoditas global, inflasi internasional akibat krisis pasokan pasca pandemi, hingga ancaman resesi di negara-negara maju semakin memperbesar kompleksitas tantangan ekonomi global. Semua kondisi ini saling terkait dan berkontribusi terhadap suasana ekonomi yang tidak stabil dan sulit diprediksi, termasuk di tingkat domestik dan lokal.

Dalam konteks Kota Yogyakarta, yang memiliki perekonomian yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, jasa pendidikan, dan ekonomi kreatif, ketidakpastian ekonomi global dapat memunculkan sejumlah risiko strategis. Penurunan minat perjalanan internasional, pembatasan perdagangan barang kreatif, dan perlambatan investasi akibat kehati-hatian pelaku ekonomi dapat secara langsung menekan pertumbuhan sektor unggulan kota. Selain itu, potensi naiknya harga bahan baku impor, terbatasnya pasokan logistik, serta perubahan preferensi konsumsi masyarakat akibat tekanan inflasi global juga dapat menimbulkan dampak sosial-ekonomi di tingkat rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Ketergantungan terhadap mobilitas dan arus barang lintas wilayah menjadikan Yogyakarta rentan terhadap gangguan ekonomi eksternal, yang jika tidak diantisipasi sejak awal, berisiko memperbesar ketimpangan dan menurunkan daya saing kota di tingkat nasional maupun regional.

2.3.2.1.4. ***Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkat***

Salah satu isu utama yang disoroti dalam *Global Risks Report 2025* dari World Economic Forum adalah meningkatnya risiko terkait polarisasi sosial dan penyebaran misinformasi yang meluas di berbagai belahan dunia. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat mengakses, menyebarkan, dan mempercayai informasi. Namun, kecepatan disrupsi teknologi ini tidak selalu diiringi dengan kesiapan masyarakat dalam membedakan informasi yang kredibel dan hoaks. Ketidaksiapan literasi digital inilah yang menyebabkan

ruang publik, terutama media sosial, menjadi arena yang sangat rentan terhadap konflik narasi, disinformasi terorganisir, hingga terpolarisasinya opini masyarakat dalam berbagai isu politik, agama, dan identitas.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di tingkat global, tetapi juga sangat relevan di Indonesia. Beberapa peristiwa politik nasional seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden dalam satu dekade terakhir menunjukkan pola peningkatan ketegangan sosial yang muncul dari perbedaan pilihan politik. Polarisasi ini diperkuat oleh penggunaan media sosial sebagai alat kampanye dan mobilisasi dukungan yang sering kali bersifat antagonistik antar kelompok. Serangan verbal, penyebaran ujaran kebencian, dan kampanye berbasis misinformasi menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan, karena tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kota Yogyakarta, sebagai kota pendidikan dan pusat budaya yang terbuka, juga berpotensi terpapar oleh dinamika tersebut. Terlebih lagi, dengan tingkat penetrasi internet yang cenderung tinggi, masyarakat Kota Yogyakarta menjadi kelompok pengguna aktif media sosial yang sangat mungkin terdampak oleh konten-konten provokatif dan narasi yang memecah belah. Selain itu, ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi, dan layanan publik di dalam kota juga berpotensi memperbesar jarak sosial antar kelompok masyarakat. Jika tidak diantisipasi, kombinasi antara disinformasi, polarisasi sosial, dan ketimpangan ini dapat melemahkan kohesi sosial, menciptakan ketegangan antar komunitas, serta memperburuk stabilitas sosial dan tata kehidupan perkotaan di Yogyakarta.

2.3.2.2. **Isu Nasional**

Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan strategis di berbagai sektor, mulai dari transformasi pembangunan berkelanjutan, penguatan sumber daya manusia, hingga peningkatan daya saing pariwisata dan ketahanan sosial-ekonomi. Kota

Yogyakarta sebagai salah satu pusat budaya, pendidikan, dan pariwisata nasional, memiliki posisi strategis dalam dinamika pembangunan nasional tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu-isu nasional yang berdampak pada Kota Yogyakarta menjadi penting sebagai dasar dalam perumusan arah pembangunan kota ke depan.

2.3.2.2.1. ***Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan***

Transisi menuju pembangunan rendah karbon dan kota berketahanan lingkungan merupakan salah satu konsep utama dalam pembangunan global dan nasional. Kota rendah emisi mengacu pada pengelolaan wilayah perkotaan yang menurunkan emisi gas rumah kaca melalui efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Konsep ini menjadi respons terhadap meningkatnya ancaman perubahan iklim global, degradasi lingkungan, serta krisis kualitas hidup di kawasan urban. Dalam konteks global, upaya transisi ini berakar pada komitmen internasional seperti Paris Agreement, yang juga diadopsi oleh Indonesia melalui berbagai kebijakan nasional.

Secara nasional, RPJMN 2025–2029 menegaskan target penurunan emisi nasional, integrasi pembangunan rendah karbon ke dalam perencanaan wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup kota-kota besar. Data BPS 2023 menunjukkan peningkatan kontribusi sektor energi dan transportasi terhadap emisi karbon nasional, mempertegas kebutuhan transformasi kota-kota menjadi lebih hijau. Isu ini menjadi semakin mendesak mengingat pertumbuhan populasi yang tinggal di perkotaan yang diproyeksikan semakin neningkat setiap tahunnya, sehingga tekanan terhadap daya dukung lingkungan semakin besar.

Bagi Kota Yogyakarta, transisi menuju kota rendah emisi menjadi penting dalam mengantisipasi peningkatan suhu kota, penurunan kualitas udara, serta keterbatasan ruang hijau yang mendukung ketahanan iklim. Sebagai kota dengan intensitas mobilitas tinggi dan ruang perkotaan yang cenderung padat, tantangan pengelolaan lingkungan perkotaan menjadi semakin kompleks. Di sisi lain, tingginya tingkat kesadaran masyarakat, komunitas

lingkungan yang aktif, serta dorongan inovasi sektor swasta membuka peluang bagi Kota Yogyakarta untuk dapat menjadi model transisi kota rendah emisi di tingkat nasional.

2.3.2.2.2. ***Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan***

Akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, dan ruang budaya inklusif merupakan fondasi dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Konsep ketimpangan akses merujuk pada kesenjangan antarwilayah, antarkelompok sosial, atau antar lapisan ekonomi dalam memperoleh layanan dasar tersebut. Dalam literatur pembangunan, kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada rendahnya produktivitas nasional, tetapi juga memperbesar ketidaksetaraan sosial dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Di tingkat nasional, meskipun berbagai capaian pembangunan manusia menunjukkan perbaikan, ketimpangan masih menjadi isu strategis. Data BPS 2023 menunjukkan bahwa indeks ketimpangan pendidikan nasional tetap tinggi, dengan disparitas layanan pendidikan dan kesehatan yang signifikan antar provinsi dan antar kabupaten/kota. RPJMN 2025–2029 menekankan peningkatan kualitas layanan dasar dan pengurangan ketimpangan layanan antarwilayah sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Dalam konteks Kota Yogyakarta, sebagai pusat pendidikan dan budaya nasional, tantangan ketimpangan akses tetap hadir meskipun agregat indikator pembangunannya tergolong tinggi. Perbedaan akses terhadap layanan pendidikan unggul, fasilitas kesehatan preventif, serta ruang-ruang ekspresi budaya antara kawasan pusat dan pinggiran kota memperlihatkan adanya potensi ketimpangan dalam skala kota. Dinamika urbanisasi yang cepat dan perubahan demografi kota memperbesar risiko peningkatan beban layanan, sehingga penanganan ketimpangan ini menjadi penting untuk menjaga inklusivitas pembangunan Yogyakarta.

2.3.2.2.3. ***Kerentanan Ketahanan Sosial-Ekonomi terhadap Krisis Pangan dan Risiko Bencana***

Ketahanan sosial-ekonomi mencerminkan kemampuan suatu komunitas atau kota untuk mempertahankan fungsi sosial dan ekonomi dasar di tengah tekanan krisis, termasuk krisis pangan dan bencana alam. Kerentanan terhadap ketahanan ini muncul ketika suatu wilayah bergantung pada faktor eksternal untuk memenuhi kebutuhan dasar, atau ketika struktur sosial-ekonominya lemah dalam menghadapi shock eksternal. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, penguatan ketahanan sosial-ekonomi menjadi kunci untuk memastikan stabilitas jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat.

Secara nasional, RPJMN 2025–2029 menargetkan penguatan ketahanan pangan, percepatan pengurangan risiko bencana, serta pengembangan sistem sosial-ekonomi yang lebih adaptif terhadap perubahan global dan iklim. Data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di wilayah urban yang sangat bergantung pada distribusi pangan eksternal. Selain itu, BNPB mencatat lebih dari separuh kota-kota besar Indonesia, termasuk Yogyakarta, memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, terutama gempa bumi dan erupsi vulkanik.

Kota Yogyakarta, dengan ketergantungannya pada pasokan pangan dari wilayah sekitarnya dan lokasinya di jalur gempa serta dekat dengan Gunung Merapi, menghadapi kerentanan ganda terhadap krisis pangan dan bencana. Tekanan terhadap sistem distribusi pangan nasional atau terjadinya bencana besar dapat berdampak langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi kota. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan ke depan, penguatan ketahanan sosial-ekonomi menjadi isu yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan perkotaan Yogyakarta.

2.3.2.2.4. ***Penguatan Daya Saing Pariwisata Budaya dalam Konteks Pariwisata Nasional***

Pariwisata berbasis budaya merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang menekankan pada keberlanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan komunitas lokal. Pariwisata budaya tidak hanya berkontribusi pada pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat identitas nasional dan diplomasi budaya global. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sektor pariwisata budaya dipandang sebagai sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

RPJMN 2025–2029 menetapkan penguatan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas nasional, dengan target kontribusi terhadap PDB mencapai 5,5% pada 2029. Data Kemenparekraf menunjukkan adanya tren pertumbuhan pergerakan wisatawan nusantara dan mancanegara yang didorong oleh peningkatan minat terhadap destinasi budaya autentik. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Borobudur–Yogyakarta–Prambanan menjadi fokus pengembangan pariwisata nasional yang berbasis pada pelestarian nilai budaya dan warisan dunia.

Kota Yogyakarta, sebagai pusat budaya dan pendidikan nasional, berada dalam posisi strategis untuk mengambil peran utama dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya tersebut. Keberadaan Kraton Yogyakarta, kawasan sumbu filosofi, kawasan cagar budaya, serta berbagai kekayaan tradisi seni-budaya memberikan keunggulan kompetitif yang meningkatkan daya saing kota. Namun demikian, tantangan terkait keberlanjutan pariwisata, kualitas layanan, dan pelestarian budaya di tengah dinamika pariwisata yang masih dominan berorientasi pada konsep *mass tourism* perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kota ke depan sehingga tidak kontradiktif dengan upaya pelestarian kawasan yang terus diperkuat.

2.3.2.2.5. ***Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional***

Program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, transformasi digital, program makan bergizi gratis, dan cek kesehatan gratis, mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung dan

cepat. Konsep ini menekankan pentingnya peran daerah dalam mengakselerasi pencapaian target-target nasional melalui kolaborasi lintas sektor dan inovasi lokal.

Secara nasional, pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026, digitalisasi 80% layanan publik pada 2029, serta peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan dasar secara universal. Data BPS menunjukkan bahwa hingga 2023, angka kemiskinan ekstrem nasional masih berada di sekitar 1,5%, dengan variasi antarwilayah yang cukup tinggi. Transformasi digital juga masih menghadapi tantangan infrastruktur dan literasi digital di berbagai daerah.

Sebagai kota dengan tingkat pendidikan dan literasi digital yang relatif tinggi, serta basis ekonomi kreatif yang kuat, Kota Yogyakarta memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mendukung pencapaian program-program nasional tersebut. Dengan karakteristik masyarakat yang cenderung progresif dan jaringan komunitas yang aktif, Kota Yogyakarta dapat menjadi contoh implementasi program nasional berbasis kekuatan lokal yang adaptif dan inovatif.

2.3.2.3. **Isu Regional**

Selain dipengaruhi oleh dinamika global dan nasional, pembangunan Kota Yogyakarta juga sangat terkait dengan perkembangan kebijakan, fenomena, dan agenda strategis di tingkat regional, khususnya di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berbagai kebijakan kewilayahan, penetapan status warisan budaya dunia, hingga dinamika pembangunan sosial-ekonomi di DIY menjadi faktor penting yang membentuk peluang, tantangan, dan risiko bagi Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu-isu strategis regional menjadi krusial dalam merumuskan arah pembangunan kota yang sinkron dengan konteks keistimewaan daerah dan dinamika regional yang terjadi.

2.3.2.3.1. ***Implikasi Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia***

Penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2023 menandai pengakuan internasional terhadap nilai budaya dan sejarah kawasan tersebut. Konsep Sumbu Filosofi berakar pada tata ruang kosmologis dan nilai-nilai budaya Keraton Yogyakarta yang merepresentasikan hubungan manusia dengan alam dan pencipta. Status warisan dunia membawa tanggung jawab besar untuk menjaga integritas, keaslian, dan kesinambungan nilai-nilai budaya tersebut melalui pengelolaan ruang yang sensitif dan berkelanjutan.

Di tingkat regional, Pemerintah Daerah DIY menetapkan kebijakan untuk mendukung pengelolaan Sumbu Filosofi melalui Peraturan Gubernur dan rencana pengelolaan terintegrasi lintas kabupaten/kota. Pengelolaan kawasan ini menuntut sinergi antarsektor dalam menjaga nilai budaya, kualitas ruang, dan fungsi sosial-ekonomi kawasan. Tantangan yang muncul meliputi tekanan pembangunan, pertumbuhan pariwisata massal, dan perubahan sosial di kawasan sekitarnya.

Bagi Kota Yogyakarta, yang merupakan lokasi utama Sumbu Filosofi, implikasi dari penetapan ini sangat besar. Kota Yogyakarta harus menyesuaikan kebijakan penataan ruang, pengelolaan kegiatan sosial-budaya, serta tata kelola pariwisata agar tidak mengganggu integrasi kawasan. Status warisan dunia juga membuka peluang untuk penguatan citra internasional Kota Yogyakarta sebagai kota budaya berskala global, tetapi sekaligus menuntut konsistensi dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan ruang historis.

2.3.2.3.2. ***Dinamika Perkembangan Aglomerasi Perkotaan Regional***

Perkembangan wilayah perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat dan meluas lintas batas administrasi kota/kabupaten. Konsep Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) dalam RTRW DIY mengindikasikan pembentukan struktur metropolitan berbasis multi-nuclei yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman, Bantul, dan sebagian Kulon Progo. Fenomena ini mencerminkan proses urbanisasi regional yang cepat, disertai dengan

perubahan fungsi ruang, peningkatan mobilitas, dan pertumbuhan kebutuhan layanan perkotaan.

Di tingkat regional, dinamika ini menuntut penguatan integrasi perencanaan, pengelolaan ruang, dan pembangunan infrastruktur antarwilayah. RTRW DIY 2021–2041 menekankan pentingnya pengendalian pertumbuhan *urban sprawl*, penguatan konektivitas kawasan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup kawasan perkotaan. Urbanisasi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan masalah ketimpangan akses, degradasi lingkungan, serta tekanan terhadap sistem pelayanan kota.

Kota Yogyakarta, sebagai pusat utama Kawasan Perkotaan Yogyakarta, berada pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap dampak dinamika regional ini. Beban pelayanan, tekanan terhadap ruang kota, serta kebutuhan koordinasi antarwilayah menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Pada saat yang sama, konektivitas yang semakin baik dengan wilayah sekitar membuka peluang penguatan peran Yogyakarta sebagai pusat budaya, ekonomi kreatif, dan pendidikan regional.

2.3.2.3.3. ***Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis di Kota Yogyakarta***

Konsep Satuan Ruang Strategis (SRS) dalam kerangka keistimewaan DIY berfungsi untuk melindungi, mengelola, dan mengoptimalkan kawasan-kawasan dengan nilai strategis tinggi, baik dari aspek budaya, sejarah, maupun pengelolaan ruang. Di DIY, SRS menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan karakter wilayah, memperkuat identitas budaya, serta mengintegrasikan pelestarian nilai lokal dalam perencanaan pembangunan. Penetapan SRS menjadi bagian dari pelaksanaan kewenangan keistimewaan dalam urusan pertanahan dan tata ruang.

Di tingkat regional, kebijakan penetapan dan pengelolaan SRS telah dituangkan dalam Pergub DIY dan RTRW DIY, mencakup pengaturan ketat terhadap pemanfaatan ruang di kawasan-kawasan strategis, termasuk dalam kawasan perkotaan. Empat SRS utama di Kota Yogyakarta—yaitu KCB Kraton, KCB Pakualaman, KCB Kotagede, dan KCB Kotabaru—telah

ditetapkan dan memiliki regulasi ketat terkait pemanfaatan ruang dan pelestarian budaya.

Bagi Kota Yogyakarta, pengelolaan SRS menjadi isu penting dalam pembangunan kota ke depan. Keterpaduan antara rencana tata ruang kota (RDTR Kota Yogyakarta) dengan ketentuan pelestarian dalam kawasan SRS harus terus diperkuat untuk menghindari konflik penggunaan ruang. Tantangan lain meliputi perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan bersejarah tersebut.

2.3.3. Isu Strategis Daerah

2.3.3.1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Sebagai kota pendidikan dan kebudayaan, Yogyakarta memiliki potensi besar dalam menghasilkan SDM yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global. Namun, untuk memastikan bahwa potensi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, ada beberapa tantangan yang perlu diselesaikan agar peningkatan kualitas SDM berjalan merata dan optimal. Isu strategis ini mencakup beberapa permasalahan utama yang saling terkait, yaitu pendidikan yang belum merata, kualitas pelayanan kesehatan yang masih rendah, serta tantangan terhadap pelestarian adat istiadat di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

Meskipun Kota Yogyakarta memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain, kualitas pendidikan di beberapa kawasan masih menghadapi kesenjangan signifikan. Kesenjangan ini terlihat dalam akses dan fasilitas pendidikan yang tidak merata, serta ketimpangan dalam kualitas tenaga pendidik di berbagai sekolah. Beberapa daerah di pinggiran dan kawasan kumuh di Yogyakarta masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas yang cukup, perangkat teknologi yang dibutuhkan dalam pembelajaran, dan tenaga

pendidik yang terlatih. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah, anak-anak dari keluarga miskin, serta penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan besar dalam mengakses pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, kewenangan pendidikan yang terbagi antar berbagai pihak—pemerintah kota untuk tingkat SMP ke bawah, provinsi untuk SMA/SMK, dan pusat untuk pendidikan tinggi—menjadikan koordinasi dan sinergi lintas pihak menjadi sangat penting. Untuk memastikan bahwa keluaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sinergi lintas sektor dan hierarki antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat harus terjalin secara efektif. Pemerintah kota, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pendidikan dasar, perlu bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menyelaraskan kurikulum, program pelatihan keterampilan, serta mengatasi kesenjangan antara output pendidikan dan permintaan pasar kerja, khususnya di bidang yang berhubungan dengan ekonomi kreatif dan teknologi informasi.

Selain itu, banyak lulusan dari perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0, di mana teknologi informasi dan ekonomi kreatif menjadi faktor utama dalam perekonomian. Kurangnya pengintegrasian keterampilan digital dalam kurikulum pendidikan mengakibatkan lulusan tidak kompeten dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi dalam kurikulum pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Selain masalah pendidikan, tantangan penting lainnya dalam peningkatan kualitas SDM adalah semakin lemahnya kepribadian dan jatidiri masyarakat dalam hal pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah "nguri-uri budaya". Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang pesat, terjadi disrupsi nilai-nilai tradisional yang sebelumnya dijaga dengan baik oleh masyarakat. Teknologi, media sosial, dan arus globalisasi sering kali membawa informasi dan budaya yang tidak sesuai dengan kearifan lokal, yang berpotensi melemahkan rasa identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap budaya asli mereka.

Dalam konteks ini, disrupsi informasi yang terjadi seiring dengan cepatnya kemajuan teknologi memunculkan tantangan besar dalam melestarikan budaya dan adat istiadat. Hal ini bisa berdampak pada pembentukan karakter generasi muda yang lebih cenderung terpengaruh oleh budaya luar dan mengurangi kepedulian terhadap tradisi lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pelajaran tentang budaya lokal dalam pendidikan sejak dini, serta mendorong generasi muda untuk tetap menjaga dan mengembangkan kearifan lokal di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Pelestarian budaya ini akan menjadi bagian dari penguatan karakter bangsa, yang tidak hanya mengedepankan kecakapan akademik, tetapi juga kesadaran akan pentingnya identitas budaya yang kuat.

Di sisi lain, masalah kesehatan masyarakat juga sangat penting dalam konteks peningkatan kualitas SDM. Meskipun usia harapan hidup di Kota Yogyakarta cukup tinggi, masalah terkait dengan aging population (populasi yang semakin menua) menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Peningkatan jumlah lansia, yang diperkirakan akan terus meningkat, memerlukan perhatian khusus terhadap penyediaan layanan kesehatan yang memadai, serta penguatan program kesejahteraan sosial untuk kelompok usia lanjut.

Meningkatnya angka usia harapan hidup yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta semakin tua, namun sering kali mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan khusus lansia. Ini menciptakan tantangan dalam hal perawatan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia, baik itu perawatan medis rutin maupun dukungan sosial dan psikologis. Program kesehatan untuk lansia perlu diperkuat agar mereka dapat tetap aktif dan produktif dalam masyarakat, serta dapat mengurangi beban sosial-ekonomi akibat ketergantungan yang tinggi pada layanan kesehatan. Penyuluhan mengenai pola hidup sehat yang lebih aktif dan penyediaan fasilitas yang ramah lansia akan sangat berperan dalam menjaga kualitas hidup mereka.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sinergi yang lebih erat antara sektor pendidikan dan kesehatan dalam memastikan kualitas SDM yang

holistik, yang artinya tidak hanya terdidik tetapi juga sehat secara fisik dan mental. Dengan adanya kolaborasi antar berbagai tingkat pemerintahan, sektor swasta, serta masyarakat, Kota Yogyakarta dapat mengembangkan program-program kesehatan yang lebih inklusif dan terjangkau, serta memastikan keberlanjutan kualitas SDM di berbagai aspek kehidupan.

2.3.3.2. Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Kota Yogyakarta merupakan isu strategis yang harus segera diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun Kota Yogyakarta memiliki PDRB per kapita yang relatif tinggi, tantangan besar tetap ada dalam memastikan distribusi ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu masalah utama yang mengemuka adalah tingginya tingkat ketimpangan ekonomi yang tercermin pada angka Indeks Gini yang relatif tinggi. Ketimpangan ekonomi yang besar dapat berimplikasi negatif pada banyak hal, seperti peningkatan ketegangan sosial, rendahnya mobilitas sosial, dan berkurangnya akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan yang semakin sulit diatasi, di mana kelompok berpendapatan tinggi terus berkembang sementara kelompok berpendapatan rendah semakin terpinggirkan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang tidak merata. Program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, meskipun penting, masih menghadapi kendala dalam hal efektivitas distribusi dan ketepatan sasaran. Belum optimalnya program pengentasan kemiskinan untuk menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan kemudian mengurangi dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Selain itu, akses terhadap lapangan kerja yang layak juga belum merata, dengan sebagian besar pekerjaan bergaji tinggi tersedia di sektor formal, sementara banyak masyarakat masih mengandalkan sektor informal yang pendapatannya tidak stabil dan rentan terhadap ketidakpastian ekonomi.

Pada perspektif lain, pemberdayaan sektor UMKM menjadi kunci dalam mendorong kemandirian ekonomi kota. Namun, pelaku UMKM faktanya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dalam akses permodalan, kurangnya *skill*, maupun rendahnya tingkat literasi keuangan. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki keterampilan dalam manajemen keuangan yang efektif, sehingga kesulitan dalam memperbesar skala usaha mereka. Tanpa dukungan yang memadai, sektor UMKM jelas akan kesulitan untuk berkembang dan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi lokal di Kota Yogyakarta.

Dalam konteks pariwisata, Kota Yogyakarta memiliki potensi besar berkaita dengan pengembangan pariwisata berbasis kewilayahan yang belum sepenuhnya digali. Keberagaman budaya bersama dengan kreativitas masyarakatnya, menjadi aset penting yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi. Ketidaksiapan untuk memaksimalkan potensi kewilayahan ini salah satunya berkaitan dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata yang dimiliki. Kondisi tersebut menjadi penghambat dalam mengembangkan pariwisata berbasis kewilayahan secara berkelanjutan dan inklusif. Pengelolaan pada hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih terkoordinasi untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas dan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kota Yogyakarta juga memiliki potensi besar sebagai pusat kegiatan festival dan *event*, baik pada skala lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Keberagaman budaya dan kreativitas masyarakat Yogyakarta memberikan ruang bagi penyelenggaraan berbagai jenis acara yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi. Festival seni dan budaya yang diselenggarakan setiap tahun telah menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, sekaligus menciptakan kesempatan kerja dan memperkenalkan produk-produk ekonomi kreatif lokal.

Namun, tantangannya selama ini adalah kurangnya sinergi dan integrasi seluruh pihak yang terkait. Festival-festival yang selama ini terselenggara cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya didukung oleh ekosistem

yang kuat. Dalam konteks tersebut, tantangan ke depan adalah terkait dengan fasiltasi dalam mengembangkan ekosistem festival yang meliputi manajemen acara, pengelolaan sumber daya, serta promosi yang lebih efektif. Selain itu, kolaborasi antara sektor kreatif, pariwisata, dan pemerintahan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas festival sebagai alat untuk meningkatkan perekonomian kota.

Dengan memaksimalkan potensi ekonomi kreatif dan menjadikan Yogyakarta sebagai pusat kegiatan festival, Kota Yogyakarta dapat memperkuat posisi sebagai kota kreatif yang berdaya saing global, sambil memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sinergi antara sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan kebudayaan akan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial di Kota Yogyakarta.

2.3.3.3. Pengelolaan Layanan Infrastruktur Perkotaan Berkualitas untuk Mewujudkan Ruang Kota yang Berkelanjutan

Pengelolaan layanan infrastruktur perkotaan berkualitas di Kota Yogyakarta menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung keberlanjutan kota yang inklusif dan berdaya saing. Infrastruktur yang baik tidak hanya memperlancar aksesibilitas, tetapi juga harus mampu menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keberlanjutan sosial di tengah pesatnya perkembangan kota. Dengan keterbatasan ruang yang dimiliki Yogyakarta, serta peran pentingnya sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata, pengelolaan infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar berbagai wilayah dan tingkatan pemerintahan.

Seiring dengan pembangunan jalan tol Jogja-Solo, Jogja-Bawen, dan Jogja-YIA, konektivitas antar wilayah akan meningkat pesat, yang berpotensi mempercepat pergerakan barang, wisatawan, dan tenaga kerja. Peningkatan aksesibilitas ini dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi, namun di sisi lain, semakin terbukanya akses menuju Yogyakarta membawa tantangan besar terkait dengan kemacetan dan peningkatan

volume kendaraan, terutama di kawasan pusat-pusat daya tarik wisata. Kemacetan lalu lintas ini dapat menurunkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat, serta mendegradasi lingkungan kota secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan transportasi publik yang efisien dan penataan sirkulasi lalu lintas menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang semakin meningkatkan kepadatan.

Kota Yogyakarta memiliki karakter ruang yang khas, sebagai kota bersejarah dengan dominasi kawasan cagar budaya yang sangat penting untuk keberlanjutan kota. Lebih dari 45% dari wilayah Kota Yogyakarta merupakan kawasan yang terkait dengan cagar budaya dan pelestarian lingkungan. Pengelolaan ruang yang berkelanjutan harus memperhatikan kapasitas daya dukung kawasan-kawasan tersebut, agar pembangunan infrastruktur tidak justru merusak nilai sejarah dan budaya yang menjadi karakteristik Kota Yogyakarta. Hal ini semakin penting mengingat penetapan sumbu filosofi sebagai *World Heritage* oleh UNESCO pada tahun 2023 yang menuntut pembangunan perkotaan secara lebih terukur dan hati-hati.

Dalam konteks pelaksanaannya, sinergi lintas tingkatan dan lintas wilayah menjadi sangat penting. Misalnya, pengelolaan transportasi publik, yang kewenangannya berada di tingkat provinsi, jelas memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah kota, provinsi, dan kabupaten yang masuk dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur di Kota Yogyakarta tidak bisa dipandang secara terpisah dari wilayah sekitarnya, karena aktivitas ekonomi, sosial, dan pariwisata di Kota Yogyakarta berpengaruh langsung terhadap wilayah kabupaten lain di sekitarnya.

Selain itu, secara spesifik, pengelolaan sampah dan limbah menjadi bagian tak terpisahkan dari pengelolaan infrastruktur yang berkelanjutan. Timbulan sampah yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tidak sebanding dengan kapasitas pengolahan yang ada, berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan sampah yang lebih baik, terutama dalam pemilahan sampah 3R dan peningkatan kapasitas pengolahan, harus

menjadi prioritas agar Kota Yogyakarta tetap terjaga kebersihannya, terutama di kawasan-kawasan wisata utama yang menjadi daya tarik wisatawan. Pengelolaan air tanah juga memerlukan perhatian serius, karena penurunan kualitas air tanah akan mempengaruhi ketersediaan air bersih untuk masyarakat.

Secara keseluruhan, pengelolaan layanan infrastruktur perkotaan berkualitas di Kota Yogyakarta tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekologis, pelestarian budaya, dan keberlanjutan sosial. Pengelolaan transportasi, penataan ruang, dan pembangunan infrastruktur yang melibatkan sinergi lintas wilayah akan menciptakan ruang kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat posisi Yogyakarta sebagai kota yang berdaya saing global dan tetap menjaga karakter budaya serta sejarah yang dimilikinya.

2.3.3.4. Tantangan Peningkatan Kualitas Layanan Publik untuk Mewujudkan *Good Government Governance*

Mewujudkan *good government governance* di Kota Yogyakarta menjadi tantangan utama dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berintegritas. Kota Yogyakarta, sebagai pusat pelayanan pada skala regional bahkan nasional, berperan sebagai kota yang menghubungkan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pariwisata, hingga ekonomi. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi hal yang sangat penting.

Penerapan prinsip *good government governance* harus dapat diterjemahkan dalam pengelolaan keuangan daerah, manajemen sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil menjadi sangat penting dalam menjaga akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi yang bisa merusak kepercayaan masyarakat.

Begitu pula, penguatan literasi digital dan kapasitas manajerial aparatur pemerintah perlu menjadi perhatian, agar setiap kebijakan yang dijalankan dapat mengatasi tantangan yang ada dengan lebih efektif.

Salah satu tantangan yang signifikan adalah terkait dengan digitalisasi pelayanan publik. Digitalisasi merupakan elemen kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Meskipun beberapa langkah telah dilakukan untuk menerapkan teknologi digital, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaannya menjadi belum optimal. Selain itu, keterbatasan literasi digital di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat juga menjadi hambatan yang mengurangi potensi besar dari digitalisasi layanan publik tersebut.

Tantangan lainnya adalah terkait dengan penegakan hukum yang lebih baik. Kota Yogyakarta, sebagai kota dengan mobilitas tinggi, baik dari wisatawan maupun penduduk lokal, memerlukan sistem penegakan hukum yang efektif untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondisi kondusif yang mendukung kualitas pelayanan publik. Gangguan terhadap ketertiban umum seperti penggunaan ruang secara ilegal, parkir liar, maupun gangguan keamanan lainnya, jika tidak ditangani dengan baik, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, tantangan dalam mewujudkan *good government governance* di Kota Yogyakarta terletak pada kemampuan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan, mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan digitalisasi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien dan responsif. Di samping itu, penguatan penegakan hukum yang solid akan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapainya. Dengan langkah-langkah ini, Kota Yogyakarta dapat menjadi kota yang lebih modern, transparan, dan berintegritas, yang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat serta memperkuat daya saing di tingkat nasional dan bahkan tingkat global.

BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi

Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 merupakan pernyataan tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan selama periode kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah lima tahun ke depan. Visi ini menjadi arah utama bagi seluruh proses pembangunan, mencerminkan cita-cita kolektif masyarakat, sekaligus menjadi kompas strategis dalam merespons tantangan dan dinamika pembangunan daerah.

Sebagai pemandu arah kebijakan, Visi pembangunan daerah digunakan untuk menjawab isu-isu strategis jangka menengah secara adaptif dan transformatif. Di saat yang sama, Visi pembangunan daerah juga selaras dengan arah pembangunan jangka panjang agar terbangun kesinambungan antar periode pembangunan.

Dalam perumusannya, Visi pembangunan Kota Yogyakarta 2025-2029 mempertimbangkan Visi pembangunan pada berbagai dokumen perencanaan dengan hierarki lebih tinggi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah, meliputi:

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Visi pembangunan nasional 2025-2029:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY 2022-2027

Visi pembangunan DIY 2022-2027

"Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi"

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta 2025-2045:

"Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan"

Gambar III.1 Visi Pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan yang Relevan

Berdasarkan kondisi, tantangan, dan isu-isu strategis yang dihadapi Kota Yogyakarta serta mempertimbangkan keselarasan terhadap Visi pembangunan pada berbagai dokumen perencanaan di atas, dirumuskanlah Visi Pembangunan Kota Yogyakarta 2025-2029 sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat

Visi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 mencakup tiga kata kunci sebagai cerminan cita-cita, harapan, dan amanat Masyarakat Kota Yogyakarta terhadap pembangunan Kota Yogyakarta 2025-2029, yaitu "Adil Makmur", "Lestari" dan "Berkeadaban". Visi tersebut menjadi pemandu gerak bersama antara pemerintahan dengan masyarakat dan seluruh komponen pembangunan dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang maju dan berkembang, tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya, etika, maupun moral sebagai identitas khas kota yang berlandaskan kearifan lokal serta semangat kebersamaan.

Pembangunan Kota Yogyakarta 2025–2029 diarahkan sebagai sebuah gerakan bersama yang menjiwai pembangunan sehingga pembangunan Kota Yogyakarta menjadi lebih bernyawa. Sebagaimana makna gerakan yang berarti adanya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, maka hal tersebut dimakani serupa dengan gerakan bersama dalam pembangunan Kota Yogyakarta dari kondisi awal menuju kondisi baru sebagai perubahan nyata yang menunjukkan kondisi lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Gerakan kolektif tersebut dilakukan secara terpadu dan terarah di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menuju Visi "*Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".*

Dalam implementasinya, gerakan kolektif dalam pembangunan Kota Yogyakarta menyaratkan adanya konvergensi, yakni penyelarasan arah, komitmen, serta sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan menuju satu tujuan bersama. Konvergensi ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pembangunan yang kondusif, partisipatif, dan terarah. Seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan merupakan aktor utama yang akan bergerak bersama dalam mendorong terwujudnya Visi pembangunan Kota Yogyakarta. Dalam konteks ini, hal pertama yang paling krusial adalah tersampaikannya informasi yang utuh, tepat, dan terbuka kepada seluruh pelaku pembangunan sehingga setiap pihak memahami arah, semangat, serta peran mereka dalam gerakan bersama untuk mengakselerasi pencapaian Visi *"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".*

Sebagai pemaknannya, visi *"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban"* mencerminkan komitmen penuh untuk menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga memiliki keseimbangan dalam aspek keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan, dengan nilai-nilai budaya dan moral yang kuat.

Visi *"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban"* juga menegaskan pentingnya pertumbuhan yang inklusif, di mana setiap warga masyarakat Kota Yogyakarta, tanpa terkecuali, memiliki akses yang adil

terhadap peluang ekonomi. Kesejahteraan masyarakat juga menjadi pilar utama sehingga penyediaan layanan dasar yang berkualitas dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, keadilan sosial dimaknai tidak hanya dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, mendorong inklusivitas, serta memastikan bahwa pembangunan yang terjadi berdampak positif bagi seluruh warga masyarakat Kota Yogyakarta.

Selain itu, visi *"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban"* menekankan pembangunan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Artinya, Kota Yogyakarta harus mampu terus bertumbuh tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan, sehingga tetap menjadi ruang kota yang aman, nyaman, produktif, inklusif, inovatif, berkelanjutan serta mendukung nilai-nilai keistimewaan, sebagaimana menjadi tujuan dalam penataan ruang.

Lebih dari itu, visi *"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban"* juga menggarisbawahi pentingnya pelestarian budaya dan penguatan moral sebagai fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai kota dengan warisan budaya yang kaya, Kota Yogyakarta harus mempertahankan identitasnya melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal, perlindungan terhadap cagar budaya, serta pembangunan berlandaskan sejarah dan tradisi.

Melalaui pendekatan yang menyeluruh ini, Kota Yogyakarta tidak hanya akan berkembang secara fisik dan ekonomi, tetapi juga akan tetap menjadi kota yang berhati nyaman, tempat di mana kesejahteraan, keadilan, serta harmoni sosial budaya dan lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Pada aspek keselarasan dengan pembangunan jangka panjang, Visi *"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban"* sebagai visi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan visi pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta 2025-2045, yaitu *"Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan*

Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan". Penjabaran makna dan keterkaitan Visi pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kata kunci "*Adil Makmur*" dalam visi RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pemaknaannya, yang memiliki korelasi dengan konsep *Maju* dalam visi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. *Adil Makmur* menekankan bahwa kesejahteraan hanya dapat dicapai melalui pembangunan yang berkeadilan, di mana pemerataan akses terhadap layanan publik, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan peningkatan kualitas hidup menjadi elemen yang saling mendukung. Konsep ini menegaskan bahwa keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi tidak dapat dipisahkan, melainkan harus berjalan beriringan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Selaras dengan konsep *Maju* dalam RPJPD, pembangunan Kota Yogyakarta diarahkan pada transformasi untuk menjadi pusat ekonomi kreatif, jasa, dan pariwisata berbasis budaya berskala global, dengan tujuan utama menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.
2. Kata kunci "Lestari" dalam visi RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 memiliki hubungan langsung dengan konsep "Berkelanjutan" dalam RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. Pembangunan yang lestari mengacu pada upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan dan budaya. Dalam RPJPD, "Berkelanjutan" dimaknai sebagai penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana perwujudan kota yang unggul dan maju harus didukung dengan infrastruktur yang ramah lingkungan serta tata kelola pembangunan yang baik.
3. Kata kunci "Berkeadaban" dalam visi RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 selaras dengan konsep "Unggul" dalam RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. Kota yang berkeadaban menekankan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam

RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045, "Unggul" mencerminkan keunggulan kompetitif, komparatif, dan kolaboratif dalam sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Oleh karena itu, pembangunan yang berkeadaban tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pembangunan tetap berakar pada nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta.

4. Konteks "budaya dan nilai-nilai keistimewaan" yang menjadi landasan utama dalam visi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 juga merupakan konsep yang melandasi seluruh aspek dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029. Pembangunan di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan berbasis pada landasan kebudayaan dan keistimewaan, yang menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan harus selaras dengan filosofi keistimewaan dan adat istiadat khas Yogyakarta. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknokratik, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam memastikan bahwa pembangunan tetap mempertahankan identitas Kota Yogyakarta sebagai kota budaya, pendidikan, dan pariwisata yang istimewa.

Sesuai dengan makna visi *"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban"*, terdapat tiga fokus orientasi pembangunan yang perlu diwujudkan melalui gerakan pembangunan yang nyata dan kontekstual di Kota Yogyakarta. Pertama, fokus orientasi pada pembangunan manusia, yang mencakup penguatan sumber daya manusia yang unggul, ketahanan keluarga, serta pembentukan masyarakat madani sebagai fondasi sosial yang kokoh. Kedua, fokus orientasi pada pembangunan infrastruktur, yang diarahkan pada pengembangan kawasan berbasis Satuan Ruang Strategis (SRS) di luar Sumbu Filosofi sebagai lokus pertumbuhan kawasan, sekaligus memperkuat citra Kota Yogyakarta sebagai *City of Festivals*. Ketiga, fokus orientasi pada pembangunan lingkungan, yang meliputi aspek fisik maupun non-fisik sehingga tercipta kondisi lingkungan yang bersih, indah, aman dari bencana, serta mendukung kehidupan masyarakat yang nyaman dan

sejahtera. Seluruh arah pembangunan tersebut berpuncak pada tujuan besar untuk menjadikan Kota Yogyakarta sebagai *Center of Excellence* (pusat keunggulan) sekaligus *Center of Referral* (pusat acuan) dalam rangka memperkuat keunggulan komparatif Kota Yogyakarta.

3.2. **Misi**

Misi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah, yang berfungsi sebagai panduan operasional dalam mengarahkan kebijakan pembangunan. Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 dirumuskan melalui proses yang sistematis, dengan mempertimbangkan keselarasan antara perencanaan jangka panjang dan janji politik kepala daerah terpilih.

Secara teknis, perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 dilakukan dengan menyinergikan misi pembangunan jangka panjang daerah yang tertuang dalam RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 dengan misi kepala daerah yang terpilih. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun tetap berorientasi pada kesinambungan pembangunan, relevan dengan kondisi daerah, serta mampu merespons dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang.

Selain itu, perumusan misi juga memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek-menengah, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang sistematis ini, RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan kesinambungan pembangunan, serta memastikan pencapaian target pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 telah menetapkan empat Misi pembangunan sebagai penjabaran Visi, yaitu:

1. Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial

2. Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Kesinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Dukungan Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Di sisi lain, Wali Kota terpilih telah merumuskan enam Misi pembangunan yang termuat dalam dokumen resmi pendaftaran di KPUD sebagai janji politik bagi masyarakat, meliputi:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat dan pelestarian lingkungan hidup
3. Mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat kapasitas ekonomi rakyat yang inklusif dan kreatif
4. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal
5. Menjalankan tata pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan menjunjung tinggi hukum serta hak-hak rakyat
6. Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY

Dengan melakukan analisis keterkaitan muatan antara misi Wali Kota terpilih dengan muatan RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045, maka dapat ditarik konteks keterkaitan seperti dalam skema berikut:

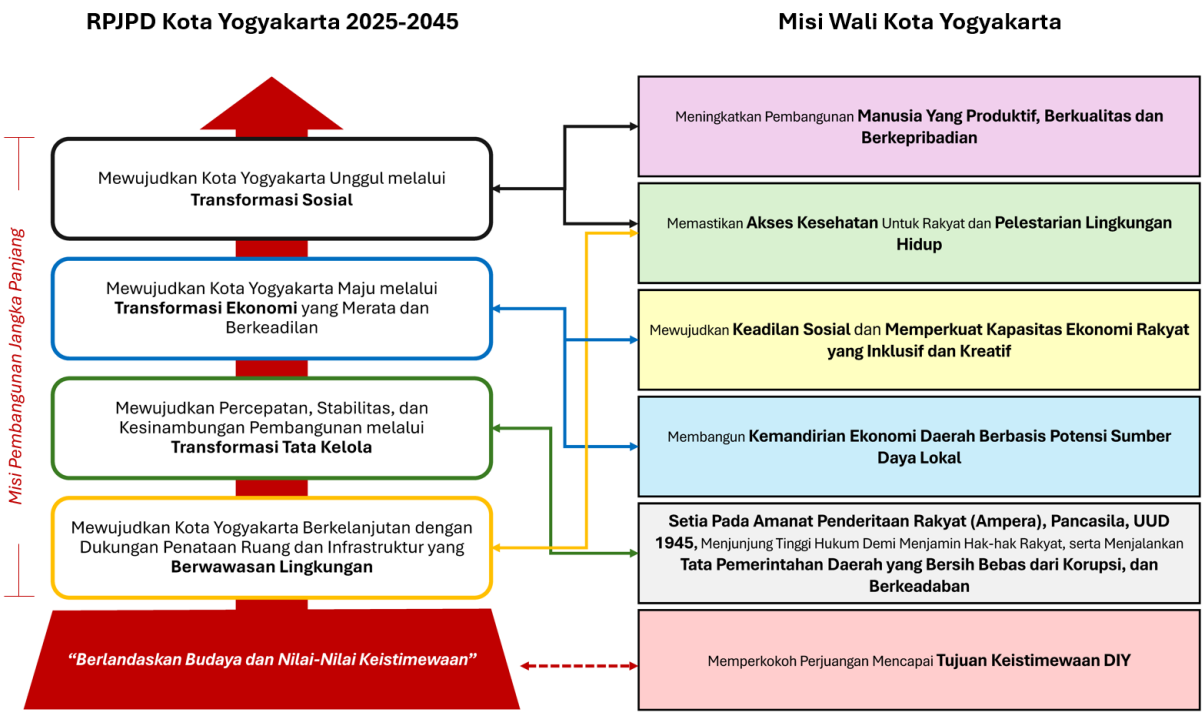

Gambar III.2 Keterkaitan Misi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 dengan Misi Wali Kota

Dengan mempertimbangkan aspek relevansi serta integrasi antara Misi RPJPD 2025-2045 dengan Misi Wali Kota terpilih, maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 dirumuskan lebih lanjut dengan mengacu pada hasil elaborasi berikut:

- Misi 1 dan Misi 2 Wali Kota Terpilih yang selaras dengan Misi 1 RPJPD (Transformasi Sosial) digabung menjadi satu Misi Pembangunan
- Misi 2 Wali Kota Terpilih yang selaras dengan Misi 4 RPJPD (Infrastruktur dan Lingkungan) menjadi satu Misi Pembangunan
- Misi 3 dan Misi 4 Wali Kota Terpilih yang selaras dengan Misi 2 RPJPD (Transformasi Ekonomi) digabung menjadi satu Misi Pembangunan
- Misi 5 Wali Kota Terpilih yang selaras dengan Misi 3 RPJPD (Transformasi Tata Kelola) menjadi satu Misi Pembangunan
- Misi 6 Wali Kota Terpilih selaras dengan konteks landasan pembangunan dalam RPJPD (Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan) menjadi satu Misi Pembangunan

Hasil elaborasi sebagaimana dijelaskan di atas menjadi rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 yang terdiri dari lima Misi, meliputi:

Gambar III.3 Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025-2029

3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029. Tahap ini akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan

tujuan dan sasaran bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan *ultimate outcome* yang tidak menurunkan indikator kinerja lebih lanjut.

Tujuan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pernyataan mengenai langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai visi dan menjalankan misi, serta mengatasi isu-isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh daerah. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada analisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah, serta dirancang untuk dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun.

Perumusan tujuan berperan sebagai dasar dalam merancang strategi pembangunan dan mencerminkan dampak keberhasilan yang ingin dicapai melalui berbagai program prioritas. Tujuan ini dapat mencakup berbagai fokus pembangunan, seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur, peningkatan produktivitas, daya saing sumber daya manusia (SDM), lingkungan sosial dan budaya, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang dirumuskan secara spesifik, terukur, relevan, dan realistis dalam rentang waktu lima tahun ke depan. Sasaran ini diturunkan dari tujuan dan merupakan indikator kinerja yang menunjukkan pencapaian tujuan tersebut.

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu periode 2025-2029 seperti dalam tabel berikut.

Tabel -1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kerja RPJMD Kota Yogyakarta

Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Visi: "Terwujudnya **Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"**				
Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian, melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan	Terwujudnya manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah
				Harapan Lama Sekolah
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup
Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan tahan terhadap bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan (IIP)
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
				Indeks Risiko Bencana (IRB)
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial, melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif dan Berbudaya Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan	Pengeluaran Riil Per Kapita	Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal	Pertumbuhan Ekonomi
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Indeks Gini	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat (IKM)
			Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan

Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945	Terwujudnya tata pemerintahan dan tatanan sosial yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Nilai AKIP
				Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY			Terciptanya tatanan sosial masyarakat yang stabil, aman dan tertib	Indeks Harmoni
				Crime Rate

3.4. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban" memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sebagai dasar acuan pengelolaan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Strategi pembangunan menjadi bagian dari proses mengelola setiap program kegiatan pembangunan melalui rumusan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Strategi pembangunan dijabarkan dalam tahapan pembangunan, lokus pembangunan prioritas, arah kebijakan serta program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

3.4.1. Penahapan Pembangunan

Sebagai bagian dari siklus perencanaan, RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 merupakan tahap pertama dalam implementasi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 memiliki peran strategis sebagai tahapan awal dalam periodisasi pembangunan jangka panjang 2025-2045. Periode ini difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya.

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta 2025-2045 terbagi ke dalam empat tahapan periode pembangunan yang mencerminkan strategi bertahap dalam mencapai visi pembangunan daerah seperti dalam skema berikut:

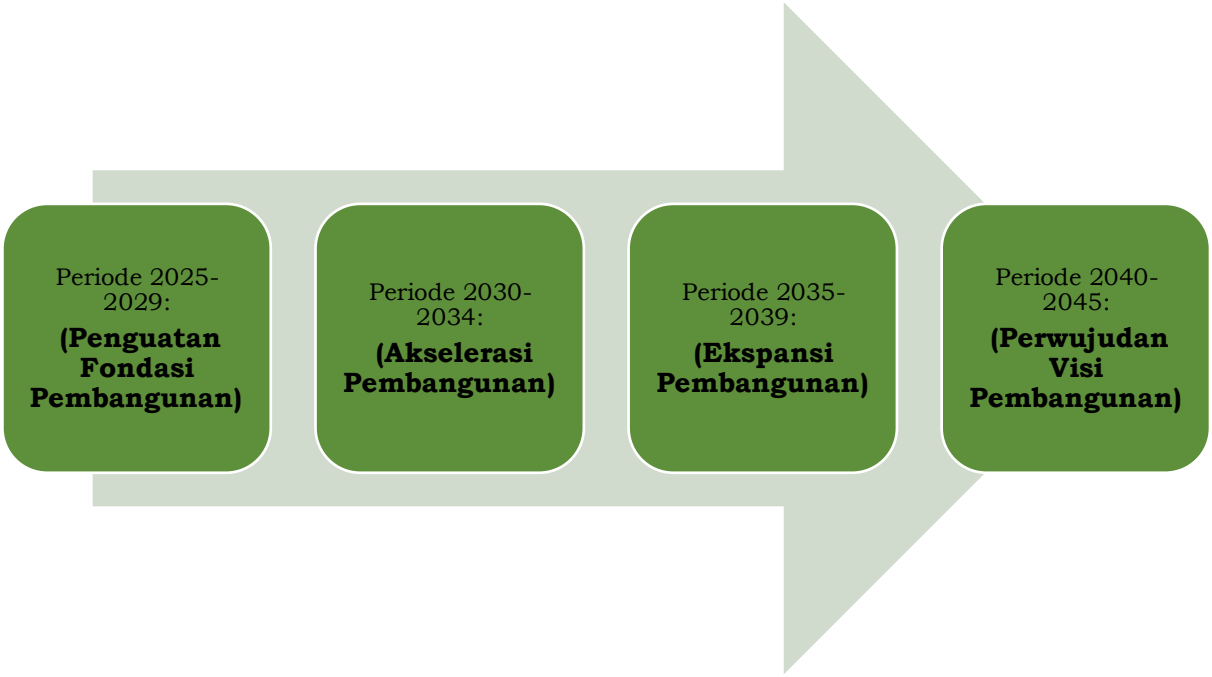

Gambar III.4 Tahapan Periode Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta 2025-2034

Sumber: RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045

RPJMD 2025-2029 menjadi dokumen perencanaan strategis yang menghubungkan visi pembangunan jangka panjang dengan kondisi kewilayahan serta janji politik kepala daerah terpilih. Proses perumusannya tidak hanya berlandaskan pada analisis teknokratik dan kebijakan strategis nasional, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, potensi lokal, serta dinamika sosial-ekonomi daerah.

Dalam penjabarannya, arah kebijakan prioritas sebagai tema pembangunan pada periode 2025-2029 juga telah ditetapkan sebagai upaya keselarasan dengan pembangunan jangka panjang sesuai dengan rumusan Misi pembangunan yang berfokus pada Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola dan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan.

Tabel -2 Arah Kebijakan Prioritas pada Periode I berdasarkan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi Pembangunan Jangka Panjang	Misi Pembangunan Jangka Panjang	Arah Kebijakan Prioritas sebagai Tema Pembangunan 2025-2029 (Perkuatan Fondasi Pembangunan)
Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan	Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
	Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan	Penguatan potensi daerah pada sektor ekonomi produktif
	Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Kesinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, dan digitalisasi pelayanan publik
	Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Penataan Ruang dan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Pemerataan layanan infrastruktur perkotaan berdasarkan arahan rencana tata ruang

Sumber: RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045

RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan visi besar pembangunan Kota Yogyakarta selama dua dekade mendatang. Sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 tidak hanya menggambarkan langkah konkret dalam pencapaian tujuan jangka panjang, tetapi juga menjadi fondasi yang akan memastikan kelancaran transisi menuju fase-fase berikutnya, yang mencakup akselerasi, ekspansi, dan pencapaian visi

pembangunan. Keberhasilan tahap awal ini akan memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Tahapan pembangunan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 mencerminkan kerangka waktu yang disusun untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta. Penahapan ini dirancang dengan pendekatan tematik yang mencerminkan strategi pemerintah kota dalam mencapai target pembangunan. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus tematik tertentu, yang menggambarkan langkah-langkah strategis sekaligus sebagai tema pembangunan. Meskipun penekanan diberikan pada tema besar pembangunan di setiap tahapan, penting untuk dipahami bahwa seluruh sektor pembangunan akan terus berperan aktif dan berkembang secara sinergis, untuk memastikan bahwa setiap tema pembangunan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tidak bertumpu pada satu sektor tertentu.

Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui penentuan fokus prioritas tematik setiap tahunnya, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan. Dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor, tahapan pertama hingga kelima akan saling mendukung dalam membentuk proses pembangunan yang holistik dan terkoordinasi. Pada akhir periode 2029, Kota Yogyakarta diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan yang telah ditetapkan dan siap untuk melanjutkan fase-fase pembangunan berikutnya.

Sebagai bagian dari rencana pembangunan yang berkelanjutan, tahapan pembangunan ini juga akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, serta penetapan indikator keberhasilan untuk masing-masing sektor. Penekanan pada fokus tematik dirancang untuk memastikan bahwa setiap sektor akan berkembang secara seimbang dan

dinamis, dengan prioritas yang disesuaikan dengan tantangan dan potensi yang ada pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, pada akhir periode pembangunan ini, diharapkan dapat tercapai secara utuh visi pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban", yang menjadi pedoman dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil dalam proses pembangunan daerah.

Sesuai dengan penjabaran konsep penahapan pembangunan tersebut, maka tahapan pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 terbagi ke dalam lima tahapan, meliputi: (i) Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan; (ii) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik; (iii) Akselerasi Pembangunan Prioritas; (iv) Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan; dan (v) Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan.

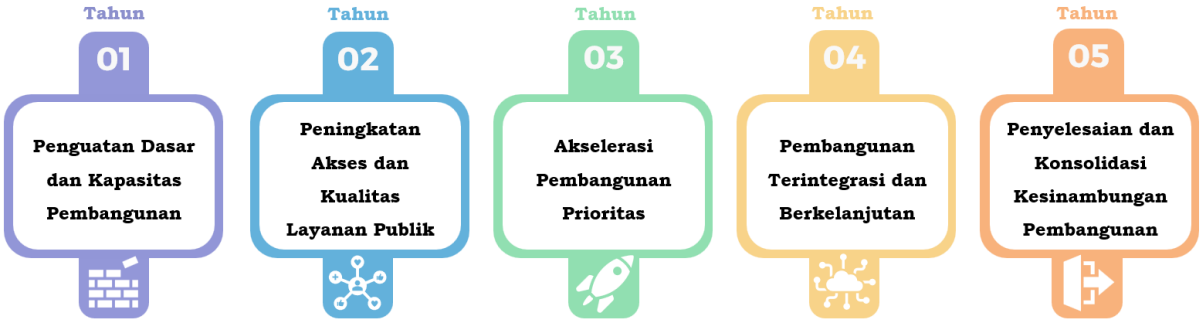

Gambar III.5 Penahapan Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025-2029

Penjelasan terkait penekanan pembangunan pada setiap tahapan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan

Tahap pertama dalam pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 fokus pada penyiapan dasar atau fondasi pembangunan, termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya pembangunan, mencakup SDM, infrastruktur, teknologi, pendanaan, maupun kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik serta suprastruktur yang bersifat non-fisik menjadi dua hal yang sangat penting untuk dibangun secara paralel dan terintegrasi

sehingga memiliki dasar pembangunan yang kokoh. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh komponen pembangunan dapat saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Melalui penyiapan kerangka kebijakan yang jelas serta tata kelola yang baik, pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, tahapan pertama ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian visi "**Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".**

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik

Tahap kedua merupakan tahapan lanjut dari tema pembangunan tahap pertama, dengan dasar-dasar pembangunan, seperti dukungan kebijakan serta kapasitas sumber daya dan kelembagaan telah. Fokus utama dari tahap ini adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada menciptakan layanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Perluasan akses layanan publik ini tidak dimaknai sempit terbatas pada aspek jangkauan layanan secara geografis, tetapi lebih pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kota Yogyakarta dapat dengan mudah mengakses layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik akan menjadi kunci utama sehingga dapat mempercepat proses, memangkas birokrasi, serta meningkatkan efisiensi maupun transparansi. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat Kota Yogyakarta akan semakin mudah mengakses layanan publik yang di waktu bersamaan juga terus dilakukan peningkatan kualitasnya, mencakup layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan sosial lainnya, sehingga sistem layanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan merata.

3. Akselerasi Pembangunan Prioritas

Tahap ketiga merupakan fase kunci dalam upaya memastikan terwujudnya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta di akhir tahun perencanaan. Pada tahap ini, fokus utama yang dilakukan adalah mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan, khususnya terhadap program yang belum mencapai hasil optimal selama periode pembangunan yang telah berjalan. Sebagai periode tengah waktu, tahap ini menjadi tahap krusial karena sudah terlihat proyeksi keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu secara menyeluruh sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Pelaksanaan serta capaian pembangunan yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan sesuai target yang telah ditetapkan akan terus dilaksanakan dengan fokus pada pencapaian yang lebih mendalam. Namun, terhadap pelaksanaan maupun capaian pembangunan yang teridentifikasi berjalan lambat atau tidak sesuai target, dilakukan akselerasi untuk memastikan bahwa target pembangunan tersebut dapat kembali di jalur yang tepat sehingga akan tercapai sesuai target di akhir tahun perencanaan. Upaya akselerasi ini sekaligus merupakan upaya mitigasi yang sangat penting untuk menghindari risiko tidak tercapainya target pembangunan sebagai bagian dari proses mewujudkan visi "**Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban**".

4. Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Tahap keempat berfokus pada pencapaian pembangunan terintegrasi, yang merupakan hasil dari fondasi yang kuat yang telah dibangun pada tahap pertama, peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas pada tahap kedua, serta akselerasi pelaksanaan program-program pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahap ketiga. Pada tahap ini, integrasi pembangunan menekankan pada pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai faktor kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak

hanya efisien tetapi juga bersifat inklusif, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Integrasi ini juga mencakup peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tahap keempat ini sekaligus menjadi tahapan yang memastikan bahwa pembangunan yang telah dicapai dapat terkoordinasi dengan baik, memberikan dampak yang lebih luas dan merata, serta dapat diteruskan melalui sistem yang efisien dan berkelanjutan, yang mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

Tahap kelima berfokus pada penyelesaian seluruh program pembangunan, memastikan target pembangunan tercapai sebagai indikator keberhasilan terwujudnya visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban". Tahap ini juga menjadi fase transisi menuju tahapan lanjut dalam kerangka pembangunan jangka panjang (Periode 2030-2034), yang menekankan pada tema “Akselerasi Pembangunan” guna mencapai target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tahap kelima ini juga menjadi tahap yang berfokus pada proses konsolidasi kesinambungan pembangunan. Artinya, pembangunan di Kota Yogyakarta dipandang sebagai pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap mendasarkan pada pelaksanaan maupun capaian pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan konsolidasi yang kuat, hasil-hasil yang telah dicapai akan diperkuat dan dipertahankan, menciptakan dasar yang kokoh untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta menuju “**Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan**".

3.4.2. Lokus Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

Pada periode 2025–2029, Kota Yogyakarta difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. Pembangunan wilayah Kota Yogyakarta pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pembentukan manusia yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, perwujudan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

3.4.2.1. Orientasi Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang

Arah pembangunan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 ditetapkan selaras dengan orientasi pembangunan kewilayahan yang tertuang dalam rencana tata ruang (RTRW dan RDTR) Kota Yogyakarta. Secara teknis, hal tersebut tertuang melalui penguatan struktur ruang, penataan pola ruang, serta pengembangan kawasan strategis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang merupakan susunan permukiman dan prasarana pendukung aktivitas masyarakat. Penataan wilayah Kota Yogyakarta 2021–2041 bertujuan mengakomodasi fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pengembangan kota sesuai kebijakan Provinsi dan Kota. Struktur ruang memberikan arah fisik bagi pengembangan kota yang terencana dan berkelanjutan, serta memastikan keterpaduan antara pemanfaatan ruang dengan prioritas pembangunan wilayah.

Rencana pengembangan struktur ruang perkotaan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan sistem perkotaan di Kota menggunakan hierarki tingkat pelayanan. Pusat pelayanan terdiri dari beberapa fungsi yaitu (i) pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang berada di Kawasan Malioboro dan Kawasan Jalan Solo, (ii) pusat pelayanan kegiatan budaya di Kawasan Kraton dan Kawasan Pakualaman, dan (iii) pusat pelayanan administrasi di Kawasan Balaikota, Kawasan Kantor Kecamatan, dan Kawasan Kantor Kelurahan.

b) Sebagai antisipasi terhadap potensi perubahan orientasi Kota Yogyakarta setelah pembangunan YIA, diarahkan pembentukan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta Barat sebagai kawasan prioritas pembangunan bersama dengan Kawasan Yogyakarta Selatan.

c) Upaya meningkatkan aksesibilitas dan mendukung Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta Barat, dilakukan perubahan fungsi jalan pada beberapa ruas, termasuk Jalan Bantul, Jalan Imogiri, sebagian ruas Jalan Pramuka, dan sebagian ruas Jalan Gambiran menjadi Jalan Arteri Sekunder. Jalan Letjen. MT. Haryono, Jalan Mayjend. Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Menteri Supeno, dan Jalan Perintis Kemerdekaan diturunkan fungsinya menjadi Jalan Kolektor kota.

2. Rencana Pola Ruang

Sejalan dengan pengembangan struktur ruang, penataan pola ruang juga memegang peranan penting dalam mendukung arah pembangunan Kota Yogyakarta. Pola ruang mencerminkan distribusi pemanfaatan ruang dalam wilayah kota, mencakup fungsi lindung dan fungsi budidaya, yang disusun untuk mewujudkan kota yang layak huni dan selaras dengan fungsi strategis yang dimilikinya.

a. Kawasan Lindung

a. Kawasan perlindungan setempat diarahkan pada pengembangan kawasan sempadan Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajahwong.

b. Ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta berupa taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, dan pemakaman di seluruh Kota Yogyakarta.

c. Kawasan Cagar Budaya (KCB) di Kota Yogyakarta yang meliputi KCB Kotabaru, KCB Kotagede, KCB Kraton, dan KCB Pakualaman.

b. Kawasan Budidaya

a. Kawasan Permukiman :

(a) Kawasan Perumahan, yang tersebar di seluruh wilayah kemantren.

(b) Kawasan Perdagangan dan Jasa, luas yang tersebar di sepanjang koridor jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder. Kawasan perdagangan dan jasa dilengkapi dengan penyediaan lokasi parkir dalam halaman atau gedung sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak mengganggu kelancaran sirkulasi pergerakan pada kawasan-kawasan strategis tersebut.

(c) Kawasan Perkantoran yang tersebar merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, terdiri dari:

(d) Kawasan pendidikan di Kemantren Jetis, Kemantren Tegalrejo, Kemantren Mergangsan, Kemantren Danurejan, Kemantren Wirobrajan, Kemantren Mantrijeron, Kemantren Kraton, Kemantren Gendongtengen, Kemantren Gondokusuman, Kemantren Ngampilan, dan Kemantren Umbulharjo. Pengembangan dilakukan secara tersebar berdasarkan tingkat lingkup skala pelayanannya.

(e) Kawasan kesehatan di Kemantren Gondokusuman, Kemantren Gondomanan, Kemantren Ngampilan, dan Kemantren Umbulharjo.

(f) Kawasan olahraga di Stadion Mandala Krida di Kemantren Umbulharjo, Gedung Olah Raga Amongrogo di Kemantren Umbulharjo, dan sarana olahraga lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

(g) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau yang meliputi tempat khusus parkir Ngabean di Kemantren Ngampilan dan tempat khusus parkir Gembira Loka di Kemantren Umbulharjo.

(h) Kawasan Transportasi yang terletak di Terminal Giwangan, Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, Stasiun penumpang yang tersebar di sepanjang jalur pengembangan angkutan massal berbasis rel, dan depo kereta api.

c. Kawasan Campuran, diperuntukkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran

perdagangan/jasa. Kawasan campuran Kota Yogyakarta yang tersebar di Kemantren Danurejan, Kemantren Gondokusuman, dan Kemantren Umbulharjo.

d. Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kota Yogyakarta yang tersebar di Kemantren Danurejan, Kemantren Gondokusuman; Kemantren Gondomanan; Kemantren Jetis; Kemantren Umbulharjo; dan Seluruh wilayah Kemantren di Kota Yogyakarta.

3. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis kota adalah area yang diprioritaskan karena memiliki peran penting bagi ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan Kota Yogyakarta. Dalam RTRW Kota Yogyakarta 2021–2041, kawasan strategis ditetapkan untuk membentuk citra kota, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara sejarah dan masa depan kota. Pada periode pembangunan ini, kawasan strategis juga dibagi menjadi tiga sudut pandang kepentingan, meliputi:

a) Kepentingan pertumbuhan ekonomi, mencakup pusat kota, kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan, dan pengembangan ekonomi terpadu, meliputi:
   a. Kawasan Simpul Transportasi di Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, dan Terminal Giwangan;
   b. Kawasan Ekonomi Yogyakarta Selatan yang terdiri dari Kawasan Prawirotaman, Kawasan Koridor Jalan Taman Siswa, Kawasan Koridor Jalan Glagahsari, Kawasan Koridor Tegal Turi-Sorogenen, serta Kawasan Koridor Jalan Imogiri; dan
   c. Kawasan Ekonomi Yogyakarta Barat yang terdiri dari Kawasan Koridor Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Bugisan, Kawasan Koridor Jalan Sugeng Jeroni, dan Kawasan Koridor Jalan Bantul.

b) Kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
   - KCB Kotabaru;
   - KCB Kotagede;
   - KCB Kraton; dan

- KCB Pakualaman

c) Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang difokuskan pada kawasan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, meliputi:

- Kawasan di Sepanjang Aliran Sungai Winongo;
- Kawasan di Sepanjang Aliran Sungai Code; dan
- Kawasan di Sepanjang Aliran Sungai Gajahwong.

3.4.2.2. **Lokus Pembangunan Prioritas**

Dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029, terdapat beberapa lokus prioritas pembangunan yang akan sebagai fokus kewilayahan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Lokus-lokus ini mencakup Kawasan Sumbu Filosofi, Pengembangan Kawasan Yogya Selatan, dan Penataan Kawasan Kumuh di Bantaran Sungai. Masing-masing lokasi memiliki karakteristik dan tantangan yang memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang terintegrasi, serta sinergi antara berbagai sektor.

Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing lokus prioritas tersebut:

a. Kawasan Sumbu Filosofi

Kawasan Sumbu Filosofi yang ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 2023, memiliki posisi strategis sebagai struktur ruang utama dan pusat Kota Yogyakarta. Penetapan kawasan ini sebagai warisan dunia membawa tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan budaya dan sejarah kota, serta mengatur perkembangan kawasan ini agar tetap selaras dengan prinsip pelestarian nilai-nilai warisan budaya.

Penetapan ini tentu saja mengandung beberapa konsekuensi besar yang harus diperhatikan, terutama terkait dengan sektor-sektor berikut:

Kebijakan dan Regulasi: Pengelolaan kawasan Sumbu Filosofi memerlukan penyesuaian regulasi yang lebih ketat, guna memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkandung dalam kawasan ini. Penetapan sebagai warisan dunia menuntut adanya standar pengelolaan yang lebih tinggi, baik terkait dengan zonasi maupun pembangunan infrastruktur yang ada di kawasan tersebut.

Dampak Sosial Penataan Sumbu Filosofi: Penataan kawasan Sumbu Filosofi akan berdampak pada pola hidup sosial masyarakat, terutama yang berada di kawasan inti dan penyangga. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan partisipasi masyarakat untuk mengurangi potensi konflik sosial akibat pembatasan ruang atau perubahan fungsi lahan yang mungkin terjadi sebagai bagian dari penataan kawasan ini.

Transportasi dan Lalu Lintas: Dengan status kawasan Sumbu Filosofi yang merupakan pusat kegiatan kota, peningkatan aksesibilitas dan penataan transportasi menjadi sangat penting. Kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di kawasan ini perlu dikelola dengan baik melalui pengembangan sistem transportasi umum yang lebih efisien, serta penyediaan jalan alternatif yang mendukung kelancaran mobilitas.

Penataan Infrastruktur: Penataan infrastruktur kawasan Sumbu Filosofi juga harus mendukung keberlanjutan kawasan tersebut sebagai pusat budaya dan pariwisata. Infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mengakomodasi kebutuhan modern masyarakat kota, seperti fasilitas perkantoran, tempat wisata, dan area publik.

b. Pengembangan Kawasan Yogya Selatan

Pengembangan Kawasan Yogya Selatan menjadi salah satu strategi penting dalam mengurangi disparitas pembangunan antara kawasan utara dan selatan Kota Yogyakarta. Pendekatan pengembangan kawasan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi pariwisata akan menjadi motor penggerak utama dalam pengembangan kawasan ini, dengan mengintegrasikan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi yang akan mendukung sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan kawasan ini adalah peningkatan kemudahan akses menuju pusat kegiatan wisata di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pembangunan jalur transportasi yang lebih baik dan terintegrasi menjadi sangat penting. Hal ini mencakup

peningkatan akses jalan serta peningkatan layanan transportasi publik yang menghubungkan berbagai titik pusat kegiatan di Kota Yogyakarta.

Penguatan daya tarik utama yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke kawasan Yogya Selatan sangat krusial. Oleh karena itu, pengembangan potensi lokal, meliputi Kawasan Kotagede, Taman Budaya Embung Giwangan (TBEG), XT *Square*, dan Gembira Loka Zoo akan menjadi fokus dalam meningkatkan kualitas kawasan ini. Kombinasi dari atraksi wisata sejarah, budaya, dan alam akan memperkaya pengalaman wisata di kawasan selatan Yogyakarta. Terminal Tipe A Giwangan sebagai tempat khusus parkir akan menjadi hub kawasan yang memudahkan aksesibilitas dari dan menuju berbagai pusat kegiatan wisata, serta mendukung pengembangan Kawasan Yogyakarta Selatan menjadi salah satu destinasi wisata utama di Kota Yogyakarta. Dengan kata lain, pengembangan ekosistem pariwisata yang mendukung kebutuhan pariwisata akan menjadi faktor penting dalam menarik lebih banyak pengunjung ke kawasan ini.

c. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai

Penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai menjadi salah satu isu pembangunan yang sangat penting dalam rangka menciptakan Kota Yogyakarta yang ramah lingkungan dan layak huni. Program ini akan mengedepankan prinsip M3K (*Mundur, Munggah, Madhep* Kali) yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di kawasan permukiman kumuh, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Penanganan kawasan permukiman kumuh dilakukan salah satunya melalui pemugaran dan peremajaan kawasan dengan menggunakan konsep konsolidasi lahan yang memungkinkan pengembangan kawasan menjadi lebih tertata dengan baik dan lebih nyaman untuk dihuni. Penataan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak.

Implementasi konsep konsolidasi lahan akan menjadi salah satu upaya strategis dalam penanganan kawasan kumuh. Melalui konsolidasi ini, tanah yang tidak teratur dan tidak tertata dengan baik akan dikelola menjadi kawasan yang lebih fungsional dan teratur, yang pada akhirnya dapat mendukung ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

3.4.3. **Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 selaras dengan arah kebijakan RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 yang telah dirumuskan untuk pelaksanaan periode pembangunan jangka panjang tahap 1. Rumusan arah kebijakan sebagai turunan dari Misi dan Aspek Strategi dalam pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel -3 Arah Kebijakan berdasarkan Misi Pembangunan Daerah

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	**Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan**	
	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Meningkatkan kualifikasi pendidik melalui pemenuhan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
		Meningkatkan partisipasi dan prestasi peserta didik
		Meningkatkan kualitas bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat miskin dan/atau bagi yang memiliki prestasi
		Mengembangkan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
		Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, inklusi, dan berkeadilan
		Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar dan aman bencana
		Mengembangkan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK
	Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan	Meningkatkan kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter
		Meningkatkan kualitas sarana prasarana olahraga
		Memperkuat ekosistem dan industri olahraga
	Peningkatan prestasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
		Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan literasi dan kegemaran membaca masyarakat	Meningkatkan penguatan literasi dan budaya gemar membaca
	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan status kesehatan masyarakat
		Meningkatkan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat dan siklus hidup termasuk aktivitas fisik/olahraga
		Mempercepat penurunan dan pencegahan *stunting* melalui peningkatan kualitas gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
		Memeratakan akses penjaminan dan pembiayaan kesehatan
		Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
		Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
		Meningkatkan kualitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai standar
		Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan
		Meningkatkan sertifikasi bidang kesehatan
		Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas
		Mengimplementasikan transformasi teknologi kesehatan
		Mengimplementasikan transformasi sistem ketahanan kesehatan
	Peningkatan mutu pelayanan RSUD Kota Yogyakarta	Meningkatkan mutu tata kelola administrasi dan keuangan RSUD Kota Yogyakarta
		Meningkatkan mutu pelayanan medis, pelayanan penunjang dan asuhan keperawatan RSUD Kota Yogyakarta

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan mutu pelayanan RS Pratama	Meningkatkan standar pelayanan minimal layanan penunjang dan kefarmasian di RS Pratama

2	**Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari**	
	Peningkatan kualitas prasarana umum wilayah	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kota
		Meningkatkan kualitas lampu penerangan jalan umum kota yang ramah lingkungan
		Meningkatkan sistem drainase kondisi baik
		Meningkatkan talud sungai dan saluran irigasi kondisi baik
		Meningkatkan bangunan gedung pemerintah dengan kondisi baik
		Meningkatkan pengendalian bangunan gedung melalui layanan penerbitan rekomendasi teknis persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF) tepat waktu
		Meningkatkan kapasitas jasa konstruksi
		Mempercepat pembangunan infrastruktur sanitasi perkotaan yang aman untuk mendukung kualitas hidup masyarakat
		Memperkuat inovasi dan kerja sama dalam percepatan penyediaan infrastruktur air minum
	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman	Mempercepat penanganan rumah tidak layak huni untuk mendukung lingkungan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan
		Mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh
		Meningkatkan kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik
		Meningkatkan penanganan *backlog* perumahan

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan tata kelola dan penyediaan infrastruktur pendukung kualitas air, udara dan tutupan lahan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
		Meningkatkan kesesuaian perencanaan pembangunan dan perencanaan lingkungan
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas ruang terbuka hijau
	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir menuju *zero solid waste city*	Meningkatkan kualitas dan kapasitas penanganan sampah
		Mempercepat pengurangan sampah berbasis masyarakat dan 3R *(Reduce, Reuse, Recycle)*
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah
		Meningkatkan peran dan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah *(extended producer responsibility)*
	Peningkatan kualitas penataan ruang	Meningkatkan pemenuhan kebijakan dan peraturan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta perubahan iklim
		Meningkatkan ketaatan terhadap kebijakan dan peraturan tata ruang
		Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang
	Peningkatan tata kelola, sistem, dan sarana prasarana transportasi yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas
		Meningkatkan sinergi dan kerja sama penyediaan angkutan umum yang berkualitas
		Meningkatkan tata kelola perparkiran
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi yang inklusif dan berkelanjutan
		Meningkatkan pencegahan terhadap risiko kebakaran
		Meningkatkan penanggulangan kebakaran

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan ketahanan daerah terhadap keselamatan dan risiko kebakaran	Meningkatkan penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia
		Meningkatkan layanan penunjang keselamatan dan risiko kebakaran
		Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan penegakan standar keandalan infrastruktur yang berketahanan bencana	Meningkatkan efektivitas mitigasi bencana
		Mengembangkan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana
		Meningkatkan kualitas penanganan bencana
		Meningkatkan kualitas sistem pemulihan bencana
		Meningkatkan kapasitas dan ketangguhan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana
3	**Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal**	
	Penguatan *branding* kota Yogyakarta sebagai *"City of Festivals"* serta pengembangan kebijakan dan fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan festival berskala besar *(mega event)*	Memperkuat dukungan kebijakan terhadap ekosistem industri kreatif
		Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung industri kreatif
		Membentuk ekosistem festival
		Mempercepat transformasi digital dengan pembangunan kapasitas penggunaan teknologi
	Penataan dan penguatan *quality tourism* sebagai fondasi	Peningkatan kontribusi masyarakat terhadap pariwisata melalui penguatan UMKM dan pariwisata berbasis wilayah

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	industri pariwisata berskala global	Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan kampung wisata dengan pendekatan terpadu, mencakup aspek perencanaan, kapasitas lokal, dan pengelolaan berkelanjutan
		Meningkatkan daya tarik destinasi wisata
		Meningkatkan kualitas pemasaran pariwisata
		Meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
	Penguatan kebudayaan pada kehidupan dalam mendukung perekonomian masyarakat	Meningkatkan pelindungan objek warisan budaya
		Meningkatkan kemandirian rintisan kelurahan budaya (RKB) dan sanggar/lembaga budaya
		Meningkatkan literasi masyarakat terhadap bahasa sastra dan sejarah
		Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan cagar budaya
		Meningkatkan pelayanan pemanfaatan taman budaya dan taman pintar
	Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Meningkatkan kualitas layanan BLUD pusat bisnis
		Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan
		Meningkatkan pengembangan pemasaran produk dalam negeri bagi pelaku usaha binaan
	Peningkatan perlindungan konsumen	Meningkatkan tertib niaga pelaku usaha sektor perdagangan
		Pengembangan sistem distribusi yang efisien dan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga
		Meningkatkan standardisasi metrologi legal
		Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan dampak inflasi daerah
		Menumbuhkan wirausaha baru

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan produktivitas sektor UMKM	Meningkatkan UMKM naik kelas
	Pemberdayaan koperasi Sebagai penggerak ekonomi Kerakyatan	Meningkatkan kapasitas dan kinerja koperasi yang berkelanjutan
	Peningkatan produktivitas sektor industri	Memperkuat dukungan kebijakan serta infrastruktur untuk implementasi praktik berkelanjutan dalam pembangunan industri
		Meningkatkan kualitas dan daya saing IKM
	Peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku perikanan	Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku pertanian
		Meningkatkan nilai produksi perikanan
		Mempercepat penurunan kasus penyakit hewan menular strategis
		Meningkatkan pendayagunaan aset pertanian, perikanan dan kesehatan hewan
	Peningkatan nilai investasi	Mengembangkan riset dan penyusunan rencana yang komprehensif untuk penyiapan kawasan strategis ekonomi bagi peningkatan investasi
		Meningkatkan investor baru
		Meningkatkan iklim penanaman modal
		Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal
		Meningkatkan pelayanan perizinan
		Meningkatkan pemanfaatan data dan sistem informasi penanaman modal dan perizinan
		Meningkatkan perencanaan tenaga kerja

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*	Mengembangkan lapangan kerja
		Meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi dan penempatan tenaga kerja
		Memperkuat perlindungan tenaga kerja bagi seluruh kelompok masyarakat
	Peningkatan keluarga yang berkualitas melalui implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Meningkatkan keberdayaan perempuan
		Meningkatkan pemenuhan hak anak
		Meningkatkan perlindungan khusus anak
		Mengendalikan kuantitas penduduk untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk pada berbagai segmen tingkat ekonomi serta lingkungan hidup berupa daya dukung maupun daya tampung lingkungan
		Meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender
	Peningkatan perkembangan pembangunan kemantren	Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kemantren
		Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban kemantren
		Meningkatkan sinergitas *stakeholder* penyelenggara pemerintahan tingkat kemantren
	Peningkatan kesejahteraan sosial	Mengimplementasikan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok marginal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu
		Meningkatkan pemberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan rehabilitasi sosial
		Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti
		Meningkatkan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial
		Meningkatkan akurasi data sasaran intervensi kemiskinan
		Meningkatkan kemampuan yang adaptif dan inklusif bagi kelompok marginal dan rentan
		Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap bencana dan paska bencana bagi korban bencana
		Meningkatkan penempatan transmigran
	Pemenuhan ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat dan peningkatan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan pangan
		Meningkatkan kemanfaatan pangan
		Meningkatkan mutu dan keamanan pangan
4	**Misi 4 : Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945**	
	Peningkatan kualitas kebijakan daerah	Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat, perekonomian, pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan administrasi umum
		Mempercepat penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Menata kelembagaan dan melakukan peningkatan kapasitas aparatur daerah sesuai kebutuhan daerah
		Perluasan kerja sama lintas wilayah dan sinergi lintas pemerintahan maupun dengan *stakeholder* lainnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan
		Meningkatkan kualitas layanan umum dan keprotokolan
		Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan
		Meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan
	Peningkatan kinerja pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan perangkat daerah
		Meningkatnya pemanfaatan data dan analisa dalam perencanaan pembangunan
		Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah
		Meningkatkan perencanaan strategis sektor perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia serta infrastruktur dan pengembangan wilayah
		Meningkatkan kemanfaatan riset dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah
		Meningkatkan kualitas inovasi daerah
	Peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah
		Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah
		Meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
		Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah (PDRD), peningkatan produktivitas BUMD dan penguatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah
	Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui pengembangan karier ASN daerah berbasis meritokrasi	Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan ASN
		Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian
		Meningkatkan layanan kesejahteraan ASN
		Meningkatkan pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem informasi yang terintegrasi
		Meningkatkan redistribusi pejabat pelaksana dan fungsional
		Meningkatkan kualitas pengisian jabatan manajerial
		Meningkatkan kualitas pengisian jabatan fungsional
		Meningkatkan kualitas layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN
		Meningkatkan hasil pengukuran kinerja PNS
		Meningkatkan kualitas layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN
		Menurunkan pelanggaran disiplin ASN
		Meningkatkan pengembangan kompetensi
	Peningkatan efektivitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Mewujudkan kepatuhan perangkat daerah terhadap saran dan rekomendasi pemeriksaan
		Meningkatkan ketaatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Meningkatkan kualitas SPIP perangkat daerah
		Meningkatkan kualitas SAKIP perangkat daerah
		Meningkatkan nilai zona integritas perangkat daerah

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan responsivitas perangkat daerah
		Meningkatkan manajemen risiko dan pencegahan korupsi perangkat daerah
		Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (ekonomis, efisien, efektif) di komponen aktivitas serta kualitas pengawasan
	Peningkatan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi legislasi
		Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi *budgeting*
		Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi pengawasan
		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam rangka fasilitasi terhadap agenda DPRD
		Meningkatkan keterbukaan informasi publik
		Menyelenggarakan SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital yang memperhatikan harmonisasi teknologi, manusia, dan lingkungan
		Mengoptimalkan penggunaan TIK sebagai upaya mitigasi risiko di era VUCA *(volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity)*
	Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Meningkatkan kualitas pengelolaan data sektoral
		Meningkatkan pemanfaatan data sektoral dalam pembangunan
	Peningkatan keamanan informasi	Meningkatkan keamanan informasi
	Peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan masyarakat	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan
		Meningkatkan kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil
		Meningkatkan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data kependudukan

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	dan pemanfaatan data kependudukan	Meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai SOP Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
	Peningkatan kualitas pengelolaan arsip	Meningkatkan tata kelola kearsipan
		Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip
		Meningkatkan penyelesaian arsip tertutup
	Peningkatan tertib administrasi pertanahan	Meningkatkan tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah
		Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan pertanahan
		Meningkatkan tertib administrasi pemanfaatan pertanahan
		Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
	Peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Meningkatkan pengendalian potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
		Meningkatkan penegakan Perda dan Perkada
		Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Satpol PP
		Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam turut mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta pelindungan masyarakat
		Meningkatkan kerja sama penegakan hukum
	Peningkatan penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	Meningkatkan pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan melalui implementasi nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila
		Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
		Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		Meningkatkan penyelesaian potensi konflik sosial di wilayah
5	**Misi 5 : Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY**	
	Peningkatan Pemanfaatan Dana Keistimewaan	Memperkuat kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan
		Memajukan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat
		Mengembangkan tata ruang keistimewaan
		Memperkokoh pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan
		Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga

3.4.4. **Program Prioritas**

Program prioritas merupakan hasil dari proses *cascading* kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level *outcome* yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program-prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait.

Program prioritas dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis yang dijabarkan ke dalam program-program unggulan dari Wali Kota terpilih, meliputi:

1. Meningkatkan derajat pendidikan warga, melalui program unggulan:
    a. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
    b. Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian
    c. Penumbuhan Wirausaha Muda
2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan:
    a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat
    b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan
    c. Satu Kampung Satu Bidan
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program unggulan:
    a. Bela Beli Produk Warga
    b. Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan
    c. Modernisasi Pasar Rakyat.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:
    a. Revitalisasi Kampung Wisata
    b. Ekonomi Olahraga; dan
    c. Penguatan akses pendanaan pembangunan

5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program unggulan:
    a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi.
    b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif; dan
    c. Perlindungan Hukum bagi Warga
6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui program unggulan:
    a. Bapak Asuh Keluarga Miskin
    b. Kampung Layak Huni
    c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan
7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program unggulan:
    a. Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan
    b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat
    c. Mengembangkan tata ruang keistimewaan
    d. Memperkokoh pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan
    e. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga
8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:
    a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah
    b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan
    c. Jogja Tangguh Bencana

Delapan program strategis Wali Kota terpilih tersebut kemudian diselaraskan dengan indikasi program yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang relevan sebagai pengampu. Penyelarasan tersebut dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif sehingga program prioritas yang telah ditetapkan memiliki

dasar operasional yang kuat dan berorientasi pada hasil seperti dalam tabel berikut.

Tabel -4 Keterkaitan Program Strategis/Unggulan Kepala Daerah dengan Program Perangkat Daerah

NO.	PROGRAM STRATEGIS/ UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG SESUAI	OPD PENGAMPU
1	Meningkatkan derajat pendidikan warga, melalui program unggulan:		
	d) Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana	Program Pengelolaan Pendidikan	PD Pengampu Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	e) Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian	Program Pengelolaan Pendidikan	PD Pengampu Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	f) Penumbuhan Wirausaha Muda	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi dan UKM
2	Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan:		
	a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	PD Pengampu Urusan Kesehatan
	b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PD Pengampu Urusan Kesehatan
	c. Satu Kampung Satu Bidan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PD Pengampu Urusan Kesehatan
3	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program unggulan:		

NO.	PROGRAM STRATEGIS/ UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG SESUAI	OPD PENGAMPU
	a. Bela Beli Produk Warga	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi dan UKM
	b. Pemajuan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi dan UKM
	c. Modernisasi Pasar Rakyat	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	PD Pengampu Urusan Perdagangan

4	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:		
	a. Revitalisasi Kampung Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PD Pengampu Urusan Pariwisata
	b. Ekonomi Olahraga	Program Pemasaran Pariwisata	PD Pengampu Urusan Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	PD Pengampu Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	c. Penguatan akses pendanaan pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	PD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	PD Pengampu Urusan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

NO.	PROGRAM STRATEGIS/ UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG SESUAI	OPD PENGAMPU
5	Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program unggulan:		
	a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi	Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	PD Pengampu Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	PD Pengampu Urusan Pengawasan – Sekretariat Daerah
	b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Organisasi – Sekretariat Daerah
	c. Perlindungan Hukum bagi Warga	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum – Sekretariat Daerah

6	Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui program unggulan:		
	a. Bapak Asuh Keluarga Miskin	Program Pemberdayaan Sosial	PD Pengampu Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	b. Kampung Layak Huni	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Perumahan	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	PROGRAM STRATEGIS/ UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG SESUAI	OPD PENGAMPU
		Program Kawasan Permukiman	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Rehabilitasi Sosial	PD Pengampu Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program unggulan:		
	a. Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan	Bagian Organisasi – Sekretariat Daerah
	b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
			PD Pengampu Urusan Pertanahan dan Tata Ruang

NO.	PROGRAM STRATEGIS/ UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG SESUAI	OPD PENGAMPU
	c. Mengembangkan tata ruang keistimewaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	d. Memperkokoh pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	PD Pengampu Urusan Pertanahan dan Tata Ruang
	e. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

8	**Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:**		
	a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PD Pengampu Urusan Pertanahan dan Tata Ruang
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

NO.	PROGRAM STRATEGIS/ UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG SESUAI	OPD PENGAMPU
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	PROGRAM STRATEGIS/ UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG SESUAI	OPD PENGAMPU
		Program Penataan Bangunan Gedung	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Jalan	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	c. Jogja Tangguh Bencana	Program Penanggulangan Bencana	PD Pengampu Urusan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	PD Pengampu Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dengan mendasar pada penjabaran keterkaitan antara program strategis/unggulan dengan program perangkat daerah yang relevan, maka terdapat 49 Program Prioritas dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029, seperti dalam tabel berikut:

Tabel -5 Rumusan Program Prioritas Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Pengampu

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Program Pengelolaan Pendidikan	PD Pengampu Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	PD Pengampu Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi dan UKM
4	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi dan UKM
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	PD Pengampu Urusan Kesehatan
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PD Pengampu Urusan Kesehatan
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	PD Pengampu Urusan Perdagangan
8	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PD Pengampu Urusan Pariwisata
9	Program Pemasaran Pariwisata	PD Pengampu Urusan Pariwisata
10	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PD Pengampu Urusan Pariwisata
11	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PD Pengampu Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian
12	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah
13	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	PD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
14	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	PD Pengampu Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
15	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	PD Pengampu Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
16	Program Kepegawaian Daerah	PD Pengampu Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
17	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	PD Pengampu Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
18	Program Penyelenggaraan Pengawasan	PD Pengampu Urusan Pengawasan
19	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Organisasi – Sekretariat Daerah; Bagian Hukum – Sekretariat Daerah
20	Program Pemberdayaan Sosial	PD Pengampu Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21	Program Rehabilitasi Sosial	PD Pengampu Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Program Pengembangan Perumahan	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	Program Kawasan Permukiman	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
26	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
28	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
29	Program Penataan Bangunan Gedung	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
30	Program Penyelenggaraan Jalan	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
31	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
32	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
33	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
34	Program Rehabilitasi Sosial	PD Pengampu Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
35	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan	Bagian Organisasi – Sekretariat Daerah
36	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
37	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	PD Pengampu Urusan Pertanahan dan Tata Ruang; Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
38	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	PD Pengampu Urusan Pertanahan dan Tata Ruang
39	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PD Pengampu Urusan Pertanahan dan Tata Ruang

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
40	Program Pengelolaan Persampahan	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
41	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
42	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
43	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
44	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
45	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
46	Program Penanggulangan Bencana	PD Pengampu Urusan Penanggulangan Bencana Daerah
47	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	PD Pengampu Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
48	Program Pendaftaran Penduduk	PD Pengampu Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
49	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian dan Kerjasama – Sekretariat Daerah

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program pembangunan, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Program ini disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunannya, program-program pembangunan daerah dirancang dengan mempertimbangkan janji politik kepala daerah serta memperhatikan kapasitas fiskal yang tersedia. Dengan demikian, target pembangunan dan alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga implementasi program menjadi lebih realistis dan berkelanjutan.

Sesuai dengan arsitektur perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu:

- Program/Kegiatan Strategis: Program yang memiliki dampak luas dan signifikan terhadap pembangunan daerah. Karena urgensinya yang tinggi, program ini mendapat prioritas dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi. Program strategis juga menjadi tanggung jawab bersama antara Kepala Perangkat Daerah dan kepala daerah dalam pengambilan kebijakan.
- Program/Kegiatan Operasional: Program yang bersifat teknis dan mendukung implementasi kebijakan strategis. Meskipun cakupannya lebih terbatas, program operasional tetap penting untuk menunjang pencapaian target pembangunan daerah.

Dalam dokumen ini, program strategis dijabarkan secara terperinci pada bab sebelumnya sebagai program prioritas, sedangkan program/kegiatan operasional dijabarkan lebih lanjut pada penjabaran berikutnya.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, setiap program pembangunan daerah harus disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan alokasi dana yang telah diproyeksikan berdasarkan kapasitas fiskal daerah. Penyusunan program pembangunan Kota Yogyakarta juga mempertimbangkan kondisi keuangan yang tersedia agar penetapan target dan anggaran tetap realistis dan berkelanjutan.

Dalam proses ini, dilakukan perumusan indikasi program pembangunan yang mencakup kebutuhan pendanaan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah. Indikasi kebutuhan pendanaan ini juga menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah serta merinci kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tahap awal dalam penyusunan program pembangunan daerah dimulai dengan evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup identifikasi permasalahan di seluruh urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan. Hasil evaluasi tersebut menjadi acuan dalam merumuskan program yang tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, perencanaan program tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga harus memastikan kesinambungan pembangunan. Program yang dirancang untuk tahun 2030, menjadi landasan bagi penyusunan RKPD 2030 yang akan diterapkan oleh kepala daerah periode berikutnya. Dengan pendekatan ini, kesinambungan pembangunan daerah dapat terjaga dengan baik.

Tabel -1 Program Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga															
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik yang memenuhi kualifikasi	95,24%	97,15%	15.849.078.400	97,20%		97,26%		97,32%		97,37%	15.849.078.400	97,43%		PD Pengampu Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar SD	110,91/110,14	110,29%		110,44%		110,59%		110,74%		110,89%		111,04%		PD Pengampu Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Angka Partisipasi Kasar SMP	123,74/123,16	123,31%		123,46%		123,61%		123,76%		123,92%		124,06%		
	Angka Partisipasi Murni SD	104,67/103,95	104,05%		104,15%		104,25%		104,35%		104,44%		104,56%		
	Angka Partisipasi Murni SMP	108,1/107,59	107,60%		107,80%		107,99%		108,18%		108,36%		108,55%		
	Persentase kelulusan Peserta Didik	52,00%	52,05%		52.10%		52,15%		52,20%		52,25%		52,30%		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Perolehan Medali Tingkat Provinsi	215	218		219		220		221		222		224		PD Pengampu Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan	5,04	5,29		5,39		5,49		5,59		5,69		5,79		PD Pengampu Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	A (88,48)	A (88,48-88,51)	234.009.049.145	A (88,51-88,54)		A (88,54-88,57)		A (88,57-89)		A (88,57-89)		A (89-90)		PD Pengampu Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Nilai SPIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4,605	4,85		4,93		4,945		4,955		4,96		4,97		
	Nilai IKM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	81,91	82,04		82,17		82,3		82,43		82,56		82,69		
Bidang Kesehatan															
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Persentase Posyandu ILP Aktif	16,24%	84%	93.006.661.110	88%	72.828.612.941	92%	72.828.612.941	96%	72.828.612.941	100%	72.828.612.941	100%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase pengendalian penyakit menular	88,44%	88,64%		88,97%		89,30%		89,46%		89,70%		89,75%		

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KESEHATAN MASYARAKAT	dan tidak menular prioritas														
	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase ketersediaan obat indikator	95%	95%		95,50%		96%		96,50%		97%		97,50%		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Dinas Kesehatan	A (84,14)	A (85)	168.671.767.450	A (85)		A (85)		A (85)		A (85)		A (85)		PD Pengampu Urusan Kesehatan
	Nilai AKIP	A	A		A		A		A		A		A		
	Nilai SPIP	4.424	3		3,25		3,5		3,75		4		4		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase tercapainya indikator SPM layanan Rumah Sakit	92%	92,50%		93%		93,50%		94%		94,50%		95%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	86,82	86,85		86,9		86,95		87		87,05		87,1		PD Pengampu Urusan Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM pelayanan rumah sakit	85,00%	85,50%		86,00%		86,50%		87,00%		87,50%		88,00%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase capaian pemenuhan Alat	64,51%	64,60%		64,80%		65,00%		65,20%		65,40%		65,42%		PD Pengampu Urusan Kesehatan

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kesehatan sesuai standar														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta	84,9	85		85,2		85,4		85,6		85,8		86		PD Pengampu Urusan Kesehatan
	Nilai Evaluasi SAKIP Rumah Sakit	A	A		A		A		A		A		A		
	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Rumah Sakit	4,33	4,34		4,35		4,36		4,37		4,38		4,4		
	Persentase capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Urusan Pekerjaan Umum															
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan kondisi mantap	85,22%	85,26%	29.880.447.165	85,31%		85,35%		85,40%		85,44%		85,49%		PD Pengampu Urusan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan	81,53%	83,87%	33.480.806.466	86,28%		88,68%		91,06%		93,43%		95,78%		PD Pengampu Urusan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pemenuhan drainase kondisi baik	88,44%	88,49%	16.174.514.750	88,54%		88,59%		88,64%		88,68%		88,73%		PD Pengampu Urusan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik	72,58%	72,62%	5.941.549.413	73,10%		73,58%		74,06%		74,54%		75,02%		PD Pengampu Urusan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung pemerintah Dengan Kondisi Baik	91,92%	92,29%	30.623.548.057	92,76%		93,22%		93,69%		94,24%		94,70%		PD Pengampu Urusan Penataan Ruang
	Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan kapasitas jasa konstruksi	N/A	88,42%	500.876.145	89,44%		90,74%		92,04%		93,33%		94,63%		PD Pengampu Urusan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	23,80%	23,81%	13.648.320.129	23,83%		23,84%		23,88%		23,93%		23,98%		PD Pengampu Urusan Penataan Ruang
	Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	19,87%	20,11%		20,43%		20,63%		20,89%		21,16%		21,42%		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM	100,00%	100,00%	10.094.000	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		PD Pengampu Urusan Penataan Ruang
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman															
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	41,65% / 50,19%	63,27%	14.071.729.429	71,98%		80,70%		89,42%		100,00%		100,00%		PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase pemenuhan rumah layak huni	98,70%	98,86%		99,02%		99,18%		99,34%		99,50%		99,66%		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan Permukiman Dengan Sarana dan Prasarana Dasar yang Baik	96,16%	97,16%		97,84%		98,51%		99,18%		100,00%		100,00%		PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	100,00%	100,00%	1.724.338.036	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase rumah susun yang dipelihara	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	A (84,52)	A (84,75-87,75)	17.052.895.834	A (85-88)		A (85,25-88,25)		A (85,5-88,5)		A (85,75-88,75)		A (86-89)		PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Nilai SPIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terkelola dan Terukur (4,169)	Terkelola dan Terukur (4,200-4,50)		Terkelola dan Terukur (4,230-4,50)		Terkelola dan Terukur (4,260-4,50)		Terkelola dan Terukur (4,290-4,50)		Terkelola dan Terukur (4,320-4,50)		Terkelola dan Terukur (4,360-4,50)		
	Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	83,42	85		86,67		88,33		90		91,67		93,33		
Urusan Pertanahan															
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah	N/A	83,58%	2.330.952.550	83,82%		84,06%		84,29%		84,51%		84,72%		PD Pengampu Urusan Pertanahan
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	N/A	80,44%	475.844.320	82,43%		82,81%		83,19%		83,48%		83,76%		PD Pengampu Urusan Pertanahan
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai rekomendasi	N/A	6,00%	73.299.000	12,00%		18,00%		20,00%		26,00%		32,00%		PD Pengampu Urusan Pertanahan
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP	10000,00%	100,00%	116.478.500	100,00%	96.726.000	100,00%	97.693.260	100,00%	98.670.195	100,00%	99.656.90	100,00%		PD Pengampu Urusan Pertanahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	N/A	68,44%	932.719.470	74,72%		81,01%		83,80%		86,59%		89,11%		PD Pengampu Urusan Pertanahan
	Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	N/A	89,71%		92,68%		94,66%		96,64%		98,42%		100,00%		
	Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	N/A	38,81%		50,08%		61,35%		72,62%		83,90%		95,00%		
	Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	ditindaklanjuti sesuai SOP														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	A (83,77)	A (83,87 - 84,5)	5.828.465.398	A (83,97 - 84,5)		A (84,07 - 84,5)		A (84,17 - 84,5)		A (84,27 - 84,5)		A (84,37 - 84,5)		PD Pengampu Urusan Pertanahan, PD Pengampu Urusan Penataan Ruang
	Nilai SPIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Terkelola dan Terukur (4,483 - <4,5)	Terkelola dan Terukur (4,484 - <4,5)		Terkelola dan Terukur (4,485 - <4,5)		Terkelola dan Terukur (4,486 - <4,5)		Terkelola dan Terukur (4,487 - <4,5)		Terkelola dan Terukur (4,488 - <4,5)		Terkelola dan Terukur (4,489 - <4,5)		
	Nilai IKM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	85,33	85,35		85,37		85,39		85,41		85,43		85,45		
Urusan Penataan Ruang															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	N/A	68,75%	6.276.635.858	75,00%		81,25%		87,50%		93,75%		100,00%		PD Pengampu Urusan Penataan Ruang
	Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	N/A	64,84%	1.627.610.750	71,87%	2.384.305.550	78,90%	2.408.148.610	85,93%	2.432.230.095	92,97%	2.456.552.400	100,00%		
	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	85,26%	85,27%		85,27%		85,27%		85,27%		85,28%		85,28%		
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		PD Pengampu Urusan Penataan Ruang
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat															
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	100,00%	100,00%	27.297.674.276	100%		100%		100%		100%		100%		PD Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada	100,00%	100,00%		100,00%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat	91,81%	82,67%		84,43%		86,59%		88,75%		90,91%		93,,07%		
	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur Satpol PP	97,61%	71,49%		76,67%		81,85%		86,93%		92,01%		97,09%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Satpol PP	A (88,54)	A (88,55-89,50)	19.500.414.917	A (88,65-89,51)		A (88,75-89,52)		A (88,85-89,53)		A (88,90-89,54)		A (89,00-89,55)		PD Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai SPIP Satpol PP	Terkelola dan Terukur (4,170)	Terkelola dan Terukur (4,180-4,50)		Terkelola dan Terukur (4,190-4,50)		Terkelola dan Terukur (4,205-4,50)		Terkelola dan Terukur (4,210-4,50)		Terkelola dan Terukur (4,220-4,50)		Terkelola dan Terukur (4,230-4,50)		
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Satpol PP	80,3	81,25		82,5		83,5		84,5		85		85,5		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Nilai indeks prioritas Efektivitas Mitigasi Bencana	0,73	0,74	8.013.949.291	0,75		0,76		0,77		0,78		0,79		PD Urusan Kebencanaan
	Nilai Indeks Prioritas Peningkatan Kualitas Penanganan Darurat Bencana	0,68	0,69		0,7		0,71		0,72		0,73		0,74		
	Nilai Indeks prioritas Peningkatan Kualitas Sistem Pemulihan Bencana	0,45	0,46		0,47		0,48		0,49		0,5		0,51		
	Nilai Indeks Prioritas Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	0,87	0,88		0,89		0,9		0,91		0,92		0,93		
	Nilai SPM Sub Urusan Kebencanaan	100	100		10000%		10000%		10000%		10000%		100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP BPBD	A	A	5.645.874.584	A		A		A		A		A		PD Urusan Kebencanaan
	Nilai SPIP	12,738	12,7		12,8		12,9		13		13,1		13,2		

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM	85,94	86		86,3		86,6		86,9		87,2		87,5		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan Terhadap Resiko Kebakaran	N/A	40,36%	6.079.233.065	51,08%		61,81%		72,54%		83,27%		90,74%		PD Pengampu Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Persentase penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota)	100%	100,00%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime (15 menit) oleh petugas dan dengan keterlibatan REDKAR	100%	100,00%		100%		100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A	A	7.808.983.720	A		A		A		A		A		PD Pengampu Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Nilai SPIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4,245	4,246		4,247		4,248		4,249		4,25		4,251		
	Nilai IKM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	86,16	86,17		86,18		86,19		86,2		86,21		86,22		
Urusan Sosial															
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	64,35%	65,28%	640.461.100	66,20%		67,59%		68,52%		69,91%		69,91		PD Pengampu Urusan Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	81,74%	83,17%	3.273.069.361	83,37%		83,56%		83,76%		83,96%		84,16%		PD Pengampu Urusan Sosial

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	92,91%	93,24%	2.203.194.450	93,66%		94,06%		94,47%		94,88%		94,88%		PD Pengampu Urusan Sosial
	Persentase Tingkat kepersertaan jaminan sosial pekerja rentan	Belum ada Baseline	13,71%		13,715%		13,716%		13,717%		13,718%		13,718%		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Kejadian Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	100%	100%	432.295.350	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Sosial
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Imigrasi	A (89,58)	A (83,5-86,5)	12.956.991.887	A (84-87)		A (84,5-87,5)		A (85-88)		A (85,5-88,5)		A (86-89)		PD Pengampu Urusan Sosial, PD Pengampu Tenaga Kerja, PD Pengampu Transmigrasi
	Nilai SPIP Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Imigrasi	Terkelola dan Terukur (4,335 - 4,50)	Terkelola dan Terukur (4,345 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,355 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,3465 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,375 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,385 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,395 - 4,50)		
	Nilai IKM Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Imigrasi	89.17	89,05-89,25		89,20-89.45		89,30-89,55		89,40-89,65		89,50-89,75		89,50-89,75		
Urusan Tenaga Kerja															
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	69,23%	69,23%	194.131.150	69,23%		69,23%		69,23%		69,23%		69,23%		PD Pengampu Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja peserta pelatihan pada sektor formal dan non formal	92,31%	92,31%	2.015.791.600	92,49%		92,78%		93,06%		93,61%		93,61%		PD Pengampu Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	53,13%	53,15%	1.188.621.150	53,08%		53,02%		52,95%		52,97%		52,97%		PD Pengampu Tenaga Kerja

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rerata persentase Fasilitasi Kesejahteraan bagi Pekerja dari Perusahaan	24,62%	25,29%	1.573.792.539	26,02%		26,59%		27,12%		27,12%		27,60%		PD Pengampu Tenaga Kerja
Urusan Transmigrasi															
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Peminat Transmigrasi yang ditempatkan	15%	17,50%	221.289.800	19,05%		19,51%		20,00%		20,51%		20,51%		PD Pengampu Transmigrasi
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Berdaya	39,83%	39,97%	795.211.750	40,11%		40,25%		40,39%		40,53%		40,68%		PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Tertangani	100%	100%	787.556.075	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I - IV	463	468	1.660.996.635	473		478		483		488		493		PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V	195%	196%	1.023.327.333	197%		198%		199%		200%		201%		PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP)	40,11%	40,12%	3.652.436.929	40,13%		40,14%		40,15%		40,16%		40,17%		PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	ASFR 15 - 19 Tahun	9,1	9,5 - 8,7	423.446.750	9,5 - 8,7		9,4 - 8,6		9,4 - 8,6		9,3 - 8,5		9,3 - 8,5		PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Persentase Kelompok Kegiatan Bina	13,58%	14,37%	2.698.563.590	15,37%		16,48%		17,59%		18,82%		20,60%		PD Pengampu Urusan Pengendalian

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Keluarga Sejahtera Paripurna														Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DP3AP2KB	A (87,34)	A (87,5 - 88)	7.112.182.733	A (88,1 - 88,5)		A (88,6 - 89)		A (89,1 - 89,5)		A (89,6 - 90)		AA (90,1- 90,5)		PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Nilai SPIP DP3AP2KB	Terkelola dan Terukur (4,40)	Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49)		
	Nilai IKM DP3AP2KB	84,91	84,95 - 85,00		85,00 - 85,25		Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49)		
Urusan Pangan															
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari	27 Kelurahan	28 Kelurahan	0	0 Kelurahan	0	0 Kelurahan	0	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		PD Pengampu Urusan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Energi (AKE)	2.773,73	2.775,43	773.900.830	2.777,13		2.778,83		2.780,53		2.782,23		2.783.93		PD Pengampu Urusan Pangan
	Pola Pangan Harapan	91,61	92,11		92,61		93,11		93,61		94,11		94,61		PD Pengampu Urusan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA)	100,00%	91,11%	109.466.250	93,33%		95,56%		97,78%		97,78%		97,78%		PD Pengampu Urusan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman	88,00%	70,04%	304.392.500	70,31%		70,58%		70,84%		71,11%		71,58		PD Pengampu Urusan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASAYRAKAT VETERINER	Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman	84,17%	84,58%		85%		85,42%		85,83%		86,25%		86,67%		PD Pengampu Urusan Pangan
Urusan Kelautan dan Perikanan															
PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase kenaikan produksi	99,54%	99,62%	829.198.388	99,69%		99,77%		99,85%		99,92%		100%		

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PERIKANAN BUDIDAYA	perikanan budidaya														PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
	PAD Perikanan	58.159.000	90.200.000		100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000		
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kenaikan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	92,92%	99,94%	185.055.335	99,95%		99,96%		99,98%		99,99%		100%		PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Urusan Pertanian															
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan jumlah planlet yang diproduksi	0%	1%		1,1%		1,2%		1,3%		1,4%		1,5%		PD Pengampu Urusan Pertanian
	Persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan	20%	21%		22%		23%		24%		25%		26%		PD Pengampu Urusan Pertanian
PROGRAM PENYULUAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi petani tanaman hortikultura	0%	5%	729.816.400	9,52%		10,87%		11,76%		12,28%		14,06%		PD Pengampu Urusan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas	100%	100%	232.948.246	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PAD Pertanian	128.326.000	152.672.000		153.785.000		155.866.000		157.130.000		160.590.000		161.905.000		PD Pengampu Urusan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan wilayah yang terkendali wabah PHMS	100%	100%	1.528.094.394	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Pertanian
	PAD Kesehatan Hewan	406.687.000	414.425.000		427.675.000		443.765.000		459.659.000		477.128.000		493.697.000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan	A (88,49)	A (88,5-89,5)	12.760.135.729	A (89,0-90,5)		A (89,0-91,5)		A (90,0-91,5)		A (90,5-92,0)		A (91,0-92,5)		PD Pengampu Urusan Pertanian, PD Pengampu

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SPIP Dinas Pertanian dan Pangan	4,537	4,54		4,57		4,6		4,63		4,65		4,7		Urusan Kelautan dan Perikanan, PD Pengampu Urusan Pangan
	Nilai IKM Dinas Pertanian dan Pangan	82,81	84,21		85,61		87,01		88,41		89,81		91,21		
Urusan Lingkungan Hidup															
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup	78,50%	79,00%	453.914.800	79,50%		80,00%		80,50%		81,00%		81,00%		PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	82,50%	83,33%	3.184.685.246	84,17%		85,00%		85,83%		86,67%		87,50%		PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku	53,51%	60,53%		61,40%		62,28%		63,16%		64,04%		72,81%		
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Persentase pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3	17,85%	18,47%		19,07%		19,65%		20,23%		20,79%		21,33%		PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan melakukan pengelolaan lingkungan hidup	32,71%	33,30%	354.729.523	33,43%		33,57%		33,70%		33,83%		33,92%		PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan	Belum ada baseline	77,58%		78,04%		78,48%		78,90%		7,31%		Belum ada targetnya		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	23,33%	23,33%	11.735.739.643	23,33%		23,34%		23,34%		23,34%		23,34%		PD Pengampu Urusan

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MAN HAYATI (KEHATI)															Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kampung ProKlim	65,09%	65,09%	2.429.905.100	68,05%		71,01%		73,96%		76,92%		79,88%		PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	Persentase sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah adiwiyata	69,35%	76,45%		79,68%		81,29%		82,90%		84,52%		86,13%		
	Persentase Bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler)	73,92%	62,98%		65,85%		68,39%		70,88%		73,33%		75,75%		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkurangi	18,95%	19,09%	65.845.959.621	19,16%		19,24%		19,31%		19,39%		19,46%		PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	Persentase sampah yang tertangani	65,12%	6653,00%		67,15%		67,78%		68,40%		69,03%		69,66%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	A (82,80)	A (82,90-85,90)	24.373.501.939	A (82,95-85,95)		A (83-86)		A (83,05-86,05)		A (83,10-86,10)		A (83,15-86,15)		PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	Nilai SPIP Dinas Lingkungan Hidup	89,86	89,91		89,96		90,01		90,06		90,11		90,16		
	Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup	79,47	79,57		79,67		79,77		79,87		79,97		80,07		
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	81,99%	82,24%	1.321.910.770	82,50%		82,76%		83,02%		83,28%		83,54%		PD Pengampu Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	95,06%	95,12%	649.499.000	95,17%		95,22%		95,27%		95,32%		95,38%		PD Pengampu Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan	100%	100%	1.051.377.651	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase penerapan kebijakan keamanan informasi yang telah dilaksanakan dan pemahaman	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		PD Pengampu Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	terhadap keamanan informasi														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A (88,54)	A (88,54)	6.489.396.426	A (88,55)		A (88,56)		A (88,57)		A (88,58)		A (88,59)		PD Pengampu Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Nilai SPIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terkelola dan Terukur (4 - 4,50)	Terkelola dan Terukur (4 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4 - 4,50)		PD Pengampu Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90	90,3		90,6		90,9		91,2		91,5		91,8		PD Pengampu Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Perhubungan															
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Kinerja ruas jalan perkotaan (VC ratio)	0,63	0,749	12.775.388.114	0,748		0,75		0,746		0,745		0,745		PD Pengampu Urusan Perhubungan
	Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum	84,85%	89,82%		76,03%		85,23%		90,02%		77,12%		85,64%		
	Persentase pendukung penyelenggaran perparkiran yang terkelola secara resmi dan memenuhi standart	91,35%	92,21%		93,27%		93,93%		94,55%		95,60%		96,10%		
	Persentase kendaraan laik jalan	88,66%	89,16%		87,66%		88,66%		89,16%		87,66%		88,66%		
	Persentase kepatuhan lalu lintas	60,96%	60%		65%		70,00%		75,00%		80,00%		85,00%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	A (83,70)	A (83,80-85,00)	11.549.962.745	A (83,86-85,00)		A (83,92-85,00)		A (83,97-85,00)		A (84,03-85,00)		A (84,10-85,00)		PD Pengampu Urusan Perhubungan
	Nilai SPIP Dinas Perhubungan	Optimum (3,47)	Optimum (3,48-4)		Optimum (3,49-4)		Optimum (3,50-4)		Optimum (3,51-4)		Optimum (3,52-4)		Optimum (3,53-4)		
	Nilai IKM Dinas Perhubungan	-	80		80,01		80,02		80,03		80,04		80,05		
Urusan Komunikasi dan Informatika															

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai persepsi publik terhadap kinerja Pemkot Yogyakarta	75,20%	76,60%	3.795.596.200	76,80%		77,00%		77,20%		77,40%		77,60%		PD Pengampu Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Persentase perangkat daerah dengan predikat informatif	35,85%	47,17%		56,60%		66,04%		75,47%		84,91%		94,34%		PD Pengampu Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai domain layanan Indeks SPBE	3,5 / 4,31	4,36	13.936.872.409	4,38		4,4		4,42		4,47		4,5		PD Pengampu Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Nilai sub domain teknologi informasi SPBE	3,75	3,8		3,9		4		4,1		4,2		4,2		PD Pengampu Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Persentase rekomendasi infrastruktur pasif telekomunikasi yang dapat dilayani	N/A	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		PD Pengampu Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Nilai Domain Manajemen SPBE	1,6 / 1,64	1,65		1,8		2		2,2		2,4		2,4		PD Pengampu Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian
Urusan Statistik															
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) minimal baik	14,29%(jumlah OPD yang dinilai 49)	18,37%	415.994.240	22,45%		26,53%		30,61%		34,69%		40,82%		PD Pengampu Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Persentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	N/A	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		PD Pengampu Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Kominfo dan Persandian	A (86,72)	A (86,74-89,74)	12.011.631.029	A (86,76-89,76)		A (86,78-89,78)		A (86,80-89,80)		A (86,82-89,82)		A (86,84-89,84)		PD Pengampu Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Nilai SPIP Dinas Kominfo dan Persandian	Terkelola dan Terukur (4,370 - 4,50)	Terkelola dan Terukur (4,375 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,380 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,385 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,390 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,395 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,400 - 4,50)		PD Pengampu Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Nilai IKM Dinas Kominfo dan Persandian	Belum ada Baseline	80		82		84		86		88		89		PD Pengampu Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian
Urusan Persandian															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai Keamanan Informasi	87,807	88	332.566.450	89		90		91		92		93		PD Pengampu Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah															
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Wirausaha Baru	1,46%	2,19%	602.866.500	2,93%		3,66%		4,39%		5,12%		5,85%		PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi, dan UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM naik kelas	10%	10%	1.356.834.650	10%		10%		10%		10%		10%		PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi, dan UKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang tersertifikasi	7,23%	9,10%	457.852.875	10,98%		12,86%		15,27%		17,68%		20,09%		PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi, dan UKM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rasio koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	28,9	30,35	198.013.000	31,79		33,24		34,68		36,13		37,57		PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi, dan UKM
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP	Persentase koperasi sehat	13,29%	13,87%	78.509.000	14,45%		15,03%		15,61%		16,18%		16,76%		PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi, dan UKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	7,80%	9,54%	474.558.500	11,27%		13,01%		14,45%		15,90%		17,34%		PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi, dan UKM
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	53,55%	58,86%		63,08%		66,51%		69,36%		71,76%		73,82%		PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi, dan UKM

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PRORAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang berizin industri	42,62%	62,52%		73,54%		75,64%		76,38%		77,09%		77,75%		PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi, dan UKM
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	5,98%	5,51%		5,65%		5,79%		5,92%		6,04%		6,16%		PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi, dan UKM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendapatan UPT Desain dan Industri	566.776.486	614.075.000		627.334.400		657.334.400		687.334.400		707.334.400		727.334.400		PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi, dan UKM
	Nilai AKIP Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM	A (83,61)	A (83,61)	6.367.722.792	A (83,61)		A (83,61)		A (83,61)		A (83,61)		A (83,61)		PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi, dan UKM
	Nilai SPIP Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM	4,251	4,251		4,251		4,251		4,251		4,251		4,251		PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi, dan UKM
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM	82,36	82,46		82,56		82,66		82,76		82,86		82,96		PD Pengampu Urusan Perindustrian, Koperasi, dan UKM
Urusan Penanaman Modal															
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor baru baru tahun n	11.350 investor baru	6.898 investor baru		7.174 investor baru		7.439 investor baru		7.715 investor baru		8.000 investor baru		8.296 investor baru		PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha baru tahun n	Belum ada Baseline	13.834 usaha baru	1.314.472.750	14.346 usaha baru		14.877 usaha baru		15.427 usaha baru		15.998 usaha baru		16.590 usaha baru		PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase LKPM yang dilaporkan investor pada tahun n	Belum ada Baseline	46,17%	625.192.000	47,42%		48,67%		49,92%		51,17%		52,42%		PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	81,95	81,95	698.550.000	81,96		81,97		81,98		81,99		82		PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengunjung yang memanfaatkan data	Belum ada Baseline	80%	315.866.700	81%		82%		83%		84%		85%		PD Pengampu Urusan Penanaman Modal

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A (89,29)	A (89,29-89,34)	8.758.459.648	A (89,30-89,35)		A (89,31-89,36)		A (89,32-89,37)		A (89,33-89,38)		A (89,34-89,39)		PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
	Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,582	4,59-4,64		4,60-4,65		4,61-4,66		4,62-4,67		4,63-4,68		4,64-4,69		
	Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belum ada Baseline	80		80,5		81		81,5		82		82,5		
Kebudayaan															
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Objek Warisan Budaya yang Diapresiasi	Belum ada Baseline	51,54%	41.743.598.757	59,86%		65,58%		70%		73.34%		75,99%		PD Pengampu Urusan Kebudayaan
	Persentase Keaktifan Sanggar/ Lembaga Budaya	31,71%	39,11%		41,56%		44,01%		46,45%		48,89%		51,34%		
	Tingkat Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra dan Sejarah	82,52%	82,77%		83,27%		83,77%		84,27%		84,77%		85,27%		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	83,93%	84%		84,50%		85%		85,50%		86%		85,25%		
	Jumlah Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan	Belum ada Baseline	10		15		20		25		30		35		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Taman Pintar	738.683 Orang	750.000 Orang	26.995.299.690	755.000 Orang		760.000 Orang		765.000 Orang		770.000 Orang		775.000 Orang		PD Pengampu Urusan Kebudayaan
	Hasil penilaian SAKIP Dinas Kebudayaan	A (87,01)	A (87,01-87,5)		A (87,5-88,75)		A (88,6-88,9)		A (88,75-89)		A (88,7-89,1)		A (88,8-89,5)		
	Nilai SPIP Dinas Kebudayaan	4,424	4,45		4,5		4,55		4,6		4,65		4,65		
	Nilai IKM Dinas Kebudayaan	82,27	82,75		83, 25		83,75		83,75		84,25		84,75		

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pariwisata															
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang Berstandar Layanan Prima	Belum ada Baseline	58,62%	3.115.282.717	65,52%		72,41%		79,31%		87,93%		87,93%		PD Pengampu Urusan Pariwisata
	Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi	57,11%	33,66%		44,34%		54,37%		63,75%		72,82%		72,82%		PD Pengampu Urusan Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	10.583.877	8.000.000 Wisatawan	4.682.322.365	8.200.000 Wisatawan		8.400.000 Wisatawan		8.650.000 Wisatawan		8.900.000 Wisatawan		9.000.000 Wisatawan		PD Pengampu Urusan Pariwisata
	Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara	355.333	175.000 Wisatawan		180.000 Wisatawan		187.500 Wisatawan		195.000 Wisatawan		205.000 Wisatawan		210.000 Wisatawan		PD Pengampu Urusan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkat Kompetensinya	50%	50,00%	3.746.205.029	62,50%		75,00%		87,50%		100,00%		100,00%		PD Pengampu Urusan Pariwisata
PROGRAM PENUNUJANG URUSAN PEMERINTAH	Nilai AKIP Dinas Pariwisata	A (86,15)	A (86,15-86,65)	6.610.756.852	A (86,65-87,15)		A (87,15-87,65)		A (87,65-88,15)		A (88,15-88,65)		A (88,65-89,15)		PD Pengampu Urusan Pariwisata
	Nilai Penguatan Keuangan Dinas Pariwisata	Terkelola dan Terukur (4,427)	Terkelola dan Terukur (4,427-4,527)		Terkelola dan Terukur (4,527-4,627)		Terkelola dan Terukur (4,627-4,727)		Terkelola dan Terukur (4,727-4,827)		Terkelola dan Terukur (4,827-4,927)		Terkelola dan Terukur (4,927-5,0)		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pariwisata	B (85,25)	B (85,25-86,25)		B (86,25-87,25)		B (87,25-88,25)		B (88,25-89,25)		A (89,25-90,25)		A (89,25-90,25)		
Urusan Perpusatakaan dan Kearsipan															
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	39,55%	41,82%	6.672.622.820	44,09%		46,36%		48,64%		50,91%		55,45%		PD Pengampu Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	83,47	83,97		84,47		84,97		85,45		85,97		86,47		
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI	Persentase Naskah Nusantara yang didayagunakan	0%	33,94%	133.267.125	45,25%		56,56%		67,87%		79,19%		90,50%		PD Pengampu Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
NASIONAL DAN NASKAH KUNO															
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori memuaskan	46%	50%	587.377.700	54%		58%		62%		66%		70%		PD Pengampu Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	5,65%	8,48%	151.292.500	11,31%		14,13%		16,96%		19,79%		22,61%		PD Pengampu Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	persentase arsip statis tertutup yang dilayankan	100%	100%	18.413.000	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A (84,04)	A (84,54 - 90)	13.079.608.965	A (85,04 - 90)		A (85,54 - 90)		A (86,04 - 90)		A (86,54 - 90)		A (87,04 - 90)		PD Pengampu Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
	Nilai SPIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terkelola dan Terukur (4,118)	Terkelola dan Terukur (4,128 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,138 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,158 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,178 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,198 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,218 - 4,49)		
	Nilai IKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baik (87,31)	Baik (87,81 - 88,30)		Sangat Baik (88,31 - 100)		Sangat Baik (88,81 - 100)		Sangat Baik (89,31 - 100)		Sangat Baik (89,81 - 100)		Sangat Baik (90,31 - 100)		
Urusan Perdagangan															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendapatan BLUD Pusat Bisnis	5.933.182.475	5.964.498.400,00		6.010.421.500,00		6.013.847.500,00		6.017.322.500,00		6.020.825.500,00		6.024.379.500,00		PD Pengampu Urusan Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat	34,48%	37,93%	23,069,044,741	41,38%		44,83%		48,28%		51,72%		55,17%		PD Pengampu Urusan Perdagangan
	Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola	17.946.182.379,00	18.000.000.000,00		18.050.000.000,00		18.100.000.000,00		18.150.000.000,00		18.200.000.000,00		18.250.000.000,00		PD Pengampu Urusan Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usah yang meningkat omsetnya	Belum ada Baseline	6,67%	1.053.104.200	7,22%		7,78%		8,33%		8,89%		9,44%		PD Pengampu Urusan Perdagangan
PROGRAM PERIZINAN DAN	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	Belum ada Baseline	97,18%	154.169.000	97,74%		98,31%		98,87%		99,44%		100%		PD Pengampu Urusan Perdagangan

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENDAFTARAN PERUSAHAAN															
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	98,04%	90,20%		92,16%		94,12%		96,08%		98,04%		98,04%		PD Pengampu Urusan Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP yang Bertanda Tera Sah	99,96%	99,96%	391.018.840	99,96%		99,96%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Perdagangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan	A (83)	A (83,5-86,5)	19.430.960.317	A (84-87)		A (84,5-87,5)		A (85-88)		A (85,5-88,5)		A (86-89)		PD Pengampu Urusan Perdagangan
	Nilai SPIP Dinas Perdagangan	89,24	89,24		89,24		89,24		89,24		89,24		89,24		PD Pengampu Urusan Perdagangan
	Nilai IKM Dinas Perdagangan	80,69	80,69		80,69		80,69		80,69		80,69		80,69		PD Pengampu Urusan Perdagangan
Sekretariat Daerah															
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis bina mental	Belum ada Baseline	90%		91%		92%		93%		94%		95%		Sekretariat Daerah
	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kesejahteraan sosial	Belum ada Baseline	90%		91%		92%		93%		94%		95%		
	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kesejahteraan masyarakat	Belum ada Baseline	90%		91%		92%		93%		94%		95%		
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan	Belum ada Baseline	90%		91%		92%		93%		94%		95%		Sekretariat Daerah
	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai 393,91)	Cepat Berkembang (nilai 395)		Cepat Berkembang (nilai 396)		Cepat Berkembang (nilai 396,5)		Cepat Berkembang (nilai 397)		Cepat Berkembang (nilai 397,5)		Cepat Berkembang (nilai 398)		

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Indeks Reformasi Hukum	AA (97,46)	AA (90 - 97,50)		AA (90 - 97,55)		AA (90 - 97,60)		AA (90 - 97,65)		AA (90 - 97,70)		AA (90 - 97,75)		
	Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	99,72%	95,25%		95,93%		96,00%		96,50%		97,00%		97,50%		
Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	56,1	75%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah	sangat tinggi (51)	sangat tinggi (51,1 - 52)		sangat tinggi (51,2 - 52,1)		sangat tinggi (51,3 - 52,2)		sangat tinggi (51,4 - 52,3)		sangat tinggi (51,5 - 52,4)		sangat tinggi (51,6 - 52,5)		Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan publik	Belum ada Baseline	90%		91%		92%		93%		94%		95%		Sekretariat Daerah
	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis administrasi umum	Belum ada Baseline	90%		91%		92%		93%		94%		95%		
	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,53 (Baik)	81,60 (Baik)		81,70 (Baik)		81,80 (Baik)		81,90 (Baik)		82,00 (Baik)		82,10 (Baik)		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Setda	B (Baik) (85,73)	B (Baik) (76,61 - 88,30)		B (Baik) (76,61 - 88,30)		B (Baik) (76,61 - 88,30)		B (Baik) (76,61 - 88,30)		B (Baik) (76,61 - 88,30)		B (Baik) (76,61 - 88,30)		Sekretariat Daerah
	Nilai AKIP Setda	A (84,47)	A (>80 - 90)		A (>80 - 90)		A (>80 - 90)		A (>80 - 90)		A (>80 - 90)		A (>80 - 90)		
	Nilai SPIP Setda	94,78%	94,80%		94,82%		94,84%		94,86%		94,88%		94,90%		
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif	Belum ada Baseline	82,35%		88,24%		90,00%		91%		92%		93%		Sekretariat Daerah
	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD	Belum ada Baseline	90%		91%		92%		93%		94%		95%		

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)	80,77%	84,62%		88,46%		92,31%		92,31%		96,15%		96,15%		
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan	89%	90%		91%		92%		93%		94%		95%		Sekretariat Daerah
	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,54%	98,57%		98,60%		98,63%		98,66%		98,69%		98,72%		
	Indeks tata kelola pengadaan	84,21	84,5		85		85,5		86		86,5		87		
Sekretariat DPRD															
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi pengesahan perda yang tepat waktu	100%	88,89%	26.531.134.623	81,82%		84,62%		86,67%		88,24%		94,44%		Sekretariat DPRD
	Persentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat DPRD
	Persentase pengesahan dokumen pengawasan yang di fasilitasi	100%	80%		87,27%%		89,09%		90,91%		94,55%		98,18%		Sekretariat DPRD
	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD	85,42%	86,98%		91,80%		93,44%		95,08%		96,72%		98,36%		Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	A (84,25)	A (83,5-86,5)		A (84-87)		A (84,5-87,5)		A (85-88)		A (85,5-88,5)		A (86-89)		Sekretariat DPRD
	NilaiSPIP Sekretariat DPRD	Terkelola dan Terukur (4,406)	Terkelola dan Terukur (4,407-4,50)		Terkelola dan Terukur (4,408-4,50)		Terkelola dan Terukur (4,409-4,50)		Terkelola dan Terukur (4,410-4,50)		Terkelola dan Terukur (4,411-4,50)		Terkelola dan Terukur (4,412-4,50)		Sekretariat DPRD
	Indeks kepuasan masyarakat Sekretariat DPRD	85,33	80		81		82,67		84,67		86,67		89,67		Sekretariat DPRD
Urusan Perencanaan															

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Target Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	92,87%	92,87%	1.094.927.590	92,88%		92,89%		92,90%		92,91%		92,92%		Bappeda
	Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah	Belum ada Baseline	60,00%		70%		80%		80%		80%		100%		Bappeda
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian	Belum ada Baseline	80,00%	1.377.958.625	84,00%		86,00%		88,00%		90,00%		92,00%		Bappeda
	Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian	Belum ada Baseline	89,77%		90,91%		92,05%		93,18%		94,32%		95,45%		
	Persentase Ketercapaian Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Belum ada Baseline	79,07%		81,40%		88,37%		88,37%		93,02%		93,02%		Bappeda
	Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Belum ada Baseline	85,22%		85,22%		87,83%		88,70%		93,04%		93,04%		
	Persentase Ketercapaian Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Belum ada Baseline	83,33%		86,67%		90%		93,33%		96,67%		97%		
	Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Belum ada Baseline	87,62%		88,57%		89,52%		90,48%		91,43%		92,38%		Bappeda
PROGRAM PENELITIAN DAN	Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti	Belum ada Baseline	88%	1.778.971.900	88%		88%		88%		88%		88%		Bappeda

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGEMBANGAN DAERAH	Skor Rata-Rata Hasil Inovasi Perangkat Daerah	88,84%	76		77		78		79		80		81		Bappeda
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Belum ada Baseline	A	35.142.144.714	A		A		A		A		A		Bappeda
	Nilai SPIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimum (4,65)	Optimum (4,66-5)		Optimum (4,67-5)		Optimum (4,69-5)		Optimum (4,7-5)		Optimum (4,71-5)		Optimum (4,72-5)		Bappeda
	Nilai IKM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	89,04	89,14		89,24		89,34		89,44		89,54		89,64		
Keuangan															
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Dimensi Perencanaan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	98,65	96,78		97,29		97,78		97,78		97,78		98,27		BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indeks Pengelolaan Aset Daerah)	2,98	2,98		2,98		2,98		2,98		2,98		2,98		BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	119,28%	100%	3.469.029.617	100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPKAD	A (84,13)	A (84,13-84,16)	47.957.583.336	A (84,14-84,17)		A (84,15-84,18)		A (84,16-84,19)		A (84,17-84,20)		A (84,18-84,21)		BPKAD
	Nilai SPIP BPKAD	4,368 Skala 4	4,368 Skala 4		4,368 Skala 4		4,368 Skala 4		4,368 Skala 4		4,368 Skala 4		4,368 Skala 4		BPKAD
	Nilai IKM BPKAD	A	A		A		A		A		A		A		BPKAD
Urusan Kepegawaian															
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan	100%	100%	3.255.203.269	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Kepegawaian
	Persentase Ketepatan waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	layanan kesejahteraan														
	Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase keterisian jabatan manajerial sesuai kompetensi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai	99,45%	90,00%		92,00%		93,99%		96,01%		98,01%		98,01%		
	Persentase ASN yang melanggar disiplin	99,82%	97,01%		97,50%		98%		98,51%		99%		99%		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi	87,95%	88,35%	5.026.386.777	90,20%		90,60%		91,29%		92,16%		92,16%		PD Pengampu Urusan Kepegawaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP BKPSDM	A (89,01)	A (89,05)	11.384.475.277	A (89,07)		A (89,09)		A (89,11)		A (89,13)		A (89,17)		PD Pengampu Urusan Kepegawaian
	Nilai SPIP BKPSDM	Terkelola dan Terukur (4,666)	Terkelola dan Terukur (4,507-4,70)		Terkelola dan Terukur (4,508-4,70)		Terkelola dan Terukur (4,509-4,70)		Terkelola dan Terukur (4,510-4,70)		Terkelola dan Terukur (4,511-4,70)		Terkelola dan Terukur (4,511-4,70)		
	Nilai IKM BKPSDM	93,03	93,10		93,20		93,40		93,50		93,60		93,80		

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Inspektorat															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	100%	95,50%	294.981.753	96,00%		96,25%		97,00%		97,25%		97,50%		PD Pengampu Urusan Pengawasan
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset	100%	92,00%		96%		95,00%		96.6%		96.6%		96.6%		
	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00	57,14%	61,90%		66,67%		71,43%		78,57%		85,71%		92,86%		
	Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	54,76%	64,29%		73,81%		83,33%		92,86%		100,00%		100,00%		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM	9,52%	11,90%	426.077.320	11,90%		14,29%		14,29%		16,67%		16,67%		PD Pengampu Urusan Pengawasan
	Persentase PD dengan tingkat responsivitas > 90%	100%	93,75%		93,75%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	Persentase PD dengan nilai MRI >3,00	97,61%	97,62%		97,62%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	Persentase PD dengan IEPK > 2,8	47,62%	52,38%		57,14%		61,90%		66,67%		71,43%		76,19%		
	Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	1,2	1,2		1,21		1,21		1,22		1,22		1,22		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen	1,99	1,99		2,08		2,1		2,14		2,18		2,22		PD Pengampu Urusan Pengawasan

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola														
	Nilai SAKIP	A (89,25)	A (89,25)	13.859.114.506	A (89,4)		A (89,6)		A (89,8)		A (90,00)		A (90,00)		
	Nilai SPIP	4,514	4,520		4,500		4,550		4,600		4,650		4,700		
	Nilai IKM Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta	89,91	89,91		89,93		89,95		89,95		89,97		89,97		
Kesatuan Bangsa dan Politik															
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	83,62%	83,98%	2.838.827.316	85,05%		85,98%		86,92%		88,08%		89,02%		PD Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	74,34%	78,17%	3.599.729.285	82,01%		85,84%		89,68%		93,51%		94,99%		PD Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta	71,05%	71,71%	379.491.300	73,03%		74,34%		75,00%		76,32%		76,97%		PD Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya di wilayah	57,78%	67%	914.466.300	71%		76%		80%		84%		89%		PD Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi wilayah	94,17%	84,80%	1.408.664.754	86,40%		87,20%		87,69%		89,23%		90,00%		PD Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A (84,4)	A (84,5-87,5)	4.753.182.695	A (84,6-87,6)		A (84,7-87,7)		A (84,8-87,8)		A (84,9-87,9)		A (85-88)		PD Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Nilai SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terkelola dan Terukur (4,183 - 4,50)	Terkelola dan Terukur (4,185 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,186 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,187 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,188 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,189 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,190 - 4,50)		
Kewilayahan															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren	114,5	114,5	67.729.000	114,5		114,5		114,5		114,5		Belum ada proyeksi		Kemantren Tegalrejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	187,25	187,25	5.191.406.950	188,25		189,25		190,25		191,25		Belum ada proyeksi		Kemantren Tegalrejo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	24.220.000	100%		100%		100%		100%		Belum ada proyeksi		Kemantren Tegalrejo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100%	100%	83.719.625	100%		100%		100%		100%		Belum ada proyeksi		Kemantren Tegalrejo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kemantren Tegalrejo	A (83,2)	A (83,2-86,2)	7.371.362.199	A (83,3-86,3)		A (83,4-86,4)		A (83,5-86,5)		A (83,6-86,6)		Belum ada proyeksi		Kemantren Tegalrejo
	Nilai SPIP Kemantren Tegalrejo	4,303-4,500	4,303-4,500		4,304-4,500		4,305-4,500		4,306-4,500		4,307-4,500		Belum ada proyeksi		
	Nilai IKM Kemantren Tegalrejo	85,3	85,3		85,4		85,5		85,6		85,7		Belum ada proyeksi		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren	115	115	75.253.800	115		115		115		115		115		Kemantren Gedongtengen

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	187	187	2.738.141.650	187		187		187		187		187		Kemantren Gedongtengen
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	119.615.000	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Gedongtengen
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100%	100%	48.435.000	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Gedongtengen
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kemantren Gedongtengen	A (86,43-89,63)	A (86,43-89,63)	5.626.999.535	A (86,45-89,45)		A (86,47-89,47)		A (86,49-89,49)		A (86,51-89,51)		A (86,53-89,53)		Kemantren Gedongtengen
	Nilai SPIP Kemantren Gedongtengen	4,306 - 4,500	4,306 - 4,500		4,350 - 4,500		4,360 - 4,500		4,370 - 4,500		4,380 - 4,500		4,380 - 4,500		
	Nilai IKM Kemantren Gedongtengen	85,07	85,5		86		86,5		87		87,5		87,5		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren	116	116	115.783.500	116		116		116		116		116		Kemantren Jetis
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	194,33	194,33	4.082.167.250	194,5		194,83		195		195,33		195,33		Kemantren Jetis
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	84.040.300	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Jetis
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100%	100%	81.011.500	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Jetis

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kemantren Jetis	A (84,02)	A (84,02 - 89,02)	7.052.498.977	A (84,06 - 89,06)		A (84,08-89,08)		A (84,10-89,10)		A (84,12-89,12)		A (84,15-89,15)		Kemantren Jetis
	Nilai SPIP Kemantren Jetis	4,308	4,308 - 4,500		4,320 - 4,500		4,325-4,500		4,330-4,500		4,335-4,500		4,340-4,500		
	Nilai IKM Kemantren Jetis	88,23	88,3		88,4		88,5		88,6		88,7		88,8		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren	116,4	116,4	37.240.000	116,8		116,8		117		117		117		Kemantren Gondokusuman
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	190,6	190,6	6.259.645.750	190,2		190,4		190,4		190,8		190,6		Kemantren Gondokusuman
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	195.034.500	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Gondokusuman
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100%	100%	61.904.000	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Gondokusuman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kemantren Gondokusuman	A (88,00)	A (88,00-90,00)	8.709.352.472	A (88,02-90,00)		A (88,04-90,00)		A (88,06-90,00)		A (88,08-90,00)		A (88,10-90,00)		Kemantren Gondokusuman
	Nilai SPIP Kemantren Gondokusuman	4,351	4,351-4,500		4,352-4,500		4,353-4,500		4,354-4,500		4,355-4,500		4,356-4,500		
	Nilai IKM Kemantren Gondokusuman	83,5	83,5		83,52		83,54		83,56		83,6		83,62		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren	525,6	525,6	58.435.500	525,8		526		526,5		526,4		526,6		Kemantren Danurejan

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	409	409	3.864.683.350	409		409		409		409		409		Kemantren Danurejan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	46.690.000	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Danurejan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100%	100%	53.164.000	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Danurejan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kemantren Danurejan	A (86,89)	A (86,90)	6.732.070.155	A (86,91)		A (86,92)		A (86,93)		A (86,94)		A (86,95)		Kemantren Danurejan
	Nilai SPIP Kemantren Danurejan	93,26	86		86,5		87		87,5		88		88,5		
	Nilai IKM Kemantren Danurejan	83,5	83,5		84		84,5		85		85,5		86		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren	116,5	116,5	34.985.000	116,5		117		117		117		117		Kemantren Ngampilan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	185	191,5	2.680.485.115	191,5		191,5		192		192		192		Kemantren Ngampilan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	152.859.000	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Ngampilan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100%	100%	39.930.000	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Ngampilan

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kemantren Ngampilan	A (85,74)	A (85,74)	5.585.503.952	A (85,75)		A (85,75)		A (85,75)		A (85,76)		A (85,76)		Kemantren Ngampilan
	Nilai SPIP Kemantren Ngampilan	88,860	88,860		88,880		88,880		88,900		88,900		88,900		
	Nilai IKM Kemantren Ngampilan	84,62	84,8		85		85,2		85,4		85,6		85,6		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren	113,33	111	365.291.539	111,33		113,33		111,66		111,66		112		Kemantren Wirobrajan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	186,66	184,66	4.201.421.636	184,66		184,66		184,66		184,66		184,66		Kemantren Wirobrajan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	98.346.185	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Wirobrajan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100%	100%	91.988.954	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Wirobrajan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kemantren Wirobrajan	A (86.45)	A (86.45)	6.268.186.911	A (86.46)		A (86.47)		A (86.48)		A (86.49)		A (86.50)		Kemantren Wirobrajan
	Nilai SPIP Kemantren Wirobrajan	4,586	4,586		4,586		4,586		4,586		4,586		4,586		
	Nilai IKM Kemantren Wirobrajan	83,602	83.67		83.87		84.07		84.27		84.47		84.67		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren	115	115	254.192.000	116		116		117		118		118		Kemantren Mantrijeron

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	181,67	181,67	4.664.452.063	186		190		194		198		198		Kemantren Mantrijeron
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	78.680.000	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Mantrijeron
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	78%	78%	58.005.000	79%		80%		81%		82%		83%		Kemantren Mantrijeron
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kemantren Mantrijeron	A (83,34)	A (83,34 - 90,00)	6.208.834.186	A (83,35 - 90,00)		A (83,36 - 90,00)		A (83,37 - 90,00)		A (83,38 - 90,00)		A (83,39 - 90,00)		Kemantren Mantrijeron
	Nilai SPIP Kemantren Mantrijeron	4,437	4,438 - 4,50		4,439 - 4,50		4,440 - 4,50		4,441 - 4,50		4,442 - 4,50		4,443 - 4,50		
	Nilai IKM Kemantren Mantrijeron	85,11	85,11		85,2		85,25		85,3		85,35		85,4		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren	116	116	198.265.415	116,33		116,67		117		117,33		117,67		Kemantren Kraton
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	196,33	196,33	4.011.337.815	196,67		197		197,33		197,67		198		Kemantren Kraton
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	111.011.000	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Kraton
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100%	100%	39.618.000	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Kraton

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kemantren Kraton	A (86,04)	A (86,04-89,04)	6.478.450.905	A (86,06-89,06)		A (86,08-89,08)		A (86,10-89,10)		A (86,12-89,12)		A (86,16-89,16)		Kemantren Kraton
	Nilai SPIP Kemantren Kraton	4,399	4,399-4,500		4,400-4,500		4,401-4,500		4,402-4,500		4,403-4,500		4,404-4,500		Kemantren Kraton
	Nilai IKM Kemantren Kraton	86,66	86,66		87		87,25		87,5		87,75		88		Kemantren Kraton
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren	116	116	29.003.000	116		116,5		116,5		116,5		116,5		Kemantren Gondomanan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	180	180	2.791.430.137	180		180		180		180		180		Kemantren Gondomanan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	217.360.000	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Gondomanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100%	100%	73.350.000	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Gondomanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Kemantren Gondomanan	A (85,52)	A (85,52-90,00)	5.562.952.799	A (85,52-90,00)		A (85,52-90,00)		A (85,52-90,00)		A (85,52-90,00)		A (85,52-90,00)		Kemantren Gondomanan
	Nilai SPIP Kemantren Gondomanan	4,405	4,406-4,500		4,407-4,500		4,408-4,500		4,409-4,500		4,410-4,500		4,411-4,500		
	Nilai IKM Kemantren Gondomanan	88,72	88,75		88,8		88,85		88,9		88,95		88,95		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren	117,5	117,5	63.183.060	118		118,5		119		119		119,5		Kemantren Pakualaman

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PELAYANAN PUBLIK															
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	194,5	194,5	2.729.434.510	194,5		194,5		194,5		194,5		194,5		Kemantren Pakualaman
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	103.696.000	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Pakualaman
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100%	100%	94.276.000	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Pakualaman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Kemantren Pakualaman	A	A	5.393.293.938	A		A		A		A		A		Kemantren Pakualaman
	Nilai SPIP Kemantren Pakualaman	4.172	4.172		4.172		4.172		4.173		4.173		4.173		
	Nilai IKM Kemantren Pakualaman	88,33	88,4		88,5		88,6		88,7		88,8		88,85		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren	117	117,67	299.748.721	117,33		117,67		118		118		118		Kemantren Mergangsan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	193	190,67	5.218.232.467	192		192,67		193,33		193,33		193,33		Kemantren Mergangsan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	50.502.000	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Mergangsan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100%	100%	103.306.700	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Mergangsan

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kemantren Mergangsan	A (83,77)	A (83,77 - 85,0)	7.027.053.032	A (83,78 - 85,0)		A (83,78 - 85,0)		A (83,79 - 85,0)		A (83,79 - 85,0)		A (83,80 - 85,0)		Kemantren Mergangsan
	Nilai SPIP Kemantren Mergangsan	Terkelola dan Terukur (4,040)	Terkelola dan Terukur (4,040 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,041 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,041 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,042 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,042 - 4,50)		Terkelola dan Terukur (4,043 - 4,50)		
	Nilai IKM Kemantren Mergangsan	86.05	86,08		86,1		86,12		86,13		86,14		86,14		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren	114,29	114,72	138.025.000	115		115,14		115,29		115,57		116,14		Kemantren Umbulharjo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	185,29	187,14	10.560.556.138	187,57		188		188,29		189		189,43		Kemantren Umbulharjo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	244.249.200	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Umbulharjo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100%	100%	128.986.000	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Umbulharjo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kemantren Umbulharjo	A (86,68)	A (86,69-89,69)	12.438.523.903	A (86,70-89,70)		A (86,71-89,71)		A (86,72-89,72)		A (86,73-89,73)		A (86,75-89,75)		Kemantren Umbulharjo
	Nilai SPIP Kemantren Umbulharjo	Terkelola dan Terukur (4,388-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,389-4,500)		Terkelola dan Terukur (4,39-4,500)		Terkelola dan Terukur (4,391-4,500)		Terkelola dan Terukur (4,392-4,500)		Terkelola dan Terukur (4,393-4,500)		Terkelola dan Terukur (4,395-4,500)		
	Nilai IKM Kemantren Umbulharjo	86,06	86,07		86,08		86,09		86,1		86,11		86,13		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren	115	115	69.582.500	115,33		115,33		115,33		115,67		115,67		Kemantren Kotagede

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PELAYANAN PUBLIK															
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	194,33	194,33	4.820.163.832	194,33		194,33		194,67		194,67		194,67		Kemantren Kotagede
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	122%	100%	319.677.750	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Kotagede
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100%	100%	47.710.000	100%		100%		100%		100%		100%		Kemantren Kotagede
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kemantren Kotagede	A (86,70)	A (86,70-86,71)	6.362.447.108	A (86,71-86,72)		A (86,72-86,73)		A (86,72-86,73)		A (86,73-86,74)		A (86,73-86,74)		Kemantren Kotagede
	Nilai SPIP Kemantren Kotagede	Terkelola dan Terukur (4,344 - 4,500)	Terkelola dan Terukur (4,344 - 4,500)		Terkelola dan Terukur (4,344 - 4,500)		Terkelola dan Terukur (4,345 - 4,500)		Terkelola dan Terukur (4,345 - 4,500)		Terkelola dan Terukur (4,346 - 4,500)		Terkelola dan Terukur (4,346 - 4,500)		
	Nilai IKM Kemantren Kotagede	91,2	91,2		91,25		91,25		91,3		91,3		91,3		

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai alat ukur. IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan strategis, yang dikompilasi dari indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur utama pencapaian pembangunan secara menyeluruh. IKD mencerminkan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih luas yang diklasifikasikan ke dalam Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

Baik IKU maupun IKD berlaku dalam periode 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi. Pada tahun tersebut, indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 tetap berlaku, tetapi pencapaiannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Oleh karena itu, indikator tahun 2030 juga menjadi dasar penyusunan RPJMD lima tahun berikutnya, guna memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan di Kota Yogyakarta.

Tidak semua indikator dalam urusan pemerintahan dimasukkan dalam RPJMD. Hanya indikator yang strategis, berdampak luas, serta berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan layanan publik yang dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Indikator lainnya tetap digunakan dalam Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai bagian dari perencanaan operasional masing-masing sektor.

Setiap indikator yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dengan sistem ini, kebijakan yang dirancang tidak hanya terukur, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Rincian IKU dan IKD, beserta baseline data tahun 2024 dan target tahunan hingga akhir periode perencanaan, disajikan dalam Tabel IV.2 dan Tabel IV.3.

Tabel -2 Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	Target Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	89,10	89,11-89,4	89,12-89,5	89,13-89,6	89,14-89,7	89,15-89,8	89,16-89,9
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,12	12,13-12,20	12,14-12,25	12,15-12,30	12,16-12,35	12,17-12,40	12,18-12,45
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,66	17,67-17,75	17,68-17,80	17,69-17,85	17,70-17,90	17,71-17,95	17,72-18,00
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,73	75,74-75,85	75,75-75,90	75,76-75,95	75,77-76,00	75,78-76,05	75,79-76,10
5	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Nilai	68,43	70,31	71,60	72,89	74,18	75,54	76,47
6	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Nilai	76,12	77,61	78,60	79,56	80,54	81,66	82,02
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	55,53	57,42	57,50	57,58	57,65	57,73	57,81
8	Indeks Risiko Bencana	Nilai	64,22	63,76	63,30	62,85	62,41	61,97	61,54
9	PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah	131,43	137-139	144-147	150-156	158-166	165-176	173-186
10	Indeks Gini	Nilai	0,453	0,385 - 0.450	0,381 – 0,446	0,380 – 0,445	0,379 – 0,444	0,378 - 0.443	0,377 – 0,442
11	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	5,05 – 6,02	5,06 – 6,03	5,07 – 6,04	5,08 – 6,05	5,09 – 6,06	5,10 – 6,07

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	Target Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,80	5,42 – 5,80	5,41 – 5,71	5,30 – 5,61	5,20 – 5,51	4,97-5,41	4,78-5,31
13	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	81,23	81,32	81,41	81,49	81,56	81,62	81,69
14	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,26	5,84 – 6,26	5,55 – 6,25	5,54 – 6,24	5,53 – 6,23	5,47 – 6,22	5,46 – 6,21
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	A- (91,57)	A- (91,58-95,00)	A- (91,60-96,00)	A- (91,79-97,00)	A- (91,89-98,00)	A- (92,00-99,00)	A- (92,10-100)
16	Indeks Pelayanan Publik	Kategori	A (4,53)	A (4,54-4,70)	A (4,55-4,75)	A (4,56-4,80)	A (4,57-4,85)	A (4,58-4,90)	A (4,59-5.00)
17	Nilai AKIP	Kategori	A (84,84)	A (84,90-88,00)	A (85-88,5)	A (85,5-89)	A (86-89,5)	AA (90,01-92)	AA (90,02-93)
18	*Crime Rate*	Nilai	174	171	168	165	162	159	156
19	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,49)	Sangat Baik (7,10 - 7,48)	Sangat Baik (7,15-7,53)	Sangat Baik (7,20-7,58)	Sangat Baik (7,25-7,63)	Sangat baik (7,30-7,68)	Sangat baik (7,35-7,73)

Tabel -3 Indikator Kinerja Daerah Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84,21	84,31	85,07	85,84	86,6	87,36	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	10,35	10,05	9,75	9,45	9,15	8,85	
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	20,12	21,71	22,71	23,7	24,7	25,71	
4	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	Nilai	55,53	55,42	57,5	57,58	57,66	57,73	
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	39,31	41,42	42,19 42,23	42,97 43,02	43,75 43,80	44,53 44,56	
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	50,03						

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	76,13	84,97	85,72	86,47	87,23	87,98	
8	**Indeks Risiko Bencana**	Angka	64,22	66,61	66,6	66,59	66,58	66,57	
9	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,69	0,695	0,7	0,705	0,71	0,715	
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	
11	Rasio Penduduk	%	95,00/95,01	95,01	95,01	95,01	95,01	95,01	
12	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	12.671	12.664	12.664	12.664	12.664	12.664	
13	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	*%*	*85,26*	*85,27*	*85,27*	*85,27*	*85,27*	*85,28*	
14	Kapasitas Air Baku	*m3/detik*	0,631	*0,615*	*0,636*	*0,658*	*0,679*	*0,7*	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,05	5,05 – 6,02	5,06 – 6,03	5,07 – 6,04	5,08 – 6,05	5,09 – 6,06	
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,26	5,84 – 6,26	5,55 – 6,25	5,54 – 6,24	5,53 – 6,23	5,47 – 6,22	
3	PDRB Per Kapita	Rupiah	131,433	127,32-128,41	131,69-133,87	136,06-139,33	140,43-144,79	144,80 - 150,27	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,8	5,42 – 5,80	5,41 – 5,71	5,30 – 5,61	5,20 – 5,51	4,97 – 5,41	
5	Indeks Gini	Angka	0,449	0,385 - 0.450	0,381 – 0,446	0,380 – 0,445	0,379 – 0,444	0,378 - 0.443	
6	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Angka	89,1	89,11-89,4	89,12-89,5	89,13-89,6	89,14-89,7	89,15-89,8	
7	Usia Harapan Hidup	angka	75,73	75,74 - 75,85	75,75 - 75,90	75,76 - 75,95	75,77 - 76	75,78 - 76,05	
8	Prevalensi Stunting	%	10,07	10,06	10,05	10,04	10,03	10,02	
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	12,12	12,13	12,14	12,15	12,16	12,17	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,66	17,67	17,68	17,69	17,7	17,71	
11	Angka Literasi SD		76.43	75,99 - 78,49	76,49 - 80,99	77,99 - 83,49	78,49 - 85,99	79,99 - 88,49	
12	Angka Numerasi SD		56.07	62,82 - 65,72	65,72 - 68,62	70,62 - 71,52	73,52 - 74,42	76,42 - 77,32	
13	Angka Literasi SMP		84.62	89,28 - 90,38	89,38 - 91,48	89,68 - 92,58	89,88 - 93,68	90,08 - 94,78	
14	Angka Numerasi SMP	%	73.15	75,46 - 76,96	75,66 - 78,46	75,88 - 79,96	76,00 - 81,46	76,50 - 82,96	
15	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	93,11	93,12	93,13	93,14	93,15	93,16	
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%		62,79	62,84	62,89	62,94	62,99	
17	Indeks Perlindungan Anak	Angka	70,88	70,95	70,96	71,05	71,06	71,07	
18	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	64,91	64,91	64,93	64,95	64,97	65,00	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
19	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,167	0,167	0,167	0,167	0,17	0,17	
20	Indeks Pembangunan Gender	Angka	99,25/98,65	98,65	98,65	98,65	98,67	98,67	
21	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	73,83	73,85	73,87	73,89	73,91	73,93	
22	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment tingkat nasional untuk: Literasi Membaca	*%*	*76,43*	78,49 - 87,68	78,99 - 87,68	79,49 - 88,68	79,99 - 88,68	80,49 - 88,69	
23	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment	*%*	*85,78*	90,09	90,99	91,89	92,79	93,69	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
	tingkat nasional untuk: Numerasi								
24	Angka Kematian Ibu	*(per 100.000 kelahiran hidup)*	*93,15 / 334 (8 dari 2400 kelahiran hidup)*	*93,1*	*93,09*	*93,08*	*93,07*	*93,06*	
25	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	*%*	*90*	*92*	*93*	*94*	*94,5*	*95*	
26	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	*%*	*80*	*84,5*	*86*	*87*	*88*	*90*	
27	Cakupan Kepesertaan Jaminan	*%*	*99*	*99*	*99*	*99*	*99*	*99*	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Kesehatan Nasional								
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Angka Ketergantungan	%	41,15						
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	12,02	12,2 - 12,276	12,2 - 12,352	12,2 - 12,428	12,2 - 12,504	12,202 - 12,58	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum	%	13,44	13,44-13,80	13,50-13,84	13,56 -13,88	13,62 -13,92	13,68-13,96	13,74-14,00
4	Rasio Kewirausahaan	%	0	5,158 - 5,162	5,165 - 5,169	5,172 - 5,176	5,179 - 5,183	5,186 - 5,192	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	74,78						
6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	62.38						

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp	12.099.314,74						
8	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	%	98,7	98,86	99,02	99,18	99,34	99,5	
9	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,17						
10	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	83,42	84	84,67	85,33	86	86,67	
11	Tingkat Inflasi	%	1,73	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	*%*	*64,19/98,31*	*97,05 - 98,85*	*97,10 - 98,90*	*97,15 - 98,95*	*97,20 - 99,00*	*97,25 - 99,05*	
13	Kecepatan Rata-Rata Kendaraan	*km/jam*	*25.76/25,002*	*25,003*	*25,004*	*25,006*	*25,007*	*25,008*	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
14	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	*(%)*	44,38						
15	Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara	*orang*	*355.333*	*175.000*	*180.000*	*187.500*	*195.000*	*205.000*	
16	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	*%*	0,8	0,860 - 0,875	0,862 - 0,89	0,864 - 0,905	0,866 - 0,92	0,868 - 0,935	
17	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	*%*	6,21						
18	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan (Total Kredit/PDRB)	*%*	45,28%						
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Hukum	Predikat	AA	AA	AA	AA	AA	AA	
2	Indeks Sistem Pemerintahan	Nilai	3,5	3,5	3,75	4	4,25	4,5	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Berbasis Elektronik								
3	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,53)	A (4,54-4,70)	A (4,55-4,71)	A (4,56-4,72)	A (4,57-5,73)	A (4,58-4,74)	
5	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	100	100	100	100	100	100	
9	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Angka		70	75	80	85	90	
10	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,39	4,39	4,4	4,4	4,41	4,41	
11	Tingkat Kriminalitas (Crime Rate)	*Kasus/jiwa*	*174*	*171*	*168*	*165*	*162*	*159*	
12	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
13	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan perlindungan masyarakat	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
14	Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
15	Indeks Reformasi Birokrasi	*Predikat*	*A- (91,57)*	A- (91,58-95,00)	A- (91,60-96,00)	A- (91,79-97,00)	A- (91,89-98,00)	A- (92,00-99,00)	
16	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	*indeks*	*Baik (85,19)*	85,20 – 86,00 (Baik)	85,21 – 86,01 (Baik)	85,22 – 86,02 (Baik)	85,23 – 86,03 (Baik)	85,24 – 86,04 (Baik)	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6	Persentase (%)	90,86	90,88	90,90	90,92	90,94	90,97	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
	tahun yang berpartisipasi dalam PAUD								
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persentase (%)	118,97%	100	100	100	100	100	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persentase (%)	143,03%	100	100	100	100	100	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi	Persentase (%)	99,60%	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
	dalam pendidikan kesetaraan								
5	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	
6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
	kesehatan bayi baru lahir								
10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	Persentase (%)	0%						
?	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS	Persentase (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Kewenangan Kab/Kota								
21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh	Persentase (%)	97,83%	99,22%	99,38%	99,53%	99,69%	99,84%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
	layanan pengolahan air limbah domestik								
24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
25	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persentase (%)	79,96%	80,01%	80,06%	80,11%	80,16%	80,21%	
26	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase (%)	28,87%	38,84%	47,48%	56,11%	64,74%	73,37%	
27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
29	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persentase (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Persentase (%)	67,24%					100%	
31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persentase (%)	1,30%	1,14%	0,98%	0,82%	0,66%	0,50%	
32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
	evakuasi korban bencana								
38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%)	98,59%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	
39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	7,5	7,5	7,5	7,5	6	6	
40	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Rp/Orang	2,26%						
44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase (%)	36.423,48						

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persentase (%)	3,88%						
46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persentase (%)	95,95%						
47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase (%)	40,41%						
48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Rasio	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
	instansi terkait kabupaten/kota								
49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persentase (%)	51,59%						
50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persentase (%)	139,89%	139,89%	139,89%	139,89%	139,89%	139,89%	
51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persentase (%)	100%						

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persentase (%)	31,38%						
54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persentase (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
56	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Indeks	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Persentase (%)	55,53	55,42	57,5	57,58	57,66	57,73	
58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persentase (%)	84,06%	85,62%	86,32%	87,02%	87,72%	88,42%	
59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase (%)	50%						
60	Perekaman KTP elektronik	Persentase (%)	99,20%	99,45%	99,50%	99,55%	99,60%	99,65%	
61	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persentase (%)	86,24%	88,22%	89,23%	90,23%	91,23%	92,23%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
62	Kepemilikan akta kelahiran usia 0 - 4 thn	Persentase (%)	99,55%	99,60%	99,65%	99,70%	99,75%	99,80%	
63	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persentase (%)	99,88%	99,89%	99,90%	99,91%	99,92%	99,93%	
64	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
65	Persentase peningkatan status desa mandiri	Rasio	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
66	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persentase (%)	1,65	1,53 - 1,65	1,53 - 1,65	1,55 - 1,67	1,55 - 1,67	1,57 - 1,69	
67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive	Persentase (%)	62,60%	62,61	62,62	62,63	62,64	62,65	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Prevalence Rate/mCPR)								
68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Indeks	12,55%	12,54	12,53	12,52	12,51	12,50	
69	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	1	1	1	1	1	1	
70	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Persentase (%)	0,5						
71	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase (%)	63,58%	65,63%	67,68%	69,73%	71,78%	73,84%	
74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase (%)	12,14%						
75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persentase (%)	12,54%						
76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persentase (%)	0,61%	0,62%	0,63%	0,64%	0,65%	0,66%	
77	Tingkat partisipasi pemuda dalam	Persentase (%)	1,19%						

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
	kegiatan ekonomi mandiri								
78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase (%)	4,63%						
79	Peningkatan prestasi olahraga	Persentase (%)	54						
80	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
81	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
	pembangunan daerah								
82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase (%)	91,78%	64,27%	65,35%	65,90%	66,44%	66,99%	
83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Indeks	77,14%	80%	82,22%	84%	85,45%	86,67%	
84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	78,47	78,57	79,07	79,57	80,07	80,57	
85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persentase (%)	93,11	93,12	93,13	93,14	93,15	93,16	
86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
	dan 59 U 43/2009)								
87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Persentase (%)	113,09%	99,62%	99,69%	99,77%	99,85%	99,92%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persentase (%)	14,74%	-50,75%	2,85%	4,16%	4,00%	5,12%	
90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persentase (%)	45,38%						
91	Tingkat hunian akomodasi	Persentase (%)	71,61%						
92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persentase (%)	13,44%						
93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rata-rata ton per hektar per tahun	38,38%						
94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persentase (%)	5,80	5,9	6	6,15	6,3	6,5	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (Persentase kasus zoonosis kab/ kota)		-100%	100%	100%	100%	100%	100%	
96	KEHUTANAN (tidak ada IKK Outcome)	Persentase (%)							
97	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Persentase (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
98	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persentase (%)	98,87%						

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
99	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase (%)	74,86%						
100	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase (%)	99,96%	100%	100%	100%	100%	100%	
101	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	Persentase (%)	1,91%						
102	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase (%)	70,40%						

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase (%)	1,26%						
104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase (%)	0%						
105	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan	Indeks	0%						

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota								
106	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		125						
107	TRANSMIGRASI (tidak ada IKK Outcome)	Persentase (%)							
108	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persentase (%)	23,65%						
109	Rasio PAD	Indeks	41,08%		47,40%	48,20%	49,03%	49,90%	
110	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	3	3	3	3	3	3	
111	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan	Persentase (%)	3	3	3	3	3	3	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Intern Pemerintah (APIP)								
112	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Indeks	79,52%						
113	Opini Laporan Keuangan	Persentase (%)	10						
114	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persentase (%)	0%						
115	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persentase (%)	52,95%						
116	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persentase (%)	41,12%						

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
117	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persentase (%)	41,37%						
118	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase (%)	77,15%	78,4%	79,2%	80,2%	81,8%	83,9%	
119	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase (%)	22,20%						

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
120	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase (%)	36,68%						
121	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persentase (%)	2,58%						
122	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persentase (%)	10,44%						
123	Manajemen Aset	Persentase (%)	4	4	4	4	4	4	
124	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja	Persentase (%)	10,50%						

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
	dalam APBD Tahun Sebelumnya								
125	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Persentase (%)	94,07%						
126	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)		100%						

BAB V
PENUTUP

Dokumen RPJMD Kota Yogyakarta 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis pembangunan jangka menengah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih, yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional melalui RPJMN 2025–2029, serta arah kebijakan pembangunan daerah tingkat provinsi dan jangka panjang melalui RPJMD DIY 2022-2027 dan RPJPD Kota Yogyakarta 2025–2045.

Penyusunan dokumen ini dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up*, serta holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan tersebut memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan program pembangunan tidak hanya mencerminkan visi kepala daerah, tetapi juga sejalan dengan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, dan tantangan masa depan.

Secara substansial, RPJMD ini memuat arah strategis pembangunan yang berdasar pada upaya perwujudan nyata dari lima misi pembangunan, meliputi: (i) Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan; (ii) Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari; (iii) Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya, Berbasis Potensi

Sumber Daya Lokal; (iv) Tata Pemerintahan Daerah yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945; serta (v) Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY.

Pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, inklusivitas, akuntabilitas, dan berorientasi hasil. Setiap perangkat daerah diharapkan menyusun rencana kerja yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD, serta mengimplementasikannya dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya yang optimal dan partisipasi aktif masyarakat.

Untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai arah yang ditetapkan, pengendalian dan evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme monitoring dan evaluasi internal maupun eksternal. Evaluasi dilakukan setiap tahun, pertengahan periode serta akhir tahun perencanaan sebagai dasar penyesuaian program, serta sebagai wujud akuntabilitas publik terhadap capaian pembangunan.

Dengan demikian, RPJMD Kota Yogyakarta 2025–2029 diharapkan dapat menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya memenuhi mandat perencanaan, tetapi juga mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkeadaban dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.

WALI KOTA YOGYAKARTA

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA YOGYAKARTA

DALAM

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA PADA PERSETUJUAN BERSAMA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan dan Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara-saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan perkenan, rahmat dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Kepala Daerah yang telah dilantik berkewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN Nasional maupun RPJMD DIY serta dokumen lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan RPJMD dimulai sejak dilantiknya Wali Kota terpilih pada 20 Februari 2025 dan paling lambat diselesaikan 6 (enam) bulan setelah pelantikan Wali Kota terpilih, yakni pada tanggal 20 Agustus 2025 mendatang.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Penyusunan RPJMD ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan pada jangka waktu 2025 – 2029.
2. Menyediakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing perangkat daerah untuk mencapai keselarasan dan sinkronisasi dengan RPJMD.
3. Menyediakan acuan dalam penyusunan RKPD, yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu indikatif, sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga perumusan indikator untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama 5 (lima) tahun kepemimpinan.

Visi yang ingin dicapai dalam RPJMD ini selama 5 (lima) tahun ke depan adalah "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban". Visi tersebut menjadi pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan seluruh Masyarakat Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang terus bertumbuh dan berkembang, tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya, etika, dan moral sebagai identitas khas kota yang berlandaskan kearifan lokal serta semangat kebersamaan.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan Misi Pembangunan sebagai dasar pembangunan dalam periode 5 tahun mendatang yaitu:

1. Misi 1: "Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan"
2. Misi 2: "Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari"
3. Misi 3: "Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya, Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal"
4. Misi 4: "Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945"
5. Misi 5: “Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY”Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 8 (delapan) program strategis yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, diantaranya Meningkatkan derajat pendidikan warga, melalui program unggulan: Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian, Penumbuhan Wirausaha Muda. Kemudian, meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah, Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan, dan Jogja Tangguh Bencana.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Besar harapan kami, bahwa dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini, diharapkan mampu memberikan arah gerak, tidak hanya bagi perangkat daerah tetapi juga seluruh *stakeholder* pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban.

Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka tahapan selanjutnya adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, disampaikan kepada Gubernur DIY untuk dilaksanakan evaluasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikianlah jawaban kami atas Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan Pendapat Akhir ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Yang Terhormat.

Atas perhatian Peserta Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami ucapkan terima kasih.

Sekian. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA

ATAS

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat,
Saudara Pimpinan Rapat Paripurna,
Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta,
Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta,
Direktur Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta,
Rekan pers serta hadirin yang berbahagia.

Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'alla atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk melanjuntukan

rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 yang telah dihantarkan pada 23 Juni 2025.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Sebelum menyampaikan tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Jawaban Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, perkenankan kami menyampaikan jawaban sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pemerintah Kota Yogyakarta sepakat bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dalam upaya membangun kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam membiayai pembangunan dan menyediakan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Pendapatan asli daerah dihasilkan dari sumber-sumber lokal seperti pajak, retribusi, hasil usaha BUMD, dan lainnya.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini target PAD turun jika dibandingkan dengan target pada APBD TA 2025 yang antara lain disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi nasional dan global yang berdampak pada daya beli masyarakat, kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat serta kebijakan pembatasan kegiatan studi banding oleh beberapa daerah

yang mempengaruhi tingkat hunian dan penggunaan fasilitas hotel serta kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta. Begitu juga kebijakan diskon tagihan listrik yang diterapkan pada bulan Januari dan Februari 2025 berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah. Akan tetapi, kami berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai langkah strategis dan terukur, tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berbagai kebijakan yang telah dilakukan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target-target PAD. Proses penjaringan, pendataan dan pembaharuan basis data obyek-obyek pajak dan retribusi dilaksanakan untuk memperluas basis penerimaan. Sebagai bentuk peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan kepada wajib pajak, telah diluncurkan portal pelayanan pajak secara online. Aplikasi tersebut terintegrasi dalam Jogja *Smart Service*, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan pajak dan pembayaran pajak melalui gawai yang dimiliki tanpa harus meninggalkan rumah atau tempat kerja.

Saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah memulai proses penyusunan arsitektur sistem informasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara terintegrasi. Kami juga akan terus mendorong percepatan implementasi sistem terintegrasi ini, sebagai fondasi utama upaya peningkatan PAD yang berkelanjutan.

Terkait peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah, terus dilakukan pembenahan pada berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan aset daerah, mulai dari sumber daya manusia yang terlibat, tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, hingga pemahaman regulasi yang harus dipatuhi dalam setiap langkah pengelolaan aset.

Pada aspek sumber daya manusia, telah diadakan pelatihan dan pembekalan secara rutin bagi aparatur pengelola aset guna memastikan bahwa setiap personil yang terlibat dalam pengelolaan aset memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan, pengawasan, serta peraturan yang berlaku, agar tidak ada kendala dalam proses pengelolaan aset yang dapat berujung pada kerugian daerah.

Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan aset dalam rangka meningkatkan PAD, akan dilakukan inventarisasi barang-barang milik daerah yang berada pada perangkat daerah yang sudah tidak mendukung pelaksanaan tupoksi agar dapat diserahkan kepada Pengelola Barang sehingga dapat dioptimalkan melalui skema sewa, Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna, kerjasama pemanfaatan, atau dengan skema Kerjasama Penyediaan Infrastruktur(KSPI). Sedangkan untuk barang milik daerah yang masih digunakan oleh perangkat dalam menyelenggarakan tugas pokok fungsinya maka skema yang diberlakukan adalah dengan retribusi atas barang milik daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Kami sepakat bahwa Badan Usaha Milik Daerah dibentuk agar dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat Kota Yogyakarta. Kontribusi tersebut dapat berwujud kemudahan pelayanan, fasilitas, peran serta dalam pengembangan UMKM, dan peningkatan PAD.

Oleh karenanya, kita harus memastikan bahwa BUMD beroperasi secara efisien dan profesional. Ini melibatkan peningkatan manajemen dan tata kelola yang baik, termasuk transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan strategis yang berbasis data.

Berkaitan dengan penyertaan modal untuk BUMD, sesuai dengan PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada setiap BUMD dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan analisis investasi dengan melibatkan pihak independen. Pasca penyertaan modal, pengawasan dan evaluasi kinerja dilakukan setiap triwulan untuk memantau realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan Perusahaan. Masing-masing BUMD memiliki target kinerja sesuai jenis usaha dan tujuan penyertaan modal yang ditetapkan setiap tahun dalam rencana kerja tahunan perusaahaan. Terkait dampak investasi terhadap deviden yang disetorkan ke kas daerah, BUMD diharapkan terus dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat struktur permodalan BUMD dan pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi PAD kepada Pemerintak Kota Yogyakarta.

2. BELANJA DAERAH

Dengan dikeluarkannya Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Yogyakarta harus melakukan penyesuaian anggaran belanja karena pengurangan dana transfer yang disalurkan oleh pemerintah pusat terutama di sektor infrastruktur jalan. Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menindaklanjuti arahan tersebut dan melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas serta melakukan penataan kembali anggaran untuk dialokasikan ke belanja belanja yg lebih prioritas sehingga program-program prioritas pembangunan terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terus dijalankan dengan optimal.

Terkait dengan belanja pegawai, kenaikan belanja pegawai di rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan kebutuhan dan diperhitungkan dengan peraturan yang berlaku. Dalam rangka menurunkan belanja pegawai, saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menerapkan "pertumbuhan negatif" dalam pemenuhan kebutuhan pegawai dimana jumlah yang direkrut sebagai pegawai baru lebih sedikit dari pegawai yang pensiun. Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan penataan organisasi dilakukan untuk memastikan pekerjaan dan pelayanan dapat terus berjalan dengan optimal dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia.

3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sehingga menjadi komitmen kami untuk memajukan pendidikan dengan berbagai kebijakan disertai dengan komitmen penganggaran yang mencukupi dalam rangka mempertahankan citra Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan kota pelajar di tanah air.

Berkaitan dengan permasalahan ijasah bagi pelajar swasta warga Kota Yogyakarta yang telah lulus namun masih ditahan pihak sekolah karena tidak mampu membayar administrasi sekolah, Pemerintah Kota yogyakarta melalui perangkat daerah terkait telah melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dalam rangka pendataan terkait permasalahan tunggakan ijazah pada jenjang SMA/SMK. Hasil pendataan tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan anggaran dalam pemberian bantuan tunggakan. Kami juga berupaya memediasi permasalahan pembiayaan pendidikan antara satuan pendidikan dan wali murid, dengan harapan dapat terselesaikan secara efektif.

BOSDA merupakan salah satu instrumen pendanaan pendidikan dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan operasional sekolah yang mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Oleh karenanya, besaran alokasi anggaran BOSDA selalu dilakukan evaluasi dalam upaya memenuhi kebutuhan pendanaan pendidikan. Kami sepakat dengan masukan dari Dewan agar kebijakan dalam pemberian BOSDA negeri maupun swasta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Saat ini besaran BOSDA sudah di atas BOSP (Pusat).

Terkait dengan adanya kebijakan penggratisan sekolah swasta sesuai keputusan MK, sampai saat ini kami masih menunggu arahan/ kebijakan/ regulasi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.

Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan juga merupakan komponen yang penting dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan profesi bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan insentif yang mana besarannya sudah disesuaikan dengan kemampuan APBD Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk mengisi kekosongan Tenaga Pendidik yang telah purna tugas, kami akan mengusulkan formasi untuk pemenuhan formasi atas kekurangan Tenaga Pendidik serta mengoptimalkan penataan dan pendistribusian Tenaga Pendidik baik ASN maupun non-ASN .

4. KESEHATAN

Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terkait dengan kesehatan. Alokasi anggaran urusan kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penambahan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas SDM kesehatan yang ada di Puskesmas maupun RSUD, termasuk didalamnya pos pelayanan terpadu (posyandu). Pembinaan posyandu dilakukan oleh

puskesmas berdasarkan wilayah masing-masing, diantaranya dengan melakukan pelatihan bagi kader posyandu, rapat koordinasi dengan kader, maupun *update knowledge/refreshing* kader. Puskesmas juga melakukan pendampingan langsung pada hari buka posyandu melalui keterlibatan tenaga kesehatan dari Puskesmas dalam pelaksanaan posyandu. Kami juga telah memberikan bantuan transport bagi kader posyandu apabila menyelenggarakan kegiatan seperti pelatihan/pertemuan koordinasi atau melakukan kunjungan rumah.

Terkait dengan surat dari Kementrian sosial tentang perubahan pelayanan dan kepersertaan BPJS yang akan merubah konsep *Universal Health Coverage* (UHC) yang selama ini menjadi hak Warga Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini telah menyediakan anggaran untuk meng*cover* Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang tidak masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penduduk yang tidak masuk dalam DTSEN sebanyak 3.645 akan dialihkan dalam PPK1 (Pemberi Pelayanan kesehatan tingkat 1) di Puskemas Kota Yogyakarta atau ke program PDPD (Penduduk Daerah yang didaftarkan Pemerintah Daerah).

5. EKONOMI DAN PARIWISATA

Pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, salah satu target yang direncanakan adalah mengenai pariwisata berkualitas (*quality tourism*). Hal ini bersendikan pada belanja wisata yang tinggi, serapan jasa dan produk lokal, serta keberlanjutan. Pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta mengintegrasikan potensi wilayah yang berbasis masyarakat (*community based tourism*), budaya yang dibina dan hidup di dalam masyarakat, serta potensi ekonomi kreatif berbasis UMKM.

Untuk mendorong sektor pariwisata dan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat, dan kelurahan telah berhasil membentuk 20 kampung wisata baru. Dengan demikian, saat ini terdapat 45 kampung wisata yang tersebar di berbagai kelurahan di Kota Yogyakarta. Setiap kampung wisata memiliki kekhasan masing-masing sebagai daya tarik wisata yang unik. Kami juga mengalokasikan anggaran untuk tenaga pendamping kampung wisata dalam rangka menguatkan potensi, kelembagaan, dan daya tarik yang dimiliki. Pendampingan ini juga mencakup penyusunan paket wisata yang layak jual (*marketable*) serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi. Hal ini bertujuan agar kampung wisata sebagai pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) dapat menggerakkan seluruh potensinya dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

Event pariwisata yang diselenggarakan, seperti Festival Kawasan dan Festival Destinasi, dilakukan dengan kolaborasi bersama kampung wisata di sekitarnya. Contohnya adalah pelaksanaan event *Tour de Kotabaru* dan Festival Prawirotaman yang melibatkan kampung wisata sekitar sebagai bagian dari pengembangan dan promosi kawasan. Untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana promosi kampung wisata, setiap dua tahun sekali kami melaksanakan pemilihan Mas dan Mbak Kampung Wisata sebagai duta kampung wisata. Para duta ini berperan aktif dalam promosi serta terlibat dalam berbagai aktivitas kampung wisata.

Pada konteks revitalisasi pasar tradisional/pasar rakyat, penguatan "ekonomi kerakyatan" dilakukan melalui pemeliharaan Pasar Rakyat sebagai salah satu sarana distribusi perdagangan pada aspek sosial dan fisik, diantaranya:

1. Perbaikan pasar rakyat untuk mendukung kegiatan ekonomi kerakyatan,

2. Penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan ke pasar Rakat,
3. Pengembangan marketplace Beringharjo Official Market (BOS).

6. KEMISKINAN

Pemerintah Kota Yogyakarta senantiasa melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai macam program yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Pelatihan keterampilan sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan dilakukan dalam rangka memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal, khususnya melalui program pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi keahlian, dan penempatan tenaga kerja terampil. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan jangkauan pelatihan keterampilan kerja, terutama di sektor-sektor yang terbukti menyerap tenaga kerja seperti kuliner, digital marketing, serta jasa kreatif lainnya yang relevan dengan ekosistem UMKM dan wisata kampung; memperluas kolaborasi dengan LPK, dunia usaha, dan industri, untuk memastikan kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja dan adaptif terhadap dinamika ekonomi; meningkatkan efektivitas program padat karya dan pelatihan berbasis kewirausahaan, dengan prioritas bagi kelompok rentan seperti pencari kerja usia produktif dari keluarga miskin dan penyandang disabilitas; dan mengoptimalkan monitoring, evaluasi, pendampingan pascapelatihan dan pemberian informasi lowongan kerja kepada alumni peserta pelatihan.

Penguatan UMKM dan Koperasi juga terus dilakukan. Untuk penguatan kapasitas dan kompetensi SDM koperasi pada tahun 2025 telah dilaksanakan diklat sertifikasi dan bimtek perkoperasian bagi pengurus pengelola koperasi. Demikian juga menindaklanjuti Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi

Desa/ Kelurahan Merah Putih, kami telah memfasilitasi pembiayaan untuk pendirian koperasi kelurahan merah putih di 45 kelurahan dan direncanakan untuk ditindaklanjuti dengan bimtek perkoperasian bagi ketua dan pengurus koperasi kelurahan merah putih yang dibiayai melalui perubahan anggaran ini.

7. PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN

Kami menyadari bahwa penataan pemukiman merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang sehat dan nyaman untuk dihuni. Pemerintah Kota Yogyakarta terus meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan pembangunan gedung, baik untuk rumah tinggal, usaha, maupun fungsi sosial. Pengawasan dilakukan terkait Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Masyarakat yang belum melakukan proses perijinan diminta untuk segera memproses perijinan dan kami undang untuk mengikuti sosialisasi proses perijinan PBG.

Untuk mewujudkan kehidupan yang layak di pemukiman padat, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menjalankan berbagai program, seperti penataan kawasan kumuh, perbaikan infrastruktur dasar (jalan, drainase, dan sanitasi),perbaikan rumah tidak layak huni, serta penyediaan ruang terbuka hijau. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan bantuan renovasi rumah layak huni juga terus digalakkan. Upaya ini dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan tertata. Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan penataan rumah di kawasan kumuh di Kelurahan Kotabaru dan Pringgokusuman.

Terkait dengan penyediaan lahan untuk pemakaman, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama DPRD saat ini sedang melakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemakaman. Peraturan daerah tersebuntukedepannya akan menjadi dasar untuk penyusunan

program penataan makam. Beberapa masukan yang disampaikan sudah menjadi bagian dari pembahasan perda pemakaman.

8. PENGELOLAAN SAMPAH

Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen dalam menyelesaikan permasalahan sampah perkotaan melalui kebijakan holistik dan terintegrasi, dari hulu sampai hilir. Hal ini memerlukan perencanaan yang berkesinambungan dan disertai evaluasi kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut saat ini kami sedang berproses menyusun Master Plan Persampahanan yang melibatkan berbagai *stakeholder* terkait.

Kota Yogyakarta tidak memiliki lahan yang cukup untuk digunakan sebagai lokasi mengolah sampah sehingga penganggaran terlihat besar karena memang alokasi terbesar digunakan untuk biaya pengolahan sampah baik oleh dinas maupun swasta.

Pelibatan masyarakat dilakukan di hulu dengan keterlibatan bank sampah yang berbasis RW sehingga mencegah volume sampahnya semakin besar di hilir. Upaya mengoptimalkan keterlibatan masyarakat di hulu dilakukan dengan berbagai media edukasi, antara lain melalui:

1. Edukasi pengelolaan sampah di sekoah tingkat SD dan SMP dioptimalkan dengan adanya Sekolah Adiwiyata, dimana setiap tahun dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah SD dan SMP yang ada di kota Yogyakarta, sekaligus sebagai cara untuk memberikan reward kepada sekolah yang telah optimal melaksanakan pengelolaan lingkungannya.
2. Edukasi di tingkat SMP dan SLTA yang bekerjasama denga Dinas Pendidikan Propinsi DIY adalah dengan mengoptimalkan peran Saka Kalpataru dalam Gerakan Pramuka. Edukasi ini juga merupakan langkah nyata untuk mengoptimalkan peran anggota pramuka untuk mampu memberikan contoh nyata di sekolah dan di masyarakat.
3. Edukasi tingkat kepemudaan dengan cara bekerjasama dengan Karang Taruna Kota Yogyakarta agar berperan sebagai agen

pengelola sampah sekaligus menjembatani edukasi dari pemerintah kepada masyarakat.

Dengan adanya pihak-pihak yang bisa diajak untuk mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat maka penganggaran akan menjadi tepat sasaran mengingat masing-masing pihak diatas mempunyai sasaran yang jelas. Hal ini juga akan memberikan peluang bagi generasi muda untuk berperan sekaligus untuk mempermudah pemerintah menyampaikan edukasi kepada masyarakat.

Hal lain yang dapat dioptimalkan dalam pengelolaan sampah ditingkat sumber adalah optimalisasi peran Ketua RT dan Ketua RW untuk mengedukasi *transporter* atau penggerobak dalam melayani pengambilan sampah dari masyarakat. Penjadwalan pengambilan sampah sudah ditetapkan di masing-masing depo, sehingga para Ketua RT atau RW dapat mengarahkan *transporter* yang ada diwilayahnya untuk mematuhi peraturan tersebut. Apabila kepatuhan dalam jadwal pembuangan sampah ini dapat dilaksanakan maka secara otomatis pengurangan sampah akan dapat dilakukan.

Selain itu upaya untuk percepatan perubahan perilaku ditengah masyarakat agar berkesinambungan dan selalu diaplikasi oleh masyarakat adalah dengan upaya publikasi yang konsisten dan mengikuti perkembangan informasi. Salah satunya adalah menayangkan iklan layanan masyakat tentang pengelolaan sampah di ruang-ruang publik baik berupa reklame, poster, iklan di layar televise, media social maupun videotron yang ada di jalan-jalan.

Hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat disertai juga kegiatan monitoring dan evaluasi baik atas dasar kewilayahan, instansi, kelompok masyarakat maupun sekolah. Ke depan juga tentunya harapan juga ada pemberian reward bagi yang mampu melaksanakan pengelolaan sampah sesuai kaidah-kaidah dan memberikan sumbangsih atas upaya pengurangan sampah ditingkat

hulu. Tentunya *punishment* atau teguran kepada wilayah, institusi, kemlompok masyarakat maupun lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan upaya pengurangan sampah ditingkat hulu tetap harus diterapkan sebagai upaya untuk mempercepat program pengurangan sampah tersebut. Kerja sama juga sudah dirintis dengan para pihak antara lain dengan Perguruan tinggi maupun swasta dan harapannya DLH bersama beberapa OPD lain saling memberikan dukungan untuk mengatasi persampahan. Peran pelaku usaha juga sudah dilakukan dengan merintis penyusunan kajian Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.

Penganggaran untuk optimalisasi pengelolaan sampah ditingkat hulu telah dilakukan, namun untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat masih dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan mengingat pengelolaan ditingkat hulu menyesuaikan dengan kegiatan yang telah ada dan sesuai dengan karakter masing-masing wiilayah. Namun pada prinsipnya pengelolaan sampah ditingkat hulu harus dioptimalkan. Sebagai contoh adalah pengelolaan sampah anorganik dengan mengoptimalkan peran bank sampah dan optmalisasi pengolahan sampah organik dapat menggunakan berbagai metoda pengolahan sampah organik.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Akhirnya, kami telah berusaha menjawab Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, namun jika dalam penyampaian jawaban tersebut masih ada kekurangan kami mohon maaf. Selanjutnya apabila masih diperlukan penjelasan lebih lanjut, dapat dibahas dalam forum koordinasi antara Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan antara Komisi dengan Perangkat Daerah mitra kerja. Harapan kami Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat segera disetujui bersama.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam berinovasi serta berkolaborasi mengatasi setiap tantangan yang dihadapi. Kami yakin, kita bersama-sama mampu menjadikan APBD sebagai instrumen kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

Wabillahitaufiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 26 Juni 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

DPRD KOTA YOGYAKARTA

2025

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

23